LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

Kepala Daerah Akhir Tahun 2022

(LKPJ)

BerAKHLAK #bangga melayani bangsa

Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala karena berkat ridlo dan hidayah-Nya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik dapat selesai sesuai batas waktu yang ditentukan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka selaku Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2022 kepada DPRD sebelum 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sistematika Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan
BAB II : Perubahan Penjabaran Anggaranpendapatan dan Belanja
BAB III : Hasil Penyelanggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah
BAB IV : Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan
BAB V : Penutup

Adapun tolok kinerja hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2022.

Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2022 ini, penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah disusun berdasarkan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar; Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar; Urusan Pemerintahan Pilihan; Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan; Unsur Penunjang urusan Pemerintahan; Unsur Pengawas; Unsur Kewilayahan; Urusan Pemerintahan Umum; dan Urusan Kekhususan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2022 ini. Saya berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pemerintahan, menjadi telaah pertimbangan yang strategis dalam menentukan kebijakan daerah, dan menguatkan Gresik yang telah baik untuk semakin baik, berdikari dalam perekonomian dan sejahtera.

BUPATI GRESIK

H. FANDI AHMAD YANI, SE

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI iv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 DASAR HUKUM 1
1.1.1 PEMBENTUKAN DAERAH 1
1.1.2 DASAR HUKUM 1
1.2 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH 4
1.3 DATA UMUM DAERAH 5
1.3.1 DATA GEOGRAFIS WILAYAH 5
1.3.2 Data Demografis 24
1.3.3 Data Kepegawaian 26
1.3.4 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan 38
1.3.4.1 Pendapatan Asli Daerah 38
1.3.4.2 Pendapatan Transfer 44
1.3.4.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 50
1.3.5 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja 51
1.3.6 Realisasi Pembiayaan 53
BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 54
DAN BELANJA DAERAH 54
2.1 Kebijakan Perubahan Pendapatan 54
2.1.1 Kebijakan Perubahan Pendapatan Asli Daerah 54
2.1.1.1 Pajak Daerah 55
2.1.1.2 Retribusi Daerah 57
2.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 58
2.1.1.4 Lain- lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 59
2.1.2 Pendapatan Transfer 60
2.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 61
2.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah 62
2.1.3 Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah 63
2.2 Kebijakan Perubahan Belanja 63
2.2.1 Belanja Operasi 63
2.2.1.1 Belanja Pegawai 64
2.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa 65
2.2.1.3 Belanja Hibah 65
2.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial 66
2.2.2 Belanja Modal 66
2.2.3 Belanja Tidak Terduga 66
2.2.4 Belanja Transfer 67
2.2.4.1 Belanja Bagi Hasil 67
2.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan 67
2.3 Kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah 67
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH 69
3.1 Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran 71
3.1.1 Indikator Tujuan 71
3.1.1.1 Indeks Reformasi Birokrasi 71
3.1.1.2 Indeks Daya Saing Daerah 75
3.1.1.3 Pertumbuhan Ekonomi 79
3.1.1.4 Indeks Pembangunan Manusia 80
3.1.1.5 Tingkat Kemiskinan 81
3.1.1.6 Tingkat Pengangguran Terbuka 84

3.1.2 Indikator Sasaran 87
3.1.2.1 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 87
3.1.2.2 Indeks Inovasi Daerah 90
3.1.2.3 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur 91
3.1.2.4 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 92
3.1.2.5 Indeks Pembangunan Gender 96
3.1.2.6 Indeks Williamson 98
3.1.2.7 Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian 98
3.1.2.8 Indeks Pendidikan 101
3.1.2.9 Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat 102
3.1.2.10 Prevalensi Stunting 102
3.1.2.11 Indeks Kesalehan Sosial 105
3.1.2.12 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 108
3.1.2.13 Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin 110
3.2 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan 111
3.2.1 Pelaksanaan urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 112
3.2.1.1 Pendidikan 112
3.2.1.1 Kesehatan 112
3.2.1.2 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 112
3.2.1.3 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 113
3.2.1.4 Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 113
3.2.1.5 Sosial 114
3.2.2 Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar 114
3.2.2.1 Ketenagakerjaan 114
3.2.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 114
3.2.2.3 Pangan 115
3.2.2.4 Pertanahan 115
3.2.2.5 Lingkungan hidup 115
3.2.2.6 Kependudukan dan catatan sipil 116
3.2.2.7 Pemberdayaan masyarakat dan desa 116
3.2.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 116
3.2.2.9 Perhubungan 116
3.2.2.10 Komunikasi dan informatika 117
3.2.2.11 Koperasi dan usaha mikro 117
3.2.2.12 Penanaman modal 118
3.2.2.13 Kepemudaan dan Olahraga 118
3.2.2.14 Statistik 118
3.2.2.15 Persandian 119
3.2.2.16 Kebudayaan 119
3.2.2.17 Perpustakaan 119
3.2.2.18 Kearsipan 119
3.2.3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pilihan 120
3.2.3.1 Perikanan 120
3.2.3.2 Pariwisata 120
3.2.3.3 Pertanian 120
3.2.3.4 Perdagangan 120
3.2.3.5 Perindustrian 121
3.2.4 Pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan 121

3.2.5 Pelaksanaan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan 121
3.2.5.1 Perencanaan..... 121
3.2.5.2 Keuangan 122
3.2.5.3 Kepegawaian 122
3.2.5.4 Pendidikan dan pelatihan 122
3.2.5.5 Penelitian dan pengembangan 122
3.2.6 Pelaksanaan Unsur Pengawas 123
3.2.7 Pelaksanaan Unsur Kewilayahan..... 123
3.2.7.1 Kecamatan Gresik 123
3.2.7.2 Kecamatan Kebomas 123
3.2.7.3 Kecamatan Manyar..... 123
3.2.7.4 Kecamatan Cerme 124
3.2.7.5 Kecamatan Benjeng..... 124
3.2.7.6 Kecamatan balongpanggang 124
3.2.7.7 Kecamatan duduksampeyan 124
3.2.7.8 Kecamatan Driyorejo 124
3.2.7.9 Kecamatan Wringinanom 125
3.2.7.10 Kecamatan Kedamean 125
3.2.7.11 Kecamatan Menganti..... 125
3.2.7.12 Kecamatan Sidayu 125
3.2.7.13 Kecamatan Ujungpangkah 125
3.2.7.14 Kecamatan Panceng 126
3.2.7.15 Kecamatan Bungah 126
3.2.7.16 Kecamatan Dukun 126
3.2.7.17 Kecamatan Sangkapura 126
3.2.7.18 Kecamatan Tambak..... 126
3.2.8 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum 127
3.3 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan..... 127
3.4 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya 132
BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN 149
4.1 Urusan Pemerintahan yang ditugas-Pembantuan 149
4.1.1 Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya. 149
4.1.2 Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan pemerintahan dibawahnya.. 149
4.2 Hambatan/Permasalahan dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaiannya 149
BAB V PENUTUP..... 150

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Kabupaten Gresik 9
Gambar 3.1 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Gresik Tahun 2016-2022..... 64
Gambar 3.2 Pertumbuhan Ekonomi Nasional. Provinsi dan Kabupaten Gresik 70
Gambar 3.3 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gresik Tahun 2011 sd 2022 72
Gambar 3.4 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gresik 10 (Sepuluh) Tahun terakhir..... 74
Gambar 3.5 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/ kota di Jawa Timur 77
Gambar 3. 6 Nilai Indeks SPBE. Domain. dan Aspek..... 79
Gambar 3.7 Prevelensi Balita Stunted (Tinggi Badan Menurut Umur) berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, SSGI 2022..... 95
Gambar 3.8 Stunting Balita Indonesia. Jawa Timur dan Gresik Tahun 2007 sd 2022 96
Gambar 3. 9 Perbandingan Nilai Indeks Pengetahuan Kesalehan Sosial tiap Kecamatan di Kabupaten Gresik..... 98

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan di Kabupaten Gresik 6
Tabel 1.2 Data Waduk di Kabupaten Gresik 11
Tabel 1.3 Kawasan Rawan Bencana Cuaca Ekstrim di Kabupaten Gresik ..18
Tabel 1.4 Kawasan Rawan Bencana Epidemi dan Wabah Penyakit di Kabupaten Gresik 19
Tabel 1.5 Kawasan Rawan Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Kabupaten Gresik 21
Tabel 1.6 Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Gresik 21
Tabel 1.7 Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Gresik ..22
Tabel 1.8 Jumlah Desa/ Kelurahan yang terfasilitasi dalam 23
Tabel 1.9 Rekapitulasi Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Berdasarkan Jenis Kelamin Bulan Desember 2022 24
Tabel 1.10 Rekapitulasi Jumlah Kecamatan, Jumlah Kepala Keluarga Dan Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Bulan Desember 2022 25
Tabel 1.11 Kelompok Umur Kabupaten Gresik Tahun 2022 25
Tabel 1.12 Rekapitulasi Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2021 dan Tahun 2022 26
Tabel 1. 13 Data ASN Kabupaten Gresik Menurut Golongan Per 31 Desember 2022 28
Tabel 1.14 Data ASN Kabupaten Gresik Menurut Jenis Kelamin Per 31 Desember 2022 30
Tabel 1.15 Data ASN Kabupaten Gresik Menurut Pendidikan Tahun 2022 33
Tabel 1.16 Data ASN Kabupaten Gresik Menurut Usia Per 31 Desember 2022 36
Tabel 1.17 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022 38
Tabel 1.18 Realisasi Pajak Daerah Tahun 2022 39
Tabel 1.19Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2022 40
Tabel 1.20 Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2022 41
Tabel 1.21 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 43
Tabel 1.22 Realisasi Pendapatan Transfer 48
Tabel 1.23 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 50
Tabel 1.24 Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022 52
Tabel 1. 25 Realisasi Pembiayaan Tahun 2022 53

Tabel 2.1Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2022 54
Tabel 2.2 Perubahan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 54
Tabel 2.3 Perubahan Pajak Daerah Tahun 2022 55
Tabel 2.4 Perubahan Retribusi Daerah Tahun 2022 57
Tabel 2.5 Perubahan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2022 59
Tabel 2.6 Perubahan Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2022 60
Tabel 2.7 Perubahan Pendapatan Transfer Tahun 2022 60
Tabel 2.8 Perubahan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 202261
Tabel 2.9 Perubahan Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2022 63
Tabel 2.10 Perubahan Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah2022 63
Tabel 2.11 Belanja Operasi 64
Tabel 2.12 Belanja Pegawai 64
Tabel 2. 13 Belanja Barang dan Jasa 65
Tabel 2. 14 Belanja Hibah 65

Tabel 2.15 Belanja Bantuan Sosial 66
Tabel 2. 16 Belanja Modal 66
Tabel 2.17 Belanja Tidak Terduga 66
Tabel 2. 18 Belanja Transfer 67
Tabel 2.19 Belanja Bagi Hasil 67
Tabel 2.20 Belanja Bantuan Keuangan 67
Tabel 2.21 Pembiayaan Daerah 68

Tabel 3. 2 Skala Nilai Peringkat Kinerja 71
Tabel 3.3 Indeks Reformasi Birokrasi 71
Tabel 3.4 Rincian Evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Gresik . 72
Tabel 3. 5 Indeks Daya Saing Daerah 75
Tabel 3. 6 Aspek Penilaian Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 77
Tabel 3.7 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gresik 79
Tabel 3.8 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gresik Tahun 2020 sd 2022 80
Tabel 3.9 Indeks Pembangunan Manusia Nasional. Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020 sd 2022 81
Tabel 3.10 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2020 s.d. 2022 .. 82
Tabel 3.11 Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Gresik Tahun 2016-2022 83
Tabel 3.12 Pengangguran Terbuka Kabupaten Gresik Tahun 2020 sd 2022 84
Tabel 3. 13 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional. Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/ kota di Jawa Timur 84
Tabel 3.14 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Gresik Tahun 2020 s.d. 2022 88
Tabel 3.15 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2018 sd 2021 88
Tabel 3.16 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 sd Tahun 2022 90
Tabel 3.17 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten di Jawa Timur Tahun 2022 90
Tabel 3. 18 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kabupaten Gresik Tahun 2020 sd 2022 92
Tabel 3.19 Indeks Kualitas Layanan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2020 sd 2022 95
Tabel 3.20 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Gresik Tahun 2020 sd Tahun 2022 97
Tabel 3.21 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota di Jawa Timur lima tahun terakhir 97
Tabel 3.22 Indeks Williamson Kabupaten Gresik Tahun 2020 sd Tahun 2022 98
Tabel 3.23 PDRB atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (jutaan rupiah) 99
Tabel 3.24 Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2020 sd Tahun 2022 100
Tabel 3.25 Indeks Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2020 sd Tahun 2022 101
Tabel 3.26 Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Gresik Tahun 2020 sd Tahun 2022 102
Tabel 3.27 Prevalensi Stunting Kabupaten Gresik 103

Tabel 3.28 Nilai Indeks Pengetahuan Kesalehan Sosial tiap Kecamatan ... 106
Tabel 3. 29 Perbandingan rerata taksiran Indeks Kesalehan Sosial 107
Tabel 3.30 Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Gresik..... 107
Tabel 3.31 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2020 sd Tahun 2022 109
Tabel 3.32 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur. 2020-2022 109
Tabel 3.33 Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin Kabupaten Gresik Tahun 2020 sd Tahun 2022 110
Tabel 3.34 Kebijakan Strategis yang ditetapkan Tahun 2022 127
Tabel 3.35 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran 2022..... 132

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 DASAR HUKUM

1.1.1 PEMBENTUKAN DAERAH

Pemerintah Kabupaten Gresik dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya.

1.1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standart Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2013;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahn 2010- 2030;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-Udangan di Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2021;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
26. Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 8 Tahun 2017;
27. Peraturan Bupati Gresik Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

28. Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2022;
29. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

1.2 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, visi yang dirumuskan sebagai berikut:

"Mewujudkan Gresik Baru yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah"

Sebagai upaya dalam mewujudkan visi Kabupaten Gresik maka dirumuskan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Gresik periode 2021-2026 sebagaimana berikut:

Misi ke-1

Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif

Misi ke-2

Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota

Misi ke-3

Mendorong Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah

Misi ke-4

Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah

Misi ke-5

Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja, dan menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik

1.3 DATA UMUM DAERAH

1.3.1 DATA GEOGRAFIS WILAYAH

Lokasi Kabupaten Gresik terletak di sebelah Barat Laut Kota Surabaya yang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Timur. Secara administrasi, Kabupaten Gresik berbatasan dengan :

a. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Jawa;
b. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Madura dan Kota Surabaya;
c. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Lamongan; serta
d. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo.

Sedangkan secara geografis, wilayah Kabupaten Gresik terletak antara 112^0 sampai 113^0 Bujur Timur dan 7^0 sampai 8^0 Lintang Selatan merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2 sampai 12 meter di atas permukaan air laut kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter diatas permukaan air laut.

Luas wilayah Kabupaten Gresik berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah 1.191,25 km^2 (119.125 hektare), namun berdasarkan penampakan citra satelit khususnya pada perubahan bentang alam akibat proses perubahan batas garis pantai, proses sedimentasi, dan reklamasi, luas wilayah Kabupaten Gresik bertambah menjadi 1.256,76 km^2 (125.675,97 hektare).

Wilayah Kabupaten Gresik terdiri dari 18 Kecamatan dengan 330 Desa dan 26 Kelurahan. Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Gresik sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan di Kabupaten Gresik

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Kelurahan/Desa
1	Balongpanggang	25	Ngasin, Ganggang, Pinggir, Dohoagung, Klotok, Tenggor, Babatan, Pacuh, Pucung Balongpanggang, Wonorejo, Kedungsumber, Kedungpring, Mojogede, Bandungsekaran, Wahas, Karangsemanding, Banjaragung, Sekarputih, Wotansari, Tanahladean, Dapet, Brangkal, Jombangdelik, Ngampel
2	Benjeng	23	Jatirembe, Jogodalu, Pundut Trate, Metatu, Banter, Munggugebang, Klampok, Kedungsekar, Sirnoboyo, Karangkidul, Dermo, Kalipadang, Bulurejo, Munggugianti, Kedungrukem, Bengkelolor, Gluranploso, Deliksumber, Sedapurklagen, Bulangkulon, Lundo, Balongmojo, Balongtunjung
3	Bungah	22	Gumeng, Sungonlegowo, Bedanten, Tanjung Widoro, Indrodelik, Raciwetan, Pegundan, Kemangi, Mojopurowetan,Mojopurogede, Kisik, Sidomukti, Melirang, Watuagung, Abar-Abir, Sidokumpul, Kramat, Masangan, Bungah, Sidorejo, Sukorejo, Sukowati
4	Cerme	25	Banjarsari, Padeg, Gedangkulut, Semampir, Wedani, Jono, Kambingan, Pandu, Cerme Lor, Cagakagung, Ngabetan, Kandangan, Cerme Kidul, Dungus, Betiting, Iker-Iker Geger, Dooro, Lengkong, Dampaan, Gununganyar, Morowudi, Ngembung, Dadapkuning, Sukoanyar, Tambakberas, Jono
5	Driyorejo	16	Wedoroanom, Gadung, Randegansari, Petiken, Karangandong, Mojosarirejo, Mulung, Sumput, Bambe, Kesambenwetan, Tenaru, Tanjungan, Banjaran, Cangkir, Driyorejo, Krikilan, Randengansari
6	Duduksampeyan	23	Kramat, Kemudi, Wadak Lor, Wadak Kidul, Glanggang, Pandaan, Kawistowindu, Petisbenem, Tumapel, Setrohadi, Tambakrejo, Samirplapan, Kandangan, Tebaloan, Ambeng-Ambeng Watangrejo,

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Kelurahan/Desa
			Panjunan, Sumengko, Sumari, Tirem, Gredek, Bendungan, Duduksampeyan, Palebon
7	Dukun	26	Sawo, Petiyin Tunggal, Tebuwung, Bulangan, Ima'an, Karangcangkring, Mejopetung, Mentaras, Bangeran, Babaksari, Babakbowo, Sambogunung, Gedung Kedo'an, Tiremenggal, Madumulyorejo, Lowayu Sembunganyar, Jrebeng, Dukuh Kembar, Baron, Sembungan Kidul, Kalirejo, Dukunanyar, Padang Bandung, Sekargadung, Wonokerto,
8	Gresik	21	Lumpur, Kroman, Kemuteran, Tlogopojok, Pekelingan, Sukodono, Kebungson, Ngipik, Karangpoh, Karangturi, Bedilan, Trate, Pekauman, Sukorame, Tlogobendung, Tlogopatut, Sidorukun, Kramatinggil, Gapurosukolilo, Sidokumpul, Pulopancikan
9	Kebomas	21	Randuagung, Dahanrejo, Kebomas, Sidomoro, Klangonan, Kawisanyar, Giri, Singosari, Sekarkurung, Sidomukti, Indro, Prambangan, Kedanyang, Gulomantung, Karangkering, Tenggulunan, Segoromadu, Sukorejo, Ngargosari, Gending, Kembangan
10	Kedamean	15	Cermen Lerek, Lampah, Glindah, Tulung, Turirejo, Katimoho, Slempit, Tanjung, Belahanrejo, Sidoraharjo, Mojowuku, Kedamean, Ngepung, Banyuurip, Manunggal
11	Manyar	23	Manyarejo, Morobakung, Tanggulrejo, Sembayat, Ngampel, Karangrejo, Gumeno, Sumberejo, Betoyoguci, Betoyokauman, Manyar Sidomukti, Leran, Sukomulyo, Penganden, Banjarsari, Pongangan, Roomo, Tebalo, Suci, Yosowilangun, Pejangganan, Banyuwangi, Manyar Sidorukun
12	Menganti	22	Kepatihan, Hendrosari, Gempolkurung, Palemwatu, Drancang, Pengalangan, Boteng, Gadingwatu, Randupadangan, Domas, Sidojangkung, Hulaan, Setro, Bringkang, Sidowugu, Pranti, Menganti, Laban, Mojotengah, Boboh, Beton, Putatlor
13	Panceng	14	Banyutengah, Dalegan, Ketanen,

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Kelurahan/Desa
			Pantenan, Campurejo, Prupuh, Surowiti, Wotan, Siwalan, Sukodono, Sumurber, Serah, Doudo, Petung
14	Sangkapura	17	Kebuntelukdalam, Gunungteguh, Patarselamat, Suwari, Pudakitbarat, Pudakittimur, Bululanjang, Daun, Lebak, Sunaiteluk, Sawahmulya, Kotakusuma, Balikterus, Dekatagung, Kumalasa, Sidogedungbatu, Sungairujing
15	Sidayu	21	Randu Boto, Wadeng, Sedangaran, Sambi Pondok, Mriyungan, Golokan, Sukorejo, Purwodadi, Racitengah, Srowo, Lasem, Kertosono, Ngawen, Pengulu, Bunderan, Sido Mulyo, Raci Kulon, Asem Papak, Gedangan, Kauman, Mojo Asem
16	Tambak	13	Diponggo, Tambak, Kepuhteluk, Pekalongan, Grejeg, Sukalela, Kepuhlegundi, Klomponggubug, Paromaan, Tanjungori, Gelam, Sukaoneng, Telukjatidawang
17	Ujungpangkah	13	Pangkah Kulon, Pangkah Wetan, Banyu Urip, Ngemboh, Cangaan, Gosari, Kebonagung, Ketapanglor, Karangrejo, Bolo, Tanjangawan, Glatik, Sekapuk
18	Wringinanom	16	Sooko, Kesambenkulon, Sumbergede, Padangan, Watestanjung, Sembung, Kepuhklagen, Pasinanlemahputih, Sumengko, Wringinanom, Sumberame,Lebaniwaras, Kedunganyar, Sumberwaru, Lebanisuko, Mondoluku
	Jumlah	**356**	

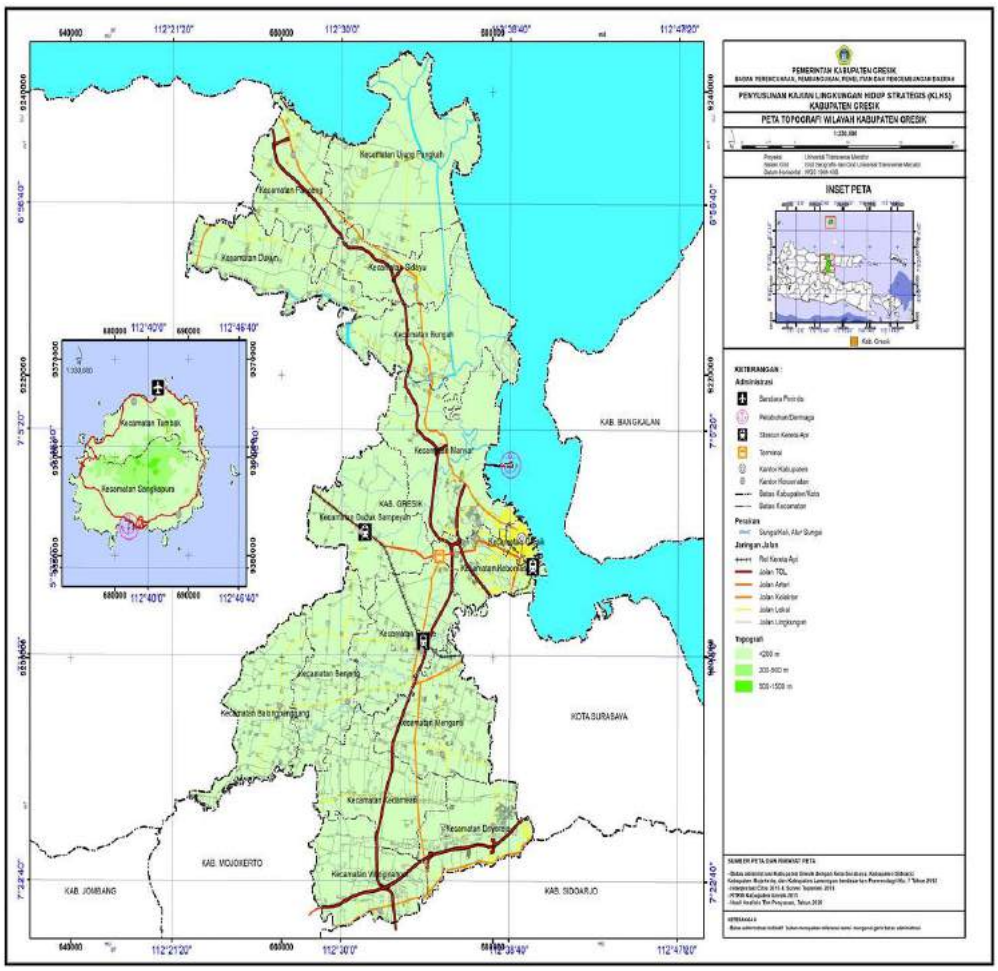

Sumber data: Materi Teknis RTRW Kabupaten Gresik Tahun 2020

Gambar 1.1 Peta Kabupaten Gresik

Secara Hidrografi, keadaan permukaan air tanah di Wilayah Kabupaten Gresik pada umumnya relatif dalam, hanya daerah-daerah tertentu di sekitar sungai atau rawa-rawa saja yang mempunyai permukaan air tanah agak dangkal. Pola aliran sungai di Kabupaten Gresik memperlihatkan wilayah Gresik merupakan daerah muara Sungai Bengawan Solo dan Kali Lamong dan juga dilalui oleh Kali Surabaya di Wilayah Selatan. Sungai-sungai ini memiliki sifat aliran dan kandungan unsur hara yang berbeda. Sungai Bengawan Solo mempunyai debit air yang cukup tinggi dengan membawa sedimen lebih banyak dibandingkan dengan Kali Lamong, sehingga pendangkalan di Sungai Bengawan Solo lebih cepat. Dengan adanya peristiwa tersebut mengakibatkan timbulnya tanah-tanah oloran yang seringkali oleh penduduk dimanfaatkan untuk lahan perikanan.

Selain dialiri oleh sungai-sungai tersebut diatas keadaan hidrologi Kabupaten Gresik juga ditentukan oleh adanya waduk, mata air, pompa air dan sumur bor.

Semua sumber air baku dari dam, waduk, telaga, bendungan serta sungai-sungai klasifikasi I – IV, airnya dapat dimanfaatkan secara langsung dan dikembangkan untuk berbagai kepentingan. Berikut ini sumber air yang terdapat di Kabupaten Gresik:

1. Air Permukaan

   Air permukaan adalah air yang terkumpul di atas tanah atau di mata air, sungai danau, lahan basah atau laut. Air permukaan berhubungan dengan air tanah atau awan. Air permukaan secara alami terisi melalui presipitasi dan secara alami berkurang melalui penguapan dan rembesan ke bawah permukaan sehingga menjadi air bawah tanah. Berikut ini air permukaan yang terdapat di Kabupaten Gresik meliputi:

   a. Kali Mas;
   b. Kali Bengawan Solo;
   c. Kali Lewean;
   d. Kali Lamongan;
   e. Kali Benem;
   f. Kali Corong;
   g. Kali Mentani;
   h. Kali Wangen;
   i. Kali Bedahan;
   j. Kali Mantup;
   k. Kali Medangan;
   l. Kali Ceper;
   m. Kali Mireng;
   n. Kali Wadak;
   o. Kali Gladakgede;
   p. Kali Tambak;
   q. Kali Baturata;
   r. Kali Raya;
   s. Kali Baturaya;
   t. Kali Kope;
   u. Kali Deje;
   v. Kali Laok;
   w. Kali Kebonagung;
   x. Kali Grunjungan;
   y. Kali Lancabur; dan
   z. Kali Legundi.
   aa. Danau/Telaga

2. Waduk

   Waduk yang merupakan perairan berbentuk bendungan, maka debit air yang muat di waduk pun biasanya sangat banyak. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi

kebutuhan sehari- hari, baik dalam operasional maupun investasi. Maksudnya, stok air di waduk biasanya selain digunakan untuk minum, mencuci, dan kebutuhan rumah tangga lainnya, waduk juga digunakan untuk mengairi lahan masyarakat yang mempunyai profesi sebagai petani. Oleh karena itulah keberadaan waduk ini sangatlah berguna atau bermanfaat. Selain yang telah disebutkan di atas, masih banyak lagi manfaat yang dapat dihadirkan oleh waduk ini. Berbagai macam manfaat waduk antara lain adalah sebagai sumber pengairan lahan maupun sawah, sebagai pembangkit listrik tenaga air, memenuhi kebutuhan air dalam kehidupan sehari-hari, menyediakan stok persediaan air minum, sebagai tempat budidaya ikan air tawar, merupakan tempat untuk budidaya tanaman air tertentu, serta sebagai sarana hiburan hingga edukasi. Berikut ini data waduk yang berada di Kabupaten Gresik:

Tabel 1.2 Data Waduk di Kabupaten Gresik

No	Nama	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Waduk	Gresik	0,39
2	Waduk Lowayu	Dukun	0,24
3	Waduk Sukodono	Panceng	25,60
4	Waduk	Kebomas	0,19
5	Waduk	Kebomas	0,00
6	Waduk	Kebomas	1,23
7	Waduk Cerme Kidul	Cerme	1,88
8	Waduk	Sidayu	0,21
9	Waduk Siraman	Dukun	5,28
10	Waduk Rambit	Sidayu	2,38
11	Waduk Palem Watu	Menganti	1,09
12	Waduk Belahan Rejo	Kedamean	2,24
13	Waduk Mojokuwu	Kedamean	1,33
14	Waduk Katimoho	Kedamean	2,43
15	Waduk Tulung	Kedamean	0,50
16	Waduk Tulung	Kedamean	1,59
17	Waduk Ngepung I	Kedamean	6,74
18	Waduk Kedamean	Kedamean	6,94
19	Waduk Randupukah/Gadung	Driyorejo	2,68
20	Waduk Tanjung	Kedamean	2,67
21	Waduk	Kedamean	0,50
22	Waduk Sekar Putih	Balongpanggang	2,77
23	Waduk Gluran Ploso	Benjeng	1,84
24	Waduk Balongpanggang	Balongpanggang	1,62
25	Waduk Gridi	Balongpanggang	8,27
26	Waduk Kedung Jati	Balongpanggang	1,66
27	Waduk	Cerme	0,39
28	Waduk Ngabetan	Cerme	12,27

No	Nama	Kecamatan	Luas (Ha)
29	Waduk	Benjeng	0,26
30	Waduk Mentaras DS	Dukun	7,33
31	Waduk Joho	Dukun	19,28
32	Waduk Ketenan II	Panceng	2,63
33	Waduk Bunder	Kebomas	14,00
34	Waduk Sumari	Duduksampeyan	5,21
35	Waduk Lowayu	Dukun	65,05
36	Waduk Mentaras	Dukun	12,32
37	Waduk Mentaras	Dukun	16,71
38	Waduk Kedung Sumber	Balongpanggang	2,07
39	Waduk Balong Jrambah (Kedamean II)	Kedamean	5,21
40	Waduk Mojosarirejo	Driyorejo	2,17
41	Waduk Gedang Kulud	Duduksampeyan	55,20
42	Waduk Gredeg	Duduksampeyan	10,07
43	Waduk Pundutrate II	Benjeng	5,86
44	Waduk Banter	Benjeng	7,18
45	Waduk Ngasin	Balongpanggang	10,04
46	Waduk Bunder	Kebomas	75,67
47	Waduk Juwet	Balongpanggang	7,00
48	Waduk Doho Agung	Balongpanggang	6,25
49	Waduk Tenggor	Balongpanggang	3,62
50	Waduk Gadel	Balongpanggang	8,11
51	Waduk Gogor	Balongpanggang	3,45
52	Waduk Gogor	Balongpanggang	15,78
53	Waduk Bongsokulon	Menganti	0,50
54	Waduk Randu Padangan	Menganti	2,18
55	Waduk Bongso Kulon	Menganti	0,50
56	Waduk Hendro Sari I	Menganti	1,06
57	Waduk Pengalangan	Menganti	2,73
58	Waduk Mojotengah	Menganti	1,78
59	Waduk Pakupari	Menganti	2,24
60	Waduk Pacuh	Balongpanggang	11,21
61	Waduk Turirejo	Kedamean	2,64
62	Waduk Wedoro	Driyorejo	5,29
63	Waduk Tenaru	Driyorejo	1,26
64	Waduk Doro (Ngepung II)	Kedamean	7,09
65	Waduk Sooko	Wringinanom	2,11
66	Kastoba	Sangkapura	15,65
67	Kastoba	Tambak	17,50
68	Waduk	Dukun	0,01
69	Waduk Sumber Barat	Balongpanggang	3,41
70	Waduk Babatan	Balongpanggang	2,76
71	Waduk Ngampel	Balongpanggang	2,15
72	Waduk Tanah Landean	Balongpanggang	2,58
73	Waduk Jogodalu	Benjeng	27,60
74	Waduk	Bungah	1,18
75	Waduk Wonosari	Benjeng	13,53
76	Waduk Grogol	Bungah	1,29
77	Waduk Suci	Manyar	6,95
78	Waduk	Balongpanggang	473,98
79	Waduk Pinggir	Balongpanggang	13,64
80	Waduk Bangle	Balongpanggang	235,92
81	Waduk Bangle	Balongpanggang	213,57
82	Waduk Wareng	Balongpanggang	336,07
83	Waduk Mojo Gede	Balongpanggang	225,92

No	Nama	Kecamatan	Luas (Ha)
84	Waduk Mojo Gede	Balongpanggang	50,90
85	Waduk Karangwungu	Balongpanggang	225,92
86	Waduk Bandung Sekaran	Balongpanggang	189,76
87	Waduk Jombang Delik	Balongpanggang	90,93
88	Waduk Brangkal I	Balongpanggang	27,37
89	Waduk Brangkal II	Balongpanggang	27,37
90	Waduk Pundutrate	Benjeng	144,21
91	Waduk Sekargeneng	Benjeng	76,52
92	Waduk Balongmojo	Benjeng	125,38
93	Waduk Raci Ndlanyar	Bungah	211,87
94	Waduk Raci Wetan	Bungah	78,48
95	Waduk	Bungah	211,87
96	Waduk Pengundan	Bungah	128,79
97	Waduk Kemangi	Bungah	128,79
98	Waduk Melirang	Bungah	12,52
99	Waduk Sidomukti	Bungah	47,91
100	Waduk	Bungah	74,19
101	Waduk Mojopurno Gede dan Mojopurno Wetan	Bungah	149,63
102	Waduk Abar-Abar	Bungah	38,86
103	Waduk	Bungah	83,68
104	Waduk Kisik	Bungah	238,93
105	Waduk Indro Delik	Bungah	100,28
106	Waduk Cerme Lor	Cerme	54,61
107	Waduk	Cerme	54,61
108	Waduk	Cerme	115,07
109	Waduk Cagak Agung	Cerme	115,07
110	Waduk Karangan	Cerme	328,77
111	Waduk Kambingan	Cerme	328,77
112	Waduk Wedani II	Cerme	153,28
113	Waduk Wedani I	Cerme	153,28
114	Waduk Kandangan	Cerme	324,24
115	Waduk Amburan	Cerme	324,24
116	Waduk Iker-Iker Geger	Cerme	149,03
117	Waduk Betting	Cerme	141,02
118	Waduk Telapak I	Driyorejo	660,12
119	Waduk Telapak II	Driyorejo	660,12
120	Waduk Randegan	Driyorejo	660,12
121	Waduk Radengan Sari	Driyorejo	660,12
122	Waduk Anom	Driyorejo	556,17
123	Waduk Banjaran	Driyorejo	105,18
124	Waduk Gunung Daten	Driyorejo	293,78
125	Waduk Kesamben Wetan	Driyorejo	281,98
126	Waduk Kliteh	Driyorejo	660,12
127	Waduk Petiken Barat	Driyorejo	321,77
128	Waduk	Driyorejo	660,12
129	Waduk Petiken Timur	Driyorejo	321,77
130	Waduk Mulung	Driyorejo	104,23
131	Waduk Pandanan	Duduksampeyan	74,77
132	Waduk Tumapel	Duduksampeyan	175,74
133	Waduk Kali Ombo	Duduksampeyan	367,31
134	Waduk Bulangan	Dukun	27,80
135	Waduk Proliman	Dukun	102,52
136	Waduk Mojo Petung	Dukun	219,12
137	Waduk Mojo Petung	Dukun	2,76
138	Waduk Sombo Gunung	Dukun	49,04

No	Nama	Kecamatan	Luas (Ha)
139	Waduk Kedanyang	Kebomas	178,60
140	Waduk Gading Sidoharjo	Kedamean	511,22
141	Waduk Slempit	Kedamean	624,21
142	Waduk Lingsir	Kedamean	624,21
143	Waduk Balekambang	Kedamean	419,77
144	Waduk Hendro Sari II	Menganti	325,02
145	Waduk Kepatihan	Menganti	27,40
146	Waduk Boteng	Menganti	14,69
147	Waduk Pranti	Menganti	218,97
148	Waduk Wonoayuceper	Menganti	214,07
149	Waduk Menganti	Menganti	443,40
150	Waduk Songgat	Menganti	454,57
151	Waduk Hulaan	Menganti	490,01
152	Waduk Setro	Menganti	173,71
153	Waduk Sido Wungu	Menganti	490,01
154	Waduk Pengampon II	Menganti	207,66
155	Waduk Pengampon I	Menganti	207,66
156	Waduk Labankulon III	Menganti	377,53
157	Waduk Labankulon II	Menganti	377,53
158	Waduk Labankulon I	Menganti	377,53
159	Waduk Grogol	Menganti	377,53
160	Waduk Laban Wetan	Menganti	377,53
161	Waduk Delegan	Panceng	26,18
162	Waduk Campurejo	Panceng	70,46
163	Waduk Ketanen I	Panceng	56,71
164	Waduk Pantenan	Panceng	248,70
165	Waduk Sukodono	Panceng	639,02
166	Waduk Doudo	Panceng	58,97
167	Waduk Wotan	Panceng	50,69
168	Waduk	Panceng	7,85
169	Waduk Petung II	Panceng	92,33
170	Waduk Petung I	Panceng	92,33
171	Waduk Wedeng	Sidayu	102,55
172	Waduk Sukorejo	Sidayu	87,97
173	Waduk Ngawen IV	Sidayu	134,07
174	Waduk Ngawen II	Sidayu	134,07
175	Waduk Ngawen I	Sidayu	134,07
176	Waduk Ngawen III	Sidayu	134,07
177	Waduk Rambit	Ujungpangkah	147,57
178	Waduk Gosari	Ujungpangkah	242,63
179	Waduk Ketapang	Ujungpangkah	122,50
180	Waduk Glatik	Ujungpangkah	158,58
181	Waduk Glatik	Ujungpangkah	28,87
182	Waduk Bolo	Ujungpangkah	65,63
183	Waduk Kesamben Kulon	Wringinanom	19,15
184	Waduk Sembung	Wringinanom	192,43
185	Waduk Raci Kulon	Sidayu	112,33
186	Waduk Sekargeneng	Cerme	148,33
187	Waduk Banjarsari	Manyar	259,23
188	Telaga Dowo	Manyar	1,23
189	Telaga Ngipik	Manyar	12,50
190	Telaga Ngipik	Manyar	6,44
191	Telaga Ngipik	Gresik	4,13
192	Telaga Ngipik	Kebomas	15,54
193	Telaga Dowo	Kebomas	5,36

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Gresik Tahun 2020-2040

Arahan pengembangan wilayah sungai kabupaten termasuk waduk dan embung, meliputi:

a. Menambah penampungan air pada musim hujan untuk dimanfaatkan pada musim kemarau, dengan dan memanfaatkan cekungan-cekungan yang ada;
b. Melakukan peningkatan kinerja sungai lintas kabupaten yang melalui kali surabaya dan kali tengah yang merupakan bagian dari das brantas;
c. Melakukan peningkatan kinerja sungai lintas kabupaten yang melalui kali lamong dengan wilayah pelayanan gresik dan lamongan yang merupakan bagian dari das bengawan solo; dan
d. Mengoptimalkan waduk-waduk atau embung di kabupaten gresik yang berjumlah 100.

Pemutakhiran rencana pola ruang kabupaten disusun berdasarkan analisis optimasi pemanfaatan ruang yang berangkat dari strategi penataan ruang kabupaten dengan memperhatikan kebijakan dan strategi pola ruang provinsi dan nasional. Rencana pola ruang wilayah kabupaten, meliputi:

1. Rencana pola ruang kawasan lindung yang mencakup:
   a. Kawasan hutan lindung;
   b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi:
   c. Kawasan bergambut; dan
   d. Kawasan resapan air;
2. Kawasan perlindungan setempat, meliputi:
   a. Sempadan pantai;

      Kawasan sempadan pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Menurut PP No 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dengan luas kurang lebih sebesar 1,72 Ha pada Kecamatan Kebomas. Kawasan sempadan pantai di Kabupaten Gresik

terdapat di sepanjang pantai yang melalui Pulau Bawean, Kecamatan Panceng, Ujung Pangkah, Sidayu, Bungah, Manyar, Gresik, Kebomas.

b. Sempadan sungai

Sempadan sungai meliputi ruang di kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggul, atau di antara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggul dengan luas kurang lebih 1.318,42 Ha pada Kecamatan Bungah, Kecamatan Cerme, Kecamatan Dukun, Kecamatan Kebomas, Kecamatan Manyar, Kecamatan Panceng, Kecamatan Sangkapura, Kecamatan Sidayu, Kecamatan Tambak dan Kecamatan Ujungpangkah

c. Kawasan sekitar danau atau waduk

Kawasan perlindungan setempat sekitar waduk memiliki luas kurang lebih sebesar 49,41 Ha pada Kecamatan Gresik, Kecamatan Kebomas, dan Kecamatan Manyar meliputi:

1) Daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter dari tepi air muka tertinggi yang pernah terjadi;
2) Muka air tertinggi yang pernah terjadi menjadi batas badan danau/waduk.

Adapun rencana pemantapan kawasan sempadan waduk diatas antara lain:

1) Pengendalian kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan sekitar danau/waduk dan mata air agar tidak mengganggu fungsi danau dan mata air
2) Pelarangan kegiatan budidaya baru di kawasan sekitar danau/waduk dan mata air
3) Pengembalian fungsi lindung kawasan sekitar danau/waduk dan mata air

3. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, meliputi:
   a. Kawasan suaka alam;
   b. Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya;
   c. Suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut;
   d. Cagar alam dan cagar alam laut;
   e. Kawasan pantai berhutan bakau;
   f. Taman nasional dan taman nasional laut;
   g. Taman hutan raya;
   h. Taman wisata alam dan taman wisata alam laut; dan
   i. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
4. Kawasan rawan bencana alam, meliputi:
   a. Kawasan rawan tanah longsor; dan
   b. Kawasan rawan gelombang pasang dan kawasan rawan banjir.
5. Kawasan lindung geologi, meliputi:
   a. Kawasan cagar alam geologi; dan
   b. Kawasan rawan bencana alam geologidan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
6. Kawasan lindung lainnya, meliputi:
   a. Cagar biosfer;
   b. Ramsar;
   c. Taman buru;
   d. Kawasan perlindungan plasma-nutfah; dan
   e. Kawasan pengungsian satwa, terumbu karang dan kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi.
7. Kawasan Budidaya, meliputi:
   a. Kawasan peruntukan hutan produksi;
   b. Kawasan hutan rakyat;
   c. Kawasan peruntukan pertanian;
   d. Kawasan peruntukan perkebunan;
   e. Kawasan peruntukan perikanan;
   f. Kawasan peruntukan pertambangan;
   g. Kawasan peruntukan industri;

h. Kawasan peruntukan pariwisata;
i. Kawasan peruntukan permukiman;
j. Kawasan peruntukan lainnya.

8. Kawasan Rawan Bencana di Kabupaten Gresik

a. Kawasan Rawan Bencana Banjir

Seluruh kecamatan di Kabupaten Gresik masuk dalam kawasan rawan bencana banjir dengan indeks resiko bencana banjir tinggi, sedang, dan rendah. Banjir di Kabupaten Gresik dapat diakibatkan oleh DAS Bengawan Solo, DAS Lamong, DAS Surabaya, banjir kota/genangan. DAS Bengawan Solo merupakan DAS terpanjang di Pulau Jawa yang bermuara di Kabupaten Gresik.

Dari sejarah kejadian dapat diamati kejadian banjir yang diakibatkan karena meluapnya aliran DAS Bengawan Solo dalam periode dua tahun terakhir 2016 – 2017 awal mencapai 6 kejadian banjir dengan cakupan 3 wilayah Kecamatan terdampak, Kecamatan Bungah, Kecamatan Dukun dan Kecamatan Ujungpangkah

b. Kawasan Rawan Bencana Cuaca Ekstrim

18 Kecamatan di Kabupaten Gresik masuk dalam kawasan rawan bencana cuaca ekstrim. Kawasan rawan bencana cuaca ekstrim di Kabupaten Gresik dibagi menjadi 3, yakni Rendah, Sedang dan Tinggi. Sebaran kawasan rawan bencana cuaca ekstrim pada Seluruh Kecamatan di Kabupaten Gresik dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 1.3 Kawasan Rawan Bencana Cuaca Ekstrim di Kabupaten Gresik

No	Kecamatan	Indeks Resiko Bencana Cuaca Ekstrim		
		Rendah	Sedang	Tinggi
1	Panceng	V	V	
2	Ujungpangkah	V	V	
3	Dukun	V	V	
4	Sidayu	V	V	
5	Bungah	V	V	
6	Manyar	V	V	
7	Duduksampeyan	V	V	
8	Kebomas	V	V	
9	Gresik	V		

No	Kecamatan	Indeks Resiko Bencana Cuaca Ekstrim		
		Rendah	Sedang	Tinggi
10	Cerme	V	V	
11	Benjeng	V	V	V
12	Balongpanggang		V	V
13	Kedamean		V	V
14	Driyorejo		V	V
15	Menganti		V	V
16	Wringinanom		V	V
17	Tambak	V	V	V
18	Sangkapura	V	V	V

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Gresik Tahun 2020-2040

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 3 Kecamatan yang memiliki tingkat atau indeks resiko bencana cuaca ekstrim rendah, sedang dan tinggi sekaligus. 3 Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Benjeng, Kecamatan Tambak dan Kecamatan Sangkapura. 5 Kecamatan dengan indeks resiko bencana cuaca ekstrim sedang hingga tinggi, 8 Kecamatan dengan indeks resiko rendah hingga sedang, dan 1 Kecamatan yang memiliki indeks resiko rendah. Kecamatan yang memiliki indeks resiko bencana cuaca ekstrim rendah adalah Kecamatan Gresik.

c. Kawasan Rawan Bencana Epidemi dan Wabah Penyakit

Kawasan bencana epidemi dan wabah penyakit di Kabupaten Gresik juga memiliki 3 indeks resiko, yakni rendah, sedang dan tinggi. Sebaran kawasab rawan bencana epidemi dan wabah penyakit pada seluruh kecamatan di Kabupaten Gresik dapat dilihat memalui tabel berikut:

Tabel 1.4 Kawasan Rawan Bencana Epidemi dan Wabah Penyakit di Kabupaten Gresik

No	Kecamatan	Indeks Resiko Bencana Epidemi dan Wabah Penyakit		
		Rendah	Sedang	Tinggi
1	Panceng			V
2	Ujungpangkah			
3	Dukun		V	V
4	Sidayu			
5	Bungah		V	V
6	Manyar		V	V
7	Duduksampeyan			V
8	Kebomas	V	V	V

No	Kecamatan	Indeks Resiko Bencana Epidemi dan Wabah Penyakit		
		Rendah	Sedang	Tinggi
9	Gresik	V		
10	Cerme		V	V
11	Benjeng			V
12	Balongpanggang	V	V	V
13	Kedamean			V
14	Driyorejo			
15	Menganti			V
16	Wringinanom			
17	Tambak			V
18	Sangkapura			

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Gresik Tahun 2020-2040

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 18 Kecamatan di Kabupaten Gresik, terdapat 2 Kecamatan dengan indeks resiko bencana rendah, sedang hingga tinggi. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Kebomas dan Kecamatan Balongpanggang. 4 Kecamatan dengan indeks sedang hingga tinggi, yakni Kecamatan Dukun, Bungah, Manyar dan Cerme. 6 Kecamatan dengan indeks resiko tinggi, yakni Kecamatan Panceng, Duduksampeyan, Benjeng, Kedamean, Menganti dan Tambak. 1 Kecamatan dengan indeks resiko rendah adalah Kecamatan Gresik. Serta 5 Kecamatan tidak berpotensi sebagai kawasan rawan bencana epidemi dan wabah penyakit adalah Kecamatan Ujungpangkah, Sidayu, Driyorejo, Wringinanom dan Sangkapura.

d. Kawasan Rawan Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Parameter tinggi gelombang dan arus gelombang pada jenis bencana abrasi dan gelombang ekstrim di Kabupaten Gresik merupakan faktor utama yang menjadi penyebab bencana. Semua pesisir pantai kabupaten Gresik memiliki indeks resiko bencana gelombang ekstrim dan abrasi rendah, sedang, hingga tinggi. Pesisir pantai di Kabupaten Gresik memanjang melalui Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, Bungah, Sidayu, Ujungpangkah, dan Panceng. Serta Kecamatan Tambak dan Sangkapura di Pulau Bawean. Berikut sebaran

kawasan rawan bencana pada 9 Kecamatan di Kabupaten Gresik:

Tabel 1.5 Kawasan Rawan Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Kabupaten Gresik

No	Kecamatan	Indeks Resiko Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi		
		Rendah	Sedang	Tinggi
1	Panceng	V		
2	Ujungpangkah	V	V	V
3	Sidayu		V	V
4	Bungah		V	V
5	Manyar		V	V
6	Kebomas	V	V	
7	Gresik	V	V	
8	Tambak	V		
9	Sangkapura	V		

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Gresik Tahun 2020-2040

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 18 Kecamatan di Kabupaten Gresik, terdapat 9 Kecamatan yang termasuk ke dalam kawasan rawan bencana gelombanmg ekstrim dan abrasi. Dari 9 Kecamatan, Kecamatan Ujungpangkah adalah Kecamatan yang memiliki indeks resiko bencana rendah hingga tinggi. 3 Kecamatan dengan indeks resiko sedang hingga tinggi, 2 Kecamatan dengan indeks resiko rendah hingga sedang dan 3 Kecamatan dengan indeks resiko rendah.

e. Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi

Kabupaten Gresik adalah Kabupaten dengan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi. Hal ini disebabkan masuknya Kabupaten Gresik dalam radius patahan sesar di Wilayah Surabaya. Sama halnya dengan Bencana yang lain, indeks resiko bencana gempa bumi juga dibagi dalam 3 tingkatan, yakni rendah, sedang hingga tinggi. Berikut sebaran kawasan rawan bencana gempa bumi di Kabupaten Gresik:

Tabel 1.6 Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Gresik

No	Kecamatan	Indeks Resiko Bencana Gempa Bumi		
		Rendah	Sedang	Tinggi
1	Panceng	V	V	
2	Ujungpangkah	V	V	

No	Kecamatan	Indeks Resiko Bencana Gempa Bumi		
		Rendah	Sedang	Tinggi
3	Dukun	V	V	
4	Sidayu	V	V	
5	Bungah	V	V	
6	Manyar	V	V	
7	Duduksampeyan	V	V	
8	Kebomas	V	V	
9	Gresik	V	V	
10	Cerme	V	V	
11	Benjeng	V	V	
12	Balongpanggang	V	V	
13	Kedamean	V	V	
14	Driyorejo	V	V	
15	Menganti	V	V	
16	Wringinanom	V	V	
17	Tambak		V	V
18	Sangkapura		V	V

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Gresik Tahun 2020-2040

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Seluruh Kecamatan di Kabupaten Gresik masuk ke dalam kawasan rawan bencana gempa bumi. 2 Kecamatan di Pulau Bawaan, yakni Kecamatan Tambak dan Sangkapura adalah Kecamatan dengan tingkat resiko gempa bumi sedang hingga tinggi. Sedangkan untuk 16 Kecamatan lainnya yang berada di Pulau Jawa memiliki tingkat resiko gempa bumi rendah hingga sedang.

f. Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor

Kawasan rawan bencana tanah longsor di Kabupaten Gresik menyebar pada beberapa kecamatan. Diantaranya sebagian wilayah di Kecamatan Panceng, Ujungpangkah, Dukun, Bungah, Manyar, Kebomas, Cerme, Wringinanom. Sebaran kawasan rawan bencana tanah longsor dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.7 Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Gresik

No	Kecamatan	Indeks Resiko Bencana Tanah Longsor		
		Rendah	Sedang	Tinggi
1	Panceng	V	V	
2	Ujungpangkah	V	V	
3	Dukun			V
4	Bungah			V
5	Manyar		V	V
6	Kebomas		V	

No	Kecamatan	Indeks Resiko Bencana Tanah Longsor		
		Rendah	Sedang	Tinggi
7	Cerme			V
8	Wringinanom		V	

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Gresik Tahun 2020-2040

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 18 Kecamatan di Kabupaten Gresik terdapat 8 Kecamatan yang masuk kedalam kawasan rawan bencana tanah longsor. Terdapat 3 Kecamatan dengan tingat resiko rawan bencana tinggi adalah Kecamatan Dukun, Bungah dan Cerme, 1 Kecamatan dengan indeks resiko sedang hingga tinggi adalah Kecamatan Manyar, 2 Kecamatan dengan indeks resiko sedang adalah Kecamatan Kebomas dan Wringinanom dan 2 Kecamatan lainnya dengan indeks resiko rendah hingga sedang adalah Kecamatan Panceng dan Ujungpangkah.

Berdasarkan pencatatan data bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik, terdapat 4 (empat) bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Gresik yaitu Banjir, Tanah Longsor, Angin Kencang dan kekeringan. Pada Tahun 2022 telah terjadi 62 kali bencana di Kabupaten Gresik dan semuanya dapat tertangani.

Bencana Banjir mendominasi kejadian bencana di Kabupaten Gresik dengan rincian sebagaimana berikut:

Tabel 1.8 Jumlah Desa/ Kelurahan yang terfasilitasi dalam penanganan saat bencana Per desember 2022

NO	BULAN	Jenis Kejadian Bencana				Jumlah Desa/Kelurahan yang terdampak dan terfasilitasi saat bencana
		BANJIR	TANAH LONGSOR	ANGIN KENCANG	KEKERINGAN	
1	Januari	4	2	3	-	9
2	Februari	2	-	2	-	4
3	Maret	6	1	1	-	8
4	April	-	-	-	-	0
5	Mei	3	-	-	-	3
6	Juni	6	-	-	-	6
7	Juli	5	-	-	-	5
8	Agustus	-	-	1	-	1
9	September	-	-	-	1	1
10	Oktober	3	-	4	1	8
11	November	5	-	1	-	6
12	Desember	6	2	3		11
JUMLAH		**40**	**5**	**15**	**2**	**62**

Sumber: BPBD Kabupaten Gresik, 2022

1.3.2 Data Demografis

a. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik jumlah penduduk Kabupaten Gresik pada akhir tahun 2022 sebanyak 1.291.518 jiwa yang terdiri dari 648.861 laki-laki dan 642.657 perempuan. Kepadatan penduduk Kabupaten Gresik pada tahun 2022 sebesar 1.128 jiwa/Km^2. Sedangkan angka rasio jenis kelamin perempuan dibanding laki-laki pada tahun 2022 sebesar 1:1 Adapun rincian jumlah penduduk Kabupaten Gresik dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 1.9 Rekapitulasi Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Berdasarkan Jenis Kelamin Bulan Desember 2022

NO	KECAMATAN	Jml Desa/Kel	PENDUDUKAN AKHIR BULAN INI		
			L	P	L+P
1	DUKUN	26	33,042	32,576	65,618
2	BALONGPANGGANG	25	28,051	28,289	56,340
3	PANCENG	14	26,138	26,202	52,340
4	BENJENG	23	32,829	32,595	65,424
5	DUDUKSAMPEYN	23	24,706	24,701	49,407
6	WRINGINANOM	16	36,429	35,879	72,308
7	UJUNGPANGKAH	13	25,945	25,775	51,720
8	KEDAMEAN	15	31,841	31,297	63,138
9	SIDAYU	21	21,984	21,610	43,594
10	MANYAR	23	59,282	58,193	117,475
11	CERME	25	40,834	40,259	81,093
12	BUNGAH	22	34,346	33,637	67,983
13	MENGANTI	22	63,920	62,886	126,806
14	KEBOMAS	21	55,890	55,641	111,531
15	DRIYOREJO	16	52,248	51,470	103,718
16	GRESIK	21	39,802	40,334	80,136
17	SANGKAPURA	17	26,568	26,164	52,732
18	TAMBAK	13	15,006	15,149	30,155
JUMLAH		**356**	**648,861**	**642,657**	**1,291,518**

Sumber: Dispendukcapil Tahun 2022

Adapun Jumlah keluarga di Kabupaten Gresik pada Tahun 2022 sebanyak 410.553 keluarga. Adapun rincian jumlah keluarga di Kabupaten Gresik sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.10 Rekapitulasi Jumlah Kecamatan, Jumlah Kepala Keluarga Dan Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Bulan Desember 2022

NO	KECAMATAN	Desa /Kel	JUMLAH KK	MEMILIKI KK	BELUM MEMILIKI KK	PENDUDUKAN AKHIR BULAN INI		
						L	P	L+P
1	DUKUN	26	21.035	21.035	0	33.042	32.576	65,618
2	BALONGPANGGANG	25	19.020	19.020	0	28.051	28.289	56,340
3	PANCENG	14	16.444	16.444	0	26.138	26.202	52,340
4	BENJENG	23	21.396	21.396	0	32.829	32.595	65,424
5	DUDUKSAMPEYAN	23	15.472	15.472	0	24.706	24.701	49,407
6	WRINGINANOM	16	24.582	24.582	0	36.429	35.879	72,308
7	UJUNGPANGKAH	13	16.327	16.327	0	25.945	25.775	51,720
8	KEDAMEAN	15	21.017	21.017	0	31.841	31.297	63,138
9	SIDAYU	21	13.318	13.318	0	21.984	21.610	43,594
10	MANYAR	23	35.657	35.657	0	59.282	58.193	117,475
11	CERME	25	24.944	24.944	0	40.834	40.259	81,093
12	BUNGAH	22	20.815	20.815	0	34.346	33.637	67,983
13	MENGANTI	22	40.778	40.778	0	63.920	62.886	126,806
14	KEBOMAS	21	34.445	34.445	0	55.890	55.641	111,531
15	DRIYOREJO	16	33.769	33.769	0	52.248	51.470	103,718
16	GRESIK	21	25.622	25.622	0	39.802	40.334	80,136
17	SANGKAPURA	17	16.412	16.412	0	26.568	26.164	52,732
18	TAMBAK	13	9.500	9.500	0	15.006	15.149	30,155
JUMLAH		356	410,553	410.553	0	648.861	642.657	1.291.518

Sumber: Dispendukcapil Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa pada tahun 2022, jumlah keluarga terbanyak di Kecamatan Menganti dengan 40.778 KK, selaras dengan jumlah penduduk terbanyak 126.806 jiwa. Sedangkan persebaran keluarga terendah berada pada Kecamatan Tambak dengan 9.500 KK dengan jumlah penduduk sebanyak 30.155 jiwa. Selain itu berdasarkan kelompok umur dijelaskan bahwa kelompok umur 40-44 tahun mendominasi piramida penduduk dengan persentase 8,22% kemudian kelompok umur 10 – 14 tahun mecapai 8.07% dan selanjutnya kelompok umur 15–19 tahun mencapai 8.02%. Adapun rincian kelompok umur disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.11 Kelompok Umur Kabupaten Gresik Tahun 2022

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah	%
		Laki Laki	Perempuan		
1	0 - 4 Th	34.787	32.590	67.377	5.22
2	5 - 9 Th	50.656	47.092	97.748	7.57
3	10 - 14 Th	53.215	49.978	103.193	7.99
4	15 - 19 Th	50.339	47.587	97.926	7.58
5	20 - 24 Th	53.374	50.690	104.064	8.06
6	25 - 29 Th	50.039	49.214	99.253	7.68
7	30 - 34 Th	46.666	45.312	91.978	7.12
8	35 - 39 Th	47.323	47.353	94.676	7.33
9	40 - 44 Th	53.284	53.823	107.107	8.29
10	45 -49 Th	50.658	50.531	101.189	7.83
11	50 - 54 Th	46.908	47.216	94.124	7.29
12	55 - 59 Th	37.577	38.741	76.318	5.91
13	60 - 64 Th	29.346	31.418	60.764	4.70

14	65 - 69 Th	21.443	21.743	43.186	3.34
15	70 - 74 Th	12.583	12.946	25.529	1.98
16	75 Th	10.663	16.423	27.086	2.10
	JUMLAH	**648,861**	**642.657**	**1.291.518**	

Sumber: Dispendukcapil Tahun 2022

b. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2022 mengalami penurunan jumlah penduduk sebesar 1,78 % dibandingkan pada tahun 2021. Jumlah penduduk pada Tahun 2022 sebanyak 1.291.518 Jiwa turun 23.377 jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Berikut Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 berdasarkan Kecamatan:

Tabel 1.12 Rekapitulasi Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2021 dan Tahun 2022

No	Kecamatan	Desa/Kel	2021	2022
1	DUKUN	26	67.483	65.618
2	BALONGPANGGANG	25	58.166	56.340
3	PANCENG	14	53.305	52.340
4	BENJENG	23	67.102	65.424
5	DUDUKSAMPEYAN	23	50.748	49.407
6	WRINGINANOM	16	74.178	72.308
7	UJUNGPANGKAH	13	52.771	51.720
8	KEDAMEAN	15	64.984	63.138
9	SIDAYU	21	44.241	43.594
10	MANYAR	23	117.967	117.475
11	CERME	25	82.034	81.093
12	BUNGAH	22	69.280	67.983
13	MENGANTI	22	127.882	126.806
14	KEBOMAS	21	111.779	111.531
15	DRIYOREJO	16	104.820	103.718
16	GRESIK	21	81.494	80.136
17	SANGKAPURA	17	55.190	52.732
18	TAMBAK	13	31.471	30.155
	JUMLAH	**356**	**1.314.895**	**1.291.518**

Sumber: Dispendukcapil Tahun 2022

1.3.3 Data Kepegawaian

Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Gresik sebanyak 8.761 terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jumlah 7.198 Orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 1.563 Orang yang tersebar ke Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik. Struktur birokrasi pada ASN

dibagi berdasarkan pangkat dan golongan. Pangkat dan Golongan ASN sangat dipengaruhi oleh lamanya waktu mengabdi. diklat jabatan yang pernah diikuti. Kompetensi, pendidikan, serta prestasi.

ASN di Kabupaten Gresik menurut golongannya dibedakan menjadi 4 Golongan. yakni Golongan I. II. III dan IV. Golongan I merupakan level terendah dalam struktur birokrasi PNS. berasal dari lulusan SD sampai dengan SMP; Golongan II memiliki kualifikasi pendidikan minimal SMA hingga D3; Golongan III diperuntukkan bagi lulusan S1 atau setara D4 hingga S3; dan yang terakhir atau yang paling tinggi adalah Golongan IV. Data sebaran Golongan ASN di Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 13 Data ASN Kabupaten Gresik Menurut Golongan Per 31 Desember 2022

No	Perangkat Daerah	Pegawai Negeri Sipil																PPPK				
		I/b	I/c	I/d	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	Jumlah	V	VII	IX	X	JUMLAH PPPK
1	Dinas Pendidikan	1	1	7	11	46	38	157	595	248	425	444	560	744	77	3	3357			1435		1435
2	Dinas Kesehatan	-	1	8	3	31	351	262	272	353	140	328	72	58	15	6	1900		83	1	10	94
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	-	-	3	8	6	3	22	33	6	4	13	6	2	-	-	106					
4	Dinas Cipta Karya Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	-	-	-	1	1	10	14	35	5	7	13	7	1	1	-	95					
5	Dinas Sosial	-	-	-	-	3	-	2	6	2	1	3	9	1	-	-	27					
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	1	1	1	3	-	2	7	4	-	1	-	20					
7	Dinas Pemadam Kebakaran	-	-	-	-	1	-	10	6	-	-	6	3	1	1	-	28					
8	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	2	1	4	5	76	18	1	-	9	3	1	1	-	121					
9	Dinas Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	-	-	-	-	-	1	1	5	1	2	7	8	1	-	-	26					
10	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	2	2	7	4	5	-	12	1	2	-	-	35					
11	Dinas Komunikasi Dan Informatika	-	-	-	1	-	6	-	8	-	1	8	5	1	1	-	31					
12	Dinas Koperasi. Usaha Mikro. Perindustrian Dan Perdagangan	-	-	11	1	5	3	8	14	1	2	13	5	1	1	-	65					
13	Dinas Lingkungan Hidup	-	1	8	2	10	7	11	14	3	3	13	5	-	-	-	77					
14	Dinas Parekrafbudpora	-	-	-	-	1	1	5	10	3	2	15	6	2	-	-	45					
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	-	-	-	-	-	-	4	7	3	-	6	8	1	1	-	30					
16	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	-	-	6	21	4	7	12	2	1	-	-	53					
17	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	3	3	18	17	2	2	7	3	1	1	-	57					
18	Dinas Perikanan	-	-	-	-	-	1	2	7	3	-	16	5	3	-	-	37					
19	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	-	-	-	-	-	6	2	7	2	-	3	7	1	1	-	29					
20	Dinas Pertanian	-	-	-	1	6	2	12	11	10	6	17	17	4	1	-	87	3	2	29	0	34
21	Dinas Tenaga Kerja	-	-	-	-	1	2	-	7	1	1	9	10	-	1	-	32					
22	Sekretariat Daerah	-	-	-	1	1	3	24	42	15	6	20	7	5	6	-	130					
23	Sekretariat DPRD	-	-	-	1	1	1	6	13	1	2	6	3	1	1	-	36					
24	Inspektorat	-	-	-	-	1	7	3	13	1	2	4	7	8	-	-	46					
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	-	3	3	20	7	7	7	4	1	1	-	53					
26	Badan Pendapatan. Pengelolaan Keuangan	-	-	1	1	-	14	13	32	5	7	32	5	2	-	-	112					

No	Perangkat Daerah	Pegawai Negeri Sipil																PPPK				
		I/b	I/c	I/d	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	Jumlah	V	VII	IX	X	JUMLAH PPPK
	Dan Aset Daerah																					
27	Badan Perencanaan Pembangunan. Penelitian Dan Pengembangan	-	-	-	-	-	3	3	17	4	1	14	3	1	-	-	46					
28	Kecamatan Balongpanggang	-	-	1	1	-	2	6	6	3	1	6	2	-	-	-	28					
29	Kecamatan Benjeng	-	-	-	-	1	-	7	4	-	1	5	2	1	1	-	22					
30	Kecamatan Bungah	-	-	-	-	-	-	9	6	1	1	3	4	1	-	-	25					
31	Kecamatan Cerme	-	-	-	-	1	3	2	4	1	-	6	3	-	-	-	20					
32	Kecamatan Driyorejo	-	-	-	-	-	-	4	4	2	2	4	1	2	-	-	19					
33	Kecamatan Duduk Sampeyan	-	-	-	-	-	1	1	7	3	2	3	3	-	-	-	20					
34	Kecamatan Dukun	-	-	-	-	1	1	8	6	-	1	2	3	1	-	-	23					
35	Kecamatan Gresik	-	-	1	1	1	-	11	18	2	14	34	5	1	-	-	88					
36	Kecamatan Kebomas	-	-	1	-	1	1	4	13	2	10	24	3	1	-	-	60					
37	Kecamatan Kedamean	-	-	-	-	-	2	5	2	1	-	5	2	-	-	-	17					
38	Kecamatan Manyar	-	-	-	-	-	-	6	6	1	-	5	3	-	-	-	21					
39	Kecamatan Menganti	-	-	-	1	1	1	5	4	1	2	5	1	1	-	-	22					
40	Kecamatan Panceng	-	-	-	-	3	-	5	4	-	1	5	2	1	-	-	21					
41	Kecamatan Sangkapura	-	-	-	-	1	-	7	2	1	-	7	1	2	-	-	21					
42	Kecamatan Sidayu	-	-	-	-	-	1	7	9	-	2	2	4	1	-	-	26					
43	Kecamatan Tambak	-	-	-	-	1	-	5	4	-	1	6	1	1	-	-	19					
44	Kecamatan Ujung Pangkah	-	-	-	-	1	-	2	5	-	1	7	3	1	-	-	20					
45	Kecamatan Wringinanom	-	-	-	-	-	-	6	6	1	1	6	1	2	-	-	23					
46	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	-	-	-	-	-	3	5	3	1	4	4	1	1	-	22					
	Jumlah	1	3	43	35	136	485	775	1352	708	671	1183	823	861	113	9	7198	3	85	1465	10	1563

Sumber: BKPSDM Kabupaten Gresik Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa struktur birokrasi di Kabupaten Gresik didominasi oleh PNS Golongan 3 dengan jumlah PNS sebanyak 3.802 ASN atau sebesar 54.38%. Golongan 3 ASN tersebut terbagi atas Golongan III a. III b. III c dan III d. Sedangkan untuk Golongan dengan ASN paling sedikit adalah Golongan I dengan jumlah ASN sebanyak 47 ASN atau sebesar 0.65%. Hal ini menunjukkan bahwa PNS di Kabupaten Gresik rata-rata memiliki kualifikasi pendidikan yang cukup tinggi.

Tabel 1.14 Data ASN Kabupaten Gresik Menurut Jenis Kelamin Per 31 Desember 2022

No	Perangkat Daerah	PNS			PPPK		
		Jenis Kelamin		Jumlah	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P		L	P	
1	DINAS PENDIDIKAN	1297	2060	3357	386	1049	1435
2	DINAS KESEHATAN	476	1422	1900	16	78	94
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	81	25	106			
4	DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	48	47	95			
5	DINAS SOSIAL	15	12	27			
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	11	9	20			
7	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	22	6	28			
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	115	6	121			
9	DINAS KELUARGA BERENCANA. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5	21	26			
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	19	16	35			
11	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	13	18	31			
12	DINAS KOPERASI. USAHA MIKRO. PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	40	25	65			
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	54	23	77			
14	DINAS PAREKRAFBUDPORA	24	21	45			
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	17	13	30			
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	26	27	53			
17	DINAS PERHUBUNGAN	50	7	57			
18	DINAS PERIKANAN	21	16	37			
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	14	15	29			

No	Perangkat Daerah	PNS			PPPK		
		Jenis Kelamin		Jumlah	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P		L	P	
20	DINAS PERTANIAN	46	41	87	20	14	34
21	DINAS TENAGA KERJA	17	15	32			
22	SEKRETARIAT DAERAH	67	63	130			
23	SEKRETARIAT DPRD	23	13	36			
24	INSPEKTORAT	23	23	46			
25	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	22	31	53			
26	BADAN PENDAPATAN. PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	59	53	112			
27	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	18	28	46			
28	KECAMATAN BALONGPANGGANG	19	9	28			
29	KECAMATAN BENJENG	14	8	22			
30	KECAMATAN BUNGAH	19	6	25			
31	KECAMATAN CERME	15	5	20			
32	KECAMATAN DRIYOREJO	17	2	19			
33	KECAMATAN DUDUK SAMPEYAN	15	5	20			
34	KECAMATAN DUKUN	18	5	23			
35	KECAMATAN GRESIK	46	42	88			
36	KECAMATAN KEBOMAS	33	27	60			
37	KECAMATAN KEDAMEAN	13	4	17			
38	KECAMATAN MANYAR	15	6	21			
39	KECAMATAN MENGANTI	16	6	22			
40	KECAMATAN PANCENG	17	4	21			
41	KECAMATAN SANGKAPURA	18	3	21			
42	KECAMATAN SIDAYU	20	6	26			
43	KECAMATAN TAMBAK	16	3	19			
44	KECAMATAN UJUNG PANGKAH	14	6	20			
45	KECAMATAN WRINGINANOM	14	9	23			
46	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	16	6	22			
	Jumlah	**2.980**	**4.218**	**7198**	**422**	**1141**	**1563**

Sumber: BKPSDM Kabupaten Gresik Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas. diketahui bahwa jumlah pegawai ASN dengan jenis kelamin perempuan masih mendominasi dibandingkan laki-laki. Dari total keseluruhan 46 OPD, pegawai PNS dengan jenis kelamin laki-laki tercatat lebih banyak di 38 OPD sedangkan 8 OPD lainnya didominasi oleh jenis kelamin perempuan. Rasio selisih terbesar terdapat di Dinas Pendidikan dengan jumlah

jenis kelamin laki-laki sebanyak 1.297orang dan perempuan sebanyak 2.060 orang.

Pengembangan kepegawaian Aparatur Sipil Negara ditinjau dari tingkat pendidikan. Lebih dari 80% PNS Kabupaten Gresik telah mengenyam pendidikan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas pegawai di lingkup Kabupaten Gresik cukup unggul dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi terutama dalam pelayanan publik.

Tabel 1.15 Data ASN Kabupaten Gresik Menurut Pendidikan Tahun 2022

No	Perangkat Daerah	PNS														PPPK				
		D I	D II	DIII/Sarjana Muda	DIV	S1	S2	S3	SD	SLTA	SLTA Keguruan	SLTA Kejuruan	SLTP	SLTP Kejuruan	Jumlah	SLTA	D3	S1	S2	JUMLAH
1	DINAS PENDIDIKAN	4	70	19	1	2710	270		14	210	6	21	31	1	3357	-	-	1435	-	1435
2	DINAS KESEHATAN	69	-	993	33	506	68	-	6	144	-	55	26	-	1900	-	84	-	10	94
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	-	-	3	-	50	8	-	2	25	-	12	6	-	106					
4	DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	1	-	6	1	55	10	-	-	17	-	5	-	-	95					
5	DINAS SOSIAL	-	-	-	-	13	8	-	-	4	-	-	2	-	27					
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1	1	4	-	26	8	-	1	51	-	27	2	-	121					
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	2	-	10	4	-	-	2	-	1	1	-	20					
8	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	-	-	-	1	10	5	-	-	6	-	5	1	-	28					
9	DINAS KELUARGA BERENCANA. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	-	1	-	17	5	-	-	3	-	-	-	-	26					
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	2	1	13	6	-	-	13	-	-	-	-	35					
11	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	6	-	15	9	-	-	1	-	-	-	-	31					
12	DINAS KOPERASI. USAHA MIKRO. PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	-	-	2	29	7	-	9	8	-	4	6	-	65					
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			5		25	9		2	27		4	5		77					
14	DINAS PAREKRAFBUDPORA	1	-	1	2	27	8	-	-	6	-	-	-	-	45					
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	1	-	15	7	-	-	6	-	1	-	-	30					
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	-	1	2	35	5	-	-	9	-	1	-	-	53					
17	DINAS	-	1	3	2	24	3	-	-	16	-	6	2	-	57					

No	Perangkat Daerah	PNS														PPPK				
		D I	D II	DIII/Sarjana Muda	DIV	S1	S2	S3	SD	SLTA	SLTA Keguruan	SLTA Kejuruan	SLTP	SLTP Kejuruan	Jumlah	SLTA	D3	S1	S2	JUMLAH
	PERHUBUNGAN																			
18	DINAS PERIKANAN	-	-	1	-	27	6	-	-	2	-	1	-	-	37					
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	-	-	5	1	10	8	-	-	5	-	-	-	-	29					
20	DINAS PERTANIAN	-	-	3	1	47	17	-	-	11	-	4	4	-	87	3	2	29	-	34
21	DINAS TENAGA KERJA	-	-	2	1	18	9	-	-	1	-	1	-	-	32					
22	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	5	1	71	17	1	-	31	-	4	-	-	130					
23	SEKRETARIAT DPRD	-	-	1	2	19	4	-	-	8	-	1	1	-	36					
24	INSPEKTORAT	-	-	8	1	23	9	1	-	4	-	-	-	-	46					
25	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	1	3	5	26	8	-	-	10	-	-	-	-	53					
26	BADAN PENDAPATAN. PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-	15	2	67	8	-	-	16	-	2	2	-	112					
27	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	-	5	1	32	5	-	-	3	-	-	-	-	46					
28	KECAMATAN BALONGPANGGANG	-	-	1	-	13	2	-	1	11					28					
29	KECAMATAN BENJENG	1	-	1	-	10	2	-	-	7	-	-	1	-	22					
30	KECAMATAN BUNGAH	-	-	-	-	8	6	-	-	10	-	1	-	-	25					
31	KECAMATAN CERME	-	-	-	-	10	3	-	-	7	-	-	-	-	20					
32	KECAMATAN DRIYOREJO	-	-	-	-	8	2	-	-	8	-	1	-	-	19					
33	KECAMATAN DUDUK SAMPEYAN	-	-	2	-	9	5	-	-	3	-	1	-	-	20					
34	KECAMATAN DUKUN	-	-	-	-	11	2	-	-	8	-	1	1	-	23					
35	KECAMATAN GRESIK	-	-	1	3	53	9	-	2	18	-	2	-	-	88					
36	KECAMATAN KEBOMAS	-	-	2	1	37	6	-	-	11	-	-	3	-	60					
37	KECAMATAN KEDAMEAN	-	-	2	-	6	2	-	-	7	-	-	-	-	17					
38	KECAMATAN MANYAR	-	-	-	-	8	3	-	-	8	-	2	-	-	21					
39	KECAMATAN	-	-	-	-	8	4	-	-	10	-	-	-	-	22					

No	Perangkat Daerah	PNS													PPPK				
		D I	D II	DIII/Sarjana Muda	DIV	S1	S2	S3	SD	SLTA	SLTA Keguruan	SLTA Kejuruan	SLTP	SLTP Kejuruan	Jumlah	SLTA	D3	S1	S2	JUMLAH
	MENGANTI																		
40	KECAMATAN PANCENG	-	1	-	-	11	2	-	-	6	-	-	1	-	21					
41	KECAMATAN SANGKAPURA	-	-	-	-	8	3	1	-	9	-	-	-	-	21					
42	KECAMATAN SIDAYU	-	-	1	-	11	5	-	-	9	-	-	-	-	26					
43	KECAMATAN TAMBAK	-	-	-	-	12	1	-	-	6	-	-	-	-	19					
44	KECAMATAN UJUNG PANGKAH	-	-	-	-	11	5	-	-	4	-	-	-	-	20					
45	KECAMATAN WRINGINANOM	-	-	-	-	13	1	-	-	9	-	-	-	-	23					
46	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	-	-	14	4	-	-	3	-	1	-	-	22					
	Jumlah														7198					1.563

Sumber: BKPSDM Kabupaten Gresik Tahun 2022

Tabel 1.16 Data ASN Kabupaten Gresik Menurut Usia Per 31 Desember 2022

No	Perangkat Daerah	PNS								Jumlah	PPPK								Jumlah
		UMUR									UMUR								
		21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	50-55	56-60		21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	50-55	56-60	
1	DINAS PENDIDIKAN	12	180	196	405	365	490	835	874	3357	8	254	291	471	263	90	48	10	1435
2	DINAS KESEHATAN	104	298	202	218	369	333	264	112	1900	-	2	19	35	33	4	1	-	94
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	1	13	9	11	17	16	31	8	106									
4	DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	7	18	6	10	12	23	16	3	95									
5	DINAS SOSIAL	1	2	1	2	1	5	10	5	27									
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1	2	1	49	30	21	11	6	121									
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	1	-	1	4	4	5	5	20									
8	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	1	-	2	3	6	7	4	5	28									
9	DINAS KELUARGA BERENCANA. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	3	-	1	4	5	10	3	26									
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	2	1	3	5	10	11	2	35									
11	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2	6	3	6	3	4	5	2	31									
12	DINAS KOPERASI. USAHA MIKRO. PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3	3	2	3	6	20	21	7	65									
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2	6	4	11	18	18	14	4	77									
14	DINAS PAREKRAFBUDPORA	1	7	2	4	6	7	13	5	45									
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	2	3	1	3	6	10	5	30									
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1	8	7	12	8	10	5	2	53									
17	DINAS PERHUBUNGAN	2	4	3	8	7	13	15	5	57									
18	DINAS PERIKANAN	1	5	-	2	4	5	7	13	37									
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4	3	1	3	2	5	6	5	29									
20	DINAS PERTANIAN	-	8	3	23	8	12	18	15	87									
21	DINAS TENAGA KERJA	2	2	2	2	3	5	10	6	32									
22	SEKRETARIAT DAERAH	1	8	4	21	25	33	26	12	130									
23	SEKRETARIAT DPRD	-	3	1	7	7	5	10	3	36									
24	INSPEKTORAT	8	5	4	5	2	7	12	3	46									
25	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3	5	3	10	13	11	5	3	53									
26	BADAN PENDAPATAN. PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	17	6	2	19	28	27	9	4	112									
27	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3	11	3	8	5	8	6	2	46									
28	KECAMATAN BALONGPANGGANG	-	1	-	2	3	10	8	4	28									
29	KECAMATAN BENJENG	-	1	-	1	5	5	8	2	22									
30	KECAMATAN BUNGAH	-	1	-	1	2	7	7	7	25									
31	KECAMATAN CERME	-	1	-	2	2	5	7	3	20									
32	KECAMATAN DRIYOREJO	-	-	-	-	4	1	6	8	19									
33	KECAMATAN DUDUK SAMPEYAN	-	-	1	1	6	3	7	2	20									
34	KECAMATAN DUKUN	-	1	-	2	1	9	9	1	23									
35	KECAMATAN GRESIK	-	2	3	3	15	16	33	16	88									
36	KECAMATAN KEBOMAS	-	1	2	7	8	13	16	13	60									
37	KECAMATAN KEDAMEAN	-	-	1	1	3	4	4	4	17									
38	KECAMATAN MANYAR	-	1	-	-	5	7	5	3	21									
39	KECAMATAN MENGANTI	-	1	-	3	4	4	5	5	22									
40	KECAMATAN PANCENG	-	1	-	1	3	7	4	5	21									
41	KECAMATAN SANGKAPURA	-	-	-	1	4	5	10	1	21									
42	KECAMATAN SIDAYU	-	2	-	-	3	4	10	7	26									

No	Perangkat Daerah	PNS								Jumlah	PPPK								Jumlah
		UMUR									UMUR								
		21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	50-55	56-60		21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	50-55	56-60	
43	KECAMATAN TAMBAK	-	1	1	-	3	3	7	4	19									
44	KECAMATAN UJUNG PANGKAH	-	-	-	1	3	1	9	6	20									
45	KECAMATAN WRINGINANOM	-	-	-	3	1	4	7	8	23									
46	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1	-	-	2	3	4	7	5	22									
	Jumlah									7198	-	1	2	1	10	9	9	2	34

Sumber: BKPSDM Kabupaten Gresik Tahun 2022

1.3.4 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Target Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik pada Tahun Anggaran 2022 sebagaimana yang tertuang dalam APBD ditargetkan sebesar Rp3.677.070.809.274 dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp3.366.654.784.393 atau mencapai 92%. Realisasi Kinerja Pendapatan Daerah terbagi atas Capaian Pendapatan Asli Daerah sebesar 86%. capaian Pendapatan Transfer mencapai 95% dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah melampauai target pendapatan dengan capaian 130%. Berikut Rincian Realisasi Jenis Pendapatan pada Tahun 2022:

Tabel 1.17 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022

No Rek		Uraian	PAPBD 2022		%	Lebih/ (Kurang
			Target	Realisasi		
4		**PENDAPATAN DAERAH**	**3.677.070.809.274**	**3.366.654.784.393**	**92**	**(310.416.024.881)**
4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.381.671.641.242	1.191.799.002.154	86	(189.872.639.088)
4	2	PENDAPATAN TRANSFER	2.279.654.272.226	2.154.340.660.571	95	(125.313.611.655)
4	3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	15.744.895.806	20.515.121.668	130	4.770.225.862

Sumber: BPPKAD Kabupaten Gresik. Desember 2022

1.3.4.1 Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.381.671.641.242 dapat direalisasikan sebesar Rp1.191.799.002.154 atau mencapai 86%. Rincian Obyek Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Jenis Pendapatannya sebagaimana berikut:

a. Pajak Daerah

Jenis pajak daerah kabupaten/kota yang ditargetkan dalam APBD 2021 sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik meliputi (1) Pajak Hotel (2) Pajak Restoran. (3) Pajak Hiburan. (4) Pajak Reklame. (5) Pajak Penerangan Jalan. (6) Pajak Parkir (7) Pajak Air Tanah (8) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. (9) PBB Pedesaan dan Perkotaan (10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Realisasi Pajak Daerah mencapai Rp783.835.812.278 atau 87% dari Target Rp 895.965.683.770; Pajak Penerangan Jalan Mendominisi Pendapatan Asli Daerah.

yakni sebesar Rp240.596.105.684 dengan capaian 102%. Adapun Rincian pendapatan pajak daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.18 Realisasi Pajak Daerah Tahun 2022

No Rekening						Uraian	PAPBD 2022			
							Target	Realisasi	%	Lebih/ (Kurang)
4	**1**	**01**				**Pajak Daerah**	**895.965.683.770**	**783.835.812.278**	**87**	**(112.129.871.492)**
4	**1**	**01**	**06**			**Pajak Hotel**	**10.650.000.000**	**9.517.372.625**	**89**	**(1.132.627.375)**
4	1	01	06	01	0001	Pajak Hotel	10.600.000.000	9.439.832.233	89	(1.160.167.767)
4	1	01	06	03	0003	Pajak Losmen	50.000.000	77.540.392	155	27.540.392
4	**1**	**01**	**07**			**Pajak Restoran**	**30.350.000.000**	**26.918.141.325**	**89**	**(3.431.858.675)**
4	1	01	07	01	0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	15.850.000.000	17.790.614.798	112	1.940.614.798
4	1	01	07	02	0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	7.000.000.000	3.874.383.290	55	(3.125.616.710)
4	1	01	07	05	0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	500.000.000	10.476.019	2	(489.523.981)
4	1	01	07	07	0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	7.000.000.000	5.242.667.219	75	(1.757.332.781)
4	**1**	**01**	**08**			**Pajak Hiburan**	**3.300.000.000**	**2.078.159.911**	**63**	**(1.221.840.089)**
4	1	01	08	01	0001	Pajak Tontonan Film	2.640.000.000	1.840.026.028	70	(799.973.972)
4	1	01	08	02	0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	100.000.000	13.850.000	14	(86.150.000)
4	1	01	08	07	0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	20.000.000	5.400.000	27	(14.600.000)
4	1	01	08	08	0001	Pajak Pacuan Kuda. Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan	-	74.087.328		74.087.328
4	1	01	08	09	0001	Pajak Panti Pijat. Refleksi. Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	400.000.000	54.611.260	14	(345.388.740)
4	1	01	08	10	0001	Pajak Pertandingan Olahraga	140.000.000	90.185.295	64	(49.814.705)
4	**1**	**01**	**09**			**Pajak Reklame**	**5.200.000.000**	**4.030.506.376**	**78**	**(1.169.493.624)**
4	1	01	09	01	0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	3.000.000.000	2.702.909.327	90	(297.090.673)
4	1	01	09	02	0001	Pajak Reklame Kain	2.200.000.000	1.327.597.049	60	(872.402.951)
4	**1**	**01**	**10**			**Pajak Penerangan Jalan**	**235.000.000.000**	**240.596.105.684**	**102**	**5.596.105.684**
4	1	01	10	01	0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	16.750.000.000	15.305.298.979	91	(1.444.701.021)
4	1	01	10	02	0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	218.250.000.000	225.290.806.705	103	7.040.806.705
4	**1**	**01**	**11**			**Pajak Parkir**	**6.000.000.000**	**5.222.265.470**	**87**	**(777.734.530)**
4	1	01	11	01	0001	Pajak Parkir	6.000.000.000	5.222.265.470	87	(777.734.530)
4	**1**	**01**	**12**			**Pajak Air Tanah**	**2.750.000.000**	**2.125.064.895**	**77**	**(624.935.105)**
4	1	01	12	01	0001	Pajak Air Tanah	2.750.000.000	2.125.064.895	77	(624.935.105)
4	**1**	**01**	**14**			**Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**	**8.000.000.000**	**2.251.649.925**	**28**	**(5.748.350.075)**
4	1	01	14	04	0001	Pajak Batu Kapur	8.000.000.000	2.251.649.925	28	(5.748.350.075)
4	**1**	**01**	**15**			**Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)**	**140.000.000.000**	**148.982.248.430**	**106**	**8.982.248.430**
4	1	01	15	01	0001	PBBP2	140.000.000.000	148.982.248.430	106	8.982.248.430
4	**1**	**01**	**16**			**Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**	**454.715.683.770**	**342.114.297.637**	**75**	**(112.601.386.133)**
4	1	01	16	01	0001	BPHTB-Pemindahan Hak	454.715.683.770	342.114.297.637	75	(112.601.386.133)

Sumber: BPPKAD Kabupaten Gresik. Desember 2022

b. Retribusi Daerah

Realisasi Retribusi Daerah mencapai Rp90.871.266.103 atau 50% dari target Rp181.296.900.000. Terdapat 3 komponen pembentuk retribusi daerah. yakni:

a. Retribusi Jasa Umum yang terdiri dari Retribusi Pelayanan. Retribusi Penhujian Kendaraan Bermotor. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang. Realisasi Retribusi Jasa Umum sebesar Rp18.201.905.013 atau 63% dari Target Rp28.957.500.000
b. Retribusi Jasa Usaha yang terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Retribusi Tempat Pelelangan. Retribusi Terminal. Retribusi Tempak Khusus Parkir. Retribusi Rumah Potong Hewan. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dan Retribusi Penyebrangan di air. Realisasi Retribusi Jasa Usaha Rp15.754.277.334 atau 76% dari target Rp20.661.250.000
c. Retribusi Perizinan Tertentu yang terdiri dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu dari target Rp131.678.150.000 dapat terealisasi sebesar Rp56.915.083.756 atau 43%.

Dari ketiga komponen diatas. Retribusi Perizinan Tertentu memiliki kontribusi paling besar dalam komponen Retribusi Daerah. Adapun rincian pendapatan retribusi daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.19 Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2022

No Rekening						Uraian	PAPBD 2022			
							Target	Realisasi	%	Lebih/ (Kurang)
4	**1**	**02**				**Retribusi Daerah**	**181.296.900.000**	**90.871.266.103**	**50**	**(90.425.633.897)**
4	**1**	**02**	**01**			**Retribusi Jasa Umum**	**28.957.500.000**	**18.201.905.013**	**63**	**(10.755.594.987)**
4	1	02	01	01	0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	6.300.000.000	6.418.197.523	102	118.197.523
4	1	02	01	02	0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	3.500.000.000	1.047.938.300	30	(2.452.061.700)
4	1	02	01	04	0001	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	9.000.000.000	3.048.802.470	34	(5.951.197.530)
4	1	02	01	05	0002	Retribusi Pelayanan Pasar (Los)	-	187.857.000		187.857.000
4	1	02	01	05	0003	Retribusi Pelayanan Pasar (Kios)	3.000.000.000	1.845.208.220	62	(1.154.791.780)
4	1	02	01	05	0003	Retribusi Pelayanan Pasar (Kios)	-	148.151.000		148.151.000
4	1	02	01	06	0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	5.000.000.000	3.796.050.000	76	(1.203.950.000)
4	1	02	01	09	0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	-	-		-
4	1	02	01	09	0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	157.500.000	219.985.000	140	62.485.000
4	1	02	01	11	0001	Retribusi Pengujian Alat Ukur. takar. Timbang dan Perlengkapannya	2.000.000.000	1.489.715.500	74	(510.284.500)
4	**1**	**02**	**02**			**Retribusi Jasa Usaha**	**20.661.250.000**	**15.754.277.334**	**76**	**(4.906.972.666)**

No Rekening						Uraian	PAPBD 2022			
							Target	Realisasi	%	Lebih/ (Kurang)
4	1	02	02	01	0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	15.000.000.000	11.035.582.553	74	(3.964.417.447)
4	1	02	02	01	0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	-	142.500.000		142.500.000
4	1	02	02	01	0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	1.500.000.000	1.117.146.000	74	(382.854.000)
4	1	02	02	01	0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	262.500.000	151.435.000	58	(111.065.000)
4	1	02	02	01	0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	250.000.000	285.384.999	114	35.384.999
4	1	02	02	01	0007	Retribusi Pemakaian Alat	-	-		-
4	1	02	02	02	0001	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang dikontrakkan	236.250.000	273.450.500	116	37.200.500
4	1	02	02	03	0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	-	-		-
4	1	02	02	04	0003	Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	105.000.000	107.732.000	103	2.732.000
4	1	02	02	05	0001	Retribusi Tempat Khusus Parkir	945.000.000	1.043.862.682	110	98.862.682
4	1	02	02	07	0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	-	124.942.000		124.942.000
4	1	02	02	09	0001	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.100.000.000	1.162.995.000	55	(937.005.000)
4	1	02	02	10	0001	Retribusi Penyeberangan Orang	262.500.000	309.246.600	118	46.746.600
4	1	02	02	10	0002	Retribusi Penyeberangan Barang	-	-		-
4	**1**	**02**	**03**			**Retribusi Perizinan Tertentu**	**131.678.150.000**	**56.915.083.756**	**43**	**(74.763.066.244)**
4	1	02	03	01	0001	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	131.678.150.000	56.915.083.756	43	(74.763.066.244)
4	1	02	03	03	0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	-	-		-
4	1	02	03	06	0001	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	-	-		-

Sumber: BPPKAD Kabupaten Gresik. Desember 2022

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Tahun anggaran 2022 diperoleh dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada perusahaan milik daerah/BUMD sebesar Rp13.132.195.396 atau 96%. Perusahaan Milik Daerah yang dimaksud adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik. PT Gresik Migas. PT Bank Jatim dan PT BPR Jatim. Rincian pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.20 Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2022

No Rekening						Uraian	PAPBD 2022			
							Target	Realisasi	%	Lebih/ (Kurang)
4	**1**	**03**				**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	**13.660.000.000**	**13.132.195.396**	**96**	**(527.804.604)**
4	**1**	**03**	**02**			**Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD**	**13.660.000.000**	**13.132.195.396**	**96**	**(527.804.604)**
4	**1**	**03**	**02**	**01**		**Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)**	**11.660.000.000**	**12.132.195.396**	**104**	**472.195.396**
4	1	03	02	01	0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	11.660.000.000	12.132.195.396	104	472.195.396
						Bank Gresik	653.000.000	651.945.107	100	(1.054.893)
						Bank Jatim	11.000.000.000	11.475.308.289	104	475.308.289
						BPR Jatim	7.000.000	4.942.000	71	(2.058.000)
4	**1**	**03**	**02**	**02**		**Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)**	**2.000.000.000**	**1.000.000.000**	**50**	**(1.000.000.000)**
4	1	03	02	02	0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah	2.000.000.000	1.000.000.000	50	(1.000.000.000)

No Rekening	PAPBD 2022				
	Uraian	Target	Realisasi	%	Lebih/ (Kurang)
	(Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)				
	Gresik Migas	2.000.000.000	1.000.000.000	50	(1.000.000.000)

Sumber: BPPKAD Kabupaten Gresik. Desember 2022

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Tahun anggaran 2022 direalisasikan sebesar Rp303.959.728.378 atau mencapai 105% dari Target Rp290.749.057.472 dengan 12 komponen pembentuk. yaitu:

Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan yang terdiri dari Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan;

a. Penerimaan Jasa Giro yang terdiri dari Jasa Giro Kas Daerah dan Jasa Giro Pemegang Kas;
b. Pendapatan Bunga Deposito yang terdiri dari Rekening Deposito pada Bank Jatim. Bank BTN dan Bank BRI;
c. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan yang terdiri dari Bidang Pendidikan. Kesehatan. Pekerjaan Umum. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Sekretariat;
d. Pendapatan Denda Pajak yang terdiri dari Pendapatan Denda Hotel. Pajak Air Bawah Tanah dan PBB Pedesaan dan Perkotaan;
e. Pendapatan Denda Retribusi yang terdiri dari Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum. Jasa Usaha dan Perijinan Tertentu;
f. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan yang berasal dari pembongkaran reklame;
g. Pendapatan dari Pengembalian yang terdiri dari Kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan. perjalanan dinas dan lain-lain;
h. Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah yang terdiri dari Badan Pelayanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan 17 Puskesmas;

i. Tindak Lanjut Penghapusan Aset; dan

j. Pendapatan Tas Pelanggaran Perda/Perbup

Rincian Capaian Kinerja Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana berikut:

Tabel 1.21 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

No Rekening						PAPBD 2022			
					Uraian	Target	Realisasi	%	Lebih/ (Kurang)
4	**1**	**04**			**Lain-lain PAD yang Sah**	**290.749.057.472**	**303.959.728.378**	**105**	**13.210.670.906**
4	**1**	**04**	**01**		**Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan**	**-**	**404.952.473**		**404.952.473**
4	1	04	01	02	0002 Hasil Penjualan Alat Angkutan	-	171.627.473		171.627.473
4	1	04	01	02	0005 Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga	-	4.296.000		4.296.000
4	1	04	01	03	0001 Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	-	109.433.000		109.433.000
4	1	04	01	04	0001 Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan	-	119.596.000		119.596.000
4	**1**	**04**	**03**		**Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan**	**-**	**35.530.000**		**35.530.000**
4	1	04	03	02	0001 Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	-	35.530.000		35.530.000
4	**1**	**04**	**05**		**Jasa Giro**	**7.000.000.000**	**2.746.446.239**	**39**	**(4.253.553.761)**
4	1	04	05	01	0001 Jasa Giro pada Kas Daerah	7.000.000.000	2.622.424.429	37	(4.377.575.571)
4	1	04	05	02	0001 Jasa Giro pada Kas di Bendahara	-	124.021.810		124.021.810
4	**1**	**04**	**06**		**Hasil Pengelolaan Dana Bergulir**	**-**	**-**		**-**
4	1	04	06	01	0001 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-	-		-
4	**1**	**04**	**07**		**Pendapatan Bunga**	**25.000.000.000**	**2.448.219.177**	**10**	**(22.551.780.823)**
4	1	04	07	01	0001 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	25.000.000.000	2.448.219.177	10	(22.551.780.823)
4	**1**	**04**	**08**		**Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah**	**-**	**61.010.099**		**61.010.099**
4	1	04	08	01	0001 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	-	-		-
4	1	04	08	02	0001 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	-	61.010.099		61.010.099
4	**1**	**04**	**11**		**Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan**	**-**	**895.896.217**		**895.896.217**
4	1	04	11	01	0001 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	895.896.217		895.896.217
4	**1**	**04**	**12**		**Pendapatan Denda Pajak Daerah**	**56.113.836**	**1.289.635.993**	**2.298**	**1.233.522.157**
4	1	04	12	06	0001 Pendapatan Denda Pajak Hotel	-	6.448.825		6.448.825
4	1	04	12	07	0001 Pendapatan Denda Pajak Restoran	-	39.528.706		39.528.706
4	1	04	12	08	0001 Pendapatan Denda Pajak Hiburan	-	252.317		252.317
4	1	04	12	09	0001 Pendapatan Denda Pajak Reklame	-	217.003		217.003
4	1	04	12	10	0001 Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	-	2.751.258		2.751.258
4	1	04	12	11	0001 Pendapatan Denda Pajak Parkir	-	12.005.291		12.005.291
4	1	04	12	12	0001 Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	-	4.939.618		4.939.618
4	1	04	12	14	0004 Pendapatan Denda Pajak Batu Kapur	-	44.109.000		44.109.000
4	1	04	12	15	0001 Pendapatan Denda PBBP2	56.113.836	1.103.053.512	1.966	1.046.939.676
4	1	04	12	16	0001 Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	-	76.330.463		76.330.463
4	**1**	**04**	**13**		**Pendapatan Denda Retribusi Daerah**	**-**	**250.116.375**		**250.116.375**
4	1	04	13	01	0001 Pendapatan Denda Retribusi Umum	-	11.826.298		11.826.298
4	1	04	13	02	0001 Pendapatan Denda Retribusi Usaha	-	4.803.700		4.803.700
4	1	04	13	02	0001 Pendapatan Denda Retribusi Usaha	-	61.163.708		61.163.708
4	1	04	13	02	0001 Pendapatan Denda Retribusi Usaha	-	355.300		355.300
4	1	04	13	03	0001 Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	-	171.967.369		171.967.369
4	**1**	**04**	**14**		**Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan**	**-**	**34.295.250**		**34.295.250**
4	1	04	14	01	0001 Hasil Eksekusi Jaminan atas Pembongkaran Reklame	-	34.295.250		34.295.250
4	**1**	**04**	**15**		**Pendapatan dari Pengembalian**	**-**	**3.281.104.183**		**3.281.104.183**
4	1	04	15	03	0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	-	324.529.172		324.529.172
4	1	04	15	04	0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	-	2.956.575.011		2.956.575.011
4	**1**	**04**	**16**		**Pendapatan BLUD**	**258.692.943.636**	**292.512.222.372**	**113**	**33.819.278.736**
4	**1**	**04**	**16**	**01**	**Pendapatan BLUD**	**33.159.516.064**	**35.233.859.312**	**106**	**2.074.343.248**

No Rekening						Uraian	PAPBD 2022 Target	Realisasi	%	Lebih/ (Kurang)
						Puskesmas				
4	1	04	16	01	0001	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Alon-alon	1.833.092.404	1.928.841.943	105	95.749.539
4	1	04	16	01	0001	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kebomas	1.498.838.329	1.680.275.453	112	181.437.124
4	1	04	16	01	0001	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Manyar	1.469.966.874	1.390.466.427	95	(79.500.447)
4	1	04	16	01	0001	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Sukomulyo	1.292.023.324	1.367.785.590	106	75.762.266
4	1	04	16	01	0001	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Duduksampeyan	2.178.418.669	2.357.616.831	108	179.198.162
4	1	04	16	01	0001	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Cerme	2.783.251.697	2.925.076.598	105	141.824.901
4	1	04	16	01	0001	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Balongpanggang	1.662.614.800	1.788.541.429	108	125.926.629
4	1	04	16	01	0001	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Benjeng	2.256.156.930	2.251.045.420	100	(5.111.510)
4	1	04	16	01	0001	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Metatu	1.324.276.110	1.312.555.591	99	(11.720.519)
4	1	04	16	01	0001	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Driyorejo	2.341.654.132	2.847.167.636	122	505.513.504
4	1	04	16	01	0001	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Wringinanom	1.725.100.701	1.700.380.680	99	(24.720.021)
4	1	04	16	01	0001	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kesamben kulon	1.510.000.001	1.505.922.514	100	(4.077.487)
4	1	04	16	01	0001	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Bungah	3.183.551.607	3.440.533.975	108	256.982.368
4	1	04	16	01	0001	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Mentaras	1.280.000.001	1.508.222.448	118	228.222.447
4	1	04	16	01	0001	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Sidayu	2.113.619.391	2.303.634.921	109	190.015.530
4	1	04	16	01	0001	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Ujungpangkah	1.851.563.350	1.943.224.469	105	91.661.119
4	1	04	16	01	0001	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Panceng	2.855.387.744	2.982.567.385	104	127.179.641
4	**1**	**04**	**16**	**01**		**Pendapatan BLUD RSUD**	**225.533.427.572**	**257.278.363.060**	**114**	**31.744.935.488**
4	1	04	16	01	0001	Pendapatan BLUD RSUD Ibnu Sina	225.533.427.572	257.278.363.060	114	31.744.935.488
4	**1**	**04**	**19**			**Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir**	**-**	**-**		**-**
4	1	04	19	01	0001	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-	-		-
4	**1**	**04**	**21**			**Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah**	**-**	**300.000**		**300.000**
4	1	04	21	01	0001	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	-	300.000		300.000

Sumber: BPPKAD Kabupaten Gresik. Desember 2022

1.3.4.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer dengan Target Rp2.279.654.272.226 mampu direalisasikan sebesar Rp2.154.340.660.571 atau 95%. Komponen Pendapatan Transfer terdiri atas: (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. dan (2) Pendapatan Transfer Antar Daerah.

a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada Tahun 2022 direncanakan sebesar sebesar Rp1.876.903.994.000 terealisasi sebesar Rp1.874.808.942.986 atau 99,89%. Komponen Pendapatan Trtansfer Pemerintah Pusat terdiri atas:

   a) Dana Perimbangan;

      Dana perimbangan yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan merupakan penerimaan daerah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan ini terdiri atas: (1)Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) (2)Dana Alokasi Umum dan (3) Dana Transfer Khusus. Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara Pemerintahan Daerah serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2022 Rp1.528.999.930.386 dari target Rp1.530.695.894.000 atau 99,89%.

b) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil yang diperoleh Pemerintah dalam APBN dibagihasilkan kepada daerah dengan proporsi yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005. Dana bagi hasil ditujukan dalam rangka memperkecil kesenjangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Komponen penerimaan dari Bagi Hasil Pajak terdiri atas:

1. DBH Pajak Bumi dan Bangunan
2. DBH PPh Pasal 21
3. DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN
4. DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
5. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi
6. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi
7. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi
8. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent

9. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
10. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan

Realisasi Dana Bagi Hasil Tahun 2022 sebesar Rp253.383.149.961 dari target Rp193.537.635.000 atau sebesar 130,92%.

c) Dana Alokasi Umum;

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penerimaan Pemerintah Kabupaten Gresik yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) pada Tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp870.446.047.000 terealisasi sebesar Rp864.287.717.761 atau sebesar 99,29%.

d) Dana Transfer Khusus;

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kebijakan transfer ke daerah terutama melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) ditujukan untuk pembangunan fisik dan non fisik layanan publik daerah. Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

1. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dapat direalisasikan sebesar Rp100.414.100.629 atau 90,75% dari target Rp110.650.121.000.

2. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dapat direalisasikan sebesar Rp310.914.962.035 atau 87,32% dari target sebesar Rp356.062.091.000.

e) Dana Insentif Daerah (DID);

Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah Dana Penyesuaian dalam APBN Tahun Anggaran 2022 yang digunakan dalam rangka pelaksanaan fungsi pendidikan yang dialokasikan kepada daerah dengan mempertimbangkan kriteria kinerja tertentu. Realisasi DID Tahun 2022 51.487.263.000 atau 100%.

f) Dana Desa.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima pemerintah desa 30% alokasi dana desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan operasional desa, biaya operasional BPD, biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa. Sedangkan 70% dana desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepala lembaga masyarakat desa, BUMDes, kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa

seperti LPMD; RT; RW; PKK; Karang Taruna; dan Linmas. Dana Desa terealisasi sebesar Rp294.321.749.600 dari target sebesar Rp294.720.837.000 atau sebesar 99,86%.

b) Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil pajak, dan bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Timur dengan target Rp402.750.278.226 dapat terealisasi sebesar Rp279.531.717.585 atau 69,41%.

Adapun rincian Realisasi Pendapatan Transfer pada Tahun 2022 sebagaimana berikut:

Tabel 1.22 Realisasi Pendapatan Transfer

No Rekening						Uraian	PAPBD 2022			
							Target	Realisasi	%	Lebih/ (Kurang)
4	**2**					**PENDAPATAN TRANSFER**	**2.279.654.272.226**	**2.154.340.660.571**	**95**	**(125.313.611.655)**
4	**2**	**01**				**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**1.876.903.994.000**	**1.874.808.942.986**	**99,89**	**(2.095.051.014)**
4	**2**	**01**	**01**			**Dana Perimbangan**	**1.530.695.894.000**	**1.528.999.930.386**	**99,89**	**(1.695.963.614)**
4	**2**	**01**	**01**	**01**		**Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)**	**193.537.635.000**	**253.383.149.961**	**131**	**59.845.514.961**
4	2	01	01	01	0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	29.712.237.000	31.381.262.705	106	1.669.025.705
4	2	01	01	01	0002	DBH PPh Pasal 21	76.306.518.000	94.227.750.583	123	17.921.232.583
4	2	01	01	01	0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	2.718.736.000	4.372.695.278	161	1.653.959.278
4	2	01	01	01	0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	21.820.825.000	23.409.486.583	107	1.588.661.583
4	2	01	01	01	0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	49.995.229.000	83.788.543.810	168	33.793.314.810
4	2	01	01	01	0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	8.281.717.000	10.653.364.246	129	2.371.647.246
4	2	01	01	01	0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	29.976.000	46.240.672	154	16.264.672
4	2	01	01	01	0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	-	-		-
4	2	01	01	01	0009	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalti	2.321.387.000	3.065.942.525	132	744.555.525
4	2	01	01	01	0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	392.699.000	479.552.559	122	86.853.559
4	2	01	01	01	0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.958.311.000	1.958.311.000	100	-
										-
4	**2**	**01**	**01**	**02**		**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)**	**870.446.047.000**	**864.287.717.761**	**99**	**(6.158.329.239)**
										-
4	**2**	**01**	**01**	**03**		**Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik**	**110.650.121.000**	**100.414.100.629**	**91**	**(10.236.020.371)**
4	2	01	01	03	0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	235.184.000	234.874.800	100	(309.200)
4	2	01	01	03	0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	4.572.936.000	4.528.821.150	99	(44.114.850)
4	2	01	01	03	0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	11.077.208.000	11.075.131.350	100	(2.076.650)
4	2	01	01	03	0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	-	-		-
4	2	01	01	03	0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	-	-		-
4	2	01	01	03	0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Dasar	-	-		-
4	2	01	01	03	0014	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Rujukan	-	-		-
4	2	01	01	03	0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Pakai Habis	5.492.424.000	5.385.618.284	98	(106.805.716)
4	2	01	01	03	0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB	3.742.200.000	3.525.702.600	94	(216.497.400)
4	2	01	01	03	0017	DAK Fisik-Bidang	-	-		-

No Rekening						Uraian	PAPBD 2022 Target	Realisasi	%	Lebih/ (Kurang)
						Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Intervensi Stunting				
4	2	01	01	03	0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.114.693.000	1.007.361.224	90	(107.331.776)
4	2	01	01	03	0026	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan Stunting (KB)	2.777.309.000	2.709.185.000	98	(68.124.000)
4	2	01	01	03	0027	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	7.137.132.000	6.577.445.143	92	(559.686.857)
4	2	01	01	03	0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	3.413.966.000	3.304.327.000	97	(109.639.000)
4	2	01	01	03	0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	490.319.000	479.864.604	98	(10.454.396)
4	2	01	01	03	0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	6.538.582.000	5.529.343.320	85	(1.009.238.680)
4	2	01	01	03	0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	6.146.725.000	5.344.469.084	87	(802.255.916)
4	2	01	01	03	0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler-Jalan	35.377.489.000	31.133.599.493	88	(4.243.889.507)
4	2	01	01	03	0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi- Reguler	3.599.773.000	3.590.393.000	100	(9.380.000)
4	2	01	01	03	0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	4.353.287.000	3.594.177.743	83	(759.109.257)
4	2	01	01	03	0052	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	-	-		-
4	2	01	01	03	0059	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	9.644.525.000	7.802.660.355	81	(1.841.864.645)
4	2	01	01	03	0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	4.936.369.000	4.591.126.479	93	(345.242.521)
4	**2**	**01**	**01**	**04**		**Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik**	**356.062.091.000**	**310.914.962.035**	**87**	**(45.147.128.965)**
4	01	01	01	04	0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	132.805.660.000	126.362.181.516	95	(6.443.478.484)
4	2	01	01	04	0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	4.200.000.000	4.160.000.000	99	(40.000.000)
4	01	01	01	04	0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	139.110.557.000	117.585.303.015	85	(21.525.253.985)
4	2	01	01	04	0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	4.239.000.000	2.440.900.000	58	(1.798.100.000)
4	2	01	01	04	0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	35.409.360.000	35.320.132.000	100	(89.228.000)
4	2	01	01	04	0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.541.200.000	1.541.200.000	100	-
4	2	01	01	04	0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya - Museum	700.000.000	638.710.984	91	(61.289.016)
4	2	01	01	04	0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	24.169.228.000	14.501.618.190	60	(9.667.609.810)
4	2	01	01	04	0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	420.134.000	-	-	(420.134.000)
4	2	01	01	04	0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	-	-		-
4	2	01	01	04	0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	1.166.204.000	-	-	(1.166.204.000)
4	2	01	01	04	0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	11.339.034.000	7.564.898.720	67	(3.774.135.280)
4	2	01	01	04	0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	404.200.000	384.279.854	95	(19.920.146)
4	2	01	01	04	0017	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	-	-		-
4	2	01	01	04	0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	383.914.000	259.181.992	68	(124.732.008)
4	2	01	01	04	0022	DAK Non Fisik - Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	-		-
4	2	01	01	04	0023	DAK Non Fisik - Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	173.600.000	156.555.764	90	(17.044.236)
										-
4	**2**	**01**	**02**			**Dana Insentif Daerah (DID)**	**51.487.263.000**	**51.487.263.000**	**100**	**-**
4	2	01	02	01	0001	DID	51.487.263.000	51.487.263.000	100	-
4	**2**	**01**	**05**			**Dana Desa**	**294.720.837.000**	**294.321.749.600**	**100**	**(399.087.400)**
4	2	01	05	01	0001	Dana Desa	294.720.837.000	294.321.749.600	100	(399.087.400)
4	**2**	**02**				**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**402.750.278.226**	**279.531.717.585**	**69**	**(123.218.560.641)**
4	**2**	**02**	**01**			**Pendapatan Bagi Hasil**	**385.767.458.226**	**263.373.114.585**	**68**	**(122.394.343.641)**
4	**2**	**02**	**01**	**01**		**Pendapatan Bagi Hasil Pajak**	**385.767.458.226**	**263.373.114.585**	**68**	**(122.394.343.641)**
4	2	02	01	01	0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	109.488.532.006	72.164.342.320	66	(37.324.189.686)
4	2	02	01	01	0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	77.044.555.485	51.525.175.420	67	(25.519.380.065)
4	2	02	01	01	0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	115.524.504.329	75.393.740.920	65	(40.130.763.409)
4	2	02	01	01	0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.372.410.174	841.957.640	61	(530.452.534)
4	2	02	01	01	0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	82.337.456.232	63.447.898.285	77	(18.889.557.947)

No Rekening						PAPBD 2022				
						Uraian	Target	Realisasi	%	Lebih/ (Kurang)
4	**2**	**02**	**02**			**Bantuan Keuangan**	**16.982.820.000**	**16.158.603.000**	**95**	**(824.217.000)**
4	2	02	02	02	0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	16.982.820.000	16.158.603.000	95	(824.217.000)
										-

Sumber: BPPKAD Kabupaten Gresik. Desember 2022

1.3.4.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penerimaan Pemerintah Kabupaten Gresik yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri atas: (1) Pendapatan Hibah dan (2) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah pada Tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp15.744.895.806 dan dapat direalisasikan sebesar Rp20.515.121.668 atau mencapai 130%. Adapun perincian Lain-lain Pendapatan yang Sah pada Tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.23 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

No Rekening						PAPBD 2022				
						Uraian	Target	Realisasi	%	Lebih/ (Kurang)
4	**3**					**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**15.744.895.806**	**20.515.121.668**	**130**	**4.770.225.862**
4	**3**	**01**				**Pendapatan Hibah**	**-**	**3.988.597.568**		**3.988.597.568**
4	**3**	**01**	**01**			**Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat**	**-**	**3.988.597.568**		**3.988.597.568**
4	3	01	01	01	0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	-	3.988.597.568		3.988.597.568
4	**3**	**01**	**03**			**Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri**	**-**	**-**		**-**
4	3	01	03	01	0001	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	-	-		-
4	**3**	**03**				**Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**	**15.744.895.806**	**16.526.524.100**	**105**	**781.628.294**
4	**3**	**03**	**01**			**Lain-lain Pendapatan**	**-**	**402.545.000**		**402.545.000**
4	3	03	01	01	0001	Pendapatan Hibah Dana BOS	-	-		-
4	**3**	**03**	**02**			**Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)**	**15.744.895.806**	**16.123.979.100**	**102**	**379.083.294**
4	**3**	**03**	**02**	**01**		**Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP**	**15.744.895.806**	**16.123.979.100**	**102**	**379.083.294**
4	3	03	02	01	0002	Pendapatan Dana Kapitasi Puskesmas Nelayan	480.975.192	555.878.492	116	74.903.300
4	3	03	02	01	0002	Pendapatan Dana Kapitasi Puskesmas Industri	613.283.635	680.403.410	111	67.119.775
4	3	03	02	01	0002	Pendapatan Dana Kapitasi Puskesmas Gending	746.320.121	802.227.221	107	55.907.100
4	3	03	02	01	0002	Pendapatan Dana Kapitasi Puskesmas Sembayat	975.865.946	917.365.606	94	(58.500.340)
4	3	03	02	01	0002	Pendapatan Dana Kapitasi Puskesmas Dadapkuning	901.771.069	683.108.994	76	(218.662.075)
4	3	03	02	01	0002	Pendapatan Dana Kapitasi Puskesmas Dapet	476.219.241	518.392.497	109	42.173.256
4	3	03	02	01	0002	Pendapatan Dana Kapitasi Puskesmas Menganti	2.253.521.223	2.340.203.084	104	86.681.861
4	3	03	02	01	0002	Pendapatan Dana Kapitasi Puskesmas Kepatihan	926.829.057	1.005.389.747	108	78.560.690
4	3	03	02	01	0002	Pendapatan Dana Kapitasi Puskesmas Kedamean	1.321.124.500	1.087.696.800	82	(233.427.700)
4	3	03	02	01	0002	Pendapatan Dana Kapitasi Puskesmas Slempit	1.180.711.912	1.112.903.812	94	(67.808.100)
4	3	03	02	01	0002	Pendapatan Dana Kapitasi Puskesmas Karangandong	1.128.975.600	1.157.062.095	102	28.086.495
4	3	03	02	01	0002	Pendapatan Dana Kapitasi Puskesmas Dukun	1.366.856.932	1.264.256.632	92	(102.600.300)
4	3	03	02	01	0002	Pendapatan Dana Kapitasi Puskesmas Sekapuk	605.312.400	685.029.600	113	79.717.200
4	3	03	02	01	0002	Pendapatan Dana Kapitasi Puskesmas Sangkapura	1.586.284.825	2.128.724.357	134	542.439.532
4	3	03	02	01	0002	Pendapatan Dana Kapitasi Puskesmas Tambak	1.180.844.153	1.185.336.753	100	4.492.600

No Rekening						PAPBD 2022				
						Uraian	Target	Realisasi	%	Lebih/ (Kurang)
4	**3**	**03**	**01**	**02**		**Pendapatan atas Pengembalian Hibah**	**-**	**402.545.000**		**402.545.000**
4	3	03	01	02	0005	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan. Lembaga. dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia	-	402.545.000		402.545.000

Sumber: BPPKAD Kabupaten Gresik. Desember 2022

1.3.5 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Rp3.554.076.907.627 atau mencapai 90,20% dari Target Rp3.940.289.380.229 dengan rincian sebagaimana berikut:

Tabel 1.24 Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022

No	URUSAN/SUB BIDANG URUSAN	TARGET	REALISASI	%	SISA
5.	**BELANJA DAERAH**	**3.940.289.380.229**	**3.554.076.907.627**	**90,20**	**3.192.751.693.289**
5.1.	**BELANJA OPERASI**	2.541.815.941.557	2.336.050.670.076	91,90	2.107.828.823.192
	BELANJA PEGAWAI	1.035.327.472.245	978.449.069.438	94,51	944.573.454.546
	BELANJA BARANG JASA	1.210.281.324.641	1.077.649.432.360	89,04	867.782.534.353
	BELANJA HIBAH	267.129.173.921	255.072.373.102	95,49	273.451.594.290
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	29.077.970.750	24.879.795.175	85,56	22.021.240.002
5.2.	**BELANJA MODAL**	**459.274.455.452**	**310.157.730.143**	**67,53**	**298.579.850.432**
	BELANJA MODAL TANAH	56.112.500.000	18.343.184.523	32,69	21.417.109.595
	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	108.122.425.094	100.433.635.601	92,89	108.937.138.662
	BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	77.444.277.036	33.936.349.305	43,82	54.994.128.306
5.2.04	BELANJA MODAL JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI	205.484.564.123	147.378.850.812	71,72	105.085.089.741
5.2.05	BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	8.334.803.005	7.268.442.379	87,21	5.710.468.682
5.2.06	BELANJA MODAL ASET LAINNYA	3.775.886.194	2.797.267.521	74,08	2.435.915.445
5.3.	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**4.488.591.420**	**2.824.635.908**	**62,93**	**29.684.216.764**
5.4.	**BELANJA TRANSFER**	**934.710.391.800**	**905.043.871.500**	**96,83**	**756.658.802.900**
5.4.01	BELANJA BAGI HASIL	95.708.790.000	66.996.357.000	70,00	76.046.420.100
5.4.02	BELANJA BANTUAN KEUANGAN	839.001.601.800	838.047.514.500	99,89	680.612.382.800

Sumber: BPPKAD Kabupaten Gresik Tahun 2022

1.3.6 Realisasi Pembiayaan

Pembiayaan daerah pada Tahun Anggaran 2022 diarahkan pada Penyesuaian penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2021 (tahun sebelumnya) dengan penerimaan pembiayaan sebesar Rp246.425.903.889 dari target sebesar Rp263.218.570.955 atau 93,62% dan Pengeluaran Pembiayaan terealisasi) dari target Rp5.022.890.000. Adapun Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan sebesar Rp59.003.780.655.

Tabel 1. 25 Realisasi Pembiayaan Tahun 2022

No Rek	Uraian	PAPBD 2022			
		Target	Realisasi	%	Lebih/ (Kurang)
	PEMBIAYAAN DAERAH	263.218.570.955	246.425.903.889	93.62	(16.792.667.065
6 1	Penerimaan Pembiayaan	268.241.460.955	246.425.903.889	91.87	(21.815.557.065
6 1 01	Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya	246.778.460.955	246.409.984.889	99.85	(368.476.065)
6 1 02	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0
6 1 03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang	0	0	0	0
6 1 06	Pinjaman Daerah Lembaga Keuangan	21.463.000.000	0	0	(21.463.000.000)
6 1 09	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	15.919.000	0	15.919.000
6 1 10	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0	0	0	0
6 2	Pengeluaran Pembiayaan	5.022.890.000	0	0	(5.022.890.000)
6 2 01	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0
6 2 02	Pembayaran Pokok Cicilan Utang	643.890.000	0	0	(643.890.000)
6 2 08	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0
6 2 09	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya - Penyertaan Modal	4.379.000.000	0	0	(4.979.000.000)
	PEMBIAYAAN NETTO	**263.218.570.955**	**246.425.903.889**		
	SISALEBIH PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**0**	**59.003.780.655**		

Sumber: BPPKAD Kabupaten Gresik Tahun 2022

BAB II
PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2.1Kebijakan Perubahan Pendapatan

Perubahan Pendapatan Daerah Pada Tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp3.675.707.809.274 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah Rp1.381.671.641.242. Pendapatan Transfer Rp2.278.291.272.226 dan Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp15.744.895.806 sebagaimana berikut:

Tabel 2.1 Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2022

No	Uraian	APBD	P-APBD	Selisih	%
4	PENDAPATAN DAERAH	3.439.387.485.952	3.675.707.809.274	236.320.323.322	7%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.215.569.895.227	1.381.671.641.242	166.101.746.015	14%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.206.791.578.000	2.278.291.272.226	71.499.694.226	3%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	17.026.012.725	15.744.895.806	-1.281.116.919	8%

Sumber: Peraturan Bupati Gresik Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2022

2.1.1 Kebijakan Perubahan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah naik Rp1.381.671.641.242, naik 14% atau Rp166.101.746.015 didominasi dengan naiknya obyek pendapatan pada Pajak Daerah dengan persentase kenaikan sebesar 15% dari Target Awal yang ditetapkan di APBD 2022. Retribusi Daerah naik sebesar 4%. Hasil pengelolaan kekayaan daerah tetap dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah naik sebesar 19%.

Tabel 2.2 Perubahan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022

No	Uraian	APBD	P-APBD	Selisih	%
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**1.215.569.895.227**	**1.381.671.641.242**	**166.101.746.015**	**14%**
4.1.01	Pajak Daerah	782.250.000.000	895.965.683.770	113.715.683.770	15%
4.1.02	Retribusi Daerah	174.837.900.000	181.296.900.000	6.459.000.000	4%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.660.000.000	13.660.000.000	0	0%

No	Uraian	APBD	P-APBD	Selisih	%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	244.821.995.227	290.749.057.472	45.927.062.245	19%

Sumber: Peraturan Bupati Gresik Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2022

2.1.1.1 Pajak Daerah

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) merupakan komponen utama Pendapatan Asli daerah (PAD). Penguatan *local taxing power* kepada daerah melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dilakukan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sesuai undang-undang tersebut pajak daerah yang dapat dipungut oleh kabupaten/kota adalah sebanyak 11 jenis. Kebijakan Perubahan Hasil Pajak Daerah Tahun 2022 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3 Perubahan Pajak Daerah Tahun 2022

No	Uraian	APBD	P-APBD	Selisih	%
4.1.01	**Pajak Daerah**	**782.250.000.000**	**895.965.683.770**	**113.715.683.770**	**15%**
4.1.01.06	Pajak Hotel	10.650.000.000	10.650.000.000	0	0%
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	10.600.000.000	10.600.000.000	0	0%
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	10.600.000.000	10.600.000.000	0	0%
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	50.000.000	50.000.000	0	0%
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen	50.000.000	50.000.000	0	0%
4.1.01.07	Pajak Restoran	30.350.000.000	30.350.000.000	0	0%
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	15.850.000.000	15.850.000.000	0	0%
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	15.850.000.000	15.850.000.000	0	0%
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	7.000.000.000	7.000.000.000	0	0%
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	7.000.000.000	7.000.000.000	0	0%
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	500.000.000	500.000.000	0	0%
4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	500.000.000	500.000.000	0	0%
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	7.000.000.000	7.000.000.000	0	0%
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	7.000.000.000	7.000.000.000	0	0%
4.1.01.08	Pajak Hiburan	3.300.000.000	3.300.000.000	0	0%
4.1.01.08.01	Pajak Tontonan Film	2.640.000.000	2.640.000.000	0	0%
4.1.01.08.01.0001	Pajak Tontonan Film	2.640.000.000	2.640.000.000	0	0%
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	100.000.000	100.000.000	0	0%
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	100.000.000	100.000.000	0	0%
4.1.01.08.07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	20.000.000	20.000.000	0	0%
4.1.01.08.07.0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	20.000.000	20.000.000	0	0%

No	Uraian	APBD	P-APBD	Selisih	%
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda. Kendaraan Bermotor. dan Permainan Ketangkasan	0	0	0	0%
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda. Kendaraan Bermotor. dan Permainan Ketangkasan	0	0	0	0%
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat. Refleksi. Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	400.000.000	400.000.000	0	0%
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat. Refleksi. Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	400.000.000	400.000.000	0	0%
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	140.000.000	140.000.000	0	0%
4.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	140.000.000	140.000.000	0	0%
4.1.01.09	Pajak Reklame	5.200.000.000	5.200.000.000	0	0%
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0%
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0%
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	2.200.000.000	2.200.000.000	0	0%
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	2.200.000.000	2.200.000.000	0	0%
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	230.000.000.000	235.000.000.000	5.000.000.000	2%
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	28.000.000.000	16.750.000.000	-11.250.000.000	40%
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	28.000.000.000	16.750.000.000	-11.250.000.000	40%
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	202.000.000.000	218.250.000.000	16.250.000.000	8%
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	202.000.000.000	218.250.000.000	16.250.000.000	8%
4.1.01.11	Pajak Parkir	6.000.000.000	6.000.000.000	0	0%
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	6.000.000.000	6.000.000.000	0	0%
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	6.000.000.000	6.000.000.000	0	0%
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	1.750.000.000	2.750.000.000	1.000.000.000	57%
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	1.750.000.000	2.750.000.000	1.000.000.000	57%
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	1.750.000.000	2.750.000.000	1.000.000.000	57%
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.000.000.000	8.000.000.000	4.000.000.000	100%
4.1.01.14.04	Pajak Batu Kapur	4.000.000.000	8.000.000.000	4.000.000.000	100%
4.1.01.14.04.0001	Pajak Batu Kapur	4.000.000.000	8.000.000.000	4.000.000.000	100%
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	135.000.000.000	140.000.000.000	5.000.000.000	4%
4.1.01.15.01	PBBP2	135.000.000.000	140.000.000.000	5.000.000.000	4%
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	135.000.000.000	140.000.000.000	5.000.000.000	4%
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	356.000.000.000	454.715.683.770	98.715.683.770	28%
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	356.000.000.000	454.715.683.770	98.715.683.770	28%
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	356.000.000.000	454.715.683.770	98.715.683.770	28%

Sumber: Peraturan Bupati Gresik Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2022

Terdapat 5 sektor pada pajak daerah yang mengalami kenaikan. diataranya: Pajak Penerangan Jalan sebesar 2%. Pajak Air Tanah 57%. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 100%. Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 4%. dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 28%.

2.1.1.2 Retribusi Daerah

Kewenangan daerah untuk memungut retribusi daerah diatur pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perda Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Perda Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu dan Perda Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Sumber-sumber penerimaan retribusi Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik adalah 7 (tujuh) jenis Retribusi Jasa Umum. 8 (delapan) jenis Retribusi Jasa Usaha dan 3 (tiga) jenis Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi Daerah di Perubahan APBD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar 4% atau Rp6.459.000.000 dengan total target Retribusi Daerah Rp181.296.900.000.

Tabel 2.4 Perubahan Retribusi Daerah Tahun 2022

No	Uraian	APBD	P-APBD	Selisih	%
4.1.02	**Retribusi Daerah**	**174.837.900.000**	**181.296.900.000**	**6.459.000.000**	**4%**
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	26.957.500.000	28.957.500.000	2.000.000.000	7%
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	6.300.000.000	6.300.000.000	0	0%
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	6.300.000.000	6.300.000.000	0	0%
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	3.500.000.000	3.500.000.000	0	0%
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	3.500.000.000	3.500.000.000	0	0%
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	9.000.000.000	9.000.000.000	0	0%
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	9.000.000.000	9.000.000.000	0	0%
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0%
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0%
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	3.000.000.000	5.000.000.000	2.000.000.000	67%
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	3.000.000.000	5.000.000.000	2.000.000.000	67%
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	157.500.000	157.500.000	0	0%
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	157.500.000	157.500.000	0	0%
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0%
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur. Takar. Timbang.	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0%

No	Uraian	APBD	P-APBD	Selisih	%
	dan Perlengkapannya				
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	16.202.250.000	20.661.250.000	4.459.000.000	28%
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	12.553.500.000	17.012.500.000	4.459.000.000	36%
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	10.581.000.000	15.000.000.000	4.419.000.000	42%
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0%
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	360.000.000	512.500.000	152.500.000	42%
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	112.500.000	0	-112.500.000	100%
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	236.250.000	236.250.000	0	0%
4.1.02.02.02.0001	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	236.250.000	236.250.000	0	0%
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	0	0	0	0%
4.1.02.02.03.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	0	0	0	0%
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	105.000.000	105.000.000	0	0%
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	105.000.000	105.000.000	0	0%
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	945.000.000	945.000.000	0	0%
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	945.000.000	945.000.000	0	0%
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	0	0	0	0%
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	0	0	0	0%
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.100.000.000	2.100.000.000	0	0%
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.100.000.000	2.100.000.000	0	0%
4.1.02.02.10	Retribusi Penyeberangan di Air	262.500.000	262.500.000	0	0%
4.1.02.02.10.0001	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang	262.500.000	262.500.000	0	0%
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	131.678.150.000	131.678.150.000	0	0%
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	128.175.150.000	131.678.150.000	3.503.000.000	3%
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	128.175.150.000	131.678.150.000	3.503.000.000	3%
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	3.000.000	0	-3.000.000	100%
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	3.000.000	0	-3.000.000	100%
4.1.02.03.06	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	3.500.000.000	0	-3.500.000.000	100%
4.1.02.03.06.0001	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	3.500.000.000	0	-3.500.000.000	100%

Sumber: Peraturan Bupati Gresik Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2022

2.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Sumber-sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan antara lain diperoleh dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik mempunyai penyertaan modal pada lembaga keuangan dan aneka usaha. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Tahun Anggaran 2022 diperkirakan sebesar Rp13.660.000.000.

Tabel 2.5 Perubahan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2022

No	Uraian	APBD	P-APBD	Selisih	%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.660.000.000	13.660.000.000	0	0%
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	13.660.000.000	13.660.000.000	0	0%
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	11.660.000.000	11.660.000.000	0	0%
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	11.660.000.000	11.660.000.000	0	0%
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0%
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0%

Sumber: Peraturan Bupati Gresik Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2022

2.1.1.4 Lain- lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Sumber-sumber pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berasal dari hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan. penerimaan jasa giro. pendapatan bunga. pendapatan BLUD dan Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Tahun Anggaran 2022 diperkirakan akan mencapai Rp290.749.057.472 mengalami perubahan target dari Rp244.821.995.227 atau naik 19% yakni sebesar Rp45.927.062.245.

Tabel 2.6 Perubahan Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2022

No	Uraian	APBD	P-APBD	Selisih	%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	244.821.995.227	290.749.057.472	45.927.062.245	19%
4.1.04.05	Jasa Giro	7.000.000.000	7.000.000.000	0	0%
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	7.000.000.000	7.000.000.000	0	0%
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	7.000.000.000	7.000.000.000	0	0%
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	25.000.000.000	25.000.000.000	0	0%
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	25.000.000.000	25.000.000.000	0	0%
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	25.000.000.000	25.000.000.000	0	0%
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0	56.113.836	56.113.836	100%
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	0	56.113.836	56.113.836	100%
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	0	56.113.836	56.113.836	100%
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	212.821.995.227	258.692.943.636	45.870.948.409	22%
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	212.821.995.227	258.692.943.636	45.870.948.409	22%
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	212.821.995.227	258.692.943.636	45.870.948.409	22%
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0	0	0	0%
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0	0	0	0%
4.1.04.18.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0	0	0	0%

Sumber: Peraturan Bupati Gresik Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2022

2.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2022 naik 3% atau sebesar Rp71.499.694.226 dari target awal yang ditetapkan Rp2.206.791.578.000 menjadi Rp2.278.291.272.226.

Tabel 2.7 Perubahan Pendapatan Transfer Tahun 2022

No	Uraian	APBD	P-APBD	Selisih	%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.206.791.578.000	2.278.291.272.226	71.499.694.226	3%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.869.686.758.000	1.876.903.994.000	7.217.236.000	0%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	337.104.820.000	401.387.278.226	64.282.458.226	19%

Sumber: Peraturan Bupati Gresik Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2022

2.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp1.876.903.994.000 naik 0,0039% atau Rp7.217.236.000 dari Rp1.869.686.758.000. Adapun Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan sebesar Rp1.530.695.894.000. Dana Insentif Daerah (DID) Rp51.487.263.000 dan Dana Desa sebesar Rp294.720.837.000.

Tabel 2.8 Perubahan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2022

No	Uraian	APBD	P-APBD	Selisih	%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.869.686.758.000	1.876.903.994.000	7.217.236.000	0,0039
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.523.478.658.000	1.530.695.894.000	7.217.236.000	0,0047
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	184.897.249.000	193.537.635.000	8.640.386.000	0,0467
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	27.978.748.000	29.712.237.000	1.733.489.000	0,0620
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	76.439.395.000	76.306.518.000	-132.877.000	-0,0017
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0	2.718.736.000	2.718.736.000	
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	21.058.646.000	21.820.825.000	762.179.000	0,0362
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	37.993.892.280	49.995.229.000	12.001.336.720	0,3159
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	17.879.478.720	8.281.717.000	-9.597.761.720	-0,5368
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	29.339.000	29.976.000	637.000	0,0217
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	1.206.768.000	2.321.387.000	1.114.619.000	0,9236
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	392.156.000	392.699.000	543.000	0,0014
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.918.826.000	1.958.311.000	39.485.000	0,0206
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	870.446.047.000	870.446.047.000	0	0,0000
4.2.01.01.02.0001	DAU	870.446.047.000	870.446.047.000	0	0,0000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	110.650.121.000	110.650.121.000	0	0,0000
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	235.184.000	235.184.000	0	0,0000
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	4.572.936.000	4.572.936.000	0	0,0000
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	11.077.208.000	11.077.208.000	0	0,0000
4.2.01.01.03.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	14.580.894.000	14.580.894.000	0	0,0000
4.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	5.492.424.000	5.492.424.000	0	0,0000
4.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	3.742.200.000	3.742.200.000	0	0,0000
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.114.693.000	1.114.693.000	0	0,0000
4.2.01.01.03.0026	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	2.777.309.000	2.777.309.000	0	0,0000

No	Uraian	APBD	P-APBD	Selisih	%
4.2.01.01.03.0027	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	7.137.132.000	7.137.132.000	0	0,0000
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	3.413.966.000	3.413.966.000	0	0,0000
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	490.319.000	490.319.000	0	0,0000
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	6.538.582.000	6.538.582.000	0	0,0000
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	6.146.725.000	6.146.725.000	0	0,0000
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	35.377.489.000	35.377.489.000	0	0,0000
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	3.599.773.000	3.599.773.000	0	0,0000
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	4.353.287.000	4.353.287.000	0	0,0000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	357.485.241.000	356.062.091.000	-1.423.150.000	-0,0040
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	132.805.660.000	132.805.660.000	0	0,0000
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	4.200.000.000	4.200.000.000	0	0,0000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	139.110.557.000	139.110.557.000	0	0,0000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	4.239.000.000	4.239.000.000	0	0,0000
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	36.464.160.000	35.409.360.000	-1.054.800.000	-0,0289
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.909.550.000	1.541.200.000	-368.350.000	-0,1929
4.2.01.01.04.0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	700.000.000	700.000.000	0	0,0000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	24.169.228.000	24.169.228.000	0	0,0000
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	420.134.000	420.134.000	0	0,0000
4.2.01.01.04.0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	1.166.204.000	1.166.204.000	0	0,0000
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	11.339.034.000	11.339.034.000	0	0,0000
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	404.200.000	404.200.000	0	0,0000
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	383.914.000	383.914.000	0	0,0000
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	173.600.000	173.600.000	0	0,0000
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	51.487.263.000	51.487.263.000	0	0,0000
4.2.01.02.01	DID	51.487.263.000	51.487.263.000	0	0,0000
4.2.01.02.01.0001	DID	51.487.263.000	51.487.263.000	0	0,0000
4.2.01.05	Dana Desa	294.720.837.000	294.720.837.000	0	0,0000
4.2.01.05.01	Dana Desa	294.720.837.000	294.720.837.000	0	0,0000
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	294.720.837.000	294.720.837.000	0	0,0000

Sumber: Peraturan Bupati Gresik Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2022

2.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp401.387.278.226 naik sebesar 19% atau Rp64.282.458.226 dari target sebelumnya Rp337.104.820.000.

Tabel 2.9 Perubahan Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2022

No	Uraian	APBD	P-APBD	Selisih	%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	337.104.820.000	401.387.278.226	64.282.458.226	19%
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	321.610.000.000	385.767.458.226	64.157.458.226	20%
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	321.610.000.000	385.767.458.226	64.157.458.226	20%
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	89.903.000.000	109.488.532.006	19.585.532.006	22%
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	64.615.000.000	77.044.555.485	12.429.555.485	19%
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	96.887.000.000	115.524.504.329	18.637.504.329	19%
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.151.000.000	1.372.410.174	221.410.174	19%
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	69.054.000.000	82.337.456.232	13.283.456.232	19%
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	15.494.820.000	15.619.820.000	125.000.000	1%
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	15.494.820.000	15.619.820.000	125.000.000	1%
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	15.494.820.000	15.619.820.000	125.000.000	1%

Sumber: Peraturan Bupati Gresik Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2022

2.1.3 Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp15.744.895.806 turun 8% atau Rp1.281.116.919 dari target Rp17.026.012.725.

Tabel 2.10 Perubahan Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2022

No	Uraian	APBD	P-APBD	Selisih	%
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	17.026.012.725	15.744.895.806	-1.281.116.919	8%
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	17.026.012.725	15.744.895.806	-1.281.116.919	8%
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	17.026.012.725	15.744.895.806	-1.281.116.919	8%
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	17.026.012.725	15.744.895.806	-1.281.116.919	8%
4.3.03.02.01.0002	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD	17.026.012.725	15.744.895.806	-1.281.116.919	8%

Sumber: Peraturan Bupati Gresik Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2022

2.2Kebijakan Perubahan Belanja

2.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi Rp2.539.852.941.557 naik sebesar 6% atau Rp139.669.698.924 dari target sebelumnya Rp2.400.183.242.633. adapun Belanja Operasi terdiri dari belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.

Tabel 2.11 Belanja Operasi

No	Uraian	APBD	P-APBD	Selisih	%
5.1	**BELANJA OPERASI**	**2.400.183.242.633**	**2.539.852.941.557**	**139.669.698.924**	**6%**
5.1.01	Belanja Pegawai	1.077.047.944.888	1.035.327.472.245	-41.720.472.643	4%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.010.705.363.695	1.208.318.324.641	197.612.960.946	20%
5.1.05	Belanja Hibah	289.136.063.300	267.129.173.921	-22.006.889.379	8%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	23.293.870.750	29.077.970.750	5.784.100.000	25%

Sumber: Peraturan Bupati Gresik Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2022

2.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp1.035.327.472.245 turun sebesar 4% atau Rp41.720.472.643 dari target sebelumnya Rp1.077.047.944.888.

Tabel 2.12 Belanja Pegawai

No	Uraian	APBD	P-APBD	Selisih	%
5.1.01	Belanja Pegawai	1.077.047.944.888	1.035.327.472.245	-41.720.472.643	4%
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	636.177.381.244	562.543.996.312	-73.633.384.932	12%
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	166.437.825.203	169.908.124.266	3.470.299.063	2%
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	184.482.253.583	186.228.653.853	1.746.400.270	1%
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	32.519.133.000	31.128.695.000	-1.390.438.000	4%
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	5.256.745.000	5.165.701.872	-91.043.128	2%
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	2.114.233.000	2.216.474.843	102.241.843	5%

Sumber: Peraturan Bupati Gresik Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2022

2.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp1.208.318.324.641 naik sebesar 20% atau Rp197.612.960.946 dari target sebelumnya Rp1.010.705.363.695.

Tabel 2. 13 Belanja Barang dan Jasa

No	Uraian	APBD	P-APBD	Selisih	%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.010.705.363.695	1.208.318.324.641	197.612.960.946	20%
5.1.02.01	Belanja Barang	172.551.975.602	288.421.438.333	115.869.462.731	67%
5.1.02.02	Belanja Jasa	435.714.896.370	457.883.918.514	22.169.022.144	5%
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	77.965.700.617	88.304.017.136	10.338.316.519	13%
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	62.005.083.467	71.502.160.528	9.497.077.061	15%
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	32.535.918.000	46.814.157.000	14.278.239.000	44%
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	78.982.104.730	80.526.153.882	1.544.049.152	2%
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	150.949.684.909	174.866.479.248	23.916.794.339	16%

Sumber: Peraturan Bupati Gresik Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2022

2.2.1.3 Belanja Hibah

Belanja Hibah turun 8% atau Rp22.006.889.379 dengan total Belanja hibah Rp267.129.173.921.

Tabel 2. 14 Belanja Hibah

No	Uraian	APBD	P-APBD	Selisih	%
5.1.05	Belanja Hibah	289.136.063.300	267.129.173.921	-22.006.889.379	8%
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	4.000.000.000	4.000.000.000	0	0%
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan. Lembaga. Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	279.341.180.800	258.914.713.921	-20.426.466.879	7%
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	5.794.882.500	4.214.460.000	-1.580.422.500	27%

Sumber: Peraturan Bupati Gresik Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2022

2.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial naik 25% atau Rp5.784.100.000 dengan target Belanja bantuan sosial sebesar Rp29.077.970.750.

Tabel 2.15 Belanja Bantuan Sosial

No	Uraian	APBD	P-APBD	Selisih	%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	23.293.870.750	29.077.970.750	5.784.100.000	25%
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	23.293.870.750	29.077.970.750	5.784.100.000	25%

Sumber: Peraturan Bupati Gresik Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2022

2.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal Tahun 2022 naik 8% atau sebesar Rp35.515.778.242 dengan total Belanja modal Rp459.274.455.452.

Tabel 2. 16 Belanja Modal

No	Uraian	APBD	P-APBD	Selisih	%
5.2	**BELANJA MODAL**	**423.758.677.210**	**459.274.455.452**	**35.515.778.242**	**8%**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	54.112.500.000	56.112.500.000	2.000.000.000	4%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	77.589.445.852	108.122.425.094	30.532.979.242	39%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	33.975.661.168	77.444.277.036	43.468.615.868	128%
5.2.04	Belanja Modal Jalan. Jaringan. dan Irigasi	247.317.809.438	205.484.564.123	-41.833.245.315	17%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.722.771.292	8.334.803.005	-387.968.287	4%
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.040.489.460	3.775.886.194	1.735.396.734	85%

Sumber: Peraturan Bupati Gresik Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2022

2.2.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak terduga turun 90% atau Rp43.882.959.015 dari target Rp48.971.550.435.

Tabel 2.17 Belanja Tidak Terduga

No	Uraian	APBD	P-APBD	Selisih	%
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**48.971.550.435**	**5.088.591.420**	**-43.882.959.015**	**90%**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	48.971.550.435	5.088.591.420	-43.882.959.015	90%

Sumber: Peraturan Bupati Gresik Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2022

2.2.4 Belanja Transfer

Belanja Transfer Naik 15% atau sebesar Rp124.873.000.000 dari target sebelumnya Rp809.837.391.800.

Tabel 2. 18 Belanja Transfer

No	Uraian	APBD	P-APBD	Selisih	%
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**809.837.391.800**	**934.710.391.800**	**124.873.000.000**	**15%**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	95.708.790.000	95.708.790.000	0	0%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	714.128.601.800	839.001.601.800	124.873.000.000	17%

Sumber: Peraturan Bupati Gresik Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2022

2.2.4.1 Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil pada Perubahan APBD tidak mengalami perubahan atau ditargetkan sebesar Rp95.708.790.000.

Tabel 2.19 Belanja Bagi Hasil

No	Uraian	APBD	P-APBD	Selisih	%
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	95.708.790.000	95.708.790.000	0	0%
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	78.225.000.000	78.225.000.000	0	0%
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	17.483.790.000	17.483.790.000	0	0%

Sumber: Peraturan Bupati Gresik Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2022

2.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan

Target Perubahan Belanja Bantuan Keuangan Pada PAPBD Tahun 2022 Sebesar Rp839.001.601.800 atau naik 17% dari Target Pada APBD Rp714.128.601.800.

Tabel 2.20 Belanja Bantuan Keuangan

No	Uraian	APBD	P-APBD	Selisih	%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	714.128.601.800	839.001.601.800	124.873.000.000	17%
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	714.128.601.800	839.001.601.800	124.873.000.000	17%

Sumber: Peraturan Bupati Gresik Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2022

2.3 Kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Perubahan Pembiayaan sebesar Rp268.241.460.955 atau naik 9% dari Target APBD 2022 sebesar Rp245.114.451.126.

Tabel 2.21 Pembiayaan Daerah

No	Uraian	APBD	P-APBD	Selisih	%
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**245.114.451.126**	**268.241.460.955**	**23.127.009.829**	**9%**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	178.501.451.126	246.778.460.955	68.277.009.829	38%
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	2.860.000.000	-121.876.743.512	-124.736.743.512	4361%
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	13.278.000.000	-38.142.269.769	-51.420.269.769	387%
6.1.01.03	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	4.560.000.000	1.596.085.062	-2.963.914.938	65%
6.1.01.04	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	0	15.492.000	15.492.000	100%
6.1.01.05	Penghematan Belanja	157.803.451.126	405.185.897.174	247.382.446.048	157%
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	66.613.000.000	21.463.000.000	-45.150.000.000	68%
6.1.04.01	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	66.613.000.000	0	-66.613.000.000	100%
6.1.04.03	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0	21.463.000.000	21.463.000.000	100%
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**245.114.451.126**	**268.241.460.955**	**23.127.009.829**	**9%**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**1.751.075.000**	**5.022.890.000**	**3.271.815.000**	**187%**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0	4.379.000.000	4.379.000.000	100%
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	0	4.379.000.000	4.379.000.000	100%
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1.751.075.000	643.890.000	-1.107.185.000	63%
6.2.03.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	1.751.075.000	643.890.000	-1.107.185.000	63%
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**1.751.075.000**	**5.022.890.000**	**3.271.815.000**	**187%**

Sumber: Peraturan Bupati Gresik Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2022

BAB III
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Kemandirian Pemerintah Daerah untuk mengelola sumber daya daerah dalam meningkatkan kesejahteraan umum merupakan akibat dari penyelenggaraan pemerintahan yang berazaskan desentralisasi. Sejalan dengan azas desentralisasi sebagaimana dimaksud. Pemerintah Kabupaten Gresik menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2022 . penyelenggaraan urusan pemerintahan disajikan dengan substansi pokok sebagaimana berikut:

1. Capaian Kinerja Utama (Tujuan) dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022 berlandaskan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026;
2. Penyelenggaraan urusan dan program pembangunan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 yang mengelompokkan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yaitu urusan wajib pelayanan dasar. urusan wajib non pelayanan dasar. urusan pilihan. dan urusan penunjang;
3. Nomenklatur Perangkat Daerah berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

4. Penyelenggaran Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Adapun penilaian capaian indikator kinerja RPJMD tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tentang Tata Cara Perencanaan. Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. sedangkan formulasi dan skala nilai peringkat kinerja dirumuskan sebagai berikut:

Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian indikator kinerja yang semakin baik. maka untuk menghitung persentase pencapaian kinerja digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} : \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Namun. apabila diasumsikan bahwa semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya pencapaian kinerja. maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} : \frac{\text{Rencana}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

Berdasarkan perhitungan persentase capaian kinerja dapat ditetapkan peniaian realisasasi kinerja berdasarkan kriteria sesebagai berikut:

Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

3.1Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran

3.1.1 Indikator Tujuan

3.1.1.1 Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Gresik sebagaimana Penilaian Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/973/RB.06/2022 tentang Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022, Kabupaten Gresik memperoleh nilai 68,93 dengan predikat B. Dalam catatan kemenpan RB diharapkan agar pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik perlu lebih masif khususnya di tingkat Perangkat Daerah.

Tabel 3.2 Indeks Reformasi Birokrasi

Uraian	2020	2021	2022			
			Target	Realisasi	Capaian	Nilai
Indeks Reformasi Birokrasi	69.40	69.47	74.62	68.93	92.37%	ST

Sumber : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB

Jika dibandingkan dengan tahun 2021, terdapat beberapa peningkatan hasil antara lain indeks sistem merit, kualitas kebijakan dan penilaian ASN yang profesional, kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa, kualitas pelayanan publik, maturitas SPIP dan kualitas pengelolaan arsip. Namun Indeks SPBE dan Kepatuhan

Standar Pelayanan Publik Kabupaten Gresik mengalami penurunan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3 Rincian Evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Gresik

No	Komponen Penilaian	Bobot	2020	2021	2022
A.	Komponen Pengungkit				
1	Pemenuhan	20	11.74	13.21	12.98
2	Hasil Antara Area Perubahan	10	5.21	5.55	6.56
3	Reform	30	18.91	19.28	16.86
	Total Komponen Pengungkit	**60**	**35.85**	**38.04**	**36.40**
B.	Komponen Hasil				
1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10	8.65	8.69	8.71
2	Kualitas Pelayanan Publik	10	8.78	8.90	9.43
3	Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	10	9.30	8.09	8.16
4	Kinerja Organisasi	10	6.82	5.75	6.23
	Total Komponen Hasil	40.00	33.54	31.43	32.53
Indeks Reformasi Birokrasi		**100.00**	**69.40**	**69.47**	**68.93**

Sumber : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pemerintah Kabupaten Gresik telah melakukan upaya perbaikan dan tindak lanjut rekomendasi yang telah disampaikan Kemenpan RB pada tahun sebelumnya. diantaranya sebagai berikut:

1. Melakukan MOU dengan BsrE terkait dengan tanda tangan digital dan dimanfaatkan pada aplikasi Srikandi milik Pemerintah Kabupaten Gresik
2. Menetapkan kebijakan terkait dengan Manajemen Talenta dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 28 Tahun 222 tentang Manajemen Talenta PNS di Lingkungan pemerintah Kabupaten Gresik
3. Melakukan Perubahan Kebijakan tentang Pemberian tambagan Penghasilan Pegawai (TPP) dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022

4. Meningkatkan Pemahaman unit Kerja tentang Pembangunan Zona Integritas dengan Cara Sosialisasi dan Bimbingan Teknis terkait dengan manajemen Resiko.

   Jika diliat dari Gambar berikut. penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Gresik Pada Tahun 2022 turun signifikan jika dibandingkan dengan 2 (dua) Tahun terakhir.

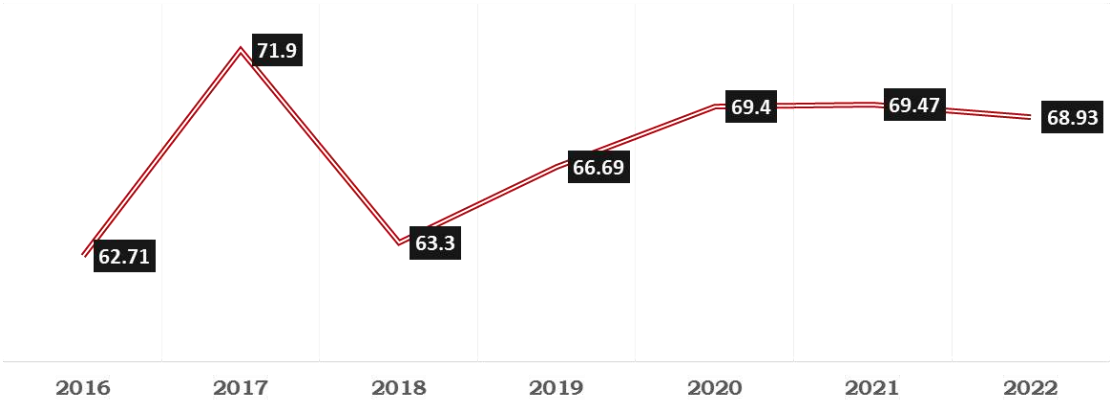

Sumber : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB

Gambar 3. 1 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Gresik Tahun 2016-2022

Upaya peningkatan Reformasi Birokrasi. masih mendapatkan catatan yang masih harus diperhatikan dalam rangka mengoptimalkan program reformasi birokrasi dianataranya sebagai berikut:

1. Dalam Manajemen Perubahan:
   a. Data dukung yang dilampirkan masih didominasi dokumen Tahun 2021 termasuk monitoring dan evaluasi rencana kerja Reformasi Birokrasi. padahal rencana kerja akan dievaluasi adalah rencana tahun berjalan
   b. Penentuan quick wins mandiri pada dokumen Road Map RB Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024 masih bersifat normatif dan belum menggambarkan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam waktu cepat sesuai dengan kebutuhan dan isu strategis yang sedang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Gresik

   c. Peran agen perubahan dalam mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi belum optimal. hal ini terlihat dari belum adanya data dukung pada area reform yang memperlihatkan keterkaitan antara agen perubahan dengan inovasi atau perubahan yang diinisiasi oleh masing masing agen perubahan.
2. Proses reviu dan identifikasi akan kebijakan yang telah diterbitkan Kabupaten Gresik masih sebatas satu tahun ke belakang. sehingga belum dapat dipastikan seluruh kebijakan yang diterbitkan tidak bersifat menghambat. tumpang tindih atau tidak harmonis. Selain itu. peta keterkaitan kebijakan yang baru terbit dengan kebijakan lainnya belum disusun.
3. Struktur Organisasi Belum berdasarkan peta Proses Bisnis yang telah disusun dikarenakan proses bisnis baru disusun setelah adanya penyederhanaan birokrasi.
4. Peta Proses Bisnis ditingkat Pemerintah Daerah belum seluruhnya dijabarkan dalam bentuk Standart Operasional Prosedur (SOP) dan belum dilakukan monitoring dan evaluasi atas implementasinya
5. Dalam upaya untuk melaksanakan sisten merit. telah dilaksanakan assessment kepada pegawai. namun hanya pada tingkat pimpinan Perangkat Daerah. Kebijakan terkait manajemen talenta telah disusun tetapi belum terlihat implementasinya;
6. Perencanaan kinerja belum terbangun dengan baik. khususnya di Perangkat Daerah. hal ini disebabkan oleh penjenjangan kinerja yang disusun belum sepenuhnya manggambarkan kerangka berpikir logis untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi.
7. Pemerintah Kabupaten Gresik telah membuat seluruh kebijakan terkait pengawasan internal dan telah juga dilakukan sosialisasi. akan tetapi belum dilakukan pengukuran terkait dengan tingkat pemahaman seluruh pegawai terhadap kebijakan tersebut untuk mengetahui sejauh mana tahap implementasinya.

8. Pada tahun 2022 belum terdapat unit kerja dari Kabupaten Gresik yang mendapatkan predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
9. Kebijakan terkait dengan sistem Pemberian Kompensasi bila layanan tidak sesuai standart bagi penerima layanan di seluruh jenis layanan belum diterapkan pada sekuruh Perangkat Daerah.

3.1.1.2 Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakuka noleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Berdasarkan Publikasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Nilai IDSD Kabupaten Gresik memperoleh nilai 3.42.

Tabel 3. 4 Indeks Daya Saing Daerah

Uraian	2020	2021	2022			
			Target	Realisasi	Capaian	Nilai
Indeks Daya Saing Daerah	2.68	2.58	4.00	3.42	85.50%	T

Sumber : Deputi Pemanfaatan Riset Dan Inovasi Tahun 2022

Kerangka pengukuran IDSD 2022 mengacu kepada Global Competitiveness Index (GCI) 2019 (WEF.2019). yang terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing. lingkungan pendukung. sumber daya manusia. pasar. dan ekosistem inovasi. Keempat komponen tersebut ditopang oleh 12 pilar daya saing sebagaimana berikut:

Pilar 1	Institusi	Pilar 7	Pasar Produk
Pilar 2	Infrastruktur	Pilar 8	Pasar Tenaga Kerja
Pilar 3	Adopsi TIK	Pilar 9	Sistem Keuangan
Pilar 4	Stabilitas Ekonomi Makro	Pilar 10	Ukuran Pasar
Pilar 5	Kesehatan	Pilar 11	Dinamisme Bisnis
Pilar 6	Keterampilan	Pilar 12	Kapabilitas Inovasi

Adapun IDSD Tahun 2022 Nasional memperoleh nilai 3.26; Provinsi Jawa Timur 3.74 dan Kabupaten Gresik berada pada peringkat 4 tertinggi di Provinsi Jawa Timur setelah Surabaya. Kota Malang dan Sidoarjo dengan nilai IDSD 3.42 sebagaimana berikut:

Tabel 3. 5 Aspek Penilaian Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022

Rangking	Kabupaten/Kota	Lingkungan Pendukung				SDM		Pasar			Ekosistem Inovasi			Skor IDSD
		Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
	NASIONAL*	4.14	2.91	3.57	3.05	3.76	3.73	2.68	3.73	2.66	1.31	5.00	2.62	3.26
	PROVINSI JAWA TIMUR	4.07	3.60	3.90	3.88	3.83	3.50	2.18	3.31	3.14	3.88	5.00	4.54	3.74
1	SURABAYA	4.32	3.04	4.92	4.08	4.15	3.95	4.53	2.94	2.10	5.00	5.00	4.74	4.06
2	KOTA MALANG	4.74	3.21	3.80	3.56	4.08	4.02	4.12	3.65	2.37	3.50	5.00	4.93	3.91
3	SIDOARJO	4.52	3.54	3.62	3.77	4.15	4.03	2.29	2.80	1.73	5.00	5.00	3.45	3.66
4	GRESIK	4.72	2.46	3.44	3.99	4.08	3.53	1.73	2.13	1.98	5.00	5.00	3.05	3.42
5	KOTA BLITAR	4.68	2.21	3.67	2.65	4.15	3.74	5.00	3.71	3.60	0.32	5.00	2.30	3.42
6	KAB. MALANG	4.22	2.61	3.19	3.51	4.08	3.00	3.19	1.91	2.96	4.50	5.00	1.98	3.35
7	BANYUWANGI	4.25	1.96	3.05	3.59	3.92	3.09	2.55	2.56	4.03	3.64	5.00	1.73	3.28
8	KOTA MOJOKERTO	4.59	1.66	3.61	2.63	4.08	4.12	5.00	3.66	2.32	0.33	5.00	2.10	3.26
9	KAB. MOJOKERTO	4.34	1.61	3.16	3.70	4.08	3.27	1.83	1.91	3.10	3.95	5.00	2.82	3.23
10	JOMBANG	4.41	1.63	3.18	2.92	4.00	3.29	3.43	2.89	3.28	1.87	5.00	2.67	3.21
11	JEMBER	3.89	2.25	2.81	3.15	3.77	2.65	2.70	2.42	2.45	3.59	5.00	3.59	3.19
12	TULUNGAGUNG	4.30	2.06	3.27	3.10	4.15	3.15	3.17	3.06	3.64	1.80	5.00	1.42	3.18
13	KAB. PASURUAN	4.30	2.96	2.92	4.04	3.85	3.00	1.42	1.85	1.74	5.00	5.00	2.04	3.18
14	LAMONGAN	4.77	1.91	3.12	3.09	4.00	3.23	3.01	2.40	3.45	1.83	5.00	1.91	3.14
15	KOTA PROBOLINGGO	4.53	1.98	3.40	2.61	3.85	3.69	4.77	2.80	2.76	0.55	5.00	1.46	3.12
16	KOTA PASURUAN	4.41	2.30	3.57	2.31	4.00	3.53	4.71	3.23	1.61	0.39	5.00	2.30	3.11
17	PONOROGO	4.47	1.46	3.33	2.16	4.08	2.98	3.66	2.73	3.96	0.96	5.00	2.45	3.10
18	KAB. KEDIRI	4.23	2.34	3.09	2.97	4.08	2.80	3.07	2.29	3.66	1.93	5.00	1.80	3.10
19	BOJONEGORO	4.43	1.46	3.09	2.87	4.00	2.79	1.52	2.44	3.69	4.32	5.00	1.61	3.10
20	KAB. MADIUN	4.57	1.73	3.16	2.84	3.92	2.96	4.02	3.26	3.94	0.88	5.00	0.80	3.09
21	NGAWI	4.66	1.93	3.11	2.63	4.00	2.83	3.30	2.84	3.66	0.91	5.00	1.32	3.02

Rangking	Kabupaten/Kota	Lingkungan Pendukung				SDM			Pasar			Ekosistem Inovasi		Skor IDSD
		Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
22	NGANJUK	4.32	2.15	2.94	2.95	4.00	2.86	2.99	2.77	3.58	1.22	5.00	1.30	3.01
23	KAB. BLITAR	4.34	1.45	3.38	3.04	4.15	2.92	2.86	2.39	4.06	1.69	5.00	0.56	2.99
24	SITUBONDO	4.65	2.07	2.67	2.81	3.77	3.10	2.86	2.32	3.81	0.90	5.00	1.78	2.98
25	PAMEKASAN	4.34	2.16	2.96	2.73	3.69	2.91	3.86	2.88	1.49	0.75	5.00	1.60	2.86
26	SUMENEP	4.28	3.51	2.78	2.90	4.00	2.69	2.14	2.29	1.55	1.58	5.00	1.45	2.85
27	TRENGGALEK	4.58	2.04	3.20	2.17	4.15	2.94	2.96	2.50	2.64	0.85	5.00	1.04	2.84
28	PACITAN	4.24	1.52	2.86	2.17	4.00	2.93	3.14	2.33	3.54	0.73	5.00	1.22	2.81
29	LUMAJANG	4.37	1.48	2.85	2.96	3.85	2.60	2.27	2.23	3.33	1.48	5.00	1.29	2.81
30	KAB. PROBOLINGGO	4.48	1.99	2.78	2.90	3.62	2.82	2.09	1.98	2.70	1.55	5.00	1.57	2.79
31	BONDOWOSO	4.41	2.08	2.71	2.74	3.62	2.85	2.50	2.44	3.08	0.91	5.00	1.00	2.78
32	BANGKALAN	4.14	1.49	2.96	2.13	3.85	2.42	2.65	2.71	1.20	1.13	5.00	2.23	2.66
33	MAGETAN	4.60	-	3.19	2.74	4.08	3.04	3.37	3.23	4.75	0.88	5.00	0.99	-
34	TUBAN	4.26	-	3.05	3.44	4.00	2.64	2.14	2.06	3.14	2.89	5.00	1.57	-
35	SAMPANG	4.42	2.12	2.92	2.26	3.69	2.38	2.52	-	1.06	0.92	5.00	0.98	-
36	KOTA KEDIRI	4.41	-	3.67	3.52	4.15	3.84	1.03	3.11	3.21	5.00	5.00	3.44	-
37	KOTA MADIUN	4.74	-	3.74	2.94	4.08	4.00	5.00	4.01	3.60	0.71	5.00	3.61	-
38	BATU	-	1.57	3.38	2.90	4.08	3.57	4.51	2.69	3.77	0.75	5.00	1.60	-

Sumber : Deputi Pemanfaatan Riset Dan Inovasi Tahun 2022

Keterangan :

Pilar 1	Institusi	Pilar 4	Stabilitas Ekonomi Makro	Pilar 7	Pasar Produk	Pilar 10	Ukuran Pasar
Pilar 2	Infrastruktur	Pilar 5	Kesehatan	Pilar 8	Pasar Tenaga Kerja	Pilar 11	Dinamisme Bisnis
Pilar 3	Adopsi TIK	Pilar 6	Keterampilan	Pilar 9	Sistem Keuangan	Pilar 12	Kapabilitas Inovasi

3.1.1.3 Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan publikasi BPS, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik selama 5 tahun terakhir menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Selama masa pandemi, perekonomian Kabupaten Gresik cenderung mengalami penurunan, di tahun 2019 Pertumbuhan Ekonomi mengalami penurunan sebesar 0,39% dari tahun 2018. Penurunan drastis kembali terjadi pada tahun 2020 mencapai -3,68%. Hal ini kemudian menjadikan nilai pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik sangat rendah. Publikasi BPS Pada Tahun 2021 menunjukkan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gresik berangsur kembali pulih dengan nilai pertumbuhan ekonomi Tahun 2021 sebesar 3.79.

Tabel 3.6 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gresik

Uraian	2020	2021	2022			
			Target	Realisasi	Capaian	Nilai
Pertumbuhan Ekonomi	-3,68%	3.79	2-3	7,38	246%	ST

Sumber : BPS Kabupaten Gresik Tahun 2023

Pada Tahun 2021 Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik Tumbuh diatas Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur sebesar 3.57%. dibanding target yang hanya sebesar 0,5-1% ,capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik menunjukkan hasil yang positif sebesar 357% dengan nilai Sangat Tinggi. Sedangkan untuk Tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik naik sebesar 3,59 poin sebesar 7,38 dari tahun 2021, dengan capaian 246% terhadap target yang telah ditetapkan.

Sumber: BPS Gresik Tahun 2023

Gambar 3.2 Pertumbuhan Ekonomi Nasional. Provinsi dan Kabupaten Gresik

3.1.1.4 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat upaya dan kinerja pembangunan manusia di suatu wilayah yang juga merupakan salah satu tujuan nasional dalam RPJMN Tahun 2019-2024 yaitu menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul untuk Indonesia Maju. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: (i) Umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), (ii) Pengetahuan (knowledge), dan (iii) Standar hidup layak (decent standard of living). Sebagaimana publikasi BPS Kabupaten Gresik Tahun 2022, IPM Kabupaten Gresik memperoleh nilai 77,16 atau naik jika dibandingkan dengan IPM Tahun 2021 sebesar 76,50.

Tabel 3.7 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gresik Tahun 2020 sd 2022

Uraian	2020	2021	2022			
			Target	Realisasi	Capaian	Nilai
Indeks Pembangunan Manusia	76,10	76,50	78,31	77,16	98,53%	ST

Sumber : BPS Kabupaten Gresik Tahun 2023

Terlihat bahwa sejak 2013, IPM Kabupaten Gresik menunjukkan tren yang terus meningkat. Pada tahun 2013, IPM Kabupaten Gresik masih berada pada angka 72,47 poin. Dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun, IPM Kabupaten Gresik mampu mencapai angka 77.16 poin pada tahun 2022. Hal ini berarti program pemerintah Kabupaten Gresik baik di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi telah dirasakan dampak positifnya oleh masyarakat sebagai objek pembangunan. Kebijakan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran per kapita cukup baik. Kondisi selain menjadi prestasi, juga menjadi tantangan tersendiri bagi Kabupaten Gresik agar dapat terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

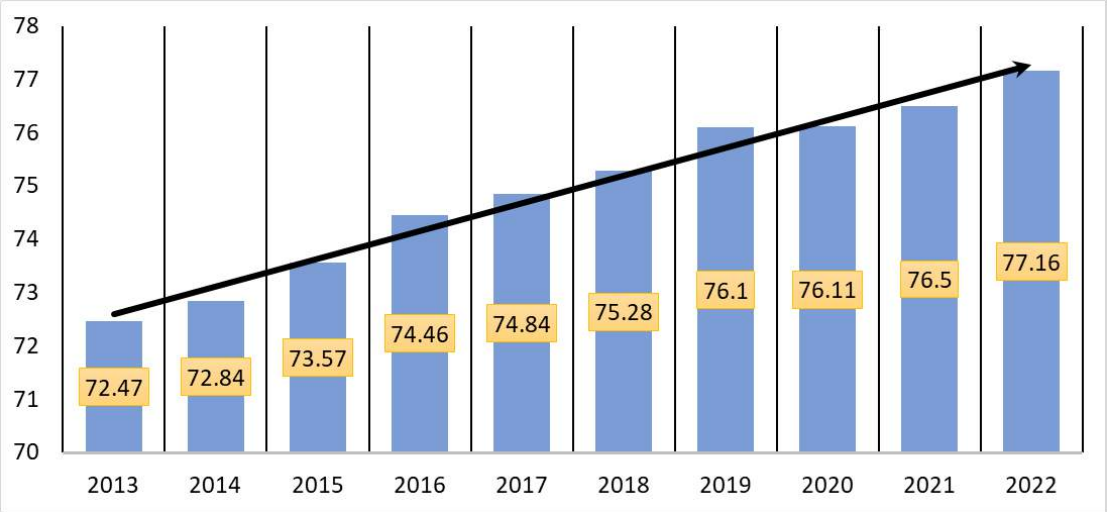

Sumber: BPS Kabupaten Gresik Tahun 2023

Gambar 3.3 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gresik Tahun 2011 sd 2022

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gresik selalu diatas rerata Provinsi Jawa Timur dan Nasional selama 3 (tiga) tahun terakhir. Pada tahun 2022 IPM Kabupaten Gresik berada diatas IPM Provinsi Jawa Timur 72,75 dan Nasional 72,91.

Tabel 3.8 Indeks Pembangunan Manusia Nasional. Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020 sd 2022

Sumber: BPS Nasional Tahun 2023

3.1.1.5 Tingkat Kemiskinan

Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gresik pada tahun 2022 mencapai 11.06 dibandingkan kondisi baseline tahun 2020 sebesar 12.40. Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2021 melampaui target yang ditetapkan 11.5-10.8. Tingkat Kemiskinan (P0) adalah persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemisikinan. Pengukuran tingkat kemiskinan merupakan data makro

sedangkan sebaran penduduk miskin secara by name by address merupakan data mikro berdasarkan Basis Data terpadu Tahun 2015 atau yang telah berubah menjadi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Tingkat kemiskinan suatu daerah dapat dipengaruhi oleh indeks kedalaman kemiskinan (P1), indeks keparahan kemiskinan (P2), namun turunnya P0 tidak selalu disertai dengan penurunan P1 dan P2. Itulah mengapa memperhatikan pergerakan P1 dan P2 antar waktu juga diperlukan untuk melakukan analisis apakah turunnya tingkat kemiskinan disertai dengan semakin sejahteranya penduduk yang masih miskin.

Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gresik pada tahun 2022 mencapai 11,06 dibandingkan kondisi baseline tahun 2020 sebesar 12,40. Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2021 melampaui target yang ditetapkan 11,5-10,8.

Tabel 3.9 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2020 s.d. 2022

Uraian	2020	2021	2022			
			Target	Realisasi	Capaian	Nilai
Tingkat Kemiskinan	12.4	12.42	11.5-10.8	11.06	100%	ST

Sumber : BPS Kabupaten Gresik Tahun 2023

Perumusan strategi dan program penanggulangan kemiskinan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota. Jika dibandingkan dengan Tingkat Kemiskinan Nasional dan Provinsi Jawa Timur, Persentase Tingkat kemiskinan di Kabupaten Gresik cenderung lebih tinggi, namun Pencapaian di Tahun 2022 merupakan pencapaian terbaik sebagaimana gambar berikut:

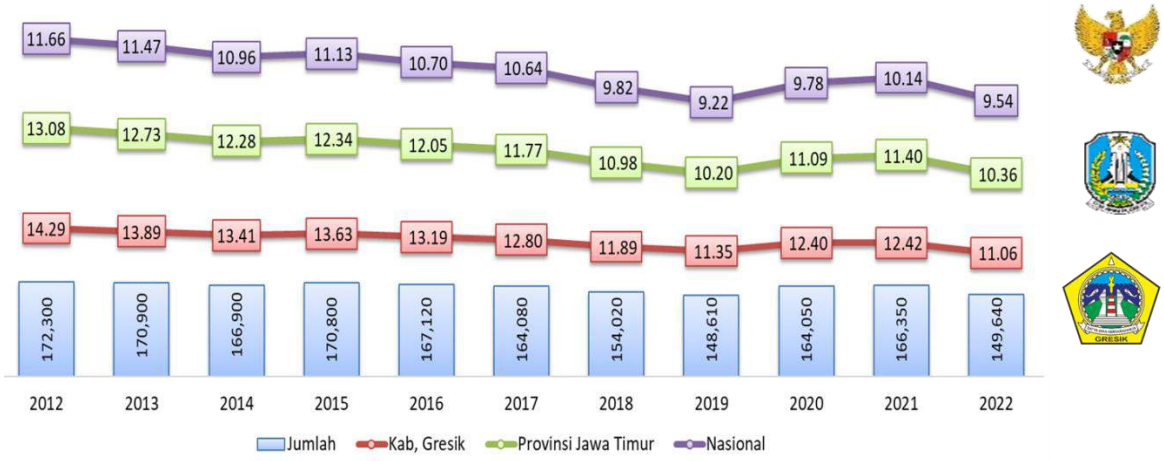

Sumber: BPS Kabupaten Gresik Tahun 2023

Gambar 3.4 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gresik 10 (Sepuluh) Tahun terakhir

Berikut ini merupakan Perkembangan Penduduk Miskin pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 dengan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2022 149.640 (Ribu Jiwa).

Tabel 3.10 Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Gresik Tahun 2016-2022

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2016	167.120	13.19
2017	164.080	12.80
2018	154.020	11.89
2019	148.610	11.35
2020	164.050	12.40
2021	166.350	12.42
2022	149.640	11.06

Sumber: BPS Kabupaten Gresik Tahun 2023

Pada tahun 2022, persentase penduduk miskin menurun 1,36% dibandingkan dengan tahun 2021 karena program yang dilaksanakan oleh Kabupaten Gresik dalam penanggulangan kemiskinan tepat sasaran dengan strategi intervensi penurunan dan pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan penurunan kantong-kantong kemiskinan. Berbagai program yang telah dilaksanakan antara lain program perbaikan rumah tidak layak huni; program bantuan sosial siswa miskin; program PKH inklusif; program Universal Health

Coverage (UHC); program santunan yatim piatu dan janda miskin; program beasiswa untuk mahasiswa kurang mampu, huffadz, dan prestasi.

3.1.1.6 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Tabel 3.11 Pengangguran Terbuka Kabupaten Gresik Tahun 2020 sd 2022

Uraian	2020	2021	2022			
			Target	Realisasi	Capaian	Nilai
Tingkat Pengangguran Terbuka	8.21	8.00	7.2	7.84	91.84%	ST

Sumber : BPS Kabupaten Gresik Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gresik pada tahun 2022 mencapai 7,84 angka ini lebih rendah 0,16 dari realisasi tahun 2021 sebesar 8,00 dan lebih rendah 0,37 dari realisasi tahun 2020. Hal ini mengisyaratkan bahwa pengangguran di Kabupaten Gresiksetiap tahun semakin berkurang.

Tabel 3. 12 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional. Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/ kota di Jawa Timur

No	Kabupaten/Kota Se Jawa Timur	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Timur (Persen)		
		2020	2021	2022
	Nasional	**10.19**	**8.71**	**6.32**
	Jawa Timur	**5.84**	**5.74**	**5.49**
1.	Kabupaten Pacitan	2.28	2.04	3.65

No	Kabupaten/Kota Se Jawa Timur	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Timur (Persen)		
		2020	2021	2022
	Nasional	**10.19**	**8.71**	**6.32**
2.	Kabupaten Ponorogo	4.45	4.38	5.51
3.	Kabupaten Trenggalek	4.11	3.53	5.37
4.	Kabupaten Tulungagung	4.61	4.91	6.65
5.	Kabupaten Blitar	3.82	3.66	5.45
6.	Kabupaten Kediri	5.24	5.15	6.83
7.	Kabupaten Malang	5.49	5.40	6.57
8.	Kabupaten Lumajang	3.36	3.51	4.97
9.	Kabupaten Jember	5.12	5.44	4.06
10.	Kabupaten Banyuwangi	5.34	5.42	5.26
11.	Kabupaten Bondowoso	4.13	4.46	4.32
12.	Kabupaten Situbondo	3.85	3.68	3.38
13.	Kabupaten Probolinggo	4.86	4.55	3.25
14.	Kabupaten Pasuruan	6.24	6.03	5.91
15.	Kabupaten Sidoarjo	10.97	10.87	8.80
16.	Kabupaten Mojokerto	5.75	5.54	4.83
17.	Kabupaten Jombang	7.48	7.09	5.47
18.	Kabupaten Nganjuk	4.80	4.98	4.74
19.	Kabupaten Madiun	4.80	4.99	5.84
20.	Kabupaten Magetan	3.74	3.86	4.33
21.	Kabupaten Ngawi	5.44	4.25	2.48
22.	Kabupaten Bojonegoro	4.92	4.82	4.69
23.	Kabupaten Tuban	4.81	4.68	4.54
24.	Kabupaten Lamongan	5.13	4.90	6.05
25.	Kabupaten Gresik	8.21	8.00	7.84
26.	Kabupaten Bangkalan	8.77	8.07	8.05
27.	Kabupaten Sampang	3.35	3.45	3.11
28.	Kabupaten Pamekasan	3.49	3.10	1.40
29.	Kabupaten Sumenep	2.84	2.31	1.36
30.	Kota Kediri	6.21	6.37	4.38
31.	Kota Blitar	6.68	6.61	5.39
32.	Kota Malang	9.61	9.65	7.66
33.	Kota Probolinggo	6.70	6.55	4.57
34.	Kota Pasuruan	6.33	6.23	6.18
35.	Kota Mojokerto	6.74	6.87	5.05
36.	Kota Madiun	8.32	8.15	6.39
37.	Kota Surabaya	9.79	9.68	7.62
38.	Kota Batu	5.93	6.57	8.43

Sumber : BPS Jawa Timur Tahun 2023

Sumber: BPS Nasional Tahun 2023

Gambar 3.5 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/ kota di Jawa Timur

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Gresik masih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dengan nilai 5,49 dan dibandingkan dengan Nasional dengan nilai 6,32. Beberapa langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik dalam mengurangi jumlah pengangguran diantaranya memberikan pelatihan bagi para pencari kerja. Pelatihan yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja memiliki dua kategori diantaranya pelatihan dengan uji kompetensi dan pelatihan non uji kompetensi. Pelatihan yang memiliki uji kompetensi memiliki output sertifikat yang dikeluarkan oleh BNSP/Kemnaker, sedangkan pelatihan yang non uji kompetensi dilaksanakan secara internal di perusahaan khusus untuk program pemagangan dalam negeri yang nantinya peserta yang lolos akan melanjutkan untuk magang lalu setelah masa evaluasi akan diterima sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Pelatihan uji kompetensi dilaksanakan dengan tujuan memenuhi industri dan pasar kerja, sedangkan pelatihan non uji kompetensi dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan keterampilan, dan keahlian dengan cara kewirausahaan (entepreneur).

Pelatihan dengan uji kompetensi yang diselenggarakan oleh UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Tenaga Kerja selama tahun 2022 sebanyak 16 kejuruan, diantaranya Ahli K3 Umum; Operator Scaffolding; Operator Excavator; teknis Instalasi Listrik; Desain

Grafis; Bahasa Jepang; Bakery; Teknik Instalasi Listrik Rumah Tangga; Barista; Barber; Barista (Mobile Training Unit); Junior Administrative Assistant (Mobile); Customer Service (Mobile Training Unit); Pembuatan Roti dan Kue; K3 Konstruksi; dan Administrasi Perkantoran dengan total 323 peserta. Pelatihan non uji kompetensi diantaranya operator mekanik, operator elektrik, operator produksi, operator pemesinan. Selain memberikan pelatihan, upaya lainnya yakni dengan penempatan tenaga kerja disabilitas, pemberdayaan PMI purna, dan perluasan kesempatan kerja.

3.1.2 Indikator Sasaran

3.1.2.1 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Indeks SPBE merupakan suatu nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Indeks SPBE Kabupaten Gresik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Gresik Tahun 2020 s.d. 2022

Uraian	2020	2021	2022			
			Target	Realisasi	Capaian	Nilai
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Eklektronik	2.55	3.31	3.19	3.27 (Baik)	102.51%	ST

Sumber : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tahun 2022

Pada Tahun 2022, Indeks SPBE Kabupaten Gresik mengalami penurunan sebesar 0.04 poin ke angka 3.27 dengan predikat "Baik" namun dapat melebihi target yang direncanakan sebesar 0.08 sehingga capaian yang dihasilkan memiliki nilai sangat tinggi. Secara rinci domain dan aspek yang menunjang penilaian indeks SPBE Kabupaten Gresik akan disajikan dalam gambar 3.6 dan tabel 3.14 sebagai berikut:

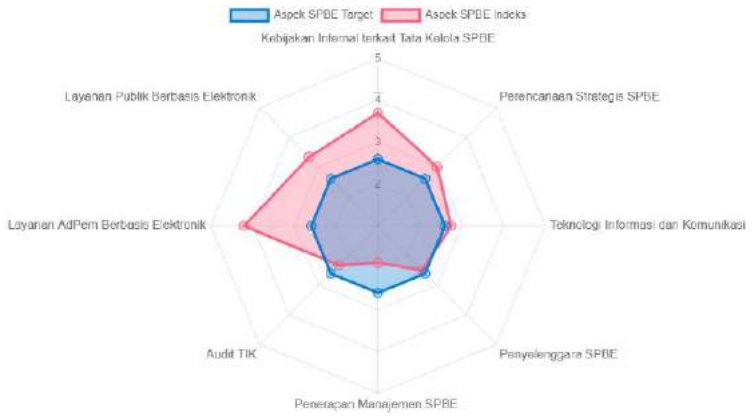

Sumber : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tahun 2022

Gambar 3. 6 Nilai Indeks SPBE. Domain. dan Aspek

Tabel 3.14 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2018 sd 2021

ASPEK INDEKS	2018	2019	2020	2021	2022
SPBE	2.56	3.14	3.18	3.31	3.27
Domain Kebijakan SPBE	**3.12**	**3.06**	**3.06**	**3.10**	**3.70**
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	3.12	3.06	3.06	3.10	3.70
Domain Tata Kelola SPBE	**1.29**	**1.86**	**2.00**	**2.90**	**2.80**

ASPEK INDEKS	2018	2019	2020	2021	2022
Penyelenggaraan SPBE	1.00	2.50	3.00	3.50	2.50
Perencanaan Strategis SPBE	1.00	1.00	1.00	2.75	3.00
Teknologi Informasi dan Komunikasi	1.67	2.00	2.00	1.00	2.75
Domain Layanan SPBE	**3.03**	**3.82**	**3.82**	**4.31**	**3.86**
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3.14	4.00	4.00	4.40	4.20
Layanan Publik Berbasis Elektronik	2.83	3.50	3.50	4.17	3.33
Domain Manajemen SPBE	**-**	**-**	**-**	**1.36**	**2.00**
Penerapan Manajemen SPBE	-	-	-	1.50	1.88

Sumber : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tahun 2022

Penilaian Indeks SPBE didasarkan pada beberapa Domain diantaranya Domain Kebijakan SPBE; Domain Tata Kelola SPBE; Domain Layanan SPBE; Domain Manajemen SPBE dan beberapa aspek yang menunjang domain tersebut. Dapat dilihat dari tabel di atas Domain Kebijakan SPBE dan Domain Manajemen SPBE mengalami kenaikan dibanding dengan tahun lalu. berbanding terbalik dengan penilaian pada Domain Kebijakan SPBE. Domain Tata Kelola SPBE yang cenderung mengalami penurunan nilai. Penurunan Indeks SPBE Kabupaten Gresik disebabkan oleh beberapa faktor. diantaranya:

1. Beberapa Indikator dibatasi nilai maksimal 3 dari 5 karena adanya kebijakan Tim Koordinasi SPBE Pusat;
2. OPD pemangku Indikator tidak menyertakan eviden dengan lengkap dan sesuai permintaan;
3. Penilaian Indeks SPBE 2022 tidak menggunakan interview (hanya pemantauan eviden) sehingga tidak ada kesempatan untuk perbaikan atau menjelaskan tentang eviden yang disampaikan;
4. Pemangku Indikator belum memasukkan target indikator SPBE menjadi Indikator Kinerja OPD.

3.1.2.2 Indeks Inovasi Daerah

Indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bentuk kebaruan didasarkan urusan dan kewenangan suatu pemerintahan daerah pada setiap tingkatnya.

Pengukuran dan penilaian Inovasi Daerah Tahun 2022 telah dilakukan secara berkesinambungan melalui tahapan penjaringan, pengukuran, presentasi Kepala Daerah dan validasi lapangan. Hasil penilaian Inovasi Daerah Tahun 2022 telah ditetapkan dalam Kemendagri No. 400.10.11-6301.A Tahun 2022 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2022.

Tabel 3.15 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 sd Tahun 2022

Uraian	2020	2021	2022			
			Target	Realisasi	Capaian	Nilai
Indeks Inovasi Daerah	N/A	43.04	40	48.4	121.0%	ST

Sumber : Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2022

Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Gresik mengalami kenaikan 5,36 poin dari tahun 2021 sebesar 43,04 dengan predikat Inovatif (dapat dilihat pada Tabel 3.16 dan mampu melampaui target tahun 2022 sebesar 8,40 sehingga capaian indeks inovasi daerah menjadi 48,40. Maka Dari itu, Capaian Tahun 2022 sebesar 121% dengan kategori Sangat Tinggi.

Tabel 3.16 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten di Jawa Timur Tahun 2022

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Kategori
	Provinsi Jawa Timur	**72.82**	
1	Kabupaten Banyuwangi	96.30	Sangat Inovatif
2	Kabupaten Situbondo	73.17	Sangat Inovatif
3	Kabupaten Pamekasan	69.95	Sangat Inovatif
4	Kabupaten Sampang	66.35	Sangat Inovatif
5	Kabupaten Malang	64.83	Sangat Inovatif
6	Kabupaten Sidoarjo	60.25	Sangat Inovatif

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Kategori
7	Kabupaten Lumajang	58.84	Inovatif
8	Kabupaten Jember	58.72	Inovatif
9	Kabupaten Lamongan	58.56	Inovatif
10	Kabupaten Ngawi	58.43	Inovatif
11	Kabupaten Bondowoso	58.09	Inovatif
12	Kabupaten Magetan	56.53	Inovatif
13	Kabupaten Trenggalek	56.38	Inovatif
14	Kabupaten Tuban	56.10	Inovatif
15	Kabupaten Pasuruan	55.73	Inovatif
16	Kabupaten Blitar	55.51	Inovatif
17	Kabupaten Mojokerto	55.25	Inovatif
18	Kabupaten Bojonegoro	54.96	Inovatif
19	Kabupaten Nganjuk	54.23	Inovatif
20	Kabupaten Pacitan	53.41	Inovatif
21	Kabupaten Bangkalan	52.68	Inovatif
22	Kabupaten Ponorogo	51.46	Inovatif
23	Kabupaten Sumenep	50.63	Inovatif
24	Kabupaten Kediri	50.37	Inovatif
25	Kabupaten Probolinggo	50.36	Inovatif
26	Kabupaten Tulungagung	49.27	Inovatif
27	Kabupaten Gresik	48.40	Inovatif
28	Kabupaten Jombang	47.04	Inovatif
29	Kabupaten Madiun	44.24	Inovatif

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11 – 6301.A TAHUN 2022

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan nilai Indeks Inovasi Daerah diantaranya melakukan pemetaan terhadap urusan yang memiliki nilai rendah, memberikan pendampingan dan sosialisasi terhadap perangkat daerah yang memiliki indeks rendah, dan melakukan pemenuhan data dukung terhadap penilaian indeks Inovasi Daerah.

3.1.2.3 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

Perkembangan pembangunan yang pesat membuat terjadinya perubahan lingkungan, kebutuhan dan kepuasan masyarakat. Pemerintah daerah dalam hal ini memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat terkait dengan kemampuan mereka untuk mengakses layanan infrastruktur yang ada. Pengukuran Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur secara berkala (1

tahun sekali) merupakan sarana evaluasi bagi pemerintah daerah untuk menilai seberapa baik pembangunan infrastruktur yang sudah berjalan.

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur memberikan informasi perspektif masyarakat secara obyektif, komprehensif dan kredibel, baik dalam aspek pembangunan fisik maupun aspek manfaat.

Tabel 3. 17 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kabupaten Gresik Tahun 2020 sd 2022

Uraian	2020	2021	2022			
			Target	Realisasi	Capaian	Nilai
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	N/A	87.39	89	89.04	100.04%	ST

Sumber : Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2023

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kabupaten Gresik pada Tahun 2022 mendapat nilai 89,04 dengan capaian 100.04%. Adapun Pengukuran Kepuasan Infrastruktur dilakukan melalui 7 Sektor meliputi:

1. Infrastruktur jalan
2. Infrastruktur Jembatan
3. Infrastruktur Transportasi Darat
4. Infrastruktur Jaringan Irigasi
5. Infrastruktur Air Bersih
6. Infrastruktur Perumahan dan Permukiman
7. Infrastruktur Ruang Publik

3.1.2.4 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas Lingkungan Hidup saat ini dimulai secara kuantitatif menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan (IKLH) yang diadopsi dari beberapa sumber diantaranya Environmental Performance Index

(EPI). Tiga indikator yang menjadi dasar penilaian IKLH di Indonesia saat ini mencakup aspek udara, air dan tutupan lahan. IKLH didapatkan dari parameter dan perhitungan sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Air Sungai (IKA)

   Indeks Kualitas Air menggambarkan kondisi kualitas air dari nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Lokasi pemantauan kualitas air harus memenuhi kriteria diantaranya mewakili sumber pencemar, pada outlet daerah aliran sungai utama, pada titik intake pengolahan air minum, pada danau waduk atau situ, dan atau pada aliran Badan Air kawasan hulu yang belum terpengaruh aktivitas manusia. Waktu dan frekuensi pengambilan data dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali pada setiap musim kemarau dan musim hujan. Pengambilan sampel harus mewakili hulu, tengah dan hilir dengan parameter pH, BOD, COD, TSS, DO, NO3, total Fosfat, total Nitrogen, fecal coliform, klorofil-a dan/atau transparansi.

   Perhitungan IKA Kabupaten Gresik didapatkan melalui 34 data hasil pemantauan kualitas air pada 16 (enam belas) titik pantau yang dianggap mewakili kualitas air di Kabupaten Gresik. Status mutu kualitas air dari 34 data tersebut, 31 diantaranya termasuk dalam tercemar ringan dengan nilai 45,59 dan 3 lainnya termasuk dalam tercemar sedang dengan nilai 2,65, sehingga IKA Kabupaten Gresik pada tahun 2022 adalah sebesar 48,24 dan termasuk dalam kategori kurang.

2. Indeks Kualitas Udara (IKU)

   Indeks Kualitas Udara didapatkan melalui pemantauan kualitas udara ambien di lokasi yang memenuhi kriteria daerah padat transportasi yang meliputi jalan utama dengan lalu lintas padat, daerah atau kawasan industri, pemukiman padat penduduk dan kawasan perkantoran yang tidak terpengaruh langsung transportasi pada parameter SO2 dan NO2. Waktu dan frekuensi pengambilan data udara

ambien tergantung pada alat pengambilan sampel, jika menggunakan alat manual pasif maka dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali pada setiap musim selama 14 (empat belas) hari atau dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali pada setiap musim selama 7 (tujuh) hari, jika menggunakan alat manual aktif dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan, selama 24 (dua puluh empat) jam.

Perhitungan IKU Kabupaten Gresik didapatkan melalui 9 data terverifikasi pada 4 (empat) titik pantau pada kawasan pemukiman, industri, perkantoran dan transportasi menggunakan metode passive sampler. Dari hasil pemantauan tersebut, IKU Kabupaten Gresik Tahun 2022 adalah sebesar 81,03 dan termasuk dalam kategori baik.

3. Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Indeks Kualitas Tutupan Lahan menggambarkan kualitas tutupan lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan pada kawasan hutan dan areal penggunaan lain. Pengambilan data untuk tutupan lahan dilakukan menggunakan citra satelit dan/atau foto udara. Dalam rumus perhitungan kualitas tutupan lahan, dibutuhkan luasan tutupan lahan berikut:

1. Hutan lahan kering primer, hutan rawa primer, hutan mangrove primer, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa sekunder, hutan mangrove sekunder, dan hutan tanaman.
2. Semak/belukar dan semak/belukar rawa, yang berada di kawasan hutan, sempadan sungai, sekitar danau/waduk, sempadan pantai dan lahan kemiringan lereng > 25%.
3. Ruang terbuka hijau, seperti hutan kota, kebun raya, taman keanekaragaman hayati.
4. Rehabilitasi hutan dan lahan.

Berdasarkan hasil pemantauan terhadap ke-4 klasifikasi tutupan lahan di atas, Kabupaten Gresik memiliki

total tutupan lahan seluas 1.554,949 Ha yang terdiri dari taman kota seluas 25,852 Ha, hutan kota seluas 126,360 Ha, jalur hijau seluas 5,999 Ha, sempadan rel kereta api seluas 0,4 Ha, sempadan sungai seluas 1.157,31 Ha dan rehabilitasi hutan dan lahan seluas 239,028 Ha, sehingga didapatkan nilai IKL sebesar 32,86 yang termasuk dalam kategori kurang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, perhitungan awal indeks kabupaten/kota oleh Tim Pelaksana IKLH Provinsi melalui tahapan pemantauan dan/atau pengumpulan data, validasi data, input dan verifikasi, selanjutnya dilakukan perhitungan awal dengan rumusan berikut:

IKLH = (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL)

Berdasarkan tahapan perhitungan IKLH tersebut, capaian IKLH Kabupaten Gresik Tahun 2022 sebesar 58,15 dengan rincian IKA 48,24; IKU 81,03; IKL 32,86 dan termasuk dalam kategori sedang. Perbandingan target dan capaian IKLH Kabupaten Gresik tahun 2020 - 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.18 Indeks Kualitas Layanan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2020 sd 2022

lUraian	2020	2021	2022			
			Target	Realisasi	Capaian	Nilai
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	N/A	53.40	60.19	58.15 (Sedang)	96.61%	ST

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2023

IKLH Kabupaten Gresik tahun 2022 meningkat dibandingkan tahun 2021, karena terdapat peningkatan nilai IKU, namun terjadi penurunan pada nilai IKA dan IKL. Realisasi Indeks Kualitas Layanan Hidup Kabupaten Gresik turun 2,04 poin ke angka 58,15

dibandingkan dengan target 60,19 dengan capaian 96,61% dan kategori Sangat Tinggi. Nilai IKLH Kabupaten Gresik di berada pada posisi 32 dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur dan 393 dari 514 Kabupaten/Kota di Indonesia.

Oleh karena itu, sebagai upaya peningkatan nilai kualitas air dapat dilakukan berbagai upaya diantaranya meningkatkan pengawasan terhadap industri, meningkatkan jumlah titik pantau pada sungai yang belum terpantau, meningkatkan pelayanan terhadap IPAL domestik, meningkatkan pembinaan terhadap usaha skala kecil dan melakukan publikasi melalui media terkait pengendalian pencemaran air. Sedangkan untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai IKL, perlu menetapkan kebijakan dan peraturan dalam implementasi kegiatan yang mendukung pengendalian kerusakan lahan dan melakukan pengayaan serta pemeliharaan tutupan hutan dan RTH, serta melakukan inovasi bersama masyarakat dan stakeholder terkait untuk meningkatkan luas dan kualitas tutupan lahan.

3.1.2.5 Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung Gender Development Index (GDI) dan Human Development Indeks (HDI) pada tahun 2010. Perubahan metode ini merupakan penyesuaian dengan perubahan metodologi pada IPM. Selain sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya, IPG metode baru juga merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antar gender dalam pencapaian pembangunan manusia.

Kegunaan IPG adalah untuk melengkapi penghitungan IPM dengan memberikan informasi capaian pembangunan manusia menurut gender. IPG mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi juga mengungkapkan perbandingan

pencapaian antara laki-laki dan perempuan. Untuk menghitung IPG perlu menghitung IPM laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender dikatakan baik apabila nilainya mencapai angka 100 yang berarti semakin kecil kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki yang terjadi pada suatu wilayah.

Tabel 3.19 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Gresik Tahun 2020 sd Tahun 2022

Uraian	2020	2021	2022			
			Target	Realisasi	Capaian	Nilai
Indeks Pembangunan Gender	89,93	90,20	91,12	90,78	99,63%	ST

Sumber : BPS Jawa Timur Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Indeks Pembangunan Gender Kabupatan Gresik diperoleh nilai 90,78 lebih rendah dari target 91,12 sehingga capaian yang dihasilkan sebesar 99,63% dengan kategori Sangat Tinggi. Selain itu realisasi tahun 2022 lebih besar 0,58 poin dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 dan lebih besar 0,85 dibandingkan dengan realisasi tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2022 kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki yang terjadi pada Kabupaten Gresik semakin rendah

Tabel 3.20 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota di Jawa Timur lima tahun terakhir

No	Kab/Kota	Indeks Pembangunan Gender				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Gresik	90,05	89,72	89,93	90,20	90.78
2	Jawa Timur	90,91	90,77	91,07	91,67	92.08
3	Nasional	91,07	90,99	91,06	91,27	91.63

Sumber : BPS Jawa Timur Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Gresik masih lebih rendah 1,3 poin dibawah Provinsi Jawa Timur yang mana menyentuh angka 92,08 dan lebih rendah 0,85 poin dibawah nilai IPG Indonesia yakni pada angka 91,63. Hal ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Gresik kedepannya dalam mengevaluasi kesetaraan gender di Kabupaten Gresik agar semakin baik lagi.

3.1.2.6 Indeks Williamson

Indeks Williamson merupakan pendekatan untuk mengukur derajat ketimpangan antar wilayah berdasarkan PDRB perkapita. Indeks Williamson meneliti hubungan antar disparitas regional dengan tingkat pembangunan ekonomi, dengan menggunakan data ekonomi yang sudah maju dan ekonomi yang sedang berkembang, ditemukan bahwa selama tahap awal pembangunan, disparitas regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi di daerah – daerah tertentu. Pada tahap yang lebih matang dari pertumbuhan ekonomi tampak adanya keseimbangan antar daerah dan disparitas berkurang dengan signifikan.

Tabel 3. 21 Indeks Williamson Kabupaten Gresik Tahun 2020 sd Tahun 2022

Uraian	2020	2021	2022			
			Target	Realisasi	Capaian	Nilai
Indeks Williamson	N/A	48%	46%	48%	95,83%	ST

Sumber : Bappeda Gresik Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, Indeks Williamson Kabupaten Gresik mengalami nilai yang stagnan dari tahun 2021 yakni sebesar 48%. Realisasi tahun ini juga selisih 2% dari target 46% dengan capaian 95,83% dan nilai Sangat Tinggi.

3.1.2.7 Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian

Proses pertumbuhan ekonomi daerah ditunjukkan dengan menggunakan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sehingga tingkat perkembangan PDRB perkapita yang dicapai oleh masyarakat seringkali dijadikan ukuran kesuksesan suatu

daerah dalam mencapai cita-cita untuk menciptakan pembangunan ekonomi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu wilayah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.

Sektor pertanian menjadi tumpuan hidup sebagian masyarakat Kabupaten Gresik dengan wilayah luas yang meliputi daerah pedesaan dengan masyarakat yang hidup sebagai petani. Dengan perhitungan PDRB harga konstan selama 5 (lima) tahun terakhir, menunjukkan bahwa trend pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan yang positif.

Tabel 3. 22 PDRB atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (jutaan rupiah)

Kategori	Uraian	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.030.047,80	6.053.855,00	6.004.076,10	5.823.540,90	6.007.942,90
B	Pertambangan dan Penggalian	9.895.835,10	9.844.446,70	8.582.771,90	8.705.938,90	9.385.491,80
C	Industri Pengolahan	45.840.599,00	48.340.369,30	47.703.855,90	49.808.944,60	54.162.279,80
D	Pengadaan Listrik dan Gas	519.069,80	544.260,80	543.748,90	556.661,60	590.754,40
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	58.207,00	61.843,20	64.115,20	70.670,50	73.151,70
F	Konstruksi	9.072.388,70	9.893.280,70	9.234.800,10	9.418.460,40	9.929.737,40
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12.002.373,50	12.805.933,50	11.509.213,40	12.342.986,50	13.245.024,10

Kategori	Uraian	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
H	Transportasi dan Pergudangan	2.089.489,00	2.337.378,40	2.209.853,10	2.284.803,10	2.603.661,80
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.183.368,00	1.281.886,80	1.158.991,70	1.209.198,80	1.317.233,30
J	Informasi dan Komunikasi	4.304.842,80	4.722.777,70	5.113.944,10	5.470.630,10	5.687.882,40
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.039.844,10	1.084.152,30	1.075.747,50	1.079.421,70	1.102.431,70
L	Real Estate	1.263.119,30	1.362.855,20	1.383.876,80	1.445.483,10	1.527.524,10
M,N	Jasa Perusahaan	267.967,90	285.254,50	290.782,30	297.422,40	312.432,10
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.094.021,30	1.136.239,60	1.131.655,00	1.140.306,20	1.144.448,50
P	Jasa Pendidikan	822.069,30	891.618,20	916.567,10	937.052,60	939.419,00
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	375.926,50	405.459,30	441.850,60	462.545,00	452.582,60
R,S, T,U	Jasa lainnya	272.443,70	294.937,30	250.752,50	264.619,10	314.886,60
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	96.131.612,70	101.346.548,40	97.616.602,10	101.318.685,70	108.796.883,90
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO NON MIGAS		86.921.382,70	92.187.213,90	89.647.399,60	93.268.287,80	100.049.212,00
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO NON PEMERINTAHAN		95.037.591,40	100.210.308,80	96.484.947,10	100.178.379,60	107.652.435,50

Sumber: BPS Kabupaten Gresik Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa sektor pertanian menyumbang 5,52% dari total PDRB Kabupaten Gresik pada tahun 2022. Disamping itu, sektor pertanian juga merupakan pendapatan terbesar ke lima setelah industri pengolahan; perdagangan beras dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; konstruksi; dan pertambangan dan penggalian.

Tabel 3.23 Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2020 sd Tahun 2022

Uraian	2020	2021	2022			
			Target	Realisasi	Capaian	Nilai
Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian	3%	-3,01	4%-5%	3,17%	79,25%	T

Sumber : BPS Kabupaten Gresik Tahun 2023

Berdasarkan tabel tersebut di atas, pertumbuhan PDRB sektor Pertanian Kabupaten Gresik mengalami kenaikan yang signifikan 6,18 menuju 3,17% di tahun 2022, namun masih belum bisa melampaui target yang ditetapkan yakni 4%-5% sehingga capaian yang dihasilkan sebesar 79,25% dengan nilai Tinggi. Kenaikan realisasi PDRB sektor pertanian Kabupaten Gresik dipengaruhi oleh peningkatan produksi tanaman pangan dan holtikultura, tanaman perkebunan, dan produksi peternakan.

3.1.2.8 Indeks Pendidikan

Faktor pendidikan akan menjadi investasi penting untuk meningkatkan daya saing daerah di masa yang akan datang. Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan yang dilakukan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah adalah Indeks Pendidikan. Klasifikasi Indeks Pendidikan dihitung secara mandiri dengan mengadopsi interval IPM dengan kriteria sebagai berikut: Sangat Tinggi (>80), Tinggi (70-79), Sedang (60-79), Rendah (<60). Indeks Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2021 diperoleh nilai 73,41 dengan Kategori Tinggi. Indeks Tersebut didapatkan dari 6 Aspek Penilaian meliputi *Achievement outcomes, Subsequent achievement, Infrastructure, Human Resource, Social-Pedagogy Competency dan State Partially*.

Tabel 3.24 Indeks Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2020 sd Tahun 2022

Uraian	2020	2021	2022			
			Target	Realisasi	Capaian	Nilai
Indeks Pendidikan	N/A	73,41	79,8	78,9	98,87%	ST

Sumber : Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa Indeks Pendidikan Kabupaten Gresik mengalami trend yang cenderung naik selama 2 (dua) tahun terakhir, naik 5,5 poin ke angka 78,9 dibandingkan dengan tahun 2021 yakni 73,4. Realisasi Indeks Pendidikan tahun 2022 selisih sebesar 0,9 poin dibandingkan dengan

target semula 79,80 sehingga capaian yang dihasilkan sebesar 98,87% dengan kategori nilai Sangat Tinggi.

3.1.2.9 Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat

IPKM adalah kumpulan indikator kesehatan yang dapat dengan mudah dan langsung diukur untuk menggambarkan masalah kesehatan. Serangkaian indikator kesehatan ini secara langsung maupun tidak langsung dapat berperan meningkatkan umur harapan hidup yang panjang dan sehat. Prinsip umum indikator yang digunakan dalam penyusunan IPKM adalah sederhana, mudah, dapat diukur, bermanfaat, dipercaya, dan tepat waktu. Indikator-indikator terpilih dalam IPKM lebih menunjukkan dampak dari pembangunan kesehatan tahun sebelumnya dan menjadi acuan perencanaan program pembangunan kesehatan untuk tahun berikutnya.

Tabel 3.25 Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Gresik Tahun 2020 sd Tahun 2022

Uraian	2020	2021	2022			
			Target	Realisasi	Capaian	Nilai
Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	63,39	65,94	65,3	82,20	125,8%	ST

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun 2023

Dapat dilihat dari tabel di atas, bahwa realisasi Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Gresik mengalami kenaikan yang sangat signifikan di tahun 2022 sebesar 16,26 poin ke angka 82,20 sedangkan dibandingkan dengan target tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Gresik berhasil naik sebesar 16,90 poin sehingga capaian yang dihasilkan sebesar 125,88% dengan nilai Sangat Tinggi.

3.1.2.10 Prevalensi Stunting

Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas)

menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1995/MENKES/SK/XII/2010 adalah sebagai berikut:

1. Sangat pendek : Zscore <-3.0
2. Pendek : Zscore ≥- 3.0 s/d Zscore < -2.0

Indikator ini mengukur persentase anak balita yang tingginya dibawah ketinggian rata-rata penduduk acuan. Stunting pada anak-anak mencerminkan efek yang luas dari kekurangan gizi yang kronis dan menderita penyakit berulang yang disebabkan oleh latar belakang sosial dan ekonomi yang buruk. Stunting pada anak-anak dapat memiliki dampak serius pada perkembangan fisik. mental. dan emosional anak-anak. dan bukti menunjukkan bahwa efek dari stunting pada usia muda. khususnya pada perkembangan otak. sulit untuk memperbaikinya pada usia lanjut walaupun jika anak menerima gizi yang tepat. Selain itu anak yang mengalami stunting beresiko lebih besar menderita penyakit menular dan tidak menular pada usia dewasa seperti jantung. diabetes. dan penyakit pembuluh darah. Oleh karena itu. indikator ini menunjukan bahwa betapa pentingnya memberikan gizi yang cukup untuk anak-anak

Tabel 3.26 Prevalensi Stunting Kabupaten Gresik Tahun 2020 sd Tahun 2022

Uraian	2020	2021	2022			
			Target	Realisasi	Capaian	Nilai
Prevalensi Stunting	N/A	23	11-10	10.7	107%	ST

Sumber : Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Prevalensi Stunting Kabupaten Gresik tahun 2022 mengalami penurunan yang sangat signifikan sebesar 12,30 dibandingkan tahun 2021 yakni sebesar 23, dan berada di antara rentang target yang ditetapkan sebesar 11-10 sehingga menghasilkan capaian sebesar 107% dengan nilai Sangat Tinggi.

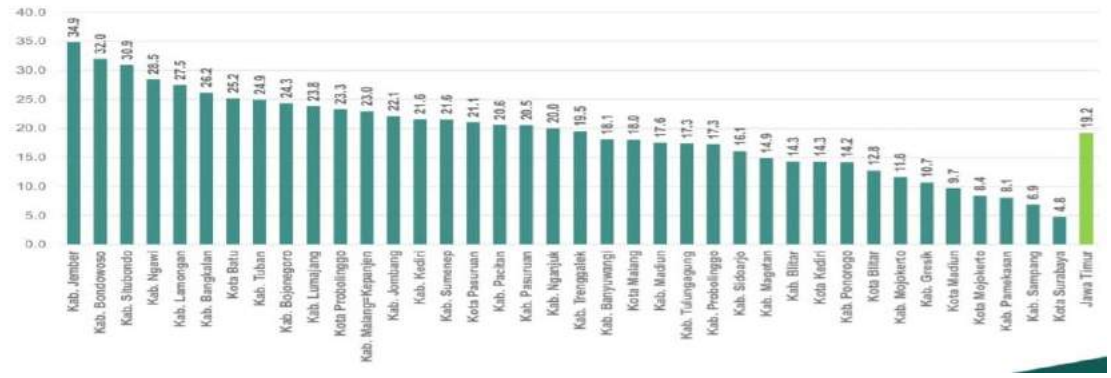

Sumber : SSGI 2022

Gambar 3. 7 Prevelensi Balita Stunted (Tinggi Badan Menurut Umur) berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, SSGI 2022

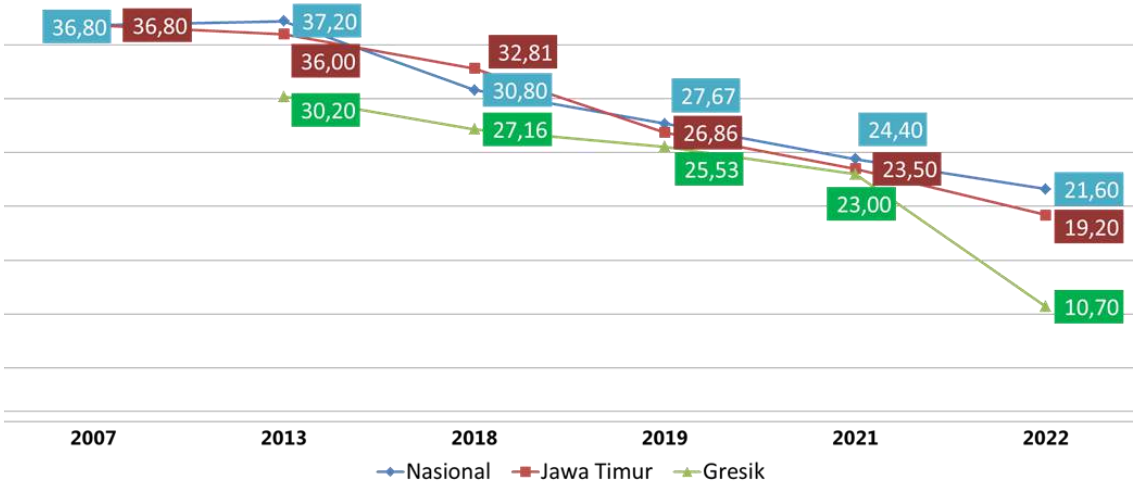

*Sumber: 2007-2018 RISKESDAS. * 2019 SSGBI. 2021 2022 SSGI*

Gambar 3.8 Stunting Balita Indonesia. Jawa Timur dan Gresik Tahun 2007 sd 2022

Berdasarkan gambar 3.8 Kabupaten Gresik berhasil menurunkan angka prevalensi stunting sebesar 10,7 sehingga menduduki peringkat enam kabupaten terendah dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Keberhasilan ini sejalan dengan upaya Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik dalam mengurangi stunting dengan berbagai cara diantaranya pelacakan dan pendampingan stunting yang bekerjasama dengan PKK Kabupaten Gresik; pemberian makanan tambahan berupa susu, dan biskuit untuk anak gizi kurang, bumil, KEK dan gizi buruk; pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) pada remaja putri; pemantauan status gizi balita setiap bulan; Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal melalui posyandu bagi balita

stunting; dan intervensi sensitif sudah dilakukan oleh OPD masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

3.1.2.11 Indeks Kesalehan Sosial

Kesalehan sosial merupakan suatu bentuk kesalehan yang tidak hanya ditandai oleh rukuk dan sujud, puasa dan haji melainkan juga ditandai seberapa besar seseorang memiliki kepekaan sosial dan berbuat kebajikan untuk orang-orang di sekitarnya. Kesalihan sosial sejatinya adalah merupakan manifestasi dari kesalihan individual, tanpa kesalihan individual maka kesalihan sosial menjadi semu, sehingga mendiskusikan kesalihan sosial tidak bisa dilepaskan dari kesalihan individual.

Kesalehan sosial adalah sikap seseorang yang memiliki unsur kebaikan (salih) atau manfaat dalam kerangka hidup bermasyarakat. Sikap kesalehan sosial bisa meliputi: (a) solidaritas sosial (al-takaful alijtima'i), (b) toleransi (al-tasamuh), (c) mutualitas/kerjasama (al-ta'awun), (d) tengah-tengah (al-I'tidal), dan (e) stabilitas (al-tsabat). Kesalehan sosial dalam perspektif tokoh-tokoh muslim adalah berangkat dari kesadaran manusia sebagai makhluk Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan di bumi dan sekaligus menjalankan tugas sebagai 'wakil Tuhan' (khalifah) di bumi. Dalam psikologi kognitif dikenal adanya bentuk kesadaran dalam diri individu yaitu teori tentang konsep diri yang berasal dari dimensi pengetahuan, dimensi pengharapan, dan dimensi penilaian. Konsep diri inilah yang menentukan perbuatan seseorang, yang berulang-ulang terhadap objek sosial.

Kesalehan sosial sebagai attitude atau sikap mempunyai tiga aspek yaitu kognitif, afektif, dan konatif. Sikap bisa berubah dalam hal intensitasnya, namun biasanya konsisten sepanjang waktu dalam situasi yang sama, dan komposisinya hampir selalu kompleks. Kelima, kesalehan sosial merupakan salah satu bagian

dari capaian seseorang dalam memberikan “pemaknaan” terhadap hidupnya di bumi (will to meaning).

Tabel 3.27 Nilai Indeks Pengetahuan Kesalehan Sosial tiap Kecamatan

No	Kecamatan	Nilai Indeks Pengetahuan
1	Wringinanom	70.3
2	Driyorejo	55
3	Kedamean	72
4	Menganti	58.6
5	Cerme	68.9
6	Benjeng	72.9
7	Balongpanggang	66.7
8	Duduksampeyan	80.3
9	Kebomas	62.2
10	Gresik	75.9
11	Manyar	65.8
12	Bungah	74.2
13	Sidayu	85.2
14	Dukun	80.9
15	Panceng	73.9
16	Ujungpangkah	80.8
17	Sangkapura	69.2
18	Tambak	62.2

Sumber : Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2023

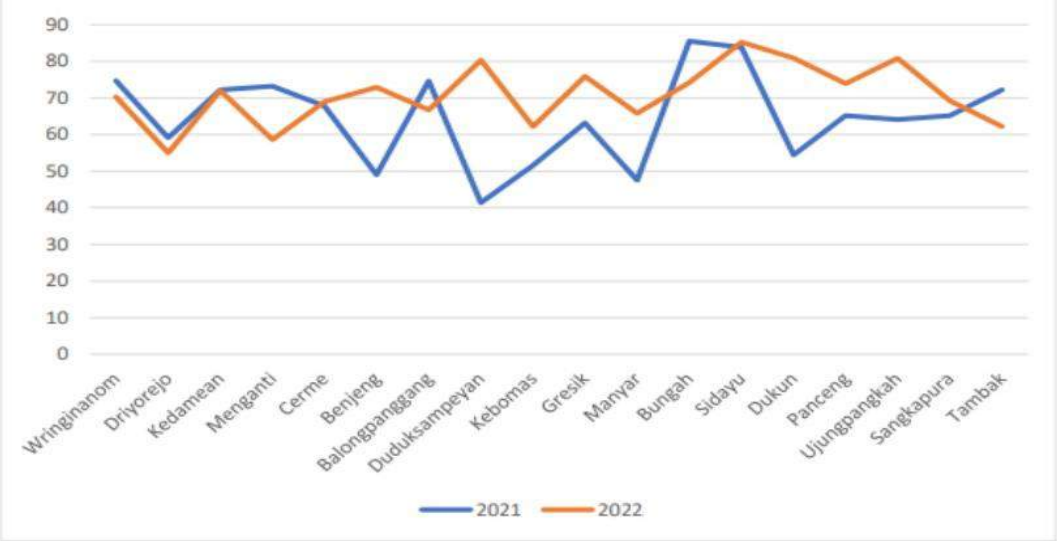

Gambar 3. 9 Perbandingan Nilai Indeks Pengetahuan Kesalehan Sosial tiap Kecamatan di Kabupaten Gresik

Dapat dilihat dari dua tabel tersebut diatas, menunjukkan bahwa nilai Indeks Pengetahuan paling tinggi ada di Kecamatan Sidayu

dengan nilai sebesar 85,20 sedangkan terendah pada Kecamatan Driyorejo sebesar 55.

Tabel 3. 28 Perbandingan rerata taksiran Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Gresik

No	Uraian Penilaian	2021	2022
1	Sikap peduli	71,13	70,17
2	Sikap memberi	77,97	79,77
3	Menghargai perbedaan	77,97	76,3
4	Tidak memaksakan nilai	80,41	77,42
5	Tidak menghina nilai yang berbeda	79,6	83,14
6	Keterlibatan dalam demokrasi	71,79	83,78
7	Keterlibatan dalam good governance	73,74	80,35
8	Pencegahan kekerasan	80,25	81,81
9	Keterlibatan dalam konservasi	77,49	81,81
10	Keterlibatan dalam restorasi	79,11	76,36
	Nilai IKS	**76,94**	**79,16**

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023

Tabel 3.29 Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2020 sd Tahun 2022

Uraian	2020	2021	2022			
			Target	Realisasi	Capaian	Nilai
Indeks Kesalehan Sosial	N/A	76,94	64,83	79,16	122,10%	ST

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023

Realisasi Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Gresik berada pada angka 79,16 lebih besar 2,22 poin dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 76,94 sehingga capaian yang didapat sebesar 122,10% dengan nilai Sangat Tinggi. Hasil dari perhitungan Indeks Kesalehan Sosial ini menunjukkan perlunya upaya Pemerintah Kabupaten Gresik dalam meningkatkan aspek pengetahuan kesalehan sosial guna memenuhi nilai indikator Indeks Kesalehan sosial yang tinggi diantaranya:

a. melakukan pembinaan keumatan dan memperkuat penyuluhan dalam aspek kesalehan sosial terutama pada Kecamatan dengan nilai Kesalehan Sosial yang rendah seperti Driyorejo;
b. bersinergi dengan stakeholder lain untuk melakukan berbagai langkah strategis untuk meningkatkan nilai indeks kesalehan sosial agar nilai-nilai agama dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan dengan meningkatkan aspek indeks kesalehan sosial yang masih rendah seperti sikap peduli, menghargai perbedaan, dan keterlibatan dalam restorasi. Pemerintah Kabupaten Gresik juga dapat mengkampanyekan sikap toleransi antar umat beragama dan menggalakkan gerakan penghijauan sebagai upaya meningkatkan nilai keterlibatan dalam restorasi;
c. melakukan upaya-upaya nyata dalam peningkatan daya afektif masyarakat yang sifatnya dapat menggugah perasaan dan menumbuhkan keyakinan terhadap pentingnya nilai-nilai agama sebagai pedoman berperilaku di masyarakat sehingga perilaku kesalehan sosial terus dapat ditingkatkan. Upaya yang bisa dilakukan adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait pentingnya nilai kesalehan sosial, terutama di daerah masyarakat urban di Kecamatan Menganti, Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Manyar, Kecamatan Gresik, dan Kecamatan Kebomas.

3.1.2.12 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara. Semakin tinggi nilai TPAK. semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja diperoleh dari Jumlah Angkatan Kerja dibandingkan dengan Jumlah Penduduk Usia Kerja.

Tabel 3.30 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2020 sd Tahun 2022

Uraian	2020	2021	2022			
			Target	Realisasi	Capaian	Nilai
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	66.53%	69.43	67	68.30	101,94%	ST

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Gresik pada tahun 2022 selisih 1,13 poin ke angka 68,30 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 69,43 dan dapat melebihi target sebesar 1,30 poin sehingga capaian yang dihasilkan 101,94% dengan nilai Sangat Tinggi.

Tabel 3.31 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur. 2020-2022

No	Kabupaten/Kota	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		
		2020	2021	2022
1	**Jawa Timur**	**70.33**	**70.00**	**71.23**
2	Kabupaten Pacitan	80.36	80.57	82.99
3	Kabupaten Ponorogo	71.51	72.63	72.92
4	Kabupaten Trenggalek	75.72	72.36	72.01
5	Kabupaten Tulungagung	73.17	72.26	71.95
6	Kabupaten Blitar	70.83	70.44	72.79
7	Kabupaten Kediri	70.65	69.34	68.73
8	Kabupaten Malang	71.62	68.49	70.38
9	Kabupaten Lumajang	66.92	66.19	69.75
10	Kabupaten Jember	68.04	68.97	69.44
11	Kabupaten Banyuwangi	71.80	72.32	72.00
12	Kabupaten Bondowoso	75.09	73.89	74.61
13	Kabupaten Situbondo	73.17	71.63	72.15
14	Kabupaten Probolinggo	72.89	73.24	71.56
15	Kabupaten Pasuruan	67.67	69.03	70.19
16	Kabupaten Sidoarjo	67.17	66.47	72.87
17	Kabupaten Mojokerto	69.79	70.47	71.34
18	Kabupaten Jombang	70.23	70.69	66.65
19	Kabupaten Nganjuk	65.75	64.24	66.79
20	Kabupaten Madiun	71.42	67.77	72.72
21	Kabupaten Magetan	73.23	73.31	74.03
22	Kabupaten Ngawi	72.69	72.88	78.60
23	Kabupaten Bojonegoro	74.60	71.84	72.16
24	Kabupaten Tuban	71.84	73.77	73.63
25	Kabupaten Lamongan	70.81	70.72	69.30
26	Kabupaten Gresik	66.53	69.43	68.30
27	Kabupaten Bangkalan	67.00	68.66	73.86
28	Kabupaten Sampang	69.93	70.19	73.37
29	Kabupaten Pamekasan	69.82	65.88	73.59
30	Kabupaten Sumenep	75.02	75.63	75.12
31	Kota/*Municipality*			
32	Kota Kediri	66.00	67.35	69.93

No	Kabupaten/Kota	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		
		2020	2021	2022
33	Kota Blitar	69.53	69.96	67.78
34	Kota Malang	66.41	67.59	63.08
35	Kota Probolinggo	69.07	69.71	68.39
36	Kota Pasuruan	70.05	71.66	68.05
37	Kota Mojokerto	68.21	67.09	69.41
38	Kota Madiun	68.63	66.87	66.85
39	Kota Surabaya	68.05	67.30	69.99
40	Kota Batu	72.33	73.74	71.51

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2022 TPAK Provinsi Jawa Timur mencapai 71,23 selisih 2,93 dengan capaian Kabupaten Gresik sebesar 68,30.

3.1.2.13 Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin

Dalam mendukung penyelenggaraan perlindungan sosial terdapat 5 (lima) pilar utama meliputi penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial, penyelenggaraan pemberdayaan sosial, penyelenggaraan rehabilitasi sosial, penyelenggaraan penanganan fakir miskin, serta penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penelitian kesejahteraan sosial dan penyuluhan sosial. Perlindungan Sosial dimaksudkan untuk memberi perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin akibat bencana alam, bencana sosial, orang terlantar, lanjut usia diatas usia 70 tahun, sehingga mampu berfungsi sosialnya.

Tabel 3.32 Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin Kabupaten Gresik Tahun 2020 sd Tahun 2022

Uraian	2020	2021	2022			
			Target	Realisasi	Capaian	Nilai
Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin	69,65%	89,97	>80%	90,66%	113,32%	ST

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2023

Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin tahun 2022 diperoleh 90,66% lebih tinggi 0,69% dari tahun 2021 dan lebih besar 10,66% dibandingkan dengan target yang sudah ditetapkan sehingga capaian yang dihasilkan sebesar 113,32% dengan nilai sangat tinggi.

Perolehan nilai ini dihitung berdasarkan jumlah penerima bantuan asistensi sosial berbasis keluarga dan siklus hidup yang komprehensif dalam mewujudkan kemandirian yang mensejahterakan dengan 54.569 penerima dibandingkan dengan Jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebesar 596.263.

3.2 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Nomenklatur Program dan Kegiatan Tahun 2021 berlandaskan dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 50-5881 Tahun 2021. Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, Konsistensi ketepatan Indikator Kinerja Program, Indikator Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan Selaras dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022, Rencana Strategis Serta dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022.

3.2.1 Pelaksanaan urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

3.2.1.1 Pendidikan

Penyelenggaraan urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan melalui 6 Program 16 kegiatan dan 77 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp957.446.812.465 yang terealisasi sebesar Rp908.740.125.559 atau 94.91% tidak terserap sebesar Rp48.706.686.906 yang disebabkan karena efisiensi.

3.2.1.1 Kesehatan

Penyelenggaraan urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Ibnu Sina melalui 5 program 15 kegiatan dan 83 Sub Kegiatan dengan alokasi Alokasi Anggaran pada Dinas Kesehatan sebesar Rp693.694.743.149 yang terealisasi sebesar Rp605.564.307.214,53 atau 87.30% tidak terserap sebesar Rp88.130.435.934,47.

3.2.1.2 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang dan Dinas Cipta Karya Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melalui 10 program 24 kegiatan dan 83 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebagai berikut:

a) Alokasi Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp197.611.668.357 yang terealisasi sebesar Rp165.816.394.670 atau 83.91% tidak terserap sebesar Rp31.795.273.687 yang disebabkan karena:

- Sisa Lelang : Rp14.523.275.185
- Efisiensi : Rp 4.258.594.698
- Tidak Selesai : Rp 6.780.584.388

- Kurang Bayar : Rp 6.232.819.416

b) Alokasi Anggaran pada Dinas Cipta Karya Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp133.908.488.436 yang terealisasi sebesar Rp92.723.164.717 atau 69% tidak terserap sebesar Rp41.185.323.719 yang disebabkan karena:

- Sisa Lelang : Rp 30.034.174.319
- Efisiensi : Rp 10.818.494.400
- Tidak dilaksanakan : Rp 332.655.000

3.2.1.3 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Penyelenggaraan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melalui 4 program 16 kegiatan dan 37 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp58.790.029.088 yang terealisasi sebesar Rp52.028.998.349 atau 88% tidak terserap sebesar Rp6.761.030.739 yang disebabkan karena:

Sisa Lelang	Rp 1.106.685.003
Efisiensi	Rp 4.825.191.054
Tidak dilaksanakan	Rp 829.154.681

3.2.1.4 Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Dinas Polisi Pamong Praja. Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan melalui 4 program 17 kegiatan dan 56 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebagai berikut:

a) Alokasi Anggaran pada Dinas Polisi Pamong Praja sebesar Rp29.696.316.500 yang terealisasi sebesar

Rp26.163.285.539 atau 88.10% tidak terserap sebesar Rp 3.533.030.961 yang disebabkan karena efisiensi.

b) Alokasi Anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp10.029.874.575 yang terealisasi sebesar Rp 9.537.675.104 atau 95.09% tidak terserap sebesar Rp492.199.471 yang disebabkan karena efisiensi.

c) Alokasi Anggaran pada Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan sebesar 9.772.576.100 yang terealisasi sebesar 9.501.393.339 atau 97.23% tidak terserap sebesar 271.252.761 yang disebabkan karena efisiensi.

3.2.1.5 Sosial

Penyelenggaraan urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial melalui 6 program 14 kegiatan dan 39 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp29.493.460.596 yang terealisasi sebesar Rp22.046.376.653 atau 74.75% tidak terserap sebesar Rp7.447.083.943 yang disebabkan karena efisiensi.

3.2.2 Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

3.2.2.1 Ketenagakerjaan

Penyelenggaraan urusan Tenaga Kerja dilaksanakan oleh Dinas tenaga kerja melalui 5 program 14 kegiatan dan 29 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp 8.971.806.925 yang terealisasi sebesar Rp 8.502.066.411 atau 94.76% tidak terserap sebesar Rp469.740.514 yang disebabkan karena efisiensi.

3.2.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan oleh Dinas Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

melalui 6 program 13 kegiatan dan 20 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp5.325.589.748 yang terealisasi sebesar Rp4.186.253.286 atau 78.61% tidak terserap sebesar Rp1.139.336.462 yang disebabkan karena efisiensi.

3.2.2.3 Pangan

Penyelenggaraan urusan Pangan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian melalui 6 program 13 kegiatan dan 20 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp 3.040.720.000 yang terealisasi sebesar Rp 1.615.884.505 atau 53.1% tidak terserap sebesar Rp 1.424.835.495 yang disebabkan karena:

- Sisa Lelang : Rp 1.594.000
- Efisiensi : Rp 2.360.100
- Tidak dilaksanakan : Rp 1.420.881.395

3.2.2.4 Pertanahan

Penyelenggaraan urusan Pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan umum dan Penataan ruang melalui 5 program 9 kegiatan dan 25 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp63.198.301.000 yang terealisasi sebesar Rp20.987.016.295 atau 33.21% tidak terserap sebesar Rp42.211.284.705 yang disebabkan karena:

- Sisa Lelang : Rp 100.000
- Efisiensi : Rp 4.441.869.228
- Tidak dilaksanakan : Rp 37.769.315.477

3.2.2.5 Lingkungan hidup

Penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup melalui 8 program 13 kegiatan dan 28 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp40.193.223.680 yang terealisasi sebesar Rp 38.786.729.138 atau 96.50% tidak terserap sebesar Rp1.406.494.542 yang disebabkan karena:

- Sisa Lelang : Rp587.022.771
- Efisiensi : Rp659.091.771

- Tidak dilaksanakan : Rp160.380.000

3.2.2.6 Kependudukan dan catatan sipil

Penyelenggaraan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui 5 program 15 kegiatan dan 33 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.664.176.005 yang terealisasi sebesar Rp10.021.338.016 atau 93.97% tidak terserap sebesar Rp642.837.989 yang disebabkan karena efisiensi.

3.2.2.7 Pemberdayaan masyarakat dan desa

Penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan oleh Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa melalui 5 program 11 kegiatan dan 34 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp17.802.659.800 yang terealisasi sebesar Rp16.042.269.882 atau 90.11% tidak terserap sebesar Rp1.760.389.918 yang disebabkan karena efisiensi.

3.2.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penyelenggaraan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Dinas Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui 4 program 14 kegiatan dan 40 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp23.554.710.460 yang terealisasi sebesar Rp18.984.144.787 atau 80.60% tidak terserap sebesar Rp4.570.565.673 yang disebabkan karena:

- Sisa Lelang : Rp185.896.042
- Efisiensi : Rp4.359.669.631
- Tidak dilaksanakan : Rp25.000.000

3.2.2.9 Perhubungan

Penyelenggaraan urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan melalui 4 program 25 kegiatan dan 26 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp39.680.439.855

yang terealisasi sebesar Rp36.322.666.153 atau 91.54% tidak terserap sebesar Rp3.357.773.702 yang disebabkan karena:

- Sisa Lelang : Rp 90.926.939
- Efisiensi : Rp 1.989.104.807
- Tidak dilaksanakan : Rp 717.257.250
- Tidak Selesai : Rp 560.484.706

Alasan tidak dilaksanakan maupun tidak selesai sebagai berikut:

a. Pada bulan desember terjadi ombak besar sehingga kapal berhenti beroperasi, dan subsidi tidak diberikan.
b. Calon penerima bantuan sosial tidak lolos verifikasi sesuai ketentuan peraturan Bupati Gresik Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perlindungan Sosial untuk mendukung program Penanganan dampak Inflasi di Kabupaten Gresik;
c. Penyusunan Rancangan Bupati tentang Tarif Angkutan maish belum bisa dilaksanakan karena Naskah Akademis belum disusun

3.2.2.10 Komunikasi dan informatika

Penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika melalui 3 program 10 kegiatan dan 35 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp14.121.993.165 yang terealisasi sebesar Rp 13.773.059.884 atau 97.53% tidak terserap sebesar Rp348.933.281 yang disebabkan karena efisiensi.

3.2.2.11 Koperasi dan usaha mikro

Penyelenggaraan urusan Koperasi dan Usaha Mikro dilaksanakan oleh Dinas Koperasi. Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan melalui 7 program 11 kegiatan dan 24 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp32.807.479.470 yang terealisasi sebesar Rp30.099.857.686 atau 91.75% tidak

terserap sebesar Rp2.707.621.784 yang disebabkan karena efisiensi.

3.2.2.12 Penanaman modal

Penyelenggaraan urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP melalui 6 program 12 kegiatan dan 34 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp14.492.610.495 yang terealisasi sebesar Rp12.610.338.073 atau 87.01% tidak terserap sebesar Rp1.882.272.422 yang disebabkan karena:

- Sisa Lelang : Rp 395.136.550
- Efisiensi : Rp 875.817.802
- Tidak Selesai : Rp 611.318.070

3.2.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

Penyelenggaraan urusan Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kepemudaan dan Olahraga melalui 3 program 8 kegiatan dan 13 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp19.706.396.069 yang terealisasi sebesar Rp18.789.700.037 atau 95.35% tidak terserap sebesar Rp916.696.032 yang disebabkan karena:

- Efisiensi : Rp 713.138.062
- Tidak dilaksanakan : Rp 203.557.970

3.2.2.14 Statistik

Penyelenggaraan urusan Statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika melalui 1 program 1 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp99.862.100 yang terealisasi sebesar Rp82.378.972 atau 82.49% tidak terserap sebesar Rp17.483.128 yang disebabkan karena efisiensi.

3.2.2.15 Persandian

Penyelenggaraan urusan Persandian dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika melalui 1 program 1 kegiatan dan 2 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp447.129.000 yang terealisasi sebesar Rp445.508.593 atau 99.64% tidak terserap sebesar Rp1.620.407 yang disebabkan Efisiensi.

3.2.2.16 Kebudayaan

Penyelenggaraan urusan Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kepemudaan dan Olahraga melalui 3 program 5 kegiatan dan 10 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp3.339.435.000 yang terealisasi sebesar Rp 3.291.233.707 atau 98.56% tidak terserap sebesar Rp 48.201.293 yang disebabkan karena efisiensi.

3.2.2.17 Perpustakaan

Penyelenggaraan urusan Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melalui 3 program 8 kegiatan dan 24 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.538.228.189 yang terealisasi sebesar Rp10.125.304.112 atau 96.08% tidak terserap sebesar Rp412.924.077 yang disebabkan karena sisa lelang sebesar Rp 143.782.818 dan efisiensi sebesar Rp 269.141.259

3.2.2.18 Kearsipan

Penyelenggaraan urusan Kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakan dan Kearsipan melalui 2 program 5 kegiatan dan 6 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp316.983.250 yang terealisasi sebesar Rp301.876.093 atau 95.23% tidak terserap sebesar Rp8.594.900 yang disebabkan karena sisanya lelang Rp209.807 dan Efisiensi Rp8.385.093.

3.2.3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pilihan

3.2.3.1 Perikanan

Penyelenggaraan urusan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan melalui 5 program 16 kegiatan dan 36 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp 12.431.838.246 yang terealisasi sebesar Rp 11.959.956.507 atau 96.20% tidak terserap sebesar Rp 471.996.304 yang disebabkan karena sisa lelang Rp 128.436.221 dan Efisiensi Rp343.560.083.

3.2.3.2 Pariwisata

Penyelenggaraan urusan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kepemudaan dan Olahraga melalui 4 program 11 kegiatan dan 35 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp11.829.628.897 yang terealisasi sebesar Rp11.472.556.046 atau 96.98% tidak terserap sebesar Rp357.072.851 yang disebabkan karena efisiensi.

3.2.3.3 Pertanian

Penyelenggaraan urusan Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian melalui 6 program 14 kegiatan dan 42 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp34.987.933.838 yang terealisasi sebesar Rp29.784.685.620 atau 85.13% tidak terserap sebesar Rp5.203.248.218 yang disebabkan karena:

- Sisa Lelang : Rp 581.413.154
- Efisiensi : Rp 586.191.485
- Tidak dilaksanakan : Rp 4.035.643.579

3.2.3.4 Perdagangan

Penyelenggaraan urusan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan melalui 4 program 5 kegiatan dan 10 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp2.956.308.000 yang terealisasi sebesar Rp2.609.236.452 atau 88.26% tidak terserap sebesar Rp347.071.548 yang disebabkan karena efisiensi.

3.2.3.5 Perindustrian

Penyelenggaraan urusan Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Koperasi. Usaha Mikro. Perindustrian dan Perdagangan melalui 3 program 3 kegiatan dan 3 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp426.000.000 yang terealisasi sebesar Rp393.533.242 atau 92.38% tidak terserap sebesar Rp32.466.758 yang disebabkan karena efisiensi.

3.2.4 Pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Penyelenggaraan urusan Sekretariat dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dengan alokasi dana sebagai berikut:

a) Alokasi Anggaran pada **Sekretariat Daerah** melalui 3 program 18 kegiatan dan 66 Sub Kegiatan sebesar Rp166.894.478.609 yang terealisasi sebesar Rp153.129.187.684 atau 91.75% tidak terserap sebesar Rp13.765.291.275 yang disebabkan karena:

- Efisiensi : Rp 12.851.691.275
- Tidak dilaksanakan : Rp 913.600.000

b) Alokasi Anggaran pada **Sekretariat DPRD** melalui 2 program 17 kegiatan dan 68 Sub Kegiatan sebesar Rp87.652.956.450 yang terealisasi sebesar Rp79.175.372.395 atau 90.33% tidak terserap sebesar Rp8.477.584.055 yang disebabkan karena

- Sisa Lelang : Rp 44.855.083
- Efisiensi : Rp 8.432.728.972

3.2.5 Pelaksanaan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

3.2.5.1 Perencanaan

Penyelenggaraan urusan Perencanaan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan. Penelitian dan Pengembangan Daerah melalui 3 program 10 kegiatan dan 26 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp14.537.493.860

yang terealisasi sebesar Rp13.577.707.116 atau 93.40% tidak terserap sebesar Rp959.786.744 yang disebabkan karena Efisiensi.

3.2.5.2 Keuangan

Penyelenggaraan urusan Keuangan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui 4 program 13 kegiatan dan 52 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp1.011.041.623.743 yang terealisasi sebesar Rp 963.675.926.369 atau 95.26% tidak terserap sebesar Rp 47.965.697.374 yang disebabkan karena Efisiensi.

3.2.5.3 Kepegawaian

Penyelenggaraan urusan Kepegawaian dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia melalui 2 program 9 kegiatan dan 24 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp12.310.118.390 yang terealisasi sebesar Rp10.913.304.105 atau 88.65% tidak terserap sebesar Rp1.396.806.285 yang disebabkan karena efisiensi.

3.2.5.4 Pendidikan dan pelatihan

Penyelenggaraan urusan Pendidikan dan Pelatihan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia melalui 1 program 2 kegiatan dan 3 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp4.109.149.800 yang terealisasi sebesar Rp3.372.633.940 atau 82.08% tidak terserap sebesar Rp736.515.860 yang disebabkan karena efisiensi.

3.2.5.5 Penelitian dan pengembangan

Penyelenggaraan urusan Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan. Penelitian dan Pengembangan Daerah melalui 1 program 3 kegiatan dan 3 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp2.127.147.100 yang terealisasi sebesar Rp1.894.832.839

atau 89.08% tidak terserap sebesar Rp232.314.261 yang disebabkan karena efisiensi.

3.2.6 Pelaksanaan Unsur Pengawas

Penyelenggaraan urusan Pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah melalui 3 program 11 kegiatan dan 46 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp17.038.045.306 yang terealisasi sebesar Rp13.609.868.912 atau 79.88% tidak terserap sebesar Rp 3.428.176.394 yang disebabkan karena Efisiensi Rp 3.070.762.394 dan Tidak dilaksanakan sebesar Rp357.414.000

3.2.7 Pelaksanaan Unsur Kewilayahan

Penyelenggaraan urusan Kewilayahan dilaksanakan oleh 18 Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik melalui 6 program 19 kegiatan dan 80 Sub Kegiatan.

3.2.7.1 Kecamatan Gresik

Alokasi Anggaran pada Kecamatan Gresik sebesar Rp27.441.218.077 yang terealisasi sebesar Rp24.282.153.908 atau 88.49% tidak terserap sebesar Rp3.159.064.169 yang disebabkan karena:

- Efisiensi : Rp3.148.543.169
- Tidak dilaksanakan : Rp 10.521.000

3.2.7.2 Kecamatan Kebomas

Alokasi Anggaran pada Kecamatan Kebomas sebesar Rp18.401.548.085 yang terealisasi sebesar Rp17.430.005.177 atau 94.72% tidak terserap sebesar Rp971.542.908 yang disebabkan karena Efisiensi.

3.2.7.3 Kecamatan Manyar

Alokasi Anggaran pada Kecamatan Manyar sebesar Rp4.429.985.000 yang terealisasi sebesar

Rp4.279.626.570 atau 96.61% tidak terserap sebesar Rp150.358.430 yang disebabkan karena Efisiensi.

3.2.7.4 Kecamatan Cerme

Alokasi Anggaran pada Kecamatan Cerme sebesar Rp4.383.812.000 yang terealisasi sebesar Rp4.116.136.772 atau 93.89% tidak terserap sebesar Rp267.675.228 yang disebabkan karena Efisiensi.

3.2.7.5 Kecamatan Benjeng

Alokasi Anggaran pada Kecamatan Benjeng sebesar Rp4.588.491.000 yang terealisasi sebesar Rp4.447.594.986 atau 96.93% tidak terserap sebesar Rp140.896.014 yang disebabkan karena Efisiensi.

3.2.7.6 Kecamatan balongpanggang

Alokasi Anggaran pada Kecamatan Balongpanggang sebesar Rp5.211.175.000 yang terealisasi sebesar Rp5.025.873.987 atau 96.44% tidak terserap sebesar Rp185.301.013 yang disebabkan karena Efisiensi.

3.2.7.7 Kecamatan duduksampeyan

Alokasi Anggaran pada Kecamatan Duduksampeyan sebesar Rp4.508.599.000 yang terealisasi sebesar Rp4.176.645.073 atau 92.64% tidak terserap sebesar Rp331.953.927 yang disebabkan karena Efisiensi.

3.2.7.8 Kecamatan Driyorejo

Alokasi Anggaran pada Kecamatan Driyorejo sebesar Rp4.160.942.000 yang terealisasi sebesar Rp4.100.275.406 atau 98.54% tidak terserap sebesar Rp60.666.594 yang disebabkan karena Efisiensi.

3.2.7.9 Kecamatan Wringinanom

Alokasi Anggaran pada Kecamatan Wringinanom sebesar Rp4.414.167.000 yang terealisasi sebesar Rp4.332.423.566 atau 98.15% tidak terserap sebesar Rp81.743.434 yang disebabkan karena Efisiensi.

3.2.7.10 Kecamatan Kedamean

Alokasi Anggaran pada Kecamatan Kedamean sebesar Rp3.831.298.000 yang terealisasi sebesar Rp3.753.381.230 atau 97.97% tidak terserap sebesar Rp77.916.770 yang disebabkan karena Efisiensi.

3.2.7.11 Kecamatan Menganti

Alokasi Anggaran pada Kecamatan Menganti sebesar Rp4.424.276.000 yang terealisasi sebesar Rp4.274.199.537 atau 96.61% tidak terserap sebesar Rp147.696.463 yang disebabkan karena Efisiensi.

3.2.7.12 Kecamatan Sidayu

Alokasi Anggaran pada Kecamatan Sidayu sebesar Rp5.032.590.900 yang terealisasi sebesar Rp4.645.931.309 atau 92.32% tidak terserap sebesar Rp386.659.591 yang disebabkan karena Efisiensi.

3.2.7.13 Kecamatan Ujungpangkah

Alokasi Anggaran pada Kecamatan Ujung Pangkah sebesar Rp4.483.948.600 yang terealisasi sebesar Rp4.223.229.825 atau 94.19% tidak terserap sebesar Rp249.003.775 yang disebabkan karena Efisiensi.

3.2.7.14 Kecamatan Panceng

Alokasi Anggaran pada Kecamatan Panceng sebesar Rp4.759.750.596 yang terealisasi sebesar Rp4.577.135.449 atau 96.16% tidak terserap sebesar Rp 170.731.147 yang disebabkan karena Efisiensi.

3.2.7.15 Kecamatan Bungah

Alokasi Anggaran pada Kecamatan Bungah sebesar Rp4.898.405.000 yang terealisasi sebesar Rp4.728.601.953 atau 96.53% tidak terserap sebesar Rp169.803.047 yang disebabkan karena Efisiensi.

3.2.7.16 Kecamatan Dukun

Alokasi Anggaran pada Kecamatan Dukun sebesar Rp4.616.185.000 yang terealisasi sebesar Rp4.463.727.277 atau 96.70% tidak terserap sebesar Rp 152.457.723 yang disebabkan karena Efisiensi.

3.2.7.17 Kecamatan Sangkapura

Alokasi Anggaran pada Kecamatan Sangkapura sebesar Rp4.151.513.000 yang terealisasi sebesar Rp3.433.820.803 atau 82.71% tidak terserap sebesar Rp717.692.197 yang disebabkan karena Efisiensi.

3.2.7.18 Kecamatan Tambak

Alokasi Anggaran pada Kecamatan Tambak sebesar Rp3.967.881.885 yang terealisasi sebesar Rp3.501.124.700 atau 88.24% tidak terserap sebesar Rp466.757.185 yang disebabkan karena:

- Efisiensi : Rp463.310.185

- Tidak dilaksanakan : Rp 3.447.000

3.2.8 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum

Penyelenggaraan urusan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilaksanakan oleh Badan Kesatuan melalui 6 program 10 kegiatan dan 21 Sub Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp15.495.088.370 yang terealisasi sebesar Rp11.550.908.997 atau 74.55% tidak terserap sebesar Rp3.944.179.373 yang disebabkan karena:

- Sisa Lelang : Rp3.969.470
- Efisiensi : Rp3.940.209.903

Secara rinci. Uraian Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan sebagaimana pada Lampiran.

3.3 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

Arah kebijakan pembangunan kabupaten Gresik mengacu kepada prioritas pembangunan Nasional. Program Prioritas Nasional diacu dalam penentuan prioritas pembangunan daerah, yang selanjutnya dijabarkan kedalam sasaran, program dan output kunci prioritas pembangunan Kabupaten Gresik. Output Kunci atas prioritas tersebut merupakan wujud rencana pembangunan yang terukur dalam rumusan Prioritas Pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2022 sebagaimana berikut:

Tabel 3.33 Kebijakan Strategis yang ditetapkan Tahun 2022

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	Penanganan Pandemi Covid-19	Peraturan Bupati Gresik Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas	Perilaku selama Pandemi Covid-19

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
		Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pedoman Masa Transisi Menuju Tatanan Normal Baru Pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Gresik	
2	Kesetaraan gender	Peraturan Bupati Gresik Nomor 9 Tahun 2022 Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender Melalui Program Bunda Puspa	Kesetaraan gender
3	Reaksi Cepat *Public Safety Center* 119	Peraturan Bupati Gresik Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan *Public Safety Center* 119 Kabupaten Gresik	Pelayanan *Public Safety Center* 119
4	Kepemilikan Sertifikat Tanah	Peraturan Bupati Gresik Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Gresik	Kepemilikan Sertifikat Tanah

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
5	Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Peraturan Bupati Gresik Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Optimalisasi Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kabupaten Gresik	Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
6	Bantuan PKH Inklusif	Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Program Keluarga Harapan Inklusif Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas Kabupaten Gresik	Bantuan Untuk Lanjut Usia dan Disabilitas yang belum Mendapatkan Bantuan dari Pusat
7	Program Bebas Jaminan Kesehatan	Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Universal Health Coverage Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Kabupaten Gresik	Jaminan Kesehatan
8	Penanganan dampak Inflasi	Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perlindungan Sosial Untuk	Dampak inflasi

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
		Mendukung Program Penanganan Dampak Inflasi di Kabupaten Gresik	
9	Penuntasan Bagi Siswa Putus Sekolah	Peraturan Bupati Gresik Nomor 88 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Program Kejar Paket Tuntaskan Putus Sekolah Di Kabupaten Gresik	Penuntasan Bagi Siswa Putus Sekolah
11	Penyederhanaan Birokrasi	Peraturan Bupati Gresik Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal, Satuan Pendidikan Non Fo Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Penyederhanaan Birokrasi

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
		Kabupaten Gresik Peraturan Bupati Gresik Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Gresik Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gresik Peraturan Bupati Gresik Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Peraturan Bupati Gresik Nomor 86 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Keluarga Berencana,	

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
		Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
12	Bencana Banjir	Keputusan Bupati Gresik Nomor : 360/ 40 /Hk/437.12/2022 Tentang Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Di Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2022	Bencana Banjir

3.4 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Sebagai tindaklanjut atas rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati selama tahun anggaran sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Gresik dengan upaya dan kerja keras menindaklanjuti dengan meneruskan Rekomendasi DPRD sebagai acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja. Adapun tindaklanjut atas rekomendasi DPRD Kabupaten Gresik sebagaimana berikut:

Tabel 3.34 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran 2022

Urusan	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut
Pendidikan		
	Perencanaan yang baik dalam penyediaan gaji ASN dan Non ASN dan disesuaikan dengan kebutuhan;	Dilakukan perhitungan terkait kebutuhan anggaran dengan adanya tambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
	Moratorium pendidikan tingkat negeri dan swasta	Hal ini dilakukan untuk meningkatkan mutu sekolah yang sudah ada
	Rasionalisasi Rombel dan Rehabilitasi serta kebutuhan perlengkapan sekolah SD dan SMP perlu perencanaan yang baik, efektif, efisien, tepat waktu, sehingga dalam	Dilakukan kajian secara menyeluruh terkait rehabilitasi dan rasionalisasi rombel

Urusan	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut
	pelaksanaan tidak terjadi sisa anggaran.	
	Pemerintah Kabupaten Gresik lebih memperhatikan kebutuhan pendidikan yang diselenggarakan oleh swasta, madrasah, dan Pondok pesantren.	Madrasah dan Pondok Pesantren menjadi kewenangan Kemenag
	Besaran dana untuk subsidi bidang Pendidikan, diupayakan ada perimbangan baik pendidikan yang diselenggarakan oleh pihak swasta, madrasah, dan pondok pesantren dengan pendidikan yang diselenggarakan oleh negara. Alokasi APBD bidang pendidikan lebih dikonsentrasikan pada Lembaga pendidikan swasta, madrasah dan pondok pesantren demi untuk membentuk generasi yang mandiri dan berakhlakul karimah, sesuai dengan visi dan misi Bupati.	Alokasi APBD telah dikonsentrasikan kepada lembaga swasta, madrasah dan pondok pesantren, dengan adanya Program BOSDA, BOP, BPPDGS dan Pokir
	Agar dalam penyediaan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN betul-betul direncanakan dengan baik sesuai dengan kebutuhan.	Dilakukan perhitungan terkait kebutuhan anggaran dengan adanya tambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
	Pemerintah Kabupaten Gresik saat ini menetapkan untuk tidak membuka ijin pendirian Pendidikan tingkat negeri dan swasta yang baru (moratorium)	Hal ini dilakukan untuk meningkatkan mutu sekolah yang sudah ada
	Rasionalisasi Rombel dan Rehabilitasi serta kebutuhan perlengkapan sekolah SD dan SMP perlu perencanaan yang baik, efektif, efisien, tepat waktu,sehingga dalam pelaksanaan tidak terjadi sisa anggaran	Dilakukan kajian secara menyeluruh terkait rehabilitasi dan rasionalisasi rombel
Kesehatan		
	Pelaksanaan pembangunan infra stuktur terhadap pembangunan puskesmas perlu adanya perencanaan yang matang dan pengawasan yang baik sehingga bisa selesai tepat waktu sesuai target	Pembangunan Puskesmas di tahun 2023 sudah ada perencanaan di P-APBD 2022 yaitu Puskesmas Kepatihan, tetapi belum dilakukan pembangunan fisik karena keterbatasan anggaran. Pembangunan

Urusan	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut
		yang dilakukan pada tahun 2023 adalah pembangunan puskesmas pembantu (Pustu Randuagung) yang anggaran perencanaannya di P-APBD 2022.
	Agar dalam pengadaan peralatan alat kesehatan perlu adanya perencanaan dengan mempertimbangkan keberadaan barang di pabrikan dan proses shecdule pengadaan tepat waktu.	Pengadaan alat kesehatan sudah disesuaikan dengan ASPAK Puskesmas dan juga berdasarkan usulan puskesmas di N-1
	Perlu kerjasama lintas sektor karena stunting tidak hanya bisa ditangani oleh Dinas Kesehatan saja	sudah dilakukan kerjasama lintas sektor dalam rangka penanganan stunting seperti halnya: 1. Melakukan pelacakan dan pendampingan stunting bekerja sama dg PKK Kabupaten Gresik 2. Memberikan makanan tambahan (PMT) berupa susu dan biskuit utk anak gizi kurang, bumil KEK dan gizi buruk 3. Memberikan Tablet Tambah Darah (TTD) pada remaja putri 4. pemantauan status gizi balita stiap bulannya 5. pemberian pmt lokal melalui posyandu utk balita stunting 6. intervensi sensitif sudah dilakukan oleh OPD masing2 sesuai dg tupoksi
	Strategi DOTS di tingkatkan, screening aktif ditingkatkan di setiap tingkatan dengan Mendorong kader – kader kesehatan yang dekat dengan masyarakat untuk menemukan penyandang penyakit TBC	Screening penyakit TBC telah ditingkatkan
	Memberi pemahaman masyarakat agar tidak mengucilkan terhadap penyandang ODHA Memberi pengertian tentang ARV Mempermudah akses PDV di	Bekerja sama dengan LSM dan PP HIV di Puskesmas untuk memberikan pengertian dan pengetahuan tentang penyakit HIV dan proses penularannya kepada masyarakat

Urusan	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut
	semua tingkatan	Sosialisasi dan study club ODHA dan pasangannya tentang pentingnya ARV Menambahkan layanan PDP pada layanan pemerintah ataupun swasta
	Dinas Kesehatan di semua tingkatan agar aktif dalam pengawasan untuk menekan angka kematian ibu dan bayi	Dinas Kesehatan sudah aktif dalam menekan angka kematian ibu dan bayi
	Akreditasi Puskesmas agar ditingkatkan dengan meningkatkan mutu Sumber Daya Manusianya	Puskesmas telah meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia
	Infrastruktur yang memadai	Perencanaan pembangunan puskesmas dan puskesmas pembantu sudah tertuang di dalam renstra, tetapi karena keterbatasan anggaran sehingga pembangunan tidak bisa sesuai dengan renstra.
	Status tanah puskesmas agar segera diurus legalitasnya dengan tenggat waktu tertentu.	Terdapat 3 Puskesmas yang belum memiliki sertifikat karena 2 Puskesmas dengan status Tanah Kas Desa dan 1 Puskesmas dengan status tanah bekas gogol
	Khusus untuk pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina dirasa perlu ditingkatkan mutu pelayanan,termasuk peningkatan tata kelola SDM secara professional. RSUD Ibnu Sina juga perlu untuk segera melakukan kerjasama dengan perusahan-perusahaan sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan.	RSUD Ibnu Sina terus melakukan peningkatan mutu pelayanan dengan memfasilitasi pendidikan dan pelatihan untuk SDM yang sudah ada dan melakukan penambahan tenaga kesehatan yang dibutuhkan sesuai dengan pelayanan kesehatan yang ada di RSUD Ibnu Sina. Saat ini RSUD Ibnu Sina sudah menjalin kerjasama dengan total 52 perusahaan yang ada di Kabupaten Gresik dan akan terus berupaya untuk menjalin dan

Urusan	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut
		menambah kerjasama dengan berbagai perusahaan di Kabupaten Gresik dengan cara : 1. Kolaborasi data perusahaan dengan Disnaker Gresik. 2. Menguatkan hubungan dengan perusahaan untuk sosialisasi layanan baru, MCU, layanan unggulan dll. 3. Sosialisasi dan promosi melalui media sosial ig, youtube, website. 4. Beriklan di koran lokal
Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		
	Kepala OPD menunjukkan kinerja yang lemah dalam mengkordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan, tidak mampu melakukan analisa yang matang dari setiap pekerjaan/ proyek dari sisi waktu, ditambah dengan kelemahan dalam pemilihan kontraktor pelaksana yang ternyata tidak punya kemampuan seperti yang diharapkan. Maka Bupati harus memberi peringatan kepada kepala OPD tersebut, agar tidak lagi terjadi pengulangan atas peristiwa yang sama pada tahun anggaran 2022 ini.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang telah meningkatkan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan
	Agar pelaksanaan pekerjaan disesuaikan dengan perencanaan dan teknis.	Pelaksanaan pekerjaan telah disesuaikan dengan perencanaan dan teknis
	Terkait permasalahan banjir di kota perlu dicarikan solusinya dan diperlukan penguatan lintas sektor dalam pengendaliannya.	Dalam permasalahan banjir di kota telah melibatkan lintas sektor
	Pengendalian banjir akibat luapan kali lamong terutama pada Kecamatan Benjeng, Cerme, Balongpanggang, Kedamean serta Menganti menjadi prioritas perlu segera berkoordinasi dengan instansi terkait.	Telah dilakukan koordinasi dengan instansi terkait mengenai pengendalian banjir akibat luapan kali lamong
	Terkait pekerjaan yang lelang Dinas PU dan ULP harus	Telah dilakukan koordinasi terkait

Urusan	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut
	koordinasi, agar tidak berjalan sendiri-sendiri sehingga pekerjaan bisa dimulai awal tahun.	pekerjaan yang lelang di Dinas PUTR dan bagian ULP
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
	Kepala OPD agar lebih serius untuk memberikan perhatian terhadap program ini. Karena program ini juga mendapat perhatian dari Kementerian PUPR RI, maka Langkah konsolidasi program dan kegiatan serta anggaran harus lebih diseriusi, agar program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) bisa menjadi salah program unggulan Kab. Gresik.	1. Membuat perencanaan penanganan kumuh (RP2KPKPK, Masterplan Kumuh, RAB DED) 2. Melaksanakan sosialisasi penanganan kumuh kepada masyarakat 3. Melaksanakan pembangunan untuk pengurangan kumuh 4. Pembentukan Kelompok Pemelihara dan Pemanfaat (KPP)
	Dinas Perkim tiap Tahun Anggaran harus ada target jumlah yang harus diselesaikan dalam setiap Program dan Kegiatan yang dilaksanakan.	Target tertuang dalam Renstra dan Renja OPD yang kemudian disesuaikan dengan anggaran yang tersedia pada tahun ke-n
	Untuk Pendapatan agar membuat inovasi sehingga bisa meningkatkan PAD.	1.Mengubah/mengusulkan perubahan Peraturan Bupati yang lama untuk menaikkan tarif rusunawa dengan didukung perbaikan sarana dan prasarana rusunawa 2. Mengusulkan perubahan peningkatan tarif layanan penyedotan lumpur tinja dan pengolahan lumpur tinja pada RanPerda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3. Meningkatkan pelayanan penyedotan dan pengolahan lumpur tinja. Peningkatan layanan penyedotan lumpur tinja sektor rumah tangga dalam rangka peningkatan sanitasi aman. Adapun peningkatan layanan penyedotan lumpur tinja sektor niaga dalam rangka peningkatan PAD.

Urusan	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut
	Inventarisasi Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Permasalahan terkait fasilitas umum dan Fasilitas Sosial (Fasum dan Fasos) yang belum diproses serah-terimanya oleh developer (Pengembang) kepada Pemerintah Daerah harus segera ditindaklanjuti.	1. Membuat Perbup Tentang Serah Terima PSU Perumahan 2. Merubah Alur Proses Serah Terima PSU 3. Melibatkan BPN dalam proses Verifikasi Teknis Serah Terima PSU 4. Melibatkan Kejaksaan untuk mendampingi pada Proses Serah Terima PSU
Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat		
	BPBD harus mengantisipasi terhadap sumber bencana baik itu bencana alam, bencana sosial dan bencana non alam	BPBD telah mengantisipasi terhadap bencana yang akan terjadi baik bencana alam maupun bencana non alam, untuk bencana alam telah melakukan beberapa upaya yang dilakukan untuk meminimalisir korban, misalnya dengan pemasangan alat sistem peringatan dini yang telah terpasang di beberapa titik, memasang rambu-rambu kebencanaan, mitigasi bencana melalui pembentukan desa tangguh bencana, melakukan sosialisasi, informasi dan edukasi berupa satuan pendidikan aman bencana (SPAB), melakukan gladi kesiapsiagaan, penguatan tim reaksi cepat serta membuat dokumen rencana kontijensi
	Memberikan informasi dan peta kawasan rawan bencana	Sudah dilakukan informasi rawan bencana melalui rambu-rambu kebencanaan yang telah terpasang di beberapa titik daerah rawan bencana, serta adanya peta kawasan rawan bencana serta potensi ancaman bencana yang tertuang dalam dokumen kajian risiko bencana
	Sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman	sudah dilakukan sosialisasi tentang

Urusan	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut
	masyarakat dalam menghadapi bencana	kebencanaan pada masyarakat, melalui pembentukan desa tangguh bencana berupa sosialisasi dan pelatihan yang diikuti oleh laki-laki dan perempuan, sosialisasi pada anak2 di sekolah rawan bencana melalui satuan pendidikan aman bencana, serta adanya simulasi kebencanaan
	Memberikan edukasi apa yang perlu dilakukan dan dihindari cara menyelamatkan diri dari bencana kepada masyarakat	Sudah dilakukan edukasi kepada masyarakat tentang cara menyelamatkan diri dari bencana melalui kegiatan pembentukan desa tangguh bencana dan Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana
	Segera dilakukan pengaturan dan penataan untuk meminimalisir dampak bencana/ potensi terjadinya bencana	Sudah dilakukan pemetaan terhadap potensi terjadinya bencana dan dituangkan dalam dokumen kajian resiko bencana yang di buat oleh BPBD Kabupaten Gresik
Sosial		
	Kegiatan yang tidak terlaksana akan diusulkan kembali Tahun berikutnya ;	Kegiatan yang tidak dilaksanakan akan diusulkan kembali
	Koordinasi dan kerjasama yang baik antara Dinas Sosial dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan ;	Sudah dikoordinasikan dengan instansi lain
	Verifikasi dan validasi data agar bantuan sosial tepat sasaran	Verifikasi dan validasi data akan ditingkatkan
	Meningkatkan UHC dengan memanfaatkan kuota 84.000 untuk pengajuan DTKS kepada Pemerintah Pusat	UHC telah ditingkatkan untuk pengajuan DTKS kepada Pemerintah Pusat
	Segera membentuk Tim Terpadu lintas sektor OPD untuk mempercepat pengelolaan DTKS di Kabupaten Gresik	Tim Terpadu lintas sektor OPD sedang dibentuk
	Sebagai bentuk dukungan atas program Kabupaten Layak Lansia, Pelayanan kesehatan untuk lansia di puskesmas Sukomulyo hendaknya dilaksanakan juga di puskesmas – puskesmas yang	Program Kabupaten Layak Lansia akan diimplementasikan untuk Puskesmas yang lain

Urusan	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut
	lain	
	Membangun Rumah Jompo	Rumah Jompo sedang direncanakan
Tenaga Kerja		
	Membuat aplikasi yang bisa diakses bebas oleh masyarakat terutama para pencari kerja	Dinas Tenaga Kerja sudah membuat aplikasi Gresik Kerja pada Gresik Pedia yang bisa diakses oleh masyarakat terutama pencari kerja untuk mendapatkan kartu AK1 secara online dan memperoleh informasi lowongan kerja dari perusahaan yang ada di Kabupaten Gresik.
	Membuka pelatihan – pelatihan para pencari kerja khususnya masyarakat Gresik sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan kewirausahaan.	Dinas Tenaga Kerja telah melaksanakan pelatihan-pelatihan bagi pencari kerja masyarakat Kab. Gresik yang seusai dengan kebutuhan perusahaan dan kewirausahaan.
	Lembaga – lembaga pelatihan kerja yang ada di Kabupaten Gresik untuk segera ditingkatkan menjadi lembaga – lembaga yang terakreditasi	Dinas Tenaga Kerja telah melakukan upaya pembinaan kepada lembaga pelatihan kerja yang ada di Kabupaten Gresik untuk ditingkatkan menjadi lembaga terakreditasi.
	Dinas Tenaga kerja harus memiliki kontrak kerja antara perusahaan dengan para pekerja	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 bahwa setiap perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) antara perusahaan dengan pekerja harus dilakukan pencatatan di Dinas Tenaga Kerja. Selain itu Dinas Tenaga Kerja juga melakukan upaya pembinaan kepada pelaku hubungan industrial untuk mematuhi regulasi tersebut.
	Dibutuhkan kajian pemetaan antara kompetensi tenaga kerja, kebutuhan perusahaan/pasar, dan penyerapan tenaga kerja lokal atas investasi yang masuk di Kabupaten Gresik	Dinas Tenaga Kerja belum melaksanakan kajian secara ilmiah namun pelatihan yang diselenggarakan telah disesuaikan dengan kebutuhan

Urusan	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut
		perusahaan/pangsa pasar industri berdasarkan informasi lowongan kerja dari perusahaan yang ada di Kabupaten Gresik
	Kebutuhan perusahaan akan tenaga kerja terampil hendaknya didukung dengan adanya pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan pemerintah	Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil di perusahaan, Dinas Tenaga Kerja telah melaksanakan pelatihan-pelatihan yang sesuai-Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan bersertifikat kompetensi BNSP / Kemnaker bagi pencari tenaga kerja di Kabupaten Gresik.
	Perlu mendorong penganggaran untuk program pelatihan berwirausaha, pemetaan dan pelatihan bagi UMKM berbasis rumah tangga	Dinas Tenaga Kerja telah melaksanakan pelatihan kewirausahaan bagi pencari kerja dan PMI purna beserta keluarganya.
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		
	Dalam rangka program perlindungan kekerasan terhadap perempuan agar Dinas KBPPA bekerjasama lebih intensif dengan pihak terkait (Kepolisian, DEPAG, Psikolog, LSM HAM);	Dinas KBPPA sudah bekerjasama dengan beberapa pihak terkait
	Program Perlindungan Khusus Anak agar mendapatkan perhatian pemerintah;	Program Perlindungan Khusus Anak sudah mendapatkan perhatian pemerintah diantaranya dengan adanya Musrenbang Anak
	Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) perlu diprioritaskan;	Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) sudah diprioritaskan
	Meningkatkan peran perempuan desa dalam pembangunan perlu ditumbuh kembangkan sekolah – sekolah perempuan yang ada di desa.	Peran perempuan desa dalam pembangunan sudah ditingkatkan
Pangan		
	Terkait keterbatasan Pupuk, Kontrol penyaluran kios – kios ke para	Maka perlu ditingkatkan dalam penyaluran pupuk ke gapoktan/poktan.

Urusan	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut
	petani karena rawan kebocoran	Dalam pengawasan penyaluran yang tepat sasaran.
Lingkungan Hidup		
	Persoalan TPA harus sudah terselesaikan.	Pengolahan sampah di TPA menjadi bahan bakar atau dikenal sebagai Refuse Derived Fuel (RDF) dalam proses instalasi mesin, setelah beroperasi akan mengurangi sampah yang masuk ke landfill TPA
	Memperbanyak program TPS3R dan pendirian Bank Sampah di desa atau lingkungan masyarakat sebagai tempat memproses sampah di tahap awal, agar bisa menekan pembuangan sampah liar, karena menunggu antrian pengangkutan oleh armada pengangkut sampah yang terbatas untuk dibuang ke TPA yang sudah overload tersebut	Bank Sampah Induk = 4, Bank SAmpah Unit = 223, TPS 3R = 28 UNIT (16 BEROPERASI)
	Potensi Pendapatan harus ditingkatkan disertai dengan inovasi baru karena untuk meningkatkan PAD sudah dibuat Regulasinya yaitu perubahan peraturan daerah tentang Retribusi Persampahan.	diperlukan perubahan UPT TPA menjadi BLUD untuk meningkatkan pendapatan dari pengolahan sampah
	Sarana-prasarana TPA dan TPST serta taman segera direalisasikan.	Mesin RDF di TPA sudah dalam proses instalasi
	Berkoordinasi ke Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup terkait dengan bantuan anggaran untuk Kabupaten Gresik terutama untuk sarana prasarana persampahan.	Sudah berkoordinasi
Kependudukan dan catatan sipil		
	Menyempumakan, mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan, dengan melakukan inovasi yang menjadikan masyarakat merasa terlayani dengan mudah, cepat dan akurat;	Inovasi terkait hal tersebut sudah dikembangkan, diantaranya aplikasi POEDAK
	Meningkatkan kompetensi SDM pelayanan maupun aparatur di Lingkungan Dinas	Kompetensi SDM pelayanan maupun aparatur di Lingkungan

Urusan	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut
	Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan;	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah ditingkatkan
	Meningkatkan aktivitas pengendalian dan melakukan pengawasan serta monitoring secara terus menerus atas semua kegiatan, khususnya pelayanan;	Pengendalian dan monitoring sedang dilaksanakan
	Mengintensifkan Konsultasi, koordinasi dan hubungan kerja dengan instansi vertikal (Pusat dan Provinsi) maupun kecamatan dan desa; serta;	Konsultasi, koordinasi dan hubungan kerja dengan instansi vertical sudah ditingkatkan
	Membuka jejaring yang lebih luas dalam rangka peningkatan kapasitas lembaga;	Peningkatan kapasitas Lembaga sudah dilaksanakan
	Memastikan semua pelayanan adminduk dari tingkat Desa, Kecamatan, Disdukcapil Bebas dari Administrasi yang bersifat Pungli;	Semua pelayanan adminduk bebas pungli
Perhubungan		
	Kepala Daerah agar serius memberi perhatian lebih serius lagi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada Dinas Perhubungan. Kepala OPD tersebut harus memiliki kemampuan manajerial dan kompetensi terhadap persoalan perhubungan. Para pejabatnya harus memenuhi kualifikasi yang memadai sesuai dengan tugasnya, baik di bidang pendataan maupun pelayanan kepada masyarakat. Perlu segera ditata dan dilakukan perombakan personalia di Dinas Perhubungan.	Dinas Perhubungan akan selalu berupaya meningkatkan kapasitas dan kompetensi para personilnya diantaranya: 1. Adanya Anggaran untuk Peningkatan Sumber Daya Insan Perhubungan Tahun 2023. 2. Mengirim Personil untuk Diklat di Kementrian Perhubungan. 3. Melakukan Study Tiru ke daerah lain.
	Dinas Perhubungan agar membuat inovasi perubahan untuk mencapai target retribusi parkir ditepi jalan umum serta mencari lahan-lahan parkir baru.	Dinas Perhubungan telah mendata titik-titik baru yang selama ini menjadi parkir ilegal
	Dalam rangka mengoptimalkan PAD dari sektor retribusi parkir, Dinas Perhubungan segera memfungsikan mesin E Parkir di Jalan H. Samanhudi/ Pasar yang telah terpasang agar	Dinas perhubungan telah mendatangkan ahli untuk perbaikan tersebut, akan tetapi untuk mengaktifkan mesin tersebut tidak sebanding dengan

Urusan	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut
	anggaran yang telah dialokasikan untuk pengadaan mesin dimaksud tidak sia-sia. Perencanaan di Ruas Jalan yang lain untuk penarikan Retribusi Parkir yang diprogramkan/ direncanakan memakai Sistem E Parkir tahun ini harus segera dipercepat pelaksanaannya dan segera juga penyiapan/ pengadaan alatnya.	pendapatan yang diterima oleh pemkab gresik
Komunikasi dan Informatika		
	Keberadaan Radio Suara Gresik merupakan salah satu sarana untuk melaksanakan tugas mempublikasikan kebijakan pemerintah dengan harapan untuk mendapatkan respon dari masyarakat. Maka keberadaan Radio Suara Gresik harus segera dilakukan pembenahan dari sisi legalitas dan kualitas penyiaran yang tunduk dan berpedoman kepada Peraturan Perundangan yang berlaku.	Telah dilakukan: 1. Penyusunan ranperda LPPL sebagai dasar hukum legalitas radio LPPL di Kabupaten Gresik dan saat ini masih dalam proses evaluasi di Biro Hukum Setda Provinsi Jatim, 2. konsultasi dan pengajuan kanal frekuensi dengan Dirjen SDPPI Kemenkominfo RI.
Koperasi dan Usaha Mikro		
	Diperluas cakupan pemungutan retribusi pelayanan tera/ tera ulang sampai ke perusahaan / Pabrik yang menggunakan timbangan untuk meningkatkan realisasi pendapatan	Sudah dilakukan pendataan terhadap perusahaan yang menggunakan timbangan
	Kajian regulasinya dan anggarkan kebutuhan terkait kegiatan cakupan pemungutan retribusi pelayanan tera/ tera ulang ke perusahaan / Pabrik / Jasa Timbangan	Sedang disusun telaah staf tentang pelayanan tera
Penanaman Modal		
	Menggali Potensi pendapatan untuk menambah PAD	Menggali pendapatan baru utk menambah PAD. Menggiatkan pemantauan, pembinaan dan pengawasan ke pelaku usaha
	Masih sangat perlu inovasi baru dalam peningkatan retribusi	Sudah membangun inovasi baru yang kami sebut dengan KELAS PATAS. Inovasi KELAS PATAS yaitu kelas pandu terintegrasi akses SIMBG.
Kepemudaan dan Olahraga		

Urusan	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut
	Membangun Sistem Pembinaan Pemuda Yang Komprehensif, Sinergi, Kotinu dan Efektif dengan berbagai pihak	Sistem Pembinaan Pemuda Yang Komprehensif, Sinergi, Kotinu dan Efektif sudah dibangun
	Meningkatkan Kualitas dan kuantitas Atlit berprestasi dengan merintis penyelenggaraan event olahraga prestasi	Event olahraga prestasi sudah diselenggarakan, misalnya Bupati Cup 2022
	Pembinaan prestasi berdasarkan skala prioritas cabang olah raga unggulan	Pembinaan prestasi cabang olah raga unggulan telah dilakukan
	Mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga (pengusaha) dalam rangka meningkatkan mutu kualitas keolahragaan di Kabupaten Gresik	Sudah melakukaan audiensi dengan perusahaan dalam rangka meningkatkan mutu kualitas keolahragaan
	Membebaskan para atlit untuk berlatih di Fasilitas Sarana Keolahragaan di Kabupaten Gresik	Memberikan fasilitas ruang berlatih bagi para atlet
	Mengajukan ke Bupati untuk diserahkan kepengurusannya/ pemeliharaannya fasilitas – fasilitas olahraga di Kabupaten Gresik kepada Dispora	Fasilitas keolahragaan merupakan aset Pemerintah daerah
Kepegawaian		
	Perlu adanya analisis jabatan untuk menentukan personal pada posisi jabatan tertentu;	Sudah menggunakan Anjab untuk penempatan
	Bupati Kepala Daerah dalam menentukan jabatan tertentu tidak dapat mengambil keputusan tanpa pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), maka proses pengangkatan, mutasi, pemberhentian harus melalui badan tersebut.	Telah dilakukan Rapat Tim Penilai Kinerja untuk proses pengangkatan, mutasi, pemberhentian
	Terkait dengan promosi jabatan agar lebih proporsional dengan pertimbangan aspek kompetensi dan asetabiltas.	Promosi jabatan telah sesuai dengan kompetensi
Kebencanaan		
	Perlu adanya normalisasi Kali Lamong	Sudah dilakukan normalisasi kali lamong sehingga bisa memitigasi bencana banjir yang ada di wilayah Kabupaten Gresik
	Perlu adanya sosialisasi atau pendidikan tentang	Telah dilakukan sosialisasi, edukasi,

Urusan	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut
	kebencanaan, pada seluruh elemen masyarakat, khususnya para Ibu-Ibu dan anak-anak yang berada diwilayah rawan banjir.	informasi melalui kegiatan satuan pendidikan aman bencana (SPAB) pada seluruh elemen masyarakat, baik laki-laki, perempuan, maupun anak-anak
	Perlu adanya support dana tambahan dari anggaran sebelumnya yang digunakan untuk melakukan sosialisasi dan memperbaiki jaringan yang penting agar banjir dapat diminimalkan.	Belum adanya support anggaran tambahan yang digunakan untuk penanggulangan bencana pada pra, saat bencana, dan pasca bencana
	Koordinasiantar OPD, terutama pada OPD yang berkaitan untuk penanganan banjir dan OPD yang bias mencegah terjadinya banjir.	Sudah dilakukan koordinasi dengan OPD terkait untuk penanganan banjir dan telah dilakukan mitigasi bencana untuk mengantisipasi bencana yang akan terjadi
Pajak Bumi Bangunan dan Pertanahan		
	Perlu inovasi baru pada proses pembayaran PBB yang tertunggak terhadap wajib pajak yang bukan orang Gresik.	Memberikan insentif berupa bebas denda pajak
	Perlu adanya mekanisme dalam proses jual beli tanah yang wajib diketahui oleh kepala desa/ kelurahan, dan dicatatkan menggunakan akta notaris. Hal ini sebagai syarat dalam proses peralihan hak atas tanah yang dicatatkan melalui BPN untuk mendapatkan sertifikat.	Mekanisme jual beli tanah akan dikaji ulang sesuai dengan peraturan yang berlaku
	Perlu upaya membuat aplikasi sistem jual beli tanah secara online yang terintegrasi dengan OPD-OPD yang lain.	Sudah dikembangkan aplikasi pembayaran layanan online pajak (SILOPINTER)
Penambangan Galian C		
	Bagi penambangan galian C yang illegal wajib untuk di tutup oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, karena akibat penambangan selain merusak lingkungan hidup juga mengakibatkan sanksi hukum.	Kewenangan penutupan ada di perangkat daerah yang melakukan penertiban (penegakan perda), akan tetapi perlu untuk dilakukan koordinasi dgn Instansi di Provinsi dan Pusat sebagai penerbit izin untuk dilakukan verivali terkait kepemilikan izin dan langkah yang tepat dalam melaksanakan penutupan

Urusan	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut
		lokasi pertambangan
	Bagi penambangan galian C yang sudah mendapatkan ijin,hendaknya memberikan restribusi juga kepada pemerintah daerah, meskipun hal ini merupakan kewenangan pusat.	Saat ini dari BPPKAD sudah melakukan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan secara aturan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Hal ini didasari oleh Perda Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah dirubah kedua kalinya dengan Perda Nomor 1 Tahun 2018 serta Perbup Nomor 34 Tahun 2013 tentang Harga Standar Batuan Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Gresik
	Perlu adanya usulan regulasi tentang pembagian retribusi penambangan galian C antara Pemerintah Kabupaten Gresik dengan pemerintah pusat .	Sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 huruf g , 81 huruf c, Pasal 82 huruf c, dan 83 huruf c Undang - Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah bahwa sudah ada opsen pembagian pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Selanjutnya apabila diperlukan untuk diatur lebih spesifik dapat dilengkapi pada Ranperda HKPD yang saat ini masih dalam proses penyempurnaan.
Ketenagakerjaan		
	Dibutuhkan kajian pemetaan antara kompetensi tenaga kerja, kebutuhan perusahaan/pasar, dan penyerapan tenaga kerja lokal atas investasi yang masuk di Kabupaten Gresik;	Dinas Tenaga Kerja belum melaksanakan kajian secara ilmiah namun pelatihan yang diselenggarakan telah disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan/pangsa pasar industri berdasarkan informasi lowongan kerja dari perusahaan yang ada di Kabupaten Gresik
	Kebutuhan perusahaan akan	Untuk memenuhi

Urusan	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut
	tenaga kerja terampil hendaknya didukung dengan adanya pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan pemerintah;	kebutuhan tenaga kerja terampil di perusahaan, Dinas Tenaga Kerja telah melaksanakan pelatihan-pelatihan yang sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan bersertifikat kompetensi BNSP / Kemnaker bagi pencari tenaga kerja di Kabupaten Gresik.
	Perlu mendorong penganggaran untuk program pelatihan berwirausaha, pemetaan dan pelatihan bagi UMKM berbasis rumah tangga.	Dinas Tenaga Kerja telah melaksanakan pelatihan kewirausahaan bagi pencari kerja dan PMI purna beserta keluarganya.
Inventarisasi Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Permasalahan terkait fasilitas umum dan Fasilitas Sosial		
	Perlu dilakukan updating data fasum dan fasos yang ada di wilayah Kabupaten Gresik sekaligus data terkait status penanggungjawabnya.	Data fasum dan fasos sedang dalam proses pendataan ulang
Perubahan Peraturan Bupati tentang pengadaan Barang dan Jasa		
	Kriteria dan syarat - syarat penyedia/ konsultan perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini dan kebutuhan pekerjaan pengadaan barang dan jasa	Sudah dilakukan penyesuaian dengan cara menambah dan/atau merubah persyaratan penyedia/konsultan.
	Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan pada awal tahun anggaran dengan harapan pekerjaan tidak terlambat untuk dilaksanakan.	- Sudah dilakukan percepatan proses pengadaan barang dan jasa. - Beberapa paket pekerjaan telah dilakukan tender dini.

BAB IV
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

4.1Urusan Pemerintahan yang ditugas-Pembantuan

4.1.1 Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya.

Dalam sistem dan prinsip negara kesatuan sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, asas otonomi dan tugas pembantuan, pembagian urusan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang telah ditentukan menjadi urusan Pemerintah. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan, karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Pada Tahun 2022 Kabupaten Gresik tidak melaksanakan Dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

4.1.2 Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan pemerintahan dibawahnya.

Pada Tahun 2022 Kabupaten Gresik tidak memberikan tugas pembantuan terhadap tingkatan pemerintahan di bawahnya.

4.2 Hambatan/Permasalahan dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaiannya

NIHIL

BAB V

PENUTUP

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang meliputi pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah akhir Tahun Anggaran 2022, pada dasarnya merupakan laporan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 dengan berlandaskan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 sebagai Penjabaran Tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 yang mencakup seluruh penyelenggaraan urusan desentralisasi, urusan tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.

Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Tahun 2022 merupakan hasil kerja sama yang baik antara Pemerintah Daerah, DPRD, dan Masyarakat yang telah berpartisipasi aktif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang telah berpartisipasi aktif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Penyelenggaraan Pemerintahan selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh Bupati Gresik kepada DPRD Kabupaten Gresik secara akuntabilitas disajikan dalam dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Gresik Akhir Tahun Anggaran 2022.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan pada Tahun Anggaran 2022 patut disyukuri. Selanjutnya sebagai implementasi hubungan kemitraan yang sejajar antara Pemerintah Daerah dan DPRD maka diharapkan adanya saran konstruktif berupa rekomendasi dari DPRD untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Gresik. Dengan demikian, hubungan timbal balik yang seimbang dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat terjalin secara harmonis dan konstruktif.

Demikian Laporan keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2022 ini, semoga Allah Subhanahu Wata'ala senantiasa memberikan hidayah dan meridhloi usaha kita bersama untuk menghadirkan Gresik yang lebih baik.

Gresik, Maret 2023

BUPATI GRESIK

BUPATI GRESIK

H. FANDI AHMAD YANI, SE

Lampiran 1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2022

Realisasi Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2022

No	Misi RPJMD	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	2020	2021	2022			NILAI	Perangkat Daerah	Sumber Data
						Target	Realisasi	Capaian			
1	Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntable Serta Mewujudkan Kepemimpinan Yang Inovatif dan Kolaboratif	Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru Yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan *Good and Clean Governance*	Indeks Reformasi Birokrasi	69,40	69,47	74,62	68,93	92,37%	ST	Bagian Ortala- Setda	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB
2	Membangun Infrastruktur Yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata Kota	Mewujudkan pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing dan berkelanjutan	Indeks Daya Saing Daerah	2.68	2,585	4,0	3,42	85,50%	T	Bappeda	Deputi Pemanfaatan Riset Dan Inovasi Tahun 2022
3	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang Seimbang Antar Sektor dan Antar Wilayah	Menguatkan pembangunan perekonomian Gresik Baru yang inklusif	Pertumbuhan Ekonomi	-3,68%	3,79	2-3	7,38	246,00%	ST	Dinas Komunikasi dan Informatika	BPS
4	Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah	Menguatkan pembangunan manusia Gresik Baru yang berkualitas & berkeadilan berlandaskan akhlakul karimah	Indeks Pembangunan Manusia	76,10	76,50	78,31	77,16	98,53%	ST	Dinas Komunikasi dan Informatika	BPS
5	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dengan Menciptakan Lapangan Kerja dan Menjamin Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik	Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penguatan sektor ketenagakerjaan	Tingkat Kemiskinan	12,4	12,42	11,5-10,8	11,06	100,00%	ST	Dinas Komunikasi dan Informatika	BPS
			Tingkat Pengangguran Terbuka	8,21	8,00	7,2	7,84	91,84%	ST	Dinas Komunikasi dan Informatika	BPS

Lampiran 2

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2022

Realisasi Capaian KinerjaSasaran RPJMD Tahun 2022

No	Misi RPJMD	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	2020	2021	2022			Nilai	Perangkat Daerah	Sumber Data
							Target	Realisasi	Capaian (%)			
1	Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntable Serta Mewujudkan Kepemimpinan Yang Inovatif dan Kolaboratif	Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru Yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan *Good and Clean Governance*	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,55	3,31	3,35	3,27 (Baik)	97,61%	ST	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kementerian PANRB.
			Menguatkan inovasi Daerah berlandaskan pembangunan kolaboratif di semua level pemerintahan	Indeks Inovasi Daerah	N/A	43,04	43,5	48,4	111,3%	ST	Bappeda	SK Kemendagri Tahun 2023 Nomor 000.10/398/BSKDN tentang Indeks Inovasi Daerah
2	Membangun Infrastruktur Yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata Kota	Mewujudkan pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing dan berkelanjutan	Mewujudkan Pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	N/A	87,39	89,00	89,04	100,04%	ST	Bappeda	Bappeda
			Mewujudkan kelestarian dan keselarasan pembangunan ekologi yang tangguh dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	N/A	53,40	60,19	58,15	96,61%	ST	Dinas Lingkungan Hidup	Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2022
			Mewujudkan kesetaraan akses pembangunan bagi semua golongan	Indeks Pembangunan Gender	89,93	90,20	91,12	90,78	99,63%	ST	Dinas KBPPPA	BPS
3	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang Seimbang Antar Sektor dan Antar Wilayah	Menguatkan pembangunan perekonomian Gresik Baru yang inklusif	Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah	Indeks Williamson	N/A	0,48	0,46	0,48	95,83%	ST	Bappeda	Bappeda
				Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian	3%	-3,01	4%-5%	3,17%	79,25%	T	BPS	BPS
4	Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah	Menguatkan pembangunan manusia Gresik Baru yang berkualitas & berkeadilan berlandaskan akhlakul karimah	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan & kesehatan	Indeks Pendidikan	NA	73,41	79,8	78,9	98,87%	ST	Bappeda	Bappeda
				Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	63,39	65,94	66	82,2	124,55%	ST	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Prevalensi Stunting	N/A	23	12-11	10,7	97,27%	ST	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Meningkatnya nilai-nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Toleransi Dalam Masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	N/A	76,94	77	79,16	102,81%	ST	Badan Kesbangpol	Badan Kesbangpol
5	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dengan Menciptakan Lapangan Kerja dan Menjamin Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik	Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penguatan sektor ketenagakerjaan	Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	66,53%	69,43	67%	68,30%	101,94%	ST	Dinas Tenaga Kerja	BPS
				Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin	69,65%	89,97	90%	90,66%	100,73%	ST	Dinas Sosial	Dinas Sosial

Lampiran 3
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2022
Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022

No	PERANGKAT DAERAH	URUSAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	2020	2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	NILAI 2022	Sumber Data	Permasalahan	Solusi
1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	Persentase Penanganan pra bencana	Jumlah desa/ kelurahan yang terfasilitasi dalam penanganan pra bencana dibanding dengan jumlah desa/ kelurahan di kabupaten gresik di kali 100%	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	ST	BPBD Kab. Gresik		
2	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Menurunnya risiko bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	Desa Tangguh Bencana di banding dengan desa terdampak bencana x 100%	38.63 Persen	47.73 Persen	56.82 Persen	59.09 Persen	104 Persen	ST	BPBD Kab. Gresik		
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya responsifitas penanganan saat bencana	Persentase Penanganan saat bencana	Jumlah desa/ kelurahan yang terfasilitasi dalam penanganan saat bencana dibanding dengan jumlah desa/ kelurahan di kabupaten gresik yang terdampak bencana di kali 100%	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	ST	BPBD Kab. Gresik		
4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya pemulihan pasca bencana	Persentase Rencana Pemulihan pasca bencana yang direalisasikan	Jumlah rencana pemulihan pasca bencana yang direalisasikan dibanding dg jumlah usulan rencana pemulihan pasca bencana di kali 100%	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	ST	BPBD Kab. Gresik		
5	DINAS SOSIAL	SOSIAL	Meningkatkan penanganan dan pelayanan sosial serta pengentasan kemiskinan	Persentase Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan serta Pemberdayaan PMKS	Jumlah Penanganan PMKS/ Jumlah PMKS	(9.437/135.177) x 100% = 6,98%	(266.991 / 457.170) x 100 % = 58.40%	54,68%	65,06%	118,98%	ST	Dinas Sosial		
6	DINAS SOSIAL	SOSIAL	Meningkatkan penanganan dan pelayanan sosial serta pengentasan kemiskinan	Nilai Kabupaten Layak Lansia	Nilai yang didapat	-	76,10	80	79,50	99,38%	ST	Dinas Sosial		
7	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Angka Investasi	Pertumbuhan Realisasi Investasi	Jumlah Akumulasi Realisasi Investasi Tahun n - Jumlah Akumulasi realisasi investasi n-1 dibagi jumlah akumulasi investasi n-1 x 100%	26,97 Persen	11,050 Persen	2,89 Persen	24,11 Persen	834,26%	ST	Data Rekap Ijin Usaha per Triwulan yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	-	-

No	PERANGKAT DAERAH	URUSAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	2020	2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	NILAI 2022	Sumber Data	Permasalahan	Solusi
8	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	91,095 Persen	Sangat Baik (91,103)	Sangat Baik (88,31)	Sangat Baik (91,44)	103,54%	ST	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	-	-
9	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Meningkatkan Prestasi pemuda di bidang kepemudaan dan olahraga	Persentase Pemuda Berprestasi dibidang Kepemudaan dan Keolahragaan	Pemuda Berprestasi : Pemuda yang Mengikuti Lomba x 100%	39,00 Persen	60,67 Persen	39%	39,98%	102,51%	ST	Bidang Kepemudaan dan Olahraga, KONI Kabupaten Gresik, NPCI Kabupaten Gresik		
10	DINAS PERIKANAN	KELAUTAN DAN PERIKANAN	Meningkatnya Produksi dan produktivitas Usaha Kelautan dan Perikanan	Pertumbuhan produksi perikanan tangkap (%)	Selisih Jumlah Produksi Tahun N dengan TahunN-1 dibagi Jumlah Produksi perikanan Tangkap Tahun N-1 x 100%	Minus 50 Persen	1,11 Persen	1,6	1,63	101,88	ST	DINAS PERIKANAN		
11	DINAS PERIKANAN	KELAUTAN DAN PERIKANAN	Meningkatnya Produksi dan produktivitas Usaha Kelautan dan Perikanan	Pertumbuhan produksi perikanan budidaya (%)	Selisih Jumlah Produksi Tahun N dengan TahunN-1 dibagi Jumlah Produksi perikanan Budidaya Tahun N-1 x 100%	1,8 Persen	2.95 Persen	3	2,77	92,33	ST	DINAS PERIKANAN		
12	DINAS PERIKANAN	KELAUTAN DAN PERIKANAN	Terwujudnya pemanfaatan sumberdaya kelautan,perikanan secara optimal terkendali dan berkelanjutan	Persentase peningkatan luas ekosistem kawasan pesisir yang direhabilitasi (%)	Selisih Luas Kawasan pesisir yg direhabilitasi Tahun N dengan TahunN-1 dibagi Luas kawasan pesisir yg direhabilitasi Tahun N-1 x 100%	5,44 Persen	22.73 Persen	15	22,85	152,33	ST	DINAS PERIKANAN		
13	DINAS PERIKANAN	KELAUTAN DAN PERIKANAN	Tercapainya kecukupan Gizi dari protein hewani masyarakat dari hasil perikanan	Angka Konsumsi Ikan kabupaten Gresik (kg /kapita / tahun	selisih Jumlah Produksi Ikan dikurangi ikan yg dijual keluar daerah dibagi Jumlah Penduduk Kab. Gresik	39,21	42.86 Persen	40,5	43,25	106,79	ST	DINAS PERIKANAN		
14	INSPEKTORAT	PENGAWASAN	Meningkatkan nilai level kapabilitas APIP pada Inspektorat	Level kapabilitas APIP	level kapabilitas APIP yang di nilai BPKP	2	3	3	3	100%	ST	BPKP		

No	PERANGKAT DAERAH	URUSAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	2020	2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	NILAI 2022	Sumber Data	Permasalahan	Solusi
15	INSPEKTORAT	PENGAWASAN	Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah Kabupaten Gresik	Persentase Tindak lanjut selesai sesuai Audit Internal dan Eksternal Berstatus Sesuai Rekomendasi	(Jumlah rekomendasi yang tindaklanjuti telah berstatus telah selesai /Jumlah seluruh rekomendasi) x 100 %	79 Persen	78,30 Persen	100%	80,98%	80,98%	T	Laporan Tindak Lanjut	1. Jumlah tugas mandatori yang harus dilaksanakan banyak. 2. Penyelesaian tindak lanjut terhambat karena: a. Temuan sudah lama tahun pemeriksaannya b. Adanya pergantian personil pada OPD dikarenakan mutasi, promosi dan purna tugas	1. Memasukkan kegiatan monitoring tindak lanjut pemeriksaan APIP ke dalam dokumen perencanaan pengawasan berbasis risiko agar mendapat alokasi waktu pelaksanaanny a. 2.a. Memberikan file Laporan
16	INSPEKTORAT	PENGAWASAN	Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah Kabupaten Gresik	Rata-rata kategori hasil Evaluasi SAKIP OPD	Jumlah nilai SAKIP OPD / Jumlah OPD	81.65 Persen	82,75 Persen	82,5	72,47	87,85%	T	Laporan hasil evaluasi SAKIP	1. Dokumen evaluasi SAKIP yang kurang lengkap. 2. Perbedaan persepsi baik di lingkup internal evaluator maupun antara inspektorat dengan bag organisasi.	1. Diadakan sosialisasi dan pendampingan untuk pengisian LKE SAKIP. 2.a. Dilaksanakan koordinasi internal, penyamaan persepsi atas pernyataan dan dokumen pemenuhan LKE. 2.b. Melakukan koordinasi dan
17	INSPEKTORAT	PENGAWASAN	Meningkatnya kualitas pemerintahan yang bersih melalui penilaian maturitas SPIP	Nilai maturitas SPIP Pemkab Gresik	Penilaian Maturitas SPIP oleh BPKP	3	3	3	3	100%	ST	BPKP		
18	KECAMATAN SIDAYU	KEWILAYAHAN	Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Cukup Jelas		98,9	82	84,83	103%	ST	KECAMATAN SIDAYU		
19	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Tercapaianya Penyelesaian Konflik Sosial	Persentase Penurunan Penyelesaian Konflik Sosial	Jumlah Konflik Sosial yang Diselesaikan Tahun n dikurangi Jumlah Konflik Sosial yang Diselesaikan Tahun n-1 dibagi Jumlah Konflik Sosial yang Diselesaikan Tahun n-1 dikali seratus persen	81,83 Persen	100 Persen	20 Persen	33,33 Persen	166,65 Persen	ST	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		

No	PERANGKAT DAERAH	URUSAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	2020	2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	NILAI 2022	Sumber Data	Permasalahan	Solusi
20	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai SAKIP Kesbangpol	Nilai Kemenpan RB	81,83	82,1	85,50	85,50	100 Persen	ST	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
21	DINAS PERTANIAN	PERTANIAN	Meningkatnya produksi pertanian, perkebunan, peternakan	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan pertanian (%)	Jumlah produksi tan. Pangan & Hortikultura tahun n - tan. Pangan & hortikultura tahun n-1 ---------- x 100% Jumlah produksi tan. Pangan & hortikultura Tahun n-1	0,57 Persen	0,44 Persen	0,472	0,435	92,16%	ST	DINAS PERTANIAN		
22	DINAS PERTANIAN	PERTANIAN	Meningkatnya produksi pertanian, perkebunan, peternakan	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan perkebunan (%)	Jumlah produksi tan. perkebunan tahun n - perkebunan tahun n-1 ---------- x 100% Jumlah produksi tan. perkebunan Tahun n-1	0,42 Persen	0.35 Persen	0,42	0,32	77,36%	T	DINAS PERTANIAN		
23	DINAS PERTANIAN	PERTANIAN	Meningkatnya produksi pertanian, perkebunan, peternakan	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan peternakan (%)	Jumlah produksi peternakan tahun n - peternakan tahun n-1 ---------- x 100% Jumlah produksi peternakan tahun n-1	11,15 Persen	2.08 Persen	2,01	1,33	66,21%	S	DINAS PERTANIAN	Karena adanya wabah PMK yang menyebar sangat masif di banyak wilayah Kabupaten Gresik	Dilakukan vaksinasi terhadap hewan yang terkena PMK
24	DINAS PERTANIAN	PANGAN	Meningkatnya ketahanan pangan	Rasio ketersediaan pangan (kg/kapita/th)	Jumlah ketersediaan pangan utama (beras) tahun n ---------- Jumlah penduduk tahun n	180,1 Persen	167.38 Persen	185	180,73	97,69%	ST	DINAS PERTANIAN		
25	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	PERTANAHAN	Terpenuhinya kebutuhan pengadaan lahan	Persentase lokasi tanah yang dibebaskan	Jumlah lokasi yang dibebaskan / jumlah lokasi yang dibutuhkan	N/A	53,06 Persen	100%	80%	80,0%	T	Bidang Pertanahan	Penyesuaian dengan peta bidang yang dikeluarkan oleh BPN (kemudi)	dilakukan kajian ulang di tahun 2023

No	PERANGKAT DAERAH	URUSAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	2020	2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	NILAI 2022	Sumber Data	Permasalahan	Solusi
26	DINAS CIPTA KARYA,PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh	Persentase Penurunan Luas kawasan kumuh	((luas kawasan kumuh tahun ke (n-1) - luas kawasan kumuh yang ditangani tahun ke n)/luas kawasan kumuh tahun ke (n-1))*100%	100 Persen	95,60 Persen	99,29 Persen	66,28 Persen	66,75	T	DINAS CIPTA KARYA,PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
27	DINAS CIPTA KARYA,PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan perkotaan dan PSU perumahan	Rerata PSU Permukiman, Perumahan dan Perkotaan yang Ditangani	(Jumlah Persentase PSU Permukiman, Perumahan dan Perkotaan yang Ditangani/Jumlah Indikator PSU Permukiman, Perumahan dan Perkotaan)	60,11 Persen	0,52 Persen	1,99 Persen	3,44 Persen	172,86	ST	DINAS CIPTA KARYA,PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
28	DINAS CIPTA KARYA,PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Mewujudkan permukiman berkelanjutan melalui penyediaan rumah umum dan rumah swadaya yang layak huni	Persentase Pertumbuhan Rumah Umum	((jumlah rumah umum tahun ke n - jumlah rumah umum tahun 2020)/jumlah rumah umum tahun 2020)*100%	9 Persen	4,35 Persen	4,59 Persen	11,49 Persen	250,33	ST	DINAS CIPTA KARYA,PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
29	DINAS CIPTA KARYA,PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya Pelayanan infrastruktur sanitasi layak dan aman	Persentase Peningkatan pelayanan infrastruktur sanitasi yang layak dan aman melalui pendekatan Kawasan	Dihitung dari rerata gabungan indikator Persentase Rumah Tangga Akses Air Bersih Non PDAM + Persentase penyediaan pelayanan SPALDT akses aman + Presentase panjang saluran drainase dalam kondisi baik : 3	**N/A**	**N/A**	42,20 Persen	41,80 Persen	99,05	ST	DINAS CIPTA KARYA,PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
30	DINAS CIPTA KARYA,PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya kualitas penataan bangunan gedung dan lingkungannya	Persentase Peningkat kualitas penataan bangunan gedung dan lingkungannya	Dihitung dari rerata gabungan indikatorPersentase Pembangunan Gedung daerah sesuai dengan Kebijakan Strategis + Presentase Persentase Pemeliharaan Gedung sesuai dengan Kebijakan Strategis : 2	**N/A**	**N/A**	80 Persen	80 Persen	100	ST	DINAS CIPTA KARYA,PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		

No	PERANGKAT DAERAH	URUSAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	2020	2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	NILAI 2022	Sumber Data	Permasalahan	Solusi
31	DINAS CIPTA KARYA,PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatkan kualitas SDM Jasa Konstruksi yang mendorong perekonomian lokal	Persentase pertumbuhan tenaga terampil yang memiliki sertifikat	(Jumlah komulatif sertifikasi tahun n - jumlah komulatif sertifikasi tahun n-1) /Jumlah komulatif sertifikasi n-1 x 100%	**N/A**	**N/A**	9,89 Persen	11,23 Persen	113,55	ST	DINAS CIPTA KARYA,PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
32	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Jumlah Pelanggaran/Jumlah Pelanggaran yang ditangani	100 Persen	291	100%	100%	100%	ST	Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman	Tangkapan apabila terlalu banyak, tempat dan mamin nya tidak memadai.	Agar ada penambahan anggaran untuk mamin dan perluasan lokasi shelter.
33	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Gangguan Tibuntranmas yang Diselesaikan	Jumlah Gangguan/Jumlah Gangguan tibuntranmas yang tertangani	100 Persen	244	100%	100%	100%	ST	Bidang Penegakan Perundang-undangan	Apabila terjadi penggusuran PKL, tidak ada tempat relokasinya	Disediakan tempat relokasi buat PKL
34	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Masyarakat	Rasio Jumlah Anggota Linmas terhadap Jumlah RT	Jumlah Anggota Linmas/Jumlah RT	1 Per RT	1 Per RT	1 Per RT	1,2	120%	ST	Bidang Pembinaan Umum dan Perlindungan Masyarakat	Tidak ada anggaran Linmas desa di Satpol PP	Satpol PP mengusulkan ke DPR
35	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya kinerja Aparatur Dinas Pemasam Kebakarandan Penyelamatan	Nilai Survey Kepuasan masyarakat atas pelayanan penanganan kebakaran dan penyelamatan	Nilai hasil survey kepuasan masyarakat atas pelayanan penanganan kebakaran dan penyelamatan	N/A	N/A	80	80,0	100%	ST	Angket Survey yang diberikan ke masyarakat pada saat kejadian		
36	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Menurunya Angka Kejadian Kebakaran	Prosentase Penurunan Kejadian Kebakaran	(Jumlah Kebakaran Tahun n-1 - Jumlah Kebakaran Tahun)/Jumlah Kebakaran Tahun n-1 x 100%	N/A	N/A	10%	11%	112%	ST	Laporan Kejadian		
37	RSUD IBNU SINA	KESEHATAN	Meningkatnya kinerja, efisiensi dan mutu pelayanan	BOR (Bed Occupancy Rate)	persentase pemakaian tempat tidur pada periode n	56,54 Persen	65,04 Persen	62,33	62,42	100,14%	ST	RSUD IBNU SINA		
38	RSUD IBNU SINA	KESEHATAN	Meningkatnya kinerja, efisiensi dan mutu pelayanan	ALOS (Average Length Of Stay)	rata-rata lama rawat seorang pasien	5.15 Hari	5,57 Hari	5,65	4,46	78,94%	T	RSUD IBNU SINA		
39	RSUD IBNU SINA	KESEHATAN	Meningkatnya kinerja, efisiensi dan mutu pelayanan	TOI (Turn Over Interval)	Rata -rata waktu dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya	4,76 Hari	3,6 Hari	3,75	2,53	148,22%	ST	RSUD IBNU SINA		
40	RSUD IBNU SINA	KESEHATAN	Meningkatnya kinerja, efisiensi dan mutu pelayanan	BTO (Bed Turn Over)	frekuensi pemakaian tempat tidur pada suatu periode	33,29 Kali	35,44 Kali	36,70	55,32	150,74%	ST	RSUD IBNU SINA		

No	PERANGKAT DAERAH	URUSAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	2020	2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	NILAI 2022	Sumber Data	Permasalahan	Solusi
41	RSUD IBNU SINA	KESEHATAN	Meningkatnya kinerja, efisiensi dan mutu pelayanan	GDR (Gross Death Rate)	angka kematian umum di Rumah Sakit untuk tiap 1.000 penderita keluar	101,4 Permil	139,2 Permil	91,99	105,04	87,58%	T	RSUD IBNU SINA		
42	RSUD IBNU SINA	KESEHATAN	Meningkatnya kinerja, efisiensi dan mutu pelayanan	NDR (Net Death Rate)	angka kematian ≥ 48 jam setelah dirawat di Rumah Sakit untuk tiap 1.000 penderita keluar	59,7 Permil	91,5 Permil	54,12	63,63	85,05%	T	RSUD IBNU SINA		
43	RSUD IBNU SINA	KESEHATAN	Meningkatnya kualitas tata kelola rumah sakit dan SDM yang profesional	CRR (Cost Recovery Rate)	Nilai dalam persen yang menunjukkan besarnya kemampuan RS menutup biaya dengan penerimaannya dari retribu-si pasien (revenue).	80 Persen	97,18 Persen	86%	122%	142%	ST	RSUD IBNU SINA		
44	RSUD IBNU SINA	KESEHATAN	Meningkatnya kualitas tata kelola rumah sakit dan SDM yang profesional	Tingkat kemandirian keuangan	Nilai dalam persen yang menunjukkan tingkat kemampuan dan kemandirian rumah sakit dalam membiayai seluruh belanja rumah sakit (belanja langsung dan belanja tidak lansung, termasuk belanja modal) dari pendapatan fungsional rumah sakit.	74 Persen	76,52 Persen	76	118,53	156%	ST	RSUD IBNU SINA		
45	DINAS TENAGA KERJA	KETENAGAKERJAAN	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja didukung memperkuat kerjasama multipihak	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	Jumlah Penduduk yang berkerja/Jumlah Angkatan Kerja * 100% (Sumber data: BPS Sakernas)	91,79 Persen	92 Persen	92,12	92,16	100,04	ST	DINAS TENAGA KERJA		
46	DINAS TENAGA KERJA	KETENAGAKERJAAN	Meningkatnya hubungan industrial yang kondusif, harmonis dan dinamis	Persentase Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan / Jumlah Kasus Perselisihan Hubungan Industrial* 100%	92,86 Persen	78,79 Persen	93,92	69,70	74,21	S	DINAS TENAGA KERJA	Karena kasus pengaduan perselisihan hubungan industrial yang masuk jumlahnya turun dan pengaduan yang diselesaikan jumlahnya juga menurun	Kemampuan dan masalah kasus yg diperselisihkan berbeda, jd bahan pertimbangan untuk target diturunkan di tahun berikutnya

No	PERANGKAT DAERAH	URUSAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	2020	2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	NILAI 2022	Sumber Data	Permasalahan	Solusi
47	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya upaya pengendalian terhadap penurunan kualitas lingkungan	INDEKS KUALITAS AIR (IKA)	100 - (50/0,9×(Ieu-0,1))	50,1	48,79	50,1	48,24	96%	ST	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
48	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya upaya pengendalian terhadap penurunan kualitas lingkungan	INDEK KUALITAS UDARA (IKU)	100((50/0,9)*(50%*(indexS0)+50%*(indexN02)-0,1))	83,54	68,79	83,64	81,03	97%	ST	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
49	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya upaya pengendalian terhadap penurunan kualitas lingkungan	INDEKS KUALITAS LAHAN (IKL)	100-((84,3-((LTL/LW-DKK)*100))*50/54,3)	33,18	32,54	33,18	32,86	99%	ST	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
50	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	LINGKUNGAN HIDUP	Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan yang bersih dan indah	Tanaman Endemik yang tertanam	Jumlah Tanaman Endemik / Tahun	100 batang pohon	70 Batang Pohon	100%	100%	100%	ST	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
51	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	LINGKUNGAN HIDUP	Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan yang bersih dan indah	Prosentase Luas RTH	(Luas RTH /Luas Wilayah Kabupaten)	1.5 Persen	2,48 Persen	1,70%	2,503%	147%	ST	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
52	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	LINGKUNGAN HIDUP	Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan yang bersih dan indah	Prosentase Pengelolaan Sampah	Volume Sampah terkelola/Volume Sampah Total	59 Persen	46,76 Persen	62,00%	67,46%	109%	ST	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
53	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Meningkatanya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan KTP-el	Jumlah Penduduk yang memiliki KTP/Jumlah Penduduk Wajib KTP X 100%	98,22 Persen	98,19 Persen	98,80%	98,88%	100,08	ST	Dispendukcapil		
54	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Meningkatanya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan Akta kelahiran Anak 0-18 th	Jumlah anak 0-18 th yang memiliki Akta Kelahiran/Jumlah anak usia 0-18 th X 100%	90,6 Persen	92,76 Persen	91,50%	98,21%	107,33	ST	Dispendukcapil		
55	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Terwujudnya pelayanan prima	Nilai Indeks kepuasan Masyarakat	Hasil survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sesuai Permen PAN-RB No.14 Tahun 2017	82,4	86,48	83,5	86,5	103,59	ST	Dispendukcapil		
56	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Terwujudnya pelayanan prima	Tingkat Kematangan Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penentuan tingkat kematangan berdasarkan fakta, analisa, dan justifikasi melandai Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2020 dengan interval 1-5	4	4	4	4	100	ST	Dispendukcapil		

No	PERANGKAT DAERAH	URUSAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	2020	2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	NILAI 2022	Sumber Data	Permasalahan	Solusi
57	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Kependudukan	Persentase penurunan data ganda, anomali dan non aktif	(Jml data ganda, anomali dan non aktif (base line) - Jml data ganda, anomali dan non aktif yang sudah tervalidasi s.d. tahun N) / Jml data ganda, anomali dan non aktif (base line) X 100%	100 Persen	77,7 Persen	55,39%	59,46%	107,35	ST	Dispendukcapil		
58	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Mewujudkan Desa Mandiri	Persentase Desa Mandiri dan Maju sesuai Permendes No. 2 Tahun 2016	Jumlah Desa dengan Status Mandiri ditambah Jumlah Desa dengan Status Maju / Jumlah Seluruh Desa x 100%	60,30 Persen	84,24 Persen	66,96%	93,64%	139,84%	ST	https://idm.kemendesa.go.id/		
59	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar secara inklusif dan berkeadilan gender	Persentase desa yang telah mengakomodasi usulan perempuan	jumlah desa yang sudah mengakomodasi usulan perempuan di musrenbang desa / jumlah desa yang mengadakan musrenbang desa *100%	Belum Tersedia	4,21 Persen	4%	2,25%	56,25%	R	BA MusrenbangDes	Masih dalam proses advokasi untuk meningkatkan responsibilitas pemerintah desa terhadap usulan perempuan dan kelompok marjinal	akan dilakukkan proses edukasi ke desa
60	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar secara inklusif dan berkeadilan gender	Persentase PD yang minimal 30% kegiatannya dilengkapi dokumen Analisa Responsif Gender (ARG)	Jumlah PD yang minimal 30% kegiatannya dilengkapi dokumen Analisa Responsif Gender (ARG) / jumlah PD * 100%	Belum Tersedia	10% (5 OPD)	15%	12,73%	85,00%	T	Dokumen Analisa Rrsponsif Gender (ARG)		
61	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Peningkatan Peran dan Fungsi Keluarga dalam Pembangunan Daerah, Inisiasi Nilai Nilai Luhur Budaya Gresik dan Pembinaan Karakter	Total Fertility Rate (TFR)	Banyaknya kelahiran dari perempuan umur 15-49 tahun selama periode tertentu / Jumlah penduduk perempuan umur 15-49 tahun pada pertengahan periode yang sama * 1000	1,92 (Th. 2019)	2,03 (Th. 2020)	1,9-2%	1,89% (Tahun 2021)	105,82%	ST	Buku Saku Parameter Kependudukan yang diterbitkan oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur	Buku Saku Parameter Kependudukan yang diterbitkan oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 berisi data Tahun 2021	Data yang digunakan merupakan data tahun 2021

No	PERANGKAT DAERAH	URUSAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	2020	2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	NILAI 2022	Sumber Data	Permasalahan	Solusi
62	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Peningkatan Peran dan Fungsi Keluarga dalam Pembangunan Daerah, Inisiasi Nilai Nilai Luhur Budaya Gresik dan Pembinaan Karakter	Contraceptive Prevalency Rate (CPR)	Jumlah Peserta Aktif KB / Jumlah Pasangan Usia Subur *100%	76	76,53 (Th. 2020)	70-76%	74,19%	105,99%	ST	Buku Saku Parameter Kependudukan yang diterbitkan oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur	Buku Saku Parameter Kependudukan yang diterbitkan oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 berisi data Tahun 2021	Data yang digunakan merupakan data tahun 2021
63	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Peningkatan Peran dan Fungsi Keluarga dalam Pembangunan Daerah, Inisiasi Nilai Nilai Luhur Budaya Gresik dan Pembinaan Karakter	Persentase Usia Kawin Pertama dibawah 20 Tahun	Jumlah usia kawin pertama dibawah 20 tahun / jumlah wanita menurut perkawinan pertama * 100%	16,45 Persen	15,04 Persen (Th. 2020)	menurun	13,65% Persen (Th. 2021)	89,01%	T	Buku Saku Parameter Kependudukan yang diterbitkan oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur	Buku Saku Parameter Kependudukan yang diterbitkan oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 berisi data Tahun 2021	Data yang digunakan merupakan data tahun 2021
64	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK	Mewujudkan Layanan Komprehensif untuk Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Mendapat Layanan Komprehensif	(jumlah kasus yang mendapat layanan komprehensif/ jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan)*100%	Belum Tersedia	100 Persen	80%	100%	125%	ST	Laporan Kegiatan		
65	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK	Mewujudkan Layanan Komprehensif untuk Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Persentase Kasus Anak dalam Situasi Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif	(jumlah kasus anak yang mendapat layanan komprehensif/ jumlah kasus yang dilaporkan)*100%	Belum Tersedia	100 Persen	80%	100%	125%	ST	Laporan Kegiatan		
66	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK	Mewujudkan Layanan Komprehensif untuk Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Tingkat Kematangan Layanan sesuai Standar SPBE	Tingkat Kematangan Layanan sesuai standar SPBE adalah Penentuan tingkat kematangan berdasarkan fakta, analisa, dan justifikasi dengan interval : 1. Rintisan 2. Terkelola 3. Terdefinisi 4. Terpadu dan teratur 5. Optimum	0	Level 1	Level 1	Level 1	100%	ST	Hasil evaluasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang diterbitkan oleh tim asesor internal SPBE		

No	PERANGKAT DAERAH	URUSAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	2020	2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	NILAI 2022	Sumber Data	Permasalahan	Solusi
67	DINAS PERHUBUNGAN	PERHUBUNGAN	Menigkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan	Persentase Prasarana Angkutan yang laik fungsi	Jumlah Prasarana Angkutan yang berfungsi Optimal dibagi jumlah prasarana Angkutan	100 Persen	100 Persen	100%	100%	100,00%	ST	Database Prasarana Angkutan Jalan Tahun 2022		
68	DINAS PERHUBUNGAN	PERHUBUNGAN	Menigkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan	Ketersediaan dan aksesbilitas trayek Angkutan	Jumlah trayek angkutan yang terintegrasi antar moda dibagi dengan jumlah trayek angkutan yang beroperasi x 100%	17.65 Persen	35.29 Persen	64,71%	64,71%	100,00%	ST	Database Trayek Angkutan Umum Tahun 2022		
69	DINAS PERHUBUNGAN	PERHUBUNGAN	Menigkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan	Nilai VC Ratio Jalan Kabupaten Gresik	Jumlah Ruas Jalan Kabupaten Dalam Kota dengan VC ratio > 0,275 dibagi Jumlah Ruas Jalan Kabupaten Dalam Kota	41.67 Persen	41.67 Persen	41,67%	45,10%	108,24%	ST	Dokumen Survey Lalu Lintas Harian Rata Rata Tahun 2022		
70	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Meningkatnya tingkat kematangan kapabilitas proses SPBE	Tingkat kematangan pelaksanaan tim koordinasi SPBE	Penentuan tingkat kematangan berdasarkan fakta, analisa dan justifikasi dengan interval : 1. Rintisan 2. Terkelola 3. Terdefinisi 4. Terpadu dan teratur 5. Optimum		4	4	2	50,00%	SR	Laporan Hasil Pemantauan SPBE Kemenpanrb	Anggota Tim Koordinasi belum melaksanakan program kerja Tim Koordinasi SPBE, tidak melibatkan semua Perangkat daerah dan sebagian besar masih dilaksanakan oloeh Diskominfo	Melakukan Perbaikan SK Tim Koordinasi SPBE dengan melibatkan semua Perangkat Daerah dan mengevaluasi Kinerja Tugas Tim Koordinasi SPBE secara berkala
71	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Meningkatnya tingkat kematangan kapabilitas proses SPBE	Tingkat kematangan kolaborasi penerapan SPBE	Penentuan tingkat kematangan berdasarkan fakta, analisa, dan justifikasi dengan interval : 1. Rintisan 2. Terkelola 3. Terdefinisi 4. Terpadu dan teratur 5. Optimum		3	3	3	100,00%	ST	Laporan Hasil Pemantauan SPBE Kemenpanrb		

No	PERANGKAT DAERAH	URUSAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	2020	2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	NILAI 2022	Sumber Data	Permasalahan	Solusi
72	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Meningkatnya tingkat kematangan kapabilitas proses SPBE	Tingkat kematangan pembangunan aplikasi SPBE	Penentuan tingkat kematangan berdasarkan fakta, analisa, dan justifikasi dengan interval : 1. Rintisan 2. Terkelola 3. Terdefinisi 4. Terpadu dan teratur 5. Optimum		3	2	2	100,00%	ST	Laporan Hasil Pemantauan SPBE Kemenpanrb		
73	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Meningkatnya tingkat kematangan kapabilitas proses SPBE	Tingkat kematangan penerapan manajemen layanan SPBE	Penentuan tingkat kematangan berdasarkan fakta, analisa, dan justifikasi dengan interval : 1. Rintisan 2. Terkelola 3. Terdefinisi 4. Terpadu dan teratur 5. Optimum		2	2	2	100,00%	ST	Laporan Hasil Pemantauan SPBE Kemenpanrb		
74	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	STATISTIK	Meningkatnya informasi pemerintahan dan data statistik sektoral yang dipublikasikan	Pertumbuhan pengunjung website	Jumlah pengunjung website pada Tahun (n) - Jumlah pengunjung website pada Tahun (n-1) Dibagi Jumlah pengunjung website pada Tahun (n-1)		6,97%	5% (467.575 dari 445.309 viewers)	10.96% (494.099 dari 445.309)	219,20%	ST	Google analytic		
75	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	STATISTIK	Meningkatnya informasi pemerintahan dan data statistik sektoral yang dipublikasikan	Pertumbuhan informasi publik penyelenggaraan pemerintahan yang dipublikasikan	Jumlah Informasi yang dipublish pada Tahun (n) - Jumlah Informasi yang dipublish pada Tahun (n-1) Dibagi Jumlah informasi yang dipublish pada Tahun (n-1)		28,60%	5% (2.668 informasi dari 2.541 informasi)	14.33% (2.905 dari 2.541)	286,60%	ST	Laporan pertumbuhan informasi publik		
76	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	STATISTIK	Meningkatnya informasi pemerintahan dan data statistik sektoral yang dipublikasikan	Tingkat kematangan layanan pengaduan pelayanan publik	Penentuan tingkat kematangan berdasarkan fakta, analisa, dan justifikasi dengan interval : 1. Rintisan 2. Terkelola 3. Terdefinisi 4. Terpadu dan teratur 5. Optimum		3	4	4	100,00%	ST	Laporan Hasil Pemantauan SPBE Kemenpanrb		

No	PERANGKAT DAERAH	URUSAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	2020	2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	NILAI 2022	Sumber Data	Permasalahan	Solusi
77	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	STATISTIK	Meningkatnya informasi pemerintahan dan data statistik sektoral yang dipublikasikan	Persentase data statistik sektoral yang dipublikasikan	Jumlah data statistik sektoral yang dipublikasikan Tahun n dibagi total data statistik sektoral (dengan target rencana peningkatan 5 % dari Tahun n-1) dikali 100%	95 data yang dipublikasikan	104%	100% (105/105 data)	112.38% (118 dari 105)	112,38%	ST	Data.gresikkab.go.id		
78	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	STATISTIK	Meningkatnya informasi pemerintahan dan data statistik sektoral yang dipublikasikan	Persentase data sektoral (layanan perangkat daerah) yang Persentase data sektoral (layanan perangkat daerah) yang diintegrasikan	Jumlah Data Sektoral yang dintegrasikan dibagi Jumlah Seluruh Data Sektoral (7 data) x 100%	14.28% (1/7 data)	28,57%	42.86% (3/7 data)	42.86% (3 dari 7	100,00%	ST	Data warehouse		
79	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PERSANDIAN	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur Teknologi Informatika (TI), keamanan sistem elektronik, dan data terintegrasi	Presentase perangkat daerah dan kelurahan yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah	Jumlah perangkat daerah dan kelurahan yang terhubung jaringan intra pemerintah dibagi jumlah total perangkat daerah dan kelurahan x 100%	62% (46 OPD)	97% (46 OPD dan 26 Kelurahan)	97% (46 OPD dan 26 kelurahan)	97.3% (46 OPD dan 26 Kelurahan)	100,31%	ST	Laporan jaringan		
80	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PERSANDIAN	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur Teknologi Informatika (TI), keamanan sistem elektronik, dan data terintegrasi	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	Penentuan tingkat kematangan berdasarkan fakta, analisa, dan justifikasi dengan interval : 1. Rintisan 2. Terkelola 3. Terdefinisi 4. Terpadu dan teratur 5. Optimum	2	2	2	4	200,00%	ST	Laporan Hasil Pemantauan SPBE Kemenpanrb		
81	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PERSANDIAN	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur Teknologi Informatika (TI), keamanan sistem elektronik, dan data terintegrasi	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Penentuan tingkat kematangan berdasarkan fakta, analisa, dan justifikasi dengan interval : 1. Rintisan 2. Terkelola 3. Terdefinisi 4. Terpadu dan teratur 5. Optimum	2	4	2	3	150,00%	ST	Laporan Hasil Pemantauan SPBE Kemenpanrb		

No	PERANGKAT DAERAH	URUSAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	2020	2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	NILAI 2022	Sumber Data	Permasalahan	Solusi
82	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PERSANDIAN	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur Teknologi Informatika (TI), keamanan sistem elektronik, dan data terintegrasi	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	Penentuan tingkat kematangan berdasarkan fakta, analisa, dan justifikasi dengan interval : 1. Rintisan 2. Terkelola 3. Terdefinisi 4. Terpadu dan teratur 5. Optimum	2	2	3	2	66,67%	S	Laporan Hasil Pemantauan SPBE Kemenpanrb	Beberapa aplikasi belum membutuhkan data untuk diintegrasikan	Integrasi data akan dicukupi sesuai kebutuhan
83	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PERSANDIAN	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur Teknologi Informatika (TI), keamanan sistem elektronik, dan data terintegrasi	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	Penentuan tingkat kematangan berdasarkan fakta, analisa, dan justifikasi dengan interval : 1. Rintisan 2. Terkelola 3. Terdefinisi 4. Terpadu dan teratur 5. Optimum	1	1	1	2	200,00%	ST	Laporan Hasil Pemantauan SPBE Kemenpanrb		
84	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PERSANDIAN	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur Teknologi Informatika (TI), keamanan sistem elektronik, dan data terintegrasi	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	Penentuan tingkat kematangan berdasarkan fakta, analisa, dan justifikasi dengan interval : 1. Rintisan 2. Terkelola 3. Terdefinisi 4. Terpadu dan teratur 5. Optimum	1	1	3	2	66,67%	S	Laporan Hasil Pemantauan SPBE Kemenpanrb	Masih proses karena perlu dibahas di forum satu data dengan Bappeda sebagai koordinator forum, dan pada tahun 2022 fokus untuk collecting data dengan meta data nya	Melakukan koordinasi lanjutan dengan melibatkan BPS, wali data, dan Bappeda serta Forum Satu Data
85	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PERSANDIAN	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur Teknologi Informatika (TI), keamanan sistem elektronik, dan data terintegrasi	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	Penentuan tingkat kematangan berdasarkan fakta, analisa, dan justifikasi dengan interval : 1. Rintisan 2. Terkelola 3. Terdefinisi 4. Terpadu dan teratur 5. Optimum	2	2	3	3	100,00%	ST	Laporan Hasil Pemantauan SPBE Kemenpanrb		

No	PERANGKAT DAERAH	URUSAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	2020	2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	NILAI 2022	Sumber Data	Permasalahan	Solusi
86	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PERSANDIAN	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur Teknologi Informatika (TI), keamanan sistem elektronik, dan data terintegrasi	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	Penentuan tingkat kematangan berdasarkan fakta, analisa, dan justifikasi dengan interval : 1. Rintisan 2. Terkelola 3. Terdefinisi 4. Terpadu dan teratur 5. Optimum	1	1	2	1	50,00%	SR	Laporan Hasil Pemantauan SPBE Kemenpanrb	Dokumen penilaian kurang lengkap dan tidak memenuhi kriteria	Permintaan kebutuhan dokumen akan dicukupi untuk tahun berikutnya
87	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Angka Investasi	Pertumbuhan Realisasi Investasi	Jumlah Akumulasi Realisasi Investasi Tahun n - Jumlah Akumulasi Realisasi Investasi n-1 dibagi Jumlah Akumulasi Realisasi Investasi n-1 x 100 %\	26.97 Persen	11,050 Persen	2,89 Persen	24,11 Persen	834,26%	ST	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP		
88	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	91, 09 Persen	Sangat Baik (91,103)	Sangat Baik (88,31)	Sangat Baik (91,44)	103,54%	ST	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP		
89	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	KOPERASI DAN USAHA MIKRO	Terwujudnya tertib administrasi	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	ST	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
90	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	KOPERASI DAN USAHA MIKRO	Meningkatnya Pengelolaan Koperasi	Prosentase Koperasi Aktif (%)	Jumlah Koperasi aktif tahun n / jumlah koperasi tahun n * 100	44.30 Persen	45.40 Persen (646 Koperasi))	44.11% (633 koperasi)	49.70% (755 Koperasi)	113%	ST	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		

No	PERANGKAT DAERAH	URUSAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	2020	2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	NILAI 2022	Sumber Data	Permasalahan	Solusi
91	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	KOPERASI DAN USAHA MIKRO	Meningkatnya Usaha Mikro	pertumbuhan usaha mikro	jumlah usaha mikro tahun n - tahun n-1/ tahun n-1 * 100	0.18 Persen (314 Usaha Mikro)	0,09 Persen (146 Usaha mikro)	0,10% (175 Usaha mikro)	1.08% (1.859 Usaha mikro)	1080%	ST	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
92	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PERDAGANGAN	Meningkatnya sistem distribusi usaha Perdagangan	Pertumbuhan Nilai Neraca perdagangan (US $)	jumlah nilai neraca perdagangan tahun n - nilai neraca perdagangan tahun n-1 / nilai neraca perdagangan tahun n-1 *100	0.02 Persen 1.431.784.855.09 USD	21,14 Persen 1.734.417.711 USD	0.04% 1.546.784.855.09 USD	0.06% 2.288.229.997.55 USD	150%	ST	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
93	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PERINDUSTRIAN	Meningkatkan dan mengembangkan produk – produk kerajinan IKM	Pertumbuhan IKM	Jumlah IKM tahun N - Jumlah IKM Tahun N-1 / Jumlah IKM Tahun N-1 *100	0.77 Persen (7331 IKM)	0,79 Persen (7389 IKM)	(0.81%) 7449 IKM	(0.81%) 7.450 IKM	100%	ST	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
94	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	PERPUSTAKAAN	Meningkatnya Kegemaran membaca masyarakat	Persentase Pemustaka	Jumlah pemustaka/Jumlah penduduk usia baca (5-59 Tahun)	51,87 Persen	42,83 Persen	60,32%	57,00%	94,49%	ST	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
95	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	PERPUSTAKAAN	Meningkatnya Kegemaran membaca masyarakat	Tingkat Ketercukupan Bahan Pustaka	Jumlah koleksi bahan pustaka/Jumlah penduduk usia baca (5-59 Tahun) dikali kebutuhan ideal membaca dalam 1 Tahun (2 buku)	49,43 Persen	39,78 Persen	57,49%	49,35%	85,84%	T	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
96	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	PERPUSTAKAAN	Meningkatnya Pembangunan Literasi	Efektifitas Penguatan Literasi	Jumlah pemustaka yang dibina melalui penguatan literasi/jumlah target pemustaka yang dibina	14,68 Persen	24,37 Persen	34,56%	36,38%	105,25%	ST	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
97	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	KEARSIPAN	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kearsipan Sesuai Ketentuan	Persentasi Unit Kearsipan yang Melaksanakan Tata Kelola Kearsipan Sesuai Ketentuan	Jumlah unit kearsipan yang melaksanakan tata kelola kearsipan sesuai ketentuan/Jumlah Unit Kearsipan	12,11 persen	12,83 Persen	16,46%	15,50%	94,12%	ST	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		

No	PERANGKAT DAERAH	URUSAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	2020	2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	NILAI 2022	Sumber Data	Permasalahan	Solusi
98	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	KEARSIPAN	Meningkatnya Memori Kolektif Daerah	Persentase Peningkatan Memori Kolektif Daerah	Jumlah memori kolektif daerah berjalan - Jumlah memori kolektif daerah sebelumnya/Jumlah memori kolektif daerah sebelumnya	1,48 Persen	13,95 Persen	2,10%	1,88%	89,63%	T	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
99	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD	Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja DPRD Sesuai Dengan Fungsinya	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah sarana dan prasarana yg terpenuhi dibagi dengan jumlah kebutuhan sarana dan prasarana x 100%	100 Persen	100 Persen	100%	93%	93,00%	ST	SEKRETARIAT DPRD		
100	KECAMATAN GRESIK	KEWILAYAHAN	Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Formulasi sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	81 Persen	85,19 Persen	83%	85,28%	103%	ST	KECAMATAN GRESIK		
101	KECAMATAN KEBOMAS	KEWILAYAHAN	Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Formulasi sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	90 Persen	91,3 Persen	91%	82,63%	91%	T	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		
102	KECAMATAN MANYAR	KEWILAYAHAN	Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Cukup Jelas	90 Persen	90,19 Persen	89%	88,68%	100%	ST	KECAMATAN MANYAR		

No	PERANGKAT DAERAH	URUSAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	2020	2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	NILAI 2022	Sumber Data	Permasalahan	Solusi
103	KECAMATAN CERME	KEWILAYAHAN	Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Formulasi sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	90,83 Persen (Nilai SKM Tahun 2020)	90,83 Persen	91,50%	82,32%	90%	T	Laporan Jatim Sukma		
104	KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN	KEWILAYAHAN	Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Formulasi sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	88,15 Persen	89,01 Persen	98	89,01	91%	ST	KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN		
105	KECAMATAN WRINGINANOM	KEWILAYAHAN	Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Cukup Jelas	85 Persen	97,36 Persen	92 Persen	92 Persen	100,00	ST	SKM 2022 Semester 2		
106	KECAMATAN SIDAYU	KEWILAYAHAN	Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Cukup Jelas	90 Persen	98,9 Persen	82	84,83	103%	ST	KECAMATAN SIDAYU		
107	KECAMATAN UJUNG PANGKAH	KEWILAYAHAN	Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Cukup Jelas	90 Persen	97,67 Persen	86	96,55	96,,07 %	ST	KECAMATAN UJUNG PANGKAH		
108	KECAMATAN PANCENG	KEWILAYAHAN	Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Cukup Jelas	90 Persen	98,66 Persen	82%	84,74%	103%	ST	KECAMATAN PANCENG		
109	BPPKAD	KEUANGAN	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah	Presentase OPD yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan sesuai Ketetuan	Jumlah PD yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan dibagi dengan Jumlah Total PD x 100%	100 Persen	100 Persen	100%	100%	100%	ST	BPPKAD		

No	PERANGKAT DAERAH	URUSAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	2020	2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	NILAI 2022	Sumber Data	Permasalahan	Solusi
110	BPPKAD	KEUANGAN	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah	Presentase Data Aset yang Akurat	100% *dikurangi* (((Jumlah Aset Daerah yang disajikan dala mlaporan keuangan unaudit dikurangi jumlah aset daerah yang disajikan dalam laporan keuangan audit) dibagi jumah aset daerah yang disajikan dalam laporan keuangan audit) dikali 100%)))	99.98 Persen	99.96 Persen	90%	100,12%	111%	ST	BPPKAD		
111	BPPKAD	KEUANGAN	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah	(Pendapatan daerah tahunan - pedapatan daerah tahun n-1) / pendapatan daerah tahun n-1 dikali 100%	5.78 Persen	659 Persen	1,95%	7,45%	382%	ST	BPPKAD		
112	KECAMATAN DRIYOREJO	KEWILAYAHAN	Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Cukup Jelas	80 Persen	95,36 Persen	87 Persen	88,40 Persen	88,40	ST	SKM 2022 Semester 2		
113	KECAMATAN MENGANTI	KEWILAYAHAN	Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Cukup Jelas	91 Persen	86,49 Persen	**75**	**83,31**	**111,08**	ST	KECAMATAN MENGANTI		
114	DINAS PENDIDIKAN	PENDIDIKAN	Peningkatan Rata-Rata Lama Usia Sekolah	Rata-rata lama sekolah	Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan dilakukan pada penduduk yang berusia 25 tahun ke atas dimana diasumsikan seseorang yang telah berumur 25 tahun, maka proses pendidikannya telah berakhir.	N / A	9,56 Persen	8,97	9,75	**108,70**	ST	DINAS PENDIDIKAN		
115	DINAS PENDIDIKAN	PENDIDIKAN	Peningkatan Rata-Rata Lama Usia Sekolah	Angka Harapan Lama Sekolah	Jumlah Penduduk 15 tahun ke atas yang sedah sekolah atau telah berijazah dikali lama masa pendidikan yang dihabiskan	N / A	13,77 Persen	13,74	13,96	**101,60**	ST	DINAS PENDIDIKAN		

No	PERANGKAT DAERAH	URUSAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	2020	2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	NILAI 2022	Sumber Data	Permasalahan	Solusi
116	DINAS PENDIDIKAN	PENDIDIKAN	Peningkatan Capaian SNP	Persentase satuan pendidikan yang memenuhi SNP (Standar Nasional Pendidikan)	Jumlah Satuan Pendidikan SD di Kabupaten Gresik/Satuan Pendidikan di Kabupaten Gresik yang Memenuhi SNP	N / A	48,25	23,83	28,13	**118,04**	ST	DINAS PENDIDIKAN		
117	DINAS PENDIDIKAN	PENDIDIKAN	Peningkatan Capaian SNP	Persentase satuan pendidikan yang memenuhi SNP (Standar Nasional Pendidikan)	Jumlah Satuan Pendidikan SMP di Kabupaten Gresik/Satuan Pendidikan di Kabupaten Gresik yang Memenuhi SNP	N / A	55,76	41,24	22,58	**54,75**	ST	DINAS PENDIDIKAN		
118	DINAS KESEHATAN	KESEHATAN	Meningkatnya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat beserta sumber daya kesehatan dalam pemberdayaan dan pelayanan kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Usia harapan hidup ditentukan oleh besarnya angka jumlah kematian bayi		72.67 Tahun	72.8 Tahun	72.99 Tahun	100,3%	ST	DINAS KESEHATAN		
119	DINAS KESEHATAN	KESEHATAN	Meningkatnya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat beserta sumber daya kesehatan dalam pemberdayaan dan pelayanan kesehatan masyarakat	Angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup	Angka Kematian Ibu/100 Ribu Kelahiran Hidup		316.37 /100.000 KH	96	94,18	101,9%	ST	DINAS KESEHATAN		
120	DINAS KESEHATAN	KESEHATAN	Meningkatnya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat beserta sumber daya kesehatan dalam pemberdayaan dan pelayanan kesehatan masyarakat	Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	Angka Kematian Bayi/100 Ribu Kelahiran Hidup		3.22 /1.000 KH	5,06	4,34	116,6%	ST	DINAS KESEHATAN		

No	PERANGKAT DAERAH	URUSAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	2020	2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	NILAI 2022	Sumber Data	Permasalahan	Solusi
121	DINAS KESEHATAN	KESEHATAN	Meningkatnya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat beserta sumber daya kesehatan dalam pemberdayaan dan pelayanan kesehatan masyarakat	Persentase Balita Stunting	Jumlah Balita Pada Tahun n/ Jumlah Balita Stunting		10,9	18,4	9,61	191,5%	ST	DINAS KESEHATAN		
122	DINAS KESEHATAN	KESEHATAN	Meningkatnya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat beserta sumber daya kesehatan dalam pemberdayaan dan pelayanan kesehatan masyarakat	Persentase Reproduction Rate (Rt) Covid-19	Cukup Jelas		67,31 Peren	60	59,16	101,4%	ST	DINAS KESEHATAN		
123	DINAS KESEHATAN	KESEHATAN	Meningkatnya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat beserta sumber daya kesehatan dalam pemberdayaan dan pelayanan kesehatan masyarakat	Success Rate TB	Jumlah Penderita TB/Jumlah Penderita TB yang Tertangani		92,17 Persen	90,5	88,71	98,0%	ST	DINAS KESEHATAN		
124	DINAS KESEHATAN	KESEHATAN	Meningkatnya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat beserta sumber daya kesehatan dalam pemberdayaan dan pelayanan kesehatan masyarakat	Persentase (SKM) Survey Kepuasan Masyarakat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah ≥ 80%	Survey		100 Persen	100	100	100%	ST	DINAS KESEHATAN		
125	DINAS KESEHATAN	KESEHATAN	Meningkatnya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat beserta sumber daya kesehatan dalam pemberdayaan dan pelayanan kesehatan masyarakat	Universal Health Coverage (UHC)	Cakupan kesehatan semesta menjamin seluruh masyarakat mempunyai akses untuk kebutuhan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang berkualitas dan efektif.		78.08 Persen	82	99,65	121,5%	ST	DINAS KESEHATAN		

No	PERANGKAT DAERAH	URUSAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	2020	2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	NILAI 2022	Sumber Data	Permasalahan	Solusi
126	DINAS KESEHATAN	KESEHATAN	Meningkatnya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat beserta sumber daya kesehatan dalam pemberdayaan dan pelayanan kesehatan masyarakat	Persentase puskesmas dengan rasio terhadap jumlah penduduk ≤ 1 : 45.000	Cukup Jelas		65.63 Persen	66	65,63	99,4%	ST	DINAS KESEHATAN		
127	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Meningkatnya Kualitas Sarana Infrastruktur sumber daya air	Persentase Kapasitas daya tampung air Waduk Kabupaten	Vol Daya Tampung Waduk Kab (m3)/Vol Daya Tampung Kapasitas Waduk (Kapasitas Ideal) m3	64,42 Persen	64,59 Persen	65,20%	65,01%	99,7%	ST	Bidang SDA		
128	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Meningkatnya Kualitas Sarana Infrastruktur sumber daya air	Persentase Panjang Jaringan Irigasi Kab Dalam Kondisi Baik	Jumlah Panjang Jaringan Irigasi/Jumlah Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	43,54 Persen	47,84 Persen	46,19%	47,89%	103,7%	ST	Bidang SDA		
129	DINAS CIPTA KARYA,PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PEKERJAAN CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya pelayanan infrastruktur air bersih dan limbah layak dan aman	Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur air bersih dan limbah yang layak dan aman melalui pendekatan Kawasan	dihitung dari rerata gabungan indikator Persentase Rumah Tangga Akses Air Bersih Non PDAM + Persentase penyediaan pelayanan SPALDT akses aman + Presentase panjang saluran drainase dalam kondisi baik	39,45 Persen	38,47 Persen	42,20%	41,80%	99,05%	ST	DINAS CIPTA KARYA,PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
130	DINAS CIPTA KARYA,PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PEKERJAAN CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur	Persentase Penerbitan Sertifikat bangunan laik fungsi	Jumlah Pengajuan/Jumlah Laik Fungsi	100 Persen	100 Persen	100%	100%	100%	ST	DINAS CIPTA KARYA,PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
131	DINAS CIPTA KARYA,PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PEKERJAAN CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur	Pertumbuhan tenaga terampil yang memiliki sertifikat	Jumlah Tenaga Terampil/Jumlah Tenaga Terampil yang Memiliki Sertifikat	3,31 Persen	16,59 Persen	9,89	24	243%	ST	DINAS CIPTA KARYA,PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		

No	PERANGKAT DAERAH	URUSAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	2020	2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	NILAI 2022	Sumber Data	Permasalahan	Solusi
132	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTRW atau RDTR	Jumlah Rencana Tata Ruang/RDTR dibagi dengan Pemanfaatan Ruang Sesuai Perda	95,00 Persen	94,79 Persen	95,00%	99,11%	104%	ST	Bidang Tata Ruang		
133	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Meningkatnya kualitas Sarana Infrastruktur jalan	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	Jumlah Panjang Jalan Kabupaten/Jumlah Jalan Kabupaten dalam kondisi Mantap	73,54 Persen	74,29 Persen	70,47%	74,60%	106%	ST	Bidang Bina Marga		
134	KECAMATAN KEDAMEAN	KEWILAYAHAN	Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Cukup Jelas		91,53 Persen	92	82,18	89,33	T	KECAMATAN KEDAMEAN		
135	KECAMATAN SANGKAPURA	KEWILAYAHAN	Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Cukup Jelas		92 Persen	**100**	**82,71**	**82,71%**	T	KECAMATAN SANGKAPURA		
136	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan kesejahteraan rakyat secara agile dan inklusif serta kebijakan bidang hukum yang harmonis	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Nilai LPPD dari Kemendagri	Kurang Dari 3	3,31	3.1	-	100%	ST	SEKRETARIAT DAERAH	Penilaian LPPD, sejak pandemi Covid 19 hingga saat ini, belum ada penilaian LPPD yang dikeluarkan oleh Kemendagri	
137	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan kesejahteraan rakyat secara agile dan inklusif serta kebijakan bidang hukum yang harmonis	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang difasilitasi	Cukup Jelas	100 Persen	95,45%	100%	95,43%	95%	ST	SEKRETARIAT DAERAH		
138	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan kesejahteraan rakyat secara agile dan inklusif serta kebijakan bidang hukum yang harmonis	Persentase produk hukum yang ditetapkan	Jumlah produk hukum yang diproses dibagi jumlah usulan produk hukum dikali 100%	90 Persen	83,70 Persen	90 persen	100 persen	111%	ST	Buku Register Perda, Perbup, Keputusan Bupati		

No	PERANGKAT DAERAH	URUSAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	2020	2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	NILAI 2022	Sumber Data	Permasalahan	Solusi
139	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pembangunan, perekonomian dan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berdaya saing serta pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntable	Persentase Perangkat Daerah yang memenuhi minimal 90 % target kinerja penyerapan APBD	Jumlah Perangkat Daerah yang memenuhi minimal 90% penyerapan APBD dibagi jumlah Perangkat Daerah X 100%		68,75 Persen	85%	69.57%	81.84%	T	32 dari 46 Perangkat Daerah dengan realisasi penyerapan APBD minimal 90%		
140	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pembangunan, perekonomian dan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berdaya saing serta pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntable	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (nilai dari LKPP)	Hasil Pengisian Penilaian Mandiri Tingkat Kematangan Organisasi UKPBJ	(Level 2 Esensi)	(Level 3 Pro Aktif)	(Level 3 Pro Aktif)	(Level 2 Esensi)	(Level 2 Esensi)	ST	https://siukpbj.lkpp.go.id		
141	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pembangunan, perekonomian dan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berdaya saing serta pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntable	Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian yang ditetapkan	Jumlah kebijakan bidang perekonomian yang disahkan dibagi jumlah kebijakan bidang perekonomian yang disusun X 100%	100 Persen	100 Persen	100%	100%	100%	ST	SEKRETARIAT DAERAH		

No	PERANGKAT DAERAH	URUSAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	2020	2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	NILAI 2022	Sumber Data	Permasalahan	Solusi
142	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pembangunan, perekonomian dan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berdaya saing serta pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntable	Efektivitas Perumusan Kebijakan Administrasi Pembangunan	Jumlah kebijakan administrasi pembangunan yang dilaksanakan dibanding jumlah administrasi pembangunan yang ditetapkan dikali 100%	100 Persen	100 Persen	100%	100%	100%	ST	1. Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 2. Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026 3. Perbup Nomor 33 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2023 4. Perbup Nomor 34 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan Anggaran		
143	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	Terwujudnya pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi secara dinamis serta pelayanan protokol, komunikasi pimpinan, dan umum yang responsif	Predikat AKIP	Berdasarkan Evaluasi Kemenpan RB	81,31 Persen	81,31%	82.00	81.59	99.5%	ST	Laporan Hasil Evalaasi AKIP Tahun 2022		
144	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	Terwujudnya pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi secara dinamis serta pelayanan protokol, komunikasi pimpinan, dan umum yang responsif	Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan	Cukup Jelas	n/a	87.2	85	86,39	102%	ST	SEKRETARIAT DAERAH	Berdasarkan Survey Kepuasan Masyarakat yang di sebar melalui Questionaire di OPD yang difasilitasi Keprotokolan :2021 : 87.2 2022 86,39	
145	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	Terwujudnya pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi secara dinamis serta pelayanan protokol, komunikasi pimpinan, dan umum yang responsif	Indeks Kepuasan Pelayanan Umum	Cukup Jelas	n/a	Baik	Baik	Sangat Baik	> 100%	ST	SEKRETARIAT DAERAH		
146	KECAMATAN BALONGPANGGANG	KEWILAYAHAN	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Tingkat kecamatan	Nilai Indeks kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecmatan	Hasil SKM sesuai Permenpan No. 14 Tahun 2017	98	98	99	99	100,00%	ST	KECAMATAN BALONGPANGGANG		

No	PERANGKAT DAERAH	URUSAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	2020	2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	NILAI 2022	Sumber Data	Permasalahan	Solusi
147	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KEBUDAYAAN	Terwujudnya Pengelolaan Kekayaan Budaya Yang Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Budaya Yang Dilestarikan	Jumlah Budaya yang diLestarikan Tahun N - (N-1) dibandingkan dengan Jumlah Budaya yang diLestarikan tahun N-1 dikalikan 100%	100 Persen	94,93%	1,35%	13,53%	1002%	ST	Bidang Kebudayaan		
148	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PARIWISATA	Terwujudnya jumlah kunjungan wisata sebagai bagian pembangunan perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan	Persentase pertumbuhan kunjungan wisata	Jumlah kunjungan wisata tahun N - (n-1) dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisata tahun (N-1) dikalikan 100%	2 - 3 Persen	3,5%	2-3%	96,25%	3850%	ST	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
149	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PARIWISATA	Meningkatnya pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif dalam mendukung perekonomian	Persentase pertumbuhan sub sektor ekonomi kreatif	Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang difasilitasi dibandingkan dengan sub sektor ekonomi kreatif yang ada dikalikan 100%	-	-	30%	30,77%	102,56%	ST	Bidang Ekonomi Kreatif		
150	KECAMATAN BENJENG	KEWILAYAHAN	Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Formulasi sesuai Permen PAN no 14 tahun 2017	75,61	79,53%	90	84,41	93,79	ST	KECAMATAN BENJENG		
151	KECAMATAN BALONGPANGGANG	KEWILAYAHAN	Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Formulasi sesuai Permen PAN no 14 tahun 2017	95	103,45%	99	95,6	103,5	ST	KECAMATAN BALONGPANGGANG		
152	KECAMATAN BUNGAH	KEWILAYAHAN	Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Formulasi sesuai Permen PAN no 14 tahun 2017	79,6	98%	81	87,55%	108,09	ST	KECAMATAN BUNGAH		
153	KECAMATAN DUKUN	KEWILAYAHAN	Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Formulasi sesuai Permen PAN no 14 tahun 2017	89,91%	92,64%	91	92,64	108,09	ST	KECAMATAN DUKUN		
154	KECAMATAN TAMBAK	KEWILAYAHAN	Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Formulasi sesuai Permen PAN no 14 tahun 2017	85	90%	92	88,24%	104,2%	ST	KECAMATAN TAMBAK		

No	PERANGKAT DAERAH	URUSAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	2020	2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	NILAI 2022	Sumber Data	Permasalahan	Solusi
155	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PERENCANAAN	Menghadirkan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Cukup Jelas	100 Persen	100 Persen	100%	100%	100%	ST	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
156	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Mendorong Penguatan Inovasi Daerah untuk Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Inovatif dan Partisipatif	Pertumbuhan capaian inovasi daerah	Pertumbuhan tiap tahun dihitung dari Akumulasi Tahun 2015-2020 (Registrasi di Sinovik dan IGA)	34 Inovasi	17.65% (40 Inovasi)	20%	47,37% 66 Inovasi	236,85%	ST	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
157	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Meningkatnya Profesionalitas dan Kinerja ASN dalam memberikan pelayanan kepegawaian yang berkualitas	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	Pengukuran IPASN oleh BKN meliputi 4 dimensi : kulaifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin	47	49,62	55	53,08	96,51%	ST	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH		

Lampiran 4

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2022

Realisasi Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah Tahun 2022

URUSAN		PD	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	2020	2021	TARGET 2022	Realisasi 2022	Capaian	NILAI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	Permasalahan	Tindak Lanjut
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	TENAGA KERJA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN TENAGA KERJA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	Persen	100%	100	100%	100%	100,00	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN TENAGA KERJA		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	TENAGA KERJA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN TENAGA KERJA	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Data Sektoral Tenaga Kerja yang diakses secara elektronik	Persen	10%	20%	40%	40%	100,00	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN TENAGA KERJA		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	TENAGA KERJA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN TENAGA KERJA	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Tingkat Kematangan Layanan Ketenagakerjaan	-	N/A	1	1	1	100,00	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN TENAGA KERJA		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	TENAGA KERJA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN TENAGA KERJA	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang diberi pelatihan	Persen	36,90	25,03	37,28	7,56	20,29	SR	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN TENAGA KERJA	Kuota peserta pelatihan kompetensi jumlahnya sedikit bila dibandingkan dengan jumlah pencari kerja yang terdaftar.	Solusinya kuota peserta pelatihan kompetensi ditambah lagi jumlahnya. (Baik melalui anggaran APBD Kab. Gresik, APBD Prov. Jatim, APBN, Mandiri maupun CSR dari perusahaan.)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	TENAGA KERJA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN TENAGA KERJA	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	Persen	46,60	57,62	48,94	26,82	54,80	R	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN TENAGA KERJA	Karena dampak pandemi covid, banyak perusahaan melaksanakan efisiensi tenaga kerja sehingga posisi jabatan yang dibutuhkan banyak berkurang.	Perlunya kerjasama masing-masing stakeholder terkait untuk menciptakan iklim investasi dan ketenangan berusaha/hubungan industrial yang kondusif sehingga mempercepat recovery perusahaan.
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	TENAGA KERJA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN TENAGA KERJA	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	Persen	23,13	15,44	23,36	24,19	103,53	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN TENAGA KERJA		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	STATISTIK	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Analisa Data Sektoral yang disusun	Persen	N/A	7%(2/30)	13% (4/30)	13% (4/30)	100%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	SOSIAL	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN SOSIAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	Persen	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN SOSIAL		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	SOSIAL	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN SOSIAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dibina	Persen	92,15%	110,13%	92,91%	123,80%	133,24%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN SOSIAL		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	SOSIAL	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN SOSIAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Data Urusan Sosial yang dimutakhirkan	Persen	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN SOSIAL		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	SOSIAL	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN SOSIAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Puskesos yang terbentuk	Persen	4,93%	14,79%	41,09%	33,71%	82,03%	T	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN SOSIAL	Tidak didukung oleh anggaran (sumber dana swadaya)	Akan dilengkapi dengan data dukung dengan jumlah Puskesos yang dibentuk 120

URUSAN		PD	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	2020	2021	TARGET 2022	Realisasi 2022	Capaian	NILAI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	Permasalahan	Tindak Lanjut
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	SOSIAL	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi	Persen	0,39%	0,78%	0,28%	0,40%	141,08%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN SOSIAL		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	SOSIAL	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	2,07%	2,66%	2,24%	0,01%	0,62%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN SOSIAL		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	SOSIAL	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Keluarga Terdaftar DTKS yang mendapatkan Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persen	35,87%	37,11%	38,72%	0,00%	0,00%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN SOSIAL		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	SOSIAL	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN SOSIAL	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana Oleh Tagana	Persen	70,29%	63,43%	85,95%	97,12%	113,00%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN SOSIAL		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	SOSIAL	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN SOSIAL	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan yang difasilitasi	Persen	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN SOSIAL		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tercapainya Nilai SAKIP OPD Dengan Predikat Memuaskan		80	80,76	100	100	100%	ST	SEKRETARIAT DEWAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	ST	SEKRETARIAT DEWAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyusunan Regulasi DPRD	Persen	73%	100%	100%	72%	72%	ST	SEKRETARIAT DEWAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi penganggaran DPRD	Persen	180%	100%	100%	102%	102%	ST	SEKRETARIAT DEWAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan DPRD	Persen	70%	100%	100%	143%	143%	ST	SEKRETARIAT DEWAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat		Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	100%	ST	SEKRETARIAT DEWAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Integritas Jabatan/Organisasi	Indeks	1,36	3,32	1.70	3.32	195%	ST	SEKRETARIAT DAERAH		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PENDIDIKAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENDIDIKAN	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Prosentase satuan pendidikan tingkat PAUD yang Tenaga Pendidik dan Kependidikannya sesuai dengan SNP	Persen	80%	83,17%	93%	91,00%	97,85%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENDIDIKAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase OPD dengan Nilai AKIP Minimal “A”	Persen	70,83	77%	79%	79%	100.22%	ST	SEKRETARIAT DAERAH		

URUSAN		PD	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	2020	2021	TARGET 2022	Realisasi 2022	Capaian	NILAI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	Permasalahan	Tindak Lanjut
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Rata Rata Indeks Kepuasan Masyarakat di Unit Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks	82,95	92,62	86	80.15	93.2%	ST	SEKRETARIAT DAERAH		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Protokol dan Kehumasan yang difasilitasi	Persen	100%	100%	85%	89,50%	93.2%	ST	SEKRETARIAT DAERAH	Terkadang ada beberapa OPD yang memberikan nilai jelek terhadap Kegiatan yang difasilitasi Keprotokolan,karena schedule atau kegiatan Pimpinan (dalam hal ini Bupati dan Wabup) yang padat diakibatkan beberapa OPD yang menyelenggarakan acara tidak dihadiri	Memberikan Konfirmasi terhadap OPD terkait acara yang di fasilitasi Keprotokolan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase temuan pada laporan keuangan yang ditindaklanjuti	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	ST	SEKRETARIAT DAERAH		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Pimpinan yang difasilitasi	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	ST	SEKRETARIAT DAERAH		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang difasilitasi	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	ST	SEKRETARIAT DAERAH		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana Prasarana yang dipelihara	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	ST	SEKRETARIAT DAERAH		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan data dukung IKK	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	ST	SEKRETARIAT DAERAH	Banyak OPD yang belum bisa mencukupi data dukung IKK sesuai permintaan data LPPD	Dilaksanakan rapat desk antara OPD dengan Tim Review APIP dan Tim LPPD untuk mencukupi data tersebut
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Predikat Capaian Fasilitasi Kegiatan Kesra	Indeks	Cukup Baik	Baik	Baik (62,51-81,25)	Baik	95%	ST	SEKRETARIAT DAERAH		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Perda yang diproses	Persen	90%	100%	90%	100%	111%	ST	SEKRETARIAT DAERAH		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Perbup yang diproses	Persen	90%	71%	90%	100%	111%	ST	SEKRETARIAT DAERAH		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Keputusan Bupati yang diproses	Persen	90%	85%	90%	100%	111%	ST	SEKRETARIAT DAERAH		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan administrasi pembangunan yang disahkan	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	ST	SEKRETARIAT DAERAH		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Nilai evaluasi kinerja TPID	Indeks	60	67	67	67	100%	ST	SEKRETARIAT DAERAH	Nilai TPID berdasarkan penilaian dari TPIN	

URUSAN		PD	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	2020	2021	TARGET 2022	Realisasi 2022	Capaian	NILAI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	Permasalahan	Tindak Lanjut
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pengadaan barang dan jasa	Indeks	3	3	3	3	100%	ST	SEKRETARIAT DAERAH		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian kinerja kegiatan perangkat Daerah	Persen	-	100%	100%	100%	100%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penurunan Backlog Perumahan	Persen	16.73%	7%	4,08%	12,89%	316%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Presentase panjang Jalan lingkungan kawasan kumuh yang ditangani	Persen	N/A	2,41%	4,53%	12,64%	279%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Presentase panjang Saluran lingkungan kawasan kumuh yang ditangani	Persen	N/A	2,61%	3,62%	1,04%	29%	R	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Pekerjaan yang semula berupa saluran lingkungan dialihkan ke program nawakarsa bupati (tematik)	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Rumah Swadaya tidak layak huni yang ditangani	Persen	16.59%	1,87%	2,49%	5,21%	209%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase PSU Perumahan di permukiman dalam kondisi baik	Persen	71.11%	0,94%	0,16%	0,92%	575%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase PSU Makam di permukiman dalam kondisi baik	Persen	9.93%	0,54%	0,83%	0,71%	86%	T	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase PSU Akses Sanitasi di permukiman dalam kondisi baik	Persen	99.30%	0,04%	0,06%	0,05%	83%	T	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Capaian Kinerja pindah ke Program air limbah	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PERTANIAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERTANIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERTANIAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PERTANIAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	prosentase realisasi pupuk bersubsidi	Persen	94,52%	97,11%	95,5%	99,99%	100%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERTANIAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PERTANIAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	prorentase alsintan dalam kondisi baik	Persen	89,98%	90,00%	90,20%	91,38%	101,31%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERTANIAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PERTANIAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas lahan LP2B dan LCP2B yang terlindungi	ha	27721 ha	27721 ha	27721 ha	27721 ha	100%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERTANIAN		

URUSAN		PD	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	2020	2021	TARGET 2022	Realisasi 2022	Capaian	NILAI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	Permasalahan	Tindak Lanjut
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PERTANIAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentasi Poktan/Gapoktan yang Terfasilitasi Infrastruktur Pertanian	Persen	31,39%	31,47%	32,89%	31,99%	97,28%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERTANIAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PERTANIAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERTANIAN	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase kondisi ternak sehat	Persen	87,00%	87,13%	87,70%	87,91%	100,24%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERTANIAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PERTANIAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERTANIAN	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase penanganan organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persen	81,00%	83,00%	81,82%	74,87%	91,51%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERTANIAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PERTANIAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERTANIAN	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase penyuluh bersertifikat	Persen	21,13%	27,12%	31,35%	43,64%	139,19%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERTANIAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PERTANIAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERTANIAN	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani dengan klasifikasi Madya	Persen	10,16%	11,60%	13,04%	13,49%	103,44%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERTANIAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PERTANAHAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERTANAHAN	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Konflik/ Kasus tanah garapan Yang Diselesaikan	Persen	100	42%	100%	90%	90,0%	T	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERTANAHAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PERTANAHAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERTANAHAN	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase ganti rugi tanah yang dibebaskan untuk kepentingan umum	Persen	50%	65%	100%	18%	18,0%	SR	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERTANAHAN	Kendala : belum tercapai kesepakatan harga pada saat pelaksanaan pembebasan lahan	akan dilakukan kaji ulang di tahun 2023
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PERTANAHAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERTANAHAN	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase tanah kosong/ terlantar aset Pemerintah Daerah yang telah dimanfaatkan	Persen	100%	47%	100%	99,14%	99,14%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERTANAHAN	BPPKAD Aset	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PERTANAHAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERTANAHAN	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Tanah Pemerintah daerah yang bersertifikat	Persen	20,22%	64%	1000	827	83%	T	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERTANAHAN	BPPKAD Aset	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PERSANDIAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Penanganan Serangan Cyber	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PERPUSTAKAAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	Persen	100%	100%	100%	100%	100,00%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PERPUSTAKAAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai SKM Perpustakaan		SANGAT BAIK (98,00)	90 SANGAT BAIK	BAIK (62,51-81,25)	84,59 (SANGAT BAIK)	100,00%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PERPUSTAKAAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan yang dibina	Persen	56,01%	64,08%	70,67%	73,39%	103,84%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PERPUSTAKAAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Kelestarian Koleksi Nasional, Naskah Kuno Dan Muatan Lokal	Persen	N/A	50,00%	60%	55%	91,67%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		

URUSAN		PD	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	2020	2021	TARGET 2022	Realisasi 2022	Capaian	NILAI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	Permasalahan	Tindak Lanjut
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PERDAGANGAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Presentase sarana perdagangan yang dipelihara	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PERDAGANGAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Prosentase perubahan IHK perbulan (indeks harga konsumen)	Persen	N/A	0,23%	menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dengan inflasi 3%	menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dengan inflasi 6.59%	45%	SR	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1. Target inflasi Indonesia berdasarkan PMK No. 101/PMK.010/2021 adalah 3+-1% (sepertinya target inflasi Gresik mengikuti ini). 2. Inflasi di Indonesia pada Tahun 2022 adalah 5,51%. (Jauh dari target) 3. Inflasi Provinsi	- Tahun 2024 dimulai perhitungan inflasi untuk Kota Gresik sendiri dimulai dengan Survey Biaya Hidup pada tahun 2022 lalu. -Subsidi kepada pelaku usaha -Kebijakan Operasi Pasar Murah -Kerjasama antar daerah -Melakukan pemantauan harga secara berkala untuk
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PERDAGANGAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pertumbuhan nilai ekspor		1.37%	47,13%	2.32% (1.542.587.407.84 USD)	3.54% (2.353.590.878,17 $)	153%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PERDAGANGAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat UTTP berterra sah	Persen	99.87%	100%	97.34%(3800 UTTP)	157.44%(5983 UTTP)	162%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KELUARGA BERENCANA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Program OPD yang sudah terfasilitasi	Persen	100%	100%	100%	100%	100,00%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KELUARGA BERENCANA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PERLINDUNGAN ANAK		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KELUARGA BERENCANA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Unit Pemberi Layanan yang Telah tersosialisasi Program KKBPK	Persen	N/A	100%	100%	100%	100,00%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KELUARGA BERENCANA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PERLINDUNGAN ANAK		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KELUARGA BERENCANA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Unmet Need ber-KB	Persen	13,88%	10,08%	10,5%	9,55%	109,95%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KELUARGA BERENCANA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PERLINDUNGAN ANAK		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KELUARGA BERENCANA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Pembina Keluarga Berencana Desa yang berstatus mandiri.	Persen	6,16%	27,25%	7%	27,25%	389,25%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KELUARGA BERENCANA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PERLINDUNGAN ANAK		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PENGAWASAN	INSPEKTORAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	Persen	100%	108%	100%	139%	139%	ST	INSPEKTORAT		

URUSAN		PD	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	2020	2021	TARGET 2022	Realisasi 2022	Capaian	NILAI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	Permasalahan	Tindak Lanjut
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PENGAWASAN	INSPEKTORAT	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase tindak lanjut audit internal	Persen	100%	100%	100%	94%	94%	ST	INSPEKTORAT	1. Jumlah tugas mandatori yang harus dilaksanakan banyak.	1. Memasukkan kegiatan monitoring tindak lanjut pemeriksaan APIP ke dalam dokumen perencanaan pengawasan berbasis risiko agar mendapat alokasi waktu pelaksanaannya.
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PENGAWASAN	INSPEKTORAT	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase tindak lanjut audit eksternal	Persen	74,57%	76,26%	100%	79%	79%	T	INSPEKTORAT	1. Penyelesaian tindak lanjut terhambat karena: a. Temuan sudah lama tahun pemeriksaannya b. Adanya pergantian personil pada OPD dikarenakan mutasi, promosi dan purna tugas. c. Kurangnya pemahaman OPD atas rekomendasi	a. Memberikan file Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) serta riwayat tindak lanjutnya. b.1. Memberikan matriks temuan yang update dan melaksanakan pendampingan untuk pemenuhan dokumen tindak lanjut. b.2. Menjelang pembahasan dengan BPK selalu mengadakan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PENGAWASAN	INSPEKTORAT	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase tindak lanjut aduan masyarakat	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	ST	INSPEKTORAT		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PENGAWASAN	INSPEKTORAT	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Nilai evaluasi Internal AKIP OPD dengan persentase minimal A	Persen	100%	100%	100%	79%	79%	T	INSPEKTORAT	1. Dokumen evaluasi SAKIP yang kurang lengkap. 2. Perbedaan persepsi baik di lingkup internal evaluator maupun antara inspektorat dengan bag organisasi.	1. Diadakan sosialisasi dan pendampingan untuk pengisian LKE SAKIP. 2.a. Dilaksanakan koordinasi internal, penyamaan persepsi atas pernyataan dan dokumen pemenuhan LKE. 2.b. Melakukan koordinasi dan hadir pada saat bag. organisasi melakukan sosialisasi
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PENGAWASAN	INSPEKTORAT	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Maturitas SPIP OPD yang dievaluasi	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	ST	INSPEKTORAT		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kelitbangan		N/A	>81.26% (sangat baik)	>81.26% (sangat baik)	87,77	108%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Capaian Indeks Inovasi Daerah		N/A	43.04 (inovatif)	50,82 (Inovatif)	48,4 (inovatif)	95%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Kajian Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti (Regulasi dan dimanfaatkan oleh bidang atau OPD lain)		N/A	100%	100%	100%	100%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		

URUSAN		PD	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	2020	2021	TARGET 2022	Realisasi 2022	Capaian	NILAI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	Permasalahan	Tindak Lanjut
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Fasilitasi Pendampingan Satu Data		N/A	100%	100%	100%	100%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEPEGAWAIAN DAERAH	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Prosentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis 20 JP	Persen	20%	62%	65%	60%	92%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEPEGAWAIAN DAERAH		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEPEGAWAIAN DAERAH	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Prosentase Pejabat Struktural yang memiliki sertifikat Pelatihan Kepemimpinan sesuai jenjang	Persen	66%	63%	72%	67%	93%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEPEGAWAIAN DAERAH		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PENDIDIKAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENDIDIKAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian Program OPD	Persen	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENDIDIKAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PENDIDIKAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka partisipasi murni SD/MI/ sederajat	Persen	96,67	97,00%	98,68%	96,00%	97,28%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENDIDIKAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PENDIDIKAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni SMP/MTS/ Sederajat	Persen	74.77%	75,00%	77,16%	74,24%	96,22%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENDIDIKAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PENDIDIKAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat	Persen	102.88%	103,00%	104,00%	101,81%	97,90%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENDIDIKAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PENDIDIKAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMP/mts/sederajat	Persen	93.68%	94,99%	96,85%	94,51%	97,59%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENDIDIKAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PENDIDIKAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APS (Angka Partisipasi Sekolah) SD	Persen	100,00%	101,00%	102,00%	104,71%	102,66%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENDIDIKAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PENDIDIKAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APS (Angka Partisipasi Sekolah) SMP	Persen	94,00%	94,99%	97,00%	88,87%	91,62%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENDIDIKAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PENDIDIKAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	75.95%	80,00%	81,89%	82,93%	101,28%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENDIDIKAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PENDIDIKAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/paket A yang setara gender	Persen	72,58%	95,00%	97,00%	98,97%	102,03%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENDIDIKAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PENDIDIKAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ Paket B yang setara gender	Persen	0,00%	75,00%	76,00%	97,68%	128,53%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENDIDIKAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PENDIDIKAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah yang merumuskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS)	Persen	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENDIDIKAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PENDIDIKAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENDIDIKAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Prosentase satuan pendidikan SD yang memiliki Standar Isi sesuai SNP	Persen		85,00%	86,00%	85,00%	98,84%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENDIDIKAN		

URUSAN		PD	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	2020	2021	TARGET 2022	Realisasi 2022	Capaian	NILAI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	Permasalahan	Tindak Lanjut
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PENDIDIKAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENDIDIKAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Prosentase satuan pendidikan SMP yang memiliki Standar Isi sesuai SNP	Persen		89,00%	90,00%	89,00%	98,89%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENDIDIKAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PENDIDIKAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENDIDIKAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Prosentase satuan pendidikan PAUD yang memiliki Standar Isi sesuai SNP	Persen		80,00%	81,00%	80,00%	98,77%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENDIDIKAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PENDIDIKAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENDIDIKAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Prosentase satuan pendidikan tingkat SD yang Standar Kelulusannya sesuai dengan SNP	Persen		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENDIDIKAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PENDIDIKAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENDIDIKAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Prosentase satuan pendidikan tingkat SMP yang Standar Kelulusannya sesuai dengan SNP	Persen		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENDIDIKAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PENDIDIKAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENDIDIKAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Prosentase satuan pendidikan tingkat SD yang Standar Prosesnya sesuai dengan SNP	Persen		84,00%	85,00%	84,00%	98,82%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENDIDIKAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PENDIDIKAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENDIDIKAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Prosentase satuan pendidikan tingkat SMP yang Standar Prosesnya sesuai dengan SNP	Persen		88,00%	89,00%	88,00%	98,88%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENDIDIKAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PENDIDIKAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENDIDIKAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Prosentase satuan pendidikan tingkat PAUD yang Standar Prosesnya sesuai dengan SNP	Persen		81,00%	81,00%	80,00%	98,77%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENDIDIKAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PENDIDIKAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENDIDIKAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Prosentase satuan pendidikan SD yang memiliki Standar Penilaian sesuai SNP	Persen		84,00%	84,00%	83,00%	98,81%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENDIDIKAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PENDIDIKAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENDIDIKAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Prosentase satuan pendidikan SMP yang memiliki Standar Penilaian sesuai SNP	Persen	97,33%	88,00%	88,00%	87,00%	98,86%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENDIDIKAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PENDIDIKAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENDIDIKAN	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Prosentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang sesuai dengan SNP	Persen	87,45%	97,87%	97,87%	95,37%	97,45%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENDIDIKAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PENDIDIKAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENDIDIKAN	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Prosentase satuan pendidikan tingkat SD yang Tenaga Pendidik dan Kependidikannya sesuai dengan SNP	Persen	97,33%	97,00%	97,00%	96,50%	99,48%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENDIDIKAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PENDIDIKAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENDIDIKAN	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Prosentase satuan pendidikan tingkat SMP yang Tenaga Pendidik dan Kependidikannya sesuai dengan SNP	Persen	80,00%	97,00%	97,00%	96,00%	98,97%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENDIDIKAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PENDIDIKAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENDIDIKAN	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Prosentase satuan pendidikan tingkat PAUD yang Tenaga Pendidik dan Kependidikannya sesuai dengan SNP	Persen	80,00%	93,00%	93,00%	91,00%	97,85%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENDIDIKAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PENDIDIKAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENDIDIKAN	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	Persen	80,00%	98,33%	98,33%	97,23%	98,88%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENDIDIKAN		

URUSAN		PD	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	2020	2021	TARGET 2022	Realisasi 2022	Capaian	NILAI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	Permasalahan	Tindak Lanjut
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PENDIDIKAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENDIDIKAN	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase SMP/mts berakreditasi minimal B	Persen	80,00%	89,95%	89,95%	86,03%	95,64%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENDIDIKAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PENDIDIKAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENDIDIKAN	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase satuan pendidikan formal yang memiliki ijin yang berlaku	Persen	N/A	N/A	98,50%	72,05%	73,15%	S	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENDIDIKAN	Karena adanya peraturan baru yang tidak mengarahkan untuk ijin operasional sehingga kesadaran lembaga untuk memperpanjang ijin menurun	Akan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap sekolah/lembaga terkait ijin operasional
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PENDIDIKAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENDIDIKAN	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase satuan pendidikan PAUD yang memiliki ijin yang berlaku	Persen	N/A	N/A	87,00%	61,22%	70,37%	S	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENDIDIKAN	Karena adanya peraturan baru yang tidak mengarahkan untuk ijin operasional sehingga kesadaran lembaga untuk memperpanjang ijin menurun	Akan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap sekolah/lembaga terkait ijin operasional
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PENDIDIKAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENDIDIKAN	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Pertumbuhan karya pelajar dan tenaga pendidik	Persen	80,00%	12	12	12	100,00%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENDIDIKAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PENANAMAN MODAL	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran kegiatan	Persen	99%	100%	90%	100%	111,11%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
URUSAN KEWILAYAHAN KECAMATAN	PENANAMAN MODAL	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	Persen	84,18%	21,90%	15,62%	117,88%	754,67%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PENANAMAN MODAL	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Pertumbuhan Promosi Penanaman Modal	Persen	16,67%	57,14%	4,27%	70,00%	1639,34%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PENANAMAN MODAL	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Ijin	Persen	90,00%	81,20%	75,00%	117,55%	156,73%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PENANAMAN MODAL	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kepatuhan Perusahaan	Persen	103,00%	31,70%	30,00%	53,42%	178,07%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PENANAMAN MODAL	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Tingkat Kematangan Layanan Penanaman Modal	Indeks	4	4	4	4	100,00%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		

URUSAN		PD	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	2020	2021	TARGET 2022	Realisasi 2022	Capaian	NILAI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	Permasalahan	Tindak Lanjut
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KELUARGA BERENCANA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Usulan Perempuan yang Telah Diakomodasi dalam Musrenbang, Musrenbangdes dan Forum OPD	Persen	N/A	N/A	15%	43,28	288,53%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KELUARGA BERENCANA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PERLINDUNGAN ANAK		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KELUARGA BERENCANA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Berhasil Diselesaikan	Persen	96%	63%	96%	87,50%	91,15%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KELUARGA BERENCANA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PERLINDUNGAN ANAK		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KELUARGA BERENCANA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Ketersediaan Data Gender dan Anak mengacu pada indikator PermenPPPA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Data Gender dan Anak	Persen	N/A	100%	10%	12,50%	125%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KELUARGA BERENCANA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PERLINDUNGAN ANAK		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KELUARGA BERENCANA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Nilai Klaster Kelembagaan pada Penilaian Mandiri Kabupaten Layak Anak	Persen	N/A	100 poin	50%	79,84%	159,68%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KELUARGA BERENCANA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PERLINDUNGAN ANAK		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KELUARGA BERENCANA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Jumlah kasus kekerasan yang berhasil terminasi / jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani *100%	Persen	N/A	82%	120 poin	111,5 poin	92,92%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KELUARGA BERENCANA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PERLINDUNGAN ANAK		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	Persen	N/A	100%	100%	83,42%	83,42%	T	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Infrastruktur Pelayanan Publik Desa dalam Kondisi Baik	Persen	N/A	14%	17%	33,27%	195%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Desa yang melaksanakan Kerjasama	Persen	N/A	3,33%	4,24%	5,76%	136%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Aparatur Desa dan BPD yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tata kelola pemerintahan desa	Persen	N/A	62,67%	60,61%	72,36%	119%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		

URUSAN		PD	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	2020	2021	TARGET 2022	Realisasi 2022	Capaian	NILAI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	Permasalahan	Tindak Lanjut
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN usaha milik desa (Bumdes) dan PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN usaha bersama milik desa (Bumades) dengan status Maju	Persen	N/A	17,82%	19,4%	26,36%	136%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Cepat Berkembang	Persen	N/A	79,09%	58,17%	90,91%	156%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa pengelolaan aset desa sesuai Permendagri No.1 Th 2016	Persen	N/A	18,18%	70%	100,00%	143%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan perencanaan pembangunan desa sesuai Permendesa PDTT No 17 tahun 2019	Persen	N/A	90,91%	65%	100,00%	154%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang difasilitasi	Persen	N/A	36,88%	34,74%	47,02%	135%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	Persen	N/A	100%	100%	100%	100,0%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Waduk yang dinormalisasi setiap tahun	Persen	2,56%	5,77%	7,05%	6,41%	90,9%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Panjang Saluran Irigasi yang terpelihara setiap tahun	Persen	16,24%	4,30%	7,72%	7,60%	98,4%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga Akses Air Bersih Non PDAM	Persen	12,91%	13,82%	16,17%	16,31%	101%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Prosentase penyediaan pelayanan SPALDT akses aman	Persen	52,74%	45,55%	55,20%	52,72%	96%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Presentase panjang saluran drainase dalam kondisi baik	Persen	52,70%	56,03%	55,22%	56,38%	102%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Pembangunan Gedung daerah sesuai dengan Kebijakan Strategis	Persen	84%	93,75%	60,00%	60,00%	100%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Pemeliharaan Gedung sesuai dengan Kebijakan Strategis	Persen	100%	100%	100,00%	100%	100%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		

URUSAN		PD	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	2020	2021	TARGET 2022	Realisasi 2022	Capaian	NILAI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	Permasalahan	Tindak Lanjut
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Efektivitas Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Jalan	Persen	31,36%	24,78%	37,65%	25,13%	67%	S	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	SK masih mengacu pada SK lama, panjang jalan 512km	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PERHUBUNGAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERHUBUNGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	Persen	100,00%	100%	100,00%	100%	100,0%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERHUBUNGAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PERHUBUNGAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase ketersediaan Fasilitas Keselamatan jalan	Persen	100,00%	77,35%	85,00%	65,20%	76,71%	T	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERHUBUNGAN	Tidak tercapainya target tersebut diatas dikarenakan pada tahun 2022 pemasangan PJU difokuskan pada Ruas Jalan Perbatasan dan juga dikarenakan adanya Refocusing Anggaran PJU.	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PERHUBUNGAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Ketersediaan Trayek Angkutan Darat	Persen	82,55%	60,34%	85,90%	56,03%	65,2%	R	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERHUBUNGAN	Tidak tercapainya target tersebut diatas dikarenakan masih banyak pemilik Angkutan umum yang belum meremajakan angkutannya sehingga tidak dapat dipergunakan untuk beroperasi, selain itu semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan Angkutan Online	Melakukan revitalisasi trayek guna memaksimalkan angkutan umum yang beroperasi
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PERHUBUNGAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kendaraan Lulus Uji	Persen	38,96%	98,63%	100,00%	98,92%	98,92%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERHUBUNGAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PERHUBUNGAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Cakupan Layanan Tertib Lalu Lintas	Persen	100,00%	75,00%	87,50%	100,00%	114,29%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERHUBUNGAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PERHUBUNGAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Layanan Rekayasa Lalu Lintas	Persen	100,00%	66,67%	100,00%	100,00%	100,0%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERHUBUNGAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PERHUBUNGAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Ketersediaan Tempat Parkir Khusus	Persen	50,00%	50,00%	66,67%	75,00%	112,50%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERHUBUNGAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PERHUBUNGAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERHUBUNGAN	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Ketersediaan ASDP	Persen	66,67%	62,50%	75,00%	100,00%	133,33%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERHUBUNGAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PERHUBUNGAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERHUBUNGAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase Peningkatan ketersediaan Sarana Keselamatan Perlintasan KA Sebidang	Persen	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,0%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERHUBUNGAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase rekomendasi IUJK yang diterbitkan	Persen	-	79,86%	40,00%	30,86%	77%	T	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		

URUSAN		PD	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	2020	2021	TARGET 2022	Realisasi 2022	Capaian	NILAI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	Permasalahan	Tindak Lanjut
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang sesuai SIPR dengan Peruntukan Ruang	Persen	100%	95%	96%	99,11%	103,2%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PARIWISATA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	presentase ketercapaian sasaran program perangkat daerah	Persen	100 % (2020 : 9 Program 2021 : 1 Program)	100%	100%	100%	100%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PARIWISATA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pertumbuhan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)	Persen	71% (24 ODTW)	(30-24)/24 x 100% = 25%	25%	=(51-30)/30 X 100% = 70%	280,0%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PARIWISATA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase Fasilitasi di Objek Daya Tarik Wisata	Persen	100 % (2 Fasilitasi ODTW)	4/2 X 100% = 200%	100%	=(4/4)X100=100%	100%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PARIWISATA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pertumbuhan Kelompok Sadar Wisata yang ditetapkan	Persen	40 kelompok	(52-40)/40 x 100% = 20%	5%	=(93-64)/64X 100%= 45%	900%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PARIWISATA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase Destinasi Wisata yang Dikembangkan	Persen	100 % (1 Destinasi)	100%	100%	=2/2 X 100= 100%	100%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PARIWISATA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pertumbuhan kunjungan wisata Dalam Negeri	Persen	21,77% (2.098.995 Orang)	(2.106.133-2.030.999)/2.030.999x100 % = 4%	2%	=(4.120.683-2.106.133)/2.106.133 x 100 = 95 %	4750%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PARIWISATA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pertumbuhan kunjungan wisata Mancanegara	Persen	0 % (4.360 Orang)	0% (37 Pengunjung)	2%	=(12.599-37)/37 x 100 = 339%	16950%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PARIWISATA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pertumbuhan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif	Persen	11, 49 % (456 Usaha)	(489-456)/456 X 100% = 7 %	2%	=(501-489)/489X100=2.4 %	120%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PANGAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERTANIAN	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Stabilitas Harga Pangan Utama (Beras)	Persen	9,99%	9,89	9,80%	9,58%	98%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERTANIAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PANGAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERTANIAN	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Kualitas konsumsi Pangan yang diindikasikan oleh skor Pola pangan harapan (PPH)	Persen	83	83,37%	84%	85,00%	101%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERTANIAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PANGAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERTANIAN	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Keamanan Pangan Segar	Persen	80,00%	83,33	80%	83,33%	104,17%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERTANIAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	Persen	N/A	100%	100%	100%	100,0%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Presentase Jumlah Koperasi aktif grade B, C1, C2 dan D menjadi Koperasi Aktif grade A	Persen	64.72%	65,94%	66.35%(420 koperasi)	69.83%(442 koperasi)	105,2%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		

URUSAN		PD	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	2020	2021	TARGET 2022	Realisasi 2022	Capaian	NILAI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	Permasalahan	Tindak Lanjut
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase jumlah KSP/USP Kperasi yang dinilai kesehatannya	Persen	40.27%	83,56%	48.49%(354 kop)	33.42%(224 Koperasi)	68,92%	S	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Terbatasnya pejabat yang memiliki sertifikat koperasi tentang penilai kesehatan, KSP/USP DISKOPERINDAG. (Hanya punya 1 pejabat yang mempunyai sertifikat) Sesuai permenkop No.17 th 2015 ttg pengawasan kop perdep bidang pengawasan no	Menambah pejabat yang mempunyai sertifikat koperasi
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Pengurus Koperasi yang dilatih	Persen	13.81%	26,72%	16.18%(1180 kop)	9.52%(740 Kop)	58,84%	R	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	(Hanya punya 1 pejabat yang mempunyai sertifikat) Sesuai permenkop No.17 th 2015 ttg pengawasan kop perdep bidang pengawasan no 05/per/dep.6 IV/ 2016 harus bersertifikat	Memfasilitasi pengurus koperasi terhadap agar bisa memiliki sertifikat (DSN)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pertumbuhan Omzet Koperasi	Persen	2.71%	-15,62	2.74% (Rp. 110.000.000.000)	1.40% (Rp. 56.131.034.253)	51,09%	R	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Menurunya modal akibat infalsi dan proses pemilihan ekonomi akibat pandemi Tingkat persaingan semakin ketat antar koperasi dan non koperasi	Akan diberikan fasilitas rumah produk koperasi melalui online (market place / e katalog)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro dengan akses permodalan	Persen	0.17%	0,13%	0.12%(200 Usaha Mikro)	0.46%(774 Usaha Mikro)	383,33%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pertumbuhan Usaha Mikro	Persen	1%	1,43%	1.23% (2.119 usaha mikro)	2.90%(4.994 Usaha Mikro)	235,77%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	Persen	84.76%	100%	100%	100%	100,0%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Presentase pengaduan layanan publik yang difasilitasi	Persen	90,54% (287/317)	100%	100%	100% (213/213)	100%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Presentase jenis informasi publik penyelenggaraan pemerintah yang dipublikasi	Persen	N/A	100%(3/3)	100%(3/3)	100%(3/3)	100%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Presentase permintaan data yang difasilitasi PPID	Persen	100% (3/3)	100%(13/13)	100%	100% (3/3)	100%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		

URUSAN		PD	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	2020	2021	TARGET 2022	Realisasi 2022	Capaian	NILAI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	Permasalahan	Tindak Lanjut
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Prosentase Dokumen Kebijakan yang dievaluasi	Persen	N/A	100% (1/1)	100% (3/3)	100%	100%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Indikator SPBE yang dievaluasi	Persen	100% (37/37)	100% (47/47)	100% (47/47)	100%	100%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Perangkat Daerah yang berkolaborasi dalam Penerapan SPBE	Persen	N/A	64% (31/48)	75% (36/48)	100%	133%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Aplikasi yang dikembangkan dengan Siklus Pembangunan Aplikasi	Persen	N/A	(1/15)	13% (2/15)	100%	100%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Manajemen Layanan SPBE	Persen	N/A	10% (2)	20% (10/48)	20% (10/48)	100,00%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Penetapan formulasi perhitungan capaian kurang sesuai, seharusnya pembaginya bukan jumlah seluruh OPD tetapi jumlah OPD yang memiliki layanan SPBE	Akan ada penambahan aplikasi di tahun depan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan Ruang Server	Persen	25% (12 OPD / 48 OPD)	35% (17 OPD / 48 OPD)	25% (12/48)	31% (15/48)	124%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	KEUANGAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	Persen	100%	98,04%	100%	100,00%	100,00%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	KEUANGAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan	Indeks	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	KEUANGAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Ketepatan Waktu penyusunan dokumen penganggaran	Indeks	N/A	TEPAT	TEPAT	TEPAT	100,00%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	KEUANGAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase barang milik daerah yang tercatat dalam sistem informasi pencatatan aset	Persen	100%	100,00%	100%	100,00%	100,00%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	KEUANGAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Efektifitas pendapatan Daerah	Persen	102,98%	93,80%	100%	95,19%	95,19%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	KEUANGAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio Kemandirian Fiskal	Persen	69,44%	53,45%	65%	74,27%	114,26%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		

URUSAN		PD	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	2020	2021	TARGET 2022	Realisasi 2022	Capaian	NILAI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	Permasalahan	Tindak Lanjut
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Nihil	Nihil
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Linmas yang dibina	Persen	3,8%	29%	53,8%	53,8%	100%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Tidak ada anggaran Linmas desa di Satpol PP	Satpol PP mengusulkan ke DPR
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pengamanan Kegiatan Pemerintahan atau Kemasyarakatan strategis	Persen	100%	244	100%	100%	100%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Nihil	Nihil
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Anggota Pamong Praja yang dibina	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Anggaran yang mengalami refocusing, sehingga pembinaan anggota menjadi terbatas	mengusulkan penambahan pagu anggaran
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase penyelesaian pelanggaran Perda	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Tangkapan apabila terlalu banyak, tempat dan mamin nya tidak memadai.	Agar ada penambahan anggaran untuk mamin dan perluasan lokasi shelter.
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	Nilai	N/A	N/A	100%	97%	97%	ST	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Cepat/Respontime Penanggulangan Kejadian Kebakaran (15 Menit Menuju Lokasi Kejadian)	Persen	N/A	N/A	30%	27%	88%	T	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	Persen	N/A	100%	100%	100%	100%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	N/A	100%	100%	100%	100%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	N/A	100%	100%	100%	100%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		

URUSAN		PD	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	2020	2021	TARGET 2022	Realisasi 2022	Capaian	NILAI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	Permasalahan	Tindak Lanjut
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	N/A	100%	100%	100%	100%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase desa tangguh bencana (Dibanding Desa Rawan Bencana)	Desa	N/A	47,73%	56,82%	59,09%	104,00%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang ditangani	Persen	N/A	100%	100%	100%	100%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase perhitungan terhadap kerugian pasca bencana	Persen	N/A	100%	100%	100%	100%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD		N/A	100%	100%	100%	100,0%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESEHATAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan sesuai standar	Persen	N/A	100%	75%	100%	133,33%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESEHATAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase balita stunting mendapatkan penanganan	Persen	N/A	100,00%	100%	100,00%	100,00%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESEHATAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	CFR (Case Fatality Rate) DBD	Persen	N/A	0,00%	0,90%	0,00%	100%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESEHATAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penemuan Kasus Baru TB (CDR)	Persen	N/A	61,03%	60,00%	79,60%	133%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESEHATAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	ODHA yang mendapatkan pengobatan (on ARV)	Persen	N/A	37,64%	80,00%	86,75%	108%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESEHATAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas terakreditasi Utama dan Paripurna	Persen	N/A	34,38%	43,80%	55,00%	126%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESEHATAN		

URUSAN		PD	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	2020	2021	TARGET 2022	Realisasi 2022	Capaian	NILAI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	Permasalahan	Tindak Lanjut
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase RS terakreditasi	Persen	N/A	90,48%	100,00%	100,00%	100,00%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESEHATAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Masyarakat miskin yg tercover JKN pada KGS	Persen	N/A	100,00%	100,00%	99,65%	100%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESEHATAN		Realisasi 99,65% dicover oleh BPJS (UHC)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Pemeriksaan COVID-19 per 1.000 penduduk per minggu	Persen	N/A	101,28%	50,00%	78,27%	156,54%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESEHATAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penduduk yang mendapatkan Vaksin COVID-19	Persen	N/A	80,46%	68%	100%	147,06%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESEHATAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESEHATAN	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan di puskesmas dan jaringan dan RSUD yang memiliki ijin	Persen	N/A	100%	68%	100%	147,06%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESEHATAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESEHATAN	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase petugas penanggung jawab program esensial puskesmas yang telah mendapatkan pelatihan teknis program	Persen	N/A	100%	100%	100%	100,00%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESEHATAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESEHATAN	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana kefarmasian sesuai standar dan persyaratan perijinan	Persen	N/A	61%	53%	89%	167,92%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESEHATAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESEHATAN	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana Produksi UMOT yang memenuhi ketentuan		N/A	100%	62%	100%	161,29%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESEHATAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESEHATAN	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana Pengelolaan Makanan Minuman sesuai standar dan berijin	Persen	N/A	59,00%	60,00%	61,30%	102,17%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESEHATAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase peningkatan strata kemandirian posyandu Balita (PURI)	Persen	93,8%	98%	95,50%	95,65%	100%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESEHATAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase peningkatan strata kemandirian Pos Kesehatan Pesantren (PURI)	Persen	64,0%	64,70%	66,00%	72,09%	109,23%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESEHATAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase peningkatan strata kemandirian Pos Kesehatan Desa (PURI)	Persen	71,0%	84,24%	72,0%	71,38%	99%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESEHATAN		

URUSAN		PD	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	2020	2021	TARGET 2022	Realisasi 2022	Capaian	NILAI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	Permasalahan	Tindak Lanjut
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	KESEHATAN	RSUD IBNU SINA	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Kebutuhan alat Kesehatan atau Alat Penunjang Medik, Sarana dan Fasilitas Sarana Kesehatan	Persen	N/A	61,9	77%	87%	112,64%	ST	RSUD IBNU SINA		
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	PERINDUSTRIAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Prosentase IKM yang terdata dan terbina	Persen	0,63%	3,72%	0,84% (60 IKM)	1.40%(100 IKM)	166,67%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	PERINDUSTRIAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Prosentase IKM yang mendapat fasilitasi	Persen	1,28%	1.31 %	1,35% (95 IKM)	2.06%(145 IKM)	152,59%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	PERINDUSTRIAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Prosentase IKM ber KBLI kategori Industri yang telah verifikasi teknis melalui SIINas	Persen	0,31%	0,81%	0,62 (6 IKM)	0,62 (6 IKM)	100,00%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	KESEHATAN	RSUD IBNU SINA	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Bed Occupancy Rate (BOR)		56,54	65,04	62,33	62,42	100,14%	ST	RSUD IBNU SINA		
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	KESEHATAN	RSUD IBNU SINA	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Average Lenght of Stay (ALOS)		5,15	5,57	5,65	4,46	78,94%	T	RSUD IBNU SINA		
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	KESEHATAN	RSUD IBNU SINA	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Turn Over Internal (TOI)		4,77	3,6	3,75	2,53	148,22%	ST	RSUD IBNU SINA		
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	KESEHATAN	RSUD IBNU SINA	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Bed Turn Over (BTO)		33,29	35,44	36,70	55,32	150,74%	ST	RSUD IBNU SINA		
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	KESEHATAN	RSUD IBNU SINA	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Gross Death Rate (GDR)		101,4	139,25	91,99	105,04	87,58%	T	RSUD IBNU SINA		
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	KESEHATAN	RSUD IBNU SINA	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Net Death Rate (NDR)		59,7	91,53	54,12	63,63	85,05%	T	RSUD IBNU SINA		
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		

URUSAN		PD	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	2020	2021	TARGET 2022	Realisasi 2022	Capaian	NILAI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	Permasalahan	Tindak Lanjut
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Satuan Lembaga Pendidikan yang menerima penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Target Partisipasi Masyarakat	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang terdaftar	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Penanganan Konflik Kerukunan Umat Beragama yang difasilitasi	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Pembentukan FKDM ditingkat Kecamatan dan Desa	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda yang Meraih Penghargaan	Persen	25%	39,61%	30%	=87/262x 100=33%	110%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase cabor berprestasi	Persen	95%	96,55%	95%	=30/31 X 100= 96%	101%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Sarana Prasarana yang Terpelihara	Persen	80%	100,00%	80%	=3/3x100=100%	125%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Partisipasi Anggota Pramuka	Persen	53%	59,46%	54%	=85.593/88.571X100=96,63%	179%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	KEPEGAWAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEPEGAWAIAN DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEPEGAWAIAN DAERAH		
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	KEPEGAWAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEPEGAWAIAN DAERAH	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Prosentase ASN dengan penilaian kinerja minimal "Baik"	Persen	100%	99,9%	100%	99,9%	99,9%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEPEGAWAIAN DAERAH		
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	KEPEGAWAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEPEGAWAIAN DAERAH	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Prosentase Kedisiplinan ASN	Persen	100%	95,69%	100%	96,51%	96,5%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEPEGAWAIAN DAERAH		
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	KEPEGAWAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEPEGAWAIAN DAERAH	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Prosentase Pemenuhan Formasi sesuai dengan kebutuhan	Persen	77%	66%	87%	87%	100%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEPEGAWAIAN DAERAH		

URUSAN		PD	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	2020	2021	TARGET 2022	Realisasi 2022	Capaian	NILAI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	Permasalahan	Tindak Lanjut
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	KEPEGAWAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEPEGAWAIAN DAERAH	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Prosentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi	Persen	100%	100%	90%	80%	89%	T	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEPEGAWAIAN DAERAH		
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KEPEGAWAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEPEGAWAIAN DAERAH	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Prosentase Peningkatan Pelayanan Kepegawaian	Persen	100%	88%	85%	88%	104%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEPEGAWAIAN DAERAH		
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERIKANAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	Persen	91%	100%	100	91	91	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERIKANAN		
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap (ton)	Ton	11.115,00	11.459	11.417	11.451	100,30	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERIKANAN		
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	Ton	138.579,34	142746	147.018	146.698	99,78	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERIKANAN		
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERIKANAN	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Luasan Kawasan Pesisir Yang direhabilitasi Tahun N		72	75,48	74,75	91,83	122,85	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERIKANAN		
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERIKANAN	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Presentase Produksi Perikanan Yang diolah dan dipasarkan	Persen	84,61	85	85,50	78	91,23	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERIKANAN		
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERIKANAN	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka konsumsi ikan	Persen	1,9	2,86	1,30	6,8	523,08	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERIKANAN		
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN GRESIK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	ST	KECAMATAN GRESIK		
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN GRESIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik		4	4	4	4	100%	ST	KECAMATAN GRESIK		
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN GRESIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Musrenbang Kelurahan yang difasilitasi	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	ST	KECAMATAN GRESIK		
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN GRESIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	ST	KECAMATAN GRESIK		
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN GRESIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pelaku Ekonomi di Wilayah Kecamatan yang difasilitasi	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	ST	KECAMATAN GRESIK		
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN GRESIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	ST	KECAMATAN GRESIK		
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN GRESIK	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	ST	KECAMATAN GRESIK		
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN GRESIK	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	ST	KECAMATAN GRESIK		
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN GRESIK	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	ST	KECAMATAN GRESIK		

URUSAN		PD	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	2020	2021	TARGET 2022	Realisasi 2022	Capaian	NILAI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	Permasalahan	Tindak Lanjut
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN GRESIK	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	ST	KECAMATAN GRESIK		
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN KEBOMAS	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	ST	KECAMATAN KEBOMAS		
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN KEBOMAS	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik		4	4	4	4	100%	ST	KECAMATAN KEBOMAS		
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN KEBOMAS	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Musrenbang Kelurahan yang difasilitasi	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	ST	KECAMATAN KEBOMAS		
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN KEBOMAS	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	ST	KECAMATAN KEBOMAS		
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN KEBOMAS	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pelaku Ekonomi di Wilayah Kecamatan yang difasilitasi	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	ST	KECAMATAN KEBOMAS		
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN KEBOMAS	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	ST	KECAMATAN KEBOMAS		
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN KEBOMAS	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	ST	KECAMATAN KEBOMAS		
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN KEBOMAS	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	ST	KECAMATAN KEBOMAS		
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN KEBOMAS	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	ST	KECAMATAN KEBOMAS		
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN KEBOMAS	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	ST	KECAMATAN KEBOMAS		
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN MANYAR	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	ST	KECAMATAN MANYAR		
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN MANYAR	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	ST	KECAMATAN MANYAR		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN MANYAR	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	ST	KECAMATAN MANYAR		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN MANYAR	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pelaku Ekonomi di Wilayah Kecamatan yang difasilitasi	Persen	100%	47%	100%	100%	100%	ST	KECAMATAN MANYAR		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN MANYAR	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	ST	KECAMATAN MANYAR		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN MANYAR	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	ST	KECAMATAN MANYAR		

URUSAN		PD	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	2020	2021	TARGET 2022	Realisasi 2022	Capaian	NILAI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	Permasalahan	Tindak Lanjut
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN MANYAR	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	ST	KECAMATAN MANYAR		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN CERME	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	Persen	100%	100%	100%	93,83%	94%	ST	KECAMATAN CERME		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN CERME	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Tingkat Kematangan Pelayanan Publik	Persen	2	2	3	3	100%	ST	KECAMATAN CERME		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN CERME	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	Persen	80%	100%	100%	100,00%	100%	ST	KECAMATAN CERME		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN CERME	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	Persen	100%	100%	100%	100,00%	100%	ST	KECAMATAN CERME		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN CERME	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pelaku Ekonomi di Wilayah Kecamatan yang difasilitasi	Persen	10%	100%	100%	100,00%	100%	ST	KECAMATAN CERME		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN CERME	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina	Persen	100%	100%	100%	100,00%	100%	ST	KECAMATAN CERME		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN CERME	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	Persen	100%	100%	100%	100,00%	100%	ST	KECAMATAN CERME		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN CERME	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penugasan Kepala Daerah yang difasilitasi	Persen	100%	100%	100%	100,00%	100%	ST	KECAMATAN CERME		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN CERME	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	Persen	80%	80%	100%	100,00%	100%	ST	KECAMATAN CERME		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN BENJENG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	Persen	100%	100%	100%	97,23%	97,23%	ST	KECAMATAN BENJENG		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN BENJENG	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Tingkat Kematangan Pelayanan Publik		2	4	100%	100%	100,00%	ST	KECAMATAN BENJENG		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN BENJENG	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	Persen	100%	100%	100%	100%	100,00%	ST	KECAMATAN BENJENG		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN BENJENG	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Musrenbang Desa yang difasilitasi	Persen	100%	100%	100%	100%	100,00%	ST	KECAMATAN BENJENG		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN BENJENG	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	Persen	100%	100%	100%	90,16%	90,16%	ST	KECAMATAN BENJENG		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN BENJENG	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina	Persen	100%	100%	100%	94,61%	94,61%	ST	KECAMATAN BENJENG		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN BENJENG	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	Persen	100%	100%	100%	98,60%	98,60%	ST	KECAMATAN BENJENG		

URUSAN		PD	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	2020	2021	TARGET 2022	Realisasi 2022	Capaian	NILAI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	Permasalahan	Tindak Lanjut
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN BENJENG	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penugasan Kepala Daerah yang difasilitasi	Persen	100%	100%	100%	100%	100,00%	ST	KECAMATAN BENJENG		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN BENJENG	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	Persen	100%	100%	100%	94,18%	94,18%	ST	KECAMATAN BENJENG		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN BALONGPANGGANG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	Persen	100%	100%	100%	100%	100,0%	ST	KECAMATAN BALONGPANGGANG		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN BALONGPANGGANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik	Persen	100%	75%	100%	100%	100,0%	ST	KECAMATAN BALONGPANGGANG		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN BALONGPANGGANG	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase koordinasi kegiatan Pemberdayaan masyarakat	Persen	100%	75%	100%	100%	100,0%	ST	KECAMATAN BALONGPANGGANG		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN BALONGPANGGANG	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	Persen	100%	75%	100%	100%	100,0%	ST	KECAMATAN BALONGPANGGANG		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN BALONGPANGGANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penugasan Kepala Daerah yang difasilitasi	Persen	100%	75%	100%	100%	100,0%	ST	KECAMATAN BALONGPANGGANG		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN BALONGPANGGANG	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	Persen	100%	75%	100%	100%	100,0%	ST	KECAMATAN BALONGPANGGANG		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	Persen	100%	89%	100%	94,17%	106%	ST	KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik		N/A	89,01%	100%	77,35%	129%	ST	KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Musrenbang Kelurahan yang difasilitasi	Persen	100%	89,01%	100%	85,93%	116%	ST	KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	Persen	100%	100%	100%	85,93%	116%	ST	KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pelaku Ekonomi di Wilayah Kecamatan yang difasilitasi	Persen	100%	100%	100%	85,93%	116%	ST	KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina	Persen	100%	100%	100%	85,93%	116%	ST	KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	Persen	87%	89,01%	100%	88,64%	113%	ST	KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	Persen	100%	89,01%	100%	87,49%	114%	ST	KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN		

URUSAN		PD	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	2020	2021	TARGET 2022	Realisasi 2022	Capaian	NILAI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	Permasalahan	Tindak Lanjut
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	Persen	100%	89,01%	100%	87,49%	114%	ST	KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	Persen	100%	89,01%	100%	87,49%	114%	ST	KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN DRIYOREJO	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	Persen	100%	100%	100	98,0	98%	ST	KECAMATAN DRIYOREJO		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN DRIYOREJO	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik		N/A	97	87	88,0	101%	ST	KECAMATAN DRIYOREJO		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN DRIYOREJO	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Musrenbang Kelurahan yang difasilitasi	Persen	100%	100%	100	99,0	99%	ST	KECAMATAN DRIYOREJO		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN DRIYOREJO	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	Persen	100%	100%	100	100,0	100%	ST	KECAMATAN DRIYOREJO		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN DRIYOREJO	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pelaku Ekonomi di Wilayah Kecamatan yang difasilitasi	Persen	100%	100%	100	99,8	100%	ST	KECAMATAN DRIYOREJO		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN DRIYOREJO	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina	Persen	100%	100%	100	99,8	100%	ST	KECAMATAN DRIYOREJO		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN DRIYOREJO	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	Persen	87%	100%	100	99,6	100%	ST	KECAMATAN DRIYOREJO		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN DRIYOREJO	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penugasan Kepala Daerah yang difasilitasi	Persen	100%	100%	100	99,9	100%	ST	KECAMATAN DRIYOREJO		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN DRIYOREJO	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	Persen	95%	100%	100	99,8	100%	ST	KECAMATAN DRIYOREJO		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN WRINGINANOM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	Persen	100%	100%	100%	98,24%	98%	ST	KECAMATAN WRINGINANOM		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN WRINGINANOM	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	Persen	N/A	90.00	92	9200,00%	100%	ST	KECAMATAN WRINGINANOM		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN WRINGINANOM	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	Persen	100%	100%	100%	100,00%	100%	ST	KECAMATAN WRINGINANOM		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN WRINGINANOM	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Musrenbang Kelurahan yang difasilitasi	Persen	100%	100%	90%	90,00%	100%	ST	KECAMATAN WRINGINANOM		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN WRINGINANOM	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	Persen	100%	32%	100%	99,98%	100%	ST	KECAMATAN WRINGINANOM		

URUSAN		PD	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	2020	2021	TARGET 2022	Realisasi 2022	Capaian	NILAI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	Permasalahan	Tindak Lanjut
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN WRINGINANOM	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pelaku Ekonomi di Wilayah Kecamatan yang difasilitasi	Persen	100%	32%	100%	99,98%	100%	ST	KECAMATAN WRINGINANOM		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN WRINGINANOM	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina	Persen	100%	48%	100%	100,00%	100%	ST	KECAMATAN WRINGINANOM		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN WRINGINANOM	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	Persen	100%	100%	100%	100,00%	100%	ST	KECAMATAN WRINGINANOM		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN WRINGINANOM	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penugasan Kepala Daerah yang difasilitasi	Persen	100%	100%	100%	99,03%	99%	ST	KECAMATAN WRINGINANOM		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN WRINGINANOM	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	Persen	95%	90%	90%	99,99%	111%	ST	KECAMATAN WRINGINANOM		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN KEDAMEAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	Persen	100%	92%	100%	100%	100%	ST	KECAMATAN KEDAMEAN		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN KEDAMEAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik		2	97%	2	2	100%	ST	KECAMATAN KEDAMEAN		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN KEDAMEAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	Persen	67%	100%	73%	73%	100%	ST	KECAMATAN KEDAMEAN		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN KEDAMEAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pelaku Ekonomi di Wilayah Kecamatan yang difasilitasi	Persen	67%	32%	73%	75%	103%	ST	KECAMATAN KEDAMEAN		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN KEDAMEAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	Persen	77%	32%	79%	75%	95%	ST	KECAMATAN KEDAMEAN		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN KEDAMEAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina	Persen	60%	48%	70%	75%	107%	ST	KECAMATAN KEDAMEAN		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN KEDAMEAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	Persen	N/A	100%	100%	100%	100%	ST	KECAMATAN KEDAMEAN		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN KEDAMEAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	Persen	80%	86%	87%	73%	84%	ST	KECAMATAN KEDAMEAN		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN MENGANTI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	ST	KECAMATAN MENGANTI		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN MENGANTI	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik	Persen	2	2	2	2	100	ST	KECAMATAN MENGANTI		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN MENGANTI	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	Persen	22 RKPDes/22 desa	22 RKPDes/22 desa	100%	100%	100%	ST	KECAMATAN MENGANTI		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN MENGANTI	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Musrenbang Kelurahan yang difasilitasi	Persen	95 orang	95 orang	100%	100%	100%	ST	KECAMATAN MENGANTI		

URUSAN		PD	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	2020	2021	TARGET 2022	Realisasi 2022	Capaian	NILAI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	Permasalahan	Tindak Lanjut
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN MENGANTI	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	Persen	150 orang	150 orang	100%	100%	100%	ST	KECAMATAN MENGANTI		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN MENGANTI	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi		179 orang	179 orang	100%	100%	100%	ST	KECAMATAN MENGANTI		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN MENGANTI	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi		100%	100%	100%	100%	100%	ST	KECAMATAN MENGANTI		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN MENGANTI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu		95%	95%	100%	100%	100%	ST	KECAMATAN MENGANTI		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN SIDAYU	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	ST	KECAMATAN SIDAYU		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN SIDAYU	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik		4	4	4	4	100%	ST	KECAMATAN SIDAYU		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN SIDAYU	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	Persen	21 RKPDes/21 desa	100%	21	21	100%	ST	KECAMATAN SIDAYU		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN SIDAYU	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Musrenbang Kelurahan yang difasilitasi	Persen	100 orang/100 orang	100%	100%	100%	100%	ST	KECAMATAN SIDAYU		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN SIDAYU	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pelaku Ekonomi di Wilayah Kecamatan yang difasilitasi	Persen	530 pelaku usaha/530 pelaku usaha	14%	14%	14%	100%	ST	KECAMATAN SIDAYU		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN SIDAYU	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	Persen	78 Lembaga/78 Lembaga	53%	53%	53%	100%	ST	KECAMATAN SIDAYU		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN SIDAYU	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina	Persen	45 lembaga/45 lembaga	47%	47%	47%	100%	ST	KECAMATAN SIDAYU		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN SIDAYU	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	ST	KECAMATAN SIDAYU		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN SIDAYU	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	ST	KECAMATAN SIDAYU		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN SIDAYU	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	Persen	80%	100%	100%	100%	100%	ST	KECAMATAN SIDAYU		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN UJUNGPANGKAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	Persen	80%	100%	86%	98%	114%	ST	KECAMATAN UJUNGPANGKAH		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN UJUNGPANGKAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Musrenbang Kelurahan yang difasilitasi	Persen	100%	100%	100%	91%	91%	ST	KECAMATAN UJUNGPANGKAH		

URUSAN		PD	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	2020	2021	TARGET 2022	Realisasi 2022	Capaian	NILAI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	Permasalahan	Tindak Lanjut
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN UJUNGPANGKAH	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	Persen	100%	46%	100%	81%	81%	ST	KECAMATAN UJUNGPANGKAH		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN UJUNGPANGKAH	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	Persen	100%	100%	100%	79%	79%	ST	KECAMATAN UJUNGPANGKAH		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN PANCENG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	ST	KECAMATAN PANCENG		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN PANCENG	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik		2	2	3	3	100%	ST	KECAMATAN PANCENG		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN PANCENG	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	Persen	80%	100%	85%	100%	100%	ST	KECAMATAN PANCENG		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN PANCENG	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Musrenbang Kelurahan yang difasilitasi	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	ST	KECAMATAN PANCENG		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN PANCENG	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	Persen	85%	89%	85%	100%	118%	ST	KECAMATAN PANCENG		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN PANCENG	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pelaku Ekonomi di Wilayah Kecamatan yang difasilitasi	Persen	80%	82%	85%	100%	118%	ST	KECAMATAN PANCENG		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN PANCENG	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	ST	KECAMATAN PANCENG		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN PANCENG	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	ST	KECAMATAN PANCENG		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN PANCENG	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Desa	Persen	90%	96%	100%	100%	100%	ST	KECAMATAN PANCENG		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN BUNGAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	ST	KECAMATAN BUNGAH		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN BUNGAH	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik		2	2	2	2	100%	ST	KECAMATAN BUNGAH		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN BUNGAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Musrenbang Kelurahan yang difasilitasi	Persen	50%	100%	100%	100%	100%	ST	KECAMATAN BUNGAH		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN BUNGAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	Persen	75%	100%	83%	100%	120%	ST	KECAMATAN BUNGAH		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN BUNGAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pelaku Ekonomi di Wilayah Kecamatan yang difasilitasi	Persen	77%	100%	80%	100%	125%	ST	KECAMATAN BUNGAH		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN BUNGAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina	Persen	60%	100%	70%	100%	143%	ST	KECAMATAN BUNGAH		

URUSAN		PD	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	2020	2021	TARGET 2022	Realisasi 2022	Capaian	NILAI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	Permasalahan	Tindak Lanjut
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN BUNGAH	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	Persen	N/A	100%	100%	100%	100%	ST	KECAMATAN BUNGAH		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN BUNGAH	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	Persen	N/A	100%	100%	100%	100%	ST	KECAMATAN BUNGAH		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN BUNGAH	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	Persen	85%	100%	96%	100%	104%	ST	KECAMATAN BUNGAH		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN DUKUN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	Persen	100%	100%	100%	100%	96,69%	ST	KECAMATAN DUKUN		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN DUKUN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik		88	92	91	92,64	100,00%	ST	KECAMATAN DUKUN		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN DUKUN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Musrenbang Kelurahan yang difasilitasi	Persen	50%	100%	150 Orang	150 Orang	100%	ST	KECAMATAN DUKUN		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN DUKUN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	Persen	75%	100%	26 Desa	26 Desa	100%	ST	KECAMATAN DUKUN		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN DUKUN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pelaku Ekonomi di Wilayah Kecamatan yang difasilitasi	Persen	77%	100%	26 Desa	26 Desa	100%	ST	KECAMATAN DUKUN		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN DUKUN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina	Persen	60%	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	ST	KECAMATAN DUKUN		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN DUKUN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	Persen	N/A	100%	100%	100%	100%	ST	KECAMATAN DUKUN		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN DUKUN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	ST	KECAMATAN DUKUN		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN DUKUN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	Persen	85%	100%	100%	100%	100%	ST	KECAMATAN DUKUN		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN SANGKAPURA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	Persen	100%	100%	100%	84,37%	84%	T	KECAMATAN SANGKAPURA		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN SANGKAPURA	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik		2	2	100%	76,74%	77%	T	KECAMATAN SANGKAPURA		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN SANGKAPURA	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Musrenbang Kelurahan yang difasilitasi	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	ST	KECAMATAN SANGKAPURA		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN SANGKAPURA	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	ST	KECAMATAN SANGKAPURA		

URUSAN		PD	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	2020	2021	TARGET 2022	Realisasi 2022	Capaian	NILAI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	Permasalahan	Tindak Lanjut
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN SANGKAPURA	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pelaku Ekonomi di Wilayah Kecamatan yang difasilitasi	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	ST	KECAMATAN SANGKAPURA		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN SANGKAPURA	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	ST	KECAMATAN SANGKAPURA		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN SANGKAPURA	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	ST	KECAMATAN SANGKAPURA		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN SANGKAPURA	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	ST	KECAMATAN SANGKAPURA		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN SANGKAPURA	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	ST	KECAMATAN SANGKAPURA		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN SANGKAPURA	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	ST	KECAMATAN SANGKAPURA		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN TAMBAK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	Persen	100%	100%	94,38%	100%	106%	ST	KECAMATAN TAMBAK		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN TAMBAK	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Musrenbang Kelurahan yang difasilitasi	Persen	100%	100%	81,83%	100%	122%	ST	KECAMATAN TAMBAK		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN TAMBAK	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase BUMDes yang difasilitasi	Persen	100%	100%	37,72%	100%	265%	ST	KECAMATAN TAMBAK		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN TAMBAK	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pelaku Ekonomi di Wilayah Kecamatan yang difasilitasi	Persen	100%	100%	37,72%	100%	265%	ST	KECAMATAN TAMBAK		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN TAMBAK	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina	Persen	100%	100%	73,25%	100%	137%	ST	KECAMATAN TAMBAK		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN TAMBAK	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	Persen	100%	100%	52,30%	100%	191%	ST	KECAMATAN TAMBAK		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN TAMBAK	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	Persen	100%	100%	79,65%	100%	126%	ST	KECAMATAN TAMBAK		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN TAMBAK	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	Persen	100%	100%	79,65%	100%	126%	ST	KECAMATAN TAMBAK		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	KECAMATAN TAMBAK	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	Persen	100%	100%	79,65%	100%	126%	ST	KECAMATAN TAMBAK		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	Persen	100%	100%	100%	100%	100,0%	ST	KEC. BALONGPANGGANG		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTSHSN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik	Persen	40%	41,67%	45%	45%	100,0%	ST	KEC. BALONGPANGGANG		

URUSAN		PD	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	2020	2021	TARGET 2022	Realisasi 2022	Capaian	NILAI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	Permasalahan	Tindak Lanjut
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Persen	40%	61%	45%	45%	100,0%	ST	KEC. BALONGPANGGANG		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Penyelesaian Konflik di Tingkat Kecamatan	Persen	1,31%	2,48%	1,5%	1,5%	100,0%	ST	KEC. BALONGPANGGANG		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penugasan Kepala Daerah yang difasilitasi	Persen	40%	97%	45%	45%	100,0%	ST	KEC. BALONGPANGGANG		
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	Persen	25%	36%	40%	40%	100,0%	ST	KEC. BALONGPANGGANG		
UNSUR KEWILAYAHAN	KEBUDAYAAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Objek Budaya yang dilestarikan melalui pemanfaatan dan pengembangan	Persen	100%	10/10x100% = 100%	100%	=10/10X100=100 %	100%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
UNSUR KEWILAYAHAN	KEBUDAYAAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase WBTb berketetapan Nasional yang dilestarikan melalui pemanfaatan dan pengembangan	Persen	100%	3/3x100% = 100%	100%	=4/4X 100%= 100%	100%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
UNSUR KEWILAYAHAN	KEBUDAYAAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan melalui pemanfaatan dan pengembangan	Persen	100 % (Jumlah seni tradisi : 83)	83/83 x 100%=100%	100%	=62/62X 100%=100%	100%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
UNSUR KEWILAYAHAN	KEBUDAYAAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya terkelola lestarikan	Persen	100 % (4 CB)	4/4x100%= 100%	100%	=4/4 X 100%= 100%	100%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
UNSUR KEWILAYAHAN	KEBUDAYAAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase obyek diduga Cagar Budaya terdaftar	Persen	100 % (43 Potensi CB)	0%	10%	=(38-33)/33 X 100% = 15%	150%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
UNSUR KEWILAYAHAN	KEBUDAYAAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya Ditetapkan	Persen	100 % (15 CB)	0%	100%	=38/38 X 100%=100%	100%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
UNSUR KEWILAYAHAN	KEBUDAYAAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Pertumbuhan kunjungan museum	Persen	20,5 % (N = 1709 Orang, N-1 = 1418 Orang)	(6940-1709)/1709 x 100%=306%	30%	=(9638-6940)/6940X 100%=38.88%	130%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
UNSUR KEWILAYAHAN	KEARSIPAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Pencipta Arsip yang dibina	Persen	28,48%	32,89%	46,14%	46,14%	100,00%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
UNSUR KEWILAYAHAN	KEARSIPAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Nilai Pengawasan Kearsipan		BAIK (66,25)	BAIK 68,03	(71-80) SANGAT BAIK	81,26 MEMUASKAN	100%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
UNSUR KEWILAYAHAN	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		
UNSUR KEWILAYAHAN	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase perekaman KTP-el	Persen	98,43	98,24	98,89%	99,47%	101%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		

URUSAN		PD	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	2020	2021	TARGET 2022	Realisasi 2022	Capaian	NILAI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	Permasalahan	Tindak Lanjut
UNSUR KEWILAYAHAN	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan KIA	Persen	54,51	72,97	72,37%	79,74%	110%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		
UNSUR KEWILAYAHAN	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penerbitan Akta Kelahiran per-tahun	Persen	93,58	98,60	95,65%	100%	105%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		
UNSUR KEWILAYAHAN	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penerbitan Akta Kematian per-tahun	Persen	89,12	100	91,29%	100%	110%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		
UNSUR KEWILAYAHAN	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Kebermanfaatan data kependudukan	instansi	28 instansi	36 instansi	37 instansi	94 instansi	254,05%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		
UNSUR KEWILAYAHAN	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase layanan adminduk berstandarisasi ISO	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase validasi Data Ganda, Anomali dan non aktif	Persen	100%	22,30%	44,61%	40,54%	90,88%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	PERENCANAAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	Persen	76%	76%	76%	76%	100,0%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	PERENCANAAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Program Pembangunan RKPD terhadap RPJMD	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	PERENCANAAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Renja Kualitas Baik	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	PERENCANAAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Renstra Kualitas Baik	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	PERENCANAAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan sektoral	Persen	76%	76%	76%	76%	100%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	LINGKUNGAN HIDUP	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	Persen	100%	100%	100%	100%	100,0%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN LINGKUNGAN HIDUP		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	LINGKUNGAN HIDUP	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penurunan beban pencemaran air	Persen	40%	41,67%	45%	88%	196%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN LINGKUNGAN HIDUP		

URUSAN		PD	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	2020	2021	TARGET 2022	Realisasi 2022	Capaian	NILAI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	Permasalahan	Tindak Lanjut
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	LINGKUNGAN HIDUP	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase penurunan beban pencemar udara	Persen	40%	61%	45%	94,00%	209%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN LINGKUNGAN HIDUP		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	LINGKUNGAN HIDUP	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Prosentase Penambahan RTH	Persen	1,31%	2,48%	1,5%	2,503%	167%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN LINGKUNGAN HIDUP		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	LINGKUNGAN HIDUP	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Usaha yang Memiliki Izin Lingkungan	Persen	40%	97%	45%	64%	142,2%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN LINGKUNGAN HIDUP		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	LINGKUNGAN HIDUP	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Kelompok/Lembaga/Organisasi yang Dibina dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persen	25%	36%	40%	118%	295%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN LINGKUNGAN HIDUP		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	LINGKUNGAN HIDUP	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase Kasus Lingkungan Hidup yang terselesaikan	Persen	30%	33%	40%	3,50%	8,75%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN LINGKUNGAN HIDUP		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	LINGKUNGAN HIDUP	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah	Persen	50%	100%	52%	65,68%	126%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN LINGKUNGAN HIDUP		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	LINGKUNGAN HIDUP	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengurangan sampah	Persen	9%	47%	10%	11,70%	117%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN LINGKUNGAN HIDUP		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	LINGKUNGAN HIDUP	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah TPS dan TPS3R yang terbangun dan terkelola	Jumlah	N/A	319	142	125	88,0%	T	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN LINGKUNGAN HIDUP		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	LINGKUNGAN HIDUP	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah TPA/ TPST yang terbangun dan terkelola	Jumlah	1	1	1	1	100,0%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN LINGKUNGAN HIDUP		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	LINGKUNGAN HIDUP	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah bank sampah yang terbentuk	Jumlah	301	330	301	231	76,7%	T	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN LINGKUNGAN HIDUP		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	LINGKUNGAN HIDUP	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Usaha dengan Potensi Menghasilkan LB3 yang memiliki izin Pengelolaan LB3	Persen	30%	33%	40%	101,1%	252,8%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN LINGKUNGAN HIDUP		

Lampiran 5

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2022

Realisasi Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah Tahun 2022

No	URUSAN/SUB BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	Anggaran	Realisasi	Sisa	Keterangan Sisa Anggaran					
						Sisa Lelang	Efisiensi	Tidak Dilaksanakan	Tidak Selesai	Tidak Selesai (50 hari)	Kurang Bayar
3.2.1	**PELAKSANAAN URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		**2.120.443.969.266**	**1.892.121.721.144**	**222.089.498.707**	**45.664.134.507**	**80.352.534.196**	**1.161.809.681**	**-**	**6.780.584.388**	**6.232.819.416**
3.2.1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN	957.446.812.465	908.740.125.559	48.706.686.906	-	48.706.686.906	-	-	-	-
3.2.1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	693.694.743.149	605.564.307.215	88.130.435.934	NIHIL					-
3.2.1.4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	197.611.668.357	165.816.394.670	25.562.454.272	14.523.275.185	4.258.594.698	-	-	6.780.584.388	6.232.819.416
3.2.1.5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN	133.908.488.436	92.723.164.717	41.185.323.719	30.034.174.319	10.818.494.400	332.655.000	-	-	-
3.2.1.6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN	58.790.029.088	52.028.998.349	6.761.030.739	1.106.685.003	4.825.191.054	829.154.681	-	-	-
3.2.1.7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	DINAS POLISI PAMONG PRAJA	29.696.316.500	26.163.285.539	3.533.030.961	-	3.533.030.961	-	-	-	-
3.2.1.8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	10.029.874.575	9.537.675.104	492.199.471	-	492.199.471	-	-	-	-
3.2.1.9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	9.772.576.100	9.501.393.339	271.252.761	-	271.252.761	-	-	-	-
3.2.1.9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	DINAS SOSIAL	29.493.460.596	22.046.376.653	7.447.083.943	-	7.447.083.943	-	-	-	-
3.2.2	**PELAKSANAAN URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		**308.301.744.211**	**244.967.625.629**	**63.327.606.325**	**1.404.668.927**	**20.454.742.530**	**40.296.392.092**	**1.171.802.776**	**-**	**-**
3.2.2.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENAGAKERJAAN	DINAS TENAGA KERJA	8.971.806.925	8.502.066.411	469.740.514	-	469.740.514	-	-	-	-
3.2.2.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	23.554.710.460	18.984.144.787	4.570.565.673	185.896.042	4.359.669.631	25.000.000	-	-	-
3.2.2.3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	DINAS PERTANIAN	3.040.720.000	1.615.884.505	1.424.835.495	1.594.000	2.360.100	1.420.881.395	-	-	-
3.2.2.4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	63.198.301.000	20.987.016.295	42.211.284.705	100.000	4.441.869.228	37.769.315.477	-	-	-
3.2.2.5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	40.193.223.680	38.786.729.138	1.406.494.542	587.022.771	659.091.771	160.380.000	-	-	-

No	URUSAN/SUB BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	Anggaran	Realisasi	Sisa	Keterangan Sisa Anggaran					
						Sisa Lelang	Efisiensi	Tidak Dilaksanakan	Tidak Selesai	Tidak Selesai (50 hari)	Kurang Bayar
3.2.2.6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	10.664.176.005	10.021.338.016	642.837.989	-	642.837.989	-	-	-	-
3.2.2.7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	17.802.659.800	16.042.269.882	1.760.389.918	-	1.760.389.918	-	-	-	-
3.2.2.8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.325.589.748	4.186.253.286	1.139.336.462	-	1.139.336.462	-	-	-	-
3.2.2.9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	39.680.439.855	36.322.666.153	3.357.773.702	90.926.939	1.989.104.807	717.257.250	560.484.706	-	-
3.2.2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	14.121.993.165	13.773.059.884	348.933.281	-	348.933.281	-	-	-	-
3.2.2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	32.807.479.470	30.099.857.686	2.707.621.784	-	2.707.621.784	-	-	-	-
3.2.2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	14.492.610.495	12.610.338.073	1.882.272.422	395.136.550	875.817.802	-	611.318.070	-	-
3.2.2.13	URUSAN PEMERINTAHAN	DINAS PARIWISATA	19.706.396.069	18.789.700.037	916.696.032	-	713.138.062	203.557.970	-	-	-
3.2.2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	99.862.100	82.378.972	17.483.128	-	17.483.128	-	-	-	-
3.2.2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	447.129.000	445.508.593	1.620.407	-	1.620.407	-	-	-	-
3.2.2.16	URUSAN PEMERINTAHAN	DINAS PARIWISATA	3.339.435.000	3.291.233.707	48.201.293	-	48.201.293	-	-	-	-
3.2.2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	10.538.228.189	10.125.304.112	412.924.077	143.782.818	269.141.259	-	-	-	-
3.2.2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	316.983.250	301.876.093	8.594.900	209.807	8.385.093	-	-	-	-
3.2.3	PELAKSANAAN URUSAN PILIHAN		62.631.708.981	56.219.967.867	6.411.855.679	709.849.375	1.666.362.725	4.035.643.579	-	-	-
3.2.3.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERIKANAN	DINAS PERIKANAN	12.431.838.246	11.959.956.507	471.996.304	128.436.221	343.560.083	-	-	-	-
3.2.3.2	URUSAN PEMERINTAHAN	DINAS PARIWISATA	11.829.628.897	11.472.556.046	357.072.851	-	357.072.851	-	-	-	-
3.2.3.3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	34.987.933.838	29.784.685.620	5.203.248.218	581.413.154	586.191.485	4.035.643.579	-	-	-
3.2.3.4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2.956.308.000	2.609.236.452	347.071.548	-	347.071.548	-	-	-	-
3.2.3.5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	426.000.000	393.533.242	32.466.758	-	32.466.758	-	-	-	-
3.2.4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		254.547.435.409	232.304.560.078	22.242.875.331	44.855.083	21.284.420.248	913.600.000	-	-	-
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SEKRETARIAT	SEKRETARIAT DAERAH	166.894.478.959	153.129.187.684	13.765.291.275	-	12.851.691.275	913.600.000	-	-	-
3.2.4.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SEKRETARIAT	SEKRETARIAT DPRD	87.652.956.450	79.175.372.395	8.477.584.055	44.855.083	8.432.728.972	-	-	-	-
3.2.5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**		**1.044.725.532.893**	**993.434.404.369**	**51.291.120.524**	**-**	**51.291.120.524**	**-**	**-**	**-**	**-**

No	URUSAN/SUB BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	Anggaran	Realisasi	Sisa	Keterangan Sisa Anggaran					
						Sisa Lelang	Efisiensi	Tidak Dilaksanakan	Tidak Selesai	Tidak Selesai (50 hari)	Kurang Bayar
3.2.5.1	URUSAN PEMERINTAHAN	BADAN PERENCANAAN	14.537.493.860	13.577.707.116	959.786.744	-	959.786.744	-	-	-	-
3.2.5.2	URUSAN PEMERINTAHAN	BADAN PENDAPATAN,	1.011.641.623.743	963.675.926.369	47.965.697.374	-	47.965.697.374	-	-	-	-
3.2.5.3	KEPEGAWAIAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN SUMBER DAYA MANUSIA	12.310.118.390	10.913.304.105	1.396.806.285	-	1.396.806.285	-	-	-	-
3.2.5.4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN SUMBER DAYA MANUSIA	4.109.149.800	3.372.633.940	736.515.860	-	736.515.860	-	-	-	-
3.2.5.5	URUSAN PEMERINTAHAN	BADAN PERENCANAAN	2.127.147.100	1.894.832.839	232.314.261	-	232.314.261	-	-	-	-
3.2.6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		17.038.045.306	13.609.868.912	3.428.176.394	-	3.070.762.394	357.414.000	-	-	-
3.2.6.1	INSPEKTORAT DAERAH	INSPEKTORAT DAERAH	17.038.045.306	13.609.868.912	3.428.176.394	-	3.070.762.394	357.414.000	-	-	-
3.2.7	UNSUR KEWILAYAHAN		117.705.786.143	109.791.887.528	7.887.919.615	-	7.884.472.615	3.447.000	-	-	-
3.2.7.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEWILAYAHAN	KECAMATAN GRESIK	27.441.218.077	24.282.153.908	3.159.064.169	-	3.159.064.169	-	-	-	-
3.2.7.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEWILAYAHAN	KECAMATAN KEBOMAS	18.401.548.085	17.430.005.177	971.542.908	-	971.542.908	-	-	-	-
3.2.7.3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEWILAYAHAN	KECAMATAN MANYAR	4.429.985.000	4.279.626.570	150.358.430	-	150.358.430	-	-	-	-
3.2.7.4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEWILAYAHAN	KECAMATAN CERME	4.383.812.000	4.116.136.772	267.675.228	-	267.675.228	-	-	-	-
3.2.7.5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEWILAYAHAN	KECAMATAN BENJENG	4.588.491.000	4.447.594.986	140.896.014	-	140.896.014	-	-	-	-
3.2.7.6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEWILAYAHAN	KECAMATAN BALONG PANGGANG	5.211.175.000	5.025.873.987	185.301.013	-	185.301.013	-	-	-	-
3.2.7.7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEWILAYAHAN	KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN	4.508.599.000	4.176.645.073	331.953.927	-	331.953.927	-	-	-	-
3.2.7.8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEWILAYAHAN	KECAMATAN DRIYOREJO	4.160.942.000	4.100.275.406	60.666.594	-	60.666.594	-	-	-	-
3.2.7.9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEWILAYAHAN	KECAMATAN WRINGINANOM	4.414.167.000	4.332.423.566	81.743.434	-	81.743.434	-	-	-	-
3.2.7.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEWILAYAHAN	KECAMATAN KEDAMEAN	3.831.298.000	3.753.381.230	77.916.770	-	77.916.770	-	-	-	-
3.2.7.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEWILAYAHAN	KECAMATAN MENGANTI	4.424.276.000	4.274.199.537	147.696.463	-	147.696.463	-	-	-	-
3.2.7.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEWILAYAHAN	KECAMATAN SIDAYU	5.032.590.900	4.645.931.309	386.659.591	-	386.659.591	-	-	-	-
3.2.7.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEWILAYAHAN	KECAMATAN UJUNG PANGKAH	4.483.948.600	4.223.229.825	249.003.775	-	249.003.775	-	-	-	-
3.2.7.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEWILAYAHAN	KECAMATAN PANCENG	4.759.750.596	4.577.135.449	170.731.147	-	170.731.147	-	-	-	-
3.2.7.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEWILAYAHAN	KECAMATAN BUNGAH	4.898.405.000	4.728.601.953	169.803.047	-	169.803.047	-	-	-	-

No	URUSAN/SUB BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH	Anggaran	Realisasi	Sisa	Keterangan Sisa Anggaran					
						Sisa Lelang	Efisiensi	Tidak Dilaksanakan	Tidak Selesai	Tidak Selesai (50 hari)	Kurang Bayar
3.2.7.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEWILAYAHAN	KECAMATAN DUKUN	4.616.185.000	4.463.727.277	152.457.723	-	152.457.723	-	-	-	-
3.2.7.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEWILAYAHAN	KECAMATAN SANGKAPURA	4.151.513.000	3.433.820.803	717.692.197	-	717.692.197	-	-	-	-
3.2.7.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEWILAYAHAN	KECAMATAN TAMBAK	3.967.881.885	3.501.124.700	466.757.185	-	463.310.185	3.447.000	-	-	-
3.2.8	UNSUR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		15.495.088.370	11.550.908.997	3.944.179.373	3.969.470	3.940.209.903	-	-	-	-
3.2.8.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	15.495.088.370	11.550.908.997	3.944.179.373	3.969.470	3.940.209.903	-	-	-	-
			3.940.889.310.579	**3.554.000.944.524**	**380.623.231.948**	**47.827.477.363**	**189.944.625.135**	**46.768.306.352**	**1.171.802.776**	**6.780.584.388**	**6.232.819.416**

Lampiran 6

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2022

Realisasi Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan (Keluaran) Perangkat Daerah Tahun 2022

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	2	1			3.2.1	PELAKSANAAN URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
3	**2**	**1**	**1**		**3.2.1.1**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**DINAS PENDIDIKAN**									**957.446.812.465**	**908.740.125.559**	**48.706.686.906**
1	**01**	**01**			**1.01.01.**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**476.880.225.418**	**449.031.640.864**	**27.848.584.554**
1	**01**	**01**	**2**	**01**	**1.01.01.2.01.**				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD**	**4**	**4**				**675.999.900**	**563.048.993**	**112.950.907**
1	01	01	2	01	1.01.01.2.01.01.				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen Perencanaan yang disusun (Renstra, Renja, Rencana Aksi, KAK, PK)	5	5				175.000.000	156.577.840	18.422.160
1	01	01	2	01	1.01.01.2.01.02.				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumalah dokumen Pra RKA dan RKA APBD dan PAPBD	4	4				99.999.900	78.819.750	21.180.150
1	01	01	2	01	1.01.01.2.01.05.				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA APBD dan PAPBD	4	4				75.000.000	65.778.535	9.221.465
1	01	01	2	01	1.01.01.2.01.06.				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen laporan SKPD selama 1 tahun (LPPD, LKPJ, LAKIP, SAKIP, Monev Renja, Monev Rencana Aksi, Laporan Bulan keg APBD, KKE Kinerja SKPD)	7	7				326.000.000	261.872.868	64.127.132
1	**01**	**01**	**2**	**02**	**1.01.01.2.02.**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Gaji dan tunjangan**	**12**	**12**				**465.818.698.877**	**440.422.842.231**	**25.395.856.646**
1	01	01	2	02	1.01.01.2.02.01.				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan tunjangan	12	12				465.818.698.877	440.422.842.231	25.395.856.646
1	**01**	**01**	**2**	**06**	**1.01.01.2.01.**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah jenis alat listrik dan ATK**	**60**	**60**				**675.999.900**	**563.048.993**	**112.950.907**
	0	**0**		**0**					**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah jenis mamin dan barang cetakan**	**25**	**25**				**#N/A**	**#N/A**	**#N/A**
	0	**0**		**0**					**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah perjalanan dinas**	**123**	**123**				**#N/A**	**#N/A**	**#N/A**
1	01	01	2	06	1.01.01.2.06.01.				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen alat Listrik	11	11				84.030.000	83.438.400	591.600
1	01	01	2	06	1.01.01.2.06.02.				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis ATK	49	49				904.812.421	899.496.900	5.315.521
	0	0		0	.0.0..0..				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis bahan printer	3	3				#N/A	#N/A	#N/A
1	01	01	2	06	1.01.01.2.06.04.				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Belanja Makanan Dan Minuman	6	6				365.000.000	344.431.283	20.568.717
1	01	01	2	06	1.01.01.2.06.05.				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang Cetakan, Penggandaan, Penjilidan	19	19				383.656.400	366.787.300	16.869.100
1	01	01	2	06	1.01.01.2.06.06.				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar dan bahan bacaan	6	6				27.164.000	22.704.000	4.460.000
1	01	01	2	06	1.01.01.2.06.09.				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kota	123	123				508.259.500	141.819.000	366.440.500

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
1	**01**	**01**	**2**	**08**	**1.01.01.2.01.**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Biaya jasa komunikasi, air dan listrik kantor selama 1 tahun**	**12**	**12**				**675.999.900**	**563.048.993**	**112.950.907**
	0	**0**		**0**					**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Honor Instruktur senam, Tenaga Administrasi, Kebersihan, Keamanan dan Supir Bis Sekolah selama 1 th**	**12**	**12**				**#N/A**	**#N/A**	**#N/A**
1	01	01	2	08	1.01.01.2.08.02.				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Biaya jasa komunikasi, air dan listrik kantor selama 1 tahun	12	12				1.228.793.005	780.450.923	448.342.082
1	01	01	2	08	1.01.01.2.08.03.				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	49	49				454.289.447	447.756.719	6.532.728
1	01	01	2	08	1.01.01.2.08.04.				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Melebihi Pagu Validasi	Honor Instruktur senam, Tenaga Administrasi, Kebersihan, Keamanan dan Supir Bis Sekolah selama 1 th	12	12				3.979.400.000	3.071.804.800	907.595.200
1	**01**	**01**	**2**	**09**	**1.01.01.2.09.**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah pemeliharaan yang dilaksanakan dalam 1 tahun**	**3**	**3**				**2.450.121.868**	**1.887.060.315**	**563.061.553**
1	01	01	2	09	1.01.01.2.09.02.				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Yang dipelihara	14	14				728.599.750	324.339.147	404.260.603
1	01	01	2	09	1.01.01.2.09.06.				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.Pemeliharaan alat reproduksi (penggandaan) 2. Pemeliharaan alat pendingin 3. Pemeliharaan komputer dan peralatannya	3	3				344.951.445	290.057.120	54.894.325
1	01	01	2	09	1.01.01.2.09.09.				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan taman dan gedung dinas kab/Kec	6	6				1.376.570.673	1.272.664.048	103.906.625
1	**01**	**02**			**1.01.02.**				**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**441.789.548.971**	**424.325.585.852**	**17.463.963.119**
1	**01**	**02**	**2**	**01**	**1.01.02.2.01.**				**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Jumlah lembaga SD/MI yang difasilitasi**	**823**	**823**				**177.395.368.155**	**170.527.176.905**	**6.868.191.250**
1	01	02	2	01	1.01.02.2.01.05.				Pembangunan Ruang Perpustakaan Sekolah	Jumlah Pembangunan Ruang Perpustakaan SD	10	10				652.937.300	426.230.438	226.706.862
1	01	02	2	01	1.01.02.2.01.06.				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pemabungunan (perpus, gedung tempat kerja, gedung tempat pendidikan) (DAK)	10	10				1.397.936.000	1.307.659.894	90.276.106
1	01	02	2	01	1.01.02.2.01.08.				Rehabilitasi Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas SD yang direhab (DID)	80	80				7.774.976.912	7.677.905.718	97.071.194
1	01	02	2	01	1.01.02.2.01.12.				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah penyediaan biaya rehabilitasi sarana, prasarana dan utilitas sekolah	12	12				1.980.000.000	1.955.392.610	24.607.390
1	01	02	2	01	1.01.02.2.01.15.				Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah pengadaan komputer untuk SD (DID)	800	800				637.152.000	605.470.450	31.681.550
1	01	02	2	01	1.01.02.2.01.16.				Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Siswa SD/SMP Penerima seragam	11.011	11.011				3.875.000.000	3.831.135.000	43.865.000

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
0	0			0	.0.0..0..				Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah SD penerima komputer	718	717				#N/A	#N/A	#N/A
1	01	02	2	01	1.01.02.2.01 .22.				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah alat Peraga (DAK)	70	70				725.000.000	704.224.900	20.775.100
1	01	02	2	01	1.01.02.2.01 .23.				Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah lembaga negeri/swasta peserta kegiatan (AKM,US,PPDB, mutu pembelajaran)	453	453				669.936.367	352.078.777	317.857.590
0	0			0	.0.0..0..				Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Guru, Operator sekolah, pengawas, Kepala Sekolah (AKM,US,PPDB, mutu pembelajaran,4 keg.RC)	2.843	2.843				#N/A	#N/A	#N/A
1	01	02	2	01	1.01.02.2.01 .24.				Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Lembaga Pembinaan UKS/Ramah anak/ Adiwiyata/MBS TK, SD dan SMP	385	385				199.999.860	180.948.050	19.051.810
0	0			0	.0.0..0..				Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Kepala Sekolah, Guru dan Pengawas	700	700				#N/A	#N/A	#N/A
1	01	02	2	01	1.01.02.2.01 .25.				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa (peserta KSN, IT, KIR dan Literasi)	600	600				200.000.000	111.627.000	88.373.000
0	0			0	.0.0..0..				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah guru pembina mapel	300	300				#N/A	#N/A	#N/A
1	01	02	2	01	1.01.02.2.01 .26.				Penyediaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Cakep/pengawas/penilik	192	173				629.100.000	494.700.645	134.399.355
1	01	02	2	01	1.01.02.2.01 .27.				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1. Jumlah Jurnal Pendidikan yang diterbitkan dalan 1 tahun	4	4				662.999.751	602.090.983	60.908.768
0	0			0	.0.0..0..				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2. Jumlah Guru yang dibina	80	80				#N/A	#N/A	#N/A
0	0			0	.0.0..0..				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	3. Jumlah sekolah yang dikembangakan	80	80				#N/A	#N/A	#N/A
0	0			0	.0.0..0..				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	4. Jumlah peserta Gupres dan OGN	100	100				#N/A	#N/A	#N/A
0	0			0	.0.0..0..				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	5. Jumlah kelompk kerja yang dibina	50	50				#N/A	#N/A	#N/A
0	0			0	.0.0..0..				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	6. JUMLAH KARIR PMTK SD YANG DIKEMBANGKAN	18	18				#N/A	#N/A	#N/A
1	01	02	2	01	1.01.02.2.01 .28.				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah (seksi data)	1. Jumlah sekolah yang menerapkan Sistem danInformasi Manajemen Pendidikan	549	549				8.899.188.000	8.036.458.090	862.729.910
0	0			0	.0.0..0..				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah (seksi data)	2. Jumlah Dokumen buku pintar dan profil pendidikan	2	2				#N/A	#N/A	#N/A
0	0			0	.0.0..0..				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah (seksi data)	3. Jumlah peserta penguatan Adminstrasi sekolah	2	2				#N/A	#N/A	#N/A
0	0			0	.0.0..0..				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah (seksi data)	4. Jumlah peserta penguatan Adminstrasi perpustakaan	114	114				#N/A	#N/A	#N/A

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
0	0		0		.0.0..0..				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah (seksi data)	5. Jumlah peserta pembinaan pengelolaan Laborat IPA	50	50				#N/A	#N/A	#N/A
0	0		0		.0.0..0..				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah (seksi data)	6. Jumlah peserta pembinaan pengelolaan Laborat TIK	41	41				#N/A	#N/A	#N/A
0	0		0		.0.0..0..				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah (seksi data)	7. Jumlah peserta pembinaan pengelolaan Laborat Bahasa	4	4				#N/A	#N/A	#N/A
0	0		0		.0.0..0..				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah (seksi data)	8. Jumlah peserta in house training program sekolah Penggerak SD	100	100				#N/A	#N/A	#N/A
0	0		0		.0.0..0..				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah (seksi data)	9. Jumlah peserta lokakarya program sekolah Penggerak SD	200	200				#N/A	#N/A	#N/A
0	0		0		.0.0..0..				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah (seksi data)	10. Jumlah peserta komunitas belajar/praktisi program sekolah Penggerak SD	350	350				#N/A	#N/A	#N/A
0	0		0		.0.0..0..				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah (seksi data)	11. Jumlah peserta Pelatihan pemanfaatan platform dan literasi teknologi program sekolah Penggerak SD	150	150				#N/A	#N/A	#N/A
0	0		0		.0.0..0..				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah (seksi data)	12. Jumlah lembaga pemenuhan infrastruktur TIK (hardware,shofwere,listrik dan jaringan)program sekolah Penggerak SD	180	180				#N/A	#N/A	#N/A
0	0		0		.0.0..0..				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah (seksi data)	13. Jumlah lembaga yang dimonitoring dan dievaluasi program sekolah Penggerak SD	90	90				#N/A	#N/A	#N/A
1	01	02	2	01	1.01.02.2.01 .29.				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah penyediaan biaya Operasional SD/MI Swasta (432 sekolah) selama 1 tahun	12	12				149.091.141.965	144.241.254.350	4.849.887.615
0	0		0		.0.0..0..				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah SD/MI Swasta penerima hibah	140	140				#N/A	#N/A	#N/A
0	0		0		.0.0..0..				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah penyediaan Biaya Operasional SD selama 1 tahun	12	12				#N/A	#N/A	#N/A
1	**01**	**02**	**2**	**02**	**1.01.02.2.02 .**				**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Jumlah lembaga SMP/MTS yang difasilitasi**	**253**	**253**				**134.913.822.996**	**129.064.253.553**	**5.849.569.443**
1	01	02	2	02	1.01.02.2.02 .01.				Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah pembangunan unit SMP baru	1	1				9.750.000.000	8.471.882.325	1.278.117.675
1	01	02	2	02	1.01.02.2.02 .02.				Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah pembangunnn ruang kelas baru SMP	10	10				120.000.000	120.000.000	-
1	01	02	2	02	1.01.02.2.02 .14.				Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah rehabilitasi Ruang Kelas SMP (DAK)	40	40				8.188.211.660	8.156.514.188	31.697.472
1	01	02	2	02	1.01.02.2.02 .15.				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru SMP yang direhab (DAK)	5	5				550.917.157	550.916.000	1.157

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
1	01	02	2	02	1.01.02.2.02.17.				Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan SMP yang direhab (DAK)	5	5				1.000.195.261	1.000.193.000	2.261
1	01	02	2	02	1.01.02.2.02.18.				Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium SMP yang direhab (DAK)	10	10				1.316.820.966	1.316.818.600	2.366
1	01	02	2	02	1.01.02.2.02.24.				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas SMP yang direhab (DAK)	4	4				741.556.209	741.551.000	5.209
1	01	02	2	02	1.01.02.2.02.25.				Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Meja kursi siswa SMP	1.500	1.500				1.035.794.000	1.034.623.596	1.170.404
1	01	02	2	02	1.01.02.2.02.35.				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Peraga (Biologi, fisika, media pendidikan) DAK	36	36				1.220.771.570	1.215.360.000	5.411.570
1	01	02	2	02	1.01.02.2.02.36.				Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Siswa PPDB	15.000	15.000				518.999.900	293.389.580	225.610.320
	0	0		0	.0.0..0..				Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Guru 9 Mapel Pengemb Media Pembelajaran	495	495				#N/A	#N/A	#N/A
	0	0		0	.0.0..0..				Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Guru 9 Mapel Pengemb Metode Pembelajaran	495	495				#N/A	#N/A	#N/A
	0	0		0	.0.0..0..				Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Kasek, Wakasek Kurikulum, Wakasek Kesiswaan, GPK, Walisiswa Kurikulum Inklusi	495	495				#N/A	#N/A	#N/A
	0	0		0	.0.0..0..				Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Guru 9 Mapel Pengemb Inovasi Pembelajaran	495	495				#N/A	#N/A	#N/A
	0	0		0	.0.0..0..				Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Guru Mapel PKn Penguatan Karakter	110	110				#N/A	#N/A	#N/A
1	01	02	2	02	1.01.02.2.02.37.				Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Kepala sekolah Sosialisasi AKM	110	110				473.200.000	300.404.398	172.795.602
	0	0		0	.0.0..0..				Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Proktor dan Teknisi AKM	220	220				#N/A	#N/A	#N/A
	0	0		0	.0.0..0..				Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Guru 9 Mata Pelajaran Evaluasi Penilaian	495	495				#N/A	#N/A	#N/A
	0	0		0	.0.0..0..				Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Guru B.Ind dan Matematika Pelat Penyusunan Soal AKM	220	220				#N/A	#N/A	#N/A
1	01	02	2	02	1.01.02.2.02.38.				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa peserta lomba (O2SN, FLS2N)	600	600				549.999.984	222.726.072	327.273.912
	0	0		0	.0.0..0..				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah guru mapel peserta sosialisasi OSS dan FLS2N	150	150				#N/A	#N/A	#N/A
1	01	02	2	02	1.01.02.2.02.40.				Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Penilaian Angka Kredit Guru ASN	350	350				443.493.700	392.073.162	51.420.538
	0	0		0	.0.0..0..				Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah peserta sosialisasi SKP	500	500				#N/A	#N/A	#N/A
1	01	02	2	02	1.01.02.2.02.41.				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Lembaga Negeri dan swasta Pembinaan BOS	1.065	1.065				5.080.018.000	4.473.865.270	606.152.730
	0	0		0	.0.0..0..				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah SMP Pembinaan UKS	25	25				#N/A	#N/A	#N/A
	0	0		0	.0.0..0..				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah SMP Sekolah Ramah Anak	55	55				#N/A	#N/A	#N/A
	0	0		0	.0.0..0..				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah SMP Sekolah Penggerak	55	55				#N/A	#N/A	#N/A

Kode Rekening				No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
0	0		0	.0.0..0..				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah SMP Sekolah Adiwiyata	55	55				#N/A	#N/A	#N/A
0	0		0	.0.0..0..				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Kasek dan Bendahara SMP Pelatihan MBS	110	110				#N/A	#N/A	#N/A
0	0		0	.0.0..0..				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumalah SMP Penyusun RAPBS	110	110				#N/A	#N/A	#N/A
0	0		0	.0.0..0..				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumalah Sekolah Penyusunan & Pengembangan Standar Manajemen Pendidikan	300	300				#N/A	#N/A	#N/A
0	0		0	.0.0..0..				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Pembinaan Komite Sekolah SD/SMP	275	275				#N/A	#N/A	#N/A
0	0		0	.0.0..0..				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	8. Jumlah peserta in house training program sekolah Penggerak SMP	70	70				#N/A	#N/A	#N/A
0	0		0	.0.0..0..				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	9. Jumlah peserta lokakarya program sekolah Penggerak SMP	100	100				#N/A	#N/A	#N/A
0	0		0	.0.0..0..				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	10. Jumlah peserta komunitas belajar/praktisi program sekolah Penggerak SMP	100	100				#N/A	#N/A	#N/A
0	0		0	.0.0..0..				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	11. Jumlah peserta Pelatihan pemanfaatan platform dan literasi teknologi program sekolah Penggerak SMP	100	100				#N/A	#N/A	#N/A
0	0		0	.0.0..0..				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	12. Jumlah lembaga pemenuhan infrastruktur TIK (hardware,shofwere,listrik dan jaringan)program sekolah Penggerak SMP	50	50				#N/A	#N/A	#N/A
0	0		0	.0.0..0..				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	13. Jumlah lembaga yang dimonitoring dan dievaluasi program sekolah Penggerak SMP	25	25				#N/A	#N/A	#N/A
0	0		0	.0.0..0..				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Siswa miskin,yatim,piatu dan yatim piatu penerima bansos	25.300	25.300				#N/A	#N/A	#N/A
0	0		0	.0.0..0..				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah penyediaan biaya Operasional SD/MI Swasta (432 sekolah) selama 1 tahun	12	12				#N/A	#N/A	#N/A
0	0		0	.0.0..0..				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Siswa miskin,yatim,piatu dan yatim piatu penerima perlengkapan sekolah (sepatu lengpap dan tas)	1.200	1.200				#N/A	#N/A	#N/A
1	01	02	2	02	1.01.02.2.02 .42.			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah penyediaan biaya Operasional SMP/MTs Swasta (227 sekolah) selama 1 tahun	227	227				103.021.936.800	99.887.213.611	3.134.723.189
0	0		0	.0.0..0..				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah SMP/MTS Swasta penerima hibah	60	60				#N/A	#N/A	#N/A

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
0	0			0	.0.0..0..				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah penyediaan Biaya Operasional SMP selama 1 tahun	12	12				#N/A	#N/A	#N/A
1	**01**	**02**	**2**	**03**	**1.01.02.2.03 .**				**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**APK anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**40**	**40**				**53.911.154.820**	**51.166.283.133**	**2.744.871.687**
1	01	02	2	03	1.01.02.2.03 .01.				Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah pembangunan jamban TK (DAK)	2	2				235.184.000	233.084.800	2.099.200
1	01	02	2	03	1.01.02.2.03 .13.				Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah penyediaan Biaya Operasional TK selama 1 tahun	12	12				259.100.000	244.337.728	14.762.272
1	01	02	2	03	1.01.02.2.03 .14.				Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah Dokumen Perencanaan PAUD	1	1				37.999.820	37.139.700	860.120
1	01	02	2	03	1.01.02.2.03 .16.				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik PAUD sekolah penggerak	108	108				773.711.000	666.237.755	107.473.245
0	0			0	.0.0..0..				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Lembaga Penerima DAK Non Fisik	1.339	1.339				#N/A	#N/A	#N/A
1	01	02	2	03	1.01.02.2.03 .17.				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah jenis lomba dalam rangka Hari Anak Nasional (HAN)	5	5				700.000.000	636.024.750	63.975.250
0	0			0	.0.0..0..				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah yang dilombakan Apresiasi Guru & Kepala PAUD	4	4				#N/A	#N/A	#N/A
0	0			0	.0.0..0..				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Lembaga PKBM	13	13				#N/A	#N/A	#N/A
0	0			0	.0.0..0..				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah TPQ / Madin	2.142	2.142				#N/A	#N/A	#N/A
0	0			0	.0.0..0..				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Peserta Sosialisasi Akreditasi	300	300				#N/A	#N/A	#N/A
0	0			0	.0.0..0..				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Lembaga PAUD yang terpetakan	1.413	1.413				#N/A	#N/A	#N/A
0	0			0	.0.0..0..				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	8. Jumlah peserta in house training program sekolah Penggerak PAUD	50	50				#N/A	#N/A	#N/A
0	0			0	.0.0..0..				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	9. Jumlah peserta lokakarya program sekolah Penggerak PAUD	75	75				#N/A	#N/A	#N/A
0	0			0	.0.0..0..				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	10. Jumlah peserta komunitas belajar/praktisi program sekolah Penggerak PAUD	50	50				#N/A	#N/A	#N/A
0	0			0	.0.0..0..				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	11. Jumlah peserta Pelatihan pemanfaatan platform dan literasi teknologi program sekolah Penggerak PAUD	75	75				#N/A	#N/A	#N/A
0	0			0	.0.0..0..				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	12. Jumlah lembaga pemenuhan infrastruktur TIK (hardware,shofwere,listrik dan jaringan)program sekolah Penggerak PAUD	50	50				#N/A	#N/A	#N/A
0	0			0	.0.0..0..				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	13. Jumlah lembaga yang dimonitoring dan dievaluasi program sekolah Penggerak PAUD	25	25				#N/A	#N/A	#N/A

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
0	0			0	.0.0..0..				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Siswa miskin,yatim,piatu dan yatim piatu penerima bansos	6.106	6.106				#N/A	#N/A	#N/A
1	01	02	2	03	1.01.02.2.03.18.				Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Lembaga PAU Penerima BOP	1.574	1.574				51.905.160.000	49.349.458.400	2.555.701.600
0	0			0	.0.0..0..				Pengelolaan Dana BOP PAUD	jumlah lembaga PAUD penerima hibah	310	310				#N/A	#N/A	#N/A
1	**01**	**02**	**2**	**04**	**1.01.02.2.04.**				**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Prosentase lembaga pendidikan non formal/kesetaraan yang memiliki izin masih berlaku**	**100**	**100**				**75.569.203.000**	**73.567.872.261**	**2.001.330.739**
1	01	02	2	04	1.01.02.2.04.12.				Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Lembaga Kesetaraan	13	13				120.000.000	116.521.800	3.478.200
1	01	02	2	04	1.01.02.2.04.16.				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Sosialisasi BPPDGS (Kab+Prov)	776	776				44.530.091.000	43.063.728.461	1.466.362.539
0	0			0	.0.0..0..				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta HAI (Prov)	13	13				#N/A	#N/A	#N/A
0	0			0	.0.0..0..				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Lembaga Penerima BPPDGS (Kab+Prov)	1.410	1.410				#N/A	#N/A	#N/A
0	0			0	.0.0..0..				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Lembaga PKBM (APBN)	13	13				#N/A	#N/A	#N/A
0	0			0	.0.0..0..				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Lembaga Pembinaan LKP	15	15				#N/A	#N/A	#N/A
0	0			0	.0.0..0..				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah guru Non PNS TK, SD, SMP dan Kepala Sekolah PAUD, TK NON PNS (BKK/Prov)	294	294				#N/A	#N/A	#N/A
0	0			0	.0.0..0..				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah pondok penerima program OPOP	30	30				#N/A	#N/A	#N/A
0	0			0	.0.0..0..				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta kegiatan akademi komunitas (Paket C)	100	100				#N/A	#N/A	#N/A
0	0			0	.0.0..0..				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah penyediaan Biaya Operasional UPT RESOURCE CENTRE selama 1 tahun	12	12				#N/A	#N/A	#N/A
0	0			0	.0.0..0..				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah penyediaan Biaya Operasional UPT SANGGAR KEGIATAN BELAJAR CERME selama 1 tahun	12	12				#N/A	#N/A	#N/A
0	0			0	.0.0..0..				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Lembaga TPA/TPQ/Madin penerima BOP	2.142	2.142				#N/A	#N/A	#N/A
0	0			0	.0.0..0..				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Lembaga Ponpes penerima BOP (20,000)	103	103				#N/A	#N/A	#N/A
1	01	02	2	04	1.01.02.2.04.17.				Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Lembaga PKBM APBD penerima BOP	12	12				30.919.112.000	30.387.622.000	531.490.000
	0		0		..0..0..				Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Lembaga PKBM (DAK Non Fisik)	13	12				#N/A	#N/A	#N/A
	0		0		..0..0..				Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah lembaga TPQ/TPA penerima hibah	190	190				#N/A	#N/A	#N/A
	0		0		..0..0..				Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Yayasan penerima hibah	40	40				#N/A	#N/A	#N/A
	0		0		..0..0..				Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah lembaga Ponpes penerima hibah	32	32				#N/A	#N/A	#N/A

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
		0		0	..0..0..				Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah lembaga Madin penerima hibah	110	110				#N/A	#N/A	#N/A
1	**01**	**03**			**1.01.03.**				**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**							**735.438.076**	**617.495.923**	**117.942.153**
1	**01**	**03**	**2**	**01**	**1.01.03.2.01.**				**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	**Prosentase satuan pendidikan SD yang memiliki kurikulum muatan lokal**	**100**	**100**				**375.000.000**	**309.539.423**	**65.460.577**
1	01	03	2	01	1.01.03.2.01.03.				Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen buku teks kelas 1 s/d kelas 6	6	6				200.000.000	195.049.800	4.950.200
1	01	03	2	01	1.01.03.2.01.04.				Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Guru Peserta Pelatihan	2.865	2.865				175.000.000	114.489.623	60.510.377
	0	0		0	.0.0..0..				Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Pengawas Peserta Pelatihan	75	75				#N/A	#N/A	#N/A
	0	0		0	.0.0..0..				Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Orang Tua Peserta Pelatihan	100	100				#N/A	#N/A	#N/A
1	**01**	**03**	**2**	**02**	**1.01.03.2.02.**				**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**	**Prosentase PAUD dan lembaga pendidikan non formal yang memiliki kurikulum muatan lokal**	**100**	**100**				**360.438.076**	**307.956.500**	**52.481.576**
1	01	03	2	02	1.01.03.2.02.01.				Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Dokumen	2	2				210.438.316	178.896.150	31.542.166
1	01	03	2	02	1.01.03.2.02.02.				Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Dokumen	2	2				149.999.760	129.060.350	20.939.410
1	**01**	**04**			**1.01.04.**				**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**							**37.816.600.000**	**34.615.500.000**	**3.201.100.000**
1	**01**	**04**	**2**	**01**	**1.01.04.2.01.**				**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Jumlah honorarium GTT/PTT SD/SMP Negeri (K2 dan Non K2)**	**19.088**	**19.088**				**37.816.600.000**	**34.615.500.000**	**3.201.100.000**
1	01	04	2	01	1.01.04.2.01.01.				Perhitungan Dan Pemetaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, Dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah honorarium GTT/PTT SD/SMP Negeri (K2 dan Non K2)	4.588	4.588				37.816.600.000	34.615.500.000	3.201.100.000
	0	0		0	.0.0..0..				Perhitungan Dan Pemetaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, Dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Guru penerima Tunjangan kehormatan	14.500	14.500				#N/A	#N/A	#N/A
1	**01**	**05**			**1.01.05.**				**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**							**150.000.000**	**105.213.920**	**44.786.080**
1	**01**	**05**	**2**	**01**	**1.01.05.2.01.**				**Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat**	**Jumah lembaga SD yang izin operasionalnya masih berlaku**	**809**	**809**				**75.000.000**	**50.929.960**	**24.070.040**
1	01	05	2	01	1.01.05.2.01.01.				Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Oleh Masyarajat	Jumalah pengajuan izin pendirian lembaga baru	50	50				25.000.000	18.137.860	6.862.140
1	01	05	2	01	1.01.05.2.01.02.				Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat	Jumlah perpanjangan izin operasional lemabaga	100	100				50.000.000	32.792.100	17.207.900
1	**01**	**05**	**2**	**02**	**1.01.05.2.02.**				**Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh Masyarakat**	**Jumah lembaga PAUD yang izin operasionalnya masih berlaku**	**237**	**150**				**75.000.000**	**54.283.960**	**20.716.040**
1	01	05	2	02	1.01.05.2.02.01.				Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal Yang Diselenggarakan Oleh Masyarajat	Jumalah Lembaga izin pendirian	50	50				25.000.000	13.796.200	11.203.800

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
1	01	05	2	02	1.01.05.2.02.02.				Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat	Jumalah Lembaga perpanjangan izin pendirian	100	100				50.000.000	40.487.760	9.512.240
1	**01**	**06**			**1.01.06.**				**PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**							**75.000.000**	**44.689.000**	**30.311.000**
1	**01**	**06**	**2**	**01**	**1.01.06.2.01.**				**Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah siswa dan guru peserta GFSG**	**200**	**200**				**75.000.000**	**44.689.000**	**30.311.000**
1	01	06	2	01	1.01.06.2.01.06.				Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota (Apresiasi Pembelajaran Inovatif Guru Pendidik dan siswa Jenjang SD-SMP)	Jumlah siswa dan guru peserta GFSG	200	200				75.000.000	44.689.000	30.311.000
3	**2**	**1**	**2**		**3.2.1.2**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**DINAS KESEHATAN**									**693.694.743.149**	**605.564.307.215**	**88.130.435.934**
						Urusan Pemerintahan Waji	**DINKES**									**693.694.743.149,00**	**605.564.307.214,53**	**88.130.435.934,47**
01						**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**										**139.970.228.070,00**	**134.575.471.427,64**	**5.394.756.642,36**
01.	**2.01**	**01**				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**673.322.000,00**	**498.618.400,00**	**174.703.600,00**
01.	2.01	01	01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										12.600.000,00	12.049.500,00	550.500,00
01.	2.02	01	02			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										5.460.000,00	2.004.400,00	3.455.600,00
01.	2.03	01	03			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										4.000.000,00	3.960.000,00	40.000,00
01.	2.04	01	04			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										4.000.000,00	2.640.000,00	1.360.000,00
01.	2.05	01	05			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD										4.000.000,00	3.990.000,00	10.000,00
01.	2.05	01	06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										569.562.000,00	405.031.500,00	164.530.500,00
01.	2.05	01	07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										73.700.000,00	68.943.000,00	4.757.000,00
01.	**2.01**	**02**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**113.107.257.000,00**	**108.838.136.674,00**	**4.269.120.326,00**
01.	2.01	02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							Tunjangan PPPK yang sudah dianggarkan tidak dapat terserap			113.107.257.000,00	108.838.136.674,00	4.269.120.326,00
01.	**2.01**	**06**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**2.289.025.350,00**	**2.082.053.107,00**	**206.972.243,00**
01.	2.01	06	02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										476.172.000,00	447.021.516,00	29.150.484,00
01.	2.01	06	03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										417.588.850,00	402.684.066,00	14.904.784,00
01.	2.01	06	04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor										463.975.000,00	444.870.000,00	19.105.000,00
01.	2.01	06	05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										225.790.000,00	222.474.214,00	3.315.786,00

Kode Rekening				No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
01.	2.01	06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										5.000.000,00	4.950.000,00	50.000,00
01.	2.01	06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										700.499.500,00	560.053.311,00	140.446.189,00
01.	2.02	08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										21.368.881.200,00	20.941.869.717,00	427.011.483,00
01.	2.02	08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										1.492.635.200,00	1.375.687.447,00	116.947.753,00
01.	2.02	08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							Efisiensi krn byk THL yg diterima PPPK/ASN			19.876.246.000,00	19.566.182.270,00	310.063.730,00
01.	**2.02**	**09**			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**2.531.742.520,00**	**2.214.793.529,64**	**316.948.990,36**
01.	2.02	09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							sudah dianggarkan oleh PKM			441.078.520,00	276.608.090,00	164.470.430,00
01.	2.02	09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										138.170.000,00	136.401.490,00	1.768.510,00
01.	2.02	09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							1. sewa rumah nusantara sehat hanya diserap 3 bln terakhir (sisa 37 jt), 2. efisiensi pemeliharaan ruang rapat Lt. 2 (sisa 100 jt)			1.952.494.000,00	1.801.783.949,64	150.710.050,36
02					**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**										**134.482.934.971,00**	**123.271.405.672,35**	**11.211.529.298,65**
02	**2.**	**01**			**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**										**35.296.778.915,00**	**31.968.933.078,25**	**3.327.845.836,75**
02	2.	01	01		Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya										1.047.177.000,00	1.030.053.820,00	17.123.180,00
02	2.	01	02		Pembangunan Puskesmas										3.788.659.000,00	3.741.174.516,18	47.484.483,82
02	2.	01	03		Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya							- Adanya sisa anggaran tender pembangunan 2 pustu, adanya BOP pembangunan pustu			2.725.968.000,00	2.363.913.587,07	362.054.412,93
02	2.	01	13		Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan							harga pengadaan lebih rendah dari anggaran dengan spesifikasi yg sesuai			9.909.110.000,00	9.419.796.300,00	489.313.700,00

Kode Rekening				No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
02	2.	01	14		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan							harga di anggaran (standart harga) lebih tinggi dari pengadaan dengan spesifikasi yg sudah sesuai			4.350.388.684,00	3.783.229.235,00	567.159.449,00
02	2.	01	17		Pengadaan Bahan Habis Pakai							harga di anggaran (standart harga) lebih tinggi dari pengadaan dengan spesifikasi yg sudah sesuai			12.924.295.731,00	11.212.291.674,00	1.712.004.057,00
02	2.	01	20		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan										551.180.500,00	418.473.946,00	132.706.554,00
02	**2.**	**02**			**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**										**97.757.524.656,00**	**90.300.240.888,10**	**7.457.283.767,90**
02	2.	02	01		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil										383.846.000,00	334.138.500,00	49.707.500,00
02	2.	02	02		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin							Dengan adanya UHC maka klaim pemanfaatan jampersal untuk pelayanan ibu bersalin di faskes berkurang. Tidak ada klaim rujukan dan perjadin rujukan persalinan karena sudah ditanggung oleh BPJS			1.196.204.000,00	198.150.100,00	998.053.900,00
02	2.	02	03		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir										42.153.000,00	37.256.000,00	4.897.000,00
02	2.	02	04		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita										28.430.000,00	28.169.000,00	261.000,00
02	2.	02	05		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar										35.867.000,00	34.791.000,00	1.076.000,00
02	2.	02	06		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif										223.407.900,00	187.858.656,00	35.549.244,00
02	2.	02	07		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut										62.286.000,00	62.050.000,00	236.000,00
02	2.	02	08		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi										58.146.000,00	35.368.100,00	22.777.900,00
02	2.	02	09		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus										58.146.000,00	49.130.900,00	9.015.100,00
02	2.	02	10		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat										73.800.000,00	56.683.200,00	17.116.800,00

Kode Rekening	No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
02 2. 02 11		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis										98.400.000,00	83.873.200,00	14.526.800,00
02 2. 02 12		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV										81.430.000,00	69.070.400,00	12.359.600,00
02 2. 02 13		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)										4.844.234.000,00	4.735.072.515,00	109.161.485,00
02 2. 02 15		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat							harga di anggaran (standart harga) lebih tinggi dari pengadaan dengan spesifikasi yg sudah sesuai			1.595.194.000,00	1.379.884.704,00	215.309.296,00
02 2. 02 16		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga										65.581.800,00	63.243.000,00	2.338.800,00
02 2. 02 17		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan										61.080.000,00	53.959.200,00	7.120.800,00
02 2. 02 18		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan										48.266.900,00	47.576.000,00	690.900,00
02 2. 02 19		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya										61.870.000,00	57.573.000,00	4.297.000,00
02 2. 02 20		Pengelolaan Surveilans Kesehatan										228.296.500,00	172.662.100,00	55.634.400,00
02 2. 02 22		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA										19.680.000,00	16.205.000,00	3.475.000,00
02 2. 02 23		Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus										4.050.000,00	2.686.500,00	1.363.500,00
02 2. 02 25		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular										676.707.000,00	615.878.540,00	60.828.460,00
02 2. 02 26		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat							sisa klaim Jamkesmas/UHC			78.058.211.056,00	72.970.556.095,00	5.087.654.961,00
02 2. 02 27		Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah										10.707.500,00	10.610.940,00	96.560,00
02 2. 02 28		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional										52.000.000,00	5.500.000,00	46.500.000,00
02 2. 02 29		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat										179.160.000,00	169.184.500,00	9.975.500,00
02 2. 02 33		Operasional Pelayanan Puskesmas										968.985.500,00	775.377.300,00	193.608.200,00
02 2. 02 34		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya							Belanja Jasa Kesehatan subsidi dan non subsidi belum terserap karena belum ada Perbup			2.213.976.000,00	1.995.446.756,10	218.529.243,90
02 2. 02 35		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota							Senam GJOS, BPJSTK masih belum ada karena tempat isolasi covid-19 di GJOS di Non Aktifkan akibat penurunan kasus Covid-19			426.757.000,00	353.320.000,00	73.437.000,00

Kode Rekening				No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
02	2.	02	36		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)										193.462.500,00	179.850.463,00	13.612.037,00
02	2.	02	37		Pelaksanaa Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah										5.224.949.000,00	5.214.718.520,00	10.230.480,00
02	2.	02	38		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)							Kondisional, Rujukan PSC 119 masih sedikit			482.240.000,00	304.396.699,00	177.843.301,00
02	2.	03			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi										299.689.400,00	219.616.500,00	80.072.900,00
02	2.	03	01		Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan										26.023.000,00	23.591.000,00	2.432.000,00
02	2.	03	02		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan							Pertemuan Koordinasi SIKDA ditunda karena masih perlu penyesuaian Bridging aplikasi PCare BPJS Kesehatan versi 4.0 dan Bridging data kependudukan dengan aplikasi SIKDA;			273.666.400,00	196.025.500,00	77.640.900,00
02	**2.**	**04**			**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**										**1.128.942.000,00**	**782.615.206,00**	**346.326.794,00**
02	2.	04	01		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya										35.000.000,00	34.898.000,00	102.000,00
02	2.	04	03		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan										12.360.000,00	11.248.000,00	1.112.000,00
02	2.	04	04		Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan							Klaim pelayanan COVID-19 rendah karena kasus sudah menurun			1.081.582.000,00	736.469.206,00	345.112.794,00
03					**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**										**6.992.560.000,00**	**5.778.375.708,00**	**1.214.184.292,00**
03	**2.**	**02**			**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**										**6.339.450.000,00**	**5.280.615.708,00**	**1.058.834.292,00**
03	2.	02	02		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar							Efisiensi krn byk THL yang diterima PPPK/ASN			6.240.000.000,00	5.202.826.300,00	1.037.173.700,00

Kode Rekening				No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
03	2.	02	03		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan										99.450.000,00	77.789.408,00	21.660.592,00
03	**2.**	**03**			**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**										**653.110.000,00**	**497.760.000,00**	**155.350.000,00**
03	2.	03	01		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							Pelaksanaan pelatihan belum bisa terlaksana, karena tidak ada jadwal dari UPT LABKESMAS MURNAJATI.			653.110.000,00	497.760.000,00	155.350.000,00
04					**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**										**394.560.600,00**	**370.936.470,00**	**23.624.130,00**
04	**2.**	**01**			**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**										**60.733.600,00**	**55.482.744,00**	**5.250.856,00**
04	2.	01	01		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)										14.703.600,00	14.615.900,00	87.700,00
04	2.	01	02		Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)										11.030.000,00	10.053.000,00	977.000,00
04	2.	01	03		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)										35.000.000,00	30.813.844,00	4.186.156,00
04	2.	03			Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga										160.725.000,00	153.613.165,00	7.111.835,00

Kode Rekening				No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
04	2.	03	01		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah tangga										160.725.000,00	153.613.165,00	7.111.835,00
04	2.	04			Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)										53.057.000,00	49.696.531,00	3.360.469,00
04	2.	04	01		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)										53.057.000,00	49.696.531,00	3.360.469,00
04	2.	06			Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga										120.045.000,00	112.144.030,00	7.900.970,00
04	2.	06	01		Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan										120.045.000,00	112.144.030,00	7.900.970,00
05					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN										2.283.997.000,00	1.773.682.951,00	510.314.049,00
05		2	01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										912.437.000,00	456.941.551,00	455.495.449,00

Kode Rekening	No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
05 2 01 01		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat							kegiatan kunjungan konseling kesehatan dan bantuan transport kunjungan konseling kesehatan tidak dilaksanakan krn waktu pelaksanaan PAPBD tidak mencukupi untuk melakukan kegiatan tsb (alokasi BK Prov baru terbit di Bulan Mei 2022, sehingga anggaran baru bisa diakomodir di PAPBD)			912.437.000,00	456.941.551,00	455.495.449,00
05 2 02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										1.371.560.000,00	1.316.741.400,00	54.818.600,00
05 2 02 01		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat										1.371.560.000,00	1.316.741.400,00	54.818.600,00
		RSUD IBNU SINA										300.393.792.540,00	246.995.824.130,84	53.397.968.409,16
01		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**										298.193.792.540,00	244.820.071.425,64	53.373.721.114,36
01 2 02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										33.959.225.000,00	33.323.221.029,00	636.003.971,00
01 2 02 01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										33.959.225.000,00	33.323.221.029,00	636.003.971,00
01 2 10		Peningkatan Pelayanan BLUD										264.234.567.540,00	211.496.850.396,64	52.737.717.143,36
01 2 10 01		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							SILPA RSUD Ibnu Sina yang akan digunakan pada tahun 2023 untuk pembangunan rs gresik selatan (38M) dan pembangunan Poli terpadu (15M)			264.234.567.540,00	211.496.850.396,64	52.737.717.143,36
02		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**										2.200.000.000,00	2.175.752.705,20	24.247.294,80
02 2 01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**										2.200.000.000,00	2.175.752.705,20	24.247.294,80

Kode Rekening			No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
02	2 01	14		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan										2.000.000.000,00	1.979.045.476,00	20.954.524,00
02	2 01	18		Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan										200.000.000,00	196.707.229,20	3.292.770,80
				UPT LABOLATORIUM KESEHATAN DAERAH										**3.734.074.000,00**	**3.509.600.050,00**	**224.473.950,00**
02				**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**										**3.734.074.000,00**	**3.509.600.050,00**	**224.473.950,00**
02	2 01			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota										3.389.169.000,00	3.186.390.565,00	202.778.435,00
02	2 01	13		Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan										1.198.129.000,00	1.190.000.000,00	8.129.000,00
02	2 01	14		Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan										2.141.040.000,00	1.958.722.065,00	182.317.935,00
02	2 01	15		Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi										50.000.000,00	37.668.500,00	12.331.500,00
02	2 02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										344.905.000,00	323.209.485,00	21.695.515,00
02	2 02	34		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya							Kegiatan Akreditasi tidak bisa dilaksanakan tahun ini, karena setelah Assesment masih banyak dokumen2 dan kelengkapan lainnya yang perlu dilengkapi, dan anggaran akreditasi dialihkan ke pembelian reagen/peralatan kerja Lab.			344.905.000,00	323.209.485,00	21.695.515,00
				UPT INSTALASI FARMASI KESEHATAN										**10.614.504.000,00**	**9.539.666.040,00**	**1.074.837.960,00**
02				**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**										**10.614.504.000,00**	**9.539.666.040,00**	**1.074.837.960,00**
02	2 01			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota										10.614.504.000,00	9.539.666.040,00	1.074.837.960,00
02	2 01	16		Pengadaan Obat, Vaksin										9.168.822.832,00	9.028.262.040,00	140.560.792,00
02	2 01	17		Pengadaan Bahan Habis Pakai										1.445.681.168,00	511.404.000,00	934.277.168,00

Kode Rekening	No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
		UMAR MAS'UD										**9.542.411.842,00**	**9.320.858.363,00**	**221.553.479,00**
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										**9.542.411.842,00**	**9.320.858.363,00**	**221.553.479,00**
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										9.542.411.842,00	9.320.858.363,00	221.553.479,00
		Operasional Pelayanan Rumah Sakit										9.542.411.842,00	9.320.858.363,00	221.553.479,00
01		**PUSKESMAS BLUD**										**56.842.961.904,00**	**46.843.018.136,74**	**9.999.943.767,26**
01	**2 10**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**										**44.038.820.404,00**	**39.396.418.159,74**	**4.642.402.244,26**
		WRINGIN ANOM										2.263.056.054,00	1.929.661.354,00	333.394.700,00
		KESAMBEN KULON										2.159.179.336,00	1.784.004.031,00	375.175.305,00
		DRIYOREJO										3.115.562.000,00	3.078.456.201,00	37.105.799,00
		CERME										4.129.339.434,00	3.272.521.035,95	856.818.398,05
		BENJENG										2.884.569.026,00	2.439.285.224,87	445.283.801,13
		METATU										1.711.858.058,00	1.674.852.817,00	37.005.241,00
		BALONG PANGGANG										1.986.037.610,00	1.825.159.705,00	160.877.905,00
		DUDUK SAMPEYAN										3.212.931.645,00	2.782.687.185,00	430.244.460,00
		KEBOMAS										2.023.090.977,00	1.732.205.844,56	290.885.132,44
		ALON-ALON										2.316.000.000,00	2.090.087.519,00	225.912.481,00
		MANYAR										1.701.990.306,00	1.529.053.454,31	172.936.851,69
		SUKOMULYO										1.533.222.222,00	1.508.383.413,00	24.838.809,00
		BUNGAH										4.240.158.358,00	3.894.098.511,32	346.059.846,68
		SIDAYU										2.657.537.846,00	2.523.769.097,00	133.768.749,00
		MENTARAS										2.006.897.884,00	1.735.667.261,00	271.230.623,00
		PANCENG										3.900.694.363,00	3.568.849.063,15	331.845.299,85
		UJUNG PANGKAH										2.196.695.285,00	2.027.676.442,58	169.018.842,42
02		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**										**10.942.101.900,00**	**6.361.934.651,00**	**4.580.167.249,00**
02	**2 02**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**										**10.942.101.900,00**	**6.361.934.651,00**	**4.580.167.249,00**
05		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**										**1.862.039.600,00**	**1.084.665.326,00**	**777.374.274,00**
05	**2 01**	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**										**1.862.039.600,00**	**1.084.665.326,00**	**777.374.274,00**
		WRINGIN ANOM										727.252.000,00	223.801.063,00	503.450.937,00
		KESAMBEN KULON										533.224.000,00	246.312.324,00	286.911.676,00
		DRIYOREJO										941.053.500,00	595.004.788,00	346.048.712,00
		CERME										860.536.000,00	536.043.541,00	324.492.459,00
		BENJENG										732.466.000,00	381.771.490,00	350.694.510,00
		METATU										591.898.000,00	326.799.930,00	265.098.070,00
		BALONG PANGGANG										720.882.000,00	335.332.619,00	385.549.381,00
		DUDUK SAMPEYAN										898.854.000,00	593.929.568,00	304.924.432,00
		KEBOMAS										810.792.000,00	541.094.885,00	269.697.115,00
		ALON-ALON										694.667.000,00	316.936.801,00	377.730.199,00
		MANYAR										665.154.000,00	492.112.860,00	173.041.140,00
		SUKOMULYO										677.470.000,00	500.352.808,00	177.117.192,00
		BUNGAH										926.755.000,00	740.019.522,00	186.735.478,00
		SIDAYU										946.949.000,00	588.711.752,00	358.237.248,00

Kode Rekening				No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
					MENTARAS										686.830.000,00	272.415.391,00	414.414.609,00
					PANCENG										762.636.000,00	418.427.985,00	344.208.015,00
					UJUNG PANGKAH										626.723.000,00	337.532.650,00	289.190.350,00
01					**PUSKESMAS FKTP**										**28.442.718.222,00**	**23.585.468.264,96**	**4.857.249.957,04**
01	**2**	**10**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**										**18.597.938.922,00**	**17.228.022.108,96**	**1.369.916.813,04**
					KARANGANDONG										1.129.444.305,00	841.154.044,00	288.290.261,00
					KEDAMEAN										1.554.665.391,00	966.192.013,00	588.473.378,00
					SLEMPIT										1.237.709.400,00	794.593.692,00	443.115.708,00
					MENGANTI										2.776.112.900,00	2.022.146.227,00	753.966.673,00
					KEPATIHAN										1.126.757.950,00	842.646.660,04	284.111.289,96
					DADAPKUNING										940.711.675,00	553.064.766,00	387.646.909,00
					DAPET										689.300.394,00	485.394.931,00	203.905.463,00
					GENDING										761.474.700,00	497.699.779,00	263.774.921,00
					NELAYAN										563.639.300,00	441.515.359,00	122.123.941,00
					INDUSTRI										675.746.000,00	393.486.531,50	282.259.468,50
					SEMBAYAT										1.220.074.740,00	860.266.353,00	359.808.387,00
					DUKUN										1.757.636.500,00	1.170.671.154,00	586.965.346,00
					SEKAPUK										613.744.900,00	468.042.137,00	145.702.763,00
					SANGKAPURA										2.142.268.367,00	1.538.463.615,20	603.804.751,80
					TAMBAK										1.408.652.400,00	893.133.656,00	515.518.744,00
02					**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**										8.383.665.253,00	5.467.821.475,00	2.915.843.778,00
02	**2**	**02**			**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**										8.383.665.253,00	5.467.821.475,00	2.915.843.778,00
05					**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**										1.461.114.047,00	889.624.681,00	571.489.366,00
05	**2**	**01**			**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**										1.461.114.047,00	889.624.681,00	571.489.366,00
					KARANGANDONG										669.548.000,00	363.373.867,00	306.174.133,00
					KEDAMEAN										603.261.000,00	255.904.790,00	347.356.210,00
					SLEMPIT										598.060.000,00	387.270.422,00	210.789.578,00
					MENGANTI										896.621.900,00	434.096.616,00	462.525.284,00
					KEPATIHAN										671.995.000,00	268.541.892,00	403.453.108,00
					DADAPKUNING										547.086.000,00	373.740.919,00	173.345.081,00
					DAPET										544.912.800,00	263.711.127,00	281.201.673,00
					GENDING										712.580.000,00	592.735.278,00	119.844.722,00
					NELAYAN										464.243.000,00	196.187.319,00	268.055.681,00
					INDUSTRI										614.181.000,00	520.911.727,00	93.269.273,00
					SEMBAYAT										663.515.300,00	494.412.586,00	169.102.714,00
					DUKUN										690.696.000,00	558.214.683,00	132.481.317,00
					SEKAPUK										551.916.000,00	238.539.084,00	313.376.916,00
					SANGKAPURA										931.911.300,00	868.670.802,00	63.240.498,00
					TAMBAK										684.252.000,00	541.135.044,00	143.116.956,00
					PANCENG										684.252.000,00	238.539.084,00	445.712.916,00
					UJUNG PANGKAH										931.911.300,00	868.670.802,00	63.240.498,00
															684.252.000,00	541.135.044,00	143.116.956,00
3	**2**	**1**	**4**	**3.2.1.4**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**									**197.611.668.357**	**165.816.394.670**	**25.562.454.272**
1	03	01						**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketercapaian sasaran strategis OPD**	**90%**	**100%**				**22.907.945.985,00**	**21.637.394.376,05**	**1.270.551.608,95**

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
1	03	01	2.01						***Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas PUTR yang disusun***	30 Dokumen	30 Dokumen				***649.999.800,00***	***511.874.200,00***	***138.125.600,00***
1	03	01	2.01	01					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan tahunan dan dokumen kegiatan yang disusun	12 Dokumen	12 Dokumen				371.315.950,00	299.484.850	71.831.100,00
1	03	01	2.01	06					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	5 Dokumen	5 Dokumen				106.770.100,00	68.089.650	38.680.450,00
1	03	01	2.01	07					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang disusun	13 Dokumen	13 Dokumen				171.913.750,00	144.299.700	27.614.050,00
1	03	01	2.02						***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN***	1 Tahun	1 Tahun				***13.820.937.085,00***	***13.417.041.433,00***	***403.895.652,00***
1	03	01	2.02	01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	149 Orang	149 Orang				13.720.937.285,00	13.319.189.870	401.747.415,00
1	03	01	2.02	08					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	8 Laporan	8 Laporan				99.999.800,00	97.851.563	2.148.237,00
1	03	01	2.06						***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Jumlah kebutuhan rumah tangga pada Dinas PUTR***	**36 Jenis**	**36 Jenis**				***799.218.500,00***	***779.532.587,00***	***19.685.913,00***
1	03	01	2.06	01					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Jenis	1 Jenis				13.997.000,00	13.983.160	13.840,00
1	03	01	2.06	02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Jenis	16 Jenis				217.389.500,00	211.077.065	6.312.435,00
1	03	01	2.06	05					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Jenis	3 Jenis				96.720.000,00	96.656.850	63.150,00
1	03	01	2.06	06					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Jenis	1 Jenis				79.992.000,00	73.559.159	6.432.841,00
1	03	01	2.06	08					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Jenis	3 Jenis				62.899.000,00	62.789.200	109.800,00
1	03	01	2.06	09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Jenis	3 Jenis				328.221.000,00	321.467.153	6.753.847,00
1	03	01	2.07						***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Jumlah penyediaan barang milik daerah pada Dinas PUTR***	**2 Jenis**	**2 Jenis**				***3.300.000.000,00***	***2.993.955.000,00***	***306.045.000,00***
1	03	01	2.07	03					Pengadaan Alat Besar	Jumlah penyediaan Alat besar/berat	2 Jenis	2 Jenis				3.300.000.000,00	2.993.955.000	306.045.000,00
1	03	01	2.08						***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah layanan jasa penunjang pada Dinas PUTR***	**20 Jenis**	**20 Jenis**				***2.385.621.100,00***	***2.032.797.070,00***	***352.824.030,00***
1	03	01	2.08	02					Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah fasilitasi untuk telepon, air dan listrik dan/atau kebutuhan lain	3 Jenis	3 Jenis				600.111.100,00	398.360.339	201.750.761,00

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
1	03	01	2.08	03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	10 Jenis	10 Jenis				139.810.000,00	137.490.731	2.319.269,00
1	03	01	2.08	04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	7 Jenis	7 Jenis				1.645.700.000,00	1.496.946.000	148.754.000,00
1	03	01	2.09						***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah sarana dan prasarana operasional kantor yang dipelihara***	**340 Unit**	**348 Unit**				***1.952.169.500,00***	***1.902.194.086,05***	***49.975.413,95***
1	03	01	2.09	02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	25 Unit				398.888.000,00	361.593.353	37.294.647,00
1	03	01	2.09	03					Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	15 Unit	15 Unit				848.600.000,00	837.268.943	11.331.057,00
1	03	01	2.09	06					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralata dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	300 Unit	305 Unit				160.010.000,00	159.523.600	486.400,00
1	03	01	2.09	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Lokasi	3 Lokasi				544.671.500,00	543.808.190	863.309,95
1	03	02							**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase Waduk yang dinormalisasi setiap tahun**	**7,05%**	**6,41%**				**22.164.856.551,00**	**19.206.539.643,26**	**2.958.316.907,74**
										Persentase Panjang Saluran Irigasi yang terpelihara setiap tahun	**7,72%**	7,60%						
1	03	02	2.01						***Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota***	***Persentase Saluran Pembuang dalam Kondisi Baik***	63,38%	62,14%				***12.950.105.223,00***	***11.009.656.951,60***	***1.940.448.271,40***
1	03	02	2.01	03					Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun	13 Dokumen	13 Dokumen				1.200.000.000,00	1.172.496.795	27.503.205,00
1	03	02	2.01	21					Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Volume waduk yang dinormalisasi	58012 m3	58200 m3				1.423.473.506,00	1.384.140.072	39.333.434,19
1	03	02	2.01	26					Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah pintu air yang direhabilitasi	5 pintu air	5 pintu air				799.087.350,00	721.750.680	77.336.669,99
1	03	02	2.01	46					Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang saluran pembuang yang dipelihara	61 Km	62,14 Km				8.587.151.867,00	6.919.868.458	1.667.283.408,54
1	03	02	2.01	49					Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah bangunan penampung air yang dipelihara	1 bangunan air	1 bangunan air				100.000.000,00	96.901.331	3.098.668,68
1	03	02	2.01	51					Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku	Jumlah operasional rumah pompa waduk	1 unit	1 unit				676.550.000,00	550.663.715	125.886.285,00
1	03	02	2.01	61					Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah HIPPA yang dibina	6 HIPPA	6 HIPPA				163.842.500,00	163.835.900	6.600,00
1	03	02	2.02						***Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota***	***Panjang jaringan irigasi yang yang dipelihara dan direhabilitasi***	**11397 M**	**12136,9 M**				***9.214.751.328,00***	***8.196.882.691,66***	***1.017.868.636,34***

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
1	03	02	2.02	01					Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Perencanaan dan jumlah database dokumen aset	5 Dokumen	5 Dokumen				410.000.000,00	406.720.806	3.279.194,00
1	03	02	2.02	14					Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi	2023 M	1878 M				4.619.387.074,00	3.852.269.999	767.117.075,26
1	03	02	2.02	21					Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi yang dipelihara	9374 M	10258,9 M				4.185.364.254,00	3.937.891.887	247.472.367,08
1	03	1'0							**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Efektivitas Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan**	**37,65%**	**25,13%**				**149.830.205.821,00**	**122.487.917.137,81**	**21.109.469.267,65**
1	03	1'0	2.01						***Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota***	***Panjang Jalan Yang Ditingkatkan dan Dipelihara***	66,5 KM	44,376 KM				***149.830.205.821,00***	***122.487.917.137,81***	***21.109.469.267,65***
1	03	10	2.01	01					Penyusunan Rencana Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan dan Jembatan	85 Dokumen	84 Dokumen				7.480.000.000,00	7.209.861.006,00	270.138.994,00
1	03	10	2.01	03					Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Ruas Jalan yang di Patok Rumija dan leger Jalan	19 Ruas	19 Ruas				2.063.200.000,00	1.836.801.015,00	226.398.985,00
1	03	10	2.01	04					Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Data Kondisi Jalan dan Jembatan	11 Dokumen	15 Dokumen				1.400.000.000,00	1.325.268.000,00	74.732.000,00
1	03	10	2.01	05					Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan	3688 M	4256 M				29.399.505.571,00	22.802.389.682,70	4.126.410.455,27
1	03	10	2.01	06					Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Jalan Menuju Standar	7,82 KM	7,246 KM				32.106.092.400,00	26.858.989.826,55	4.426.467.481,54
1	03	10	2.01	08					Rekontruksi Jalan	Jumlah ruas yang dibangun	1 Ruas	1 Ruas				6.635.104.000,00	5.626.400.500,00	1.008.703.500,00
1	03	10	2.01	09					Rehabilitasi Jalan	Jumlah Ruas Jalan yang Direhabilitasi	39 Ruas	39 Ruas				18.389.553.600,00	16.051.818.892,13	2.337.734.707,87
1	03	10	2.01	10					Pemeliharaan Berkala Jalan	Jumlah Ruas Jalan yang Dipelihara	4 Ruas	4 Ruas				977.290.700,00	886.606.350,00	90.684.350,00
1	03	10	2.01	11					Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara	5,44 KM	16,061 KM				23.987.080.850,00	21.160.095.619,86	1.013.536.230,14
1	03	10	2.01	12					Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	134 M	137 M				24.102.548.500,00	15.709.056.915,84	7.265.461.693,56
1	03	10	2.01	18					Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	3 Jembatan	3 Jembatan				1.655.729.700,00	1.433.009.309,73	222.720.390,27
1	03	10	2.01	19					Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dipelihara	1144,51 M	84,2 M				1.634.100.500,00	1.587.620.020,00	46.480.480,00
1	03	12							**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang sesuai SIPR dengan Peruntukan Ruang**	**96%**	**99,11%**				**2.358.660.000,00**	**2.202.492.312,66**	**156.167.687,34**
1	03	12	2.01						***Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota***	***Jumlah dokumen Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) dan Juknis Penyelenggaraan Penataan Ruang***	10 dokumen	10 dokumen				***1.287.039.000,00***	***1.189.717.376,00***	***97.321.624,00***
1	03	12	2.01	01					Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) dan Juknis Penyelenggaraan Penataan Ruang	10 dokumen	0 dokumen	Pergeseran anggaran			63.940.000,00	61.524.945,00	2.415.055,00

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
1	03	12	2.01	02					Pelaksanaan Persetujuan Substansi Evaluasi Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah kumulatif wilayah/Kecamatan yang memiliki Dokumen RDTR yang mendapat persetujuan substansi/ ditetapkan	11 kecamatan	11 kecamatan				862.999.000,00	825.102.206,00	37.896.794,00
1	03	12	2.01	03					Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah kumulatif Dokumen RTBL yang disusun/ ditetapkan	2 dokumen	2 dokumen				220.100.000,00	199.239.225,00	20.860.775,00
1	03	12	2.01	04					Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah sosialisasi kebijakan bidang penataan ruang	4 Sosialisasi	3 Sosialisasi	Seluruh materi sosialisasi sudah tersampaikan			140.000.000,00	103.851.000,00	36.149.000,00
1	03	12	2.02						***Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah Kecamatan/kawasan yang disinkronisasi dengan perencanaa tata ruang***	4 Kecamatan	5 Kecamatan				***193.891.000,00***	***179.094.231,00***	***14.796.769,00***
1	03	12	2.02	02					Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan / Wilayah perencanaan	18 Kecamatan	18 Kecamatan				103.071.000,00	99.333.390,00	3.737.610,00
1	03	12	2.02	03					Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah kecamatan yang telah dilakukan diseminasi informasi tata ruang	16 Kecamatan	16 Kecamatan				90.820.000,00	79.760.841,00	11.059.159,00
1	03	12	2.03						***Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah Rencana Induk Jaringan Utilitas***	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**				***634.620.000,00***	***606.794.295,66***	***27.825.704,34***
1	03	12	2.03	01					Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Layanan laporan rekomendasi teknis investasi jaringan utilitas	133 Dokumen	301 Dokumen				466.620.000,00	442.941.304,66	23.678.695,34
1	03	12	2.03	02					Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah pelaporan pemanfaatan ruang / permohonan informasi peruntukan ruang yang menggunakan sistem informasi	100 Laporan	417 Laporan				168.000.000,00	163.852.991,00	4.147.009,00
1	03	12	2.04						***Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah Layanan Rekomendasi teknis tata ruang***	**300 Layanan**	**266 Layanan**				***243.110.000,00***	***226.886.410,00***	***16.223.590,00***
1	03	12	2.04	02					Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang	Jumlah lokasi pengawasan dan monitoring pengendalian pemanfaatan ruang	180 Lokasi	200 Lokasi				132.000.000,00	123.826.354,00	8.173.646,00
1	03	12	2.04	04					Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah rekomendasi teknis tata ruang	120 Rekomendasi Teknis	66 Rekomendasi Teknis				111.110.000,00	103.060.056,00	8.049.944,00
03	02								**UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Wilayah Selatan**							**100.000.000,00**	**96.991.700,00**	***3.008.300,00***
1	03	02	2.01	49					Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah kecamatan di wilayah Selatan yang dilayani pendukung urusan pekerjaan umum	8 Kecamatan	8 Kecamatan				40.000.000,00	39.806.800,00	193.200,00
1	03	10	2.01	04					Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah kecamatan di wilayah Selatan yang dilayani pendukung urusan pekerjaan umum	8 Kecamatan	8 Kecamatan				60.000.000,00	57.184.900,00	2.815.100,00
03	03								**UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Wilayah Utara**							**100.000.000,00**	**38.780.000,00**	***61.220.000,00***

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
1	03	02	2.01	49					Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah kecamatan di wilayah Utara yang dilayani pendukung urusan pekerjaan umum	6 Kecamatan	6 Kecamatan				40.000.000,00	19.853.000,00	20.147.000,00
1	03	10	2.01	04					Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah kecamatan di wilayah Utara yang dilayani pendukung urusan pekerjaan umum	6 Kecamatan	6 Kecamatan				60.000.000,00	18.927.000,00	41.073.000,00
03	04								**UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Wilayah Bawean**							**150.000.000,00**	**146.279.500,00**	***3.720.500,00***
1	03	02	2.01	49					Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah kecamatan di wilayah Bawean yang dilayani pendukung urusan pekerjaan umum	2 Kecamatan	2 Kecamatan				50.000.000,00	48.666.000,00	1.334.000,00
1	03	10	2.01	11					Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah kecamatan di wilayah Bawean yang dilayani pendukung urusan pekerjaan umum	2 Kecamatan	2 Kecamatan				100.000.000,00	97.613.500,00	2.386.500,00
3	**2**	**1**	**5**		**3.2.1.5**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**									**133.908.488.436**	**92.723.164.717**	**41.185.323.719**
	1	**3**	**2**						**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**							**2.249.489.902**	**2.108.559.232**	**140.930.670**
	1	**3**	**2**	**2,01**					**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**							**2.249.489.902**	**2.108.559.232**	**140.930.670**
	1	3	2	2,01	21				Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya		5 Unit					1.956.045.480		
									(DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG)									
	1	3	2	2,01	26				Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir							875.498.180		
									(DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG)									
	1	3	2	2,01	46				Normalisasi/Restorasi Sungai							14.417.244.135		
									(DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG)									
	1	3	2	2,01	49				Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya							231.304.800		
									(DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG)									
	1	3	2	2,01	49				Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya							37.039.800		
									(UPT DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG WILAYAH SELATAN)									
	1	3	2	2,01	49				Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya							30.603.800		
									(UPT DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG WILAYAH UTARA)									
	1	3	2	2,01	49				Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya							74.999.788		
									(UPT DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG WILAYAH BAWEAN)									
	1	3	2	2,01	51				Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku							880.887.057		

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
									(DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG)									
1	3	2	2,01	55					Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	5 Unit	5 Unit				2.249.489.902	2.108.559.232	140.930.670
									(DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG)									
1	3	2	2,01	61					Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota							176.578.300		
									(DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG)									
1	**3**	**2**	**2,02**						**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**							**10.659.606.376**		
1	3	2	2,02	1					Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa							2.479.499.850		
									(DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG)									
1	3	2	2,02	14					Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan							5.336.377.000		
									(DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG)									
1	3	2	2,02	21					Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan							2.843.729.526		
									(DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG)									
1	**3**	**3**							**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**							**87.609.542.800**	**53.652.464.419**	**33.957.078.381**
1	**3**	**3**	**2,01**						**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**							**87.609.542.800**	**53.652.464.419**	**33.957.078.381**
1	3	3	2,01	1					Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah dokumen Teknis Sarana Prasarana Air Bersih	6 Dokumen	6 Dokumen				895.510.000	800.507.183	95.002.817
									(DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG)									
1	3	3	2,01	2					Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Dokumen Monitoring DAK, Dokumen Pengawasan dan Dokumen Supervisi Pengembangan SPAM	1 Dokumen	1 Dokumen				235.700.000	109.721.397	125.978.603
									(DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG)									
1	3	3	2,01	4					Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Air Bersih Terbangun di perdesaan	2 Sumur	2 Sumur				490.000.000	415.594.676	74.405.324
									(DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG)									
1	3	3	2,01	6					Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah air bersih non PDAM terpasang	690 SR	4050 sr				7.269.999.900	2.389.346.789	4.880.653.111
									(DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG)									
1	3	3	2,01	11					Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah kegiatan yang dibangun oleh pemerintah desa dan kelompok masyarakat	20 kegiatan	20 kegiatan				114.939.000	51.439.748	63.499.252

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
									(DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG)									
1	3	3	2,01	12					Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	Jumlah sambungan Rumah Tangga yang terakses air bersih melalui kerjasam SPAM	2.000 SR	2049 SR				6.112.096.000	5.932.307.139	179.788.861
									(DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG)									
1	3	3	2,01	19					Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah air bersih non PDAM terpasang	500 SR	4050 SR				72.491.297.900	43.953.547.487	28.537.750.413
									(DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG)									
1	**3**	**5**							**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**							**5.999.753.900**	**5.788.100.718**	**211.653.182**
1	**3**	**5**	**2,01**						**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**							**5.999.753.900**	**5.788.100.718**	**211.653.182**
1	3	5	2,01	5					Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Penambahan pipa pengumpul dan SR untuk SPALD-T	78 Unit	58 Unit				729.043.000	641.292.104	87.750.896
									(DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN)									
1	3	5	2,01	6					Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	a. Jumlah truck tinja b. Jumlah IPAL skala komunal kapasitas 80 KK c. Jumlah IPAL skala permukiman 50 KK d. Jumlah tangki septic skala individual	a. 1 unit b. 80 kk c. 3 unit d. 114 unit	a. 1 unit b. 85 kk c. 3 unit d. 99 unit				3.616.823.000	3.511.687.740	105.135.260
									(DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN)									
1	3	5	2,01	10					Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah layanan penyedotan Limbah Domestik	2.000 Pelanggan	1315 Pelanggan				1.395.787.900	1.387.209.144	8.578.756
									(UPT PENGELOLAAN LIMBAH CAIR DOMESTIK)									
1	3	5	2,01	16					Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah sarana prasarana IPLT yang direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				258.100.000	247.911.730	10.188.270
									(DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG)									
1	**3**	**6**							**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**							**8.424.563.834**	**6.909.394.983**	**1.515.168.852**
1	**3**	**6**	**2,01**						**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**							**8.424.563.834**	**6.909.394.983**	**1.515.168.852**
1	3	6	2,01	1					Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah dokumen perencanaan teknis dan investigasi sistem saluran drainase yang disusun	3 Dokumen	3 Dokumen				138.918.000	125.372.575	13.545.425
									(DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG)									
1	3	6	2,01	3					Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah jasa konsultasi supervisi/ pengawasan pengelolaan saluran drainase perkotaan	5 Dokumen	5 Dokumen				153.506.423	93.275.435	60.230.988

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
									(DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG)									
1	3	6	2,01	6					Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase perkotaan yang dibangun	800 M1	500 M1				665.916.814	520.063.857	145.852.957
									(DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG)									
1	3	6	2,01	7					Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase perkotaan yang direhabilitasi	1700 M1	350 M1				2.534.456.697	1.593.754.754	940.701.943
									(DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG)									
1	3	6	2,01	9					Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang sistem saluran drainase yang dioperasionalkan dan diperlihara	27 Sistem saluran drainase (1000 m1)	18 Sistem saluran drainase (1000 m1)				4.931.765.900	4.576.928.362	354.837.538
									(DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG)									
1	**3**	**8**							**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**							**21.103.654.000**	**16.509.313.047**	**4.594.340.953**
1	**3**	**8**	**2,01**						**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**							**21.103.654.000**	**16.509.313.047**	**4.594.340.953**
1	3	8	2,01	1					Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung yang diterbitkan	123 Sertifikat	137 Sertifikat				700.000.000	186.311.502	513.688.498
									(DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG)									
1	3	8	2,01	2					Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung yang dibangun	5 unit	5 unit				20.403.654.000	16.323.001.545	4.080.652.455
									(DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG)									
1	**3**	**9**							**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**							**7.784.666.000**	**7.093.656.903**	**691.009.097**
1	**3**	**9**	**2,01**						**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**							**7.784.666.000**	**7.093.656.903**	**691.009.097**
1	3	9	2,01	4					Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah bangunan yang dipelihara	1 unit	2 unit				7.784.666.000	7.093.656.903	691.009.097
									(DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG)									
1	**3**	**10**							**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**							**158.779.690.534**		
1	**3**	**10**	**2,01**						**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**							**158.779.690.534**		
1	3	10	2,01	1					Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan							6.259.962.437		
									(DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG)									
1	3	10	2,01	2					Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan							143.897.450		
									(DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG)									
1	3	10	2,01	3					Pengelolaan Leger Jalan							2.604.764.936		
									(DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG)									

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
1	3	10	2,01	4					Survey Kondisi Jalan/Jembatan							1.473.949.925		
									(DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG)									
1	3	10	2,01	4					Survey Kondisi Jalan/Jembatan							38.620.000		
									(UPT DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG WILAYAH SELATAN)									
1	3	10	2,01	4					Survey Kondisi Jalan/Jembatan							21.060.000		
									(UPT DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG WILAYAH UTARA)									
1	3	10	2,01	5					Pembangunan Jalan							13.947.671.915		
									(DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG)									
1	3	10	2,01	6					Pelebaran Jalan Menuju Standar							51.836.639.516		
									(DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG)									
1	3	10	2,01	8					Rekonstruksi Jalan							11.554.475.649		
									(DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG)									
1	3	10	2,01	9					Rehabilitasi Jalan							21.976.571.250		
									(DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG)									
1	3	10	2,01	10					Pemeliharaan Berkala Jalan							2.203.463.810		
									(DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG)									
1	3	10	2,01	11					Pemeliharaan Rutin Jalan							26.253.900.289		
									(DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG)									
1	3	10	2,01	11					Pemeliharaan Rutin Jalan							108.999.895		
									(UPT DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG WILAYAH BAWEAN)									
1	3	10	2,01	12					Pembangunan Jembatan							14.343.894.112		
									(DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG)									
1	3	10	2,01	18					Rehabilitasi Jembatan							1.009.983.450		
									(DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG)									
1	3	10	2,01	19					Pemeliharaan Rutin Jembatan							5.001.835.900		
									(DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG)									
1	**3**	**11**							**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**							**736.818.000**	**661.675.416**	**75.142.584**
1	**3**	**11**	**2,01**						**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**							**311.720.215**	**258.556.855**	**53.163.360**
1	3	11	2,01	4					Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah sertifikat yang diterbitkan bagi Tenaga Terampil Konstruksi (sertifikat)	130 Sertifikat	197 Sertifikat				230.720.215	184.168.355	46.551.860
									(DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG)									
1	3	11	2,01	6					Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah sertifikat yang diterbitkan bagi Tenaga Terampil Konstruksi untuk ASN	60 Sertifikat	197 Sertifikat				81.000.000	74.388.500	6.611.500
									(DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG)									
1	**3**	**11**	**2,02**						**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**							**50.000.000**	**42.446.400**	**7.553.600**
1	3	11	2,02	1					Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Informasi Jasa Konstruksi yang dikelola	200 Data informasi	60 Data informasi				50.000.000	42.446.400	7.553.600
									(DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG)									
1	**3**	**11**	**2,03**						**Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)**							**236.400.000**	**225.350.700**	**11.049.300**

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
1	3	11	2,03	1					Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP terkait Penyelenggaraan IUJK Nasional di Kabupaten/Kota	Jumlah regulasi bidang jasa konstruksi yang di susun	1 Dokumen & 3 Sosialisasi peraturan	1 Dokumen & 3 Sosialisasi peraturan				177.000.000	170.077.400	6.922.600
									(DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG)									
1	3	11	2,03	3					Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah Masyarakat jasa Konstruksi yang dibina	63 Orang	210 Orang				59.400.000	55.273.300	4.126.700
									(DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG)									
1	**3**	**11**	**2,04**						**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**							**138.697.785**	**135.321.461**	**3.376.324**
1	3	11	2,04	2					Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah peserta Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Kontrsuksi bersertifikat	78 Sertifikat	51 Sertifikat				78.418.000	76.443.261	1.974.739
									(DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG)									
1	3	11	2,04	3					Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah objek pengawasan yang dievaluasi	65 objek	0 objek				60.279.785	58.878.200	1.401.585
3	**2**	**1**	**6**		**3.2.1.6**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**									**58.790.029.088**	**52.028.998.349**	**6.761.030.739**
1	**4**								**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**								**52.028.998.349**	**6.761.030.739**
1	**4**	**1**							**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**17.205.403.399**	**15.905.099.878**	**1.300.303.521**
1	**4**	**1**	**2,01**						**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**442.042.900**	**382.623.584**	**59.419.316**
1	4	1	2,01	1					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				360.920.400	330.490.983	30.429.417
									(DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN)									
1	4	1	2,01	6					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah penyusunan laporan capaian kinerja	9 Jenis	9 Jenis				81.122.500	52.132.601	28.989.899
									(DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN)									
1	**4**	**1**	**2,02**						**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**10.699.299.118**	**10.258.560.734**	**440.738.384**
1	4	1	2,02	1					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	63 Orang	83 Orang				10.689.299.118	10.248.997.234	440.301.884
									(DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN)									
1	4	1	2,02	7					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah penyusunan laporan keuangan	11 Laporan	11 Laporan				10.000.000	9.563.500	436.500
									(DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN)									
1	**4**	**1**	**2,05**						**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**26.060.000**	**26.060.000**	-

Kode Rekening				No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
1	4	1	2,05	2				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	a. Jumlah pakaian kerja lapangan b. Jumlah sosialisasi peraturan perundang undangan	a. 2 Jenis b. 1 Kali	a. 2 Jenis b. 1 Kali				26.060.000	26.060.000	-
								(DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN)									
1	**4**	**1**	**2,06**					**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**1.914.009.381**	**1.717.530.266**	**196.479.115**
1	4	1	2,06	1				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik	7 Jenis	7 Jenis				11.690.000	11.601.600	88.400
								(DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN)									
1	4	1	2,06	2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	a. Jumlah Alat Tulis Kantor b. Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	a. 4 Jenis b. 7 Jenis	a. 4 Jenis b. 7 Jenis				1.372.402.935	1.224.088.090	148.314.845
								(DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN)									
1	4	1	2,06	3				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan / Rumah Tangga	26 Jenis	26 Jenis				38.815.346	38.483.398	331.948
								(DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN)									
1	4	1	2,06	4				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Fasilitasi Penyediaan Makanan Minuman	8 Jenis	8 Jenis				126.825.000	104.662.410	22.162.590
								(DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN)									
1	4	1	2,06	5				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang dan Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	2 Rekening	2 Rekening				140.207.600	138.527.200	1.680.400
								(DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN)									
1	4	1	2,06	6				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dan Jenis Penyediaan Bahan Bacaan	4 Jenis	4 Jenis				3.000.000	3.000.000	-
								(DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN)									
1	4	1	2,06	9				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Fasilitasi Penyediaan Rapat dan Konsultasi	100%	100%				221.068.500	197.167.568	23.900.932
								(DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN)									
1	**4**	**1**	**2,07**					**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**0**	-	-
1	4	1	2,07	2				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	-	-				0	-	-
								(DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN)									
1	**4**	**1**	**2,08**					**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**2.250.175.000**	**1.895.853.563**	**354.321.437**
1	4	1	2,08	2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7 Jenis	7 Jenis				279.550.000	192.950.713	86.599.287
								(DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN)									
1	4	1	2,08	3				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Fasilitas Perbaikan Peralatan Kerja	2 Jenis	2 Jenis				48.600.000	48.582.850	17.150
								(DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN)									

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
1	4	1	2,08	4					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	a. Jumlah Jasa Administrasi Keuangan b. Jumlah Jasa Kebersihan Kantor c. Jumlah Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah d. Jumlah Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	a. 31 Orang b. 1 Jenis c. 3 Orang d. 24 Orang Kali	a. 40 Orang b. 1 Jenis c. 3 Orang d. 24 Orang Kali				1.922.025.000	1.654.320.000	267.705.000
									(DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN)									
1	**4**	**1**	**2,09**						**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**1.873.817.000**	**1.624.471.731**	**249.345.269**
1	4	1	2,09	2					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Fasilitas Pemeliharaan Kendaraan	3 Jenis	5 Jenis				267.417.000	206.640.560	60.776.440
									(DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN)									
1	4	1	2,09	9					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tolak Ukur	1 Tahun	1 Tahun				199.962.000	199.894.840	67.160
									(DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN)									
1	4	1	2,09	10					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Fasilitasi Pemeliharaan Gedung Kantor	2 Jenis	2 Jenis				1.406.438.000	1.217.936.331	188.501.669
									(DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN)									
1	**4**	**2**							**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**							**4.089.276.470**	**3.887.780.899**	**201.495.571**
1	**04**	**02**	**2**						**PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA**							**19.500.000**	**7.402.000**	**12.098.000**
1	04	02	2	1					Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				19.500.000	7.402.000	12.098.000
									(DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN)									
1	**4**	**2**	**2,02**						**Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**							**346.971.000**	**234.733.944**	**112.237.056**
1	4	2	2,02	3					Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah pengusul rumah subsidi program FLPP dan BP2PT	12 Pengembang	12 Pengembang				346.971.000	234.733.944	112.237.056
									(DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN)									
1	**4**	**2**	**2,03**						**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**							**949.579.870**	**921.762.911**	**27.816.959**
1	4	2	2,03	6					Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sederhana Sehat yang dibangun Sarana dan Prasarananya	4 Rusun	4 Rusun				949.579.870	921.762.911	27.816.959
									(UPT RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA)									

Kode Rekening				No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
1	**4**	**2**	**2,05**					**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**							**2.520.000.000**	**2.483.920.352**	**36.079.648**
1	4	2	2,05	2				Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah fasilitas kebutuhan operasional (administrasi, kebersihan, keamanan, pemeliharaan gedung, pemenuhan sarana dasar umum)	6 Lokasi 7 Rusun	6 Lokasi 7 Rusun				2.520.000.000	2.483.920.352	36.079.648
								(DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN)									
1	**4**	**2**	**2,06**					**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**							**253.225.600**	**239.961.692**	**13.263.908**
1	4	2	2,06	1				Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pengembang yang dibina	100 Pengembang	100 Pengembang				126.225.600	120.524.192	5.701.408
								(DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN)									
1	4	2	2,06	3				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah persil rumah yang dikendalikan	44 Unit	44 Unit				127.000.000	119.437.500	7.562.500
								(DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN)									
1	**4**	**3**						**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**							**25.980.356.991**	**23.240.005.400**	**2.740.351.591**
1	**4**	**3**	**2,01**					**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**							**632.656.800**	**629.607.338**	**3.049.462**
1	4	3	2,01	2				Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	-	-					0	-	-
								(DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN)									
1	4	3	2,01	3				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	18 Kecamatan	18 Kecamatan				632.656.800	629.607.338	3.049.462
								(DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN)									
1	**4**	**3**	**2,02**					**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**							**8.129.842.191**	**6.786.466.978**	**1.343.375.213**
1	4	3	2,02	1				Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Laporan pekerjaan perencanaan detail infrastruktur penataan permukiman	2 Dokumen	2 Dokumen				123.182.300	97.622.350	25.559.950
								(DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN)									
1	4	3	2,02	2				Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Penyusunan Rencana dan Rekomendasi Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	4 Dokumen	4 dokumen				650.000.000	583.301.181	66.698.819
								(DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN)									

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
1	4	3	2,02	3					Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Terlaksananya pembinaan Kelompok Swadaya masyarakat di Permukiman Kumuh	2 KPP	2 KPP				90.065.900	33.960.244	56.105.656
									(DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN)									
1	4	3	2,02	5					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Meningkatkan kualitas permukiman untuk menuju terwujudnya lingkungan permukiman yang layak huni	2 Kecamatan	2 Kecamatan				7.266.593.991	6.071.583.203	1.195.010.788
									(DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN)									
1	**4**	**3**	**2,03**						**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**							**17.217.858.000**	**15.823.931.084**	**1.393.926.916**
1	4	3	2,03	1					Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	a. Laporan Pemutakhiran Pendataan Rumah Tidak Layak Huni b. Lokasi Sosialisasi Usulan Rumah Tidak Layak Huni c. Penyusunan Usulan Rumah Tidak Layak Huni d. Sinkronisasi Data	a. 2 Laporan b. 1 Kecamatan c. 2 Usulan Kegiatan d. 18 Kecamatan	a. 2 Laporan b. 1 Kecamatan c. 2 Usulan Kegiatan d. 18 Kecamatan				150.000.000	142.612.634	7.387.366
									(DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN)									
1	4	3	2,03	2					Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Optimalisasi Biaya Operasional dan realisasi fisik pemugaran/rehab RTLH (GAKIN. BRS dan BSPS)	1000 BNBA	2092 BNBA				16.912.195.000	15.536.843.449	1.375.351.551
									(DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN)									
1	4	3	2,03	4					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	a. Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemugaran Permukiman Kumuh b. Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi c. Jumlah Sistem Informasi Rumah Swadaya	a. 18 Kecamatan b. 2 Buku c. 1 Sistem Informasi	a. 18 kecamatan b. 1 buku (2 buku dijadikan 1 buku) c. 1 sistem informasi				155.663.000	144.475.001	11.187.999
									(DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN)									
1	**4**	**5**							**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**							**11.514.992.228**	**8.996.112.173**	**2.518.880.055**
1	**4**	**5**	**2,01**						**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**							**11.514.992.228**	**8.996.112.173**	**2.518.880.055**
1	4	5	2,01	1					Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah dokumen DED, masterplan dan pendataan yang dilakukan	4 Dokumen	8 dokumen				823.821.000	586.307.194	237.513.806
									(DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN)									

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
1	4	5	2,01	2					Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	a. Panjang Jalan Lingkungan beserta kelengkapannya yang Terbangun b. Jumlah infrastruktur makam Terbangun c. Jumlah infrasturkur bipori terbangun (Perumahan dan Permukiman)	a. 842 Meter b. 7 Unit c. 2000 Unit	a. 4876,71 M b. 6 Unit c. 9853 Unit				10.158.949.228	7.885.973.421	2.272.975.807
									(DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN)									
1	4	5	2,01	3					Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Pengawasan dan Pengendalian PSU di Kawasan Perumahan	24 Perumahan	24 Perumahan				532.222.000	523.831.558	8.390.442
									(DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN)									
3	**2**	**1**	**7**		**3.2.1.7**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**DINAS SATUAN POLISI DAN PAMONG PRAJA**									**29.696.316.500**	**26.163.285.539**	**3.533.030.961**
7	**01**	**01**							**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketercapaian sasaran program OPD**						**20.954.336.500**	**19.867.293.399**	**1.087.043.101**
7	**01**	**01**	**2.01**						**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi OPD	100%	100%				**24.999.600**	16.877.000	**8.122.600**
7	01	01	2.01	01					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen				24.999.600	16.877.000	**8.122.600**
7	**01**	**01**	**2.02**						**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah fasilitasi administrasi keuangan OPD**	**12 Bulan**	**12 Bulan**				**14.878.647.000**	**14.638.805.274**	**239.841.726**
7	01	01	2.02	01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	125 Orang	125 Orang				14.878.647.000	14.638.805.274	239.841.726
									Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah fasilitasi administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**260 Stel**	**260 Stel**				**549.999.800**	**420.223.800**	**129.776.000**
									Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	260 Stel	260 Stel				549.999.800	420.223.800	129.776.000
7	**01**	**01**	**2.06**						**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah fasilitasi administrasi umum OPD**	**6 Jenis**	**6 Jenis**				**1.343.438.800**	**943.021.995**	**400.416.805**
7	01	01	2.06	02					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	40 Buah	40 Buah				28.199.000	25.329.300	2.869.700
7	01	01	2.06	02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Jenis	7 Jenis				547.795.000	506.081.745	41.713.255
7	01	01	2.06	04					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1550 DUS	1550 DUS				109.999.000	86.902.200	23.096.800
7	01	01	2.06	05					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	333 LEMBAR	333 LEMBAR				100.000.300	33.899.950	66.100.350

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
7	01	01	2.06	06					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 jenis	3 jenis				**13.140.000**	12.600.000	540.000
7	01	01	2.06	09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Orang	75 Orang				544.305.500	278.208.800	266.096.700
7	**01**	**01**	**2.08**						**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah fasilitasi penyediaan jasa penunjang pelayanan OPD**	**2 Jenis**	**2 Jenis**				**3.803.402.400**	**3.527.457.939**	**275.944.461**
7	01	01	2.08	02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Jenis	3 Jenis				**303.002.400**	187.657.939	115.344.461
7	01	01	2.08	04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	135 Orang	135 Orang				3.500.400.000	3.339.800.000	160.600.000
7	**01**	**01**	**2.09**						**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah fasilitasi pemeliharaan kendaraan dinas**	**1 Tahun**	**1 Tahun**				**353.848.900**	**320.907.391**	**32.941.509**
7	01	01	2.09	02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Tahun	1 Tahun				**353.848.900**	320.907.391	32.941.509
									PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**-Persentase Linmas yang dibina -Persentase Pengamanan Kegiatan Pemerintahan atau Kemasyarakatan strategis -Persentase Anggota Pamong Praja yang dibina -Presentase penyelesaian pelanggaran Perda**						8.741.980.000	6.295.992.140	2.445.987.860
									Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum**	**400 Kali**	**400 Kali**				4.082.047.600	**3.830.866.760**	**251.180.840**
									Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	240 KALI	240 KALI				1.364.999.800	1.344.802.100	20.197.700

Kode Rekening	No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
					Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	172 Kali	172 Kali				718.019.600	655.176.000	62.843.600
					Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1261 Orang	1261 Orang				**1.662.924.700**	1.604.665.300	58.259.400
					Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	Samapta 32 Kali Pembinaan 4 Kali Jambore 30 Orang	Pembinaan 4 KaliJambore 30 Orang				336.103.500	226.223.360	109.880.140
					Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	**Jumlah penegaka pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, dan keindahan)**	**350 Kali**	**350 Kali**				4.195.393.600	**2.275.798.380**	**1.919.595.220**
					Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	8 KALI	8 KALI				2.537.446.100	1.328.320.430	1.209.125.670
					Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	40 Kali	40 Kali				**229.813.000**	198.872.500	30.940.500
					Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	190 Kali	190 Kali				1.428.134.500	748.605.450	679.529.050
					Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	**Jumlah pembinaan PPNS**	**2 Kali**	**2 Kali**				464.538.800	**189.327.000**	**275.211.800**

Kode Rekening				No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
								Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	2 Kali	2 Kali				464.538.800	189.327.000	275.211.800
3	**2**	**1**	**8**	**3.2.1.8**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH**									**10.029.874.575,00**	**9.537.675.103,81**	**492.199.471,19**
1	**5**	**1**						**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**6.373.867.759,00**	**6.034.168.786,81**	**339.698.972,19**
1	**5**	**1**	**2,01**					**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**				**62.962.000,00**	**61.065.800,00**	**1.896.200,00**
1	5	1	2,01	1				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	80 Dokumen	80 Dokumen				41.055.000,00	40.189.500,00	865.500,00
1	5	1	2,01	6				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan				6.755.000,00	6.338.400,00	416.600,00
1	5	1	2,01	7				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan				15.152.000,00	14.537.900,00	614.100,00
1	**5**	**1**	**2,02**					**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**				**3.409.353.000,00**	**3.285.660.990,00**	**123.692.010,00**
1	5	1	2,02	1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 orang	20 orang				3.409.353.000,00	3.285.660.990,00	123.692.010,00
1	**5**	**1**	**2,05**					**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**				**220.202.000,00**	**216.984.270,00**	**3.217.730,00**
1	5	1	2,05	2				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	55 stel	55 stel				89.681.000,00	88.863.270,00	817.730,00
1	5	1	2,05	9				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	46 orang	46 orang				130.521.000,00	128.121.000,00	2.400.000,00
1	**5**	**1**	**2,06**					**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**				**731.070.605,00**	**702.917.031,80**	**28.153.573,20**
1	5	1	2,06	1				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				23.820.000,00	23.386.110,00	433.890,00
1	5	1	2,06	2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				210.910.000,00	205.156.366,80	5.753.633,20

Kode Rekening				No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
1	5	1	2,06	3				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	1 Paket				14.000.000,00	13.853.910,00	146.090,00
1	5	1	2,06	4				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	1 Paket	1 Paket				68.046.825,00	60.212.142,00	7.834.683,00
1	5	1	2,06	5				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				48.549.880,00	45.228.525,00	3.321.355,00
1	5	1	2,06	6				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				15.660.000,00	5.350.000,00	10.310.000,00
1	5	1	2,06	9				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	1 Tahun				350.083.900,00	349.729.978,00	353.922,00
1	**5**	**1**	**2,07**					**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**100%**				**520.438.000,00**	**455.668.750,00**	**64.769.250,00**
1	5	1	2,07	2				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	7 unit	7 unit				306.938.000,00	245.242.000,00	
1	5	1	2,07	6				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin	5 unit	5 unit				213.500.000,00	210.426.750,00	3.073.250,00
1	**5**	**1**	**2,08**					**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100%**				**798.437.600,00**	**728.220.235,00**	**70.217.365,00**
1	5	1	2,08	2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Tahun	1 Tahun				152.337.600,00	92.620.235,00	59.717.365,00
1	5	1	2,08	4				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah kebutuhan jasa pelayanan umum kantor	1 Tahun	1 Tahun				646.100.000,00	635.600.000,00	10.500.000,00
1	**5**	**1**	**2,09**					**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100%**				**631.404.554,00**	**583.651.710,01**	**47.752.843,99**
1	5	1	2,09	2				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kebutuhan pemeliharaan kendaraan	1 Tahun	1 Tahun				348.365.000,00	327.365.989,00	20.999.011,00
1	5	1	2,09	6				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah kebutuhan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	1 Tahun	1 Tahun				102.334.554,00	91.750.995,00	10.583.559,00
1	5	1	2,09	9				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung/kantor yang dipelihara	1 unit	1 unit				180.705.000,00	164.534.726,01	
1	**5**	**3**						**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**							**3.656.006.816,00**	**3.503.506.317,00**	**152.500.499,00**
1	**5**	**3**	**2,01**					**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Persentase Jumlah Informasi Rawan Bencana**	**100%**	**100%**				**147.868.000,00**	**139.771.000,00**	**8.097.000,00**

Kode Rekening				No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
1	5	3	2,01	2				Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota	195 orang	195 orang				147.868.000,00	139.771.000,00	8.097.000,00
1	**5**	**3**	**2,02**					**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Persentase Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**100%**	**100%**				**1.308.383.380,00**	**1.287.678.940,00**	**20.704.440,00**
1	5	3	2,02	2				Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah aparatur dan masyarakat yang ikut pelatihan	600 orang	600 orang				717.680.000,00	717.653.600,00	26.400,00
1	5	3	2,02	3				Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah petugas posko	6 orang	6 orang				55.800.000,00	46.692.000,00	9.108.000,00
1	5	3	2,02	6				Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	1 Desa	1 Desa				77.919.600,00	77.198.100,00	721.500,00
1	5	3	2,02	7				Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	4.630 buah karung dan 150 lembar bronjong	4.630 buah karung dan 150 lembar bronjong				93.643.780,00	84.710.740,00	8.933.040,00
1	5	3	2,02	8				Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	100 orang	100 orang				83.400.000,00	82.464.000,00	936.000,00
1	5	3	2,02	9				Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah dokumen rencan kontijensi yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen				115.000.000,00	114.865.500,00	
1	5	3	2,02	10				Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Orang yang mengikuti Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	350 orang	350 orang				164.940.000,00	164.095.000,00	845.000,00
1	**5**	**3**	**2,03**					**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Persentase kecepatan penanganan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kurang dari 24 jam**	**100%**	**100%**				**1.844.155.800,00**	**1.741.107.577,00**	**103.048.223,00**
1	5	3	2,03	4				Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1 Paket	1 Paket				1.647.355.800,00	1.548.507.577,00	98.848.223,00
1	5	3	2,03	5				Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat	100 orang	100 orang				132.000.000,00	132.000.000,00	
1	5	3	2,03	6				Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah penanganan respon cepat non alam	1 Tahun	1 Tahun				64.800.000,00	60.600.000,00	4.200.000,00
1	**5**	**3**	**2,04**					**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Persentase Bencana yang difasilitasi sistem peringatan dini**	**100%**	**100%**				**355.599.636,00**	**334.948.800,00**	**20.650.836,00**
1	5	3	2,04	1				Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyusunan regulasi penanggulangan Bencana	1 Dokumen	1 Dokumen				149.999.866,00	144.621.000,00	5.378.866,00
1	5	3	2,04	2				Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti penguatan kelambagaan	50 orang	50 orang				63.600.000,00	62.008.000,00	
1	5	3	2,04	3				Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah peserta kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana	100 Peserta	100 Peserta				114.399.820,00	107.139.800,00	7.260.020,00

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
1	5	3	2,04	5					Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyelanggaraan pananggulangan bencana	1 Laporan	1 Laporan				27.599.950,00	21.180.000,00	6.419.950,00
3	**2**	**1**	**8**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**									**9.772.576.100,00**	**9.501.393.338,59**	**271.252.761,41**
1	05	01				**UNSUR TRANTIBUMLINMAS**	**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		100	**95,74**				**5.433.229.800,00**	**5.201.805.058**	**231.494.742,41**
1	**05**	**01**	2,01	**1**					**PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**							**21.041.000,00**	**18.266.000,00**	**2.775.000,00**
1	**05**	**01**	2.01	01		(1)			**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	0	100	**89,75**	-	-	-	**16.041.000,00**	**14.396.000,00**	**1.645.000,00**
1	**05**	01	2.01	07		(2)			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	100	**77,40**	-	-	-	**5.000.000,00**	**3.870.000,00**	**1.130.000,00**
1	**05**	01	2.02	**2**					**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**							**3.774.243.000,00**	**3.623.663.831,00**	**150.579.169,00**
1	**05**	01	2,02	01		(3)			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0	100	**96,06**	-	-	-	**3.758.793.000,00**	**3.610.823.831,00**	**147.969.169,00**
1	**05**	01	2,02	05		(4)			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	100	**89,20**	-	-	-	**10.000.000,00**	**8.920.000,00**	**1.080.000,00**
1	**05**	01	2,02	07		(5)			Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	0	100	**71,93**	-	-	-	**5.450.000,00**	**3.920.000,00**	**1.530.000,00**
1	**05**	01	2.06	**3**					**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**							**488.937.500,00**	**471.250.099,00**	**17.687.401,00**
1	05	01	**2.06**	**01**		(6)			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	0	100	**100,00**	-	-	-	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	-
1	**05**	01	2.06	02		(7)			Penyedia Peralatan Kantor	0	100	**97,60**	-	-	-	**100.000.000,00**	**97.599.525,00**	**2.400.475,00**
1	**05**	01	2.06	03		(8)			Penyedia Peralatan Rumah Tangga	0	100	**46,27**	-	-	-	**22.000.000,00**	**10.178.500,00**	**11.821.500,00**
7	**05**	01	2.06	**04**		(9)			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0	100	**99,37**	-	-	-	**70.000.000,00**	**69.558.000,00**	**442.000,00**
1	**05**	01	2.06	**05**		(10)			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	0	100	**99,41**	-	-	-	**55.030.000,00**	**54.707.500,00**	**322.500,00**
1	**05**	01	2.06	06		(11)			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	100	**90,52**	-	-	-	**13.257.000,00**	**12.000.000,00**	**1.257.000,00**
1	**05**	01	2.06	07		(12)			Penyedia Bahan/Material	0	100	**99,88**	-	-	-	**20.000.000,00**	**19.975.504,00**	**24.496,00**
1	**05**	01	2.06	06		(13)			Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	100	**99,29**	-	-	-	**200.650.500,00**	**199.231.070,00**	**1.419.430,00**
1	**05**	01	**2.08**	**4**					**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**							**491.399.700,00**	**443.888.747,00**	**47.510.953,OO**
1	05	01	**2.08**	02		(14)			**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Litrik**	0	100	**74,55**	-	-	-	**146.399.700,00**	**109.138.747,00**	**37.260.953,00**
1	**05**	01	2.08	04		(15)			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0	100	**97,03**	-	-	-	**345.000.000,00**	**334.750.000,00**	**10.250.000,00**
1	**05**	01	2.09	**5**					**PEMELIHARAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**							**657.678.600,00**	**644.736.380,59**	**12.942.219,41**
1	**05**	01	2.09	01		(16)			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	0	100	**96,67**	-	-	-	**255.800.000,00**	**247.285.398,00**	**8.541.602,00**
1	**05**	01	**2.09**	**06**		(17)			Pemeliharaan Pelaratan dan Mesin Lainnya	0	100	**96,86**	-	-	-	**43.352.000,00**	**41.990.355,00**	**1.361.645,00**

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
1	**05**	01	2.09	11	(18)				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	100	**99,14**	-	-	-	**358.526.600,00**	**355.460.627,59**	**3.065.972,41**
1	**05**	04							PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		100	**99,08**				**4.339.346.300,00**	**4.299.588.281,00**	**39.758.019,00**
1	**05**	04	2.01	**6**					Pencegahan, Pengendalian, Pemadam, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun							**3.633.259.000,00**	**3.624.473.673,00**	**8.785.327,00**
1	**05**	**04**	**2,01**	**02**	(19)				Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	100	**99,76**	-	-	-	**3.633.259.000,00**	**3.624.473.673,00**	**8.785.327,00**
1	05	**04**	**2,02**	**7**					**Inspeksi Pelaratan Proteksi Kebakaran**							**211.249.800,00**	**185.975.704,00**	**25.274.096,00**
1	**05**	04	**2,02**	**01**	(20)				Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	0	100	**88,04**	-	-	-	**211.249.800,00**	**185.975.704,00**	**25.274.096,00**
1	**05**	**04**	**2,04**	**8**					**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**							**494.837.500,00**	**489.138.904,00**	**5.698.596,00**
1	**05**	**04**	**2,04**	01	(21)				Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan dan Penangugulaan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat.	0	100	**98,85**	-	-	-	**494.837.500,00**	**489.138.904,00**	**5.698.596,00**
3	**2**	**1**	**9**		**3.2.1.9**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	**DINAS SOSIAL**									**29.493.460.596**	**22.046.376.653**	**7.447.083.943**
1	**06**	**01**							**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketercapaian sasaran program OPD**	**100%**	**100%**				**5.438.478.944**	**5.324.208.124**	**114.270.820**
1	**06**	**01**	**2.01**						**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja**	**100%**	**100%**				**68.314.719**	**65.161.100**	**3.153.619**
1	06	01	2.01	01					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	6 dokumen	6 dokumen	-	-	-	26.221.000	25.290.500	930.500
1	06	01	2.01	06					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen	6 dokumen	6 dokumen	-	-	-	8.693.719	8.573.600	120.119
1	06	01	2.01	07					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	5 dokumen	5 dokumen	-	-	-	33.400.000	31.297.000	2.103.000
1	**06**	**01**	**2.02**						**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Fasilitasi Administrasi Keuangan ASN Dinsos**	**100%**	**100%**				**3.800.821.000**	**3.723.459.962**	**77.361.038**
1	06	01	2.02	01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	27 orang	27 orang	-	-	-	3.800.821.000	3.723.459.962	77.361.038
1	**06**	**01**	**2.06**						**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyelesaian administrasi umum**	**100%**	**100%**				**683.603.850**	**671.429.405**	**12.174.445**
1	06	01	2.06	01					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik	7 jenis	7 jenis	-	-	-	15.000.000	14.868.632	131.368
1	06	01	2.06	02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan/perlengkapan kantor	41 jenis	41 jenis	-	-	-	378.274.000	372.125.840	6.148.160
1	06	01	2.06	03					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	19 jenis	19 jenis	-	-	-	50.331.850	49.273.600	1.058.250
1	06	01	2.06	04					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makanan Minuman	6 jenis	6 jenis	-	-	-	49.998.000	46.277.803	3.720.197
1	06	01	2.06	05					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	7 jenis dan 15 buku	7 jenis dan 15 buku	-	-	-	20.000.000	19.973.150	26.850

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
1	06	01	2.06	06					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 eksemplar dan 19 buku	2 eksemplar dan 19 buku	-	-	-	5.500.000	4.681.100	818.900
1	06	01	2.06	09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas biasa dan dalam kota	86 hari	86 hari	-	-	-	164.500.000	164.229.280	270.720
1	**06**	**01**	**2.08**						**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase tercukupinya jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**100%**				**575.400.000**	**564.325.941**	**11.074.059**
1	06	01	2.08	02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening telepon, internet, air dan listrik	5 rekening	5 rekening	-	-	-	30.000.000	19.765.941	10.234.059
1	06	01	2.08	04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	26 orang	26 orang	-	-	-	545.400.000	544.560.000	840.000
1	**06**	**01**	**2.09**						**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan barang milik daerah**	**100%**	**100%**				**310.339.375**	**299.831.715,81**	**10.507.659**
1	06	01	2.09	01					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah fasilitasi pemeliharaan kendaraan	7 unit	7 unit	-	-	-	156.547.000	146.135.400	10.411.600
1	06	01	2.09	06					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan/perlengkapan kantor/rumah tangga yang terpelihara	3 jenis	3 jenis	-	-	-	29.650.000	29.645.000	5.000
1	06	01	2.09	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah fasilitasi pemeliharaan gedung	1 unit	1 unit	-	-	-	124.142.375	124.051.315,81	91.059
1	**06**	**02**							**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dibina**	**92,91%**	**123,80%**				**2.692.732.900**	**2.506.234.458**	**186.498.442**
										Persentase Data Urusan Sosial yang dimutakhirkan	**100%**	**100%**						
										Persentase Puskesos yang terbentuk	**41,09%**	**14,79%**						
1	**06**	**02**	**2,02**						**Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pengumpulan sumbangan dalam daerah**	**100%**	**100%**				**40.000.000**	**33.942.158**	**6.057.842**
1	06	02	2,02	01					Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah penerbitan izin pengumpulan sumbangan dan undian berhadiah yang dipantau	2 kali	2 kali	-	-	-	40.000.000	33.942.158	6.057.842
1	**06**	**02**	**2,03**						**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase PSKS yang terbina**	**84,93%**	**132,88%**				**2.652.732.900**	**2.472.292.300**	**180.440.600**
1	06	02	2,03	01					Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anggota PSM yang terbina	80 orang	80 orang	-	-	-	45.000.000	43.650.000	1.350.000
1	06	02	2,03	02					Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anggota TKSK yang terbina	18 orang	18 orang	-	-	-	75.000.000	70.800.000	4.200.000
1	06	02	2,03	04					Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anggota Karang Taruna yang terbina	200 orang	374 orang	-	-	-	2.467.732.900	2.292.842.300	174.890.600
										Jumlah marbot dan guru ngaji yang mendapatkan bansos	9.550 orang	8.929 orang						

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
1	06	02	2,03	05					Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga KonsultasiKesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah peserta Sosialisasi	13 orang	13 orang	-	-	-	65.000.000	65.000.000	-
1	**06**	**04**							**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi**	**0,28%**	**0,40%**				**5.935.294.520**	**5.715.442.217**	**219.852.303**
										Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	**2,24%**	**3,23%**						
1	**06**	**04**	**2.01**						**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Persentase Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar dan Lansia Terlantar yang tertangani**	**0,31%**	**0,33%**				**5.685.294.520**	**5.465.503.217**	**219.791.303**
1	06	04	2.01	03					Penyediaan Alat Bantu	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapat bantuan	25 orang	25 orang	-	-	-	149.999.850	146.127.400	3.872.450
1	06	04	2.01	05					Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah penerima bantuan janda miskin dan anak yatim	25.000 orang	24.056 orang	-	-	-	5.242.334.870	5.047.592.300	194.742.570
										Jumlah peserta Sosialisasi Kabupaten Layak Lansia	120 orang	120 orang						
										Jumlah Panti Jompo yang mendapat Bantuan Barang	1 Panti Jompo Lestari	1 Panti Jompo Lestari						
1	06	04	2.01	06					Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, AnakTerlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah peserta bimbingan	140 orang	140 orang	-	-	-	99.999.800	96.571.675	3.428.125
										Jumlah lansia produktif yang mendapat bantuan	25 orang	25 orang	-	-	-			
1	06	04	2.01	07					Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah anak yang terlayani	30 orang	45 orang	-	-	-	92.960.000	77.096.000	15.864.000
1	06	04	2.01	08					Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah pelayanan yang diberikan	60 orang	60 orang	-	-	-	50.000.000	49.983.342	16.658
1	06	04	2.01	12					Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah layanan	15 orang	35 orang	-	-	-	50.000.000	48.132.500	1.867.500
1	**06**	**04**	**2,02**						**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan KorbanHIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Persentase Rehabilitasi WTS, ODGJ dan Gepeng yang tertangani**	**0,14%**	**0,16%**				**250.000.000**	**249.939.000**	**61.000**
1	06	04	2,02	02					Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah layanan yang diberikan	96 orang	100 orang	-	-	-	75.000.000	74.959.000	41.000
1	06	04	2,02	07					Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah WTS, ODGJ, Gelandangan dan Pengemis yang mendapat bimbingan	40 orang	36 orang	-	-	-	100.000.000	99.980.000	20.000
1	06	04	2,02	13					Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah WTS, ODGJ, Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan rujukan	50 orang	83 orang	-	-	-	75.000.000	75.000.000	-

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
1	**06**	**05**							**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase Keluarga Terdaftar DTKS yang mendapatkan Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**38,72%**	**69,74%**				**14.826.954.332**	**7.976.582.404**	**6.850.371.928**
1	**06**	**05**	**2,01**						**Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**	**Persentase Panti Asuhan yang terbina**	**100%**	**100%**				**208.838.070**	**198.695.100**	**10.142.970**
1	06	05	2,01	01					Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Panti Asuhan yang mendapat hibah	2 Panti Asuhan	2 Panti Asuhan	-	-	-	208.838.070	198.695.100	10.142.970
1	**06**	**05**	**2,02**						**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin**	**95%**	**95%**				**14.618.116.262**	**7.777.887.304**	**6.840.228.958**
1	06	**05**	2,02	01					Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang mendapatkan monitoring dan evaluasi bantuan pangan	18 kecamatan	18 kecamatan	-	-	-	122.260.000	121.895.000	365.000
1	06	05	2,02	02					Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan data Fakir Miskin	95%	95%	-	-	-	322.260.000	310.738.304	11.521.696
1	06	05	2,02	03					Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah pendamping dan operator PKH yang mendapat pembinaan	170 orang	170 orang	-	-	-	14.173.596.262	7.345.254.000	6.828.342.262
1	**06**	**06**							**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana Oleh Tagana**	**85,95%**	**97,12%**				**185.000.000**	**161.777.750**	**23.222.250**
1	**06**	**06**	**2,01**						**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial**	**100%**	**100%**				**135.000.000**	**111.777.750**	**23.222.250**
1	06	06	2,01	01					Penyediaan Makanan	Jumlah penyediaan Makanan (Dapur Umum) Korban Banjir	5 kali	5 kali	-	-	-	100.000.000	85.100.000	14.900.000
1	06	06	2,01	04					Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah pemulangan Orang Terlantar dan penanganan Mr. X (Mayat tanpa Identitas)	25 orang dan 15 orang	16 orang dan 12 orang	-	-	-	35.000.000	26.677.750	8.322.250
1	**06**	**06**	**2,02**						**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**Persentase Tagana yang terbina**	**100%**	**100%**				**50.000.000**	**50.000.000**	-
1	06	06	2,02	02					Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Taruna Siaga Bencana yang diberi pembinaan	35 orang	35 orang	-	-	-	50.000.000	50.000.000	-
1	**06**	**07**							**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Persentase Taman Makam Pahlawan yang difasilitasi**	**100%**	**100%**				**414.999.900**	**362.131.700**	**52.868.200**
1	**06**	**07**	**2,01**						**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**Persentase TMP yang terpelihara**	**100%**	**100%**				**414.999.900**	**362.131.700**	**52.868.200**
1	06	07	2,01	01					Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP yang direhab	2 TMP	2 TMP	-	-	-	40.000.000	37.862.600	2.137.400
1	06	07	2,01	02					Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP yang dipelihara	11 TMP	11 TMP	-	-	-	374.999.900	324.269.100	50.730.800
										Jumlah pemuda yang mendapatkan wawasan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial	60 orang	60 orang						

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
										Jumlah Anggota LVRI dan Anggota DHC 45 yang terbina	140 orang	140 orang						
										Jumlah Penjaga Makam yang mendapat bansos	1.250 orang	1.034 orang						
3	2	2			3.2.2	PELAKSANAAN URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
3	**2**	**2**	**1**		**3.2.2.1**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENAGAKERJAAN**	**DINAS TENAGA KERJA**									**8.971.806.925**	**8.502.066.411**	**469.740.514**
2	**7**	**1**							**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketercapaian sasaran program OPD**	**100**	**100**				**6.592.616.460**	**6.362.667.537**	**229.948.923**
2	7	1	2,01						**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Jenis dokumen perencanaan dan pelaporan	3 Jenis	3 Jenis				16.950.100	14.475.500	2.474.600
2	7	1	2,01	1					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	12 Dokumen	12 Dokumen				10.950.100	10.218.500	731.600
2	7	1	2,01	6					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan				6.000.000	4.257.000	1.743.000
2	7	1	2,02						**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah waktu pemenuhan administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan				5.055.948.000	4.950.026.169	105.921.831
2	7	1	2,02	1					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/12 Bulan	32 Orang/12 Bulan				5.050.948.000	4.945.631.169	105.316.831
2	7	1	2,02	5					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30 Laporan	30 Laporan				0	0	0
2	7	1	2,02	7					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	60 Laporan	60 Laporan				5.000.000	4.395.000	605.000
2	7	1	2,06						**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah jenis penyediaan administrasi umum perangkat daerah	6 jenis sub kegiatan	6 jenis sub kegiatan				306.948.000	292.878.860	14.069.140
2	7	1	2,06	1					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	9 Jenis	9 Jenis				4.000.000	3.647.000	353.000
2	7	1	2,06	1					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							8.659.000	8.556.000	103.000
2	7	1	2,06	2					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Paket	4 Paket				85.754.000	85.185.973	568.027

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
2	7	1	2,06	2					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							17.050.000	17.003.500	46.500
2	7	1	2,06	4					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logisitik Kantor yang disediakan	12 Paket	12 Paket				71.184.000	64.211.992	6.972.008
2	7	1	2,06	5					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	7 Paket	7 Paket				20.801.000	19.801.500	999.500
2	7	1	2,06	6					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	8 Dokumen	8 Dokumen				7.500.000	3.885.000	3.615.000
2	7	1	2,06	9					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				92.000.000	90.587.895	1.412.105
2	7	1	2,08						**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	12 Bulan				747.968.360	716.794.497	31.173.863
2	7	1	2,08	1					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	12 Laporan				5.000.000	3.874.500	1.125.500
2	7	1	2,08	2					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet	12 Laporan	12 Laporan				161.918.360	148.169.997	13.748.363
2	7	1	2,08	4					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	22 Laporan	22 Laporan				581.050.000	564.750.000	16.300.000
2	7	1	2,09						**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	3 Jenis	3 Jenis				464.802.000	388.492.511	76.309.489
2	7	1	2,09	1					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	JJumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	12 Unit				114.002.000	108.752.829	5.249.171
2	7	1	2,09	6					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor	6 Jenis	6 Jenis				6.000.000	4.780.000	1.220.000
2	7	1	2,09	6					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							29.800.000	29.659.650	140.350
2	7	1	2,09	9					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	4 Unit	4 Unit				315.000.000	245.300.031,74	69.699.968
2	**7**	**2**							**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Persentase Data Sektoral Dinas Tenaga Kerja yang diakses secara elektronik**	**40**	**40**				**54.998.000**	**49.549.000**	5.449.000
										Tingkat Kematangan Layanan Ketenagakerjaan	**1**	**1**						
2	7	2	2,01						**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	Jumlah data dan informasi ketenagakerjaan	15 Dokumen	15 Dokumen				54.998.000	49.549.000	5.449.000

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
2	7	2	2,01	1					Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	15 Dokumen	15 Dokumen				54.998.000	49.549.000	5.449.000
2	**7**	**3**							**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase Pencari Kerja yang diberi pelatihan**	**37,28**	**7,56**				**1.469.908.465**	**1.336.772.700**	**133.135.765**
2	7	3	2,01						**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	Jumlah Peserta pelatihan dan pembinaan LPKS	30 LPKS, 100 orang	30 LPKS, 100 orang				1.308.090.265	1.187.693.700	120.396.565
2	7	3	2,01	1					Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	30 LPKS, 100 orang	30 LPKS, 100 orang				1.308.090.265	1.187.693.700	120.396.565
2	7	3	2,04						**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	Jumlah konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	105 perusahaan	105 perusahaan				161.818.200	149.079.000	12.739.200
2	7	3	2,04	1					Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktivitas	105 perusahaan	105 perusahaan				161.818.200	149.079.000	12.739.200
2	**7**	**4**							**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan**	**48,94**	**26,82**				**378.690.000**	**303.254.724**	**75.435.276**
2	7	4	2,01						**Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah pelayanan antar kerja	305 Orang	305 Orang				154.796.000	125.961.166	28.834.834
2	7	4	2,01	2					Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui Layanan AKAD dan AKL	270 Orang	295 Orang				91.998.000	79.703.166	12.294.834
2	7	4	2,01	5					Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang diberdayakan melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	32 Orang	32 Orang				62.798.000	46.258.000	16.540.000
2	7	4	2,03						**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	Jumlah laporan bulanan informasi pasar kerja (IPK)	65 Buku	65 Buku				50.596.000	39.340.500	11.255.500
2	7	4	2,03	2					Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam Pasar Kerja melalui Sistem Online (Karir Hub)	1.500 Orang	1.500 Orang				50.596.000	39.340.500	11.255.500
2	7	4	2,04						**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah pembinaan pelindungan bagi PMI Pra dan Purna Penempatan	105 Orang	105 Orang				173.298.000	137.953.058	35.344.942
2	7	4	2,04	1					Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetisinya	105 Orang	105 Orang				173.298.000	137.953.058	35.344.942
2	**7**	**5**							**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase Perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama**	**23,36**	**24,19**				**475.594.000**	**449.822.450**	**25.771.550**
2	7	5	2,01						**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah peserta pembinaan Persyaratan Kerja, pembinaan Struktur dan Skala Upah dan Penetapan Upah Minimum Kabupaten / UMSK	455 Orang	455 Orang				194.993.800	183.903.500	11.090.300

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
2	7	5	2,01	3					Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta pengupahan	5 Laporan	5 Laporan				194.993.800	183.903.500	11.090.300
2	7	5	2,02						**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah penanganan perselisihan hubungan industrial	100 Kasus	66 Kasus				280.600.200	265.918.950	14.681.250
2	7	5	2,02	1					Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang dicegah	100 Perkara	66 Perkara				231.362.400	222.626.950	8.735.450
2	7	5	2,02	2					Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian perselisihan hubungan industrial	100 Kasus	66 Kasus				49.237.800	43.292.000	5.945.800
3	**2**	**2**	**2**		**3.2.2.2**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN PENGENDALIAN PENDUDUK**	**DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**									**23.554.710.460**	**18.984.144.787**	**4.570.565.673**
2	**14**							**Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**18.984.144.787**	**4.570.565.673**
2	**14**	**1**							**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Program OPD yang sudah terfasilitasi**	**100%**	**100%**				**8.291.947.775**	**7.739.576.448**	**552.371.327**
2	**14**	**1**	**2**	**1**					**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja**	**5 dokumen**	**5 dokumen**				**74.608.100**	**55.970.105**	**18.637.995**
2	14	1	2	1	1				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah laporan perencanaan dan pendukung yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen				38.518.100	26.266.045	12.252.055
2	14	1	2	1	7				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja Tersusun	5 dokumen	5 dokumen				36.090.000	29.704.060	6.385.940
2	**14**	**1**	**2**	**2**					**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah bulan gaji dan Tambahan Penghasilan PNS yang terbayar**	**12 bulan**	**12 bulan**				**4.246.640.000**	**4.049.875.197**	**196.764.803**
2	14	1	2	2	1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan Tambahan Penghasilan PNS Jumlah Bulan Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS yang terbayar	26 orang 12 bulan	26 orang 12 bulan				4.246.640.000	4.049.875.197	196.764.803
2	**14**	**1**	**2**	**5**					**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah peserta pembinaan bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan**	**55 peserta**	**55 peserta**				**14.520.000**	**14.426.838**	**93.162**

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
2	14	1	2	5	11				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pembinaan bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan	55 orang	55 orang				14.520.000	14.426.838	93.162
2	**14**	**1**	**2**	**6**					**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan peralatan serta perlengkapan kantor / rumah tangga yang terpenuhi**	**30 komponen**	**30 komponen**				**726.175.444**	**703.432.650**	**22.742.794**
2	14	1	2	6	1				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik	11 jenis	11 jenis				21.342.000	21.316.150	25.850
2	14	1	2	6	2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga	10 jenis	10 jenis				276.560.744	275.765.998	794.746
2	14	1	2	6	4				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	41 jenis	41 jenis				180.456.500	169.286.350	11.170.150
2	14	1	2	6	5				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	8 jenis	8 jenis				16.066.700	11.931.150	4.135.550
2	14	1	2	6	6				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan buku peraturan perundang undang	1900 eksemplar	1900 eksemplar				10.000.000	9.720.000	280.000
2	14	1	2	6	9				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Rapat dan Konsultasi	407 kali	407 kali				221.749.500	215.413.002	6.336.498
2	**14**	**1**	**2**	**8**					**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Jasa Operasional yang tersedia**	**46 orang**	**46 orang**				**1.208.672.530**	**1.122.877.498**	**85.795.032**
2	14	1	2	8	2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa operasional kantor	3 jenis	3 jenis				106.122.530	93.077.498	13.045.032
2	14	1	2	8	4				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah petugas administrasi keuangan dan perkantoran	46 orang	46 orang				1.102.550.000	1.029.800.000	72.750.000
2	**14**	**1**	**2**	**9**					**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah fasilitas pemeliharaan yang tersedia**	**4 jenis**	**4 jenis**				**2.021.331.701**	**1.792.994.160**	**228.337.541**
2	14	1	2	9	1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah fasilitasi pemeliharaan kendaraan roda 4	4 unit	4 unit				68.796.000	50.071.177	18.724.823
2	14	1	2	9	2				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah fasilitasi pemeliharaan kendaraan roda 4	9 unit	9 unit				171.500.000	154.690.754	16.809.246
2	14	1	2	9	9				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan / gedung yang dipelihara	3 bangunan	3 bangunan				1.703.513.221	1.517.617.179	185.896.042
2	14	1	2	9	10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gendung kantor	9 jenis	9 jenis				77.522.480	70.615.050	6.907.430
2	**14**	**2**							**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Persentase Unit Pemberi Layanan yang Telah tersosialisasi Program KKBPK**	**100%**	**100%**				**162.822.865**	**128.915.501**	**33.907.364**
2	**14**	**2**	**2**	**1**					**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Jumlah Unit Pemberi Layanan Yang Sudah Tersosialisasi Program KKBPK**	**153 unit**	**153 unit**				**44.500.000**	**27.415.000**	**17.085.000**

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
2	14	2	2	1	7				Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Siswa dan Guru Sekolah Siaga Kependudukan	100 orang	100 orang				44.500.000	27.415.000	17.085.000
2	**14**	**2**	**2**	**2**					**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Data**	**1 dokumen**	**1 dokumen**				**118.322.865**	**101.500.501**	**16.822.364**
2	14	2	2	2	3				Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah buku kependudukan	49 eksemplar	49 eksemplar				30.000.000	16.772.000	13.228.000
2	14	2	2	2	11				Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah biaya cetak beresiko stunting Jumlah kegiatan	1 set 723 orang	1 set 723 orang				88.322.865	84.728.501	3.594.364
2	**14**	**3**							**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Unmet Need ber-KB**	**10,5%**	**10,08%**				**6.495.125.120**	**5.256.470.548**	**1.238.654.572**
2	**14**	**3**	**2**	**1**					**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Jumlah Balai Penyuluh yang terfasilitasi**	**18 balai penyuluh**	**18 balai penyuluh**				**1.399.382.120**	**1.211.961.473**	**187.420.647**
2	14	3	2	1	1				Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Peserta Yang Mendapat Pembinaan Jumlah Wilayah Pembinaan Kepesertaan KB	100 peserta 18 kecamatan	100 peserta 18 kecamatan				107.599.800	89.697.000	17.902.800
2	14	3	2	1	2				Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah KIE yang disediakan untuk acara momentum	1 kali	1 kali				25.000.000	-	25.000.000
2	14	3	2	1	3				Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah kampung KB yang mendapat sarana KIE Jumlah kecamatan yang terfasilitasi media KIE	53 kampung KB 18 kecamatan	53 kampung KB 18 kecamatan				146.344.320	118.870.411	27.473.909
2	14	3	2	1	4				Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Tersedianya media KIE Bangga Kencana	18 kecamatan	18 kecamatan				70.640.000	70.443.572	196.428
2	14	3	2	1	6				Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Mini Lokakarya Terselenggara	18 kecamatan	18 kecamatan				280.800.000	260.424.000	20.376.000
2	14	3	2	1	7				Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Balai Penyuluh yang terfasilitasi kegiatan operasional	18 kecamatan	18 kecamatan				728.998.000	634.858.490	94.139.510
2	14	3	2	1	8				Pengendalian Program KKBPK	Terlaksananya Audit Kasus Stunting	2 kegiatan	1 kegiatan				40.000.000	37.668.000	2.332.000
2	**14**	**3**	**2**	**2**					**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Jumlah Balai Penyuluh yang terfasilitasi**	**18 Balai Penyuluh**	**18 Balai Penyuluh**				**1.708.800.000**	**1.506.155.339**	**202.644.661**
2	14	3	2	2	4				Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah kader di desa yang terfasilitasi penggerakan Jumlah SDM Bangga Kencana yang aktif dalam kegiataan advokasi	356 desa 360 orang	356 desa 360 orang				1.708.800.000	1.506.155.339	202.644.661
2	**14**	**3**	**2**	**3**					**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah akseptor MKJP yang dilayani**	**2600 akseptor**	**2600 akseptor**				**2.472.693.000**	**1.662.755.236**	**809.937.764**

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
2	14	3	2	3	1				Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah alokon sesuai kebutuhan lapangan Jumlah faskes yang terdistribusi alokon	0 stock out 55 faskes	0 stock out 55 faskes				6.000.000	3.816.000	2.184.000
2	14	3	2	3	3				Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	jumlah akseptor terlayani	3486 akseptor	3486 akseptor				1.316.000.000	620.463.100	695.536.900
2	14	3	2	3	6				Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Balai Penyuluh yang telah dilengkapi dengan infrastruktur sistem informasi data keluarga Jumlah Balai Penyuluh yang telah dilengkapi dengan sarana prasarana pelayanan KB Jumlah PLKB yang memiliki sarana transportasi	18 unit 18 unit 18 orang	18 unit 18 unit 60 orang				1.114.693.000	1.007.361.224	107.331.776
2	14	3	2	3	8				Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah faskes yang dibina	55 faskes	55 faskes				36.000.000	31.114.912	4.885.088
2	**14**	**3**	**2**	**4**					**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Jumlah Kampung KB yang berkontribusi terhadap pembangunan di wilayahnya**	**53 Kampung KB**	**53 Kampung KB**				**914.250.000**	**875.598.500**	**38.651.500**
2	14	3	2	4	3				Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	jumlah kampung KB yang masuk dalam klasifikasi berkembang dan berkelanjutan jumlah kampung KB yang terfasilitasi kegiatan KKBPK	37 kampung KB 53 kampung KB	37 kampung KB 53 kampung KB				914.250.000	875.598.500	38.651.500
2	**14**	**4**							**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Persentase Pembina Keluarga Berencana Desa yang berstatus mandiri**	**7%**	**27,25%**				**8.604.814.700**	**5.859.182.290**	**2.745.632.410**
2	**14**	**4**	**2**	**1**					**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang difasilitasi dengan sarana, pelatihan dan orientasi teknis**	**7 unit**	**7 unit**				**8.604.814.700**	**5.859.182.290**	**2.745.632.410**

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
2	14	4	2	1	3				Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Pengelola Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang telah mengikuti Orientasi atau Pelatihan Teknis	150 orang	150 orang				40.510.000	28.175.000	12.335.000
2	14	4	2	1	4				Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Pelaksana Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang telah mengikuti Orientasi atau Pelatihan Teknis	264 orang	264 orang				71.860.000	56.856.345	15.003.655
2	14	4	2	1	5				Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Cakupan Kecamatan yang difasilitasi dengan pembinaan dan pertemuan Jumlah Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Jumlah Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD)	100 persen 356 orang 2564 orang	100 persen 356 orang 2564 orang				7.844.902.500	5.198.068.222	2.646.834.278
2	14	4	2	1	6				Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang difasilitasi dengan pendamping	551 kelompok	551 kelompok				210.641.000	178.587.363	32.053.637
2	14	4	2	1	7				Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, Pemberdayaan ekonomi Keluarga/UPPKS)	837 kelompok	837 kelompok				97.028.000	74.395.000	22.633.000
2	14	4	2	1	8				Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Pemilihan Duta Generasi Berencana Yang Terselenggara	1 kali	1 kali				339.873.200	323.100.360	16.772.840
3	**2**	**2**	**3**		**3.2.2.3**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	**DINAS PERTANIAN**									**3.040.720.000,00**	**1.615.884.504,75**	**1.424.835.495,25**
2	**09**	**02**							**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**	**Stabilitas Harga Pangan Utama**	**9,8%**	**9,58%**				**1.307.555.000,00**	**1.305.926.000,00**	**1.629.000,00**

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
2	**09**	**02**	**2.01**						**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**1) Jumlah Ketersediaan infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**2 paket**	**2 paket**				**1.307.555.000,00**	**1.305.926.000,00**	**1.629.000,00**
										2) Jumlah pertemuan terkait Ketersediaan infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**3 Pertemuan**	**2 Pertemuan**						
2	09	02	2.01	03					Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah kelompok masyarakat yang terfasilitasi pengembangan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan	2 Paket	2 Paket				1.290.000.000,00	1.288.406.000,00	1.594.000,00
2	09	02	2.01	04					Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah pertemuan penyediaan infrastruktur logistik	3 Pertemuan	2 Pertemuan				17.555.000,00	17.520.000,00	35.000,00
2	**09**	**03**							**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Kualitas konsumsi Pangan yang diindikasikan oleh skor Pola pangan harapan (PPH)**	**84**	**85**				**1.669.755.000,00**	**248.794.004,75**	**1.420.960.995,25**
2	**09**	**03**	**2.01**						**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**Jumlah Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan**	**1 Paket**	**1 Paket**				**24.755.000,00**	**24.675.400,00**	**79.600,00**
										Jumlah kelembagaan kelompok tani dan penggilingan padi yang berperan dalam jaringan distribusi dan tersedianya data pangan di Kabupaten Gresik	**1 kelompok**	**1 kelompok**						
										Jumlah Gapoktan /LUPM yang difasilitasi untuk penyediaan dan penyaluran komoditas pangan untuk kemudahan akses pangan masyarakat	**2 Gapoktan**	**2 Gapoktan**						
2	09	03	2.01	05					Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah kelembagaan kelompok tani dan penggilingan padi yang berperan dalam jaringan distribusi dan tersedianya data pangan di Kabupaten Gresik	1 Kelompok	1 Kelompok				24.755.000,00	24.675.400,00	79.600,00

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
2	**09**	**03**	**2.04**						**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**Jumlah kelompok pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal di kabupaten gresik**	**4 kelompok**	**2 kelompok**				**1.645.000.000,00**	**224.118.604,75**	**1.420.881.395,25**
2	09	03	2.04	02					Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah kelompok pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal di kabupaten gresik Jumlah Desa yang diperdayakan melalui Pekarangan Pangan Lestari (P2L)	4 kelompok	2 kelompok	karena waktu yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pekerjaan pembangunan green house			1.645.000.000,00	224.118.604,75	1.420.881.395,25
2	**09**	**04**							**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Prosentase penanganan daerah rawan pangan**	**12%**	**12%**				**35.355.000,00**	**35.209.500,00**	**145.500,00**
2	**09**	**04**	**2.01**						**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	**Jumlah Peta SKPG / FSVA**	**1 Peta**	**1 Peta**				**20.600.000,00**	**20.489.500,00**	**110.500,00**
										Jumlah Desa rentan rawan pangan yang ditangani	**3 Desa**	**3 Desa**						
2	09	04	2.01	01					Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah Peta SKPG / FSV	1 Peta	1 Peta				20.600.000,00	20.489.500,00	110.500,00
2	**09**	**04**	**2.02**						**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah daerah rentan rawan pangan yang ditangani**	**3 Daerah**	**3 Daerah**				**14.755.000,00**	**14.720.000,00**	**35.000,00**
2	09	04	2.02	01					Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah daerah rentan rawan pangan yang ditangani	3 Daerah	3 Daerah				14.755.000,00	14.720.000,00	35.000,00
2	**09**	**05**							**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase Keamanan Pangan Segar**	**80%**	**83,33%**				**28.055.000,00**	**25.955.000,00**	**2.100.000,00**
2	**09**	**05**	**2.01**						**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah sampel sertifikasi keamanan pangan segar**	-	-				28.055.000,00	25.955.000,00	2.100.000,00
										Jumlah Uji Sampel Bahan Pangan Segar Asal Tumbuhan	**3 paket**	**3 paket**						
2	09	05	2.01	05					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Uji Sampel Bahan Pangan Segar Asal Tumbuhan	3 paket	3 paket				28.055.000,00	25.955.000,00	2.100.000,00
3	**2**	**2**	**4**		**3.2.2.4**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**	**DINAS PERTANAHAN**									**63.198.301.000**	**20.987.016.295**	**42.211.284.705**
2	**10**	**04**							**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Persentase Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan untuk Aset Tanah Pemda**	**100%**	**90%**				**114.460.000,00**	**22.865.300,00**	**91.594.700,00**
2	10	04	2.01						*Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah sengketa tanah Tanah Garapan yang difasilitasi*	10 Sengketa	9 Sengketa				*114.460.000,00*	*22.865.300,00*	*91.594.700,00*

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
2	10	04	2.01	01					Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen	0 Dokumen				1.203.000,00	-	1.203.000,00
2	10	04	2.01	02					Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Konflik Pertanahan yang di Mediasi	10 Kasus	9 Kasus				113.257.000,00	22.865.300,00	90.391.700,00
2	**10**	**05**							**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Persentase bidang tanah yang dibebaskan untuk kepentingan umum**	**100%**	**18%**				**63.083.841.000,00**	**20.964.150.995,00**	**42.119.690.005,00**
2	10	05	2.01						*Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*	*Luas lahan yang dibebaskan*	2 ha	2,8135 ha				*63.083.841.000,00*	*20.964.150.995,00*	*42.119.690.005,00*
2	10	05	2.01	02					Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6 Dokumen	5 Dokumen				63.083.841.000,00	20.964.150.995,00	42.119.690.005,00
3	**2**	**2**	**5**		**3.2.2.5**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**									**40.193.223.680**	**38.786.729.138**	**1.406.494.542**
2	**11**	**`01**							**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA**	Prosentase Fasilitasi Pelayanan Program Urusan LH	**100%**	**100%**				**14.451.033.895**	**14.057.230.039**	**393.803.856**
2	**11**	**`01**	**`2.01**						**PERENCANAAN, PENGANGGARAN, & EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	Jumlah laporan dokumen	**6 jenis**	**6 jenis**				**129.928.300**	**118.524.880**	**11.403.420**
2	11	`01	`2.01	`01					**PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH**	jumlah dokumen	**3 dokumen**	**3 dokumen**				109.928.500	101.093.180	8.835.320
2	11	`01	`2.01	`06					**KOORDINASI & PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN**	jumlah laporan	**3 laporan**	**3 laporan**				19.999.800	17.431.700	2.568.100

Kode Rekening				No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
2	**11**	**`01**	**`2.02**					**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	jumlah ASN	**73 ASN**	**73 ASN**				**8.971.781.000**	**8.722.998.494**	**248.782.506**
2	11	`01	`2.02	`01				**PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN**	Jumlah ASN	**73 ASN**	**73 ASN**				8.971.781.000	8.722.998.494	248.782.506
2	**11**	**`01**	**`2.06**					**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	Jumlah fasilitas perkantor yang terpenuhi	**5 paket**	**5 paket**				**584.948.695**	**529.062.477**	**55.886.218**
2	11	`01	`2.06	`02				**PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR**	Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor	**85 jenis**	**85 jenis**				245.533.295	242.021.031	3.512.264
2	11	`01	`2.06	`05				**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	**9 jenis**	**9 jenis**				25.000.000	24.954.225	45.775
2	11	`01	`2.06	`06				**PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**	Jumlah Bahan Bacaan	**6 jenis**	**6 jenis**				11.132.500	11.071.000	615
2	11	`01	`2.06	`09				**PENYELENGGARAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI**	Jumlah perdin	**7 paket**	**7 paket**				303.282.900	251.016.221	52.266.679
2	**11**	**`01**	**`2.08**					**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	Jumlah prosentase fasilitasi pelayanan umum	**100%**	**100%**				**4.246.676.400**	**4.182.328.732**	**64.347.668**
2	11	`01	`2.08	`02				**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	Jumlah paket	**3 rekening**	**3 rekening**				178.377.400	116.238.732	62.138.668
2	11	`01	`2.08	`04				**PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR**	Jumlah paket	**7 paket**	**7 paket**				4.068.299.000	4.066.090.000	2.209.000
2	**11**	**`01**	**`2.09**					**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	Jumlah Aset terpelihara	**3 jenis**	**3 jenis**				**517.699.500**	**504.315.456**	**13.384.044**
2	11	`01	`2.09	`01				**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN**	Jumlah paket kendaraan dinas yang terpelihara	**7 paket**	**7 paket**				250.662.000	244.042.630	6.619.370
2	11	`01	`2.09	`06				**PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA**	Jumlah paket peralatan kantor yang terpelihara	**6 paket**	**6 paket**				67.037.500	62.050.000	4.987.500
2	11	`01	`2.09	`10				**PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA**	Jumlah Gedung Terpelihara	**2 lokasi**	**2 lokasi**				200.000.000	198.222.826	1.777.174
2	**11**	**`03**						**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase penurunan beban pencemaran air	**45%**	**88%**				1.218.039.860	1.195.966.561	22.073.299
									Prosentase penurunan beban pencemar udara	**45%**	94%						
2	**11**	**`03**	**`2.01**					**PENCEGAHAN PENCEMARAN & KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KAB. GRESIK**	Jumlah lokasi yang taat terhadap standart baku mutu	**17 lokasi**	**30 Lokasi**				1.113.039.860	**1.093.437.148**	**19.602.712**

Kode Rekening	No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
2 11 `03 `2.01 `01					**KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DILAKSANAKAN TERHADAP MEDIA TANAH, AIR, UDARA DAN LAUT**	**Jumlah lokasi yang terpantau**	**17 lokasi**	**30 Lokasi**				138.039.900	136.875.200	1.164.700
2 11 `03 `2.01 `02					**KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN EMISI GAS RUMAH KACA, MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM**	**Jumlah peserta pembinaan program kampung iklim KEE**	**35 Peserta**	**77 Peserta**				124.999.960	124.933.275	66.685
2 11 `03 `2.01 `03					**PENGELOLAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP KAB/KOTA**	**1. Jumlah bahan kimia 2. Jumlah peralatan terkalibrasi 3. Jumlah personel yang mendapatkan pelatihan 4. Pengadaan mobil operasional**	**1. 1 paket 2. 12 Alat 3. 11 orang 4. 1 Unit**	**1. 1 paket 2. 12 Alat 3. 11 orang 4. 1 Unit**				850.000.000	831.628.673	18.371.327
2 11 `03 `2.03					**PEMULIHAN PENCEMARAN & KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KAB/KOTA**	**Jumlah bangunan tempat khusus merokok**	**1 Unit**	**1 Unit**				**105.000.000**	**102.529.413**	**2.470.587**
2 11 `03 `2.03 `02					**KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMBERSIHAN UNSUR PENCEMAR**	**Jumlah bangunan tempat khusus merokok**	**1 Unit**	**1 Unit**				105.000.000	102.529.413	2.470.587
2 11 `04					**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	Prosentase Penambahan RTH	**1,50%**	**2,50%**				7.322.617.865	7.202.529.845	120.088.020
2 11 `04 `2.01					**PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KAB/KOTA**	Luas RTH yang terkelola	4 lokasi	4 lokasi				**7.322.617.865**	**7.202.529.845**	**120.088.020**
2 11 `04 `2.01 `04					**PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)**	**Jumlah RTH yang terkelola**	**39 taman kota 1 hutan kota 58 jalur hijau**	**39 taman kota 1 Hutan Kota 58 jalur hijau**				4.779.017.900	4.686.498.537	92.519.363
2 11 `04 `2.01 `05					**PENGELOLAAN TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI LAINNYA**	**Prosentase penanganan RTH**	**1.52 %**	**2,5%**				943.600.000	9.256.753.076	179.246.924
2 11 `04 `2.01 `07					**PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA KEANEKARAGAMAN HAYATI**	**Prosentase penanganan RTH**	**1.52 %**	**1.52 %**				1.599.999.965	1.590.356.000	9.643.965
2 11 `05					**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA & BERACUN (B3) & LIMBAH BAHAN BERBAHAYA & BERACUN (LIMBAH B3)**	Persentase Usaha dengan Potensi Menghasilkan LB3 yang Memiliki Izin Pengelolaan LB3	**40%**	**101,1%**				293.489.700	292.307.550	1.182.150
2 11 `05 `2.01					**PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3**	**Jumlah usaha yang terawasi**	**80 Pelaku**	**99 Pelaku usaha**				**293.489.700**	**292.307.550**	**1.182.150**
2 11 `05 `2.01 `01					**FASILITASI PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3 DILAKSANAKAN MELALUI SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK**	**Jumlah Rintek LB3 yang diterbitkan**	**99 Pelaku usaha**	**99 Pelaku usaha**				293.489.700	292.307.550	1.182.150

Kode Rekening	No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
2 11 `06					**PROGRAM PEMBINAAN & PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN & IZIN PERLINDUNGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase Usaha yang Memiliki Izin Lingkungan**	**45%**	**64%**				240.840.000	237.368.390	3.471.610
2 11 `06 `2.01					**PEMBINAAN & PENGAWASAN TERHADAP USAHA & KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN & IZIN PPLH DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA**	**Jumlah Dokumen Rekomendasi Lingkungan Hidup**	**160 Dokumen**	**150 dokumen**				**240.840.000**	**237.368.390**	**3.471.610**
2 11 `06 `2.01 `01					**FASILITASI PEMENUHAN KETENTUAN & KEWAJIBAN IZIN LINGKUNGAN & IZIN PPLH**	**Jumlah penilaian/pemeriksaan dokling**	**50 berkas**	**53 Berkas**				100.000.000	97.697.290	2.302.710
2 11 `06 `2.01 `03					**PENGAWASAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN HIDUP, IZIN PPLH YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**1. Jumlah lokasi terawasi 2. Jumlah pelaku usaha terawasi**	**1. 16 lokasi 2. 75 Pelaku**	**1. 16 lokasi 2. 97 Pelaku**				140.840.000	139.671.100	1.168.900
2 11 `08					**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN & PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase Peningkatan Kelompok/Lembaga/Organisasi yang Dibina dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup**	**40%**	**118%**				321.527.000	320.653.519	873.481
2 11 `08 `2.01					**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KAB/KOTA**	**Jumlah kelompok atau lembaga yang terbina**	**400 kelompok/lembaga**	**472 kelompok/lembaga**				**321.527.000**	**320.653.519**	**873.481**
2 11 `08 `2.01 `01					**PENINGKATAN KAPASITAS & KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN**	**1. Jumlah peserta Bimtek penyusunan dokumen adiwiyata tingkat nasional 2.Jumlah peserta pembinaan pengusulan penghargaan desa/kelurahan berseri 3. Jumlah peserta pembinaan pengusulan penghargaan program kalpataru tingkat nasional 4. Jumlah peserta wokrshop persiapan pengsuulan CSA tingkat Provinsi 5. Tempat sampah terpilah 6. Workshop Eco-Pesantren da Gresik BISA**	1. 100 sekolah 2. 50 desa/kelurahan 3. 20 kelompok/ masyarakat 4.100 sekolah 5. 67 buah 6. 100 peseantren dan desa	1. 75 sekolah 2. 4 desa/kelurahan 3. 5 kelompok/ masyarakat 4.91 sekolah 5. 67 buah 6. 8 peseantren dan desa				321.527.000	320.653.519	873.481
2 11 10					**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	Prosentase Kasus Lingkungan Hidup yang terselesaikan	**40%**	**3,50%**				50.000.000	49.852.000	148

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
2	**11**	**10**	**`2.01**						**PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) KAB/KOTA**	Jumlah Aduan	**30 Kasus**	**42 kasus**				**50.000.000**	**49.852.000**	**148**
2	11	10	`2.01	`01					**PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PPLH KABUPATEN / KOTA**	Jumlah kasus terselesaikan	**25 kasus**	**42 kasus**				50.000.000	49.852.000	148
2	**11**	**11**							**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Prosentase Pengurangan Sampah**	**10%**	**11,70%**				16.295.675.360	15.430.821.235	864.854.125
										Prosentase Penanangan Sampah	**52%**	**65,68%**						
										Jumlah TPS dan TPS3R yang terbangun & terkelola	**142 unit**	**125 unit**						
2	**11**	**11**	**`2.01**						**PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Prosentase Pengurangan Sampah**	**10%**	**11,70%**				**16.295.675.360**	**15.430.821.235**	**864.854.125**
										Prosentase Penanganan Sampah	**52%**	**65,68%**						
										Jumlah TPS dan TPS3R yang terbangun & terkelola	**142 unit**	**125 unit**						
										Jumlah TPA/ TPST yang terbangun dan terkelola	**1**	**1**						
										Jumlah bank sampah yang terbentuk	**301**	**231**						
2	11	11	`2.01	`03					**PENANGANAN SAMPAH DENGAN MELAKUKAN PEMILAHAN, PENGUMPULAN, PEN GANGKUTAN, PENGOLAHAN, DAN PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI TPA /TPST/SPA KABUPATEN /KOTA (BIDANG KEBERSIHAN)**	**1. Jumlah armada pengangkutan sampah 2. Jumlah petugas kebersihan**	**1. 30 kendaraan 2. 205 orang**	**1. 30 kendaraan 2. 205 orang**				6.964.000.000	6.939.629.540	24.370.460
2	11	11	`2.01	`03					**PENANGANAN SAMPAH DENGAN MELAKUKAN PEMILAHAN, PENGUMPULAN, PENGANGKUTAN, PENGOLAHAN, DAN PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI TPA/TPST/SPA KABUPATEN/KOTA (UPT TPA)**	**1. Hanggar 2. Jumlah TPA yang dikelola**	**1. 1 UNIT 2. 1 Lokasi**	**1. 1 UNIT 2. 1 Lokasi**	Tidak terlaksana kerjasama pengelolaan sampah dengan RECIKI	Pengelolaan di TPA di lakukan secara mandiri		4.881.020.750	4.346.564.535	534.456.215
2	11	11	`2.01	`04					**PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**1. Apresiasi TPS3R 2. Bank sampah 3. Bimtek standarisasi & manajemen TPS3R 4. PEDAS 5. Penguatan lembaga ASBAG 6. Zero Waste City**	**1. 5 unit 2. 301 Unit 3. 1 kali 4. 2 kali 5. 12 bulan 6. 4 lokasi**	**1. 5 unit 2. 231 Unit 3. 1 kali 4. 2 kali 5. 12 bulan 6. 4 lokasi**				294.674.000	285.741.479	8.932.521

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
2	11	11	`2.01	`05					**KOORDINASI & SINKRONISASI PENYEDIAAN SARANA & PRASARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**1. Dokumen perencanaan TPST Bawean** **2. Pengadaan kontainer Arm Roll 6m3** **3. Pengadaan Gerobak Sampah** **4. Pengadaan Mesin Pencacah organik** **5. Pengadaan tempat sampah tematik KOTAKU** **6. Penyusunan Dokumen Desain Standart TPS3R** **7. Penyusunan DED TPST/TPS3R**	**1. 1 Paket** **2. 63 unit** **3. 10 unit** **4. 1 unit** **5. 28 unit** **6. 1 paket** **7. 3 paket**	**1. 1 Paket** **2. 63 unit** **3. 10 unit** **4. 1 unit** **5. 22 unit** **6. 1 paket** **7. 3 paket**	Terjadi kenaikan harga per item unit paket pengadaan Tempat sampah tematik karena desain yang berbeda	Melakukan penyesuaian jumlah dengan pagu anggaran yang tersedia serta desain yang disepakatti		4.155.980.610	38.588.856.806	2.970.949.294
3	**2**	**2**	**6**		**3.2.2.6**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**									**10.664.176.005**	**10.021.338.016**	**642.837.989**
2	**12**	**01**							**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**10.030.234.205**	**9.447.737.450**	**582.496.755**
2	12	01	2,01						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi terhadap perencanaan dan evaluasi kinerja	100%	100%				25.019.200	24.192.500	826.700
2	12	01	2,01	01	*1*				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	5 macam	5 macam	-			12.920.200	12.680.600	239.600
2	12	01	2,01	02	*2*				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah koordinasi dg Pusat (Asistensi dan Forum Pembahasan RKA-DAK)	2 kali	2 kali	-			6.099.000	5.889.000	210.000
2	12	01	2,01	06	*3*				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan yang disusun	4 macam	4 macam	-			6.000.000	5.622.900	377.100
2	12	01	2,01						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan adm keuangan Perangkat Daerah	100%	100%				4.785.094.900	4.441.294.655	343.800.245
2	12	01	2,01	01	*4*				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	38 orang	38 orang	-			4.778.623.000	4.435.467.755	343.155.245
2	12	01	2,01	05	*5*				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Penatausahaan dan lapran keuangan tersusun	14 laporan					6.471.900	5.826.900	
2	12	01	2,01						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan adm umum Perangkat Daerah	100%	100%				2.380.531.089	2.234.082.339	146.448.750
2	12	01	2,01	02	*6*				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah alat/bahan kebersihan yang tersedia	11 macam	11 macam	-			1.590.152.500	1.491.532.055	98.620.445
										- Jumlah alat listrik yang tersedia	9 macam	9 macam						
										- Jumlah ATK yang tersedia	10 macam	10 macam						
										- Jumlah perlengkapan RT	2 macam	2 macam						
										- Jumlah cetak blangko KIA	30.000 keping	30.000 keping						
										- Jumlah cetak formulir pelayanan	13 macam	13 macam						
										- Jumlah cetak sampul KK/Akta	39.000 lembar	39.000 lembar						

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
										- Jumlah kertas HVS/blangko diadakan	600 rim	600 rim						
										- Jumlah peralatan kerja	3 macam	3 macam						
										- Jumlah tinta untuk cetak KIA	200 set	200 set						
										- Jumlah tinta untuk cetak KTP-el	130 set	130 set						
2	12	01	2,01	04	*7*				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase tersedianya mamin utk kebutuhan kantor	100%	100%	-			47.086.000	44.492.800	2.593.200
2	12	01	2,01	05	*8*				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yg tersedia	2 macam	2 macam	-			58.744.089	58.489.750	254.339
2	12	01	2,01	06	*9*				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yg tersedia	3 macam	3 macam	-			1.620.000	1.620.000	-
2	12	01	2,01	09	*10*				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya koordinasi dan konsultasi	100%	100%	-			682.928.500	637.947.734	44.980.766
										Persentase fasilitasi perjalanan dinas dalam dan luar daerah	100%	100%						
2	12	01	2,01						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan sarana prasarana kantor	100%	100%				128.590.400	116.295.559	12.294.841
2	12	01	2,01	06	*11*				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan yg diadakan	6 macam	6 macam	-			128.590.400	116.295.559	12.294.841
2	12	01	2,01						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi jasa penunjang Perangkat Daerah	100%	100%				2.360.191.616	2.315.532.068	44.659.548
2	12	01	2,01	01	*12*				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terlaksananya surat menyurat	100%	100%	-			8.073.000	5.975.920	2.097.080
2	12	01	2,01	02	*13*				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jaringan Internet	3 jar	3 jar	-			53.012.000	41.416.348	11.595.652
										- SMS Gateway	1 jar	1 jar						
										- Telepon	4 unit	4 unit						
2	12	01	2,01	04	*14*				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jml tenaga ahli yang tersedia	1 org	1 org	-			2.299.106.616	2.268.139.800	30.966.816
										- Jml Instruktur senam	1 org	1 org						
										- Jml jasa kebersihan	1 rekanan	1 rekanan						
										- Jml jasa THL	76 org	76 org						
2	12	01	2,01						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi terhadap pemeliharaan sarana prasanana penunjang Perangkat Daerah	100%	100%				350.807.000	316.340.329	34.466.671
2	12	01	2,01	02	*15*				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Jml kendaraan roda 2 yg terpelihara	3 unit	3 unit	-			101.182.000	96.427.422	4.754.578
										- Jml kendaraan roda 4 yg terpelihara	7 unit	7 unit						
2	12	01	2,01	06	*16*				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yg terpelihara	100%	100%	-			119.647.000	94.273.407	25.373.593
2	12	01	2,01	09	*17*				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung dan ruangan yg diperbaiki	1 paket	1 paket	-			129.978.000	125.639.500	4.338.500
2	**12**	**02**							**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**							**40.009.700**	**38.833.000**	**1.176.700**

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
2	12	02	2,01						Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Perekaman KTP-el dan Kepemilikan KIA	98,26	99,47				40.009.700	38.833.000	1.176.700
2	12	02	2,01	01	*18*				Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	- Jumlah penduduk rentan yg terdata	500 org	456 org	-			9.849.800	9.839.000	10.800
										- Jumlah penduduk yg mutasi	20.000 org	24.039 org						
										- Jumlah penerbitan kartu pddk non permanen	500 buah	202 buah						
2	12	02	2,01	02	*19*				Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	- Jumlah cetak KTP-el	40.000 keping	73.341 keping	-			30.159.900	28.994.000	1.165.900
										- Jumlah KIA terbit	40.000 keping	66.138 keping						
										- Jumlah KK terbit	60.000 orang	155.847 orang						
										- Jumlah KTP OA / SKTT terbit	80 orang	333 orang						
										- Jumlah perekaman KTP-el	30.000 orang	24.194 orang						
2	**12**	**03**							**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**							**44.999.800**	**44.499.800**	**500.000**
2	12	03	2,01						Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase penerbitan Akta Kelahiran dan Akta Kematian per-tahun	95,59	98,2				44.999.800	44.499.800	500.000
2	12	03	2,01	01	*20*				Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah kutipan Akta Kelahiran yg terbit	30.500 kutipan	31.858 kutipan	-			30.000.000	29.500.000	500.000
										Jumlah kutipan Akta Kematian yg terbit	8000 kutipan	20.942 kutipan						
2	12	03	2,01	02	*21*				Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah kutipan Akta perkawinan Non Muslim yg terbit	85 kutipan	153 kutipan	-			14.999.800	14.999.800	-
2	**12**	**04**							**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**							**472.280.000**	**424.992.466**	**47.287.534**
2	12	04	2,01						Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase layanan Bertandarisasi ISO	100%	100%				156.245.600	138.460.766	17.784.834
2	12	04	2,01	01	*22*				Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Tersedia biaya operasional website	1 tahun	1 tahun	-			9.999.900	5.673.900	4.326.000
2	12	04	2,01	02	*23*				Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah instansi yg memanfaatkan data kependudukan	32 unit	94 unit	-			31.245.700	20.616.150	10.629.550
2	12	04	2,01	03	*24*				Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah arsip Akta Kelahiran yang dialihmedia	70.000 data	85.753 data	-			115.000.000	112.170.716	2.829.284
										Jumlah fasilitasi pemeliharaan arsip	12 bulan	12 bulan						
2	12	04	2,01						Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase fasilitasi terhadap pelayanan Administrasi Kependudukan	100%	100%				74.999.900	74.037.900	962.000
2	12	04	2,01	03	*25*				Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Fasilitasi pelayanan JemBol, dll	100%	100%				15.160.000	15.125.000	35.000
										Jasa internet (zoom meeting & paket data) utk pelayanan	12 bulan	12 bulan						
										Fasilitasi koord dan konsultasi	100%	100%						
2	12	04	2,01	08	*26*				Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah aplikasi yg disusun/dibuat	2 paket	2 paket	-			59.839.900	58.912.900	927.000
										Jumlah jaringan SIAK yg dipelihara	19 tempat	17 tempat						
										Jumlah perangkat penyimpanan data digital yg diadakan	1 unit	1 unit						

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
2	12	04	2,01						Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase layanan yang ber-SPP	100%	100%				241.034.500	212.493.800	28.540.700
2	12	04	2,01	01	*27*				Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya kegiatan Sertifikasi ISO	1 paket	1 paket	-			80.737.000	72.984.000	7.753.000
										Terlaksananya kegiatan Survey SKM	1 paket	1 paket						
2	12	04	2,01	03	*28*				Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah petugas desa / kelurahan yg dibintek	356 org	356 org	-			160.297.500	139.509.800	20.787.700
2	**12**	**05**							**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**							**76.652.300**	**65.275.300**	**11.377.000**
2	12	05	2,01						Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase penurunan data ganda, anomali, dan non aktif	55,39%	59,46%				76.652.300	65.275.300	11.377.000
2	12	05	2,01	01	*29*				Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Persentase penurunan data ganda, anomali, dan non aktif	25.000 data	45.437 data	-			35.687.800	24.884.800	10.803.000
2	12	05	2,01	02	*30*				Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah data kependudukan yang tersusun	1 macam	1 macam	-			40.964.500	40.390.500	574.000
3	**2**	**2**	**7**		**3.2.2.7**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**									**17.802.659.800**	**16.042.269.882**	**1.760.389.918**
2	**13**	**01**							**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketercapaian sasaran program OPD**	**100%**	**100%**				**5.499.099.000**	**5.339.051.617**	**160.047.383**
2	**13**	**01**	**2.01**						**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan**	**3 Dokumen**	**3 Dokumen**				**38.132.800**	**37.174.300**	**958.500**
2	13	01	2.01	01	1			- Perbup Gresik Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kab. Gresik TA. 2022 - Perbup Gresik Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran PAPBD TA. 2022 - Perda Kab. Gresik Nomor 4 Tahun 2022 tentang PAPBD TA. 2022	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Buku	8 Buku				13.800.000	13.280.000	520.000

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
2	13	01	2.01	06	2			- Perbup Gresik Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kab. Gresik TA. 2022 - Perbup Gresik Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran PAPBD TA. 2022 - Perda Kab. Gresik Nomor 4 Tahun 2022 tentang PAPBD TA. 2022	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Buku	20 Buku				9.400.000	9.624.000 -	224.000
2	13	01	2.01	07	3			- Perbup Gresik Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kab. Gresik TA. 2022 - Perbup Gresik Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran PAPBD TA. 2022 - Perda Kab. Gresik Nomor 4 Tahun 2022 tentang PAPBD TA. 2022	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Buku	5 Buku				14.932.800	14.270.300	662.500
2	**13**	**01**	**2.02**						**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Pegawai penerima gaji dan tunjangan**	**35 Org**	**35 Org**				**4.474.990.175**	**4.334.053.957**	**140.936.218**
2	13	01	2.02	01	4			- Perbup Gresik Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kab. Gresik TA. 2022 - Perbup Gresik Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran PAPBD TA. 2022 - Perda Kab. Gresik Nomor 4 Tahun 2022 tentang PAPBD TA. 2022	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	35 Org	35 Org				4.474.990.175	4.334.053.957	140.936.218
2	**13**	**01**	**2.06**						**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**- Jumlah Peralatan dan peralatan kantor yang tersedia - Jumlah bahan logistik yang tersedia - Jumlah perjalanan dinas yg dilaksanakan**	**- 35 Jenis - 5 Jenis - 85 PerDin**	**- 35 Jenis - 5 Jenis - 85 PerDin**				**428.226.025**	**418.579.290**	**9.646.735**

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
2	13	01	2.06	02	5			- Perbup Gresik Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kab. Gresik TA. 2022 - Perbup Gresik Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran PAPBD TA. 2022 - Perda Kab. Gresik Nomor 4 Tahun 2022 tentang PAPBD TA. 2022	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	30 Jenis	30 Jenis				218.369.225	211.794.000	6.575.225
2	13	01	2.06	04	6			- Perbup Gresik Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kab. Gresik TA. 2022 - Perbup Gresik Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran PAPBD TA. 2022 - Perda Kab. Gresik Nomor 4 Tahun 2022 tentang PAPBD TA. 2022	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor	6 Jenis	6 Jenis				32.645.000	31.521.040	1.123.960
2	13	01	2.06	05	7			- Perbup Gresik Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kab. Gresik TA. 2022 - Perbup Gresik Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran PAPBD TA. 2022 - Perda Kab. Gresik Nomor 4 Tahun 2022 tentang PAPBD TA. 2022	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	11 Jenis	11 Jenis				15.064.800	15.064.800	-

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
2	13	01	2.06	06	8			- Perbup Gresik Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kab. Gresik TA. 2022 - Perbup Gresik Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran PAPBD TA. 2022 - Perda Kab. Gresik Nomor 4 Tahun 2022 tentang PAPBD TA. 2022	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan	7 Jenis	7 Jenis				4.380.000	4.380.000	-
2	13	01	2.06	08	9			- Perbup Gresik Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kab. Gresik TA. 2022 - Perbup Gresik Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran PAPBD TA. 2022 - Perda Kab. Gresik Nomor 4 Tahun 2022 tentang PAPBD TA. 2022	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu	10 Kali	10 Kali				6.780.000	6.095.000	685.000
2	13	01	2.06	09	10			- Perbup Gresik Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kab. Gresik TA. 2022 - Perbup Gresik Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran PAPBD TA. 2022 - Perda Kab. Gresik Nomor 4 Tahun 2022 tentang PAPBD TA. 2022	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Koordinasi Pelaksanaan Tugas antara Pusat, Provinsi dengan Daerah	80 PerDin	80 PerDin				90.987.000	90.616.950	370.050

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
2	13	01	2.06	011	11			- Perbup Gresik Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kab. Gresik TA. 2022 - Perbup Gresik Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran PAPBD TA. 2022 - Perda Kab. Gresik Nomor 4 Tahun 2022 tentang PAPBD TA. 2022	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Website yang dikelola	1 Paket	1 Paket				60.000.000	59.107.500	892.500
2	**13**	**01**	**2.08**						**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**15 Org**	**15 Org**				**392.400.000**	**392.400.000**	**-**
2	13	01	2.08	04	12			- Perbup Gresik Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kab. Gresik TA. 2022 - Perbup Gresik Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran PAPBD TA. 2022 - Perda Kab. Gresik Nomor 4 Tahun 2022 tentang PAPBD TA. 2022	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis jasa pelayanan umum kantor	15 Org	15 Org				392.400.000	392.400.000	-
2	**13**	**01**	**2.09**						**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah**	**3 Jenis**	**3 Jenis**				**165.350.000**	**156.844.070**	**8.505.930**
2	13	01	2.09	01	13			- Perbup Gresik Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kab. Gresik TA. 2022 - Perbup Gresik Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran PAPBD TA. 2022 - Perda Kab. Gresik Nomor 4 Tahun 2022 tentang PAPBD TA. 2022	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	7 Unit	7 Unit				144.880.000	136.374.070	8.505.930

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
2	13	01	2.09	011	14			- Perbup Gresik Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kab. Gresik TA. 2022 - Perbup Gresik Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran PAPBD TA. 2022 - Perda Kab. Gresik Nomor 4 Tahun 2022 tentang PAPBD TA. 2022	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan sarpras pendukung gedung	20 Unit	20 Unit				20.470.000	20.470.000	-
2	**13**	**02**							**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Persentase Infrastruktur Pelayanan Publik Desa dalam Kondisi Baik**	**17,03%**	**33,27%**				**600.000.000**	**582.938.125**	**17.061.875**
2	**13**	**02**	**2.01**						**Penyelenggaraan Penataan Desa**	**Jumlah Infrastruktur Desa yang difasilitasi**	**18 Titik**	**18 Titik**				**600.000.000**	**582.938.125**	**17.061.875**
2	13	02	2.01	06	15			- UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia - Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Nomor : Skep/569/V/1990 tentang Pola Dasar Konkritisasi Kemanunggalan TNI ABRI-Rakyat dan Pola Operasional TNI ABRI Masuk Desa	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah desa yang menjadi lokasi TMMD	18 Titik	18 Titik				600.000.000	582.938.125	17.061.875
2	**13**	**03**							**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**	**Persentase Desa yang melaksanakan Kerjasama**	**4,24%**	**5,76%**				**106.610.000**	**106.101.550**	**508.450**
2	**13**	**03**	**2.01**						**Fasilitasi Kerja sama antar Desa**	**Jumlah Desa yang melakukan kerjasama**	**15 Desa**	**19 Desa**				**106.610.000**	**106.101.550**	**508.450**
2	13	3	2.01	03	16			Permendesa Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah desa yang menjadi kawasan perdesaan	15 Desa	19 Desa				106.610.000	106.101.550	508.450

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
2	**13**	**04**							**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**- Persentase Aparatur Desa dan BPD yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tata kelola pemerintahan desa - Persentase badan usaha milik desa (Bumdes) dan badan usaha bersama milik desa (Bumades) dengan status Maju - Persentase Desa Cepat Berkembang - Persentase Desa pengelolaan aset desa - Persentase desa dengan perencanaan pembangunan desa**	**- 60,61% - 19,4% - 58,17% - 70% - 65%**	**- 72,36% - 26,36% - 90,91% - 100% - 100%**				**10.100.155.000**	**8.557.282.542**	**1.542.872.458**
2	**13**	**04**	**2.01**					- UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa - PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**- Jumlah aparatur desa dan anggota BPD yang mengikuti pelatihan - Tercapainya jumlah bumdes dengan kategori maju - Jumlah desa cepat berkembang - Jumlah desa yang menggunakan aplikasi SIPADES - Tercapainya jumlah desa yang merencanakan pembangunan**	**- 3.572 Org - 64 BUMDes - 192 Desa - 231 Desa - 215 Desa**	**- 4.265 Org - 87 BUMDes - 300 Desa - 330 Desa - 330 Desa**				**10.100.155.000**	**8.557.282.542**	**1.542.872.458**
2	13	04	2.01	01	17			Permendagri Nomor No. 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah perangkat desa yang mengikuti sosialisasi	348 Org	348 Org				8.410.100.000	7.074.072.500	1.336.027.500
2	13	04	2.01	02	18			Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah perangkat desa yang mengikuti sosialisasi	348 Org	348 Org				82.250.000	65.438.500	16.811.500
2	13	04	2.01	03	19			Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang mengikuti pendampingan penyusunan perencanaan desa	330 Org	330 Org				76.310.000	63.390.000	12.920.000
2	13	04	2.01	04	20			Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah operator yang mengikuti BIMTEK SISKEUDES	348 Org	348 Org				145.000.000	137.992.630	7.007.370

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
2	13	04	2.01	08	21			- Perda Kab. Gresik Nomor 3 Tahun 2017 tentang BUMDes - PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes - Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa BUMDes/BUMDesMa	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah BUMDesa dan pasar desa yang sehat, mandiri dan maju	330 Desa	330 Desa				365.264.000	344.309.501	20.954.499
2	13	04	2.01	010	22			Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	75 Desa	75 Desa				610.051.000	519.077.461	90.973.539
2	13	04	2.01	011	23			Permendagri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Pemutakhiran Data Profil Desa	356 Desa/Kel	356 Desa/Kel				85.880.000	68.480.800	17.399.200
2	13	04	2.01	013	24			- Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa - Perbup Gresik Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Desa yang menggunakan aplikasi SIPADES	200 Desa	200 Desa				148.600.000	122.488.650	26.111.350
2	13	04	2.01	018	25			Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Evaluasi desa berhasil	330 Desa	330 Desa				176.700.000	162.032.500	14.667.500
2	**13**	**05**							**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang difasilitasi**	**34,74%**	**34,74%**				**1.496.795.800**	**1.456.896.048**	**39.899.752**

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
2	**13**	**05**	**2.01**						**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan**	**4 Lembaga**	**4 Lembaga**				**1.496.795.800**	**1.456.896.048**	**39.899.752**
2	13	05	2.01	03	26			- Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa - Perda Kab. Gresik Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan - Perda Kab. Gresik Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang difasilitasi	300 Org	300 Org				173.820.000	162.572.850	11.247.150
2	13	05	2.01	05	27			- Perpres Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBD TA. 2022 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa - Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	330 Desa	330 Desa				212.800.000	211.369.000	1.431.000
2	13	05	2.01	06	28			- UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (DICABUT) - UU Nomor 17 Tahun 2019 (PENGGANTI) - Permendesa PDTT Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan TTG dalam Pengelolaan SDA Desa	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah KP-SPAMS yang dilatih	300 Org	300 Org				110.175.900	104.150.750	6.025.150

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
2	13	05	2.01	09	29			- Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang LKD dan Lembaga Adat - Permendagri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga - Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah PKK yang difasilitasi	375 PKK	375 PKK				999.999.900	978.803.448	21.196.452
3	**2**	**2**	**8**		**3.2.2.8**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**									**5.325.589.748**	**4.186.253.286**	**1.139.336.462**
2	**8**	**2**								**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase Usulan Perempuan yang Telah Diakomodasi dalam Musrenbang, Musrenbangdes dan Forum OPD**	**15%**	**Data menyusul**			**902.063.562,00**	**764.192.482,00**	**137.871.080,00**
2	**8**	**2**	**2**	**1**						**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah OPD yang telah melakukan ARG pada minimal 30% Anggarannya**	**10 OPD**	**Data menyusul**			**220.868.808,00**	**166.686.938,00**	**54.181.870,00**
2	8	2	2	1	3					Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Desa yang mendapat pendampingan PUG dan PPRG Jumlah Dokumen ARG Jumlah Kegiatan Evaluasi PUG Jumlah OPD yang mendapat pendampingan PUG dan PPRG Jumlah Peserta Musrenbang Perempuan Jumlah Ponpes yang mendapatkan sosialisasi kesetaraan gender	17 desa 47 dokumen 2 kali 55 OPD 80 orang 30 ponpes	17 desa 47 dokumen 2 kali 55 OPD 80 orang 30 ponpes			220.868.808,00	166.686.938,00	54.181.870,00

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
2	**8**	**2**	**2**	**2**						**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Desa Yang Telah Memfasilitasi Kegiatan Kelompok Perempuan dalam APBDes**	**17 Desa**	**Data menyusul**			**283.700.950,00**	**231.430.460,00**	**52.270.490,00**
2	8	2	2	2	1					Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah FGD dengan DPRD Jumlah MOU dengan Lembaga Masyarakat	3 kali 1 MoU	3 kali 1 MoU			61.717.300,00	48.151.500,00	13.565.800,00
2	8	2	2	2	2					Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Desa yang melaksanakan Pembelajaran sekolah perempuan Jumlah Pertemuan Evaluasi Sekolah Perempuan yang terselenggara Jumlah Peserta Pembelajaran Sekolah Perempuan	8 desa 2 kali 272 orang	8 desa 2 kali 272 orang			221.983.650,00	183.278.960,00	38.704.690,00
2	**8**	**2**	**2**	**3**						**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Lembaga / kelompok masyarakat yang difasilitasi**	**10 lembaga**	**10 lembaga**			**397.493.804,00**	**366.075.084,00**	**31.418.720,00**
2	8	2	2	3	2					Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Dharma Wanita Persatuan Jumlah Kegiatan Dharma Wanita Persatuan Pelatihan Wirausaha Jumlah Kegiatan PUSPA Jumlah Kegiatan Seminar GOW	5 kali 3 kali 5 kali 5 kali	5 kali 3 kali 5 kali 5 kali			397.493.804,00	366.075.084,00	31.418.720,00
2	**8**	**3**								**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Berhasil Diselesaikan**	**96%**	**87,5%**			**654.612.302,00**	**530.788.070,00**	**123.824.232,00**
2	**8**	**3**	**2**	**1**						**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah OPD yang telah berkoordinasi dan melakukan sinkronisasi dalam melakukan pencegahan kekerasan**	**30 OPD**	**30 OPD**			**12.227.199,00**	**10.227.199,00**	**2.000.000,00**
2	8	3	2	1	1					Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	3 kali	1 kali			12.227.199,00	10.227.199,00	2.000.000,00

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
2	**8**	**3**	**2**	**2**						**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Berhasil diselesaikan**	**115 kasus**	**70 kasus**	**Ada kasus yang masih dalam proses di Kepolisian, Pengadilan dan Mediasi serta dalam pendampingan Medicolegal**		**380.640.103,00**	**342.114.085,00**	**38.526.018,00**
2	8	3	2	2	1					Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pendampingan Yang dilaksanakan Jumlah Pendamping Full Time	500 kali 8 orang	500 kali 8 orang			352.273.000,00	328.596.003,00	23.676.997,00
2	8	3	2	2	2					Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pendampingan Yang Dilaksanakan	156 pendam pingan	156 pendam pingan			28.367.103,00	13.518.082,00	14.849.021,00
2	**8**	**3**	**2**	**3**						**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Lembaga / kelompok masyarakat yang difasilitasi**	**10 lembaga**	**10 lembaga**			**261.745.000,00**	**178.446.786,00**	**83.298.214,00**
2	8	3	2	3	2					Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga (selain Rumah Curhat) yang mendapat fasilitasi dan Peningkatan Kapasitas Jumlah Pendamping Fulltimer dan Relawan yang Mendapat Peningkatan Kapasitas Jumlah Rumah Curhat Desa yang Mendapat fasilitasi dan Peningkatan Kapasitas Jumlah Rumah Curhat Kabupaten yang mendapat fasilitasi dan Peningkatan Kapasitas Jumlah Rumah Curhat Kecamatan yang Mendapat	10 lembaga 15 orang 25 unit 1 unit 18 unit	10 lembaga 15 orang 25 unit 1 unit 18 unit			146.852.000,00	140.242.740,00	6.609.260,00
2	8	3	2	3	3					Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dampingan yang Kebutuhan Layanan Medicolegalnya dilayani Jumlah Petugas Jaga Shelter Kapasitas Penyediaan Layanan Fullboard bagi Dampingan	100 orang 5 orang 200 orang/hari	100 orang 5 orang 200 orang/hari			114.893.000,00	38.204.046,00	76.688.954,00

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
2	**8**	**4**								**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Persentase sasaran yang pendapatannya meningkat dari tahun sebelumnya**	**10%**	**12,50%**			**2.999.907.070,00**	**2.270.755.673,00**	**729.151.397,00**
2	**8**	**4**	**2**	**1**						**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah keluarga sasaran yang pendapatannya diatas garis kemiskinan**	**10 keluarga**	**20 keluarga**			**2.999.907.070,00**	**2.270.755.673,00**	**729.151.397,00**
2	8	4	2	1						Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Yang Mendapatkan Program Bunda Puspa Jumlah konsep kegiatan yang disahkan Jumlah Penyimpanan dan Pengolahan data elektronik yang siap digunakan Jumlah Perempuan Pengusaha Yang Mendapat Pendampingan Jumlah SOP terbentuk	17 desa 1 konsep 1 penyimpanan 340 pengusaha 1 dokumen	17 desa 1 konsep 1 penyimpanan 340 pengusaha 1 dokumen			2.999.907.070,00	2.270.755.673,00	729.151.397,00
2	**8**	**5**								**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Persentase Ketersediaan Data Gender dan Anak mengacu pada indikator PermenPPPA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Data Gender dan Anak**	**50%**	**79,84%**			**19.500.000,00**	**17.785.128,00**	**1.714.872,00**
2	**8**	**5**	**2**	**1**						**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah data yang tersedia**	**2 variabel**	**2 variabel**			**19.500.000,00**	**17.785.128,00**	**1.714.872,00**
2	8	5	2	1	2					Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Diseminasi Data Jumlah Dokumen	1 kali 1 dokumen	1 kali 1 dokumen			19.500.000,00	17.785.128,00	1.714.872,00
2	**8**	**6**								**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Nilai Klaster Kelembagaan pada Penilaian Mandiri Kabupaten Layak Anak**	**120%**	**111,50%**			**393.845.518,00**	**289.196.643,76**	**104.648.874,24**
2	**8**	**6**	**2**	**1**						**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Indikator KLA yang telah ditindaklanjuti oleh OPD/ Perusahaan / Lembaga Masyarakat**	**5 indikator**	**5 indikator**			**119.970.000,00**	**92.853.298,00**	**27.116.702,00**

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
2	8	6	2	1	1					Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Eselon III yang telah mengikuti Pelatihan PUHA Jumlah Eselon II yang telah mengikuti Pelatihan PUHA Jumlah Jurnalist yang telah mengikuti Pelatihan Pemberitaan Ramah Anak Jumlah Pertemuan Rutin Forum Anak Jumlah Perusahaan yang telah menginisiasi Perusahaan Sahabat Anak	10 persen 100 persen 25 orang 6 kali 3 perusahaan	10 persen 100 persen 25 orang 6 kali 3 perusahaan			74.120.000,00	55.327.498,00	18.792.502,00
2	8	6	2	1	2					Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pertemuan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak	4 kali pertahun	4 kali pertahun			45.850.000,00	37.525.800,00	8.324.200,00
2	**8**	**6**	**2**	**2**						**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Fasilitas Ramah Anak Yang Sudah Diselenggarakan**	**10%**	**10%**			**273.875.518,00**	**196.343.345,76**	**77.532.172,24**
2	8	6	2	2	1					Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Yang telah mendapatkan pelatihan Desa Layak Anak dan PATBM Jumlah Kecamatan Yang Telah Menginisiasi Kecamatan Layak Anak Jumlah Lomba Forum Anak Jumlah Pedoman Teknis Layanan Ramah Anak Yang disahkan Jumlah Pilot Project Desa PATBM Jumlah Pilot Project Pesantren Ramah Anak Jumlah Pilot Project Sekolah Ramah Anak Jumlah Regulasi Terkait Fasilitas Ramah Anak	30 desa 5 kecamatan 2 lomba 2 pedoman 10 desa 10 lembaga 10 lembaga 2 regulasi	30 desa 5 kecamatan 2 lomba 2 pedoman 10 desa 10 lembaga 10 lembaga 2 regulasi			207.074.785,00	162.457.602,00	44.617.183,00
2	8	6	2	2	3					Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Media Digital Musrenbang Khusus Anak	6 klip 1 kegiatan	6 klip 1 kegiatan			66.800.733,00	33.885.743,76	32.914.989,24

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
2	**8**	**7**								**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak Yang Berhasil Diselesaikan**	**100%**	**83,42%**			**355.661.296,00**	**313.535.289,00**	**42.126.007,00**
2	**8**	**7**	**2**	**1**						**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah OPD yang telah berkoordinasi dan melakukan sinkronisasi dalam melakukan pencegahan kekerasan**	**30 OPD**	**30 OPD**			**12.227.199,00**	**10.427.199,00**	**1.800.000,00**
2	8	7	2	1	2				Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	3 kali	1 kali			12.227.199,00	10.427.199,00	1.800.000,00
2	**8**	**7**	**2**	**2**						**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kasus Anak Dalam Situasi Khusus Yang Berhasil Diselesaikan**	**60 kasus**	**161 kasus**			**326.805.103,00**	**289.449.090,00**	**37.356.013,00**
2	8	7	2	2	1				Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dampingan yang mendapat layanan medicolegal Jumlah Pendampingan	60 anak 125 kali	192 anak 265 kali			198.678.000,00	184.665.508,00	14.012.492,00
2	8	7	2	2	2				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	99 pendam-pingan	45 pendam-pingan			28.367.103,00	12.948.182,00	15.418.921,00
2	8	7	2	2	3				Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan			99.760.000,00	91.835.400,00	7.924.600,00
2	**8**	**7**	**2**	**3**						**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi anak yang mendapatkan peningkatan kapasitas**	**1 lembaga**	**1 lembaga**			**16.628.994,00**	**13.659.000,00**	**2.969.994,00**

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
2	8	7	2	3	2					Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan KhususTingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Kapasitas bagi Sumber Daya Lembaga	1 kali	1 kali			16.628.994,00	13.659.000,00	2.969.994,00
3	**2**	**2**	**9**		**3.2.2.9**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	**DINAS PERHUBUNGAN**									**39.680.439.855**	**36.322.666.153**	**3.357.773.702**
2	**15**	**01**							**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**17.475.150.075**	**17.083.330.587**	**391.819.488**
2	**15**	**01**	**2.01**						**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**93.571.500**	**87.751.980**	**5.819.520**
2	15	01	2.01	1					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan yang tersusun (dokumen)	4	4				51.917.400	47.407.320	4.510.080
2	15	01	2.01	7					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja yang Tersusun (dokumen)	3	3				41.654.100	40.344.660	1.309.440
2	**15**	**01**	**2.02**						**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**7.449.911.000**	**7.274.710.424**	**175.200.576**
2	15	01	2.02	1					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang Menerima Gaji dan Tunjangan (orang)	57	57				7.449.911.000	7.274.710.424	175.200.576
2	**15**	**01**	**2.05**						**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**269.966.000**	**268.579.000**	**1.387.000**
2	15	01	2.05	2					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pegawai yang Difasilitasi Pakaian Dinas Beserta Atributnya (orang)	212	212				269.966.000	268.579.000	1.387.000
2	**15**	**01**	**2.06**						**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**993.568.875**	**978.462.523**	**15.106.352**
2	15	01	2.06	1					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakanr (unit)	14	14				75.000.000	74.669.650	330.350
2	15	01	2.06	2					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (unit)	14	14				216.056.875	213.081.820	2.975.055
2	15	01	2.06	3					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (unit)	13	13				82.650.000	71.948.775	10.701.225
2	15	01	2.06	4					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Fasilitas Terhadap Kebutuhan Makanan Minuman Kantor (bulan)	12	12				150.000.000	149.912.400	87.600
2	15	01	2.06	5					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Fasilitas Terhadap Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan (bulan)	12	12				137.750.000	137.147.245	602.755
2	15	01	2.06	7					Penyediaan Bahan/Material	Fasilitas Terhadap Kebutuhan ATK Kantor (bulan)	12	12				171.000.000	170.719.350	280.650
2	15	01	2.06	9					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Fasilitas Terhadap Penyelenggaraan Rapat Koordinasi (bulan)	12	12				161.112.000	160.983.283	128.717

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
2	**15**	**01**	**2.07**						**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**3.855.911.500**	**3.808.980.561**	**46.930.939**
2	15	01	2.07	9					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Dibangun (unit)	1	1				380.000.000	343.044.945	36.955.055
2	15	01	2.07	10					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	14	14				3.475.911.500	3.465.935.616	9.975.884
2	**15**	**01**	**2.08**						**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**4.384.721.200**	**4.255.103.627**	**129.617.573**
2	15	01	2.08	2					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Fasilitas Terhadap Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (bulan)	12	12				341.966.000	334.675.667	7.290.333
2	15	01	2.08	3					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Fasilitas Terhadap Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (bulan)	12	12				98.056.000	54.060.000	43.996.000
2	15	01	2.08	4					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pegawai Non ASN yang Dikontrak (orang)	118	118				3.944.699.200	3.866.367.960	78.331.240
2	**15**	**01**	**2.09**						**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**427.500.000**	**409.742.472**	**17.757.528**
2	15	01	2.09	1					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara (unit)	12	12				266.000.000	257.094.122	8.905.878
2	15	01	2.09	2					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional yang Dipelihara (unit)	12	12				142.500.000	133.648.350	8.851.650
2	15	01	2.09	6					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	1	1				19.000.000	19.000.000	-
2	**15**	**02**							**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**							**20.178.485.380**	**17.935.006.589**	**2.243.478.791**
2	**15**	**02**	**2.02**						**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**							**12.307.588.220**	**11.075.411.355**	**1.232.176.865**
2	15	02	2.02	2					Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Disediakan Jumlah Ruas Jalan yang dibangun PJU (unit)	142	142				4.539.207.000	4.504.242.924	34.964.076
2	15	02	2.02	3					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Dipelihara (unit)	31	31				108.927.400	104.781.150	4.146.250
2	15	02	2.02	4					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Dipelihara (unit)	142	142				7.659.453.820	6.466.387.281	1.193.066.539
2	**15**	**02**	**2.03**						**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**							**602.199.200**	**572.074.820**	**30.124.380**
2	15	02	2.03	3					Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Fasilitas Terminal yang Dikembangkan (unit)	2	2				303.371.300	299.403.680	3.967.620
2	15	02	2.03	4					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Fasilitas Terminal yang dipelihara (unit)	4	4				196.628.000	194.271.240	2.356.760
2	15	02	2.03	5					Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Fasilitasi Terhadap Pelaksanaan Penyelenggaraan Operasional Terminal Tipe C (bulan)	12	12				102.199.900	78.399.900	23.800.000

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
2	**15**	**02**	**2.04**						**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**							**1.097.429.400**	**947.316.770**	**150.112.630**
2	15	02	2.04	1					Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitas Parkir yang Disediakan (unit)	2	2				343.429.000	328.158.925	15.270.075
2	15	02	2.04	2					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitas Terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Parkir (bulan)	12	12				754.000.400	619.157.845	134.842.555
2	**15**	**02**	**2.05**						**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**							**462.750.000**	**459.107.510**	**3.642.490**
2	15	02	2.05	4					Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Smartcard Pengujian Kendaraan Bermotor yang Disediakan (unit)	4000	4000				223.850.000	222.500.000	1.350.000
2	15	02	2.05	7					Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor yang dipelihara (unit)	9	9				238.900.000	236.607.510	2.292.490
2	**15**	**02**	**2.06**						**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**							**3.396.170.900**	**3.233.280.930**	**162.889.970**
2	15	02	2.06	1					Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Manajemen Rekayasa Lalu Lintas yang Disusun (dokumen)	8	8				103.520.000	103.301.400	218.600
2	15	02	2.06	2					Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas yang Dipasang dan Dipelihara (jenis)	9	9				1.247.124.800	1.188.360.474	58.764.326
2	15	02	2.06	4					Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Petugas Operasional Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas yang Difasilitasi (orang)	50	50				1.998.026.200	1.911.294.056	86.732.144
2	15	02	2.06	5					Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Terhadap Kegiatan Forum Lalu Lintas dan LLAJ (kali)	50	50				47.499.900	30.325.000	17.174.900
2	**15**	**02**	**2.08**						**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**							**195.749.800**	**184.357.050**	**11.392.750**
2	15	02	2.08	4					Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Pengemudi yang Mengikuti Kegiatan Abdi Yasa Teladan (orang)	25	25				28.180.000	26.950.000	1.230.000
2	15	02	2.08	5					Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Petugas Pemantauan Manajemen Keselamatan Angkutan yang difasilitasi (orang)	12	12				167.569.800	157.407.050	10.162.750
2	**15**	**02**	**2.10**						**Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**							**283.619.900**	**190.964.900**	**92.655.000**

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
2	15	02	2.10	1					Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Layanan Trayek Angkutan Umum Yang Tersusun (Dokumen)	1	1				283.619.900	190.964.900	92.655.000
2	**15**	**02**	**2.16**						**Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**							**1.832.977.960**	**1.272.493.254**	**560.484.706**
2	15	02	2.16	3					Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi terhadap Subsidi Angkutan orang (bulan)	12	12				1.832.977.960	1.272.493.254	560.484.706
2	**15**	**03**							**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**							**1.644.217.000**	**942.397.373**	**701.819.627**
2	**15**	**03**	2.03						**Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha**							**50.000.000**	**42.940.827**	**7.059.173**
2	15	03	2.03	1					Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha (bulan)	12	12				50.000.000	42.940.827	7.059.173
2	**15**	**03**	2.06						**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota**							**100.000.000**	**80.103.150**	**19.896.850**
2	15	03	2.06	1					Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi Sistem Informasi yang tersusun (aplikasi)	2	2				100.000.000	80.103.150	19.896.850
2	**15**	**03**	2.07						**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**							**979.200.000**	**354.597.750**	**624.602.250**
2	15	03	2.07	2					Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi terhadap Petugas Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan (bulan)	12	12				979.200.000	354.597.750	624.602.250
2	**15**	**03**	2.12						**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**							**515.017.000**	**464.755.646**	**50.261.354**

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
2	**15**	**03**	2.12	2					Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan yang terbangun (unit)	1	1				336.617.000	294.206.256	42.410.744
2	15	03	2.12	3					Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Fasilitasi terhadap Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal (bulan)	12	12				178.400.000	170.549.390	7.850.610
2	**15**	**05**							**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**							**382.587.400**	**361.931.604**	**20.655.796**
2	**15**	**05**	2.02						**Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**							**382.587.400**	**361.931.604**	**20.655.796**
2	15	05	2.02	1					Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Petugas Perlintasan KA yang Difasilitasi dan Jumlah Peserta FGD Keselamatan Pengguna Jalan di Perlintasan KA yang tidak Berpalang Pintu (orang)	6	6				382.587.400	361.931.604	20.655.796
3	**2**	**2**	**10**		**3.2.2.10**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**									**14.121.993.165**	**13.773.059.884**	**348.933.281**
2.16.01									**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**	**Persentase ketercapaian sasaran program OPD**						**6.115.131.680**	**5.838.234.372**	**276.897.308**
2.16.01.2.01									**Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase capaian kinerja kegiatan perangkat daerah**						**25.371.000**	**23.262.400**	**2.108.600**
2.16.01.2.01.01									Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Renstra dan Renja yang disusun	1	1				**19.426.000**	17.393.400	2.032.600
2.16.01.2.01.06									Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan/dokumen capaian kinerja yang disusun (LKJIP,LKPJ, LPPD)	12	12				**5.945.000**	5.869.000	76.000
2.16.01.2.02									**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase capaian kinerja kegiatan perangkat daerah**						**4.176.525.000**	**4.041.517.624**	**135.007.376**
2.16.01.2.02.01									Penyediaan Gaji Dan Tunjangan	Jumlah gaji dn tunjangan ASN Diskominfo	1	1				**4.170.475.000**	4.035.507.624	134.967.376
2.16.01.2.02.05									Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	Jumlah dokumen laporan keuangan SKPD	1	1				**2.206.000**	2.166.000	40.000
2.16.01.2.02.07									Koordinasi Dan Penyiapan Laporan Keuangan Bulanan / Tribulanan/ Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran perangkat daerah	3	3				**3.844.000**	3.844.000	-
2.16.01.2.06									**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase capaian kinerja kegiatan perangkat daerah**						**707.960.100**	**654.101.669**	**53.858.431**
2.16.01.2.06.01									Penyedian Komponen Instalasi Listrik/Penerbangan Bangunan kantor	Jumlah bahan alat listrik	8	8				**17.500.000**	17.325.990	174.010
										Jumlah media converter	6	6						
2.16.01.2.06.02									Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	6	6				**346.952.500**	298.277.800	48.674.700

Kode Rekening	No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
						Jumlah bahan dan peralatan pembersih	1	1						
2.16.01.2.06.03					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							**16.353.500**	15.961.000	392.500
2.16.01.2.06.04					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman	2	2				**60.000.000**	60.000.000	-
2.16.01.2.06.05					Penyedian Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	3	3				**90.224.600**	85.840.400	4.384.200
2.16.01.2.06.06					Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah bahan bacaan	4	4				**10.000.000**	10.000.000	-
2.16.01.2.06.09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	Jumlah fasilitasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	2	2				**166.929.500**	166.696.479	233.021
2.16.01.2.07					**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase capaian kinerja kegiatan perangkat daerah**						**77.093.000**	**66.702.000**	**10.391.000**
2.16.01.2.07.05					Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel / Kursi	2	2				**77.093.000**	66.702.000	10.391.000
2.16.01.2.07.10					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-				-	-	-
2.16.01.2.08					**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase capaian kinerja kegiatan perangkat daerah**						**784.179.580**	**720.213.604**	**63.965.976**
)8.02					Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air, Listrik	Jumlah rekening biaya operasional kantor bulanan	5	5				**218.542.100**	160.457.604	58.084.496
2.16.01.2.08.03					Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	3	3				**62.837.480**	61.556.000	1.281.480
2.16.01.2.08.04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga administrasi non strata satu	6	6				**502.800.000**	498.200.000	4.600.000
						Jumlah tenaga administrasi strata satu	9	9						
						Jumlah tenaga keamanan	3	3						
						Jumlah tenaga kebersihan	1	1						
2.16.01.2.09					**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase capaian kinerja kegiatan perangkat daerah**						**344.003.000**	**332.437.075**	**11.565.925**
2.16.01.2.09.02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak Dan Perijinan Kendaran Operasional Atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	6	6				**193.868.000**	184.012.500	9.855.500
2.16.01.2.09.09					Pemeliharaan/ Rehabilitas Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan	1	1				**150.135.000**	148.424.575	1.710.425
2.16.02					**Program Informasi Dan Komunikasi Publik**	**Tingkat kematangan layanan pengaduan pelayanan publik, pertumbuhan kunjungan website**						**2.294.026.760**	**2.253.962.697**	**40.064.063**
2.16.02.2.01					**Pengelolaan informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota**	**Tingkat kematangan layanan pengaduan pelayanan publik, pertumbuhan kunjungan website**						**2.294.026.760**	**2.253.962.697**	**40.064.063**

Kode Rekening	No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
02.2.01.02					Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah rapat koordinasi fasilitasi PPID/pendampingan DIDP	3	3				**215.363.100**	209.708.110	5.654.990
						Jumlah rapat koordinasi fasilitasi pengaduan di aplikasi lapor.go.id	4	4						
						jumlah Sosialisasi/pendampingan terkait informasi publik atau pembuatan DIDP	3	3						
2.16.02.2.01.04					Pengelolaan Konten Dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah pemeilharaan website gresikkab.go.id	1	1				**57.735.000**	56.470.109	1.264.891
						Jumlah pemeilharaan website SiDesa, siklip, PPIID	1	1						
						Jumlah rapat koordinasi update data penyelenggaraan pemerintahan dengan OPD	2	2						
2.16.02.2.01.05					Pengelolaan Media Komunikasi Publik	jumlah iuran domain dan hosting suaragresik.id	1	1				**1.374.037.660**	1.347.759.978	26.277.682
						Jumlah lisensi radiobost	1	1						
						jumlah pemeliharaan pemancar radio FM	1	1						
						Pembuatan Ranperda Radio suara Gresik	1	1						
						jumlah reportase yang dilakukan	159	159						
						Jumlah peserta pelatihan broadcasting	10	10						
						Jumlah sewa internet (Mbps)	10	10						
						Jumlah Tenaga Penyiar dan TA (Jumlah Tenaga kontent kreatif untuk sosial media, video, teknisi radio)	8	8						
2.16.02.2.01.09					Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Tenaga Call Taker dan dispatch yang di rekrut	9	9				**589.847.000**	585.664.000	4.183.000
						Jumlah sewa aplikasi kedaruratan call 112	1	1						
						Jumlah sewa Backup internet (Mbps)	1	1						
						jumlah pelatihan SDM Command Centre	-	-						
2.16.02.0.01.10					Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah pelatihan untuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	2	2				**57.044.000**	54.360.500	2.683.500
2.16.02.0.01.12					penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah rekomendasi Branding Kebupaten Gresik	-	-				**-**	-	-

Kode Rekening	No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
2.16.03					**Program Aplikasi Informatika**	**tingkat kematangan layanan SPBE, Persentase Sistem Informasi yang terintegrasi, persentase layanan publik berbasis elektronik**						**5.712.834.725**	**5.680.862.815**	**31.971.910**
2.16.03.2.01.03					**Pengelolaan Nama Domain Yng Telah Di Tetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /kota**	tingkat kematangan layanan SPBE, Persentase Sistem Informasi yang terintegrasi, persentase layanan publik berbasis elektronik						**3.824.576.545**	**3.807.700.871**	**16.875.674**
2.16.03.2.01.03					Penyelenggaran Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Kecamatan dan OPD yang terlayani jaringan intranet	46	46				**3.824.576.545**	3.807.700.871	16.875.674
						Jumlah Kelurahan yang terlayani jaingan intranet	26	26						
						Jumlah pemeliharaan jalur CCTV	1	1						
						kapasitas bandwith internet	700	700						
2.16.03.2.02					**Penggelolaan E-Government Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota**	**tingkat kematangan layanan SPBE, Persentase Sistem Informasi yang terintegrasi, persentase layanan publik berbasis elektronik**						**1.888.258.180**	**1.873.161.944**	**15.096.236**
2.16.03.2.02.01					Penatalaksanaan Dan Pengawasan E-Goverment Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Kebijakan SPBE yang dievaluasi	2	2				**289.436.000**	288.498.588	937.412
						Jumlah SOP SPBE yang disusun	1	1						
						Jumlah Rapat monev SPBE	4	4						
						FGD evaluasi kebijakan SPBE	1	1						
2.16.03.2.02.02					Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk Dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah FGD evaluasi pelaksanaan Peta Rencana SPBE	3	3				**63.440.000**	62.663.750	776.250
						jumlah rapat sosialisasi arsitektur dan peta rencana SPBE	2	2						
						jumlah rapat verifikasi anggaran SPBE	3	3						
2.16.03.2.02.03					Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	jumlah tenaga ahli konfigurasi VPS yang direkrut	1	1				**450.000.000**	446.167.125	3.832.875
						Jumlah server backup yang di adakan	12	12						
						Jumlah memori server yang di adakan	12	12						
						jumlah PC yang dibeli	1	1						

Kode Rekening	No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
						Jumlah SSD clustring server yang di adakan	13	13						
						Jumlah rapat koordinasi terkait pemenfaatan ruang server oleh OPO	3	3						
2.16.03.2.02.07					Pengembangan Aplikasi Dan Proses Bisnis PemerintahBerbasis Elektronik	Jumlah aplikasi SID yang dibangun	1	1				**608.100.000**	604.396.655	3.703.345
						Jumlah aplikasi yang disewa	1	1						
						Jumlah bimtek aplikasi SID	6	6						
						Jumlah pemeliharaan aplikasi	1	1						
						Jumlah rapat pemantauan aplikasi	14	14						
						Jumlah rapat sosialisasi aplikasi	4	4						
2.16.03.2.02.08					Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah tenaga ahli programer yang di rekrut	1	1				**87.418.180**	87.303.000	115.180
						Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	2	2						
						Jumlah sosialisasi arsitektur data dan informasi	1	1						
						Jumlah perjalanan dinas terkati layanan penghubung di OPD	8	8						
2.16.03.2.02.09					Penggembangan Dan Penggelolaan Ekosistem Kabupaten / Kota Cedas Dan Kota Cerdas	jumlah data warehouse yg dibangun	1	1				**213.234.000**	211.511.901	1.722.099
						FGD Penerapan Smart City	1	1						
						koordinasi Smart City	2	2						
						Jumlah rapat evaluasi smart city	2	2						
2.16.03.2.02.10					Pengembangan Dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pemerintah Daerah	jumlah Aplikasi servisdesk yang dibangun	1	1				**176.630.000**	172.620.925	4.009.075
						jumlah FGD servisdesk	1	1						
						Jumlah rakor SPBE	-	-						
						Jumlah Pelatihan dibidang SPBE	2	2						
						jumlah rakor monev servisdesk	4	4						
3 2 2 11	**3.2.2.11**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO**	**DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGAN**									**32.807.479.470,00**	**30.099.857.686,00**	**2.707.621.784,00**
2.17.1 2 17 2.17.3. 01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100%	100%				10.945.847.620,00	10.341.200.919,00	604.646.701,00
2.17.1 2 17 2.17.3. 01					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah seluruh dokumen perencanaan dan monev	20 dokumen	20 dokumen				60.575.461,00	59.614.262,00	961.199,00

Kode Rekening	No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
2.17.I 2 17 2.17.3. 01					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen yang di cetak	18 Jenis Dokumen	18 Jenis Dokumen				30.600.000,00	30.239.387,00	360.613,00
2.17.I 2 17 2.17.3. 01					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen monev yang dicetak	175 buku	175 buku				29.975.461,00	29.374.875,00	600.586,00
2.17.I 2 17 2.17.3. 01					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah pembayaran pemenuhan administrasi keuangan dinas	86 administrasi keuangan	86 administrasi keuangan				8.116.362.000,00	7.723.458.155,00	392.903.845,00
2.17.I 2 17 2.17.3. 01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah jabatan pns yang terfasilitasi pembayaran gaji dan tunjanganya	86 orang	65 orang				8.096.362.000,00	7.703.458.155,00	392.903.845,00
2.17.I 2 17 2.17.3. 01					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah dokumen pelaporan yang dicetak	151 Buku	155 buku				20.000.000,00	20.000.000,00	-
2.17.I 2 17 2.17.3. 01					Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan	7 administrasi	7 administrasi				322.335.539,00	306.073.685,00	16.261.854,00
2.17.I 2 17 2.17.3. 01					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah pengadaan perlatan/perlengkapan kantor/rumah tangga	15 pengadaan	10 pengadan				110.747.539,00	104.597.080,00	6.150.459,00
2.17.I 2 17 2.17.3. 01					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	12 bulan				60.000.000,00	59.814.705,00	185.295,00
2.17.I 2 17 2.17.3. 01					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- jumlah penggandaan - jumlah penyediaan cetak	- 21557 lembar - 6 jenis cetak	- 12.021 lembar - 6 jenis cetakan				74.000.000,00	73.791.940,00	208.060,00
2.17.I 2 17 2.17.3. 01					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan	5 Jenis bacaan	3 jenis bacaan				11.088.000,00	10.374.000,00	714.000,00
2.17.I 2 17 2.17.3. 01					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan sovenir/talih asih dinas	47 Paket	23 paket				6.500.000,00	6.000.000,00	500.000,00
2.17.I 2 17 2.17.3. 01					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- jumlah perjalanan dinas dalam - jumlah perjalanan luar daerah	- 26 kali - 43 kali	- 34 kali - 52 kali				60.000.000,00	51.495.960,00	8.504.040,00
2.17.I 2 17 2.17.3. 01					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah jasa pelayanan yang terbayar	4 jasa pelayanana	4 jasa pelayanana				2.242.750.000,00	2.110.521.859,00	132.228.141,00
2.17.I 2 17 2.17.3. 01					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah pembayaran jasa pelayanan	10 jenis pembayaran	9 pembayaran				2.242.750.000,00	2.110.521.859,00	132.228.141,00
2.17.I 2 17 2.17.3. 01					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah pemeliharaan seluruh sarana dan prasarana dinas	62 pemeliharaan	62 pemeliharaan				203.824.620,00	141.532.958,00	62.291.662,00
2.17.I 2 17 2.17.3. 01					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah pemeliharaan kendaraan	8 kendaraan	8 kendaraan				143.479.646,00	104.553.158,00	38.926.488,00
2.17.I 2 17 2.17.3. 01					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah pemeliharaan peralatan pendukung kerja	54 Unit	60 unit				60.344.974,00	36.979.800,00	23.365.174,00
2.17.I 2 17 2.17.3. 03					PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Presentase Jumlah Koperasi aktif grade B, C1, C2 dan D menjadi Koperasi Aktif Grade A	66.35%(420 koperasi)	69.83%(442 koperasi)				138.549.000,00	103.689.000,00	**34.860.000,00**
2.17.I 2 17 2.17.3. 03					Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang diperiksa & diawasi	105 koperasi	33 Koperasi				138.549.000,00	103.689.000,00	34.860.000,00
2.17.I 2 17 2.17.3. 03					Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT	105 koperasi	415 Koperasi				138.549.000,00	103.689.000,00	34.860.000,00

Kode Rekening				No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
2.17.0	2	17	2.17.3. 04					PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase jumlah KSP/USP Kperasi yang dinilai kesehatannya	48.49%(354 kop)	33.42%(224 Koperasi)				67.810.000,00	64.500.000,00	**3.310.000,00**
2.17.0	2	17	2.17.3. 04					Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang di	40 Koperasi	150 koperasi				67.810.000,00	64.500.000,00	**3.310.000,00**
2.17.0	2	17	2.17.3. 04					Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi Sehat	40 Koperasi	20 Koperasi				32.810.000,00	30.830.000,00	**1.980.000,00**
2.17.0	2	17	2.17.3. 04					Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang m	6 Koperasi	9 Koperasi				35.000.000,00	33.670.000,00	**1.330.000,00**
2.17.0	2	17	2.17.3. 06					PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Pengurus Koperasi yang dilatih	16.18%(1180 kop)	9.52%(740 Kop)				578.456.000,00	487.277.900,00	**91.178.100,00**
2.17.0	2	17	2.17.3. 06					Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang dilatih	135 koperasi	370 Koperasi				578.456.000,00	487.277.900,00	**91.178.100,00**
2.17.0	2	17	2.17.3. 06					Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengurus yang siap mengikuti sertifikasi kompetensi	270 orang	54 Orang				578.456.000,00	487.277.900,00	**91.178.100,00**
2.17.0	2	17	2.17.3. 07					PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro	0.12%(200 Usaha Mikro)	0.47%(782 Usaha Mikro)				20.312.316.850,00	18.399.340.877,00	**1.912.975.973,00**
2.17.0	2	17	2.17.3. 07					Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha mikro ya	250 usaha mikro	400 Usaha Mikro				20.312.316.850,00	18.399.340.877,00	**1.912.975.973,00**
2.17.0	2	17	2.17.3. 07					Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yar	(1000 usaha mikro)	1000 Usaha Mikro				66.500.000,00	59.309.500,00	**7.190.500,00**
2.17.0	2	17	2.17.3. 07					Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yar	(150 usaha mikro)	180 Usaha Mikro				82.800.000,00	71.998.000,00	**10.802.000,00**
2.17.0	2	17	2.17.3. 07					Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yar	(998 usaha mikro)	782 Usaha Mikro				20.163.016.850,00	18.268.033.377,00	**1.894.983.473,00**
2.17.0	2	17	2.17.3. 08					PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pertumbuhan Usaha Mi	1.23% (2.119 usaha mikro)	2.90%(4.994 Usaha Mikro)				764.500.000,00	703.848.990,00	**60.651.010,00**
2.17.0	2	17	2.17.3. 08					Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yai	30 Usaha Mikro	220 Usaha mikro				764.500.000,00	703.848.990,00	**60.651.010,00**
2.17.0	2	17	2.17.3. 08					Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah usaha mikro yar	4.01%(70 usaha mikro)	201 Usaha Mikro				764.500.000,00	703.848.990,00	**60.651.010,00**
3	**2**	**2**	**12**	**3.2.2.12**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**									**14.492.610.495**	**12.610.338.073**	**1.882.272.422**
2	**18**	**01**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase ketercapaian sasaran kegiatan**	**90%**	**100%**				**10.574.131.337**	**9.832.800.178,51**	**741.331.158**
2	**18**	**01**	**2.01**					**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan**	**3 jenis dokumen**	**3 jenis dokumen**				**176.069.800**	**169.618.831**	**6.450.969**

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
2	18	01	2.01	01					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	84.170.200	78.248.231	5.921.969
2	18	01	2.01	06					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 jenis dokumen	2 jenis dokumen	-	-	-	91.899.600	91.370.600	529.000
2	**18**	**01**	**2.02**						**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang disediakan**	**2 dokumen**	**2 dokumen**				**7.654.041.400**	**7.075.646.871**	**578.394.529**
2	18	01	2.02	01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji ASN DPM PTSP dalam 1 tahun	12 bulan	12 bulan	-	-	-	7.635.001.000	7.058.519.504	576.481.496
2	18	01	2.02	07					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan SKPD	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	19.040.400	17.127.367	1.913.033
2	**18**	**01**	**2.05**						**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah administrasi kepagawaian perangkat daerah**	**1 paket**	**1 paket**				**198.299.000**	**176.876.000**	**21.423.000**
2	18	01	2.05	01					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	1 paket	1 paket	-	-	-	198.299.000	176.876.000	21.423.000
2	**18**	**01**	**2.06**						**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah administrasi umum perangkat daerah**	**6 sub kegiatan**	**6 sub kegiatan**				**604.876.700**	**599.477.933**	**5.398.767**
2	18	01	2.06	01					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung	150 buah	150 buah	-	-	-	15.214.400	15.000.000	214.400
2	18	01	2.06	02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	54 item	54 item	-	-	-	145.220.500	144.206.924	1.013.576
2	18	01	2.06	04					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor	3 jenis	3 jenis	-	-	-	161.590.000	161.544.561	45.439
2	18	01	2.06	05					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis bahan cetakan dan penggandaan	12 jenis	12 jenis	-	-	-	53.569.500	50.118.900	3.450.600
2	18	01	2.06	06					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan bahan peraturan perundang-undangan	5 jenis	5 jenis	-	-	-	10.032.000	9.600.000	432.000
2	18	01	2.06	09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	65 kali	65 kali	-	-	-	219.250.300	219.007.548	242.752
2	**18**	**01**	**2.08**						**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**3 jasa**	**3 jasa**				**1.339.027.000**	**1.234.606.771**	**104.420.229**
2	18	01	2.08	01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman surat menyurat	130 kali	130 kali	-	-	-	2.668.000	2.557.500	110.500
2	18	01	2.08	02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	-	-	-	338.484.000	322.644.271	15.839.729
2	18	01	2.08	04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis jasa pelayanan umum kantor	32 jenis	32 jenis	-	-	-	997.875.000	909.405.000	88.470.000
2	**18**	**01**	**2.09**						**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah**	**6 jenis**	**6 jenis**				**601.817.437**	**576.573.772,51**	**25.243.664**
2	18	01	2.09	01					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	1 kendaraan	1 kendaraan	-	-	-	88.020.000	87.324.437	695.563

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
2	18	01	2.09	02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	13 kendaraan	13 kendaraan	-	-	-	104.638.000	95.393.477	9.244.523
2	18	01	2.09	05					Pemeliharaan Mebel	Jumlah jenis pemeliharaan mebel	5 jenis	-	-	-	-	-	-	-
2	18	01	2.09	06					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	6 jenis	6 jenis	-	-	-	66.100.000	60.024.100	6.075.900
2	18	01	2.09	10					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana gedung	13 jenis	13 jenis	-	-	-	284.447.437	279.781.758,51	4.665.678
2	18	01	2.09	11					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana gedung	13 jenis	13 jenis	-	-	-	58.612.000	54.050.000	4.562.000
2	**18**	**02**							**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase Peningkatan Jumlah Investor**	**15,62%**	**117,88%**				**497.798.400**	**454.629.522**	**43.168.878**
2	**18**	**02**	**2.01**						**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah draft kebijakan dan evaluasi pemberian fasilitas**	**2 draft**	**2 draft**				**209.000.000**	**185.383.600**	**23.616.400**
2	18	02	2.01	01					Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah draf Rancangan Peraturan Tentang Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 draft	1 draft	-	-	-	102.300.000	92.262.100	10.037.900
2	18	02	2.01	02					Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 hasil evaluasi	1 hasil evaluasi	-	-	-	106.700.000	93.121.500	13.578.500
2	**18**	**02**	**2.02**						**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Jumlah draft kebijakan dan evaluasi pemberian fasilitas**	**2 draft**	**2 draft**				**288.798.400**	**269.245.922**	**19.552.478**
2	18	02	2.02	01					Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kab. Gresik	1 draft	1 draft	-	-	-	137.199.100	129.536.650	7.662.450
2	18	02	2.02	02					Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah kajian tentang Peta Potensi dan Peluang Usaha di Kabupaten Gresik	1 kajian	1 kajian	-	-	-	151.599.300	139.709.272	11.890.028
2	**18**	**03**							**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Pertumbuhan Promosi Penanaman Modal**	**4,27%**	**70%**				**345.375.400**	**340.393.417**	**4.981.983**
2	**18**	**03**	**2.01**						**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah jenis promosi penanaman modal**	**2 jenis**	**2 jenis**				**345.375.400**	**340.393.417**	**4.981.983**
2	18	03	2.01	01					Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah kajian mengenai strategi promosi penanaman modal	1 kajian	1 kajian	-	-	-	94.999.800	93.995.500	1.004.300
2	18	03	2.01	02					Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah promosi investasi	1 kali	1 kali	-	-	-	250.375.600	246.397.917	3.977.683
2	**18**	**04**							**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase penyelesaian ijin**	**75%**	**117,55%**				**2.309.332.150**	**1.246.152.870**	**1.063.179.280**

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
2	**18**	**04**	**2.01**						**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah pelayanan**	**4175 pelayanan**	**37732 pelayanan**				**2.309.332.150**	**1.246.152.870**	**1.063.179.280**
2	18	04	2.01	01					Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah izin/rekomendasi/persetujuan/ sertifikasi/pendaftaran dan atau izin ternotifikasi	1515 izin	35416 izin	-	-	-	294.585.100	255.918.561	38.666.539
2	18	04	2.01	02					Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah izin / rekomendasi yang terbit 1 tahun	2600 izin	1811 izin	Penyediaan jasa aprisal pelayanan perizinan bangunan sampai akhir desember baru bisa dicairkan 2 termin atau sebanyak 256 berkas yang selesai dari target 640 berkas dikarenakan lelang yang mundur			1.903.525.950	890.203.959	1.013.321.991
2	18	04	2.01	03					Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan dalam 1 tahun	20 kali	12 kali	Jumlah layanan konsultasi pengaduan menyesuaikan pengaduan yang masuk			46.039.000	35.624.000	10.415.000
2	18	04	2.01	04					Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	8 kali	8 kali	-	-	-	65.182.100	64.406.350	775.750
2	**18**	**05**							**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase kepatuhan perusahaan**	**30%**	**53,42%**				**718.876.008**	**691.961.485**	**26.914.523**
2	**18**	**05**	**2.01**						**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantuan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal**	**152 kali**	**179 kali**				**718.876.008**	**691.961.485**	**26.914.523**
2	18	05	2.01	01					Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaksanaan pemantauan penanaman modal	72 kali	45 kali	Refocussing anggaran menyebabkan jumlah pelaksanaan pemantauan ke perusahaan berkurang			112.344.834	111.834.788	510.046
2	18	05	2.01	02					Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pembinaan pelaksanaan penanaman modal	8 kali	14 kali				425.073.832	399.770.478	25.303.354
2	18	05	2.01	03					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pengawasan pelaksanaan penanaman modal	72 kali	120 kali				181.457.342	180.356.219	1.101.123
2	**18**	**06**							**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Tingkat Kematangan Layanan Penanaman Modal**	**4**	**4**				**47.097.200**	**44.400.600**	**2.696.600**
2	**18**	**06**	**2.01**						**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah jenis pengelolaan data dan informasi**	**3 jenis**	**3 jenis**				**47.097.200**	**44.400.600**	**2.696.600**

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
2	18	06	2.01	01					Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pengunjung website dan jumlah pengguna aplikasi	4000 pengunjung	89605 pengunjung				47.097.200	44.400.600	2.696.600
3	**2**	**2**	**13**		**3.2.2.13**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**									**19.706.396.069,00**	**18.789.700.037,37**	**916.696.031,63**
2	**19**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN GRESIK**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**18.789.700.037**	**916.696.031,63**
2	**19**	**02**							**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Persentase Pemuda yang Meraih Penghargaan**	**25%**	**33%**				**905.640.000,00**	**628.797.243**	**276.842.756,96**
2	**19**	**02**	**2.01**						**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan**	**5 kegiatan**	**5 kegiatan**				**755.640.000,00**	**486.357.243**	**269.282.756,96**
2	19	02	2.01	01					Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah kompetisi dan pembinaan	5 Bidang	5 Bidang				101.110.000,00	75.324.800,00	25.785.200,00
2	19	02	2.01	02					Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Peserta	165 Orang	165 Orang				223.547.000,00	18.316.600,00	205.230.400,00
2	19	02	2.01	03					Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 kegiatan				30.193.000,00	29.569.000,00	624.000,00
2	19	02	2.01	04					Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah data monev kepemudaan	18 kecamatan	18 kecamatan				30.780.000,00	18.271.900,00	12.508.100,00
2	19	02	2.01	08					Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah pemuda yang mendapatkan penghargaan	77 orang	77 orang				370.010.000,00	344.874.943,04	25.135.056,96
2	**19**	**02**	**2.02**						**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pelatihan**	**1 Pelatihan**	**1 Pelatihan**				**150.000.000,00**	**142.440.000**	**7.560.000,00**
2	19	02	2.02	02					Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pelatihan	75 orang	75 orang				150.000.000,00	142.440.000,00	7.560.000,00
2	**19**	**03**							**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Presentase cabang Olahraga Berprestasi**	**95%**	**96%**				**17.800.756.069,00**	**17.160.902.794**	**639.853.274,67**
										Presentase sarana Prasarana yang Terpelihara	**80%**	**100%**						

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
2	**19**	**03**	**2.01**						**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Sarana Prasarana Terpelihara**	**3 Unit Sarpras**	**3 Unit Sarpras**				**2.112.832.792,00**	**1.871.387.220**	**241.445.571,67**
2	19	03	2.01	03					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	JUmlah Gedung yang Terpelihara	3 Gedung	3 Gedung				2.112.832.792,00	1.871.387.220,33	241.445.571,67
2	**19**	**03**	**2.02**						**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kejuaraan**	**3 kejuaraan**	**3 kejuaraan**				**10.248.620.000,00**	**9.967.870.455**	**280.749.545,00**
2	19	03	2.02	01					Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pengiriman Cabor	14 cabor	14 cabor				10.185.810.000,00	9.908.937.455,00	276.872.545,00
2	19	03	2.02	02					Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cabang Olahraga	1 Cabor	1 Cabor				62.810.000,00	58.933.000,00	3.877.000,00
2	**19**	**03**	**2.03**						**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Jumlah Data**	**18 Kecamatan**	**18 Kecamatan**				**48.683.277,00**	**41.011.000**	**7.672.277,00**
2	19	03	2.03	05					Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data	18 Kecamatan	18 Kecamatan				48.683.277,00	41.011.000,00	7.672.277,00
2	**19**	**03**	**2.04**						**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**Jumlah Lembaga Olahraga**	**4 Lembaga**	**4 Lembaga**				**5.265.000.000,00**	**5.169.168.388**	**95.831.612,00**
2	19	03	2.04	02					Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah lembaga olahraga yang terverifikasi	**4 Lembaga**	**4 Lembaga**				5.265.000.000,00	5.169.168.388,00	95.831.612,00
2	**19**	**03**	**2.05**						**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Jumlah Partisipan Olahraga Rekreasi Dan Tradisional**	**100 peserta**	**100 peserta**				**125.620.000,00**	**111.465.731**	**14.154.269,00**
2	19	03	2.05	01					Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Peserta	100 orang	100 orang				125.620.000,00	111.465.731,00	14.154.269,00
2	**19**	**04**							**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Persentase Partisipasi Anggota pramuka**	**54%**	**97%**				**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000**	**-**
2	**19**	**04**	**2.01**						**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Jumlah Pembinaan**	**1 Lembaga**	**1 Lembaga**				**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000**	**-**
2	19	04	2.01	05					Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Lembaga Penerima Hibah	1 Lembaga	1 Lembaga				1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-
3	**2**	**2**	**14**		**3.2.2.14**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**									**99.862.100**	**82.378.972**	**17.483.128**
									Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	**tingkat kematangan layanan terbuka, pertumbuhan kunjungan website**						**99.862.100**	**82.378.972**	**17.483.128**
									Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daeah Kabupaten / Kota	**tingkat kematangan layanan terbuka, pertumbuhan kunjungan website**						**99.862.100**	**82.378.972**	**17.483.128**
									Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengumpulan ,Pengolahan , Analisis Dan Di Seminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah rapat koordinasi data stastik sektoral	2	2				99.862.100	82.378.972	17.483.128
										Jumlah tenaga ahli analisis statistik	1	1						
3	**2**	**2**	**15**		**3.2.2.15**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**									**447.129.000**	**445.508.593**	**1.620.407**

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
					2.21.02.				**Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**	**indeks keamanan informasi, presentase wilayah Desa/kelurahan yang memiliki akses jaringan telekomunikasi yang berkualitas**						**447.129.000**	**445.508.593**	**1.620.407**
					2.21.02.2.01				**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Infomasi Pemeintah Daerah Kabupaten / Kota**	**indeks keamanan informasi, presentase wilayah Desa/kelurahan yang memiliki akses jaringan telekomunikasi yang berkualitas**						**447.129.000**	**445.508.593**	**1.620.407**
					2.21.02.2.01 .02				**Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	jumlah OPD yang diberikan pelatihan tentang keamanan informasi	58	**58**				137.950.000	137.943.000,00	7.000,00
										jumlah pelatihan yang dilaksanakan	2	**2**						
										jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	2	**2**						
					2.21.02.2.01 .03				**Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Berbasis Elektronik Dan Non Elektronik**	Jumlah firewall yang digunakan untuk keamanan jaringan	1	**1**				309.179.000	307.565.593,00	1.613.407,00
										Jumlah maintenance email gresikkab.go.id	1	**1**					-	-
										Jumlah lisensi SSL	1	**1**						
										Jumlah tenaga ahli yang direkrut	1	**1**						
3	**2**	**2**	**16**		**3.2.2.16**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**	**DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**									**3.339.435.000,00**	**3.291.233.706,80**	**48.201.293,20**
2	**22**	**02**							**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Persentase Objek Budaya yang dilestarikan melalui pemanfaatan dan pengembangan**	**100%**	**100%**				**1.873.810.000,00**	**1.862.633.373**	**11.176.627,20**
										Persentase WBTb berketetapan Nasional yang dilestarikan melalui pemanfaatan dan pengembangan	**100%**	**100%**						
2	**22**	**02**	**2.01**						**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Kekayaan Budaya terlestarikan melalui pemanfaatan dan pengembangan**	**100%**	**100%**				**1.567.520.000,00**	**1.558.251.000**	**9.269.000,00**
2	22	02	2.01	01					Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah kegiatan objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	3 kegiatan	3 kegiatan				707.520.000,00	702.097.000,00	5.423.000,00
2	22	02	2.01	02					Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan melalui Hibah	22 hibah	22 hibah				860.000.000,00	856.154.000,00	3.846.000,00

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
2	**22**	**02**	**2.02**						**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Kekayaan Budaya terlestarikan melalui pemanfaatan dan pengembangan**	**100%**	**100%**				**306.290.000,00**	**304.382.373**	**1.907.627,20**
2	22	02	2.02	01					Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah kegiatan Terlindungi, terkembangkan, dan termanfaatkannya Objek Pemajuan Tradisi Budaya	3 kegiatan	3 kegiatan				306.290.000,00	304.382.372,80	1.907.627,20
2	**22**	**05**							**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Persentase Cagar Budaya Ditetapkan**	**100%**	**100%**				**665.625.000,00**	**641.541.086**	**24.083.914,00**
										Persentase obyek diduga Cagar Budaya terdaftar	**10%**	**15%**						
										"Persentase Cagar Budaya terkelola lestarikan	**100%**	**100%**						
2	**22**	**05**	**2.01**						**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Persentase Kekayaan Budaya terlestarikan melalui pemanfaatan dan pengembangan**	**100%**	**100%**				**150.000.000,00**	**141.443.000**	**8.557.000,00**
2	22	05	2.01	01					Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Pendaftaran Objek diduga CB di kawasan kota bandar Grisse	10 Portensi CB	10 Portensi CB				100.000.000,00	93.193.000,00	6.807.000,00
2	22	05	2.01	02					Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Penetapan Objek diduga CB di kawasan kota bandar Grisse	5 Potensi CB	5 Potensi CB				50.000.000,00	48.250.000,00	1.750.000,00
2	**22**	**05**	**2.02**						**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Persentase Kekayaan Budaya terlestarikan melalui pemanfaatan dan pengembangan**	**100%**	**100%**				**515.625.000,00**	**500.098.086**	**15.526.914,00**
2	22	05	2.02	02					Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Pengembangan CB di kawasan kota bandar Grisse	1 Kawasan	1 Kawasan				515.625.000,00	500.098.086,00	15.526.914,00
2	**22**	**06**							**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**Pertumbuhan kunjungan museum**	**30%**					**800.000.000,00**	**787.059.248**	**12.940.752,00**
2	**22**	**06**	**2.01**						**Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**	**Persentase Museum yang dikelola**	**100%**					**800.000.000,00**	**787.059.248**	**12.940.752,00**
2	22	06	2.01	01					Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi secara Terpadu	Jumlah koleksi museum terpamerkan	1 museum	1 museum				255.401.000,00	248.143.856,00	7.257.144,00
2	22	06	2.01	03					Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah sarana informasi museum	1 museum	1 museum				372.529.000,00	367.586.042,00	4.942.958,00
2	22	06	2.01	04					Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah sarana pamer museum	1 museum	1 museum				172.070.000,00	171.329.350,00	740.650,00
3	**2**	**2**	**17**		**3.2.2.17**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**									**10.538.228.189**	**10.125.304.112**	**412.924.077**
2	**23**	**01**							**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketercapaian sasaran program OPD**	**100%**	**100%**				**7.363.123.549**	**6.972.953.622**	**390.169.927**

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
2	**23**	**01**	**2.01**						**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun**	**16**	**16**				**26.985.000**	**21.806.100**	**5.178.900**
2	23	01	2.01	01					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rencana Kerja yang tersusun	6	6				16.645.000	11.841.100	4.803.900
2	23	01	2.01	06					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan pengendalian dan dokumen pelaporan kinerja keuangan	8	8				10.340.000	9.965.000	375.000
2	**23**	**01**	**2.02**						**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah tercapainya pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah**	**1**	**1**				**4.462.155.000**	**4.265.397.309**	**196.757.691**
2	23	01	2.02	01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Disperpussi	32	32				4.462.155.000	4.265.397.309	196.757.691
2	**23**	**01**	**2.06**						**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah administrasi perangkat daerah yang terlaksana**	**5**	**5**				**311.217.949**	**306.787.294**	**4.430.655**
2	23	01	2.06	02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan ka	2	2				128.138.749	127.363.745	775.004
2	23	01	2.06	04					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	3	3				70.751.000	70.747.125	3.875
2	23	01	2.06	05					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bahan cetakkan	4	4				7.219.200	7.115.800	103.400
2	23	01	2.06	06					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan y	2	2				9.120.000	9.120.000	-
2	23	01	2.06	09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas luar dan dalam daerah untuk mendapatkan informasi kedinasan	50	50				95.989.000	92.440.624	3.548.376
2	**23**	**01**	**2.08**						**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah tersedianya jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12**	**12**				**970.699.800**	**933.080.373**	**37.619.427**
2	23	01	2.08	02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran internet, telepon, wifi, Air dan listrik	12	12				196.499.800	163.430.373	33.069.427
2	23	01	2.08	04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran ins	48	48				774.200.000	769.650.000	4.550.000
										Jumlah pembayaran jasa pelayanan umum kantor	12	12						-
2	**23**	**01**	**2.09**						**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah pemerliharan barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintahan daerah**	**5**	**5**				**1.592.065.800**	**1.445.882.546**	**146.183.254**
2	23	01	2.09	01					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang	9	9				199.053.000	191.815.500	7.237.500
2	23	01	2.09	06					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang	5	5				29.770.000	29.770.000	-
2	23	01	2.09	08					Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset yang dipelih	1	1				11.853.000	11.750.000	103.000
2	23	01	2.09	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah lantai dalam sat	2	2				1.289.818.000	1.151.279.623	138.538.377

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
2	23	01	2.09	10					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dip	1	1				61.571.800	61.267.423	304.377
2	**23**	**02**							**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Nilai SKM Perpustakaan**	**(62,51-81,25)BAIK**	**84,59 SANGAT BAIK**				**3.003.212.740**	**2.984.110.330**	**19.102.410**
										Persentase Perpustakaan yang dibina	**70,67%**	**71,41%**						
2	**23**	**02**	**2.01**						**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Perpustakaan berstandarisasi Nasional Perpustakaan**	**15**	**0**				**2.710.354.840**	**2.697.773.680**	**12.581.160**
2	23	02	2.01	02					Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemustaka	20.824	26.411				125.374.000	117.997.900	7.376.100
2	23	02	2.01	04					Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah pengelola perpustakaan sekolah yang dibina	50	50				2.201.614.820	2.198.341.100	3.273.720
										Jumlah sekolah yang dilakukan pembinaan pengelolaan perpustakaan	17	17						-
2	23	02	2.01	06					Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peningkatan kinerja SDM perpustakaan daerah	50	50				79.099.800	77.826.800	1.273.000
2	23	02	2.01	09					Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah koleksi bahan pustaka buku	2.194	2.194				304.266.220	303.607.880	658.340
										Jumlah koleksi bahan pustaka e-book	559	559						-
2	**23**	**02**	**2.02**						**Pembudayaan Gemar Membaca Tingl**	**Jumlah Masyarakat yang Gemar Membaca**	**10.000**	**10.000**				**292.857.900**	**286.336.650**	**6.521.250**
2	23	02	2.02	01					Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi budaya baca dan literasi tingkat dasar, khusus, dan masyarakat	50	50				74.200.000	71.554.450	2.645.550
2	23	02	2.02	02					Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-tempat Umum yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembangunan dan pemeliharaan sarana perpustakaan sesuai kewenangan daerah	57	57				13.798.100	13.496.000	302.100
2	23	02	2.02	03					Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah peserta pembekalan lomba perpustakaan desa	124	124				92.899.800	92.556.900	342.900
										Jumlah peserta lomba S	16	16						-
2	23	02	2.02	04					Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah peserta pelibatan masyarakat di perpustakaan daerah	120	120				111.960.000	108.729.300	3.230.700
										Jumlah peserta dari perpustkaan desa percontohan yang diberikan pelatihan	50	50						-
										Jumlah peserta pelibatan masyarakat di perpustakaan desa	1.080	1.080						-
2	**23**	**03**							**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**Persentase Kelestarian Koleksi Nasional, Naskah Kuno Dan Muatan Lokal**	**60**	**60**				**171.891.900**	**168.240.160**	**3.651.740**

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
2	**23**	**03**	**2.01**						**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Naskah Kuno/Muatan Lokal yang dikembangkan, diolah, dan dialihmediakan untuk dilestarikan dan didayagunakan**	**12**	**12**				**171.891.900**	**168.240.160**	**3.651.740**
2	23	03	2.01	02					Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dikembangkan, diolah, dan dialihmediakan untuk dilestarikan dan didayagunakan	136	136				171.891.900	168.240.160	3.651.740
3	**2**	**2**	**18**		**3.2.2.18**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**									**316.983.250**	**301.876.093**	**8.594.900**
2	**24**								**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**								**301.876.093**	**8.594.900**
2	**24**	**02**							**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Persentase Pencipta Arsip yang dibina**	**46,14%**	**46,14%**				**287.984.750**	**274.416.893**	**7.055.600**
										Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	**(70-80)SANGAT BAIK**	**81,26**						
2	**24**	**02**	**2.01**						**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah OPD dengan Nilai Pengawasan Kategori BAIK**	**3**	**3**				**79.424.200**	**77.660.300**	**1.763.900**
2	24	02	2.01	03					Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang menjadi target pengawasan Kearsipan Internal	19	19				79.424.200	77.660.300	1.763.900
2	**24**	**02**	**2.02**						**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah arsip statis yang dikelola di Lembaga Kearsipan Daerah**	**107.004**	**119.551**				**140.801.950**	**129.545.943**	**1.763.900**
2	24	02	2.02	02					Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan /	Jumlah Arsip/Dokumen yang diduplikasi dalam bentuk Informatika	5.000	4.511				140.801.950	129.545.943	1.763.900
										Jumlah pelaksanaan akuisisi arsip	10	10						
										Luas Ruangan yang diinjeksi anti rayap	600	60						
										Volume depo arsip yang difumigasi	722	722						
										Jumlah arsip yang direstorasi	2	1						
2	**24**	**02**	**2.03**						**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**Jumlah Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasionaal Kabupaten/Kota yang dikelola**	**1**	**1**				**67.758.600**	**67.210.650**	**3.527.800**
2	24	02	2.03	01					Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah peserta bimtek I	10	10				32.391.800	32.295.850	1.763.900
										Jumlah penelusuran ars	1	1						
2	24	02	2.03	02					Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta bimtek aplikasi SRIKANDI	10	10				35.366.800	34.914.800	1.763.900
										Jumlah peserta sosialisasi aplikasi SRIKANDI	39	39						
2	**24**	**03**							**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PEN**	**Persentase arsip yang terlindungi dan terselamatkan**	**20%**	**20%**				**28.998.500**	**27.459.200**	**1.539.300**
2	**24**	**03**	**2.01**						**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pem**	**Jumlah kegiatan pemusnahan arsip**	**1**	**1**				**15.000.000**	**14.093.300**	**906.700**

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
2	24	03	2.01	01					Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah arsip/dokumen yang dimusnahkan	2	2				15.000.000	14.093.300	906.700
2	**24**	**03**	**2.03**						**Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan**	**umlah kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah yang dibubarkan/digabung**	**1**	**1**				**13.998.500**	**13.365.900**	**632.600**
2	24	03	2.03	01					Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang diselamatkan akibat dari penggabungan perangkat daerah	1	1				13.998.500	13.365.900	632.600
3	2	3			3.2.3	PELAKSANAAN URUSAN PILIHAN												
3	**2**	**3**	**1**		**3.2.3.1**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERIKANAN**	**DINAS PERIKANAN**									**12.431.838.246**	**11.959.956.507**	**471.996.304**
3	**25**	**1**							**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**7.278.307.192**	**7.061.938.083**	**216.483.674**
3	25	1	2,01						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi OPD	100	100				**32.755.400**	**29.508.000**	3.247.400
3	25	1	2,01	1					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan (bulan)	12	12				27.755.400	25.108.000	2.647.400
3	25	1	2,01	7					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya fasilitasi terhadap pelporan kinerja dan kinerja SKPD (bulan)	12	12				5.000.000	4.400.000	600.000
3	25	1	2,02						**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah (bulan)	12	12				***5.888.116.400***	**5.703.716.440**	**184.399.960**
3	25	1	2,02	1					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN (bulan)	12	12				5.888.116.400	5.703.716.440	184.399.960
3	25	1	2,06						**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	100	100				**510.948.000**	**500.828.194**	**10.119.806**
3	25	1	2,06	1					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya fasilitasi komponen instalasi listrik danpenerangan bangunan kantor (bulan)	12	12				6.000.000	5.993.112	6.888
3	25	1	2,06	2					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya fasilitasi alat tulis kantor (bulan)	12	12				322.497.000	321.697.741	799.259
3	25	1	2,06	3					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya fasilitasi peralatan rumah tangga (bulan)	12	12				5.940.000	5.758.236	181.764
3	25	1	2,06	4					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya fasilitasi makanan dan minuman rapat,tamu serta harian (bulan)	12	12				50.000.000	47.062.837	2.937.163
3	25	1	2,06	5					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya fasilitasi barang cetakan dan penggandaan (bulan)	12	12				13.000.000	9.989.700	3.010.300

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
3	25	1	2,06	9					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya fasilitasi perjalanan dinas dalam dan luar daerah (bulan)	12	12				113.511.000	110.326.568	3.184.432
3	25	1	2,08						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	100	100				**657.795.300**	**640.187.914**	**17.607.386**
3	25	1	2,08	2					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya fasilitasi jasa komunikasi, air dan listrik	12	12				108.595.300	93.337.914	15.257.386
3	25	1	2,08	4					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya fasilitasi jasa pelayanan umum kantor	12	12				549.200.000	546.850.000	2.350.000
3	25	1	2,09						**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Presentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan; Jumlah mebel yang diadakan	12	12				**188.692.092**	**187.697.535**	**1.109.122**
3	25	1	2,09	2					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya fasilitasi pemeliharaan kendaraanjabatan dan operasional dinas	12	12				100.031.500	99.734.291	297.209
3	25	1	2,09	10					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya fasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	1	1				69.025.600	68.392.244	633.356
3	25	1	2,09	11					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya fasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	12	12				19.634.992	19.571.000	178.557
3	**25**	**3**							**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	Produksi Perikanan Tangkap(ton)	11.417	11.451				**1.256.466.160**	**1.217.211.520**	**39.254.640**
3	25	3	2,01						**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	Peningkatan Jumlah Fasiltasi Sarana dan Prasarana Perikanan tangkap (Paket)	18	18				**918.044.000**	**895.999.600**	**22.044.400**
3	25	3	2,01	2					Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Peserta Pembinaan (orang)	90	90				918.044.000	895.999.600	22.044.400
3	25	3	2,02						**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Peningkatan Jumlah Nelayan yang dibina (%)	6,85	8,6				**256.282.160**	**244.805.400**	**11.476.760**
3	25	3	2,02	1					Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah peserta,pelatihan teknis penangkapan ikan (orang)	30	30				156.282.160	148.948.500	7.333.660
3	25	3	2,02	2					Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah peserta,pelatihan teknis penangkapan ikan (orang)	30	30				100.000.000	95.856.900	4.143.100
3	25	3	2,03						**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	peningkatan Jumlah TPI yang beroperasi dengan baik (%)	1	1				**82.140.000**	**76.406.520**	**5.733.480**
3	25	3	2,03	2					Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah peserta pembinaan teknis (orang)	144	144				82.140.000	76.406.520	5.733.480
3	**25**	**4**							**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	147.018	146.698				**2.808.126.354**	**2.651.147.849**	**156.978.505**

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
3	25	4	2,02						**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	Peningkatan Jumlah Fasiltasi Sarana dan Prasarana budidaya (Paket)	36	36				**2.151.487.400**	**2.021.840.050**	**129.647.350**
3	25	4	2,02	1					Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Peserta Pembinaan Teknis	150	150				2.151.487.400	2.021.840.050	129.647.350
3	25	4	2,04						**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	Peningkatan Jumlah Pembudidaya ikan yang dibina (%)	3,62	9,5				**656.638.954**	**629.307.799**	**27.331.155**
3	25	4	2,04	04					Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bahan Uji laboratorium kesehatan Ikan dan Lingkungan	88	88				25.000.000	22.294.200	2.705.800
3	25	4	2,04	06					Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Peserta Pembinaan teknis (orang)	48	48				555.480.000	541.282.799	14.197.201
3	25	4	2,04	07					Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Peserta Pembinaan teknis (orang)	120	120				76.158.954	65.730.800	10.428.154
3	**25**	**5**							**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	Persentase pengawasan usaha perikanan	26	20,63				**145.261.700**	**116.951.200**	**28.310.500**
										Persentase " Kepatuhan" pengawasan usaha perikanan	15	15,87						
										Luasan Kawasan Pesisir yang direhabilitasi	74,75	86,63						
3	25	5	2,01						Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Penurunan Jumlah Konflik Pelaku usaha perikanan yang melanggar ketentuan perundangan	7	5				**145.261.700**	**116.951.200**	**28.310.500**
3	25	5	2,01	1					Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Monitoring Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Perairan Umum Darat (kali)	6	6				91.783.000	72.591.500	19.191.500
3	25	5	2,01	2					Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Monitoring Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Perairan Umum Darat (kali)	5	5				53.478.700	44.359.700	9.119.000
3	**25**	**6**							**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	Presentase Produksi Perikanan Yang diolah dan dipasarkan	85,5	**78**				**943.676.840**	**912.707.855**	**30.968.985**
										Presentase Tingkat konsumsi ikan	1,3	**6,8**						
3	**25**	**6**	**2,01**						**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	**Peningkatan Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang mempunyai Kelayakan Produk (unit)**	**29**	**29**				-	-	-
3	25	6	2,01	1					Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Data base data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (paket	1	1						

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
3	**25**	**6**	**2,02**						**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**Peningkatan Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang mempunyai Kelayakan Produk (unit)**	**18**	**18**				**334.036.840**	**330.478.605**	**3.558.235**
3	25	6	2,02	1					Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Terlaksananya Bedah UPI	2	2				334.036.840	330.478.605	3.558.235
3	**25**	**6**	**2,03**						**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Produksi Olahan hasil Perikanan (ton)**	**145.632**	**121.858**				**609.640.000**	**582.229.250**	**27.410.750**
3	25	6	2,03	1					Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan teknis (orang)	450	495				470.379.000	464.332.200	6.046.800
3	25	6	2,03	2					Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan teknis (orang)	600	750				139.261.000	117.897.050	21.363.950
3	**2**	**3**	**2**		**3.2.3.2**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	**DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**									**11.829.628.897,00**	**11.472.556.045,98**	**357.072.851,02**
3	**26**	**01**							**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**presentase ketercapaian sasaran program perangkat daerah**	**100%**	**100%**				**10.154.153.897,00**	**9.868.088.668**	**286.065.229,22**
3	**26**	**01**	**2.01**						**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen dan Laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah**	**17 dokumen**	**17 dokumen**				**181.467.500,00**	**152.390.100**	**29.077.400,00**
3	26	01	2.01	01					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan program dan kegiatan SKPD	8 dokumen	8 dokumen				143.667.500,00	116.671.800,00	26.995.700,00
3	26	01	2.01	06					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	6 dokumen	6 dokumen				18.900.000,00	17.115.000,00	1.785.000,00
3	26	01	2.01	07					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Kegiatan SKPD	3 Laporan	3 Laporan				18.900.000,00	18.603.300,00	296.700,00
3	**26**	**01**	**2.02**						**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah fasilitasi terhadap administrasi keuangan perangkat daerah**	**1 fasilitasi**	**1 fasilitasi**				**6.194.640.000,00**	**6.056.620.157**	**138.019.843,00**
3	26	01	2.02	01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	42 orang	43 orang				6.194.640.000,00	6.056.620.157,00	138.019.843,00
3	**26**	**01**	**2.06**						**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah fasilitasi terhadap administrasi umum perangkat daerah**	**7 fasilitasi**	**7 fasilitasi**				**544.725.401,00**	**523.409.531**	**21.315.870,00**
3	26	01	2.06	01					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang disediakan	1 jenis	1 jenis				21.885.000,00	20.705.300,00	1.179.700,00
3	26	01	2.06	02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 jenis	4 jenis				122.897.901,00	112.262.100,00	10.635.801,00
3	26	01	2.06	03					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	2 jenis	2 jenis				35.155.000,00	33.501.400,00	1.653.600,00

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
3	26	01	2.06	04					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis penyediaan makan dan minum	4 jenis	4 jenis				83.740.000,00	83.250.000,00	490.000,00
3	26	01	2.06	05					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	3 jenis	3 jenis				75.000.000,00	74.967.650,00	32.350,00
3	26	01	2.06	06					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan	4 jenis	4 jenis				10.200.000,00	7.560.000,00	2.640.000,00
3	26	01	2.06	09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	150 kali	150 kali				195.847.500,00	191.163.081,00	4.684.419,00
3	**26**	**01**	**2.08**						**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**2 jasa**	**2 jasa**				**2.683.732.000,00**	**2.628.258.174**	**55.473.826,00**
3	26	01	2.08	02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis fasilitasi kantor yang dibayar	4 jenis	4 jenis				204.732.000,00	181.058.174,00	23.673.826,00
3	26	01	2.08	04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang ada	43 orang	43 orang				2.479.000.000,00	2.447.200.000,00	31.800.000,00
3	**26**	**01**	**2.09**						**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah fasilitasi terhadap pemeliharaan barang milik daerah yang menunjang urusan pemerintahan**	**6 fasilitasi**	**6 fasilitasi**				**549.588.996,00**	**507.410.706**	**42.178.290,22**
3	26	01	2.09	01					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang dipelihara	5 unit	5 unit				205.710.000,00	196.633.563,00	9.076.437,00
3	26	01	2.09	02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Jabatan yang dipelihara	5 unit	5 unit				99.000.000,00	84.917.900,00	14.082.100,00
3	26	01	2.09	06					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	8 unit	8 unit				41.940.000,00	28.004.000,00	13.936.000,00
3	26	01	2.09	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	1 gedung	1 gedung				177.994.000,00	173.213.642,78	4.780.357,22
3	26	01	2.09	11					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang direhabilitasi	2 unit	2 unit				24.944.996,00	24.641.600,00	303.396,00
3	**26**	**02**							**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	Pertumbuhan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)	25%	**70%**				**502.975.000,00**	**492.071.870**	**10.903.130,00**
										Presentase Fasilitasi di Objek Daya Tarik Wisata	100%	**100%**						
										Pertumbuhan Kelompok Sadar Wisata yang ditetapkan	5%	**45%**						
										Presentase Destinasi Wisata yang Dikembangkan	100%	**100%**						
3	**26**	**02**	**2.01**						**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan Pengelolaan Terhadap Daya Tarik Wisata**	**2 kegiatan**	**2 kegiatan**				**385.855.000,00**	**384.767.500**	**1.087.500,00**
3	26	02	2.01	03					Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Pelatihan, pembinaan dan peningkatan SDM Pemandu dan tata kelola destinasi ekowisata	3 pelatihan	3 pelatihan				366.663.000,00	365.847.500,00	815.500,00

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
3	26	02	2.01	04					Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Monitoring dan Evaluasi pada Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) di Kab. Gresik	25 ODTW	25 ODTW				19.192.000,00	18.920.000,00	272.000,00
3	**26**	**02**	**2.02**						**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata**	**2 kawasan**	**2 kawasan**				**117.120.000,00**	**107.304.370**	**9.815.630,00**
3	26	02	2.02	03					Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Pariwisata yang dikembangkan	2 kawasan	2 kawasan				117.120.000,00	107.304.370,00	9.815.630,00
3	**26**	**03**							**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	Pertumbuhan kunjungan wisata Dalam Negeri	2%	**95%**				**627.655.000,00**	**603.649.008**	**24.005.991,80**
										Pertumbuhan kunjungan wisata Mancanegara	2%	**339%**						
3	**26**	**03**	**2.01**						**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kunjungan Wisata dalam dan luar negeri**	**2145422 Orang**	**4133282 ORANG**				**627.655.000,00**	**603.649.008**	**24.005.991,80**
3	26	03	2.01	01					Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah sarana dan/atau media informasi dan promosi pariwisata baik cetak, elektronik, dan lainnya serta pengembangannya dalam rangka mendukung upaya optimalisasi promosi potensi wisata di Kab. Gresi	3 kegiatan	3 kegiatan				260.762.200,00	254.212.958,20	6.549.241,80
3	26	03	2.01	02					Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi event kepariwisataan di kota tua dan ekowisata	2 event	2 event				217.005.000,00	207.514.600,00	9.490.400,00
3	26	03	2.01	03					Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah ODTW di Kabupaten Gresik yang sudah beroperasi kembali untuk melaksanakan pendataan dan informasi pariwisat	25 ODTW	25 ODTW				107.265.000,00	107.254.150,00	10.850,00
3	26	03	2.01	04					Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah penguatan jaringan kerjasama pemasaran melalui berbagai event	1 kegiatan	1 kegiatan				16.257.800,00	14.034.800,00	2.223.000,00
3	26	03	2.01	05					Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah kegiatan laporan hasil monitoring dan evaluasi pariwisata di Kab. Gresik	2 kegiatan	2 kegiatan				26.365.000,00	20.632.500,00	5.732.500,00
3	**26**	**05**							**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Pertumbuhan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif**	**2%**	**0,8%**				**544.845.000,00**	**508.746.500**	**36.098.500,00**
3	**26**	**05**	**2.01**						**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dibina**	**40 orang**	**40 orang**				**544.845.000,00**	**508.746.500**	**36.098.500,00**
3	26	05	2.01	01					Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Pembinaan bagi industri Ekonomi Kreatif	3 kegiatan	3 kegiatan				228.845.000,00	218.850.500,00	9.994.500,00
3	26	05	2.01	06					Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Pemberdayaan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3 kegiatan	3 kegiatan				316.000.000,00	289.896.000,00	26.104.000,00

Kode Rekening				No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
3	**2**	**3**	**3**	**3.2.3.3**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**DINAS PERTANIAN**									**34.987.933.838,00**	**29.784.685.619,98**	**5.203.248.218,02**
3	**27**	**02**						**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Prosentase realisasi pupuk bersubsidi**	**95,50%**	**99,99%**				**6.320.130.941,00**	**4.268.048.390,00**	**2.052.082.551,00**
									Prosentase alsintan dalam kondisi baik	**90,20%**	**91,38%**						
3	**27**	**02**	**2.01**					**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Persentase pemanfaatan alat mesin pertanian yang dapat dimonitoring**	**100%**	**100%**				**4.641.843.941,00**	**2.684.296.995,00**	**1.957.546.946,00**
									Jumlah Alat Mesin Pertanian yang diadakan	**4 unit**	**15 unit**						
									Jumlah Monitoring Pemanfaatan Alsintan	**16 kecamatan**	**16 kecamatan**						
									Jumlah pertemuan pendukung kegiatan	**6 kali**	**6 kali**						
									Jumlah kelompok tani penerima hibah	**16 kecamatan**	**16 kecamatan**						
3	27	02	2.01	01				Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Benih Jagung	615 kg	-	Karena kelompok penerima sudah menerima berturut turut Pengadaan Cultivator, Handtraktor, Pompa air (DBHCHT)			4.641.843.941,00	2.684.296.995,00	1.957.546.946,00
									Jumlah Benih Padi	675 kg	-						
									Jumlah Benih Padi Inbrida	4300 kg	-						
									Jumlah Bibit Kelapa	500 batang	-						
									Jumlah Penerima Hibah Alsintan (DBHCHT)	3 kelompok	3 kelompok						
									Jumlah penerima hibah barang (pokir)	6 kelompok	6 kelompok						
									Jumlah Penerima Hibah Bibit Tembakau Jinten (DBHCHT)	11 kelompok	11 kelompok						
									jumlah penerima hibah handspreyer (DBHCHT)	11 kelompok	11 kelompok						
									Jumlah penerima Hibah Pupuk Organik Cair	30 kelompok	30 kelompok						
									Jumlah Penerima Hibah Pupuk SP36 (DBHCHT)	11 kelompok	11 kelompok						
									Jumlah Penerima Hibah Pupuk ZA (DBHCHT)	11 kelompok	11 kelompok						
									Jumlah Penerima Hibah Pupuk ZK (DBHCHT)	11 kelompok	11 kelompok						
									jumlah pengadaan drone full unit (DBHCHT)	1 unit	1 unit						
									Jumlah Peserta Bimtek Pemanfaatan Alsintan (DBHCHT)	20 orang	20 orang						
									Jumlah peserta FGD	25 orang	25 orang						

Kode Rekening				No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
									Jumlah Peserta Pertemuan Koordiansi & Evaluasi (DBHCHT)	20 orang	20 orang						
									Jumlah Peserta Pertemuan Koordinasi (DBHCHT	20 orang	20 orang						
									Jumlah Peserta Pertemuan Sosialisasi dan Koordinasi Komoditas Jagung	100 orang	100 orang						
									Jumlah peserta sosialisasi penerapan teknologi (DBHCHT)	60 orang	60 orang						
									Jumlah Pupuk Organik (Jagung)	16400 kg	-						
									Jumlah Pupuk Organik (Kelapa)	7200 kg	-						
3	**27**	**02**	**2.02**					**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan,Tumbuhan, dan Mikro Organisme KewenanganKabupaten/Kota**	**Jumlah tersedianya biaya operasional pengelolaan sumberdaya genetik (SDG) di UPT TTP panceng**	**12 bulan**	**12 bulan**				**362.628.000,00**	**360.450.165,00**	**2.177.835,00**
									Jumlah Sarana peningkatan Kualitas SDG Hewan	**12 bulan**	**12 bulan**						
3	27	02	2.02	02				Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tan	Jumlah tersedianya biaya operasional pengelolaan sumberdaya genetik (SDG) di UPT TTP Panceng	12 bulan	12 bulan				362.628.000,00	360.450.165,00	2.177.835,00
3	**27**	**02**	**2.03**					**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak danTanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kelompok Ternak Penerima Hibah**	**48 kelompok**	**23 kelompok**				**1.315.659.000,00**	**1.223.301.230,00**	**92.357.770,00**
									Jumlah pengadaan sarana pembibitan ternak	**1 paket**	**1 paket**						
									Jumlah pertemuan pendukung kegiatan	**1 kali**	**3 kali**						
3	27	02	2.03	01				Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Kelompok Ternak Penerima Hibah	48 kelompok	23 kelompok				1.315.659.000,00	1.223.301.230,00	92.357.770,00
									Jumlah pengadaan sarana pembibitan ternak	1 paket	1 paket						
									Jumlah pertemuan pendukung kegiatan	1 pertemuan	3 pertemuan						
3	**27**	**03**						**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Luas lahan LP2B dan CLP2B yang terlindungi**	**27721 Ha**	**27721 Ha**				**4.589.684.930,00**	**2.319.713.842,70**	**2.269.971.087,30**
									Persentase poktan/gapoktan yang terfasilitasi infrastruktur pertanian	**32,89%**	**31,99%**						
3	**27**	**03**	**2.01**					**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Persentase pengembangan prasarana pertanian yang dapat difasilitasi**	**100%**	**100%**				**676.818.468,00**	**298.651.235,00**	**378.167.233,00**

Kode Rekening	No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
						jumlah gapoktan yang menerima hibah sarana produksi pertanian untuk pengelolaan LP2B	**5 Gapoktan**	**5 Gapoktan**						
						Jumlah validasi lahan baku sawah Ka. Gresik	**1 paket**	-						
						jumlah peta pemilik LP2B kecamatan yang disusun	**1 paket**	-						
						Jumlah pertemuan pendukung kegiatan BK/DAK	**3 kali**	**3 kali**						
						Jumlah pengawasan pembangunan infrastruktur pertanian	**3 paket**	**3 paket**						
3 27 03 2.01 03					Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah pertemuan pendukung kegiatan BK/DAK	3 kegiatan	3 kegiatan	Karena kelompok penerima sudah menerima hibah berturut turut (DBHCHT) (Alat perajang, dan Widik)			676.818.468,00	298.651.235,00	378.167.233,00
						Jumlah kegiatan prasarana pendukung pertanian BK dan DAK yang difasilitasi	2 kegiatan	2 kegiatan						
						Jumlah Penerima Hibah Mesin Perajang Tembakau	5 kelompok	5 kelompok						
3 27 03 2.02					**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Persentase infrastruktur pertanian terbangun dalam kondisi baik**	**100%**	**100%**				**3.912.866.462,00**	**2.021.062.607,70**	**1.891.803.854,30**
						jumlah jaringan irigasi yang terbangun	**1 unit**	**4 unit**						
						jumlah pengawasan jaringan irigasi tersier	**1 paket**	-						
						jumlah embung yang di bangun	**4 unit**	-						
						Jumlah Jalan Usaha Tani yang di bangun (Dana DAK)	**5 unit**	**2 unit**						
						Jumlah Jalan Usaha Tani yang di bangun (Dana BK Kepada Desa)	**65 unit**	**169**						
						jumlah pembangunan ruang data BPP	**3 unit**	-						
						Jumlah Irigasi air tanah dangkal/dalam yang di bangun	**2 unit**	**2 unit**						
						jumlah long storage	-	-						
						jumlah fasilitasi pemeliharaan dan operasional kantor TTP Panceng	**12 bulan**	**12 bulan**						

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
										Jumlah pembangunan infrastruktur TTP	**3 unit**	**3 unit**						
3	27	03	2.02	01					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah irigasi air tanah (sumur bor) yang terbangun	2 paket	2 paket				1.675.000.000,00	1.479.906.607,70	195.093.392,30
										Jumlah jaringan irigasi yang terbangun	4 paket	4 paket						
										jumlah pengawasan jaringan irigasi tersier	1 kali	-						
3	27	03	2.02	03					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah jalan usaha tani yang terbangun	2 unit	2 unit				200.000.000,00	199.946.400,00	53.600,00
										Jumlah pembangunan r	3 unit							
3	27	03	2.02	09					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	DED RPH	1 paket	1 paket	Karena kelompok penerima sudah menerima hibah berturut turut (DBHCHT)			1.999.520.000,00	302.863.600,00	1.696.656.400,00
3	27	03	2.02	08					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah BPP yang mendapat alokasi DAK Fisik	3 kecamatan	-				-	-	-
										Jumlah jalan produksi yang dibangun	5 unit	0 unit,						
										Jumlah sumur bor yang dibuat	7 paket	0 paket						
										Jumlah Irigasi air tanah dangkal/dalam yang di bangun	15 unit	-						
										Jumlah long storage	-	-						
3	27	03	2.02	09					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya (UPT TTP)	Jumlah sarana pendukung operasional prasarana UPT TTP	1 paket	1 paket				38.346.462,00	38.346.000,00	462,00
3	**27**	**04**							**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase kondisi tern**	**87,70%**	**87,91%**				**208.530.000,00**	**200.856.465,00**	**7.673.535,00**
3	**27**	**04**	**2.01**						**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Obat pencegahan penyakit ternak**	**1 paket**	**1 paket**				**120.975.000,00**	**116.676.015,00**	**4.298.985,00**
										Jumlah peralatan pemeliharaan kesehatan ternak	**1 paket**	**1 paket**						
										Ketersediaan Jumlah vaksin pencegahan penyakit ternak	**2 paket**	**2 paket**						
										Jumlah pelayanan kesehatan hewan	**3 lokasi**	**3 lokasi**						
3	27	04	2.01	01					Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis (UPT Puskeswan Panceng)	Jumlah sarana pencegahan penyakit ternak	1 paket	1 paket				10.000.000,00	10.000.000,00	-
3	27	04	2.01	01					Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis (UPT Puskeswan Balongpanggang)	Jumlah sarana pencegahan penyakit ternak	1 paket	1 paket				13.420.000,00	13.418.500,00	1.500,00
3	27	04	2.01	02					Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Obat pencegahan penyakit ternak	1 paket	1 paket				97.555.000,00	93.257.515,00	4.297.485,00
										Jumlah peralatan pemeliharaan kesehatan ternak	1 paket	1 paket						

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
										Jumlah pelayanan kesehatan hewan	3 lokasi	3 lokasi						
3	**27**	**04**	**2.04**						**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Jumlah pengadaan sarana pendukung**	**1 paket**	**1 paket**				**87.555.000,00**	**84.180.450,00**	**3.374.550,00**
										Jumlah pendampingan kegiatan	**3 pertemuan**	**4 pertemuan**						
										Jumlah Hasil Pemeriksaan Laboratorium bahan asal hewan	**36 sampel**	**36 sampel**						
										jumlah obat-obatan untuk kesehatan ternak	**1 paket**	**1 paket**						
3	27	04	2.04	01					Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah pengadaan sarana pendukung	1 paket	1 paket				57.555.000,00	54.407.400,00	3.147.600,00
										Jumlah pendampingan kegiatan	3 pertemuan	4 pertemuan						
3	27	04	2.04	02					Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Hasil Pemeriksaan Laboratorium bahan asal hewan	36 sampel	36 sampel				30.000.000,00	29.773.050,00	226.950,00
										jumlah obat-obatan untuk kesehatan ternak	1 paket	1 paket						
3	**27**	**05**							**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase penanganan organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan**	**81,82**	**74,87%**				**1.543.492.900,00**	**1.489.170.985,00**	**54.321.915,00**
3	**27**	**05**	**2.01**						**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pertemuan Pendukung Kegiatan**	**35 kali**	**25 kali**				**1.543.492.900,00**	**1.489.170.985,00**	**54.321.915,00**
										Jumlah Bantuan saprodi pertanian	**1 paket**	**1 paket**						
										Jumlah Gerakan Pelestarian Musuh Alami, Pengendalian Penyakit dan HamaTanaman	**1 kali**	**1 kali**						
										Jumlah Pengembangan kawasan pangan dan non pangan	**1 paket**	-						
										Jumlah Obat tanaman perkebunan	**1 paket**	**1 paket**						
										Jumlah sarana penanggulangan pasca bencana alam	**1 paket**	**5 paket**						
3	27	05	2.01	01					Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Denfarm Penerapan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu (PHT) Tembakau	1 paket	1 paket				1.238.061.900,00	1.190.073.525,00	47.988.375,00
										Jumlah Hard Drive Eksternal	2 unit	2 unit						
										Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Serealia	60 orang	60 orang						

Kode Rekening	No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
						Jumlah Kajian Penerapan Inovasi Teknologi Pengendalian OPT Ramah Lingkungan pada Budidaya Tanaman Tembakau	1 paket	1 paket						
						Jumlah Personal Komputer	1 unit	1 unit						
						Jumlah Pertemuan Adopsi Teknologi Pengendalian OPT Tembakau menggunakan Pestisida Nabati	60 orang	60 orang						
						Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pembibitan	30 orang	30 orang						
						Jumlah Peserta FGD Pengendalian OPT tanaman pangan, horti dan perkebunan	44 orang	44 orang						
						Jumlah Peserta FGD Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan	44 orang	44 orang						
						Jumlah Peserta Gerakan Pengendalian OPT	306 orang	306 orang						
						Jumlah Peserta Pertemuan Adopsi Teknologi Pengendalian Hama Terpadu untuk meningkatkan produksi tembakau	30 orang	30 orang						
						Jumlah Peserta Pertemuan dalam rangka Pendataan Komoditas Tembakau	30 orang	30 orang						
						Jumlah Peserta Pertemuan Mekanisasi Usaha Tani Tembakau dan Penghitungan Analisa Usaha Tani Tembakau	70 orang	70 orang						
						Jumlah Peserta Pertemuan Penerapan PHT dan Pengendalian OPT	100 orang	100 orang						
						Jumlah Peserta Pertemuan Perbanyakan Agens Hayati	40 orang	40 orang						
						Jumlah Peserta Pertemuan SLPHT Tanaman Tembakau	300 orang	300 orang						
						Jumlah Peserta Pertemuan Teknis Antisipasi Dampak Anomali Iklim	200 orang	200 orang						
						Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Tanaman Pangan	30 orang	30 orang						
						Jumlah Rubuha	25 buah	25 buah						
3 27 05 2.01 02					Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah pertemuan pendukung kegiatan	8 kegiatan	8 kegiatan				226.899.000,00	225.186.960,00	1.712.040,00

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
3	27	05	2.01	03					Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah peserta pertemuan koordinasi pengendalian hama pada tanaman perkebunan	60 orang	60 orang				78.532.000,00	73.910.500,00	4.621.500,00
										Jumlah peserta pertemuan mekanisasi tanaman perkebunan	60 orang	60 orang						
										Jumlah peserta pertemuan pendataan tanaman tahunan (Bawean)	30 orang	30 orang						
										Jumlah sarana pendukung produksi yang diadakan	5 paket	5 paket						
										Jumla peserta pertemuan FGD Optimalisasi Tanaman Perkebunan	30 orang	30 orang						
3	**27**	**07**							**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase penyuluh bersertifikat**	**31,35%**	**43,64%**				**3.944.823.643,00**	**3.702.255.782,28**	**242.567.860,72**
										Persentase kelompok tani dengan klasifikasi Madya	**13,04%**	**13,49%**						
3	**27**	**07**	**2.01**						**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Jumlah Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian**	**204 kali**	**192 kali**				**3.944.823.643,00**	**3.702.255.782,28**	**242.567.860,72**
										Jumlah Programa Pertanian yang disusun	**16 Kecamatan**	**16 Kecamatan**						
										jumlah kelompok yang di nilai untuk penilaian kelas kelompok	**40 Poktan**	**40 Poktan**						
										Jumlah Rekapitulasi Database Sosial Ekonomi Terpadu Petani	**308 Gapoktan**	**302 Gapoktan**						
										Jumlah Media Penyuluhan yang dapat disediakan	**2 Jenis**	**2 Jenis**						
3	27	07	2.01	01					Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah BPP yang mendapat alokasi DAK Non Fisik	16 Kecamatan	16 Kecamatan				143.600.000,00	137.135.500,00	6.464.500,00
										Jumlah Pelatihan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian yang diselenggarakan	3 pertemuan	3 pertemuan						
3	27	07	2.01	02					Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah demplot yang difasilitasi (DBHCHT)	18 kelompok	18 kelompok				2.094.702.643,00	1.968.664.430,00	126.038.213,00
										Jumlah Gapoktan yang mendapatkan insentif	308 Gapoktan	302 Gapoktan						
										Jumlah kelompok yang di nilai untuk penilaian kelas kelompok	40 kelompok	40 kelompok						
										Jumlah pelatihan pengolahan pasca panen (DBHCHT)	2 kali	2 kali						

Kode Rekening	No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
						Jumlah penelitian yang dilaksanakan (DBHCHT	3 paket	3 paket						
						Jumlah pertemuan e rdkk tingkat kabupaten	2 kali	2 kali						
						Jumlah Pertemuan Penyusunan SOP Budidaya Tembakau (DBHCHT)	4 kali	4 kali						
						Jumlah peserta Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tembakau (DBHCHT)	50 orang	50 orang						
						Jumlah peserta Pertemuan Penentuan Grade Tanaman Tembakau (DBHCHT)	50 orang	50 orang						
						Jumlah peserta Pertemuan Pengembangan Pola Kemitraan dengan Daerah Lain (DBH CHT)	40 orang	40 orang						
						Jumlah peserta Pertemuan Perencanaan Tanaman Tembakau Tahun 2023 (DBHCHT)	100 orang	100 orang						
						Jumlah peserta Temu La	120 orang	120 orang						
						Jumlah Programa yang disusun	16 kecamatan	16 kecamatan						
						Jumlah rapat koordinasi (DBH CHT)	4 kali	4 kali						
						Jumlah Sekolah Lapang Tahap Penumbuhan (DBH CHT)	5 kali	5 kali						
3 27 07 2.01 03					Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah BPP yang mendapat Alokasi DAK Fisik	3 Kecamatan	3 Kecamatan				1.706.521.000,00	1.596.455.852,28	110.065.147,72
						Jumlah data penerima C	1 paket	1 paket						
						Jumlah FGD	1 kali	1 kali						
						Jumlah pertemuan latihan, kunjungan dan supervisi	6 kali	6 kali						
						Jumlah peserta pelatihan pengoperasian pesawat tanpa awak sektor pertanian	25 orang	25 orang						
3 27 01					**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Kapasitas Internal Organisasi**	**BB**	**BB**				**18.381.271.424,00**	**17.804.640.155,00**	**576.631.269,00**
						Persentase ketercapaian sasaran kegiatan	**90%**	**90%**						
						Persentase ketercapaian sasaran program OPD	**100%**	**100%**						
3 27 01 2.01					**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah pertemuan pendukung kegiatan**	**36**	**36**				**122.535.000,00**	**117.722.525,00**	**4.812.475,00**
						jumlah dokumen perencanaan	**40**	**40**						

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
										Jumlah Buku Profil yang dicetak	**3**	**3**						
										jumlah laporan kinerja	**21**	**21**						
										jumlah data spasial bidang pertanian	**24**	**24**						
										Jumlah Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan	**18**	**18**						
3	27	01	2.01	01					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah pertemuan pendukung kegiatan	16 Kali	16 Kali				56.942.500,00	55.694.000,00	1.248.500,00
										Jumlah Dokumen Perencanaan	16 Buku	16 Buku						
										FGD	1 Kali	1 Kali						
3	27	01	2.01	06					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Buku Profil yang dicetak	41 Buku	41 Buku				27.890.000,00	25.672.000,00	2.218.000,00
										Jumlah laporan kinerja PD	6 Buku	6 Buku						
										Jumlah pertemuan pendukung kegiatan	10 kali	10 kali						
3	27	01	2.01	07					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan	16 Kecamatan	16 Kecamatan				37.702.500,00	36.356.525,00	1.345.975,00
										Jumlah pertemuan pendukung kegiatan (FGD)	1 kali	1 kali						
3	**27**	**01**	**2.02**						**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah gaji dan tunjangan**	**12 bulan**	**12 bulan**				**14.665.864.000,00**	**14.146.716.967,00**	**519.147.033,00**
										Jumlah buku laporan keuangan	**118 buku**	**118 buku**						
3	27	01	2.02	01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjang	12 bulan	12 bulan				14.653.864.000,00	14.134.752.967,00	519.111.033,00
3	27	01	2.02	04					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah buku pedoman pelaksanaan APBD	8 buku	8 buku				7.680.000,00	7.653.000,00	27.000,00
										Jumlah laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran	108 buku	108 buku						
3	27	01	2.02	05					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah buku laporan ak	8 buku	8 buku				2.920.000,00	2.920.000,00	-
3	27	01	2.02	08					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah buku prognosis	7 buku	7 buku				1.400.000,00	1.391.000,00	9.000,00
3	**27**	**01**	**2.06**						**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah barang yang diadakan**	**13**	**13**				**553.672.626,00**	**537.217.583,00**	**16.455.043,00**
										Tersedianya Bahan Logistik Kantor	**12**	**12**						
										Jumlah rapat yang diadakan	**48**	**48**						
										Jumlah penggandaan	**8.000**	**8.000**						
										Jumlah rapat/kesediaan rutin yang tersedia mamin	**2.000**	**2.000**						
										Jumlah Tersedia Makanan dan Minuman Harian	**500**	**500**						
										Jumlah Tersedia Makanan dan Minuman Harian	**1.500**	**1.500**						
3	27	01	2.06	02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah barang yang diadakan	6 Jenis	6 Jenis				199.754.776,00	189.884.520,00	9.870.256,00
3	27	01	2.06	02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT Puskeswan Balongpanggang)	Jumlah alat dan perlengkapan yang disediakan	10 jenis	10 jenis				6.500.000,00	6.500.000,00	-
3	27	01	2.06	02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT Puskeswan Panceng)	Jumlah barang yang diadakan	8 jenis	8 jenis				6.500.000,00	6.500.000,00	-

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
3	27	01	2.06	02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT TTP)	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	10 jenis	10 jenis				7.372.000,00	7.372.000,00	-
3	27	01	2.06	04					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Tersedia Makanan dan Minuman Rapat	2000 kotak	2000 kotak				106.043.850,00	105.910.700,00	133.150,00
										Jumlah Tersedia Makanan dan Minuman Harian	445 doz	445 doz						
										Jumlah Tersedia Makanan dan Minuman Harian	1200 galon	1200 galon						
3	27	01	2.06	04					Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPT Puskeswan Balongpanggang)	Jumlah Tersedia Makanan dan Minuman Rapat	30 kotak	30 kotak				1.580.000,00	1.580.000,00	-
										Jumlah Tersedia Makanan dan Minuman Harian	12 dos	12 dos						
										Jumlah Tersedia Makanan dan Minuman Harian	32 galon	32 galon						
3	27	01	2.06	04					Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPT Puskeswan Panceng)	Jumlah Tersedia Makanan dan Minuman Rapat	200 kotak	200 kotak				5.000.000,00	1.727.000,00	3.273.000,00
										Jumlah Tersedia Makanan dan Minuman Harian	100 dos	100 dos						
3	27	01	2.06	04					Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPT TTP)	Jumlah Tersedia Makanan dan Minuman Rapat	250	250				10.000.000,00	9.962.000,00	38.000,00
										Jumlah Tersedia Makanan dan Minuman Harian	200 galon	200 galon						
										Jumlah Tersedia Makanan dan Minuman Harian	125 dos	125 dos						
3	27	01	2.06	05					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Publikasi/ Dekorasi	4 jenis	4 jenis				12.158.000,00	11.343.600,00	814.400,00
										Jumlah penggandaan yang bisa dilakukan	2521 lembar	2521 lembar						
3	27	01	2.06	05					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (UPT TTP)	Jumlah penggandaan yang bisa dilakukan	4000 lembar	4000 lembar				1.200.000,00	1.200.000,00	-
3	27	01	2.06	06					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis Bahan Bacaan yang dapat diadakan	1 Jenis	1 Jenis				5.000.000,00	5.000.000,00	-
3	27	01	2.06	09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dapat dilaksanakan	60 kali	60 kali				182.564.000,00	180.587.763,00	1.976.237,00
3	27	01	2.06	09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT TTP)	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dapat dilaksanakan	24 kali	24 kali				10.000.000,00	9.650.000,00	350.000,00
3	**27**	**01**	**2.08**						**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Pembayaran Rekening Rutin**	**4 Jenis**	**4 Jenis**				**2.703.740.000,00**	**2.673.418.563,00**	**30.321.437,00**
										Jumlah Tenaga Harian Lepas yang ada	**4 Jenis**	**4 Jenis**						
3	27	01	2.08	02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Rekening Rutin	12 bulan	12 bulan				318.600.000,00	304.347.058,00	14.252.942,00
3	27	01	2.08	02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPT Puskeswan Balongpanggang)	Jumlah Pembayaran Rekening Rutin	12 bulan	12 bulan				8.500.000,00	5.853.822,00	2.646.178,00
3	27	01	2.08	02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPT Puskeswan Panceng)	Jumlah Pembayaran Rekening Rutin	12 bulan	12 bulan				8.500.000,00	5.860.000,00	2.640.000,00
3	27	01	2.08	02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPT TTP)	Jumlah Pembayaran Rekening Rutin	12 bulan	12 bulan				24.240.000,00	22.162.683,00	2.077.317,00

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
3	27	01	2.08	04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Harian Lepas yang ada	93 orang	93 orang				2.343.900.000,00	2.335.195.000,00	8.705.000,00
3	**27**	**01**	**2.09**						**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Kendaraan yang mendapatkan perawatan rutin**	**4 Jenis**	**4 Jenis**				**335.459.798,00**	**329.564.517,00**	**5.895.281,00**
										Jumlah Jenis Barang yang dapat diadakan	**4 Jenis**	**4 Jenis**						
										Jumlah Belanja sewa Gedung	**1 Jenis**	**1 Jenis**						
										Jumlah Pekerjaan Pemeliharaan yang akan diadakan	**4 Jenis**	**4 Jenis**						
3	27	01	2.09	01					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang mendapatkan perawatan rutin	2 unit	2 unit				37.099.889,00	34.577.800,00	2.522.089,00
3	27	01	2.09	02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan yang mendapatkan perawatan rutin	10 unit	10 unit				219.315.800,00	216.002.317,00	3.313.483,00
3	27	01	2.09	06					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Barang yang dapat dilakukan pemeliharaan	4 Jenis	4 Jenis				76.544.109,00	76.484.400,00	59.709,00
3	27	01	2.09	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Belanja sewa Gedung	1 paket	1 paket				2.500.000,00	2.500.000,00	-
										Jumlah Pekerjaan Pemeliharaan yang akan diadakan	1 paket	1 paket						
3	**2**	**3**	**4**		**3.2.3.4**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**	**DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**									**2.956.308.000,00**	**2.609.236.451,73**	**347.071.548,27**
3.30.03	30	03							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Presentase sarana perda	100% (8 pemeliharaan)	100% (8 pemeliharaan)				2.213.508.000,00	1.993.304.081,73	**220.203.918,27**
3.30.03	30	03	2.01						Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	jumlah pemeliharaan sa	13 pemeliharaan	13 pemeliharaan				2.132.608.000,00	1.924.478.081,73	**208.129.918,27**
3.30.03	30	03	2.01	02					Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	jumlah pasar kabupaten	8 pemeliharaan	8 pemeliharaan				2.132.608.000,00	1.924.478.081,73	**208.129.918,27**
3.30.03	30	03	2.02						Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	jumlah pembinaan peda	3922 pedagang	3922 pedagang				80.900.000,00	68.826.000,00	**12.074.000,00**
3.30.03	30	03	2.02	01					Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	jumlah pedagang pasar	1338 stand	1338 stand				80.900.000,00	68.826.000,00	**12.074.000,00**
3.30.03	30	04							PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Prosentase perubahan IHK perbulan (indeks harga konsumen)	menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dengan inflasi 3%	6,59%				137.900.000,00	111.152.500,00	**26.747.500,00**
3.30.03	30	04	2.02						Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	jumlah komoditi yang di input dalam https://siskaperbapo.com dalam rangka pemantauan harga bahan pokok dan lainya	28 bahan pokok	31 bahan pokok				137.900.000,00	111.152.500,00	**26.747.500,00**
3.30.03	30	04	2.02	02					Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Bahan pokok yang diinput di aplikasi Siskaperbapo	36 bahan pokok	71 bahan pokok				137.900.000,00	111.152.500,00	**26.747.500,00**
3.30.03	30	05							PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	% Pertumbuhan nilai ekspor	2.32% (1.542.587.407.84 USD)	3.54% (2.353.590.878,17 $)				169.900.000,00	128.269.750,00	**41.630.250,00**

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
3.30.0	3	30	05	2.01					Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Mikro dan IKM yang mengikuti Misi dagang	5 UM/IKM	10UM/IKM				169.900.000,00	128.269.750,00	**41.630.250,00**
3.30.0	3	30	05	2.01	04				Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	jumlah pelaksanaan misi dagang daerah	1 kali	1 kali				169.900.000,00	128.269.750,00	**41.630.250,00**
3.30.0	3	30	06						PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat UTTP be	97.34%(3800 UTTP)	157.44%(5983 UTTP)				435.000.000,00	376.510.120,00	**58.489.880,00**
3.30.0	3	30	06	2.01					Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah UTTP yang diter	3500 UTTP	5983 UTTP				435.000.000,00	376.510.120,00	**58.489.880,00**
3.30.0	3	30	06	2.01	01				Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Pelaksanaan ter	3500 Pelaksanaan	5987 Pelaksanaan				398.000.000,00	349.482.982,00	**48.517.018,00**
3.30.0	3	30	06	2.01	02				Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah UTTP yang diaw	3500 UTTP	6151 UTTP				37.000.000,00	27.027.138,00	**9.972.862,00**
3	**2**	**3**	**5**		**3.2.3.5**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**	**DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**									**426.000.000,00**	**393.533.242,00**	**32.466.758,00**
3.31.0	3	31	02						PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Prosentase IKM yang te	0,84% (60 IKM)	1.40%(100 IKM)				140.400.000,00	140.308.000,00	**92.000,00**
3.31.0	3	31	02	2.01					Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang terdat	60 IKM	100 IKM				140.400.000,00	140.308.000,00	**92.000,00**
3.31.0	3	31	02	2.01	05				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM yang dibina	60 IKM	100 IKM				140.400.000,00	140.308.000,00	**92.000,00**
3.31.0	3	31	03						PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Prosentase IKM yang mendapat fasilitasi	1,35% (95 IKM)	2.06%(145 IKM)				183.200.000,00	168.342.000,00	**14.858.000,00**
3.31.0	3	31	03	2.01					Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang mengajukan Merk dan Halal	98 IKM	145 IKM	Merek 105 IKM Halal 40 IKM			183.200.000,00	168.342.000,00	**14.858.000,00**
3.31.0	3	31	03	2.01	01				Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah IKM yang mendapatkan sosialisasi terkait Merk dan Halal	150 IKM	145 IKM				183.200.000,00	168.342.000,00	**14.858.000,00**
3.31.0	3	31	04						PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Prosentase IKM ber KBLI kategori Industri yang telah verifikasi teknis melalui SIINas	0,62 (6 IKM)	0,62 (6 IKM)				102.400.000,00	84.883.242,00	**17.516.758,00**
3.31.0	3	31	04	2.01					Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah IKM ber KBLI kategori industri yang mengajukan verifikasi teknis melalui SIINas	15 IKM	6 IKM				102.400.000,00	84.883.242,00	**17.516.758,00**
3.31.0	3	31	04	2.01	02				Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah IKM yang mendapat sosialisasi SIINas	150 IKM	100 IKM				102.400.000,00	84.883.242,00	**17.516.758,00**
3	2	4			3.2.4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
3	**2**	**4**	**1**		**3.2.4.1**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SEKRETARIAT**	**SEKRETARIAT DAERAH**									**166.894.478.959**	**153.129.187.684**	**13.765.291.275**
							BAGIAN HUKUM									**1.863.137.000**	**1.726.560.158**	**136.576.842**

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
4	**01**	**02**							**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase Perda yang diproses**	**90%**	**100%**				**1.863.137.000**	**1.726.560.158**	**136.576.842**
										Persentase Perbup yang diproses	**90%**	**100%**						
										Persentase Keputusan Bupati yang diproses	**90%**	**100%**						
4	**01**	**02**	**2.03**						**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	Jumlah Produk Hukum yang diproses	850 dokumen	957 dokumen				**1.863.137.000**	**1.726.560.158**	**136.576.842**
										Jumlah Perkara hukum yang difasilitasi	1 perkara	3 perkara						
										Tingkat kematangan layanan produk hukum daerah	5 indeks	5 indeks						
4	01	02	2.03	01					Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah koordinasi permasalahan peraturan perundang-undangan	55 kali	58 kali				513.916.000	473.685.360	40.230.640
										Jumlah Peraturan Daerah yang diproses	10 dokumen	8 dokumen						
										Jumlah Peraturan Bupati yang diproses	40 dokumen	98 dokumen						
										Jumlah Keputusan Bupati yang diproses	800 dokumen	792 dokumen						
										Jumlah rancangan Peraturan Daerah yang direncanakan	10 dokumen	15 dokumen						
4	01	02	2.03	02					Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah perkara litigasi yang difasilitasi	1 perkara	3 perkara				696.088.000	627.872.333	68.215.667
										Jumlah perkara non litigasi yang terselesaikan	2 kasus	14 kasus						
										Jumlah peserta Penyuluhan Hukum	90 orang	69 orang						
										Jumlah desa/kelurahan sadar hukum	2 desa / kelurahan	2 desa / kelurahan						
										Jumlah peserta Diklat Legal Drafting atau Pendidikan Khusus Profesi Advokat	4 orang	8 orang						
4	01	02	2.03	03					Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah produk hukum yang dikaji	3 dokumen	3 dokumen				653.133.000	625.002.465	28.130.535
										Jumlah produk hukum yang terdokumentasikan	850 dokumen	898 dokumen						
										Jumlah Buku Abstrak dan Katalog Perundang-undangan, serta Himpunan Perda dan Perbup yang disebarluaskan	1445 buku	1445 buku						
										Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Daerah	110 orang	110 orang						
							BAGIAN PEMBANGUNAN									**1.548.749.900**	**1.201.872.986**	**346.876.914**
4	01	03							**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase kebijakan administrasi pembangunan yang disahkan**	**100%**	**100%**				**1.548.749.900**	**1.201.872.986**	**346.876.914**

Kode Rekening	No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
4 01 03 2.02					**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Jumlah Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah**	**6 Dokumen**	**6 Dokumen**				**1.548.749.900**	**1.201.872.986**	**346.876.914**
						Jumlah pelaksanaan pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	**46 OPD**	**46 OPD**						
4 01 03 2.02 01					Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan							738.878.900	572.211.110	**166.667.790**
						Jumlah Buku Renja Sekretariat Daerah	30 Buku	30 Buku						
						Jumlah Buku Standar Analisa Biaya	55 Buku	55 Buku						
						Jumlah Forum Koordinasi Sinergitas Program Pembangunan	14 Kali	14 Kali						
						Jumlah Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah	2 Kebijakan	2 Kebijakan						
4 01 03 2.02 02					Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan							399.871.100	287.232.480	**112.638.620**
						Jumlah Buku Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas	400 Buku	400 Buku						
						Jumlah Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kegiatan APBD	20 Kali	20 Kali						
4 01 03 2.02 03					Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan							409.999.900	342.429.396	**67.570.504**
						Jumlah Buka Laporan Realisasi Kinerja SKPD Se-Kabupaten Gresik	84 Buku	84 Buku						
						Jumlah Pelaksanaan Review APBD	3 Kali	3 Kali						
			BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA									**1.173.137.000**	**959.261.570**	**213.875.430**
4 01 01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Integritas Jabatan/Organisasi	1,70	3,32				1.173.137.000	959.261.570	213.875.430
						Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai AKIP Minimal “A”	79%	79,17%						
						Nilai Rata Rata Indeks Kepuasan Masyarakat di Unit Pelayanan Perangkat Daerah	86,00	80,15						
4 01 01 2.13					Kegiatan Penataan Organisasi	Jumlah rancangan peraturan bupati tentang perangkat daerah	5	9				1.173.137.000	959.261.570	213.875.430
						Persentase ketercapaian sasaran kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	76%	55%						
						Jumlah Unit Pelayanan dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat minimal "Baik"	71	83						

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
4	01	01	2.13	01					Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan							395.000.000	342.898.828	52.101.172
										Jumlah Perangkat Daerah yang dianalisa beban kerjanya	48	47						
										Jumlah Pembahasan Permasalahan / Isu Strategis	12	17						
										Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan evaluasi jabatannya	17	47						
										Jumlah Jabatan ASN yang telah disusun SKJ	37	37						
										Jumlah tusi perangkat daerah yang dievaluasi	46	46						
4	01	01	2.13	02					Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana							407.137.000	324.035.805	83.101.195
										Jumlah UPP yang melaksanakan SKM	80	73						
										Jumlah Inovasi yang mengikuti kompetisi	15	57						
										Jumlah UPP yang difasilitasi penyusunan / reviu SPP/SOP/Proses Bisnis	48	47						
4	01	01	2.13	03					Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi							371.000.000	292.326.937	78.673.063
										Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi penyusunan dokumen SAKIP & Reformasi Birokrasi	48	47						
										Jumlah UPP yang difasilitasi dalam pengusulan Zona Integritas	32	32						
										Jumlah Dokumen Sakip dan RB sekretariat Daerah	10	11						
										Jumlah Dokumen Sakip dan RB Pemerintah Kabupaten Gresik	5	9						
							BAGIAN PEMERINTAHAN									**1.942.160.492**	**1.655.739.911**	**286.420.581**
4	**01**	**02**					**BAGIAN TATA PEMERINTAHAN**		**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase pemenuhan data dukung IKK**						**1.942.160.492**	**1.655.739.911**	**286.420.581**
4	**01**	**02**	**2.01**						**Administrasi Tata Pemerintahan**	- Persentase data dukung IKK yang diverifikasi - Jumlah pelayanan PATEN yang telah dilimpahkan / delegasikan						**1.912.142.492**	**1.627.529.438**	**284.613.054**

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
4	01	02	2.01	01					Penataan Administrasi Pemerintahan	- Jumlah aplikasi sistem informasi administrasi pemerintahan yang dikembangkan - Jumlah kecamatan yang didampingi dalam pelaksanaan PATEN - Jumlah kecamatan yang dimonitoring dan evaluasi - Jumlah kecamatan yang mengikuti bimtek terkait peningkatan kinerja '- Jumlah kecamatan yang mengikuti penilaian sinergitas '-Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi Forkopimda	- 0 aplikasi - 18 kecamatan - 18 kecamatan - 18 kecamatan - 18 kecamatan - 36 rapat	- 0 aplikasi - 16 kecamatan - 16 kecamatan - 16 kecamatan - 16 kecamatan 33 rapat	- Pengembangan sistem informasi administrasi pemerintahan tidak dilaksanakan karena dianggap sudah tidak relevan mengingat sudah banyak pengembangan duplikasi aplikasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat yang diterapkan di daerah. - Kegiatan monev terealisasi 16 kecamatan dari target 18 kecamatan karena kondisi cuaca yang tidak memungkinkan			1.515.811.000	1.248.524.465	267.286.535
4	01	02	2.01	02					Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	- Jumlah dokumen hasil pelacakan batas daerah '- Jumlah dokumen pembukuan nama-nama rupa bumi	- 1 dokumen - 1 dokumen	- 1 dokumen - 1 dokumen				309.477.292	293.320.507	16.156.785
4	01	02	2.01	03					Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	- Jumlah Laporan LPPD - Jumlah Laporan SPM '- Jumlah Pelaksanaan Penerimaan Kunjungan Kerja	- 1 buku - 1 dokumen - 24 kunjungan	- 1 buku - 1 dokumen - 25 kunjungan				86.854.200	85.684.466	1.169.734
4	**01**	**02**	**2.04**						**Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri**	**Jumlah kerjasama yang difasilitasi**	**5 MOU**	**30 MOU**				**30.018.000**	**28.210.473**	**1.807.527**
5	01	02	2.04	01					Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah rapat TKKSD yang dilaksanakan	- 20 rapat	- 20 rapat				30.018.000	28.210.473	1.807.527
							BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA									**1.130.496.600**	**794.467.768**	**336.028.832**
4	**01**	**03**							**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN SDA**							**1.130.496.600**	**794.467.768**	**336.028.832**
4	**01**	**03**	**2.01**						**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**		7	4				**921.150.000**	**638.893.087**	**282.256.913**
									Jumlah kebijakan BUMD yang difasilitasi		1	1						
									Jumlah Laporan TPID									
4	01	03	**2.01**	**1**					**Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD**							**343.130.000**	**222.026.212**	**121.103.788**
									Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD									
										Jumlah unit pelayanan Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah	16 unit pelayanan	16 unit pelayanan						
										Jumlah Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja BUMD	2 Kali	2 Kali						

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
										Jumlah Rapat Koordinasi BUMD dan BLUD	12 Kali	8 kali						
										Jumlah Rapat Koordinasi BUMD dan BLUD	7 Laporan	7 laporan						
										Jumlah Kajian tentang Potensi Bisnis BUMD								
										Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD								
4	01	03	**2.01**	**2**					**Pengendalian dan Distribusi Perekonomian**							**100.000.000**	**52.704.250**	**47.295.750**
									Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian									
										Jumlah Pelaksanaan High Level Meeting TPID	6 kali	6 Kali						
										Jumlah pelaksanaan Capacity Building TPID								
										Jumlah Pelaksanaan Sidak Sembako dan Bahan Penting Lainnya		1 kali						
										Jumlah Operasi Bersama Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal								
										Jumlah Lokakarya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian								
										Jumlah Kajian Pengendalian dan Distribusi Perekonomian								
										Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distri busi Perekonomian								
4	**01**	**03**	**2.01**	**3**					**Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil**							**478.020.000**	**364.162.625**	**113.857.375**
									Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil									
										Jumlah Event Kontes Bandeng Tradisional	1 kali	1 kali						
										Jumlah Peserta Sosialisasi kredit Lunak Bagi Usaha Mikro	50 orang	50 orang						
										Jumlah Sinkronisasi, koordinasi dan evaluasi pengembangan pariwisata, koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan								
										Jumlah Kajian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil								
										Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil								

Kode Rekening				No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
4	**01**	**03**	**204**					**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**							**209.346.600**	**155.574.681**	**53.771.919**
								Jumlah laporan hasil monitoring dan Evaluasi kebijakan SDA		1	1						
4	**01**	**03**	**204**	01				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan							**71.301.500**	**53.970.632**	**17.330.868**
								Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja									
									Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pemantauan bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	4 kali	4 kali						
									Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kelautan, dan Kehutanan	1 laporan	1 laporan						
									Jumlah Pengumpulan Informasi Barang Kena Cukai Ilegal								
									Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan di Bidang Cukai								
									Jumlah Penerima Bantuan Langsung Tunai bagi buruh Pabrik Rokok dan Buruh Tani Tembakau yang bersumber dari DBH CHT								
									Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal , Tenaga Kerja								
4	**01**	**03**	**204**	**02**				**Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup**							**62.499.730**	**51.891.743**	**10.607.987**
								Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian									

Kode Rekening	No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
						Jumlah Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	1 kali	1 kali						
						Jumlah Laporan Monev Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	1 laporan	1 laporan						
						Jumlah Kajian Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidu	1 kajian	1 kajian						
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik dan Persandian								
4 01 03 204 03					**Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air**							**75.545.370**	**49.712.306**	**25.833.064**
					Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan									
						Jumlah Rapat Koordinasi Kebijakan Energi dan Air	1 kali	3 kali						
						Jumlah Laporan Monev Kebijakan Energi dan Ai	1 laporan	1 laporan						
						Jumlah Kajian terkait Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air								
						Jumlah Dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan energi dan air, pekerjaan umum dan Penataan ruang, perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Pertanahan								
		BAGIAN UMUM										**109.064.719.948**	**102.516.306.319**	**6.548.413.629**
4 1 1					**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**109.064.719.948**	**102.516.306.319**	**6.548.413.629**
4 1 1 2.02					**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disampaikan tepat waktu**	**1 Laporan**	**1 Laporan**				**20.443.759.900**	**18.989.153.431**	**1.454.606.469**

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
4	1	1	2.02	1					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang diterimakan	12 Bulan	12 Bulan				19.843.022.000	18.488.164.417	1.354.857.583
4	1	1	2.02	3					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah rekonsiliasi / rapat koordinasi pengelolaan keuangan dan aset	20 Kali	17 Kali				280.738.000	241.800.750	38.937.250
4	1	1	2.02	5					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan dan aset	290 Buku	290 Buku				319.999.900	259.188.264	60.811.636
										Jumlah rekonsiliasi / rapat koordinasi penyusunan laporan keuangan dan aset	20 Kali	28 Kali						
4	**1**	**1**	**2.05**						**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pakaian dinas yang disediakan**	**100%**	**100%**				**697.949.800**	**683.293.010**	**14.656.790**
4	1	1	2.05	2					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jenis pakaian dinas untuk pimpinan	6 Jenis	6 Jenis				697.949.800	683.293.010	14.656.790
										Jumlah pakaian dinas untuk pimpinan	60 Setel	60 Setel						
4	**1**	**1**	**2.06**						**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pelaksanaan perjalanan dinas yang difasilitasi**	**100%**	**100%**				**10.420.495.920**	**9.348.713.403**	**1.071.782.517**
4	1	1	2.06	1					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik yang dilakukan pengadaan	6 Jenis	6 Jenis				695.068.160	548.532.333	146.535.827
										Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang difasilitasi komponen instalasi listrik / penerangannya	5 Gedung	5 Gedung						
4	1	1	2.06	2					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 Jenis	6 Jenis				1.272.970.600	1.203.456.504	69.514.096
										Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang difasilitasi peralatan dan perlengkapan kantor	1 Gedung	1 Gedung						
4	1	1	2.06	3					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang difasilitasi penyediaan peralatan rumah tangganya	2 Gedung	2 Gedung				372.282.960	366.401.430	5.881.530
										Jumlah peralatan rumah tangga yang dilakukan pengadaan	3 Jenis	3 Jenis						
4	1	1	2.06	4					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah mamin harian	250 Kali	250 Kali				2.616.120.500	2.610.919.405	5.201.095
										Jumlah mamin kegiatan	25 Kali	45 Kali						
										Jumlah mamin rapat	60 Kali	78 Kali						
4	1	1	2.06	5					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan yang disediakan	4 Jenis	4 Jenis				467.052.400	403.127.750	63.924.650
4	1	1	2.06	7					Penyediaan Bahan/Material	Jenis bahan / material yang dilakukan pengadaan	2 Jenis	2 Jenis				999.295.800	818.319.061	180.976.739
4	1	1	2.06	8					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	25 Kali	39 Kali				744.000.000	740.395.990	3.604.010

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
4	1	1	2.06	9					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan perjalanan dinas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah / Pejabat	195 Kali	208 Kali				3.253.705.500	2.657.560.930	596.144.570
										Jumlah perjalanan dinas yang difasilitasi	220 Kali	247 Kali						
4	1	1	2.06	11					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah aplikasi	1 Aplikasi	-				-	-	-
4	**1**	**1**	**2.07**						**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan**	**100%**	**83%**				**18.826.660.840**	**17.131.651.469**	**1.695.009.371**
4	1	1	2.07	1					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	2 Unit	0				913.600.000		913.600.000
4	1	1	2.07	2					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan	360 Unit	360 Unit				13.362.644.000	12.706.720.000	655.924.000
4	1	1	2.07	5					Pengadaan Mebel	Jenis mebel	3 Jenis	3 Jenis				1.460.498.000	1.440.152.350	20.345.650
4	1	1	2.07	6					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	5 Jenis	5 Jenis				2.511.389.640	2.446.180.944	65.208.696
4	1	1	2.07	11					Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	5 Jenis	5 Jenis				33.612.000	30.023.280	3.588.720
4	1	1	2.07	11					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	4 Jenis	4 Jenis				544.917.200	508.574.895	36.342.305
4	**1**	**1**	**2.08**						**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik**	**100%**	**100%**				**47.153.508.900**	**45.731.229.699**	**1.422.279.201**
4	1	1	2.08	1					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Paket	100 Kali	100 Kali				17.100.000	15.484.602	1.615.398
										Jumlah Pengiriman Surat	30 Kali	30 Kali						
4	1	1	2.08	2					Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis jasa operasional kantor	4 Jenis	4 Jenis				39.549.965.700	38.387.443.437	1.162.522.263
										Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet	12 Bulan	12 Bulan						
4	1	1	2.08	3					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis jasa peralatan dan perlengkapan kantor	3 Jenis	3 Jenis				2.316.023.400	2.193.582.660	122.440.740
										Jumlah kegiatan yang difasilitasi	36 Kali	36 Kali						
4	1	1	2.08	4					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga administrasi kantor	153 Orang	153 Orang				5.270.419.800	5.134.719.000	135.700.800
										Jumlah tenaga keamanan	4 Orang	4 Orang						
										Jumlah tenaga kebersihan	30 Orang	30 Orang						
										Jumlah tenaga sopir	5 Orang	5 Orang						
4	**1**	**1**	**2.09**						**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Difasilitasi**	**100%**	**100%**				**8.388.290.587**	**7.748.194.987**	**640.095.600**

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
4	1	1	2.09	1					Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan dinas jabatan yang dilakukan pemeliharaan	5 Unit	5 Unit				1.021.420.000	883.119.505	138.300.495
4	1	1	2.09	2					Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang dilakukan pemeliharaan	20 Unit	20 Unit				1.931.060.000	1.496.428.523	434.631.477
4	1	1	2.09	5					Pemeliharaan Mebel	Jenis mebel yang dilakukan pemeliharaan	3 Jenis	3 Jenis				237.538.950	229.185.784	8.353.166
										Jumlah mebel yang dilakukan pemeliharaan	120 Unit	120 Unit						
4	1	1	2.09	6					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis peralatan dan mesin yang dilakukan pemeliharaan	6 Jenis	6 Jenis				846.870.000	833.969.286	12.900.714
4	1	1	2.09	9					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung/bangunan yang dilakukan pemeliharaan	5 Gedung	5 Gedung				2.534.866.700	2.514.442.308	20.424.392
4	1	1	2.09	10					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan	5 Jenis	5 Jenis				399.874.637	388.223.020	11.651.617
										Jumlah gedung kantor yang difasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarananya	5 Gedung	5 Gedung						
4	1	1	2.09	11					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis sarana dan prasarana pendukung yang dilakukan pemeliharaan	4 Jenis	4 Jenis				1.416.660.300	1.402.826.561	13.833.739
										Jumlah gedung kantor yang difasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana pendukungnya	5 Gedung	5 Gedung						
4	**1**	**1**	**2.11**						**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Persentase penyediaan gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diterimakan**	**100%**	**100%**				**2.065.526.001**	**1.933.950.479**	**131.575.522**
4	1	1	2.11	1					Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diterimakan	12 Bulan	12 Bulan				242.171.158	166.350.479	75.820.679
4	1	1	2.11	4					Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah penyediaan dana penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diterimakan	12 Bulan	12 Bulan				1.823.354.843	1.767.600.000	55.754.843
4	**1**	**1**	**2.12**						**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Persentase penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga yang disediakan**	**100%**	**100%**				**1.068.528.000**	**950.119.841**	**118.408.159**
4	1	1	2.12	1					Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jenis kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah	2 Jenis	2 Jenis				553.895.000	491.747.268	62.147.732

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
										Jumlah bulan kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah	12 Bulan	12 Bulan						
4	1	1	2.12	2					Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jenis kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah	2 Jenis	2 Jenis				441.677.625	389.392.541	52.285.084
										Jumlah bulan kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	12 Bulan						
4	1	1	2.12	3					Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jenis kebutuhan rumah tangga Sekretaris Daerah	1 Jenis	1 Jenis				72.955.375	68.980.032	3.975.343
										Jumlah bulan kebutuhan rumah tangga Sekretaris Daerah	12 Bulan	12 Bulan						
							BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT									**45.438.895.924**	**39.742.884.723**	**5.696.011.201**
4	**01**						**SEKRETARIAT DAERAH**											
4	**01**	**02**							**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**							**45.438.895.924**	**39.742.884.723**	**5.696.011.201**
4	**01**	**02**	**2.02**						**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	Predikat Capaian Fasilitasi Kegiatan Kesra	Baik	Baik				**45.438.895.924**	**39.742.884.723**	**5.696.011.201**
4	01	02	**2.02**	01					Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Idul Adha	1 Kegiatan	1 Kegiatan				6.049.999.924	5.527.136.723	522.863.201
										Istighotsah Bulanan	11 Kegiatan	11 Kegiatan						
										Istighotsah Mingguan	52 Kegiatan	52 Kegiatan						
										Musabaqoh Tilawatil Q	750 Orang	750 Orang						
										Pemberangkatan Jamaa	1 Kegiatan	1 Kegiatan						
										Pembinaan Keagamaan	4 Kegiatan	4 Kegiatan						
										Peringatan Hari Besar Is	3 Kegiatan	3 Kegiatan						
										Peringatan Hari Santri N	1 Kegiatan	1 Kegiatan						
										Ramadlan	7 Kegiatan	7 Kegiatan						
4	01	02	**2.02**	02					Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Organisasi Keagamaan dan Tempat Ibadah Penerima Hibah yang dievaluasi	569 lembaga	543 lembaga				38.688.896.000	33.840.902.000	4.847.994.000
										Jumlah Organisasi Keagamaan dan Tempat Ibadah Penerima Hibah yang dilakukan pengendalian	569 lembaga	543 lembaga						
										Jumlah Organisasi Keagamaan dan Tempat Ibadah Penerima Hibah yang direkomendasikan	569 lembaga	543 lembaga						
4	01	02	**2.02**	03					Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Fasilitasi dan Koordinasi Komisi Daerah Lansia	2 Kegiatan	2 Kegiatan				700.000.000	374.846.000	325.154.000
										Fasilitasi Penyelenggaraan Sosialisasi Pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS	4 Kegiatan	4 Kegiatan						
										Peningkatan Kesegaran Jasmani	36 Kegiatan	36 Kegiatan						
										Rakorda UKS	8 Kegiatan	7 Kegiatan						
							BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA									**1.096.022.095**	**956.425.099**	**139.596.996**
4	01	03							Program Perekonomian dan Pembangunan							1.096.022.095,00	956.425.098,56	139.596.996,44

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
4	01	03	2.03						Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Nilai Survey Kepuasan Pelanggan terhadap Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa						1.096.022.095,00	956.425.098,56	139.596.996,44
4	01	03	2.03	`01					Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Dokumen	155	108	Jumlah paket tender sesuai pengajuan DPP dari OPD	Percepatan proses pengadaan	Mengadakan Desk terkait RUP, perencanaan pengadaan hingga penanganan kontrak dengan mengundang para pemangku kepentingan baik dari unsur internal (OPD) maupun eksternal (Penyedia)	410.000.000,00	405.393.230,00	4.606.770,00
4	01	03	2.03	`06					Pengelolaan Pengadaan secara elektronik	Dokumen	155	108	Jumlah paket tender sesuai pengajuan DPP dari OPD	Percepatan proses pengadaan	Mengadakan Desk terkait perencanaan pengadaan dengan mengundang para pemangku kepentingan baik dari unsur internal (OPD) maupun eksternal (Penyedia)	249.999.095,00	226.148.162,56	23.850.932,44
4	01	03	2.03						Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Orang	210	657				436.023.000,00	324.883.706,00	111.139.294,00
							BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL									**3.637.160.000**	**3.575.669.150**	**61.490.850**
4	**01**	**01**							**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Kegiatan Protokol dan Kehumasan yang difasilitasi**						**3.637.160.000**	**3.575.669.150**	**61.490.850**
4	01	01	2.14						Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan							**3.637.160.000**	**3.575.669.150**	**61.490.850**
4	01	01	2.14	01					Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah kegiatan Keprotokolan			Efisiensi Kegiatan			250.000.000	248.962.500	1.037.500
4	01	01	2.14	02					Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Berita yang dipublikasikan			Minim nya waktu serap karena pagu anggaran baru diberika pada periode PAK	Pada kesempatan lain waktu akan di laksanakan secara maksimal mungkin.		2.828.547.000	2.807.581.250	20.965.750
4	01	01	2.14	03					Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah pendokumentasian Tugas Pimpinan			Rencana kegiatan Keprotokoleran dan Komunikasi Pimpinan di Pulau Bawean pada Tri Wulan IV , karena padatnya skedul dari Bupati dan Wabup akhirnya tidak bisa terserap.			558.613.000	519.125.400	39.487.600

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
3	**2**	**4**	**2**		**3.2.4.2**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SEKRETARIAT**	**SEKRETARIAT DPRD**									**87.652.956.450**	**79.175.372.395**	**8.477.584.055**
4	2	1							**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**44.802.138.022**	**43.744.952.672**	**1.057.185.350**
4	**2**	**1**	**2.01**						**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**15**	**13**				**669.824.000**	**629.756.632**	**40.067.368**
4	2	1	2.01	01					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	11	10				382.863.000	362.851.632	20.011.368
4	2	1	2.01	06					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	8	8				171.615.000	155.296.500	16.318.500
4	2	1	2.01	07					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi Renja OPD	4	3				115.346.000	111.608.500	3.737.500
4	**2**	**1**	**2.02**						**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah layanan administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**19**	**19**				**5.096.352.000**	**4.851.593.728**	**244.758.272**
4	2	1	2.02	01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Perangkat Daerah	34	36				4.883.046.000	4.657.388.378	225.657.622
4	2	1	2.02	03					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah rekening sub kegiatan Perangkat Daerah	68	67				160.206.000	151.551.350	8.654.650
4	2	1	2.02	05					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah akhir tahun	5	5				16.200.000	14.869.000	1.331.000
4	2	1	2.02	07					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13	13				26.400.000	20.370.000	6.030.000
4	2	1	2.02	08					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1	1				10.500.000	7.415.000	3.085.000
4	**2**	**1**	**2.05**						**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah data dan pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah**	**18**	**11**				**348.340.000**	**258.896.571**	**89.443.429**
4	2	1	2.05	03					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah data administrasi kepegawaian	4	4				19.800.000	7.625.000	12.175.000
4	2	1	2.05	09					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah kegiatan diklat pegawai berdasarkan tusi	10	5				283.230.000	238.859.571	44.370.429
4	2	1	2.05	11					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	4	2				45.310.000	12.412.000	32.898.000
4	**2**	**1**	**2.06**						**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah layanan administrasi umum**	**348**	**357**				**1.604.430.100**	**1.501.236.288**	**103.193.812**
4	2	1	2.06	01					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3	3				110.347.200	108.619.217	1.727.983
4	2	1	2.06	02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	6	12				421.700.500	383.203.400	38.497.100
4	2	1	2.06	03					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan dan Peralatan Rumah Tangga	6	9				126.002.400	124.317.650	1.684.750
4	2	1	2.06	04					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor	168	168				142.410.000	126.257.645	16.152.355

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
4	2	1	2.06	05					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	13	13				198.542.000	181.777.076	16.764.924
4	2	1	2.06	08					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu	132	132				238.800.000	210.106.100	28.693.900
4	2	1	2.06	09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	20	20				366.628.000	366.955.200 -	327.200
4	**2**	**1**	**2.07**						**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**5**	**5**				**211.098.450**	**207.085.000**	**4.013.450**
4	2	1	2.07	05					Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel	2	0				-	-	-
4	2	1	2.07	06					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	5	5				211.098.450	207.085.000	4.013.450
4	**2**	**1**	**2.08**						**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**144**	**144**				**2.535.648.000**	**2.460.621.695**	**75.026.305**
4	2	1	2.08	01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat	144	144				39.960.000	36.631.500	3.328.500
4	2	1	2.08	02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4	4				347.088.000	335.595.795	11.492.205
4	2	1	2.08	04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	57	75				2.148.600.000	2.088.394.400	60.205.600
4	**2**	**1**	**2.09**						**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara**	**424**	**508**				**2.144.458.472**	**1.943.401.887**	**201.056.585**
4	2	1	2.09	01					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan dan jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan	4	4				331.523.000	275.324.433	56.198.567
											32	61						-
4	2	1	2.09	02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan dan jumlah kendaraan dinas operasional	26	25				490.510.000	447.403.389	43.106.611
											104	154						-
4	2	1	2.09	05					Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	224	224				183.960.000	182.118.000	1.842.000
4	2	1	2.09	06					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	14	14				170.746.200	145.684.400	25.061.800
4	2	1	2.09	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	5	5				443.987.000	430.278.341	13.708.659
											2	5						-
4	2	1	2.09	10					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan sarana prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	9	9				523.732.272	462.593.323	61.138.949
											4	7						-
4	**2**	**1**	**2.15**						**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Jumlah layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD**	**50**	**50**				**32.022.815.000**	**31.757.682.910**	**265.132.090**
4	2	1	2.15	01					Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Pimpinan dan anggota DPRD	50	50				31.521.815.000	31.310.918.910	210.896.090
4	2	1	2.15	02					Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah pakaian dinas dan atribut DPRD	6	6				426.000.000	421.370.000	4.630.000

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
4	2	1	2.15	03					Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah layanan medical check up DPRD	50	21	Kurang antusiasnya anggota DPRD dalam melakukan medical check up	Lebih intens dalam sosialisasi pentingnya medical check up kepada anggota DPRD		75.000.000	25.394.000	49.606.000
4	**2**	**1**	**2.16**						**Layanan Administrasi DPRD**	**Jumlah layanan administrasi DPRD**	**15**	**13**				**169.172.000**	**134.677.961**	**34.494.039**
4	2	1	2.16	01					Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah layanan administrasi keanggotaan DPRD	5	3	Sesuai kondisi yang ada			38.608.000	27.479.961	11.128.039
4	2	1	2.16	02					Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah kebutuhan administrasi Fraksi DPRD	7	7				16.714.000	12.603.000	4.111.000
4	2	1	2.16	03					Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	10	3				113.850.000	94.595.000	19.255.000
4	2	2							**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**							**42.850.818.428**	**35.430.419.723**	**7.420.398.705**
4	**2**	**2**	**2.01**						**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Jumlah kegiatan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**29**	**21**				**8.577.200.842**	**6.172.746.580**	**2.404.454.262**
4	2	2	2.01	01					Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah kegiatan pembahasan program pembentukan Perda	8	8				342.846.200	113.717.800	229.128.400
4	2	2	2.01	02					Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah kegiatan pembahasan rancangan Perda	8	8				2.587.795.042	1.424.379.720	1.163.415.322
4	2	2	2.01	03					Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan penyelenggaraan kajian perundang-undangan	9	1				1.077.637.700	756.048.270	321.589.430
4	2	2	2.01	04					Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah fasilitasi pelaksanaan proses penyusunan naskah akademik dan Ranperda inisiatif DPRD	4	4				4.568.921.900	3.878.600.790	690.321.110
4	**2**	**2**	**2.02**						**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Jumlah kegiatan pembahasan kebijakan anggaran**	**42**	**43**				**1.645.214.900**	**1.176.006.900**	**469.208.000**
4	2	2	2.02	01					Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah kegiatan penyusunan KUA dan PPAS	4	4				274.711.000	242.722.900	31.988.100
4	2	2	2.02	02					Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah kegiatan penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan	4	6				307.270.900	230.845.000	76.425.900
4	2	2	2.02	03					Pembahasan APBD	Jumlah kegiatan pembahasan APBD	10	15				386.639.000	244.083.500	142.555.500
4	2	2	2.02	04					Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah kegiatan pembahasan APBD Perubahan	10	9				366.289.000	239.317.000	126.972.000
4	2	2	2.02	05					Pembahasan Laporan Semester	Jumlah kegiatan pembahasan laporan semester	4	3				41.800.000	5.040.000,00	36.760.000
4	2	2	2.02	06					Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah kegiatan pembahasan pertanggungjawaban APBD	10	6				268.505.000	213.998.500	54.506.500
4	**2**	**2**	**2.03**						**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Jumlah kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan**	**280**	**50**				**799.069.000**	**421.645.700**	**377.423.300**

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
4	2	2	2.03	01					Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Hukum	54	11				109.747.500	65.195.500	44.552.000
4	2	2	2.03	02					Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Infrastruktur	54	10				109.747.500	29.300.000	80.447.500
4	2	2	2.03	03					Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Kesejahteraan Rakyat	54	10				109.747.500	28.220.000	81.527.500
4	2	2	2.03	04					Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Perekonomian	54	9				109.747.500	21.290.000	88.457.500
4	2	2	2.03	05					Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Sumber Daya Alam	54	0				-	-	-
4	2	2	2.03	07					Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran	8	8				83.600.000	31.557.700	52.042.300
4	2	2	2.03	08					Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	2	2				276.479.000	246.082.500	30.396.500
4	**2**	**2**	**2.04**						**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Jumlah fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas DPRD**	**482**	**525**				**19.328.573.000**	**17.571.295.273**	**1.757.277.727**
4	2	2	2.04	02					Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah kegiatan bimtek DPRD	6	6				2.312.788.000	1.796.251.777	516.536.223
4	2	2	2.04	03					Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	15	15				16.316.866.700	15.193.716.296	1.123.150.404
										Jumlah publikasi advetorial/iklan DPRD di media massa	375	455						
										Jumlah produk legeslasi DPRD yang dipublikasikan	12	24						
										Jumlah publikasi kegiatan DPRD	5	7						
4	2	2	2.04	05					Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli Fraksi	7	7				255.140.000	252.000.000	3.140.000
4	2	2	2.04	06					Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah kegiatan kemitraan antara DPRD, Sekretariat DPRD dan Wartawan, serta fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat (demo)	25	10				118.734.900	96.327.200	22.407.700
4	2	2	2.04	07					Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah kegiatan penyusunan program kerja DPRD	37	7				325.043.400	233.000.000	92.043.400
4	**2**	**2**	**2.05**						**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Jumlah kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat**	**6**	**6**				**2.628.463.400**	**2.323.749.150**	**304.714.250**
4	2	2	2.05	02					Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah pelaksanaan kegiatan penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	3	3				908.858.400	715.421.000	193.437.400

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
4	2	2	2.05	03					Pelaksanaan Reses	Jumlah pelaksanaan kegiatan Reses DPRD	3	3				1.719.605.000	1.608.328.150	111.276.850
4	**2**	**2**	**2.06**						**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Jumlah kegiatan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD**	**16**	**12**				**90.158.286**	**72.131.800**	**18.026.486**
4	2	2	2.06	02					Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah rapat kerja Badan kehormatan DPRD dan kegiatan pengawasan kode etik DPRD	16	12				90.158.286	72131800	18.026.486
4	**2**	**2**	**2.08**						**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Jumlah kegiatan fasilitasi tugas DPRD**	**215**	**88**				**9.782.139.000**	**7.692.844.320**	**2.089.294.680**
4	2	2	2.08	01					Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah fasilitasi kegiatan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	134	35				8.465.234.800	6.919.650.500	1.545.584.300
4	2	2	2.08	02					Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah fasilitasi kegiatan penyusunan laporan kinerja DPRD	8	7				279.918.400	247.140.000	32.778.400
4	2	2	2.08	03					Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Fasilitasi pelaksanaan tugas Badan Musyawarah DPRD	37	23				51.210.000	17.961.020	33.248.980
4	2	2	2.08	04					Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah fasilitasi tugas Pimpinan DPRD	36	23				985.775.800	508.092.800	477.683.000
3	2	5			**3.2.5**	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**												
3	**2**	**5**	**1**		**3.2.5.1**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN**	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**									**14.537.493.860**	**13.577.707.116**	**959.786.744**
5	**1**	**1**							**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**7.801.928.940**	**7.469.892.999**	**332.035.941**
5	**1**	**1**	**2**						**PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJAPI**							**25.000.000**	**11.784.500**	**13.215.500**
5	1	1	2,01	1					PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH		3 Dokumen	3 Dokumen				25.000.000	11.784.500	13.215.500
5	1	1	2,02						**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							6.524.384.000	6.233.183.705	291.200.295
5	1	1	2,02	1					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		48 Pegawai	46 Pegawai				6.524.384.000	6.233.183.705	291.200.295
5	1	1	2,06						**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**245.546.600**	**233.334.193**	**12.212.407**
5	1	1	2,06	4					Penyediaan Bahan Logistik Kantor		12 Bulan	12 Bulan				34.122.600	33.942.000	180.600
5	1	1	2,06	5					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		7 Jenis	7 Jenis				22.030.000	22.010.000	20.000
5	1	1	2,06	6					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		10 Jenis	7 Jenis				8.802.000	8.800.000	2.000
5	1	1	2,06	9					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Bulan	12 Bulan				180.592.000	168.582.193	12.009.807
5	1	1	2,08						**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							866.431.300	857.089.901	9.341.399
5	1	1	2,08	2					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		2 Rekening	2 Rekening				30.124.000	25.480.501	4.643.499
5	1	1	2,08	3					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		5 Jenis, 5 Paket Pekerjaan	5 Jenis, 5 Paket Pekerjaan				472.107.300	469.509.400	2.597.900
5	1	1	2,08	4					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12 Orang	14 Orang				364.200.000	362.100.000	2.100.000
5	1	1	2,09						**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							140.567.040	134.500.700	6.066.340

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
5	1	1	2,09	2					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		11 Unit Roda Dua, 7 Unit Roda 4	11 Unit Roda Dua, 7 Unit Roda 4				140.567.040	134.500.700	6.066.340
5	**1**	**2**							**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**							**1.430.227.870**	**1.061.353.027**	**368.874.843**
5	1	2	2,01						**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**							1.272.531.000	940.324.557	332.206.443
5	1	2	2,01	2					Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya		2 Dokumen	2 Dokumen				580.623.000	437.675.348	142.947.652
5	1	2	2,01	7					Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		**2 Dokumen**	**2 Dokumen**				691.908.000	502.649.209	189.258.791
5	1	2	2,03						**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**							157.696.870	121.028.470	36.668.400
5	1	2	2,03	3					Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		3 Dokumen	3 Dokumen				157.696.870	121.028.470	36.668.400
5	**1**	**3**							**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**							**5.305.337.050**	**5.046.461.090**	**258.875.960**
5	1	3	2,01						**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**							1.043.672.000	1.002.717.635	40.954.365
5	1	3	2,01	1					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		21 OPD	21 OPD				120.594.000	112.218.077	8.375.923
5	1	3	2,01	2					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		21 perangkat Daerah, 2 Dokumen	21 perangkat Daerah, 2 Dokumen				206.150.000	197.272.600	8.877.400
5	1	3	2,01	5					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		4 OPD	4 OPD				200.184.000	193.284.726	6.899.274
5	1	3	2,01	6					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		3 Dokumen, 4 Perangkat Daerah	3 Dokumen, 4 Perangkat Daerah				516.744.000	499.942.232	16.801.768
5	1	3	2,02						**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**							1.025.894.600	926.441.226	99.453.374
5	1	3	2,02	1					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		2 Dokumen, 2 Perangkat aDaerah	2 Dokumen, 3 Perangkat aDaerah				446.948.000	390.002.300	56.945.700
5	1	3	2,02	4					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		2 Dokumen, 3 Perangkat Daerah	2 Dokumen, 3 Perangkat Daerah				395.206.600	365.185.407	30.021.193
5	1	3	2,02	5					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		1 Dokumen, 2 Perangkat Daerah	1 Dokumen, 2 Perangkat Daerah				183.740.000	171.253.519	12.486.481
5	**1**	**3**	**2,03**						**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**							**3.235.770.450**	**3.117.302.229**	**118.468.221**
5	1	3	2,03	2					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		2 Dokumen	2 Dokumen				755.597.800	727.327.867	28.269.933

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
5	1	3	2,03	3					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		2 OPD	2 OPD				87.000.000	64.214.822	22.785.178
5	1	3	2,03	6					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		4 Dokumen	4 Dokumen				1.079.697.900	1.054.388.867	25.309.033
5	1	3	2,03	7					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		2 OPD	2 OPD				86.999.800	81.552.763	5.447.037
5	1	3	2,03	8					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		4 Dokumen	4 Dokumen				1.226.474.950	1.189.817.910	36.657.040
3	**2**	**5**	**2**		**3.2.5.2**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN**	**BPPKAD**									**1.011.641.623.743,00**	**963.675.926.368,91**	**47.965.697.374,09**
5	**2**								**KEUANGAN**							**###############**	**###############**	**47.965.697.374**
5	**2**	**1**							**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**###############**	**###############**	**10.995.707.069**
5	**2**	**1**	**2,01**						**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan**	**6 Dokumen**	**6 Dokumen**				**63.320.000,00**	**26.206.410,00**	**37.113.590**
5	2	1	2,01	01					Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen				45.030.000,00	16.270.000,00	28.760.000
5	2	1	2,01	07					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	2 Dokumen	2 Dokumen				18.290.000,00	9.936.410,00	8.353.590
5	**2**	**1**	**2,02**						**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**				**###############**	**###############**	**7.814.418.415**
5	2	1	2,02	01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan tersedianya gaji dan tunjangan	12 Bulan	12 Bulan				###############	#############	7.814.418.415
5	**2**	**1**	**2,06**						**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor**	**12 Bulan**	**12 Bulan**				**###############**	**###############**	**1.639.155.080**
5	2	1	2,06	01					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	2954 Buah	900 Buah				37.738.000,00	24.019.170,00	13.718.830
5	2	1	2,06	02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	13673 Buah	11831 Buah				1.782.146.550,00	1.088.474.611,00	693.671.939
5	2	1	2,06	03					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	1044 Buah	753 Buah				303.550.100,00	199.457.789,00	104.092.311
5	2	1	2,06	04					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya penyediaan bahan logistik	12 Bulan	12 Bulan				400.000.000,00	86.490.411,00	313.509.589
5	2	1	2,06	05					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan yang disediakan	58 Jenis	12 Jenis				628.867.100,00	426.233.450,00	202.633.650

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
5	2	1	2,06	06					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	8 Jenis	3 Jenis				15.000.000,00	8.340.000,00	6.660.000
5	2	1	2,06	09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi	71 kali	40 Kali				499.999.500,00	198.412.154,00	301.587.346
5	2	1	2,06	10					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah paket penatausahaan arsip dinamis	2 Paket	2 Paket				199.998.000,00	196.716.585,00	3.281.415
5	**2**	**1**	**2,08**						**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Kantor**	**12 Bulan**	**12 Bulan**				**###############**	**###############**	**250.791.893**
5	2	1	2,08	01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman surat	200 Surat	200 Surat				100.000.000,00	20.983.000,00	79.017.000
5	2	1	2,08	02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan				349.998.000,00	317.523.107,00	32.474.893
5	2	1	2,08	04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan kantor	48 Orang	48 Orang				1.266.000.000,00	1.126.700.000,00	139.300.000
5	**2**	**1**	**2,09**						**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah BMD OPD yang terpelihara**	**637 BMD**					**###############**	**###############**	**1.254.228.091**
5	2	1	2,09	02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang dipelihara	17 Kendaraan R4	17 Kendaraan R4				731.110.000,00	586.885.351,00	144.224.649
5	2	1	2,09	06					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	449 Jenis	225Jenis				1.001.762.987,00	263.607.625,00	738.155.362
5	2	1	2,09	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 Gedung	1 Gedung				919.854.500,00	548.006.420,00	371.848.080
5	**2**	**2**							**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**							**###############**	**###############**	**33.587.159.684**
5	**2**	**2**	**2,01**						**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Jumlah Nota Kesepakatan; Jumlah Peraturan yang Disusun; Jumlah Peraturan yang Disusun; Jumlah Peraturan yang Disusun; Jumlah Peraturan yang Disusun;**	**4 Nota Kesepakatan; 2 Ranperbup; 2 Ranperbup; 2 Ranperda; 2 Ranperda**	**4 Nota Kesepakatan; 2 Ranperbup; 2 Ranperbup; 2 Ranperda; 2 Ranperda**				**###############**	**###############**	**1.106.825.220**
5	2	2	2,01	01					Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen				50.000.000,00	18.875.144,00	31.124.856
5	2	2	2,01	02					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen Perubahan KUA PPAS yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen				50.000.500,00	12.010.491,00	37.990.009

Kode Rekening				No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
5	2	2	2,01 07					Koordinasi dan Penyusunan dan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Penjabaran APBD yang disusun; Jumlah Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD dan Penjabaran APBD yang disusun	1 Ranperda; 1 Ranperbup	1 Ranperda; 1 Ranperbup				149.999.000,00	48.990.005,00	101.008.995
5	2	2	2,01 08					Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Penjabaran Perubahan APBD yang disusun; Jumlah Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD dan Penjabaran Perubahan APBD yang disusun	1 Ranperda; 1 Ranperbup	1 Ranperda; 1 Ranperbup				149.999.000,00	62.222.120,00	87.776.880
5	2	2	2,01 09					Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Regulasi dibidang anggaran yang disusun	2 Regulasi	2 Regulasi				165.799.800,00	39.350.220,00	126.449.580
5	2	2	2,01 11					Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	6 Kali	6 Kali				1.859.971.900,00	1.137.497.000,00	722.474.900
5	**2**	**2**	**2,02**					**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Jumlah Laporan Penerimaan dan Pengeluaran**	**3 Dokumen**	**3 Dokumen**				**631.600.000,00**	**136.418.300,00**	**495.181.700**
5	2	2	2,02 01					Koodinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dokumen dan laporan yang dihasilkan	3 Dokumen dan 1 Laporan	3 Dokumen dan 1 Laporan				581.600.000,00	100.904.500,00	480.695.500
5	2	2	2,02 05					Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Jenis Laporan yang dihasilkan	5 Jenis laporan	5 Jenis laporan				50.000.000,00	35.513.800,00	14.486.200
5	**2**	**2**	**2,03**					**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Jumlah Laporan Keuangan Semester I dan Prognosis; Laporan Realisasi Anggaran Perbulan**						**150.000.000,00**	**95.323.048,00**	**54.676.952**
5	2	2	2,03 04					Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis laporan yang disusun	2 Laporan	2 Laporan				50.000.000,00	25.376.050,00	24.623.950

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
5	2	2	2,03	11					Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Ranperbup yang disusun; Jumlah Ranperda yang disusun	1 Ranperda dan 1 Ranperbup	1 Ranperda dan 1 Ranperbup				100.000.000,00	69.946.998,00	30.053.002
5	**2**	**2**	**2,04**						**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Terlaksananya Pencairan Dana Keuangan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**				**###############**	**###############**	**31.930.475.812**
5	2	2	2,04	08					Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Alokasi Dana Desa; Bagi Hasil Pajak dan Retribusi; Dana desa	100%	99,89%				##############	#############	954.087.300
5	2	2	2,04	09					Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terpenuhinya kebutuhan dana darurat	100%	62,93%				5.088.591.420,00	2.824.635.908,00	2.263.955.512
5	2	2	2,04	10					Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/kota	Jumlah Desa yang memperoleh dana bagi hasil	330 Desa	330 Desa				##############	#############	28.712.433.000
5	**2**	**3**							**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**							**###############**	**###############**	**1.024.490.000**
5	**2**	**3**	**2,01**						**Pengelolaan Barang Milik Daerah**							**###############**	**###############**	**1.024.490.000**
5	2	3	2,01	02					Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Standart Harga	1 Dokumen	1 Dokumen				373.340.000,00	342.887.000,00	30.453.000
5	2	3	2,01	05					Penatausahaan Barang Milik daerah	Jumlah laporan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen				578.248.800,00	273.911.700,00	304.337.100
5	2	3	2,01	07					Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang diperbaiki administrasinya	2000 Unit	1840 Unit				2.709.708.500,00	2.119.008.600,00	590.699.900
5	2	3	2,01	08					Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang dinilai	100 Unit	110 Unit				128.987.000,00	93.954.500,00	35.032.500
5	2	3	2,01	09					Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan dalam rangka pengawasan dan pengendalian BMD	25 Kali	1 Kali				49.990.000,00	1.680.000,00	48.310.000
5	2	3	2,01	10					Optimalisasi Penggunaa, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnah, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang dihapus; Jumlah BMD yang dipindahtangankan	50 Unit; 100 Unit	102 Unit, 100 Unit				49.996.000,00	34.338.500,00	15.657.500
5	**2**	**4**							**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**							**###############**	**###############**	**2.358.340.621**
5	**2**	**4**	**2,01**						**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**							**###############**	**###############**	**2.358.340.621**
5	2	4	2,01	01					Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Pemetaan Wajib Pajak; Peta Wajib Pajak berbasis Web	3 Jenis pajak; 3 Kecamatan	ıis Pajak, 3 Kecamatan				843.700.000,00	263.163.532,00	580.536.468
5	2	4	2,01	02					Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Aplikasi yang dibangun; Jumlah Aplikasi yang dipelihara;	1 Aplikasi; 8 Aplikasi;	0 Aplikasi yang dibangun, 3 Aplikasi yang dipelihara				1.022.468.790,00	825.512.980,00	196.955.810
5	2	4	2,01	03					Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Peserta Penyuluhan; Sosialisasi dan Cetak Buku	456 Peserta; 10 Kali	350 Peserta, 10 Kali				827.084.000,00	517.648.170,00	309.435.830
5	2	4	2,01	05					Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah SPTPD yang terdata	12000 SPTPD	22756 SPTPD				270.659.500,00	126.916.006,00	143.743.494

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
5	2	4	2,01	06					Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Objek pajak yang dikelola	20000 Objek Pajak	23062 Objek Pajak				569.942.000,00	458.091.700,00	111.850.300
5	2	4	2,01	07					Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Buku yang dijilid; jumlah Desa yang Dipoling; Jumlah Objek Pajak yang dilakukan penagihan aktif; Jumlah Objek Pajak yang dilakukan penilaian; Jumlah SDM mengikuti BIMTEK	970 Buku; 40 Desa; 60 Objek Pajak; 50 Objek Pajak; 5 Orang	970 Buku, 40 Desa, 25 Objek Pajak yang dinilai, 10 Objek Pajak yang diperiksa, 0 SDM mengikuti BIMTEK				4.428.820.000,00	4.343.376.150,00	85.443.850
5	2	4	2,01	08					Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah SKPD dan Nota Perhitungannya	6000 SKPD	7024 SKPD				169.664.000,00	71.361.999,00	98.302.001
5	2	4	2,01	11					Penagihan Pajak Daerah	Persentase capaian target terhadap tunggakan piutang	55%	40,21%				1.496.240.600,00	1.093.987.131,00	402.253.469
5	2	4	2,01	13					Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang diperiksa dan dilakukan pengawasan	450 Wajib pajak	455 Wajib Pajak				947.524.000,00	517.704.601,00	429.819.399
3	**2**	**5**	**3**		**3.2.5.3**	**KEPEGAWAIAN**	**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**									**12.310.118.390**	**10.913.304.105**	**1.396.806.285**
1	**1**	**5**	**3**						**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**7.890.826.965**	**7.675.344.925**	**215.474.040**
1	1	5	3	1					**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase fasiltasi terhadap tercapainya laporan kinerja OPD; Nilai Sakip BKD**	100%; A	100%; A	-	-	-	**30.783.900**	**30.543.200**	**240.700**
		5	3	1					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	a. Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran; b. Jumlah Dokumen Perencanaan; c. Jumlah Peserta Sosialisasi BenturanKepentigan	a. 30 buku b. 30 buku c. 70 orang	a. 30 buku b. 30 buku c. 70 orang	-	-	-	16.942.100	16.939.200	2.900
1	1	5	3	1					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	a. Jumlah Dokumen LKjIP b. Jumlah Dokumen LPPD c. Jumlah Dokumen SAKIP d. Jumlah Peserta Sosialisasi Benturan Kepentigan	a. 5 buku b. 5 buku c. 5 buku d. 70 orang	a. 5 buku b. 5 buku c. 5 buku d. 70 orang	-	-	-	13.841.800	13.604.000	237.800
		5	3	1					**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Presentase fasilitasi tercapainya laporan keuangan yang berkualitas**	100%	100%				**6.852.909.075**	**6.656.577.576**	**196.331.499**
1	1	5	3	1					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	a. Penyediaan Gaji ASN b. Penyediaan TPP ASN	a. 12 bulan b. 12 bulan	a. 12 bulan b. 12 bulan				6.847.095.175	6.650.948.776	196.146.399

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
		5	3	1					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	a. Jumlah Buku Saku SPJ b. Tersusunnya laporan keuanganyang akuntabel	a. 20 buku b. 1 laporan	a. 20 buku b. 1 laporan				3.314.000	3.129.000	185.000
1	1	5	3	1					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuanganbulanan/triwulan dan semesteran yang akuntabel	15 laporan	15 laporan				2.499.900	2.499.800	100
		5	3	1					**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase fasilitasi terhadap tercapainya pelaksanaan tupoksi perangkat daerah**	100%	100%				**669.879.690**	**660.167.779**	**9.711.911**
1	**1**	**5**	**3**	**1**					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	a. Tersedianya ATK b. Tersedianya mesin absensi Biometrik c. Tersedianya peralan kantor	a. 66 jenis b. 0 unit c. 28 unit	a. 66 jenis b. 0 unit c. 28 unit				286.811.290	279.891.655	6.919.635
1	1	5	3	1					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya kebutuhan mamin	12 bulan	12 bulan				53.988.000	53.019.000	969.000
		5	3	1					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan	18 jenis	18 jenis				152.263.900	151.048.576	1.215.324
1	**1**	**5**	**3**	**1**					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang tersedia selama setahun	3 jenis	3 jenis				9.600.000	9.600.000	-
1	1	5	3	1					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana	100%	100%				167.216.500	166.608.548	607.952
		5	3	1					**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**presentase fasilitasi terhadap tersedianya sarana dan prasana aparatur**	100%	100%				**112.233.100**	**112.233.000**	**100**
1	1	5	3	1					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	a. Tersedianya petugas kebersihan kantor b. Tersedianya tenaga pembantu administrasikantor	a. 1 orang b. 4 orang	a. 1 orang b. 4 orang				112.233.100	112.233.000	100
		5	3	1					**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**presentase fasilitasi terhadap tersedianya sarana dan prasana aparatur**	100%	100%				**225.021.200**	**215.823.370**	**9.189.830**
1	1	5	3	1					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas roda 4	6 unit	6 unit				158.410.000	149.593.370	8.816.630
		5	3	1					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan kantor	122 kali	122 kali				66.611.200	66.230.000	373.200
1	1	5	3	1					**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**							**4.419.291.425**	**3.237.959.180**	**1.181.332.245**
		5	3	2					**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Presentase Pengadaan CPNS selama setahun; Presentase tingkat akurasi data kepegawaian; Presentase peningkatan pembinaan anggota Kopri, Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian**	100%; 100%;100%; 4	100%; 100%;100%; 4				**1.625.440.825**	**967.289.991**	**658.150.834**

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
1	1	5	3	2					Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	a. Terselenggaranya bintal CPNS dan PPPK b. Terselenggaranya pengangkatan PPPK c. Terselenggaranya seleksi CPNS d. Terselenggaranya Ujian Dinas dan Ujian PI Tersusunnya dokumen Analisa Kebutuhan Pegawai	a. 0 orang b. 300 orang c. 0 orang d. 300 orang e. 1 dokumen	b. 1.782 orang e. 1 dokumen	Ujian Dinas dan Ujian PI menunggu antrian jadwal pelaksanaan dari Kanreg BKN	Tetap mengusulkan Ujian Dinas dan Ujian PI ke Kanreg BKN untuk Tahun 2023		1.270.175.250	620.411.983	649.763.267
		5	3	2					Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	a. Terselenggaranya HUT KORPRI b. Terselenggaranya pengembangan minat dan bakat anggota KORPRI	a. 1 kali b. 60 orang	a. 1 kali b. 60				91.445.575	89.658.700	1.786.875
1	1	5	3	2					Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	a. Terlaksanakan pemeliharaan dan pengembangan aplikasi SIMPEG b. Terlaksanakan pemeliharaan dan pengembangan Website	a. 1 aplikasi b. 1 aplikasi c. 1 aplikasi	100 %	-	-	- Pemeliharaan WEBSITE berlanjut di tahun 2023 dengan perencanaan Fokus pada integrasi dan kelengkapan data (jika ada anggaran di tahun 2023) - Pemeliharaan SIMPEG, berlanjut pada tahun 2023 dengan fokus pada penambahan fitur fitur pelayanan kepegawaian. - Pembuatan WA Gateway fitur pelayanan kepegawaian	263.820.000	257.219.308	6.600.692
		5	3	2					**Mutasi dan Promosi ASN**	**Presentase penataan formasi sesuai kompetensi; Presentase kenaikan pangkat tepat waktu; Presentasi KGB tepat waktu**	100%; 100%;100%					**1.649.514.400**	**1.276.697.676**	**372.816.724**
1	**1**	**5**	**3**	**2**					Pengelolaan Mutasi ASN	a. Jumlah Peserta Tes Kesehatan CPNS b. Jumlah Rapat Tim Penilai Kinerja PNS c. Terselenggaranya Pengangkatan PNS d. Terselenggaranya Penyerahan SK KenaikanJabatan Fungsional periode Jan & Juli 2022	a. 500 orang b. 24 kali c. 500 orang d. 2 kali	a. 448 orang b. 125 kali c. 89 orang d. 2 kali			- Pemeliharaan SIMPEG, berlanjut pada tahun 2023 dengan fokus pada penambahan fitur fitur pelayanan kepegawaian.	373.048.700	286.133.320	86.915.380
1	1	5	3	2					Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	a. Jumlah SK Pensiun b. Terlaksanaya Bimtek PAK c. Terselenggaranya Kenaikan Pangkat d. Terselenggaranya KGB	a. 500 orang b. 0 orang c. 2 periode d. 4000 orang	a. 405 orang b. 0 orang c. 2 periode d. 2473 orang				311.390.300	304.460.900	6.929.400

Kode Rekening				No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
														Pembuatan WA Gateway fitur pelayanan kepegawaian berlanjut di tahun 2023 (jika ada anggaran di tahun 2023); penyebaran informasi otomatis yang dilakukan secara berkala meliputi harian (ucapan ulang tahun kepada pegawai), bulanan (informasi penggunaan pakaian korpri, informasi/pengingat jadwal pengajuan pensiun), 6 bulanan			
		5	3	2				Pengelolaan Promosi ASN	a. Terselenggaranya Pelantikan Pejabat Strukturaldan/atau Fungsional b. Terselenggaranya Seleksi Terbuka JabatanPimpinan Tinggi Pratama	a. 7 kali b. 5 jabatan	a. 4 kali b. 6 jabatan				965.075.400	686.103.456	278.971.944
1	1	5	3	2				**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Presentase ASN sakit menahun yang di uji kelayakan kesehatan oleh TIM penguji kesehatan**	100%	100%				**530.580.700**	**445.768.700**	**84.812.000**
		5	3	2				Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Presentase ASN sakit menahun yang di ujikelayakan kesehatan oleh TIM penguji kesehatan	100%	100%	Sisa anggaran paling besar pada Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi non ASN sebesar Rp. 68.547.000 karena tidak semua non ASN bisa didaftarkan (terdapat kriteria-kriteria tertentu). Sisa anggaran terbesar kedua ada pada belanja jasa tenaga kesehatan sebesar Rp. 11.098.400 disebabkan karena ASN yang diuji kesehatan telah melakukan uji kesehatan Citi Scan MRI dengan			530.580.700	445.768.700	84.812.000
1	1	5	3	2				**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Presentase ASN yang mengumpulkan SKP Sesuai dengan Standart yang berlaku**	100%	100%				**613.755.500**	**548.202.813**	**65.552.687**

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
		5	3	2					Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	a. Terlaksananya monev aplikasi SIPANTAS b. Terlaksananya pemeliharaan aplikasi SiPantas c. Terselenggaranya Wokshop/Sosialisasi Sipantas	a.130 OPD b. 1 aplikasi c. 100 orang	a. 80 OPD b. 1 aplikasi c. 196 orang	a. Terdapat kekeliruan dalam penentuan target kegiatan. Jumlah OPD hanya 82. Ada 2 OPD yang tidak menggunakan aplikasi SIPANTAS, yaitu RSUD Ibnu Sina dan BPPKAD			163.597.500	153.402.347	10.195.153
1	**1**	**5**	**3**	**2**					Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	a. Terlaksananya Bimtek Purna Tugas b. Terlaksananya pengajuan Karis/KARSU/KARPEG,TASPEN/BPJS c. Terlaksananya pengajuan SLKS	a. 0 orang b. 1.000 orang c. 500 orang	a. 0 orang b. 1.100 orang c. 243 orang	SLKS 243 orang merupakan pengajuan periode November 2021 yang turun di tahun 2022. Untuk pengajuan SLKS tahun 2022 ada 800 pengajuan namun turun di tahun 2023			72.801.300	61.109.691	11.691.609
1	1	5	3	2					Pembinaan Disiplin ASN	a. Terlaksananya Bintek Aplikasi Absensi b. Terpeliharanya Server, Software dan AplikasiAbsensi c. Terpenuhinya kebutuhan ID Card Pegawai	a. 180 orang b. 3 paket c. 1.550 set	a. 309 orang b. 2 paket c. 1550 set	a. 90 org masuk pada anggaran BKPSDM, sisanya masuk pada anggaran OPD pengundang b.Belanja pemeliharaan server dan software menjadi 1 paket			329.600.400	310.461.425	19.138.975
		5	3	2					Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	a. Terlaksananya monev kedisiplinan pegawai b. Tertanganinya kasus-kasus pelanggaran disiplinASN	a. 130 OPD b. 25 kasus	a. 50 OPD b. 25 kasus	Prioritas monev disiplin pada OPD yang letaknya jauh dari kantor Bupati	Dibuat schedule untuk monev kedisiplinan selama 1 tahun		47.756.300	23.229.350	24.526.950
3	**2**	**5**	**4**		**3.2.5.4**	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**									**4.109.149.800**	**3.372.633.940**	**736.515.860**
		5	4						**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**							**4.109.149.800**	**3.372.633.940**	**736.515.860**
1	1	5	4	2					**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**Presentase ASN yang lulus dan mendapatkan sertifikat diklat teknis selama setahun**	100%	100%				**367.185.800**	**264.803.890**	**102.381.910**
		5	4	2					Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	a. Jumlah peserta Barang dan Jasa b. Jumlah peserta remidi bimtek barang jasa c. Terselenggaranya Diklat Teknis/Workshop	a. 80 orang b. 40 orang c. 20 orang	a. 80 orang b. 40 orang c. 20 orang				367.185.800	264.803.890	102.381.910

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
1	**1**	**5**	4	2					**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Presentase ASN yang lulus dan mendapatkan sertifikat diklat struktural selama setahun; Tingkat kematangan penerapan kompetensi Sumber Daya Manusia; Presentase fasilitasi terlaksananya tugas belajar ASN**	100%; 2; 100%	100%; 2; 100%				**3.741.964.000**	**3.107.830.050**	**634.133.950**
1	**1**	**5**	**4**	**2**					Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	a. Jumlah diklat fungsional analis kebijakan b. Jumlah diklat fungsional analis kepegawaian c. Jumlah peserta assesment eselon III d. Terselenggaranya Diklat Fungsional e. Terselenggaranya Diklatsar dan Prajabatan	a. 30 orang b. 15 orang c. 150 orang d. 20 orang e. 451 orang	a. 0 orang b. 11 orang c. 118 orang d. 10 orang e. 448 orang	a. Diklat fungsional analis kebijakan dilaksanakan secara online dan bekerja sama dengan BKN Pusat sehingga terbatasnya kuota dan narasumber dari BKN b. Tidak ada permasalahan c. Tidak ada permasalahan d. Keterbatasan sosialisasi terkait Diklat Dasar fungsional e. Tidak ada permasalahan			3.729.064.000	3.095.830.050	633.233.950
1	1	5	4	2					Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Terselenggaranya Bantuan Tugas Belajar ASN	5 orang	1 orang				12.900.000	12.000.000	900.000
3	**2**	**5**	**5**		**3.2.5.5**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**									**2.127.147.100**	**1.894.832.839**	**232.314.261**
5	5	2							**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**							**2.127.147.100**	**1.894.832.839**	**232.314.261**
5	**5**	**2**	**2,01**						**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**							**385.807.800**	**365.358.708**	**20.449.092**
5	5	2	2,01	12					Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan		409 Data, 2 Kali, 3 Kali, 1 Data Base	1160 Data, 2 Kali, 3 Kali, 1 Data Base				385.807.800	365.358.708	20.449.092
5	**5**	**2**	**2,03**						**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**							**946.299.000**	**746.875.202**	**199.423.798**

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
5	5	2	2,03	1					PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		3 Dokumen, 3 Kali, 250 Dokumen	3 Dokumen, 3 Kali, 613 Dokumen				**946.299.000**	**746.875.202**	199.423.798
5	**5**	**2**	**2,04**						**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**							**795.040.300**	**782.598.929**	**12.441.371**
5	5	2	2,04	1					Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		1 Aplikasi Layanan Kelitbangan, 1 Aplikasi Metadata, 1 Laporan IDSD, 2 Kategori Lomba Inovasi, 400 Operator SIPD, 1 Festifal Inovasi (Ginovest)	1 Aplikasi Layanan Kelitbangan, 1 Aplikasi Metadata, 1 Laporan IDSD, 2 Kategori Lomba Inovasi, 400 Operator SIPD, 1 Festifal Inovasi (Ginovest)				795.040.300	782.598.929	12.441.371
3	2	6			3.2.6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN												
3	**2**	**6**	**1**		**3.2.6.1**	**INSPEKTORAT DAERAH**	**INSPEKTORAT DAERAH**									**17.038.045.306**	**13.609.868.912**	**3.428.176.394**
6	**01**	**01**							**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketercapaian sasaran program OPD**	**100%**	**139%**				**13.241.435.706**	**11.286.234.765**	**1.955.200.941**
6	**01**	**01**	**2.01**						**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah (Buku)**	**24**	**24**				**162.002.200**	**126.138.363**	**35.863.837**
6	01	01	2.01	01					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan yang di Cetak	24	24				53.555.800	45.393.000	8.162.800
6	01	01	2.01	02					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Laporan yang di Cetak	24	24				9.999.600	8.110.000	1.889.600
6	01	01	2.01	03					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Laporan yang di Cetak	24	24				9.999.600	8.317.500	1.682.100
6	01	01	2.01	04					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Laporan yang di Cetak	24	24				9.999.600	4.570.000	5.429.600
6	01	01	2.01	05					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Laporan yang di Cetak	24	24				9.999.600	8.285.000	1.714.600
6	01	01	2.01	06					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan yang di Cetak	24	24				34.106.000	23.516.639	10.589.361
6	01	01	2.01	07					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan yang di Cetak	24	24				34.342.000	27.946.224	6.395.776
6	**01**	**01**	**2.02**						**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	**12**	**12**				**7.116.464.091**	**7.064.110.423**	**52.353.668**
6	01	01	2.02	01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	12				7.090.544.091	7.047.310.423	43.233.668
6	01	01	2.02	07					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan yang di Cetak	24	24				15.240.000	12.110.000	3.130.000
6	01	01	2.02	08					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan yang di Cetak	24	24				10.680.000	4.690.000	5.990.000
6	**01**	**01**	**2.05**						**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Pelaksanaan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)**	**30**	**103**				**751.310.000**	**248.824.996**	**502.485.004**
6	01	01	2.05	09					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pelaksanaan Pel	30	103				751.310.000	248.824.996	502.485.004
6	**01**	**01**	**2.06**						**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Jenis Mamin**	**6**	**8**				**884.959.200**	**300.341.589**	**584.617.611**
6	01	01	2.06	04					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Mamin	6	8				126.730.000	62.642.905	64.087.095

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
6	01	01	2.06	05					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Cetakan dan Penggandaan	12	12				46.018.200	44.238.785	1.779.415
6	01	01	2.06	06					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Media yang Berlangganan	9	9				34.998.000	32.980.000	2.018.000
6	01	01	2.06	09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang terfasilitasi	250	280				677.213.000	160.479.899	516.733.101
6	**01**	**01**	**2.07**						**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**10**	**10**				**3.512.489.800**	**2.877.816.040**	**634.673.760**
6	01	01	2.07	02					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Operasional	13	13				2.535.998.000	2.422.800.000	113.198.000
6	01	01	2.07	05					Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Pengadaan Mebel	5	5				56.344.000	55.953.000	391.000
6	01	01	2.07	06					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10	10				571.146.800	399.063.040	172.083.760
6	01	01	2.07	09					Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1	0	Anggaran untuk pembangunan gedung Inspektorat Tahun 2023 dikepras oleh Tim Anggaran Kab .Gresik.	jika ada tambahan anggaran maka pengajuan/usulan lagi, jika tidak diperbolehkan maka digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pengawasan yang lain		349.001.000	0	349.001.000
6	**01**	**01**	**2.08**						**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Tenaga Honorer Lepas yang Terbayarkan**	**8**	**8**				**233.865.000**	**229.253.401**	**4.611.599**
6	01	01	2.08	01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim	390	953				7.200.000	3.653.150	3.546.850
6	01	01	2.08	02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Internet Servis Provider	12	9				8.265.000	7.200.251	1.064.749
6	01	01	2.08	04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Honorer Lepas yang Terbayarkan	8	8				218.400.000	218.400.000	0
6	**01**	**01**	**2.09**						**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara**	**100**	**100**				**580.345.415**	**439.749.953**	**140.595.462**
6	01	01	2.09	01					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaran Eselon II yang Terpelihara	1	1				77.901.000	46.699.533	31.201.467
6	01	01	2.09	02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional yang Terpelihara	16	16				356.455.000	283.619.120	72.835.880
6	01	01	2.09	05					Pemeliharaan Mebel	Jumlah Jenis Pemeliharaan Mebel	5	5				11.359.360	11.250.000	109.360
6	01	01	2.09	06					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	100	100				88.262.055	53.726.800	34.535.255
6	01	01	2.09	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1				46.368.000	44.454.500	1.913.500
6	**01**	**02**							**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase tindak lanjut audit internal**	**100%**	**94,29%**				**1.939.404.600**	**1.092.645.187**	**846.759.413**
										Persentase tindak lanjut audit eksternal	**100%**	**78,76%**						

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
										Persentase tindak lanjut aduan masyarakat	**100%**	**100%**						
										Nilai evaluasi Internal AKIP OPD dengan persentase minimal A	**100%**	**79%**						
6	**01**	**02**	**2.01**						**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Daerah**	**15**	**49**				**1.648.823.600**	**964.638.187**	**684.185.413**
6	01	02	2.01	01					Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Daerah	21	91				496.965.800	312.191.146	184.774.654
6	01	02	2.01	02					Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Daerah	15	49				276.339.000	154.461.700	121.877.300
6	01	02	2.01	03					Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Kinerja	13	16				181.508.000	42.092.500	139.415.500
6	01	02	2.01	04					Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Keuangan	31	89				410.483.000	245.999.500	164.483.500
6	01	02	2.01	05					Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	8	18				61.629.800	28.157.000	33.472.800
6	01	02	2.01	06					Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Kerja Sama Pengawasan Internal	2	0	1. belum ada pembaharuan (update) kesepakatan Perjanjian kerjasama antara Pemda kab Gresik dengan kejaksaan negeri gresik dan kepolisian resort gresik tentang koordinasi APIP dengan APH dalam penanganan laporan/ pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi. 2. belum ada pembaharuan (update) nota kesepakatan	Koordinasi dan komunikasi yang efektif akan dilakukan secara berkala dengan pihak yang terkait dengan kesepakatan ini.		8.413.000	0	8.413.000
6	01	02	2.01	07					Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Monev TLHP temuan BPK dan APIP	2	4				213.485.000	181.736.341	31.748.659
6	**01**	**02**	**2.02**						**Penyelenggaraan Pengawasan dengar**	**Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**8**	**10**				**290.581.000**	**128.007.000**	**162.574.000**
6	01	02	2.02	01					Penanganan Penyelesaian Kerugian N	Jumlah Laporan Hasil Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	4	9				105.461.000	28.521.000	76.940.000
6	01	02	2.02	02					Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	8	10				185.120.000	99.486.000	85.634.000
6	**01**	**03**							**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,**	**Persentase Maturitas SPIP OPD yang dievaluasi**	**100%**	**100%**				**1.857.205.000**	**1.230.988.960**	**626.216.040**

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
6	**01**	**03**	**2.02**						**Pendampingan dan Asistensi**	**Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi**	**12**	**12**				**1.857.205.000**	**1.230.988.960**	**626.216.040**
6	01	03	2.02	01					Pendampingan dan Asistensi Urusan F	Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Pengawalan OPD Urusan Pemerintahan Daerah	12	12				570.588.000	226.662.629	343.925.371
6	01	03	2.02	02					Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, d	Jumlah Laporan kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	1	4				211.880.000	161.256.246	50.623.754
6	01	03	2.02	03					Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	12	12				788.366.000	658.931.173	129.434.827
6	01	03	2.02	04					Pendampingan, Asistensi dan Verifika	Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1	3				286.371.000	184.138.912	102.232.088
3	2	7			3.2.7	UNSUR KEWILAYAHAN												
3	**2**	**7**	**1**		**3.2.7.1**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEWILAYAHAN**	**KECAMATAN GRESIK**									**27.441.218.077**	**24.282.153.908**	**3.159.064.169**
7	**01**	**01**							**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketercapaian sasaran program OPD**	**100%**	**100%**				**14.623.263.170**	**12.595.226.943**	**2.028.036.227**
7	**01**	**01**	**2.01**						**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja dan Keuangan**	**4 Dokumen**	**4 Dokumen**				**21.024.000**	**16.450.000**	**4.574.000**
7	01	01	2.01	01					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja SKPD dan Renstra SKPD	17 Buku	17 Buku				4.580.000	4.580.000	-
7	01	01	2.01	02					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	10 Buku	10 Buku				6.130.000	6.130.000	-
7	01	01	2.01	04					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	10 Buku	10 Buku				5.740.000	5.740.000	-
7	01	01	2.01	06					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Dokumen	8 Dokumen				4.574.000	0	4.574.000
7	**01**	**01**	**2.02**						**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja dan Administrasi Keuangan**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**				**13.278.214.000**	**11.366.943.675**	**1.911.270.325**
7	01	01	2.02	01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN di Lingkungan Kecamatan Gresik	130 Orang	86 Orang	Belum terpenuhinya jabatan kosong ASN pada Kelurahan			13.268.617.000	11.357.346.675	1.911.270.325

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
7	01	01	2.02	05					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir Tahun	13 Buku	13 Buku				9.597.000	9.597.000	-
7	**01**	**01**	**2,05**						**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Pelaksanaan Administrasi Sumberdaya Aparatur di Kecamatan**	**4 Jenis**	**4 Jenis**				**100.568.000**	**93.047.000**	**7.521.000**
7	01	01	2,05	10					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	21 Desa / Kelurahan	21 Desa / Kelurahan				24.097.000	24.097.000	-
7	01	01	2,05	11					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta pembinaan pengelolahan dana kelurahan, Sosialisasi Penyuluhan Kearsipan, Bimtek SDM	21 Desa / Kelurahan	21 Desa / Kelurahan				76.471.000	68.950.000	7.521.000
7	**01**	**01**	**2.06**						**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Fasilitasi terhadap Pelaksnaan Tupoksi Perangkat Daerah**	**5 Rekening**	**5 Rekening**				**548.591.700**	**482.201.320**	**66.390.380**
7	01	01	2.06	02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor	4 Jenis	4 Jenis				267.621.700	240.435.320	27.186.380
7	01	01	2.06	04					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kebutuhan makanan dan minuman	3 Jenis	3 Jenis				185.106.000	184.596.000	510.000
7	01	01	2.06	05					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	8 Jenis	8 Jenis				17.220.000	15.520.000	1.700.000
7	01	01	2.06	06					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	2 Jenis	2 Jenis				9.888.000	6.888.000	3.000.000
7	01	01	2.06	09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	2 Jenis	2 Jenis				68.756.000	34.762.000	33.994.000
7	**01**	**01**	**2.08**						**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah**	**3 Jenis**	**3 Jenis**				**404.597.470**	**392.834.039**	**11.763.431**
6	01	01	2.08	01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pembayaran jasa administrasi kantor	12 Bulan	12 Bulan				303.600.000	303.600.000	
7	01	01	2.08	02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah fasilitasi rekening listrik, air dan telepon	12 Bulan	12 Bulan				100.997.470	89.234.039	11.763.431
7	**01**	**01**	**2.09**						**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah fasilitasi terhadap sarana prasarana Aparatur**	**3 Jenis**	**3 Jenis**				**270.268.000**	**243.750.909**	**26.517.091**
7	01	01	2.09	02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah fasilitasi pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	4 Unit	4 Unit				108.780.000	91.451.920	17.328.080
7	01	01	2.09	06					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Fasilitasi perawatan peralatan kerja	3 Jenis	3 Jenis				21.860.000	19.410.000	2.450.000
7	01	01	2.09	9					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah fasilitasi pemeliharaan gedung kantor	1 Unit	1 Unit				139.628.000	132.888.989	6.739.011
7	**01**	**02**							**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHASN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tingkat Kematangan Pelayanan Publik**	4	4				**2.582.568.962**	**2.314.838.974**	**267.729.988**

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
7	**01**	**02**	**2,02**						**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksnakanan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Jumlah Kelurahan yang menerapkan SPM**	**83**	**85,28**				**2.582.568.962**	**2.314.838.974**	**267.729.988**
7	01	02	2,02	02					Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal diWilayah Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kelurahan	83	85,28				2.555.072.962	2.288.242.974	266.829.988
7	01	02	2,02	03					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pelayanan publik dilingkup kecamatan sesuai SOP	100	100				27.496.000	26.596.000	900.000
7	**01**	**03**							**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYAF**	**1. Persentase Musrenbang Kelurahan yang difasilitasi 2. Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi 3. Peresntase Pelaku Ekonomi di Wilayah Kecamatan yang difasilitasi**	**100 Persen**	**100 Persen**				**9.733.788.145**	**8.907.552.191**	**826.235.954**
7	**01**	**3**	**2,01**						**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan D**	**1. Jumlah Usulan Kegiatan Perencanaan Pembangunan pada Desa dan Kelurahan 2. Jumlah Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi**	**21 Desa / Kelurahan**	**21 Desa / Kelurahan**				**134.164.800**	**130.029.800**	**4.135.000**
7	01	02	2.01	01					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	Jumlah peserta musyawarah perencanaan pembangunan	21 Desa / Kelurahan	21 Desa / Kelurahan				28.909.200	24.774.200	4.135.000
7	01	02	2.01	03					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peserta pelatihan Jumlah Peserta Koperasi Jumlah Peserta Bumdes Jumlah Peserta UKM	21 Desa / Kelurahan	21 Desa / Kelurahan				105.255.600	105.255.600	-
7	**01**	**3**	**2,02**						**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah Kelurahan di Kecamatan Gresik**	**16 Kelurahan**	**16 Kelurahan**				**9.599.623.345**	**8.777.522.391**	**822.100.954**
7	01	3	2,02	02					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan	6 Jenis	6 Jenis				6.910.948.345	6.266.101.191	644.847.154
7	01	3	2,02	03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Kegiatan	10 Kegiatan				2.688.675.000	2.511.421.200	177.253.800
7	**01**	**04**							**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi**	**100 Persen**	**100 Persen**				**140.121.000**	**136.951.000**	**3.170.000**
7	**01**	**04**	**2,01**						**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Penanganan Konflik di Kecamatan**	**24 Kali**	**24 Kali**				**131.101.000**	**128.311.000**	**2.790.000**

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
7	01	04	2,01	01					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengendalian keamanan kenyaman lingkungan Jumlah peserta pembinaan linmas Jumlah peserta penyuluhan pencegahan peredaran / penggunaan miras dan narkoba	21 Desa / Kelurahan	21 Desa / Kelurahan				131.101.000	128.311.000	2.790.000
7	**01**	**04**	**2,02**						**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Penegakan Perda dan Perkada**	**21 Desa / Kelurahan**	**21 Desa / Kelurahan**				**9.020.000**	**8.640.000**	**380.000**
7	01	04	2,02	01					Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan /atau Kepolosian Negara Republik Indonesia	Jumlah pelaksanaan monitoring	21 Desa / Kelurahan	21 Desa / Kelurahan				9.020.000	8.640.000	380.000
7	**01**	**06**							**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGA**	**1. Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu 2. Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu 3. Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina**	**100 Persen**	**100 Persen**				**361.476.800**	**327.584.800**	**33.892.000**
7	**01**	**06**	**2,01**						**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan**	**100 Persen**	**100 Persen**				**361.476.800**	**327.584.800**	**33.892.000**
7	01	06	2.01	03					Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	5 Desa	5 Desa				24.951.000	24.951.000	-
7	01	06	2,01	05					Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala De	Jumlah Peserta yang difasilitasi	21 Desa / Kelurahan	21 Desa / Kelurahan				17.141.000	16.673.000	468.000
7	01	06	2.01	06					Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah monitoring pelaksanakan Pilkades	5 Desa	5 Desa				15.755.000	15.755.000	-
7	01	06	2,01	12					Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan	21 Desa / Kelurahan	21 Desa / Kelurahan				240.985.000	209.361.000	31.624.000
7	01	06	2.01	16					Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Pembangunan Desa	21 Desa / Kelurahan	21 Desa / Kelurahan				62.644.800	60.844.800	1.800.000
3	**2**	**7**	**2**		**3.2.7.2**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEWILAYAHAN**	**KECAMATAN KEBOMAS**									**18.401.548.085**	**17.430.005.177**	**971.542.908**
7	**01**	**01**							**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketercapaian sasaran program OPD**	**100%**	**100%**				**9.862.159.215**	**9.251.421.156,00**	**610.738.059**
7	**01**	**01**	**2.01**						**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja dan Keuangan**	**4 Dokumen**	**4 Dokumen**				**31.919.400**	**30.897.000,00**	**1.022.400**
7	01	01	2.01	01					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				9.228.000	8.547.000,00	681.000

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
7	01	01	2.01	02					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen				7.950.000	7.950.000,00	-
7	01	01	2.01	04					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen				7.020.000	7.020.000,00	-
7	01	01	2.01	06					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Laporan	4 Laporan				7.721.400	7.380.000,00	341.400
7	**01**	**01**	**2.02**						**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja dan Administrasi Keuangan**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**				**8.536.680.200**	**7.988.859.140,00**	**547.821.060**
7	01	01	2.02	01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang	62 Orang				8.528.533.000	7.981.468.140,00	547.064.860
7	01	01	2.02	05					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				8.147.200	7.391.000,00	756.200
7	**01**	**01**	**2,05**						**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Pelaksanaan Administrasi Sumberdaya Aparatur di Kecamatan**	**2 Kali**	**2 Kali**				**90.416.000**	**75.034.000,00**	**15.382.000**
7	01	01	2,05	10					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	80 Orang	80 Orang				45.850.000	38.476.000,00	7.374.000
7	01	01	2,05	11					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	25 Orang				44.566.000	36.558.000,00	8.008.000
7	**01**	**01**	**2.06**						**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Fasilitasi terhadap Pelaksnaan Tupoksi Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**				**395.673.025**	**384.406.350,00**	**11.266.675**
7	01	01	2.06	02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket				298.866.025	294.621.450,00	4.244.575
7	01	01	2.06	04					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				33.079.000	33.075.900,00	3.100
7	01	01	2.06	05					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				19.431.000	18.888.500,00	542.500
7	01	01	2.06	06					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen				4.805.000	4.650.000,00	155.000

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
7	01	01	2.06	09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				39.492.000	33.170.500,00	6.321.500
7	**01**	**01**	**2.08**						**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**				**603.049.000**	**574.514.916,00**	**28.534.084**
7	01	01	2.08	02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				89.249.000	61.673.916,00	27.575.084
7	01	01	2.08	03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				103.400.000	102.441.000,00	959.000
7	01	01	2.08	04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan				410.400.000	410.400.000,00	-
7	**01**	**01**	**2.09**						**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang dan Aset Milik Daerah yang terpelihara**	**5 Jenis**	**5 Jenis**				**204.421.590**	**197.709.750,00**	**6.711.840**
7	01	01	2.09	02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Unit	2 Unit				79.696.000	79.290.750,00	405.250
7	01	01	2.09	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit				40.775.590	40.517.000,00	258.590
7	01	01	2.09	10					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				83.950.000	77.902.000,00	6.048.000
7	**01**	**02**							**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHASN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tingkat Kematangan Pelayanan Publik**	**4**	**4**				**1.827.213.770**	**1.760.195.261,00**	**67.018.509**
7	**01**	**02**	**2,02**						**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksnakanan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Jumlah Kelurahan yang menerapkan SPM**	**10**	**10**				**1.827.213.770**	**1.760.195.261,00**	**67.018.509**
7	01	02	2,02	02					Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	10 Lapoan	10 Lapoan				1.820.986.770	1.753.968.261,00	67.018.509
7	01	02	2,02	03					Peningkatan efektifitas Pelaksnaan Pelayana Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	1 laporan				6.227.000	6.227.000,00	-

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
7	**01**	**03**							**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYAF**	**1. Persentase Musrenbang Kelurahan yang difasilitasi 2. Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi 3. Peresntase Pelaku Ekonomi di Wilayah Kecamatan yang difasilitasi**	**100 Persen**	**100 Persen**				**6.108.165.100**	**5.874.591.570,00**	**233.573.530**
7	**01**	**3**	**2,01**						**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan D**	**1. Jumlah Usulan Kegiatan Perencanaan Pembangunan pada Desa dan Kelurahan 2. Jumlah Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi**	**100 Persen**	**100 Persen**				**143.761.000**	**125.658.000,00**	**18.103.000**
7	01	02	2.01	01					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Unit	4 Unit				30.438.000	29.967.000,00	471.000
7	01	02	2.01	03					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Pokmas/Ormas	4 Pokmas/Ormas				113.323.000	95.691.000,00	17.632.000
7	**01**	**3**	**2,02**						**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah Kelurahan di Kecamatan Kebomas**	**10 Kelurahan**	**10 Kelurahan**				**5.964.404.100**	**5.748.933.570,00**	**215.470.530**
7	01	3	2,02	02					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	21 Lembaga	21 Lembaga				4.862.998.600	4.689.078.970,00	173.919.630
7	01	3	2,02	03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Laporan	1 Laporan				1.101.405.500	1.059.854.600,00	41.550.900
7	**01**	**04**							**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi**	**100 Persen**	**100 Persen**				**131.461.000**	**117.916.000,00**	**13.545.000**
7	**01**	**04**	**2,01**						**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Penanganan Konflik di Kecamatan**	**24 Kali**	**24 Kali**				**119.676.000**	**107.231.000**	**12.445.000**
7	01	04	2,01	01					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan				119.676.000	107.231.000,00	12.445.000
7	**01**	**04**	**2,02**						**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Penegakan Perda dan Perkada**	**12 Bulan**	**12 Bulan**				**11.785.000**	**10.685.000,00**	**1.100.000**

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
7	01	04	2,02	01					Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan /atau Kepolosian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik	12 Laporan	12 Laporan				11.785.000	10.685.000,00	1.100.000
7	**01**	**06**							**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGA**	**1. Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu 2. Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu 3. Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina**	**100 Persen**	**100 Persen**				**472.549.000**	**425.881.190,00**	**46.667.810**
7	**01**	**06**	**2,01**						**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan**	**100 Persen**	**100 Persen**				**472.549.000**	**425.881.190,00**	**46.667.810**
7	01	06	2.01	03					Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11 Dokumen	11 Dokumen				29.605.000	29.422.000,00	183.000
7	01	06	2,01	05					Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala De	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	11 Dokumen	11 Dokumen				33.840.000	27.805.000,00	6.035.000
7	01	06	2.01	07					Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	11 Dokumen	11 Dokumen				27.970.000	22.370.000,00	5.600.000
7	01	06	2,01	12					Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, dan Fungsi Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4 Dokumen	4 Dokumen				300.823.000	274.218.190,00	26.604.810
7	01	06	2.01	16					Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 Dokumen	1 Dokumen				70.125.000	62.650.000,00	7.475.000
7	01	06	2.01	17					Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	11 Laporan	11 Laporan				10.186.000	9.416.000,00	770.000
3	**2**	**7**	**3**		**3.2.7.3**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEWILAYAHAN**	**KECAMATAN MANYAR**									**4.429.985.000**	**4.279.626.570**	**150.358.430**
7	**01**	**01**							**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUAPTEN/KOTA**	Presentase ketercapaian sasaran program OPD	100%	100%				**3.657.302.700**	**3.527.235.270**	**130.067.430**

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
7	**01**	**01**	**2**	**01**					**Perencanaan , Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Prosentase terlaksanannya koordinasi penyusunan anggran dan monev evaluasi renja	100%	100%				**4.839.900**	**4.839.900**	**-**
7	01	01	2	01	01				*Penyusunan dokumen Perencanaan Pe*	Prosentase terselesaikannya dokumen perencanaan dan penganggaran OPD	100%	100%				2.539.900	2.539.900	-
7	01	01	2	01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prosentase terselesaikannya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	100%				2.300.000	2.300.000	-
7	01	01	2	02					**Administrasi Keuangan Perangkat Da**	Presentase Administrasi	100%	100%				**2.953.040.000**	**2.822.972.570**	**130.067.430**
7	01	01	2	02	01				Penyediaan Gaji dan Tujangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan				2.949.651.000	2.819.583.570	130.067.430
7	01	01	2	02	05				*Koordinasi dan Penyusunan Laporan K*	Presentase terselasaikannya laporan keuangan yang disusun	100%	100%				3.389.000	3.389.000	-
7	01	01	**2**	**06**					**Administrasi Umum Perangkat daera**	Presentase Administrasi Umum Perangkat daerah	100%	100%				**139.920.800**	**139.920.800**	**-**
7	01	01	2	06	02				*Penyediaan Peraltan dan perlengkapa*	Presentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%				86.772.100	86.772.100	-
7	01	01	2	06	04				*Penyediaan bahan logistik kantor*	Presentase tersedianya bahan logistik	100%	100%				20.521.000	20.521.000	-
7	01	01	2	06	05				*Penyediaan Barang Cetakan dan Peng*	Presentase tersedianyan Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	100%				5.625.700	5.625.700	-
7	01	01	2	06	06				*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratu*	Presentase tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%				2.240.000	2.240.000	-
7	01	01	2	06	09				*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	Presentase pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100%				24.762.000	24.762.000	-
7	01	01	**2**	**08**					**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	100%	100%				**395.964.000**	**395.964.000**	**-**
7	01	01	**2**	**08**	02				*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	Jumlah fasilitasi pembayaran listrik,air, telepon	12 Bulan	12 Bulan				53.964.000	53.964.000	-
7	01	01	**2**	**08**	04				*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Ka*	Jumlah fasilitasi pembayaran jasa pelayanan dan administrasi kantor	12 bulan	12 bulan				342.000.000	342.000.000	-
7	01	01	**2**	**09**					**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	100%	100%				**163.538.000**	**163.538.000**	**-**

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
7	01	01	**2**	**09**	02				*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	Presentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	100%				51.500.000	51.500.000	-
7	01	01	**2**	**09**	06				*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin La*	Presentase Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	100%				23.610.000	23.610.000	-
7	01	01	**2**	**09**	09				*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Ka*	Presentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor ndan Bangunan Lainnya	100%	100%				88.428.000	88.428.000	-
7	01	02							**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Presentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dibina	100%	100%				**58.879.900**	**56.079.900**	**2.800.000**
7	01	02	2	02					**Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan**		100%	100%				**58.879.900**	**56.079.900**	**2.800.000**
7	01	02	2	02	03				*Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan*	Presentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%	100%				58.879.900	56.079.900	2.800.000
7	01	03							**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Presentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dibina	100%	100%				**422.222.600**	**409.849.600**	**12.373.000**
7	01	03	2	01					**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa**	Presentase Koordinasi K	100%	100%				**123.190.000**	**119.590.000**	**3.600.000**
7	01	03	2	01	01				*Peningkatan Partisipasin Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan pembangunan di Desa*	Presentase Peningkatan Partisipasin Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan pembangunan di Desa	100%	100%				123.190.000	119.590.000	3.600.000
7	01	03	2	03					**Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan**	Presentase Pemberdayaa	100%	100%				**299.032.600**	**290.259.600**	**8.773.000**
7	01	03	2	03	01				*Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan*	Presentase Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan	100%	100%				235.152.700	226.379.700	8.773.000
7	01	03	2	03	04				*Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat*	Presentase Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	100%	100%				63.879.900	63.879.900	-
7	01	04							**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Presentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%				**155.790.000**	**154.740.000**	**1.050.000**
7	01	04	2	01					**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	Presentase koordinasi upaya penyelenggaraan kentraman dna ketertiban umum	100%	100%				**155.790.000**	**154.740.000**	**1.050.000**
7	01	04	2	01	01				*Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan*	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan				155.790.000	154.740.000	1.050.000

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
7	01	06							**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Prosentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	100%				**135.789.800**	**131.721.800**	**4.068.000**
7	01	06	2	01					**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa**	Presentase kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa	100%	100%				**135.789.800**	**131.721.800**	**4.068.000**
7	01	06	2	01	03				*Fasilitasi Pengelolaan Keuangan desa*	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	23 Dokumen	23 Dokumen				120.790.000	116.722.000	4.068.000
7	01	06	2	01	16				*Fasilitasi Penyusunan Program dan pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat Desa*	Jumlah dokumen Fasilitasi Penyusunan Program dan pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat Desa	23 Dokumen	23 Dokumen				14.999.800	14.999.800	-
3	**2**	**7**	**4**		**3.2.7.4**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEWILAYAHAN**	**KECAMATAN CERME**									**4.383.812.000,00**	**4.116.136.772,00**	**267.675.228,00**
7	**01**	**01**							**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD**	**100%**	96%				**3.599.669.200,00**	**3.466.100.772,00**	**133.568.428,00**
7	**01**	**01**	**01**						**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan keuangan dan kinerja SKPD**	**100%**	99%				**25.000.000,00**	**24.750.000,00**	**250.000,00**
7	01	01	01	01					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	0%	0%				-	-	-
7	01	01	01	02					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	100%	100%				5.000.000,00	5.000.000,00	-
7	01	01	01	03					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD	100%	99%				5.000.000,00	4.950.000,00	50.000,00
7	01	01	01	04					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	100%	100%				5.000.000,00	5.000.000,00	-
7	01	01	01	05					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD	100%	100%				5.000.000,00	5.000.000,00	-
7	01	01	01	06					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja yang akuntabel	100%	96%				5.000.000,00	4.800.000,00	200.000,00
7	01	01	01	07					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah evaluasi kinerja perangkat daerah	0%	0,00%				-	-	-
7	**01**	**01**	**02**						**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen pelaporan kinerja dan administrasi keuangan**	**100%**	96%				**2.831.352.000,00**	**2.721.449.736,00**	**109.902.264,00**
7	01	01	02	01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN selama 1 tahun	100%	96%				2.826.352.000,00	2.717.049.736,00	109.302.264,00
7	01	01	02	05					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun	100%	88%				5.000.000,00	4.400.000,00	600.000,00
7	**01**	**01**	**06**						**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen pelaporan kinerja dan administrasi keuangan**	**100%**	96%				**291.327.900,00**	**278.647.000,00**	**12.680.900,00**
									Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	**100%**	97%				9.998.000,00	9.734.000,00	264.000,00

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
7	01	01	06	02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	98%				114.938.000,00	112.422.000,00	2.516.000,00
									Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga	100%	97%				48.001.900,00	46.794.000,00	1.207.900,00
7	01	01	06	04					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik	100%	99%				46.500.000,00	45.815.000,00	685.000,00
7	01	01	06	05					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	100%	99%				34.560.000,00	34.200.000,00	360.000,00
7	01	01	06	06					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan / majalah	100%	100%				3.000.000,00	3.000.000,00	-
7	01	01	06	09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi	100%	78%				34.330.000,00	26.682.000,00	7.648.000,00
7	**01**	**01**	**08**						**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya pembayaran jasa-jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	99%				**362.039.000,00**	**356.779.036,00**	**5.259.964,00**
7	01	01	08	01					Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Jumlah fasilitasi pembayaran jasa administrasi kantor	100%	100%				313.500.000,00	313.500.000,00	-
7	01	01	08	02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah fasilitasi pembayaran listrik, air bersih dan internet berlangganan	100%	88%				44.039.000,00	38.779.036,00	5.259.964,00
7	01	01	08	03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%				4.500.000,00	4.500.000,00	-
7	**01**	**01**	**09**						**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah kendaraan dinas, peralatan kantor dan gedung kantor yang dirawat**	**100%**	94%				**89.950.300,00**	**84.475.000,00**	**5.475.300,00**
7	01	01	09	01					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah fasilitasi pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	100%	91%				47.100.000,00	42.650.000,00	4.450.000,00
									Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah fasilitasi pemeliharaan peralatan Kantor	100%	96%				17.927.500,00	17.275.000,00	652.500,00
7	01	01	09	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah fasilitasi gedung kantor	100%	99%				24.922.800,00	24.550.000,00	372.800,00
7	**01**	**02**							**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Tingkat Kematangan Pelayanan Publik**	**100%**	84%				**75.500.000,00**	**63.260.000,00**	**12.240.000,00**
7	**01**	**02**	**02**						**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah di kecamatan**	**100%**	79%				**36.500.000,00**	**28.935.000,00**	**7.565.000,00**
7	01	02	02	02					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan peningkatan Kematangan Pelayanan Publik	100%	79%				36.500.000,00	28.935.000,00	7.565.000,00
									Pelaksanaan Urusan Pemerintahan ya	Terlaksannya urusan yang dilimpahkan kepada camat	**100%**	88%				**39.000.000,00**	**34.325.000,00**	**4.675.000,00**

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
7	01	02	02	03					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelaksanaan FGD dan Sosialisasi perijinan pengurusan NIB	100%	88%				39.000.000,00	34.325.000,00	4.675.000,00
7	**01**	**03**							**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase Musrenbag Kelurahan yang difasilitasi**	**100%**	83%				**311.992.800,00**	**257.631.000,00**	**54.361.800,00**
7	**01**	**03**	**01**						**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah kegiatan pemberdayaan desa**	**100%**	92%				**67.500.000,00**	**61.885.000,00**	**5.615.000,00**
7	01	03	01	01					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	100%	100%				33.000.000,00	33.000.000,00	-
7	01	03	01	03					Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pemberdayaan desa yang difasilitasi	100%	84%				34.500.000,00	28.885.000,00	5.615.000,00
									Pemberdayaan Lembaga Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina (PKK,Kartar,LPTQ,UMKM,PERWOSI)	100%	80%				244.492.800,00	195.746.000,00	48.746.800,00
									Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah fasilitasi lembaga kemasyarakatan dibidang pemberdayaan masyarakat	100%	81%				203.293.000,00	164.011.000,00	39.282.000,00
									Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah pelaku ekonomi diwilayah kecamatan yang difasilitasi	100%	77%				41.199.800,00	31.735.000,00	9.464.800,00
7	**01**	**04**							**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum**	**100%**	90%				**146.900.000,00**	**132.092.000,00**	**14.808.000,00**
7	**01**	**04**	**01**						**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**100%**	93%				**112.300.000,00**	**104.367.000,00**	**7.933.000,00**
7	01	04	01	01					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100%	93%				112.300.000,00	104.367.000,00	7.933.000,00
7	**01**	**04**	**02**						**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Jumlah penerapan dan penegakan peraturan kepala daerah**	**100%**	80%				**34.600.000,00**	**27.725.000,00**	**6.875.000,00**
7	01	04	02	01					Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah peserta sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan atau kepolisian negara republik indonesia	100%	80%				34.600.000,00	27.725.000,00	6.875.000,00
									Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penugasan Kepala Daerah yang difasilitasi	100%	82%				37.000.000,00	30.400.000,00	6.600.000,00

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
									Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pemerintahan umum sesuai dengan penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	100%	82%				37.000.000,00	30.400.000,00	6.600.000,00
									Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat beragama Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,Regional, dan Nasional	Jumlah Peserta pelaksanaan FKUB	100%	82%				37.000.000,00	30.400.000,00	6.600.000,00
7	**01**	**06**							**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu**	**100%**	**78,33%**				**212.750.000,00**	**166.653.000,00**	**46.097.000,00**
7	**01**	**06**	**01**						**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**100%**	**78,33%**				**212.750.000,00**	**166.653.000,00**	**46.097.000,00**
									Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Perdes dan Perkades yang disusun	**100%**	86,52%				33.500.000,00	28.985.000,00	4.515.000,00
7	01	06	01	02					Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintal	Jumlah fasilitasi pembinaan administrasi Pemerintahan Desa	100%	86,52%				33.500.000,00	28.985.000,00	4.515.000,00
									Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah fasilitasi pembinaan pengelolaan keuangan desa dan aset desa	100%	47,44%				35.200.000,00	16.700.000,00	18.500.000,00
									Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan tugas dan fungsi BPD	100%	90,10%				37.500.000,00	33.788.000,00	3.712.000,00
									Fasilitasi Penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Program DD yang berbasis pemberdayaan	100%	79,34%				36.500.000,00	28.960.000,00	7.540.000,00
7	01	06	01	03					Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Jumlah fasilitasi pendampingan penyusunan aplikasi desa	100%	79,99%				36.550.000,00	29.235.000,00	7.315.000,00
3	**2**	**7**	**5**		**3.2.7.5**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEWILAYAHAN**	**KECAMATAN BENJENG**									**4.588.491.000**	**4.447.594.986**	**140.896.014**
7	**01**	**01**							**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketercapaian sasaran program OPD**	**100 Persen**	**97,23 Persen**				**3.730.285.800**	**3.626.819.786**	**103.466.014**
7	**01**	**01**	**2.01**						**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan keuangan dan kinerja SKPD**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**				**26.400.000**	**26.400.000**	**0**
7	01	01	2.01	01					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan program kegiatan SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen				13.200.000	13.200.000	0
7	01	01	2.01	06					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja yang akuntabel	4 Dokumen	4 Dokumen				13.200.000	13.200.000	0
7	**01**	**01**	**2.02**						**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja dan Administrasi Keuangan**	**100 Persen**	**97,08 Persen**				**3.036.631.000**	**2.947.998.010**	**88.632.990**
7	01	01	2.02	01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	100 Persen	97,08 Persen				3.036.631.000	2.947.998.010	88.632.990

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
7	**01**	**01**	**2.06**						**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Fasilitasi terhadap Pelaksnaan Tupoksi Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**98,58 Persen**				**177.777.692**	**175.250.152**	**2.527.540**
7	01	01	2.06	02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah tersedianya ATK, bahan kebersihan, alat listrikdan pengadaan alat kantor lainnya	100 Persen	99,16 Persen				92.753.692	91.975.152	778.540
7	01	01	2.06	04					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan makanan dan minuman rapat	12 Bulan	12 Bulan				60.000.000	60.000.000	0
7	01	01	2.06	05					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan				14.600.000	14.600.000	0
7	01	01	2.06	06					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peyediaan media cetak	12 Bulan	12 Bulan				4.200.000	3.700.000	500.000
7	01	01	2.06	09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyediaan perjalanan dinas	1 Tahun	1 Tahun				6.224.000	4.975.000	1.249.000
7	**01**	**01**	**2.08**						**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah**	**100 Persen**	**96,29 Persen**				**331.665.556**	**319.372.704**	**12.292.852**
7	01	01	2.08	01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah fasilitasi pembayaran jasa administrasi kantor,petugas kebersihan, penjaga kantor	12 Bulan	12 Bulan				249.600.000	249.600.000	0
7	01	01	2.08	02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan jasa telkom listrik air	12 Bulan	12 Bulan				64.965.556	52.672.704	12.292.852
7	01	01	2.08	03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemenuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 Persen	100 Persen				17.100.000	17.100.000	0
7	**01**	**01**	**2.09**						**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Tersedianya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 Persen**	**99,99 Persen**				**157.811.552**	**157.798.920**	**12.632**
7	01	01	2.09	06					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah kendaraan dinas yang dirawat	4 Unit	4 Unit				80.500.000	80.500.000	0
7	01	01	2.09	07					Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah tersedianya peralatan kantor yang dipelihara	1 Tahun	1 Tahun				12.378.110	12.378.110	0
7	01	01	2.09	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	1 Gedung	1 Gedung				64.933.442	64.920.810	12.632
7	**01**	**02**							**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHASN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Kegiatan peningkatan Kematangan Pelayanan Publik**	**100 Persen**	**100 Persen**				**67.860.000**	**67.860.000**	**0**
7	**01**	**02**	**2,02**						**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksnakanan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Jumlah tersedianya SOP pelayanan publik kecamatan**	**100 Persen**	**100 Persen**				**45.180.000**	**45.180.000**	**0**
7	01	02	2,02	02					Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah tersedianya SOP pelayanan publik kecamatan	100 Persen	100 Persen				22.580.000	22.580.000	0
7	01	02	2,02	03					Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah tersedianya sosialisasi pelaksanaan pelayanan publik terbaru	100 Persen	100 Persen				22.600.000	22.600.000	0

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
7	**01**	**02**	**2,04**						**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah SOP pelayanan publik perijinan non usaha yang didelegasikan Bupati ke camat**	**100 Persen**	**100 Persen**				**22.680.000**	**22.680.000**	**0**
7	**01**	**02**	**2,04**	01					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan publik perijinan non usaha di kecamatan	100 Persen	100 Persen				22.680.000	22.680.000	0
7	**01**	**03**							**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYAF**	**Persentase Musrenbang Desa yang difasilitasi dan Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi**	**100 Persen**	**93,85 Persen**				**335.675.200**	**315.045.200**	**20.630.000**
7	**01**	**3**	**2,01**						**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan D**	**Jumlah tersedianya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa**	**100 Persen**	**93,03 Persen**				**160.590.000**	**149.390.000**	**11.200.000**
7	01	03	2.01	01					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	Jumlah partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah dokumen perencanaan usulan pembangunan di desa	1 Dokumen	1 Dokumen				46.740.000	46.740.000	0
7	01	03	2.01	03					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah ersedianya pembinaan Bumdes dan kopwan	23 Desa	23 Desa				113.850.000	102.650.000	11.200.000
7	**01**	**03**	**2,03**						**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Jumlah pembinaan lembaga kemasyarakatan di tingkat Kecamatan**	**100 Persen**	**94,61 Persen**				**175.085.200**	**165.655.200**	**9.430.000**
7	01	03	2,03	02					Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Tersedianya pembinaan PKK, monev santunan sosial, dan SKJ	100 Persen	94,61 Persen				175.085.200	165.655.200	9.430.000
7	**01**	**04**							**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi**	**100 Persen**	**98,60 Persen**				**199.800.000**	**197.000.000**	**2.800.000**
7	**01**	**04**	**2,01**						**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah tersedianya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**100 Persen**	**100 Persen**				**87.000.000**	**87.000.000**	**0**
7	01	04	2,01	01					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah pembinaan dan pemantauan situasi lingkungan	12 Bulan	12 Bulan				87.000.000	87.000.000	0
7	**01**	**04**	**2,02**						**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Jumlah tersedianya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**100 Persen**	**97,52 Persen**				**112.800.000**	**110.000.000**	**2.800.000**
7	01	04	2,02	01					Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan /atau Kepolosian Negara Republik Indonesia	Jumlah peserta sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan atau kepolisian negara republik indonesia	100 Persen	97,52 Persen				112.800.000	110.000.000	2.800.000

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
7	**01**	**05**							**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penugasan Kepala Daerah yang difasilitasi**	**100 Persen**	**100 Persen**				**14.520.000**	**14.520.000**	**0**
7	01	05	2,01						Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah tersedianya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 Persen	100 Persen				14.520.000	14.520.000	0
7	01	05	2,01	05					Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah rapat koordinasi FKUB Kecamatan Benjeng yg aktif	100 Persen	100 Persen				14.520.000	14.520.000	0
7	**01**	**06**							**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu**	**100 Persen**	**94,18 Persen**				**240.350.000**	**226.350.000**	**14.000.000**
7	**01**	**06**	**2,01**						**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100 Persen**	**94,18 Persen**				**240.350.000**	**226.350.000**	**14.000.000**
7	01	06	2.01	03					Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Monev adminsitrasi pengelolaan keuangan desa	23 Desa	23 Desa				126.500.000	120.900.000	5.600.000
7	01	06	2,01	05					Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Monev pelaksanaan pembangunan desa	23 Desa	23 Desa				113.850.000	105.450.000	8.400.000
3	**2**	**7**	**6**		**3.2.7.6**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEWILAYAHAN**	**KECAMATAN BALONG PANGGANG**									**5.211.175.000**	**5.025.873.987**	**185.301.013**
7	**01**	**01**							**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketercapaian sasaran program OPD**	**100%**	**100%**				**4.451.764.000**	**4.323.301.862**	**128.462.138**
7	**01**	**01**	**2.01**						**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan OPD	**100%**	**100%**				**4.175.000**	**4.175.000**	-
7	**01**	01	2.01	01					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan OPD	5 buku	5 buku				700.000	700.000	0
7	**01**	01	2.01	02					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA OPD	10 buku	10 buku				700.000	700.000	0
7	**01**	01	2.01	03					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA OPD	10 buku	10 buku				700.000	700.000	0
7	**01**	01	2.01	04					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Tersusunnya Jumlah Dokumen DPA OPD	10 buku	10 buku				700.000	700.000	0
7	**01**	01	2.01	05					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA OPD	10 buku	10 buku				700.000	700.000	0
7	**01**	01	2.01	06					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja OPD	5 buku	5 buku				675.000	675.000	0
7	**01**	**01**	**2.02**						**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah laporan Kinerja administrasi Keuangan	**100%**	**100%**				**3.685.315.000**	**3.570.519.423**	**114.795.577**
7	**01**	**01**	**2.02**	01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunajangan yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan				3.684.615.000	3.569.819.423	114.795.577
									koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 buku	5 buku				700.000	700.000	0
7	**01**	**01**	**2.06**						**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Fasilitasi terhadap Pelaksnaan Tupoksi Perangkat Daerah	**100%**	**100%**				**355.722.500**	**354.850.750**	**871.750**
7	01	01	2.06	02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor yang disediakan	10 jenis	10 jenis				167.504.000	166.888.950	615.050

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
7	01	01	2.06	04					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan Minuman yang disediakan	7 kegiatan	7 kegiatan				63.180.000	63.109.000	71.000
7	01	01	2.06	05					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Pengandaan	5 jenis	5 jenis				20.208.500	20.208.300	200
									Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan	5 jenis	5 jenis				20.214.000	20.210.000	4.000
7	01	01	2.06	09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat dan Koordinasi yang dibiayai	12 Bulan	12 bulab				84.616.000	84.434.500	181.500
7	**01**	**01**	**2.08**						**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Fasilitasi terhadap Pelaksnaan Tupoksi Perangkat Daerah	**100%**	**100%**				**261.640.000**	**249.592.954**	**12.047.046**
7	01	01	2.08	02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayar	3 rekening	3 rekening				60.540.000	52.793.704	7.746.296
7	01	01	2.08	03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan kantor yang di sewa	4 jenis	4 jenis				17.500.000	17.399.250	100.750
									Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pembantu Administrasi Kantor dan Kebersihan Kantor	6 orang	6 orang				183.600.000	179.400.000	4.200.000
7	**01**	**01**	**2.09**						**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**				**144.911.500**	**144.163.735**	**747.765**
7	01	01	2.09	02					Penyediaan Jasa pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Kantor yang dipelihara	3 kendaraan	3 kendaraan				78.684.000	78.683.835	165
7	12	1	2,09	9					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	1 paket	1 paket				48.300.000	47.552.400	747.600
7	12	1	2,09	11					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah Sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	11 jenis	11 jenis				17.927.500	17.927.500	0
7	**01**	**02**							**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tingkat Kematangan Pelayanan Publik**	**90**	**90**				**36.100.000**	**35.879.500**	**220.500**
7	**01**	**02**	**2.02**						**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	**100%**	**100%**				**36.100.000**	**35.879.500**	**220.500**
7	01	02	2.02	03					Peningkatan Efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan SKJ dan Partisipasi Gerak jalan Tk. Kecamatan serta Tersedianya Ruang Ramah Anak	2 kegiatan	2 kegiatan				36.100.000	35.879.500	220.500
7	**01**	**03**							**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase koordinasi kegiatan Pemberdayaan masyarakat	**100**	**100**				**423.011.000**	**389.534.625**	**33.476.375**
7	**01**	**03**	**2.01**						**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Persetase Koordinasi Pemberdayaan	**100%**	**100%**				**142.150.000**	**131.316.500**	**10.833.500**
7	01	03	2.01	01					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Peserta Musrenbang	25 desa	2 desa				142.150.000	131.316.500	10.833.500
7	**01**	**03**	**2.03**						**PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN**	Persetase Koordinasi Pemberdayaan	**100%**	**100%**				**280.861.000**	**258.218.125**	**22.642.875**
7	01	03	2.03	01					PENYELENGGARAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN	Jumlah Lembaga yang dibina	25 desa	25 desa				83.670.000	83.080.125	589.875
7	01	03	2.03	02					PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN							69.691.000	68.863.000	828.000
7	01	03	2.03	03					FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKA							127.500.000	106.275.000	21.225.000

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
7	**01**	**05**							**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Penugasan Kepala Daerah yang difasilitasi	**90 - 92**	**90 - 92**				**45.300.000**	**45.300.000**	**-**
7	01	05	2.01						**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah Penugasan Kepala Daerah	**100%**	**100%**				**45.300.000**	**45.300.000**	**-**
7	01	05	2.01	01					KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	Jumlah peserta Pembinaan	25 desa	25 desa				45.300.000	45.300.000	0
7	**01**	**06**							**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan**	**90 - 92**	**90 - 92**				**127.500.000**	**116.833.000**	**10.667.000**
7	**01**	**06**	**2.01**						**PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH**	**Persentase kegiatan pemerintahan desa yang difasilitasi**	**100%**	**100%**				**127.500.000**	**116.833.000**	**10.667.000**
7	01	06	2.01	03					FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN (BIMTEK, SOSIALISASI, KONSULTASI) WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL	Jumlah Sosialisasi Pengelolaan Keuangan	2 kali	2 kali				127.500.000	116.833.000	10.667.000
7	**01**	**06**							**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan**	**90 - 92**	**90 - 92**				**127.500.000**	**115.025.000**	**12.475.000**
7	**01**	**06**	**2.01**						**FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase kegiatan pemerintahan desa yang difasilitasi**	**100%**	**100%**				**127.500.000**	**115.025.000**	**12.475.000**
									FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA	Jumlah Monev	2 kali	2 kali				127.500.000	115.025.000	12.475.000
3	**2**	**7**	**7**		**3.2.7.7**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEWILAYAHAN**	**KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN**									**4.508.599.000,00**	**4.176.645.073,00**	**331.953.927,00**
7	**01**	**01**							**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD**	**100%**	**92,64%**				**3.677.478.200,00**	**3.462.946.973,00**	**214.531.227,00**
7	**01**	**01**	**2**						**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan keuangan dan kinerja SKPD**	**100%**	93,68%				**88.851.400,00**	**83.236.400,00**	**5.615.000,00**
7	01	01	2	01					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	100%	100%				2.460.000,00	2.460.000,00	-
7	01	01	2	02					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	100%	100%				2.400.000,00	2.400.000,00	-
7	01	01	2	03					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD	100%	0%				2.400.000,00	-	2.400.000,00
7	01	01	2	04					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	100%	100%				2.400.000,00	2.400.000,00	-
7	01	01	2	05					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD	100%	100%				3.660.000,00	3.660.000,00	-
7	01	01	2	06					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja yang akuntabel	100%	100%				2.400.000,00	2.400.000,00	-
7	01	01	2	07					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	92,92%				73.131.400,00	69.916.400,00	3.215.000,00

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
7	**01**	**01**	**2**						**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen pelaporan kinerja dan administrasi keuangan**	**100%**	**94,14%**				**2.986.239.000,00**	**2.811.097.318,00**	**175.141.682,00**
7	01	01	2	01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN selama 1 tahun	100%	94,13%				2.982.039.000,00	2.806.987.318,00	175.051.682,00
7	01	01	2	05					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun	100%	97,86%				4.200.000,00	4.110.000,00	90.000,00
7	**01**	**01**	**2**						**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen pelaporan kinerja dan administrasi keuangan**	**100%**	**99,02%**				**163.652.800,00**	**162.056.520,00**	**1.596.280,00**
7	01	01	2	02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	99,61%				105.947.000,00	105.539.000,00	408.000,00
7	01	01	2	04					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik	100%	99,57%				26.016.000,00	25.905.000,00	111.000,00
7	01	01	2	05					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	100%	97,67%				13.784.300,00	13.462.800,00	321.500,00
7	01	01	2	06					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan / majalah	100%	94,76%				3.018.000,00	2.860.000,00	158.000,00
7	01	01	2	09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi	100%	95,98%				14.887.500,00	14.289.720,00	597.780,00
7	**01**	**01**	**2**						**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya pembayaran jasa-jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**92,45%**				**329.735.000,00**	**304.845.635,00**	**24.889.365,00**
7	01	01	2	01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah fasilitasi pembayaran jasa administrasi kantor	100%	91,67%				264.000.000,00	242.000.000,00	22.000.000,00
7	01	01	2	02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah fasilitasi pembayaran listrik, air bersih dan internet berlangganan	100%	95,49%				63.141.000,00	60.295.635,00	2.845.365,00
7	01	01	2	03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100%	98,30%				2.594.000,00	2.550.000,00	44.000,00
7	**01**	**01**	**2**						**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah kendaraan dinas, peralatan kantor dan gedung kantor yang dirawat**	**100%**	**93,31%**				**109.000.000,00**	**101.711.100,00**	**7.288.900,00**
7	01	01	2	01					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah fasilitasi pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	100%	92,62%				88.100.000,00	81.598.600,00	6.501.400,00
7	01	01	2	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah fasilirasi gedung kantor	100%	96,23%				20.900.000,00	20.112.500,00	787.500,00
7	**01**	**02**							**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Tingkat Kematangan Pelayanan Publik**	**100%**	**77,35%**				**76.690.000,00**	**59.316.000,00**	**17.374.000,00**
7	**01**	**02**	**2**						**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah di kecamatan**	**100%**	**77,35%**				**76.690.000,00**	**59.316.000,00**	**17.374.000,00**
7	01	02	2	02					Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	100%	72,70%				63.646.000,00	46.272.000,00	17.374.000,00

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
7	01	02	2	03					Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	100%	100%				13.044.000,00	13.044.000,00	-
7	**01**	**03**							**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase Musrenbag Kelurahan yang difasilitasi**	**100%**	**85,93%**				**473.423.100,00**	**406.803.000,00**	**66.620.100,00**
7	**01**	**03**	**2**						**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah kegiatan pemberdayaan desa**	**100%**	**85,93%**				**473.423.100,00**	**406.803.000,00**	**66.620.100,00**
7	01	03	2	01					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	100%	85,76%				86.402.500,00	74.102.500,00	12.300.000,00
7	01	03	2	02					Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	100%	88,22%				267.915.000,00	236.354.900,00	31.560.100,00
7	01	03	2	03					Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pemberdayaan desa yang difasilitasi	100%	80,89%				119.105.600,00	96.345.600,00	22.760.000,00
7	**01**	**04**							**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum**	**100%**	**88,64%**				**150.292.000,00**	**133.216.000,00**	**17.076.000,00**
7	**01**	**04**	**2**						**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**100%**	**100%**				**69.258.000,00**	**69.258.000,00**	**-**
7	01	04	0	01					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%				69.258.000,00	69.258.000,00	-
7	**01**	**04**	**2**						**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Jumlah penerapan dan penegakan peraturan kepala daerah**	**100%**	**78,93%**				**81.034.000,00**	**63.958.000,00**	**17.076.000,00**
7	01	04	2	01					Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah peserta sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan atau kepolisian negara republik indonesia	100%	78,93%				81.034.000,00	63.958.000,00	17.076.000,00
7	**01**	**06**							**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**100%**	**87,49%**				**130.715.700,00**	**114.363.100,00**	**16.352.600,00**
7	**01**	**06**	**2**						**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**100%**	**87,49%**				**130.715.700,00**	**114.363.100,00**	**16.352.600,00**
7	01	06	2	02					Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintal	Jumlah administrasi tata pemerintahan desa	100%	84,78%				76.052.700,00	64.475.100,00	11.577.600,00
7	01	06	2	03					Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	100%	91,26%				54.663.000,00	49.888.000,00	4.775.000,00
3	**2**	**7**	**8**		**3.2.7.8**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEWILAYAHAN**	**KECAMATAN DRIYOREJO**									**4.160.942.000**	**4.100.275.406**	**60.666.594**

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
7	**01**	1							**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketercapaian sasaran program OPD**								-
7	**01**	**01**	**2.01**						**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan OPD								-
7	01	01	2.01	01					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		100%	100%	-	-	-	3.000.000,00	3.000.000,00	-
7	01	01	2.01	02					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		100%	100%	-	-	-	4.000.000,00	4.000.000,00	-
		01		03					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		100%	100%	-	-	-	3.000.000,00	3.000.000,00	-
7	01	01	2.01	04					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		100%	100%	-	-	-	3.000.000,00	3.000.000,00	-
7	01	01	2,01	05					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		100%	100%	-	-	-	2.000.000,00	2.000.000,00	-
7	01	01	2.01	06					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		100%	100%	-	-	-	2.500.000,00	2.500.000,00	-
7	01	01	2.01	07					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	100%	-	-	-	2.000.000,00	2.000.000,00	-
7	01	01	**2.02**						**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah laporan Kinerja administrasi Keuangan								-
7	01	01	2.02	01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		100%	98,21%	-	-	-	2.594.182.000,00	2.547.651.104,00	46.530.896
7	01	01	2.02	05					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		100%	100,00%	-	-	-	2.000.000,00	2.000.000,00	-
7	01	01	**2.06**						**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Fasilitasi terhadap Pelaksnaan Tupoksi Perangkat Daerah								-
7	01	01	2.06	02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100%	96.20%	-	-	-	54.319.433,00	52.254.933,00	2.064.500
7	01	01	2.06	04					Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100%	100%	-	-	-	190.299.600,00	190.291.600,00	8.000
7	01	01	2.06	05					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		100%	98.50%	-	-	-	10.644.700,00	10.485.300,00	159.400
7	01	01	2.06	09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100%	99,99%	-	-	-	12.750.700,00	12.750.000,00	700
7	01	01	**2.08**						**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Fasilitasi terhadap Pelaksnaan Tupoksi Perangkat Daerah								-
7	01	01	2.08	01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat		100%	62,70%	-	-	-	6.240.000,00	3.912.500,00	2.327.500
7	01	01	2.08	02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100%	82,85%	-	-	-	36.239.501,00	30.024.607,00	6.214.894
7	01	01	2.08	03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100%	99,96%	-	-	-	12.756.000,00	12.751.000,00	5.000
7	01	01	2.08	04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100%	100%	-	-	-	100.800.000,00	100.800.000,00	-
7	01	01	**2.09**						**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Fasilitasi terhadap Pelaksnaan Tupoksi Perangkat Daerah								-
7	01	01	2.09	01					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		100%	99,97%	-	-	-	33.600.000,00	33.589.387,00	10.613
7	01	01	2.09	02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100%	100%	-	-	-	33.600.000,00	33.600.000,00	-
7	01	01	2.09	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100%	100%	-	-	-	74.510.060,00	74.510.050,00	10
7	01	01	2.09	11					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100%	99,24%	-	-	-	126.997.343,00	126.027.865,62	969.477

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
7	**01**	**02**							**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHASN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tingkat Kematangan Pelayanan Publik**								-
7	**01**	**02**	**2,02**						**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksnakanan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan								-
7	01	02	2,02	03					Peningkatan efektifitas Pelaksnaan Pelayana Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		100%	98,81%	-	-	-	59.468.000,00	58.758.000,00	710.000
7	**01**	**03**							**Program Pemberdayaan Masyarakat**	Persentase koordinasi kegiatan Pemberdayaan masyarakat								-
7	**01**	**3**	**2,01**						**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan D**	Persentase jumlah Koordinasi kegiatan Pemberdayaan masyarakat								-
7	01	02	2.01	01					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		100%	99,73%	**-**	**-**	**-**	71.050.000,00	71.015.000,00	35.000
7	01	02	2.01	02					Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		100%	99,68%	-	-	-	65.462.460,00	65.152.460,00	310.000
7	01	02	2.01	03					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		100%	99,79%	-	-	-	65.462.460,00	65.152.460,00	310.000
7	**01**	**03**	2,03						**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**									-
7	**01**	**03**	**2,03**	01					Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga yang d	100%	99,77%	-	-	-	44.100.000,00	44.000.000,00	100.000
7	01	03	2,03	02					Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		100%	100%	-	-	-	48.200.000,00	48.200.000,00	-
7	**01**	**04**							**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban UMUM**	**Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi**								-
7	**01**	**04**	**2,02**	01					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Penegakan Konf	100%	99,95%	-	-	-	71.050.000,00	71.015.000,00	35.000
7	01	04	2,02	02					Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		100%	99,53%	-	-	-	65.462.460,00	65.152.460,00	310.000
7	01	05							**Program Penyelenggaraan Urusan Pe**	Persentase Penugasan Kepala Daerah yang difasilitasi								-
7	01	05	2,01						Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Penugasan Kepala Daerah								-
7	01	06	2.01	01					Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		100%	99,81%	-	-	-	59.173.551,00	59.063.000,00	110.551
7	01	06	2.01	02					Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	100%	100,00%	-	-	-	51.850.000,00	51.850.000,00	-
7	01	06	2.01	03					Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		100%	100,00%	-	-	-	59.468.000,00	59.468.000,00	-
7	01	06	2.01	05					Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		100%	99,82%	-	-	-	56.350.000,00	56.250.000,00	100.000

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
7	01	06	2.01	07					Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		100%	100,00%	-	-	-	12.500.000,00	12.500.000,00	-
7	01	06	2.01	11					Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi dan rekomendaui Pemerintah Desa	100%	99,71%	-	-	-	68.000.000,00	67.800.000,00	200.000
7	01	06	2,01	12					Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		100%	99,63%	-	-	-	112.400.000,00	111.980.000,00	420.000
3	**2**	**7**	**9**		**3.2.7.9**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEWILAYAHAN**	**KECAMATAN WRINGINANOM**									**4.414.167.000,00**	**4.332.423.566,00**	**81.743.434,00**
7	**01**	1							**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketercapaian sasaran program OPD**	**100%**	**100%**				**3.437.023.347**	**3.355.575.303**	**81.448.044,00**
7	**01**	**01**	**2.01**						**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%				**41.339.585,00**	41.339.535,00	**50,00**
7	01	01	2.01	01					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perencanaan Perangkat daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	-	-	-	5.999.970,00	5.999.970,00	**0,00**
7	01	01	2.01	02					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 Dokumen	10 Dokumen	-	-	-	5.999.880,00	5.999.880,00	**0,00**
		01		03					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perub	5 Dokumen	5 Dokumen	-	-	-	5.999.850,00	5.999.800,00	**50,00**
7	01	01	2.01	04					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA -	7 Dokumen	7 Dokumen	-	-	-	6.000.000,00	6.000.000,00	**0,00**
7	01	01	2,01	05					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perut	7 Dokumen	7 Dokumen	-	-	-	6.000.000,00	6.000.000,00	**0,00**
7	01	01	2.01	06					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan penyust	7 Laporan	7 Laporan	-	-	-	5.339.885,00	5.339.885,00	**0,00**
7	01	01	2.01	07					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evalu	4 laporan	4 laporan	-	-	-	6.000.000,00	6.000.000,00	**0,00**
7	01	01	**2.02**						**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah	100%	100%				**2.893.607.000,00**	2.812.596.378,00	81.010.622,00
7	01	01	2.02	01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang	21 Orang	21 Orang	-	-	-	2.887.607.000,00	2.806.596.378,00	81.010.622,00
7	01	01	2.02	05					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuang	5 laporan	5 laporan	-	-	-	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
7	01	01	**2.06**						**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah	100%	100%				**103.474.172,00**	103.471.100,00	3.072,00
7	01	01	2.06	02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatai	6 Paket	6 Paket	-	-	-	31.330.000,00	31.327.400,00	2.600,00
7	01	01	2.06	04					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan	4 paket	4 paket	-	-	-	31.134.363,00	31.134.000,00	363,00
7	01	01	2.06	05					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Ce	3 Paket	3 Paket	-	-	-	15.701.809,00	15.701.700,00	109,00
7	01	01	2.06	09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Pi	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	25.308.000,00	25.308.000,00	0,00
									Pengadaan barng Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase capaian kine	100%	100%				77.412.700,00	77.131.650,00	281.050,00
									Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan d	4 Unit	4 Unit				77.412.700,00	77.131.650,00	281.050,00
7	01	01	**2.08**						**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah	100%	100%				**235.478.708,00**	235.371.092,00	107.616,00
7	01	01	2.08	01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	4 laporan	-	-	-	182.400.000,00	182.400.000,00	0,00
7	01	01	2.08	02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penye	4 laporan	4 laporan	-	-	-	28.300.000,00	28.192.384,00	107.616,00

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
7	01	01	2.08	03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyed	3 Laporan	3 laporan	-	-	-	24.778.708,00	24.778.708,00	0,00
7	01	01	**2.09**						**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah	100%	100%				**85.711.182,00**	**85.665.548,00**	45.634,00
7	01	01	2.09	02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Pero	4 Jenis	4 Jenis	-	-	-	26.372.378,00	26.353.628,00	18.750,00
7	01	01	2.09	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor	2 Unit	2 Unit	-	-	-	23.704.204,00	23.679.000,00	25.204,00
7	01	01	2.09	11					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan	2 Unit	2 Unit	-	-	-	35.634.600,00	35.632.920,00	1.680,00
7	**01**	**02**							**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHASN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tingkat Kematangan Pelayanan Publik**	100%	100%				**50.000.000,00**	50.000.000,00	0,00
7	**01**	**02**	**2,02**						**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksnakanan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	100%	100%				**50.000.000,00**	50.000.000,00	0,00
7	01	02	2,02	03					Peningkatan efektifitas Pelaksnaan Pelayana Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 laporan	2 laporan	-	-	-	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
7	**01**	**03**							**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYAF**	Persentase koordinasi kegiatan Pemberdayaan masyarakat	100%	100%				370.790.953,00	370.740.863,00	50.090,00
7	**01**	**3**	**2,01**						**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan D**	Persentase kegiatan pemberdayaan desa yang difasiltasi	100%	100%				370.790.953,00	370.740.863,00	50.090,00
7	01	02	2.01	01					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemas	70 Orang	70 Orang	-	-	-	87.690.000,00	87.689.910,00	90,00
7	01	02	2.01	03					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Peningkatan	2 laporan	2 Laporan	-	-	-	283.100.953,00	283.050.953,00	50.000,00
7	**01**	**04**							**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban UMUM**	**Persentase Peningkatan Keamanan dan ketentraman serta penyelesian konflik yang ditangani**	100%	100%				118.847.600,00	118.847.600,00	0,00
									Koordinasi upaya penyelenggaraan pemerintahan dan ketertiban umum	**Persentase Peningkatan Keamanan dan ketentraman serta penyelesian konflik yang ditangani**	100%	100%				118.847.600,00	118.847.600,00	0,00
7	**01**	**04**	**2,02**	01					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Si	12 laporan	12 laporan	-	-	-	118.847.600,00	118.847.600,00	0,00
7	01	05							**Program Penyelenggaraan Urusan Pe**	Persentase Penugasan Kepala Daerah yang difasilitasi	100%	100%				20.640.000,00	20.440.000,00	200.000,00
									Penyelenggaraan Urusan Pemerintah	Persentase kegiatan pemerintahan umum sesuai dengan penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	100%	100%				20.640.000,00	20.440.000,00	200.000,00

Kode Rekening	No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
					Pembinaan Wawasan Kebangsaan dar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang - Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	6 kali	6 Kali				20.640.000,00	20.440.000,00	200.000,00
					PROGRAAM PEMBINAAN DAN PENGA	**Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu**	100%	100%				416.865.100,00	416.819.800,00	45.300,00
7 01 05 2,01					**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase fasilitasi pe**	100%	100%				416.865.100,00	416.819.800,00	45.300,00
7 01 06 2.01 02					Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi tata Pemerintahan Desa	32 Dokumen	32 Dokumen	-	-	-	90.410.100,00	90.410.100,00	0,00
7 01 06 2.01 03					Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	43.300.000,00	43.294.800,00	5.200,00
					Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang - Undangan	12 Bulan	12 Bulan				68.168.000,00	68.168.000,00	0,00
7 01 06 2.01 05					Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	44.220.000,00	44.180.000,00	40.000,00
7 01 06 2.01 07					Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3 Desa	3 Desa	-	-	-	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
7 01 06 2.01 11					Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	94.060.000,00	94.059.900,00	100,00
7 01 06 2,01 12					fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakar Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	16 Desa	16 Desa	-	-	-	61.707.000,00	61.707.000,00	0,00

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
3	**2**	**7**	**10**		**3.2.7.10**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEWILAYAHAN**	**KECAMATAN KEDAMEAN**									**3.831.298.000**	**3.753.381.230**	**77.916.770**
7	**01**	**01**							**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketercapaian sasaran program OPD**	**100%**	**100%**				**2.946.316.000**	**2.886.214.430**	**60.101.570**
7	**01**	**01**	**2.01**						**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan OPD	30 buku	30 buku				**40.000.000**	**39.981.600**	18.400
7	01	01	2.01	01					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	20 dok	20 dok				25.000.000	24.981.600	18.400
7	01	01	2.01	06					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kineria OPD	5 lap	5 lap				15.000.000	15.000.000	-
7	01	01	**2.02**						**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah laporan Kinerja administrasi Keuangan	12 bln	12 bln				**2.290.848.000**	**2.237.169.826**	**53.678.174**
7	01	01	2.02	01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	17 org	17 org				2.280.848.000	2.227.183.826	53.664.174
7	01	01	2.02	05					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	10 lap	10 lap				10.000.000	9.986.000	14.000
7	01	01	**2.06**						**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Fasilitasi terhadap Pelaksnaan Tupoksi Perangkat Daerah	12 bln	12 bln				**151.789.000**	**150.991.000**	**798.000**
7	01	01	2.06	01					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7 jenis	7 jenis				6.500.000	6.500.000	-
7	01	01	2.06	02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	3 paket	3 paket				30.154.000	30.129.000	25.000
7	01	01	2.06	03					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	2 paket	2 paket				4.000.000	3.996.000	4.000
7	01	01	2.06	04					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	12 bln	12 bln				52.000.000	51.990.000	10.000
7	01	01	2.06	05					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	3 paket	3 paket				12.279.000	12.279.000	-
7	01	01	2.06	06					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	30.000 lembar	30.000 lembar				4.356.000	3.840.000	516.000
7	01	01	2.06	09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bln	12 bln				42.500.000	42.257.000	243.000
7	01	01	**2.08**						**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	9 jenis	9 jenis				**88.062.000**	**86.140.000**	**1.922.000**
7	01	01	2.08	01					Pengadaan mebel	Tersedianya mebel	2 jenis	2 jenis				24.000.000	23.400.000	600.000
7	01	01	2.08	02					Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	3 jenis	3 jenis				64.062.000	62.740.000	1.322.000

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
7	01	01	**2.08**						**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Fasilitasi terhadap Pelaksnaan Tupoksi Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan				**248.317.000**	**244.632.004**	**3.684.996**
7	01	01	2.08	02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan				39.517.000	37.832.004	1.684.996
7	01	01	2.08	04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 bulan	12 bulan				208.800.000	206.800.000	2.000.000
7	01	01	**2.09**						**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Fasilitasi terhadap Pelaksnaan Tupoksi Perangkat Daerah	100%	100%				**127.300.000**	**127.300.000**	**-**
7	01	01	2.09	02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3 jenis	3 jenis				81.800.000	81.800.000	-
7	01	01	2.09	06					Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Terlaksananya pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 unit	4 unit				12.000.000	12.000.000	-
7	01	01	2.09	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya peliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit				33.500.000	33.500.000	-
7	**01**	**02**							**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi**						**10.000.000**	**10.000.000**	**-**
7	**01**	**02**	**2,01**						**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilakasanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan**	Jumlah Penegakan Konflik						**10.000.000**	**10.000.000**	**-**
7	01	02	2,01	03					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan						10.000.000	10.000.000	-
7	**01**	**03**							**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase koordinasi kegiatan Pemberdayaan masyarakat	75%	75%				**479.143.000**	**461.349.000**	**17.794.000**
7	**01**	**3**	**2,01**						**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan D**	Persentase jumlah Koordinasi kegiatan Pemberdayaan masyarakat	100%	100%				**234.095.000**	**225.534.000**	**8.561.000**
7	01	02	2.01	01					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan didesa	90 org	90 org				121.695.000	113.295.000	8.400.000
7	01	02	2.01	03					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	15 desa	15 desa				112.400.000	112.239.000	161.000
7	**01**	**03**	**2.03**						**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Jumlah Lembaga yang d	100%	100%				**245.048.000**	**235.815.000**	**9.233.000**
7	01	03	2.03	01					Penyelenggaraan Lembaga Kemasyara	Terselenggaran penyelenngaraan lembaga kemasyarakatan	15 desa	15 desa				232.798.000	223.565.000	9.233.000

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
7	01	03	2.03	04					Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonc	Tersedianya fasilitiasi pengembangan UMKM	15 desa	15 desa				12.250.000	12.250.000	-
7	**01**	**04**							**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi**	100%	100%				**201.367.000**	**201.366.900**	**100**
7	**01**	**04**	**2.01**						**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Terlaksananya koordinasi upaya penyelenggaraan pemerintahan dan ketertiban umum	12 bulan	12 bulan				**55.222.000**	**55.222.000**	**-**
7	01	04	2.01	01					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan	12 bulan	12 bulan				55.222.000	55.222.000	-
7	**01**	**04**	**2.02**						**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Terlaksananya koordinasi penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 bulan	12 bulan				**146.145.000**	**146.144.900**	**100**
7	01	04	2.02	01					Koordinasi/Sinergitas dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas fungsinya dibidang penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara RI	12 bulan	12 bulan				146.145.000	146.144.900	100
7	**01**	**05**							**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu**	**100%**	**100%**				**5.145.000**	**5.145.000**	**-**
7	**01**	**05**	**2.01**						**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepla Daerah**	Terlaksananya fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**100%**	**100%**				**5.145.000**	**5.145.000**	**-**
7	01	05	2.01	01					Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3 kali	3 kali				5.145.000	5.145.000	-
7	**01**	**06**							**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGA**	**Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu**	**87%**	**87%**				**189.327.000**	**189.305.900**	**21.100**
7	**01**	**06**	**2.01**						**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Terlaksananya fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**12 bulan**	**12 bulan**				**189.327.000**	**189.305.900**	**21.100**
7	01	06	2.01	03					Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	30 dok	30 dok				13.900.000	13.900.000	-

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
7	01	06	2.01	03					Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	15 desa	15 desa				146.145.000	146.123.900	21.100
7	01	06	2.01	03					Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	15 desa	15 desa				11.500.000	11.500.000	-
7	01	06	2.01	05					Koordinasi Pendampingan Desa di Wil	Terlaksananya koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	15 desa	15 desa				11.500.000	11.500.000	-
7	01	06	2.01	16					Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan	15 desa	15 desa				6.282.000	6.282.000	-
3	**2**	**7**	**11**		**3.2.7.11**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEWILAYAHAN**	**KECAMATAN MENGANTI**									**4.424.276.000**	**4.274.199.537**	**147.696.463**
7	**01**	**01**							**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase capaian kinerja kegiatan perangkat daerah**	**100%**	**96,62%**				**3.566.024.296**	**3.445.537.833**	**120.486.463**
7	**01**	**01**	**2.01**						**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**				**14.600.000**	**14.600.000**	**-**
7	**01**	01	2.01	01					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah buku rencana kerja SKPD	20 buku	20 buku				8.100.000	8.100.000	-
7	**01**	01	2.01	06					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian dan realisasi kinerja yang disusun	15 buku	15 buku				6.500.000	6.500.000	-
7	**01**	**01**	**2.02**						**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**96%**				**2.885.776.000**	**2.777.968.319**	**107.807.681**
7	**01**	**01**	**2.02**	01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	23 orang	23 orang				2.875.776.000	2.767.968.319	107.807.681
7	**01**	**01**	**2.02**	07					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah buku susunan laporan keuangan bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	24 Buku	24 buku				10.000.000	10.000.000	-
7	**01**	**01**	**2.06**						**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**99%**				**188.360.000**	**186.560.000**	**1.800.000**
7	01	01	2.06	01					Pemyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik/ penerangan Bangunan Kantor	15 jenis	15 jenis				30.000.000	30.000.000	-
7	01	01	2.06						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	20 jenis	20 jenis				93.800.000	93.800.000	-
7	01	01	2.06	04					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan makan dan minum	2676 benda	2676 benda				35.000.000	35.000.000	-
7	01	01	2.06	05					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	9 Jenis	9 Jenis				10.000.000	10.000.000	-
7	01	01	2.06	06					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	480 eksemplar	480 eksemplar				2.760.000	2.760.000	-
7	01	01	2.06	09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	144 orang	144 orang				16.800.000	15.000.000	1.800.000

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
7	**01**	**01**	**2.08**						**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**96%**				**229.988.296**	**220.591.514**	**9.396.782**
7	01	01	2.08	02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PersentaseJumlah fasilitasi pembayaran listrik dan telepon	3 rekening	3 rekening				36.788.296	27.391.514	9.396.782
7	01	01	2.08	04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	8 orang	8 orang				193.200.000	193.200.000	-
7	**01**	**01**	**2.09**						**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**99%**				**247.300.000**	**245.818.000**	**1.482.000**
7	01	01	2.09	02					Penyediaan Jasa pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah fasilitasi pemeliharaan kendaraan dinas	2 unit	2 unit				33.600.000	33.600.000	-
7	12	1	2,09	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	1 Unit	1 Unit				185.000.000	183.518.000	1.482.000
7	12	1	2,09	10					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	2 unit	2 unit				28.700.000	28.700.000	-
7	**01**	**02**							**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tingkat Kematangan Pelayanan Publik**	**90**	**90**				**84.631.704**	**82.251.704**	**-**
7	**01**	**02**	**2.02**						**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan**	**100%**	**97%**				**84.631.704**	**82.251.704**	
7	01	02	2.02	03					Peningkatan Efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah fasilitasi pembinaan administrasi kependudukan	190 orang	190 orang				84.631.704	82.251.704	2.380.000
7	**01**	**03**							**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan**	**90**	**90**				**165.820.000**	**165.820.000**	**-**
7	**01**	**03**	**2.01**						**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase kegiatan pemberdayaan desa yang difasiltasi**	**100%**	**100%**				**165.820.000**	**165.820.000**	**-**
7	01	03	2.01	01					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah peserta Musrenbang kecamatan	95 orang	95 orang				46.940.000	46.940.000	-
7	01	03	2.01	03					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pembinaan BUMDES/PKK / LPTQ/ FKUB/ KARANG TARUNA/ UKS	150 orang	150 orang				118.880.000	118.880.000	-
7	**01**	**04**							**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan**	**90**	**90**				**375.220.000**	**350.810.000**	**24.410.000**
7	**01**	**04**	**2.01**						**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Peningkatan Keamanan dan ketentraman serta penyelesian konflik yang ditangani**	**100%**	**93%**				**375.220.000**	**350.810.000**	**24.410.000**
7	01	04	2.01	01					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah pembinaan Linmas Desa	179 orang	179 orang				375.220.000	350.810.000	24.410.000
7	**01**	**06**							**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan**	**90**	**90**				**232.580.000**	**229.780.000**	**2.800.000**

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
7	**01**	**06**	**2.01**						**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase kegiatan pemerintahan desa yang difasilitasi**	**100%**	**99%**				**232.580.000**	**229.780.000**	**2.800.000**
7	01	06	2.01	01					Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Jumlah peserta yang mengikuti evaluasi APBDes dari perangkat desa	44 orang	44 orang				62.880.000	60.080.000	2.800.000
7	01	06	2.01	02					Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Verifikasi dan Evaluasi APBDes	95 orang	95 orang				41.940.000	41.940.000	-
7	01	06	2.01	06					Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aser Desa	Jumlah peserta kegiatan pembinaan Bumdes dan Kopwan	285 orang	285 orang				63.880.000	63.880.000	-
7	01	06	2.01	16					Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah monev desa	22 desa	22 desa				31.940.000	31.940.000	-
7	01	06	2.01	17					Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Jumlah profil desa dan kecamatan yang disusun	23 data	23 data				31.940.000	31.940.000	-
3	**2**	**7**	**12**		**3.2.7.12**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEWILAYAHAN**	**KECAMATAN SIDAYU**									**5.032.590.900,00**	**4.645.931.309,00**	**386.659.591,00**
7	**01**	**01**							**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**persentase ketercapaian sasaran program OPD**	100%	100%				**4.002.542.700,00**	**3.826.200.109,00**	**176.342.591**
7	**01**	**01**	**2.01**						**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	13 dokumen	13 dokumen				**32.000.000,00**	**21.930.500,00**	**10.069.500**
7	01	01	2.01	01					**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	Jumlah buku rencana kerja SKPD	1 Buku	1 Buku				**10.000.000,00**	**7.065.000,00**	2.935.000
7	01	01	2.01	06					**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD**	Jumlah Dokumen RKA	10 Buku	10 Buku				**3.000.000,00**	**2.558.000,00**	442.000
7	01	01	2.01	07					**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD**	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10 Buku	10 Buku				**3.000.000,00**	**2.544.000,00**	456.000
7	**01**	**01**	**2.02**						**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD**	Jumlah Dokumen DPA SKPD	17 buku	17 buku				**3.000.000,00**	**2.490.000,00**	**510.000**
7	01	01	2.02	01					**Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD**	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	13 Buku	13 Buku				**3.000.000,00**	**2.179.000,00**	821.000
7	01	01	2.02	05					**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	Jumlah tersusunya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi	5 Laporan	5 Laporan				**10.000.000,00**	**5.094.500,00**	4.905.500
7	**01**	**01**	**2.06**						***Administrasi Keuangan Perangkat D***	Jumlah Laporan Kinerja yang Dievaluasi	12 bulan	12 bulan				***3.369.943.000,00***	***3.239.774.374,00***	**130.168.626**
7	01	01	2.06	01					***Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN***	Jumlah ASN yg menerima gaji & tunjangan	24 Orang	24 Orang				***3.363.943.000,00***	***3.236.501.374,00***	127.441.626
7	01	01	2.06	02					***Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD***	Jumlah Laporan/Buku Keuangan Akhir Tahun	1 Buku	1 Buku				***3.000.000,00***	***1.860.000,00***	1.140.000
7	01	01	2.06	04					***Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD***	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran SKPD	3 Laporan	3 Laporan				***3.000.000,00***	***1.413.000,00***	1.587.000
7	01	01	2.06	05					***Administrasi Kepegawaian Perangka***	**Jumlah Peserta Pembinaan Administrasi Sumberdaya Aparatur di Kecamatan**	31 Orang	31 Orang				***63.886.900,00***	***55.956.900,00***	7.930.000
7	01	01	2.06	06					***Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi***	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan	31 Orang	31 Orang				***63.886.900,00***	***55.956.900,00***	7.930.000

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
7	01	01	2.06	09					***Administrasi Umum Perangkat Daerı***	**Jumlah fasilitasi terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah**	12 Bulan	12 Bulan				***111.827.800,00***	***107.727.800,00***	4.100.000
7	**01**	**01**	**2.07**						***Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor***	Jumlah belanja Komponen Listrik	10 buah	10 buah				***3.000.000,00***	***3.000.000,00***	-
7	01	01	2.07	10					***Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor***	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang teredia	54 buah	54 buah				***65.000.000,00***	***63.937.000,00***	1.063.000
7	**01**	**01**	**2.08**						***Penyediaan Bahan Logistik Kantor***	Jumlah kegiatan kantor yg disediakan makan dan minum	18 Kegiatan	18 Kegiatan				***14.479.000,00***	***11.442.000,00***	**3.037.000**
7	01	01	2.08	02					***Penyediaan Barang Cetakan dan Pe***	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	2 jenis	2 jenis				***15.380.800,00***	***15.380.800,00***	-
7	01	01	2.08	03					***Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan***	Jumlah bahan bacaan	1 jenis	1 jenis				***1.800.000,00***	***1.800.000,00***	-
7	01	01	2.08	04					***Penyediaan Bahan/Materail***	Jumlah Materai/Buku cek	12 bulan	12 bulan				***2.508.000,00***	***2.508.000,00***	-
7	**01**	**01**	**2.09**						***Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD***	Persentase rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan	12 bulan				***9.660.000,00***	***9.660.000,00***	-
7	01	01	2.09	01					***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Kecamatan Sidayu**	6 Jenis	6 Jenis				***78.156.000,00***	***61.275.000,00***	16.881.000
7	01	01	2.09	02					***Pengadaan Mebel***	Jumlah belanja pengadaan mebel kantor	1 Jenis	1 Jenis				***20.475.000,00***	***20.475.000,00***	-
7	01	01	2.09	06					***Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya***	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	5 Jenis	5 Jenis				***57.681.000,00***	***40.800.000,00***	16.881.000
7	01	01	2.09	09					***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**Jumlah fasilitasi terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah**	12 bulan	12 bulan				***188.052.000,00***	***183.074.235,00***	4.977.765
7	01	01	2.09	11					***Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik***	Persentase jasa komunikasi, Rek. Telp dan Listrik	12 bulan	12 bulan				***27.252.000,00***	***22.274.235,00***	4.977.765
7	**01**	**02**							***Penyediaan Jasa Pelayanan Umum K***	Persentase jasa Pelayanan Umum kantor	12 bulan	12 bulan				***160.800.000,00***	***160.800.000,00***	-
7	**01**	**02**	**2.02**						***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	Jumlah fasilitasi Pemeliharaan terhadap sarana prasarana Aparatur	12 bulan	12 bulan				***158.677.000,00***	***156.461.300,00***	**2.215.700**
7	01	02	2.02	03					***Pemeliharaan Peralatan dan Mesin L***	Persentase terpeliharanya kendaraan dinas roda 2 & 4	12 bulan	12 bulan				***19.480.000,00***	***17.264.300,00***	2.215.700
7	**01**	**03**							***Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya***	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	3 Unit	3 Unit				***124.297.000,00***	***124.297.000,00***	-
									Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang teredia	20 Unit	20 Unit				***14.900.000,00***	***14.900.000,00***	
									PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat**	4	4				***12.839.900,00***	***12.839.900,00***	
									Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja PerangkatDaerah yang ada di Kecamatan	Terlaksananya sosialisasi Administrasi Kependudukan	80	82				***12.839.900,00***	***12.839.900,00***	

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
7	**01**	**03**	**2.01**						***Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan***	Terlaksananya sosialisasi Administrasi Kependudukan	147 Orang	147 Orang				***12.839.900,00***	***12.839.900,00***	-
7	01	03	2.01	01					***PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN***	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	100%	100%				***623.833.700,00***	***521.903.700,00***	101.930.000
										Persentase Musrenbang Kelurahan yang difasilitasi	100%	100%						
										Persentase Pelaku Ekonomi di Wilayah Kecamatan yang difasilitasi	14%	14%						
										Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	53%	53%						
										Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina	47%	47%						
7	01	03	2.01	03					***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	**Jumlah pelaksanaan koordinasi pemberdayaan desa**	28 Kegiatan	28 Kegiatan				***328.930.000,00***	***304.328.000,00***	24.602.000
7	**01**	**03**	**2.03**						**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa**	Jumlah Peserta Musrenbang	100 orang	100 Orang				***113.105.000,00***	***113.105.000,00***	-
7	01	03	2.03	01					**Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyrakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan**	Jumlah buku RKPDes	21 buku	21 buku				***69.480.000,00***	***45.158.000,00***	24.322.000
7	01	03	2.03	04					**Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	Jumlah Pembinaan Kopwan, Bumdes	25 Kegiatan	25 Kegiatan				***146.345.000,00***	***146.065.000,00***	280.000
7	**01**	**04**							***Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan***	Jumlah Lembaga Yang Dibina	100%	100%				***294.903.700,00***	***217.575.700,00***	**77.328.000**
7	**01**	**04**	**2.01**						***Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan***	***Jumlah Lembaga Yang Dibina***	5 Lembaga	5 Lembaga				***294.903.700,00***	***217.575.700,00***	**77.328.000**
7	01	04	2.01	01					***PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM***	***Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi***	100%	100%				***189.136.200,00***	***177.707.200,00***	11.429.000
7	**01**	**04**	**2.02**						***Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum***	***Jumah pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum.***	12 bulan	12 bulan				***119.051.000,00***	***110.369.000,00***	**8.682.000**
7	01	04	2.02	01					***Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia danInstansi Vertikal di Wilayah Kecamatan***	Jumlah peserta pembinaan Linmas desa se kec.	25 orang	25 orang				***56.158.900,00***	***50.726.900,00***	5.432.000
7	**01**	**05**							***Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh agama dan Tokoh Masyarakat***	Jumlah Konflik/Kegiatan Keagamaan yang di Fasilitasi	28 orang	28 orang				***62.892.100,00***	***59.642.100,00***	**3.250.000**
7	**01**	**05**	**2.01**						***Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia***	**Prosentase pelanggaran yang tertangani**	100%	100%				*70.085.200,00*	*67.338.200,00*	**2.747.000**

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
7	01	05	2.01	04					***Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia***	Jumlah koordinasi dan Pelaksanaan kegiatan penegakan Perda dan Perkada	4 kali	4 kali				*70.085.200,00*	*67.338.200,00*	2.747.000
7	**01**	**06**							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu**	100%	100%				***204.238.400,00***	***107.280.400,00***	**96.958.000**
7	**01**	**06**	**2.01**						Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah desa yang fasilitasi penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan**	21 Desa	21 Desa				***204.238.400,00***	***107.280.400,00***	**96.958.000**
7	01	06	2.01	01					**Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa**	Jumlah Laporan Peraturan Desa	21 buku	21 buku				***21.008.000,00***	***15.938.000,00***	5.070.000
7	01	06	2.01	03					**Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa**	Jumlah desa yang dibina	21 Desa	21 Desa				***62.975.000,00***	***28.674.000,00***	34.301.000
7	01	06	2.01	07					**Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa**	Jumlah Desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa	21 Desa	21 Desa				***25.089.900,00***	***21.414.900,00***	3.675.000
7	01	06	2.01	16					**Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa**	Jumlah peserta pelatihan manajemen pemerintahan desa	126 orang	126 orang				***80.009.500,00***	***30.219.500,00***	49.790.000
									Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Pembinaan BPD	4 Kali	4 Kali				***15.156.000,00***	***11.034.000,00***	4.122.000
3	**2**	**7**	**13**		**3.2.7.13**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEWILAYAHAN**	**KECAMATAN UJUNG PANGKAH**									**4.483.948.600**	**4.223.229.825**	**249.003.775**
7	**01**	**01**							**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketercapaian sasaran program OPD**	**100%**	**95%**	Tidak terlaksananya 8 Kegiatan FGD, dan efiensisasi anggaran	di lakukan koordinasi antar Instasi pemangku kepentingan, jadwal kegiatan hrs di lakukan sesuai skidul penetapan OPD	sangat di perhatikan,dan jadwal FGD sesuai dg agendanya	**3.455.156.500**	**3.379.838.725**	**72.602.775**
7	**01**	**01**	**2.01**						**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan OPD	4 Dokumen	4 Dokumen				**26.000.000**	**26.000.000**	-
7	01	01	2.01	01					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja dan Keuangan	2 Dokumen	2 Dokumen				5.500.000	5.500.000	
7	01	01	2.01	02					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja SKPD dan Renstra SKPD	10 Buku	10 Buku				6.000.000	6.000.000	
		01		03					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD									
7	01	01	2.01	04					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	10 Buku	10 Buku				6.000.000	6.000.000	
7	01	01	2,01	05					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD									
7	01	01	2.01	06					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Buku	15 Buku				8.500.000	8.500.000	
7	01	01	**2.02**						**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah laporan Kinerja administrasi Keuangan						**2.857.379.000**	**2.795.741.189**	**66.422.811**
7	01	01	2.02	01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN di Lingkungan Kecamatan Ujungpangkah	100	100				2.848.879.000	2.787.241.189	61.637.811
7	01	01	2.02	05					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan akhir tahun anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen				8.500.000	8.500.000	

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
									Administrasi umum Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Peserta Bimtek	100 Orang	100 Orang				**7.500.000**	-	-
									Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Bimtek	30 Orang	30 Orang				7.500.000	-	
7	01	01	**2.06**						**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Fasilitasi terhadap Pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah**						**218.216.500**	**213.431.500**	**4.785.000**
7	01	01	2.06	02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor	44 Jenis	44 Jenis				130.230.500	130.150.500	80.000
7	01	01	2.06	04					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kebutuhan makanan dan minuman	3 Jenis	3 Jenis				38.000.000	38.000.000	
7	01	01	2.06	05					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan untuk administrasi	1 Jenis	1 Jenis				19.606.000	19.606.000	
7	01	01	2.06	06					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaar	3 Jenis	3 Jenis				4.380.000	4.380.000	
7	01	01	2.06	09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang difasilitasi	2 Jenis	2 Jenis				26.000.000	21.295.000	4.705.000
7	01	01	**2.08**						**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Fasilitasi terhadap Pelaksnaan Tupoksi Perangkat Daerah**						**196.250.000**	**196.240.636**	**9.364**
7	01	01	2.08	02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah fasilitasi rekening listrik, air dan telepon	12 Bulan	12 Bulan				30.450.000	30.440.636	9.364
7	01	01	2.08	03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Jenis	3 Jenis				17.000.000	17.000.000	
7	01	01	2.08	04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah fasilitasi pembayaran jasa administrasi kantor	7 org/12 Bulan	7 org/12 Bulan				148.800.000	148.800.000	
7	01	01	**2.09**						**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Fasilitasi terhadap Pelaksnaan Tupoksi Perangkat Daerah**						**149.811.000**	**148.425.400**	**1.385.600**
									Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perorangan Dinas atau Kemdaraan Dinas Jabatan	Jumlah fasilitasi Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	3 unit R 4	3 unit R 4				33.600.000	32.214.400	1.385.600
7	01	01	2.09	02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah fasilitasi Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara*	3 unit R 4	3 unit R 4				24.000.000	24.000.000	
									Pemeliharaan Pelaratana Mesin Lainnya	Jumlah Barang dan Aset Milik Daerah yanng terpelihara	3 Jenis	3 Jenis				19.950.000	19.950.000	
7	01	01	2.09	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah fasilitasi pemeliharaan gedung kantor	2 Unit	2 Unit				72.261.000	72.261.000	
7	01	01	2.09	10					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
7	**01**	**02**							**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tingkat Kematangan Pelayanan Publik**						**1.028.792.100**	**843.391.100**	**176.401.000**

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
7	**01**	**02**	**2,02**						**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakanan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan**								
7	01	02	2,02	03					Peningkatan efektifitas Pelaksnaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaaan	13 Desa/26 org	13 Desa/26 org						
7	**01**	**03**							**Program Pemberdayaan Masyarakat**	**Persentase koordinasi kegiatan Pemberdayaan masyarakat**	100%	100%				**269.573.500**	**245.638.600**	**23.934.900**
7	**01**	**3**	**2,01**						**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan D**	**Persentase jumlah Koordinasi kegiatan Pemberdayaan masyarakat**	100%	100%				**220.500.000**	**196.565.100**	**23.934.900**
7	01	02	2.01	01					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	**Terlaksanannya partisipasi dalam Forum Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa**	13 Desa	13 Desa				87.540.000	77.375.100	10.164.900
									Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wialyah Kecamatn	**Terlaksananya Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	13 Desa	13 Desa				132.960.000	119.190.000	13.770.000
7	01	03	2,03	04					**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Lembaga yang dibina**						**49.073.500**	**49.073.500**	-
									Peningkatan Kapisitas Lembaga Kema	Jumlah peserta Pembinaan PKK di Tingkat Kecamatan						49.073.500	49.073.500	
7	**01**	**04**							**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban UMUM**	**Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi**						**208.179.000**	**169.439.000**	**38.740.000**
7	**01**	**04**	**2,02**						**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Jumlah Penegakan Konflik**								
7	01	04	2,02	01					Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan /atau Kepolosian Negara Republik Indonesia									
									Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dann Instasi Vertikal di Wialayah Kecamatan							208.179.000	169.439.000	38.740.000
7	01	05							**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerinhan Umum**	**Persentase Penugasan Kepala Daerah yang difasilitasi**								
7	01	05	2,01						**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Pengadaan Kepala Daerah**	**Jumlah Penugasan Kepala Daerah**						**8.200.200**	**8.200.200**	-
7	01	05	2.01	02					Pelaksanaan Tugas Farum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						8.200.200	8.200.200	
7	01	06							**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu**								

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
7	01	06	2.01						**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Fasilitasi dan rekomendasi Pemerintah Desa**						**542.839.400**	**420.113.300**	**113.726.100**
7	01	06	2,01	03					Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi Penyusunan Perkades	13 desa	13 desa				15.000.000	999.900	5.000.100
									Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah peserta Desa yang mengikuti fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa	13 Desa	13 Desa				50.709.900	50.709.900	
									Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala De	Jumlah Peserta yang mengikuti Fasilitasi BPD	13 Desa	13 Desa				59.480.000	47.530.000	11.950.000
									Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan fungsi Badan Pemusyawaratan Desa	Jumlah Pelaksanaan fasilitasi BPD	13 Desa	13 Desa				59.479.900	59.479.900	
									Rekomedasi Pengangangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa						7.499.800	3.768.800	3.731.000
									Faslitasi Singkronisasi Perencanaan Pembangunan daerah dengan Desa	Jumlah Fasilitasi Singkronisasi Perencanaan Pembangunan daerah dan Desa						116.629.800	78.119.800	38.510.000
									Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyaratan Desa	Jumlah Fasilitasi pelaksanaan Tugas ,Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatn Desa						234.040.000	179.505.000	54.535.000
3	**2**	**7**	**14**		**3.2.7.14**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEWILAYAHAN**	**KECAMATAN PANCENG**									**4.759.750.596**	**4.577.135.449**	**170.731.147**
7	**14**	**1**							**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketercapaian sasaran Program OPD**	**100%**	**100%**				**3.844.501.396**	**3.661.886.249**	**170.731.147**
7	**14**	**1**	**2,01**						**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**95%**	**95%**				**22.266.000**	**10.382.000**	**-**
7	14	1	2,01	0	1				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Renstra OPD	9 Dokumen	9 Dokumen				3.484.000	3.484.000	-
7	14	1	2,01	0	2				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				2.876.000	2.876.000	-
7	14	1	2,01	0	3				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				3.000.000	3.000.000	-
7	14	1	2,01	0	4				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				3.004.000	3.004.000	-

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
7	14	1	2,01	0	5				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				3.004.000	3.004.000	-
7	14	1	2,01	0	6				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian dan iktisar realisasi kinerja yang disusun	3 Lap.	3 Lap.				6.898.000	6.898.000	-
7	**14**	**1**	**2,02**						**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen pelaporan Kinerja dan Administrasi Keuangan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**				**3.149.546.596**	**2.978.956.874**	**170.589.722**
7	14	1	2,02	1					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan				3.141.250.596	2.970.660.874	170.589.722
7	14	1	2,02	5					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan / Dokumen Keuangan Akhir Tahun	1 Dok	1 Dok				4.426.000	4.426.000	-
7	14	1	2,02	7					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran yang disusun	3 Lap.	3 Lap.				3.870.000	3.870.000	-
7	**14**	**1**	**2,05**						**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Pelaksanaan Administrasi Sumberdaya Aparatur di Kecamatan**	**100%**	**100%**				**106.448.000**	**106.448.000**	**-**
7	14	1	2,05	10					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta sosialisasi	35 Orang	35 Orang				106.448.000	106.448.000	-
7	**14**	**1**	**2,06**						**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah fasilitasi terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**12 Bulan**				**206.631.800**	**206.631.800**	**-**
									Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	**Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan**	12 Bulan	12 Bulan				5.403.000	5.403.000	-
7	14	1	2,06	2					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	12 Bulan				96.825.000	96.825.000	-
									Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan				15.262.000	15.262.000	-
7	14	1	2,06	4					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik	12 Bulan	12 Bulan				43.634.000	43.634.000	-
7	14	1	2,06	5					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	2 Jenis	2 Jenis				12.127.800	12.127.800	-
7	14	1	2,06	6					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan/majalah	12 Bulan	12 Bulan				4.380.000	4.380.000	-
7	14	1	2,06	9					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12 Bulan	12 Bulan				29.000.000	29.000.000	-
7	**14**	**1**	**2,08**						**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah fasilitasi terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**12 Bulan**				**239.127.000**	**238.985.575**	**141.425**

Kode Rekening				No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
7	14	1	2,08	2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah fasilitasi pembayaran rekening listrik, air dan telepon	12 Bulan	12 Bulan				30.327.000	30.185.575	141.425
7	14	1	2,08	4				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah fasilitasi pembayaran jasa pelayanan dan administrasi kantor	12 Bulan	12 Bulan				208.800.000	208.800.000	-
7	**14**	**1**	**2,09**					**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah fasilitasi Pemeliharaan terhadap sarana prasarana Aparatur**	**12 Bulan**	**12 Bulan**				**120.482.000**	**120.482.000**	**-**
7	14	1	2,09	1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	6 Unit				85.450.000	85.450.000	-
				2				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit				-		
				5				Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit				-		
				6				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit				13.000.000	13.000.000	-
7	14	1	2,09	9				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah fasilitasi pemeliharaan gedung kantor	2 Unit	2 Unit				22.032.000	22.032.000	-
7	14	1	2,09	10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah fasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	4 Unit	12 Bulan				-	11.999.848 -	11.999.848
7	**14**	**2**						**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tingkat Kematangan Pelayanan Publik**	**2**	**2**				**294.019.200**	**294.019.200**	**-**
7	**14**	**2**	**2,02**					**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pemerintah ditingkat Kecamatan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**				**225.019.200**	**225.019.200**	**-**
7	14	2	2,02	3				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	14 Desa	14 Desa				225.019.200	225.019.200	-
7	**14**	**2**	**2,02**					**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan publik**	**12 Bulan**	**12 Bulan**				**12.220.000**	**12.220.000**	**-**
								Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						12.220.000	12.220.000	
7	**14**	**2**	**2,02**					**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**12 Bulan**	**12 Bulan**				**56.780.000**	**56.780.000**	**-**
								Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						56.780.000	56.780.000	

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
7	**14**	**3**							**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Musrenbang yang difasilitasi, Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi**	**100%**	**100%**				**212.805.000**	**212.805.000**	**-**
7	**14**	**3**	**2,01**						**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa**	**12 Bulan**	**12 Bulan**				**82.616.000**	**82.616.000**	**-**
7	14	3	2,01	1					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah jenis Kegiatan Forum Musyawarah	3 Jenis	3 Jenis				82.616.000	82.616.000	-
7	14	3	2,01	3					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Lembaga	3 Lembaga				-		-
7	**14**	**3**	**2,01**						**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Jumlah fasilitasi Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa ditingkat Kecamatan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**				**130.189.000**	**130.189.000**	**-**
									Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	**1 LKD**					49.300.000	49.300.000	-
									Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	**3 Laporan**					80.889.000	80.889.000	-
7	**14**	**4**							**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi**	**100%**	**100%**				**197.824.000**	**197.824.000**	**-**
7	**14**	**4**	**2,01**						**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumah pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum.**	**12 Bulan**	**12 Bulan**				**134.804.000**	**134.804.000**	**-**
7	14	4	2,01	1					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanan Koordinasi Keg. Pengendalian Keamanan Lingkungan, Jumlah peserta pembinaan Kewaspadaan dini	12 Bulan	12 Bulan				134.804.000	134.804.000	-
7	**14**	**4**	**2,02**						**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Jumlah koordinasi penegakan dan penegakan Perda dan Perkada**	**14 Desa**	**14 Desa**				**63.020.000**	**63.020.000**	**-**
7	14	4	2,02	1					Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah koordinas dan Pelaksanaan kegiatan penegakan Perda dan Perkada	14 Desa	14 Desa				63.020.000	63.020.000	-
7	**14**	**5**							**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penugasan Kepala Daerah yang difasilitasi**	**100%**	**100%**				-	-	**-**
7	**14**	**5**	**2,01**						**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**56 Orang**	**56 Orang**				-	-	**-**

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
7	14	5	2,01	2					Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah peserta BIMTEK	56 Orang	56 Orang				-	-	-
7	**14**	**6**							**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Desa**	**100%**	**96%**				**210.601.000**	**210.601.000**	**-**
7	**14**	**6**	**2,01**						**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah fasilitasi penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**12 Bulan**	**12 Bulan**				**210.601.000**	**210.601.000**	**-**
7	14	6	2,01	1					Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	28 Dokumen	28 Dokumen				8.500.000	8.500.000	-
7	14	6	2,01	2					Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	14 Dokumen	14 Dokumen				55.400.000	55.400.000	-
7	14	6	2,01	3					Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan pengelolaan keuangan desa dan aset desa	14 Dokumen	14 Dokumen				8.500.000	8.500.000	-
7	14	6	2,01	7					Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	14 Dokumen	14 Dokumen				56.335.000	56.335.000	
7	14	6	2,01	12					Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah fasilitasi Pembinaan Administarsai Lembaga Kemayarakatan	14 Dokumen	14 Dokumen				8.886.000	8.886.000	-
7	14	6	2,01	16					Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	14 Dokumen	14 Dokumen				66.980.000	66.980.000	-
7	14	6	2,01	17					Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah fasilitasi penyusunan Prodeskel	14 Laporan	14 Laporan				6.000.000	6.000.000	-
3	**2**	**7**	**15**		**3.2.7.15**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEWILAYAHAN**	**KECAMATAN BUNGAH**									**4.898.405.000**	**4.728.601.953**	**169.803.047**
7	01	01							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase ketercapaian sasaran program OPD**	100%	100%				3.997.387.300	3.942.004.253	55.383.047
7	01	01	2.01						Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat daerah**	3 dokumen	3 dokumen				15.640.000	15.640.000	-
7	01	01	2.01	01					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	6 dokumen				5.885.000	5.885.000	-

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
7	01	01	2.01	06					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	7 Laporan				6.125.000	6.125.000	-
7	01	01	2.01	07					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan				3.630.000	3.630.000	-
7	01	01	2.02						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah**	12 bulan	12 bulan				3.243.026.561	3.204.663.665	38.362.896
7	01	01	2.02	01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang	25 Orang				3.240.011.561	3.201.648.665	38.362.896
7	01	01	2.02	05					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan				3.015.000	3.015.000	-
7	01	01	2.06						Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah fasilitasi penyediaan administrasi umum Perangkat daerah**	12 bulan	12 bulan				159.803.100	159.660.000	143.100
7	01	01	2.06	01					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				5.415.000	5.415.000	-
7	01	01	2.06	02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				90.693.100	90.550.000	143.100
7	01	01	2.06	04					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				12.565.000	12.565.000	-
7	01	01	2.06	05					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				11.390.000	11.390.000	-
7	01	01	2.06	06					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen				3.500.000	3.500.000	-
7	01	01	2.06	09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Persen					36.240.000	36.240.000	-
7	01	01	2.07						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tesedia**	9 jenis	9 jenis				35.974.695	35.955.000	19.695

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
7	01	01	2.07	10					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	47 Unit	47 Unit				35.974.695	35.955.000	19.695
7	01	01	2.08						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah fasilitasi penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah**	12 bulan	12 bulan				336.914.200	320.653.793	16.260.407
7	01	01	2.08	02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				42.064.200	41.803.793	260.407
7	01	01	2.08	03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				11.650.000	11.650.000	-
7	01	01	2.08	04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				283.200.000	267.200.000	16.000.000
7	01	01	2.09						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah fasilitasi pemeliharaan barang milik daerah**	12 bulan	12 bulan				206.028.744	205.431.795	596.949
7	01	01	2.09	01					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				33.600.000	33.600.000	-
7	01	01	2.09	02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit				33.600.000	33.600.000	-
7	01	01	2.09	06					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	16 Unit				11.360.000	11.360.000	-
7	01	01	2.09	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				121.580.000	120.983.051	596.949
7	01	01	2.09	11					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	9 Unit				5.888.744	5.888.744	-
7	01	02							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Tingkat Kematangan Pelayanan Publik**	2	2				51.790.000	43.390.000	8.400.000
7	01	02	2.02						Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan publik**	1 kegiatan	1 kegiatan				51.790.000	43.390.000	8.400.000

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
7	01	02	2.02	03					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	5 Laporan				51.790.000	43.390.000	8.400.000
7	01	03							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu**	77%	77%				477.737.700	428.217.700	49.520.000
										Persentase Pelaku Ekonomi di Wilayah Kecamatan yang difasilitasi	80%	80%						
										Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	83%	83%						
										Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina	70%	70%						
7	01	03	2.01						Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa**	12 bulan	12 bulan				156.995.000	137.395.000	19.600.000
7	01	03	2.01	01					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 Lembaga	8 Lembaga				32.225.000	32.225.000	-
7	01	03	2.01	03					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	27 Lembaga	27 Lembaga				124.770.000	105.170.000	19.600.000
7	01	03	2.03						Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang dibina**	12 bulan	12 bulan				320.742.700	290.822.700	29.920.000
7	01	03	2.03	01					Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah fasilitasi lembaga kemasyarakatan dibidangpemberdaya an masyarakat	12 Bulan	12 Bulan				306.782.700	279.662.700	27.120.000
7	01	03	2.03	04					Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	4 Laporan	4 Laporan				13.960.000	11.160.000	2.800.000
7	01	04							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi**	100%	100%				153.910.000	139.310.000	14.600.000
7	01	04	2.01						Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Tarntibum**	12 bulan	12 bulan				94.920.000	87.520.000	7.400.000

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
7	01	04	2.01	01					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan				94.920.000	87.520.000	7.400.000
7	01	04	2.02						Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**Jumlah koordinasi penegakan dan penegakan Perda dan Perkada**	12 bulan	12 bulan				58.990.000	51.790.000	7.200.000
7	01	04	2.02	01					Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan				58.990.000	51.790.000	7.200.000
7	01	05							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase Penugasan Kepala Daerah yang difasilitasi**	100%	100%				12.695.000	11.795.000	900.000
7	01	05	2.01						Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah**	1 kali	1 kali				12.695.000	11.795.000	900.000
7	01	05	2.01	04					Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	15 Orang	15 Orang				12.695.000	11.795.000	900.000
7	01	06							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu**	96%	96%				204.885.000	163.885.000	41.000.000
7	01	06	2.01						Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa**	12 bulan	12 bulan				204.885.000	163.885.000	41.000.000
7	01	06	2.01	01					Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	44 Dokumen	44 Dokumen				27.695.000	21.195.000	6.500.000

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
7	01	06	2.01	03					Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	12 Dokumen				27.695.000	18.395.000	9.300.000
7	01	06	2.01	07					Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	22 Dokumen	22 Dokumen				27.695.000	19.295.000	8.400.000
7	01	06	2.01	16					Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	12 Dokumen	12 Dokumen				121.800.000	105.000.000	16.800.000
3	**2**	**7**	**16**		**3.2.7.16**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEWILAYAHAN**	**KECAMATAN DUKUN**									**4.616.185.000**	**4.463.727.277**	**152.457.723**
7	**01**	**01**							**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketercapaian sasaran program OPD**						**3.578.459.000**	**3.530.426.277**	**48.032.723**
7	**01**	**01**	**2.01**						**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah	**3 dokumen**	3 dokumen				22.000.000	21.999.900	**100**
7	01	01	2.01	01					PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANA	Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Renstra OPD	6 dokumen	6 dokumen				10.000.000	10.000.000	-
7	01	01	2.01	02					KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	Jumlah Dokumen SAKIP	7 Laporan	7 Laporan				7.000.000	6.999.900	**100**
		01		03					EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen SAKIP	3 Laporan	3 Laporan				5.000.000	5.000.000	-
7	01	01	**2.02**						**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah laporan Kinerja administrasi Keuangan	6 dokumen	6 dokumen				**2.996.515.000**	**2.951.580.277**	**44.934.723**
7	01	01	2.02	01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	**12 bulan**	12 bulan				2.989.515.000	2.944.580.277	**44.934.723**
7	01	01	2.02	05					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan/dokumen keuangan akhir tahun	5 Laporan	5 Laporan				7.000.000	7.000.000	-
7	01	01	**2.06**						**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Fasilitasi terhadap Pelaksnaan Tupoksi Perangkat Daerah	**12 bulan**	12 bulan				**191.183.500**	**191.038.500**	**145.000**
7	01	01	2.06	02					PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	8 jenis	8 jenis				8.000.000	8.000.000	-
7	01	01	2.06	04					PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLEI	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	6 jenis	6 jenis				51.064.500	51.064.500	-
7	01	01	2.06	05					PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTO	jumlah penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	12 bulan				66.119.000	66.119.000	-
7	01	01	2.06	06					PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN	jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5 jenis	5 jenis				18.000.000	18.000.000	-
7	01	01	2.06	09					PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PE	Jumlah penyediaan bahan bacaan/majalah	12 bulan	12 bulan				5.000.000	5.000.000	-

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
7	01	01	2.06	09					PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDIN	jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan	12 bulan				43.000.000	42.855.000	**145.000**
7	01	01	**2.08**						**PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	Jumlah Fasilitasi terhadap Pelaksnaan Tupoksi Perangkat Daerah	**9 jenis**	9 jenis				**58.892.000**	**58.892.000**	-
7	01	01	2.08	02					PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Jumlah pengadaan sarpras	9 jenis	9 jenis				58.892.000	58.892.000	-
7	01	01	**2.08**						**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	jumlah penyediaan jasa pelayanan kantor	**12 bulan**	12 bulan				**162.178.500**	**161.957.300**	**221.200**
7	01	01	2.08	02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah fasilitasi pembayaran rekening listrik, air dan telepon	12 bulan	12 bulan				28.978.500	28.757.300	**221.200**
7	01	01	2.08	04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah fasilitasi pembayaran jasa administrasi kantor	12 bulan	12 bulan				133.200.000	133.200.000	-
7	01	01	**2.09**						**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah fasilitasi pemeliharaan terhadap sarana prasarana aparatur	12 bulan	12 bulan				**147.690.000**	**144.958.300**	**2.731.700**
7	01	01	2.09	02					PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	Jumlah fasilitasi pemeliharaan peralatan kantor	12 bulan	12 bulan				35.100.000	34.441.300	**658.700**
7	01	01	2.09	09					PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	Jumlah fasilitasi pemeliharaan gedung kantor	2 gedung	2 gedung				54.350.000	52.277.000	**2.073.000**
7	01	01	2.09	10					PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Jumlah fasilitasi pemeliharaan peralatan kantor	12 bulan	12 bulan				7.960.000	7.960.000	-
7	01	01	2.09	09					PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	Jumlah fasilitasi pemeliharaan gedung kantor	12 bulan	12 bulan				43.300.000	43.300.000	-
7	01	01	2.09	10					PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Jumlah fasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	12 bulan	12 bulan				6.980.000	6.980.000	-
7	**01**	**02**							**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHASN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tingkat Kematangan Pelayanan Publik**						**25.494.000**	**25.494.000**	-
7	**01**	**02**	**2,02**						**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksnakanan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan				**25.494.000**	25.494.000	-
7	01	02	2,02	03					Peningkatan efektifitas Pelaksnaan Pelayana Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah peserta pembinaan pelayanan publik dan sosialisasi kependudukan	2 kali	2 kali				25.494.000	25.494.000	-
7	**01**	**03**							**Program Pemberdayaan Masyarakat**	Persentase koordinasi kegiatan Pemberdayaan masyarakat	12 bulan	12 bulan				**541.344.000**	**493.974.000**	**47.370.000**
7	**01**	**3**	**2,01**						**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan D**	Persentase jumlah Koordinasi kegiatan Pemberdayaan masyarakat	12 bulan	12 bulan				171.280.000	154.030.000	**17.250.000**
7	01	02	2.01	01					PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA	Jumlah jenis kegiatan forum musyawarah	150 orang	150 orang				72.030.000	63.630.000	**8.400.000**

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
7	01	02	2.01	01					PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN DI WILAYAH KECAMATAN	jumlah pelaksanaan kegiatan FKUB	26 desa	26 desa				99.250.000	90.400.000	**8.850.000**
7	**01**	**03**	**2,03**						**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Jumlah Lembaga yang dibina	**12 bulan**	12 bulan				**370.064.000**	**339.944.000**	**30.120.000**
7	01	03	2,03	01					Penyelenggaraan Lembaga Kemasyara	Jumlah jenis kegiatan forum musyawarah	12 bulan	12 bulan				266.870.000	247.950.000	**18.920.000**
7	01	03	2,03	04					Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonc	jumlah fasilitasi pengembangan usaha ekonomi	26 desa	26 desa				103.194.000	91.994.000	**11.200.000**
7	**01**	**04**							**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban UMUM**	**Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi**	12 bulan	12 bulan				**102.500.000**	**96.900.000**	**5.600.000**
7	**01**	**04**	**2,02**						**KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Jumlah Penegakan Konflik	12 bulan	12 bulan				69.940.000	67.140.000	**2.800.000**
7	01	04	2,02	01					SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	jumlah pelaksanaan pembinaan keamanan lingkungan	12 bulan	12 bulan				69.940.000	67.140.000	**2.800.000**
7	**01**	**04**	**2,02**						**KOORDINASI PENERAPAN DAN PENE(**	Jumlah Penegakan Konflik	12 bulan	12 bulan				32.560.000	29.760.000	**2.800.000**
7	01	04	2,02	01					Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan /atau Kepolosian Negara Republik Indonesia	jumlah pelaksanaan penegakkan perda	12 bulan	12 bulan				32.560.000	29.760.000	**2.800.000**
7	01	05							**Program Penyelenggaraan Urusan Pe**	Persentase Penugasan Kepala Daerah yang difasilitasi	**4 kali**	4 kali				71.365.000	64.715.000	**6.650.000**
7	01	05	2,01						**Penyeelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Pengadaan Kepala Daerah**	Jumlah Penugasan Kepala Daerah						71.365.000	64.715.000	**6.650.000**
7	01	05	2.01	02					PEMBINAAN KERUKUNAN ANTARSUKKU DAN INTRASUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL DAN NASIONAL	Jumlah Pelaksanaan FKUB	1 kali	1 kali				54.395.000	47.745.000	**6.650.000**
7	01	05	2.01	02					PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN	jumlah pelaksanaan forkopimcam	3 kali	3 kali				16.970.000	16.970.000	-
7	01	06							**Program Pembinaan dan Pengawasar**	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	**96%**	**100%**				297.023.000	252.218.000	**44.805.000**
7	01	06	2.01						**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	**12 bulan**	12 bulan				297.023.000	252.218.000	**44.805.000**
7	01	06	2,01	03					FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN	jumlah fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades	52 dokumen	52 dokumen				39.740.000	34.140.000	**5.600.000**
7	01	06	2,01	03					FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA	jumlah fasilitasi pembinaan administrasi pemerintahan Desa	12 bulan	12 bulan				42.740.000	37.140.000	**5.600.000**
7	01	06	2,01	03					FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET	jumlah fasilitasi pembinaan pengelolaan keuangan desa	12 bulan	12 bulan				68.613.000	63.013.000	**5.600.000**
7	01	06	2,01	03					FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA	Jumlah fasilitasi pembinaan BPD	26 desa	26 desa				21.770.000	21.770.000	-

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
7	01	06	2,01	03					FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF	Jumlah fasilitasi penyusunan RKPDes	3 bulan	3 bulan				59.480.000	42.675.000	**16.805.000**
7	01	06	2,01	03					FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Jumlah fasilitasi penyusunan Prodeskel	12 bulan	12 bulan				45.710.000	37.310.000	**8.400.000**
7	01	06	2,01	03					KOORDINASI PENDAMPINGAN DESA DI WILAYAHNYA	Jumlah fasilitasi penyusunan Prodeskel	26 desa	26 desa				18.970.000	16.170.000	**2.800.000**
3	**2**	**7**	**17**		**3.2.7.17**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEWILAYAHAN**	**KECAMATAN SANGKAPURA**									**4.151.513.000**	**3.433.820.803**	**717.692.197**
7	**01**	**01**			i				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD**	**100%**	**100%**				**3.854.931.220**	**3.252.343.603**	602.587.617
7	**01**	**01**	**2**	**01**					**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Capaian Kinerja**	**5 dokumen**	**5 dokumen**				**46.260.000**	**18.542.200**	**27.717.800**
7	**01**	**01**	**2**	**01**					**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	Jumlah buku rencana kerja SKPD	20 buku	20 buku				**20.460.000**	**6.900.000**	**13.560.000**
7	**01**	**01**	**2**	**01**					**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**	Jumlah buku RKA SKPD	5 buku	5 buku				**19.360.000**	5.800.000	13.560.000
7	**01**	**1**	**2**	**01**					**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	Jumlah tersusunnya laporan kinerja & ikhtisar realisasi	22 buku	22 buku				6.440.000	5.842.200	597.800
7	**01**	**01**	**2**	**02**					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja dan Administrasi Keuangan**	**2 dokumen**	**2 dokumen**				2.562.543.000	2.508.802.353	53.740.647
7	**01**	**01**	**2**	**02**					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji & Tunjangan Asn di Kecamatan Sangkapura	20 orang	20 orang				2.558.553.000	2.508.802.353	49.750.647
7	01	01	2	02					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah tersusunnya Laporan Kinerja & ikhtisar Realisasi	4 buku	4 buku	Tidak melaksanakan Koordinasi dg berlayar ke daratan	Koordinasi dilaksanakan dg komunikasi via whats App		3.990.000	-	3.990.000
7	01	01	2	06					Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Rekening Penyediaan Administrasi Umum**	**5 rekening**	**5 rekening**				700.605.220	281.543.250	419.061.970
7	01	01	2	06					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak & Penggandaan	2 jenis	2 jenis				39.232.000	38.699.200	532.800
7	01	01	2	06					Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan tamu yang Terfasilitasi	3 kali	3 kali				53.062.500	42.105.000	10.957.500
7	01	01	2	06					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentasi Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi	100%	100%	Tidak semua pekerjaan dg melaksanakan Koordinasi dg berlayar ke daratan	Koordinasi dilaksanakan dg komunikasi via whats App		608.310.720	200.739.050	407.571.670
7	01	01	2	07					PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	**Jumlah Jenis Kegiatan**	**3 jenis**	**3 jenis**				69.670.000	67.358.000	2.312.000
7	01	01	2	07					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	100%	100%				69.670.000	67.358.000	2.312.000
7	01	01	2	08					PENYEDIA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	**Jumlah Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	**3 jenis**	**3 jenis**				358.440.000	296.174.000	62.266.000
7	01	01	2	08					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembiayaan Jasa Komunikasi dan Listrik	12 bulan	12 bulan				27.840.000	20.674.000	7.166.000

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
7	01	01	2	08					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Perawatan Peralatan Kerja	12 bulan	12 bulan				33.000.000	28.000.000	5.000.000
7	01	01	2	08					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	10 orang	10 orang	Kelebihan penganggaran	Menyesuaikan penganggaran dg kondisi real		297.600.000	247.500.000	50.100.000
7	01	01	2	09					PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	**Jumlah Barang dan Aset milik Daerah yang terpelihara**	**8 jenis**	**8 jenis**				117.413.000	79.923.800	37.489.200
7	01	01	2	09					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4	100%	100%	Kelebihan penganggaran	Menyesuaikan penganggaran dg kondisi real		42.260.000	17.654.000	24.606.000
7	01	01	2	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	3 unit	3 unit	Kelebihan penganggaran	Menyesuaikan penganggaran dg kondisi real		37.208.000	24.464.800	12.743.200
7	01	01	2	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase Pemeliharaan Gedung Kantor	100%	100%				37.945.000	37.805.000	140.000
7	01	02							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Tingkat Kematangan Pelayanan Publik**	**3 tingkat**	**3 tingkat**				8.600.000	6.600.000	2.000.000
7	01	03	2	01					KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	**Jumlah Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik**	**1 kegiatan**	**1 kegiatan**				8.600.000	6.600.000	2.000.000
7	01	02	2	01					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik	1 kegiatan	1 kegiatan				8.600.000	6.600.000	2.000.000
7	01	03							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi**	**100%**	**100%**				111.571.780	67.006.000	44.565.780
										Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina	**100%**	**100%**						
										Presentase Musrenbang des/Kel yang difasilitasi	**100%**	**100%**						
										Presentase Pelaku Ekonomi di Wilayah Kecamatan yang difasilitasi	**100%**	**100%**						
7	01	03	2	01					KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	**Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan**	**17 desa**	**17 desa**				111.571.780	67.006.000	44.565.780
7	01	03	2	01					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Peserta Musrenbang Kecamatan	100 orang	100 orang				30.800.000	30.800.000	-
7	01	03	2	01					Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Lembaga Kegiatan Kemasyarakatan	17 desa	17 desa	Tidak melaksanakan Koordinasi dg berlayar ke daratan	Koordinasi dilaksanakan dg komunikasi via whats App		80.771.780	36.206.000	44.565.780
7	01	04							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi**	**100%**	**100%**				54.910.000	41.405.000	13.505.000
7	01	01	2	09					KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Jumlah Desa**	**17 desa**	**17 desa**				46.800.000	38.045.000	8.755.000

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
7	01	04	2	01					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembinaan Linmas desa se Kecamatan Sangkapura	17 desa	17 desa				46.800.000	38.045.000	8.755.000
7	01	04	2	02					KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	**Jumlah Desa**	**17 desa**	**17 desa**				8.110.000	3.360.000	4.750.000
7	01	04	2	02					Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	**Jumlah Penrapan dan Penegakan Peraturan Daerah**	17 desa	17 desa				8.110.000	3.360.000	4.750.000
7	01	04							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu**	**100%**	**100%**				121.500.000	66.466.200	55.033.800
										Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	**100%**	**100%**						
7	01	06	2	01					FASILITASI REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	**Jumlah Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100 kali**	**100 kali**				121.500.000	66.466.200	55.033.800
7	01	06	2	01					Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala desa yang disusun	17 desa	17 desa	Tidak melaksanakan Koordinasi dg berlayar ke daratan	Koordinasi dilaksanakan dg komunikasi via whats App		30.000.000	18.734.200	11.265.800
7	01	06	2	01					Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	jumlah Pengelolaan Keuangan desa dan Aset desa yang difasilitasi	17 desa	17 desa	Tidak melaksanakan Koordinasi dg berlayar ke daratan	Koordinasi dilaksanakan dg komunikasi via whats App		30.000.000	18.496.000	11.504.000
7	01	06	2	01					Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat desa	17 desa	17 desa	Tidak melaksanakan Koordinasi dg berlayar ke daratan	Koordinasi dilaksanakan dg komunikasi via whats App		35.500.000	17.026.000	18.474.000
7	01	06	2	01					Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan di Wilayah Kecamatan	17 desa	17 desa	Tidak melaksanakan Koordinasi dg berlayar ke daratan	Koordinasi dilaksanakan dg komunikasi via whats App		26.000.000	12.210.000	13.790.000
3	**2**	**7**	**18**		**3.2.7.18**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEWILAYAHAN**	**KECAMATAN TAMBAK**									**3.967.881.885**	**3.501.124.700**	**466.757.185**
7	**01**	**01**							**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketercapaian sasaran program OPD**						**3.298.615.735**	**3.113.832.950**	**184.782.785**
7	**01**	**01**	**2.01**						**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan OPD	5 dokumen	5 dokumen				**14.116.600**	**7.512.000**	6.604.600
7	01	01	2.01	01					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4 buku	4 buku				7.727.000	5.863.000	1.864.000
7	01	01	2.01	06					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2 buku	2 buku				6.389.600	1.649.000	4.740.600
7	01	01	**2.02**						**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah laporan Kinerja administrasi Keuangan	2 dokumen	2 dokumen				**2.530.356.900**	**2.473.998.558**	**56.358.342**
7	01	01	2.02	01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							**2.525.357.000**	2.469.836.658	55.520.342
7	01	01	2.02	05					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							4.999.900	4.161.900	838.000
7	01	01	**2.06**						**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Fasilitasi terhadap Pelaksnaan Tupoksi Perangkat Daerah	6 rekening	6 rekening				**380.729.210**	**332.995.138**	**47.734.072**

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
7	01	01	2.06	01					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		4 jenis	4 jenis				4.635.400	4.634.375	1.025
7	01	01	2.06	02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		11 jenis	11 jenis				101.757.410	100.000.000	1.757.410
7	01	01	2.06	03					Penyediaan Peralatan Kantor		29 Jenis	29 Jenis				49.984.000	49.980.450	3.550
7	01	01	2.06	04					Penyediaan Bahan Logistik Kantor		2 jenis	2 jenis				49.995.000	30.691.700	19.303.300
7	01	01	2.06	05					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		2 jenis	2 jenis				5.093.400	3.360.000	1.733.400
7	01	01	2.06	06					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		12 bulan	12 bulan				2.136.000	1.806.500	329.500
7	01	01	2.06	09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 bulan	12 bulan				167.128.000	142.522.113	24.605.887
7	01	01	**2.08**						**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Fasilitasi terhadap Pelaksnaan Tupoksi Perangkat Daerah	4 rekening	4 rekening				**243.303.000**	**212.098.220**	**31.204.780**
7	01	01	2.08	01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat		5 orang	5 orang				138.960.000	133.200.000	5.760.000
7	01	01	2.08	02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 bulan	12 bulan				48.000.000	41.205.220	6.794.780
7	01	01	2.08	03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		2 jenis	2 jenis				4.897.000	4.250.000	647.000
7	01	01	2.08	04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		3 jenis	3 jenis				51.446.000	33.443.000	18.003.000
7	01	01	**2.09**						**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Fasilitasi terhadap Pelaksnaan Tupoksi Perangkat Daerah	3 jenis	3 jenis				**130.110.025**	**87.229.034**	**42.880.991**
7	01	01	2.09	02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		2 jenis	2 jenis				46.818.000	35.176.000	11.642.000
7	01	01	2.09	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 unit	1 unit				59.010.525	46.091.034	12.919.491
7	01	01	2.09	10					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		5 jenis	5 jenis				24.281.500	5.962.000	18.319.500
7	**01**	**03**							**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase koordinasi kegiatan Pemberdayaan masyarakat						**321.057.150**	**192.234.750**	**128.822.400**
7	**01**	**3**	**2,01**						**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan D**	Persentase jumlah Koordinasi kegiatan Pemberdayaan masyarakat	13 desa	13 desa				**154.071.400**	**69.912.500**	**84.158.900**
7	01	02	2.01	01					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa		65 orang	65 orang				39.706.000	32.490.000	7.216.000
7	01	02	2.01	03					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		13 desa	13 desa				114.365.400	37.422.500	76.942.900
7	**01**	**03**	**2,03**						**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Jumlah Lembaga yang d	3 lembaga	3 lembaga				**166.985.750**	**122.322.250**	**44.663.500**
7	01	03	2,03	01					Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		3 lembaga	3 lembaga				166.985.750	122.322.250	44.663.500
7	**01**	**04**							**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi**						**215.737.000**	**112.841.000**	**102.896.000**
7	**01**	**04**	**2,01**						**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Jumlah Penegakan Konf	12 bulan	12 bulan				**215.737.000**	**112.841.000**	**102.896.000**
7	01	04	2,01	01					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		12 bulan	12 bulan				215.737.000	112.841.000	102.896.000

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
7	**01**	**06**							**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGA**	**Persentase Penugasan Kepala Daerah yang difasilitasi**						**132.472.000**	**82.216.000**	**50.256.000**
7	**01**	**06**	**2,01**						**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	12 bulan	12 bulan				**132.472.000**	**82.216.000**	**50.256.000**
7	01	06	2.01	03					Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		13 desa	13 desa				11.000.000	8.762.000	2.238.000
7	01	06	2.01	05					Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		13 desa	13 desa				81.425.000	57.827.000	23.598.000
7	01	06	2.01	07					Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		13 desa	13 desa				3.447.000		3.447.000
7	01	06	2.01	16					Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		13 desa	13 desa				36.600.000	15.627.000	20.973.000
3	2	8			3.2.8	UNSUR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK												
3	**2**	**8**	**1**		**3.2.8.1**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**									**15.495.088.370**	**11.550.908.996,90**	**3.944.179.373,10**
8	**01**	**01**							**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketercapaian sasaran program OPD**	**100%**	**100%**				**4.752.199.670**	**4.452.616.650,90**	**299.583.019,10**
8	**01**	**01**	**2**						**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi OPD**	**11 Dokumen**	**11 Dokumen**				**735.957.700**	**580.620.431,50**	**155.337.268,50**
8	01	01	2	01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan OPD	6 Dokumen	6 Dokumen				367.756.800	232.387.522,00	135.369.278,00
8	01	01	2	01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja OPD	7 Dokumen	7 Dokumen				368.200.900	348.232.909,50	19.967.990,50
8		**01**	**2**						**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah fasilitasi administrasi keuangan OPD**	**12 Bulan**	**12 Bulan**				**3.296.485.000**	**3.208.313.847,00**	**88.171.153,00**
8	01	01	2	02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan				3.296.485.000	3.208.313.847,00	88.171.153,00
8	**01**	**01**	**2**						**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah fasilitasi administrasi umum OPD**	**1 Tahun**	**1 Tahun**				**384.428.970**	**330.809.790,00**	**53.619.180,00**
8	01	01	2	06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	44 Jenis	44 Jenis				192.215.970	186.369.500,00	5.846.470,00
8	01	01	2	06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah kebutuhan makanan dan minuman	1 Tahun	1 Tahun				**28.363.000**	15.386.450,00	12.976.550,00
8	01	01	2	06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	12 Jenis	12 Jenis				15.055.000	13.055.000,00	2.000.000,00
8	01	01	2	06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis surat kabar	3 Jenis	3 Jenis				**21.100.000**	11.100.000,00	10.000.000,00
8	01	01	2	06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi	3 Jenis	3 Jenis				**127.695.000**	104.898.840,00	22.796.160,00
8	**01**	**01**	**2**						**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah fasilitasi administrasi umum OPD**	**1 Tahun**	**1 Tahun**				**158.400.000**	**158.400.000,00**	-
8	01	01	2	08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pelaksana tugas ASN	6 Orang	6 Orang				158.400.000	158.400.000,00	-
8	01	01	**2**						**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah fasilitasi pemeliharaan barang milik daerah**	**1 Tahun**	**1 Tahun**				176.928.000	174.472.582,40	2.455.417,60
8	01	01	2	09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan	1 Unit	1 Unit				38.610.000	37.276.224,00	1.333.776,00

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
8	01	01	2	09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	5 Unit	5 Unit				100.800.000	100.769.114,00	30.886,00
8	01	01	2	09					Pemeliharaan Mebel	Jumlah Meja Kursi	40 Buah	40 Buah				**10.350.000**	9.876.000,00	474.000,00
8	01	01	2	09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin	28 Unit	28 Unit				27.168.000	26.551.244,40	616.755,60
8	**01**	**02**							**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Persentase Satuan Lembaga Pendidikan yang menerima penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**100%**	**100%**				**1.164.011.600**	**1.098.915.776,00**	**65.095.824,00**
8	**01**	**02**	**2**						**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Jumlah Satuan Lembaga Pendidikan yang menerima penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**13 Kali**	**13 Kali**				**1.164.011.600**	**1.098.915.776,00**	**65.095.824,00**
8	01	02	2	01	03				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah pelaksanaan upacara hari-hari besar nasional dan HUT pemda	14 Kali	14 Kali				**439.774.000**	407.051.190,00	32.722.810,00
8	01	02	2	01	04				Pelaksanaan Koordinasi diBidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah sosialisasi pembauran kebangsaan dan penyelenggaraan toleransi '- Jumlah Fasilitasi Hibah FPK	8 Kali 1 Tahun	8 Kali 1 Tahun				724.237.600	691.864.586,00	32.373.014,00
8	**01**	**03**							**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase Ketercapaian Target Partisipasi Masyarakat**	**100%**	**100%**				**7.810.012.400**	**4.362.754.000,00**	**3.447.258.400,00**
8	**01**	**03**	**2**						**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**Persentase Partisipasi Masyarakat**	**100%**	**100%**				**7.810.012.400**	**4.362.754.000,00**	**3.447.258.400,00**
8	**01**	03	2	01	03				Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Sosialisasi, Persiapan, Pemantauan, Koordinasi dan Pelaporan Pemilihan Umum - Jumlah partai politik yang dibina, Jumlah Desa dan Kelurahan Yang Sosialisasi Pendidikan Politik	4 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali 16 Partai Politik 330 Desa 26 Kelurahan	4 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali 16 Partai Politik 330 Desa 26 Kelurahan				**3.595.552.400**	148.294.000,00	3.447.258.400,00
8	**01**	03	2	01	05				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Fasilitasi Hibah BK Partai Politik '- Jumlah Fasilitasi Hibah KPU '- Jumlah Fasilitasi Hibah BAWASLU	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun				**4.214.460.000**	4.214.460.000,00	-

Kode Rekening					No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Hdaerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
8	**01**	**04**							**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase Pembinaan LSM, OKP, Tomas, Orsospol & Toga**	**100%**	**100%**				**337.918.000**	**267.344.300,00**	**70.573.700,00**
8	**01**	**04**	**2**						**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Persentase Pembinaan LSM, OKP, Tomas, Orsospol & Toga**	**100%**	**100%**				**337.918.000**	**267.344.300,00**	**70.573.700,00**
8	**01**	04	2	01	05				Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah LSM dan ORMAS yang dibina '- Jumlah Fasilitasi Hibah LSM dan ORMAS	50 LSM dan ORMAS 1 Tahun	50 LSM dan ORMAS 1 Tahun				337.918.000	267.344.300,00	70.573.700,00
8	**01**	**05**							**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Persentase Penanganan Konflik Kerukunan Umat Beragama yang difasilitasi**	**100%**	**100%**				**675.034.000**	**663.697.720,00**	**11.336.280,00**
8	**01**	**05**	**2**						**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Persentase Penanganan Konflik Kerukunan Umat Beragama yang difasilitasi**	**100%**	**100%**				**675.034.000**	**663.697.720,00**	**11.336.280,00**
8	01	05	2	01	03				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah fasilitasi hibah FKUB	1 Tahun	1 Tahun				600.000.000	600.000.000,00	-
8	01	05	2	01	04				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah fasilitasi FKUB, Tim P4GN dan Satgas Toleransi Kehidupan Bermasyarakat	11 Kali 2 Kali 11 Kali	11 Kali 2 Kali 11 Kali				75.034.000	63.697.720,00	11.336.280,00
8	**01**	**06**							**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase Pembentukan FKDM ditingkat Kecamatan dan Desa**	**100%**	**100%**				**755.912.700**	**705.580.550,00**	**50.332.150,00**
8	**01**	**06**	**2**						**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Persentase Pembentukan FKDM ditingkat Kecamatan dan Desa**	**100%**	**100%**				**755.912.700**	**705.580.550,00**	**50.332.150,00**
8	**01**	06	2	01	04				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah pemantauan pengamanan hari-hari besar, pemantauan pengamanan pejabat, pemantauan pengamanan unjuk rasa, rapat koordinasi FKDM, rapat koordinasi tim fasilitasi penanganan konflik sosial '- Jumlah Fasilitasi Hibah FKDM	3 Kali 12 Kali 12 Kali 11 Kali 11 Kali 1 Tahun	3 Kali 12 Kali 12 Kali 11 Kali 11 Kali 1 Tahun				755.912.700	705.580.550,00	50.332.150,00

Lampiran 7

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2022

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022

NO REKENING	URAIAN	2022		PERANGKAT DAERAH
		PAPBD	Realisasi	
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**3.677.070.809.274,00**	**3.366.654.784.393,29**	
4 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**1.381.671.641.242,00**	**1.191.758.822.001,59**	
4 1 1	**Pajak Daerah**	**895.965.683.770,00**	**783.835.812.278,06**	
4 1 1 6	**Pajak Hotel**	**10.650.000.000,00**	**9.517.372.625,00**	
4 1 1 6 1 1	Pajak Hotel	10.600.000.000,00	9.439.832.233,00	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4 1 1 6 3 3	Pajak Losmen	50.000.000,00	77.540.392,00	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4 1 1 6 7 1	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya			Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4 1 1 6 8 1	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)			Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4 1 1 7	**Pajak Restoran**	**30.350.000.000,00**	**26.918.141.325,43**	
4 1 1 7 1 1	Pajak Restoran dan Sejenisnya	15.850.000.000,00	17.790.614.797,81	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4 1 1 7 2 1	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	7.000.000.000,00	3.874.383.290,00	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4 1 1 7 5 1	Pajak Warung dan Sejenisnya	500.000.000,00	10.476.019,00	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4 1 1 7 7 1	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	7.000.000.000,00	5.242.667.218,62	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4 1 1 8	**Pajak Hiburan**	**3.300.000.000,00**	**2.078.159.911,00**	
4 1 1 8 1 1	Pajak Tontonan Film	2.640.000.000,00	1.840.026.028,00	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4 1 1 8 2 1	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	100.000.000,00	13.850.000,00	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4 1 1 8 4 1	Pajak Pameran			Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4 1 1 8 7 1	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	20.000.000,00	5.400.000,00	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4 1 1 8 8 1	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan	0,00	74.087.328,00	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4 1 1 8 9 1	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	400.000.000,00	54.611.260,00	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4 1 1 8 10 1	Pajak Pertandingan Olahraga	140.000.000,00	90.185.295,00	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4 1 1 9	**Pajak Reklame**	**5.200.000.000,00**	**4.030.506.375,63**	
4 1 1 9 1 1	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	3.000.000.000,00	2.702.909.326,63	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4 1 1 9 2 1	Pajak Reklame Kain	2.200.000.000,00	1.327.597.049,00	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4 1 1 9 5 1	Pajak Reklame Berjalan			Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4 1 1 9 9 1	Pajak Reklame Film/Slide			Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4 1 1 10	**Pajak Penerangan Jalan**	**235.000.000.000,00**	**240.596.105.684,00**	
4 1 1 10 1 1	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	16.750.000.000,00	15.305.298.979,00	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NO REKENING						URAIAN	2022		PERANGKAT DAERAH
							PAPBD	Realisasi	
4	1	1	10	2	1	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	218.250.000.000,00	225.290.806.705,00	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4	**1**	**1**	**11**			**Pajak Parkir**	**6.000.000.000,00**	**5.222.265.470,00**	
4	1	1	11	1	1	Pajak Parkir	6.000.000.000,00	5.222.265.470,00	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4	**1**	**1**	**12**			**Pajak Air Tanah**	**2.750.000.000,00**	**2.125.064.895,00**	
4	1	1	12	1	1	Pajak Air Tanah	2.750.000.000,00	2.125.064.895,00	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4	**1**	**1**	**14**			**Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**	**8.000.000.000,00**	**2.251.649.925,00**	
4	1	1	14	4	1	Pajak Batu Kapur	8.000.000.000,00	2.251.649.925,00	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4	1	1	14	8	1	Pajak Dolomit			Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4	1	1	14	19	1	Pajak Marmer			Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4	1	1	14	26	1	Pajak Phospat			Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4	**1**	**1**	**15**			**Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)**	**140.000.000.000,00**	**148.982.248.430,00**	
4	1	1	15	1	1	PBBP2	140.000.000.000,00	148.982.248.430,00	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4	**1**	**1**	**16**			**Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**	**454.715.683.770,00**	**342.114.297.637,00**	
4	1	1	16	1	1	BPHTB-Pemindahan Hak	454.715.683.770,00	342.114.297.637,00	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4	**1**	**2**				**Retribusi Daerah**	**181.296.900.000,00**	**90.871.266.103,00**	
4	**1**	**2**	**1**			**Retribusi Jasa Umum**	**28.957.500.000,00**	**18.201.905.013,00**	
4	1	2	1	1	1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	6.300.000.000,00	6.418.197.523,00	Dinas Kesehatan
4	1	2	1	1	1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Laboratorium Kesehatan	0,00	0,00	Dinas Kesehatan
4	1	2	1	2	1	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	3.500.000.000,00	1.047.938.300,00	Dinas Lingkungan Hidup
4	1	2	1	4	1	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	9.000.000.000,00	3.048.802.470,00	Dinas Perhubungan
4	1	2	1	5	2	Retribusi Pelayanan Pasar (Los)	0,00	187.857.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
4	1	2	1	5	3	Retribusi Pelayanan Pasar (Kios)	3.000.000.000,00	1.845.208.220,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
4	1	2	1	5	3	Retribusi Kios	0,00	148.151.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
4	1	2	1	6	1	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	5.000.000.000,00	3.796.050.000,00	Dinas Perhubungan
4	1	2	1	9	1	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	157.500.000,00	219.985.000,00	Dinas Cipta Karya, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4	1	2	1	11	1	Retribusi Pengujian Alat Ukur, takar, Tiimbang dan Perlengkapannya	2.000.000.000,00	1.489.715.500,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
4	**1**	**2**	**2**			**Retribusi Jasa Usaha**	**20.661.250.000,00**	**15.754.277.334,00**	
4	1	2	2	1	1	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	15.000.000.000,00	11.035.582.553,00	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4	1	2	2	1	1	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	0,00	142.500.000,00	
4	1	2	2	1	3	Retribusi Penyewaan Bangunan	1.500.000.000,00	1.117.146.000,00	Dinas Cipta Karya, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4	1	2	2	1	4	Retribusi Pemakaian Laboratorium	262.500.000,00	151.435.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4	1	2	2	1	4	Retribusi Pemakaian Laboratorium	250.000.000,00	285.384.999,00	Dinas Lingkungan Hidup
4	1	2	2	2	1	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang dikontrakkan	236.250.000,00	273.450.500,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
4	1	2	2	3	1	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	0,00	0,00	Dinas Perikanan

NO REKENING						URAIAN	2022		PERANGKAT DAERAH
							PAPBD	Realisasi	
4	1	2	2	4	3	Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	105.000.000,00	107.732.000,00	Dinas Perhubungan
4	1	2	2	5	1	Retribusi Tempat Khusus Parkir	945.000.000,00	1.043.862.682,00	Dinas Perhubungan
4	1	2	2	7	1	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	0,00	124.942.000,00	Dinas Pertanian
4	1	2	2	9	1	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.100.000.000,00	1.162.995.000,00	Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan dan Olahraga
4	1	2	2	10	1	Retribusi Penyeberangan Orang	262.500.000,00	309.246.600,00	Dinas Perhubungan
4	1	2	2	10	2	Retribusi Penyeberangan Barang	0,00	0,00	Dinas Perhubungan
4	**1**	**2**	**3**			**Retribusi Perizinan Tertentu**	**131.678.150.000,00**	**56.915.083.756,00**	
4	1	2	3	1	1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	131.678.150.000,00	56.915.083.756,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
4	1	2	3	3	1	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	0,00	Dinas Perhubungan
4	1	2	3	6	1	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	0,00	0,00	Dinas Tenaga Kerja
4	**1**	**3**				**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	**13.660.000.000,00**	**13.132.195.395,70**	
4	**1**	**3**	**2**			**Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD**	**13.660.000.000,00**	**13.132.195.395,70**	
4	**1**	**3**	**2**	**1**		**Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)**	**11.660.000.000,00**	**12.132.195.395,70**	
4	1	3	2	1	1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	11.660.000.000,00	12.132.195.395,70	
						Bank Gresik	*653.000.000,00*	*651.945.107,00*	*Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*
						Bank Jatim	*11.000.000.000,00*	*11.475.308.288,70*	*Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*
						BPR Jatim	*7.000.000,00*	*4.942.000,00*	*Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*
4	**1**	**3**	**2**	**2**		**Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)**	**2.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	
4	1	3	2	2	1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
						Gresik Migas	*2.000.000.000,00*	*1.000.000.000,00*	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4	**1**	**4**				**Lain-lain PAD yang Sah**	**290.749.057.472,00**	**303.919.548.224,83**	
4	**1**	**4**	**1**			**Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan**	**0,00**	**404.952.473,00**	
4	1	4	1	2	2	Hasil Penjualan Alat Angkutan	0,00	171.627.473,00	
4	1	4	1	2	5	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	4.296.000,00	
4	1	4	1	3	1	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	0,00	109.433.000,00	
4	1	4	1	4	1	Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan	0,00	119.596.000,00	
4	**1**	**4**	**3**			**Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan**	**0,00**	**35.530.000,00**	
4	1	4	3	1	1	Hasil Sewa BMD	0,00	0,00	Dinas Perikanan
4	1	4	3	2	1	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	0,00	35.530.000,00	Dinas Perikanan
4	**1**	**4**	**5**			**Jasa Giro**	**7.000.000.000,00**	**2.746.446.238,67**	
4	1	4	5	1	1	Jasa Giro pada Kas Daerah	7.000.000.000,00	2.622.424.428,99	
4	1	4	5	2	1	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	0,00	124.021.809,68	
4	**1**	**4**	**6**			**Hasil Pengelolaan Dana Bergulir**	**0,00**	**0,00**	
4	1	4	6	1	1	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00	

NO REKENING						URAIAN	2022		PERANGKAT DAERAH
							PAPBD	Realisasi	
4	**1**	**4**	**7**			**Pendapatan Bunga**	**25.000.000.000,00**	**2.448.219.177,40**	
4	1	4	7	1	1	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	25.000.000.000,00	2.448.219.177,40	
4	**1**	**4**	**8**			**Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah**	**0,00**	**61.010.099,00**	
4	1	4	8	1	1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	0,00	0,00	
4	1	4	8	2	1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	61.010.099,00	
4	**1**	**4**	**11**			**Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan**	**0,00**	**895.896.216,52**	
4	1	4	11	1	1	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	895.896.216,52	
4	**1**	**4**	**12**			**Pendapatan Denda Pajak Daerah**	**56.113.836,00**	**1.250.107.287,00**	
4	1	4	12	6	1	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0,00	6.448.825,00	
4	1	4	12	7	1	Pendapatan Denda Pajak Restoran	0,00	39528705,70	
4	1	4	12	8	1	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	0,00	252.317,00	
4	1	4	12	9	1	Pendapatan Denda Pajak Reklame	0,00	217.003,00	
4	1	4	12	10	1	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	0,00	2.751.258,00	
4	1	4	12	11	1	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	12.005.291,00	
4	1	4	12	12	1	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	0,00	4.939.618,00	
4	1	4	12	14	4	Pendapatan Denda Pajak Batu Kapur	0,00	44.109.000,00	
4	1	4	12	15	1	Pendapatan Denda PBBP2	56.113.836,00	1.103.053.512,00	
4	1	4	12	16	1	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0,00	76.330.463,00	
4	**1**	**4**	**13**			**Pendapatan Denda Retribusi Daerah**	**0,00**	**249.764.628,00**	
4	1	4	13	1	1	Pendapatan Denda Retribusi Umum	0,00	11.826.298,00	
4	1	4	13	2	1	Pendapatan Denda Retribusi Usaha	0,00	4.803.700,00	
4	1	4	13	2	1	Pendapatan Denda Retribusi Usaha	0,00	61.163.708,00	
4	1	4	13	2	1	Pendapatan Denda Retribusi Usaha	0,00	3.553,00	
4	1	4	13	3	1	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	0,00	171.967.369,00	
4	**1**	**4**	**14**			**Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan**	**0,00**	**34.295.250,00**	
4	1	4	14	1	1	Hasil Eksekusi Jaminan atas Pembongkaran Reklame	0,00	34.295.250,00	
4	**1**	**4**	**15**			**Pendapatan dari Pengembalian**	**0,00**	**3.281.104.183,24**	
4	1	4	15	3	1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	324.529.172,00	
4	1	4	15	4	1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	2.956.575.011,24	
4	**1**	**4**	**16**			**Pendapatan BLUD**	**258.692.943.636,00**	**292.512.222.372,00**	
4	1	4	16	1		Pendapatan BLUD Puskesmas	33.159.516.064,00	35.233.859.312,07	
4	1	4	16	1	1	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Alon-alon	1.833.092.404,00	1.928.841.942,73	
4	1	4	16	1	1	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kebomas	1.498.838.329,00	1.680.275.453,22	
4	1	4	16	1	1	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Manyar	1.469.966.874,00	1.390.466.426,75	
4	1	4	16	1	1	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Sukomulyo	1.292.023.324,00	1.367.785.589,76	

NO REKENING						URAIAN	2022		PERANGKAT DAERAH
							PAPBD	Realisasi	
4	1	4	16	1	1	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Duduksampeyan	2.178.418.669,00	2.357.616.831,46	
4	1	4	16	1	1	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Cerme	2.783.251.697,00	2.925.076.598,48	
4	1	4	16	1	1	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Balongpanggang	1.662.614.800,00	1.788.541.429,44	
4	1	4	16	1	1	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Benjeng	2.256.156.930,00	2.251.045.420,03	
4	1	4	16	1	1	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Metatu	1.324.276.110,00	1.312.555.591,20	
4	1	4	16	1	1	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Driyorejo	2.341.654.132,00	2.847.167.635,88	
4	1	4	16	1	1	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Wringinanom	1.725.100.701,00	1.700.380.679,52	
4	1	4	16	1	1	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kesamben kulon	1.510.000.001,00	1.505.922.514,39	
4	1	4	16	1	1	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Bungah	3.183.551.607,00	3.440.533.975,19	
4	1	4	16	1	1	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Mentaras	1.280.000.001,00	1.508.222.448,37	
4	1	4	16	1	1	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Sidayu	2.113.619.391,00	2.303.634.921,16	
4	1	4	16	1	1	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Ujungpangkah	1.851.563.350,00	1.943.224.469,03	
4	1	4	16	1	1	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Panceng	2.855.387.744,00	2.982.567.385,46	
4	1	4	16	1		Pendapatan BLUD RSUD	225.533.427.572,00	257.278.363.059,93	
4	1	4	16	1	1	Pendapatan BLUD RSUD Ibnu Sina	225.533.427.572,00	257.278.363.059,93	
4	1	4	16	1	1	Pendapatan BLUD RSUD Umar Mas'ud			
4	**1**	**4**	**19**			**Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir**	**0,00**	**0,00**	
4	1	4	19	1	1	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00	
4	**1**	**4**	**21**			**Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah**	**0,00**	**300,00**	
4	1	4	21	1	1	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	300,00	
4	**2**					**PENDAPATAN TRANSFER**	**2.279.654.272.226,00**	**2.154.340.660.571,00**	
4	**2**	**1**				**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**1.876.903.994.000,00**	**1.874.808.942.986,00**	
4	**2**	**1**	**1**			**Dana Perimbangan**	**1.530.695.894.000,00**	**1.528.999.930.386,00**	
4	**2**	**1**	**1**	**1**		**Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)**	**193.537.635.000,00**	**253.383.149.961,00**	
4	2	1	1	1	1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	29.712.237.000,00	31.381.262.705,00	
4	2	1	1	1	2	DBH PPh Pasal 21	76.306.518.000,00	94.227.750.583,00	
4	2	1	1	1	3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	2.718.736.000,00	4.372.695.278,00	
4	2	1	1	1	4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	21.820.825.000,00	23.409.486.583,00	
4	2	1	1	1	5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	49.995.229.000,00	83.788.543.810,00	
4	2	1	1	1	6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	8.281.717.000,00	10.653.364.246,00	
4	2	1	1	1	7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	29.976.000,00	46.240.672,00	
4	2	1	1	1	8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	0,00	
4	2	1	1	1	9	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalti	2.321.387.000,00	3.065.942.525,00	
4	2	1	1	1	10	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	392.699.000,00	479.552.559,00	

NO REKENING						URAIAN	2022		PERANGKAT DAERAH
							PAPBD	Realisasi	
4	2	1	1	1	13	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.958.311.000,00	1.958.311.000,00	
4	**2**	**1**	**1**	**2**		**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)**	**870.446.047.000,00**	**864.287.717.761,00**	
4	**2**	**1**	**1**	**3**		**Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik**	**110.650.121.000,00**	**100.414.100.629,00**	
4	2	1	1	3	1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	235.184.000,00	234.874.800,00	
4	2	1	1	3	2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	4.572.936.000,00	4.528.821.150,00	
4	2	1	1	3	3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	11.077.208.000,00	11.075.131.350,00	
4	2	1	1	3	6	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	0,00	0,00	
4	2	1	1	3	11	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	0,00	0,00	
4	2	1	1	3	13	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Dasar	0,00	0,00	
4	2	1	1	3	14	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Rujukan	0,00	0,00	
4	2	1	1	3	15	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Pakai Habis	5.492.424.000,00	5.385.618.284,00	
4	2	1	1	3	16	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB	3.742.200.000,00	3.525.702.600,00	
4	2	1	1	3	17	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Intervensi Stunting	0,00	0,00	
4	2	1	1	3	25	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.114.693.000,00	1.007.361.224,00	
4	2	1	1	3	26	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan Stunting (KB)	2.777.309.000,00	2.709.185.000,00	
4	2	1	1	3	27	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	7.137.132.000,00	6.577.445.143,00	
4	2	1	1	3	31	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	3.413.966.000,00	3.304.327.000,00	
4	2	1	1	3	32	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	490.319.000,00	479.864.604,00	
4	2	1	1	3	34	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	6.538.582.000,00	5.529.343.320,00	
4	2	1	1	3	35	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	6.146.725.000,00	5.344.469.084,00	
4	2	1	1	3	37	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	35.377.489.000,00	31.133.599.493,00	
4	2	1	1	3	40	DAK Fisik-Bidang Sanitasi- Reguler	3.599.773.000,00	3.590.393.000,00	
4	2	1	1	3	43	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	4.353.287.000,00	3.594.177.743,00	
4	2	1	1	3	52	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	
4	2	1	1	3	59	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	9.644.525.000,00	7.802.660.355,00	
4	2	1	1	3	60	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	4.936.369.000,00	4.591.126.479,00	
4	**2**	**1**	**1**	**4**		**Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik**	**356.062.091.000,00**	**310.914.962.035,00**	
4	1	1	1	4	1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	132.805.660.000,00	126.362.181.516,00	
4	2	1	1	4	3	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	4.200.000.000,00	4.160.000.000,00	
4	1	1	1	4	4	DAK Non Fisik-TPG PNSD	139.110.557.000,00	117.585.303.015,00	
4	2	1	1	4	5	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	4.239.000.000,00	2.440.900.000,00	
4	2	1	1	4	7	DAK Non Fisik-BOP PAUD	35.409.360.000,00	35.320.132.000,00	
4	2	1	1	4	8	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.541.200.000,00	1.541.200.000,00	

NO REKENING	URAIAN	2022		PERANGKAT DAERAH
		PAPBD	Realisasi	
4 2 1 1 4 9	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya - Museum	700.000.000,00	638.710.984,00	
4 2 1 1 4 11	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	24.169.228.000,00	14.501.618.190,00	
4 2 1 1 4 12	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	420.134.000,00	0,00	
4 2 1 1 4 13	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	0,00	0,00	
4 2 1 1 4 14	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	1.166.204.000,00	0,00	
4 2 1 1 4 15	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	11.339.034.000,00	7.564.898.720,00	
4 2 1 1 4 16	DAK Non Fisik-PK2UKM	404.200.000,00	384.279.854,00	
4 2 1 1 4 17	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	
4 2 1 1 4 20	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	383.914.000,00	259.181.992,00	
4 2 1 1 4 22	DAK Non Fisik - Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	0,00	
4 2 1 1 4 23	DAK Non Fisik - Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	173.600.000,00	156.555.764,00	
4 2 1 2	**Dana Insentif Daerah (DID)**	**51.487.263.000,00**	**51.487.263.000,00**	**0,00**
4 2 1 2 1 1	DID	51.487.263.000,00	51.487.263.000,00	
4 2 1 5	**Dana Desa**	**294.720.837.000,00**	**294.321.749.600,00**	**0,00**
4 2 1 5 1 1	Dana Desa	294.720.837.000,00	294.321.749.600,00	
4 2 2	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**402.750.278.226,00**	**279.531.717.585,00**	
4 2 2 1	**Pendapatan Bagi Hasil**	**385.767.458.226,00**	**263.373.114.585,00**	
4 2 2 1 1	**Pendapatan Bagi Hasil Pajak**	**385.767.458.226,00**	**263.373.114.585,00**	
4 2 2 1 1 1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	109.488.532.006,00	72.164.342.320,00	
4 2 2 1 1 2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	77.044.555.485,00	51.525.175.420,00	
4 2 2 1 1 3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	115.524.504.329,00	75.393.740.920,00	
4 2 2 1 1 4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.372.410.174,00	841.957.640,00	
4 2 2 1 1 5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	82.337.456.232,00	63.447.898.285,00	
4 2 2 2	**Bantuan Keuangan**	**16.982.820.000,00**	**16.158.603.000,00**	
4 2 2 2 2 1	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	16.982.820.000,00	16.158.603.000,00	
4 3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**15.744.895.806,00**	**20.515.121.668,00**	**0,00**
4 3 1	**Pendapatan Hibah**	**0,00**	**3.988.597.568,00**	**0,00**
4 3 1 1	**Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat**	**0,00**	**3.988.597.568,00**	**0,00**
4 3 1 1 1 1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	3.988.597.568,00	
4 3 1 3	**Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri**	**0,00**	**0,00**	
4 3 1 3 1 1	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	0,00	0,00	
4 3 3	**Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**	**15.744.895.806,00**	**16.526.524.100,00**	

NO REKENING	URAIAN	2022		PERANGKAT DAERAH
		PAPBD	Realisasi	
4 3 3 1	**Lain-lain Pendapatan**	0,00	402.545.000,00	0,00
4 3 3 1 1 1	Pendapatan Hibah Dana BOS		402.545.000,00	
4 3 3 2	**Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)**	**15.744.895.806,00**	**16.123.979.100,00**	
4 3 3 2 1	**Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP**	**15.744.895.806,00**	**16.123.979.100,00**	
4 3 3 2 1 2	Pendapatan Dana Kapitasi Puskesmas Nelayan	480.975.192,00	555.878.492,00	
4 3 3 2 1 2	Pendapatan Dana Kapitasi Puskesmas Industri	613.283.635,00	680.403.410,00	
4 3 3 2 1 2	Pendapatan Dana Kapitasi Puskesmas Gending	746.320.121,00	802.227.221,00	
4 3 3 2 1 2	Pendapatan Dana Kapitasi Puskesmas Sembayat	975.865.946,00	917.365.606,00	
4 3 3 2 1 2	Pendapatan Dana Kapitasi Puskesmas Dadapkuning	901.771.069,00	683.108.994,00	
4 3 3 2 1 2	Pendapatan Dana Kapitasi Puskesmas Dapet	476.219.241,00	518.392.497,00	
4 3 3 2 1 2	Pendapatan Dana Kapitasi Puskesmas Menganti	2.253.521.223,00	2.340.203.084,00	
4 3 3 2 1 2	Pendapatan Dana Kapitasi Puskesmas Kepatihan	926.829.057,00	1.005.389.747,00	
4 3 3 2 1 2	Pendapatan Dana Kapitasi Puskesmas Kedamean	1.321.124.500,00	1.087.696.800,00	
4 3 3 2 1 2	Pendapatan Dana Kapitasi Puskesmas Slempit	1.180.711.912,00	1.112.903.812,00	
4 3 3 2 1 2	Pendapatan Dana Kapitasi Puskesmas Karangandong	1.128.975.600,00	1.157.062.095,00	
4 3 3 2 1 2	Pendapatan Dana Kapitasi Puskesmas Dukun	1.366.856.932,00	1.264.256.632,00	
4 3 3 2 1 2	Pendapatan Dana Kapitasi Puskesmas Sekapuk	605.312.400,00	685.029.600,00	
4 3 3 2 1 2	Pendapatan Dana Kapitasi Puskesmas Sangkapura	1.586.284.825,00	2.128.724.357,00	
4 3 3 2 1 2	Pendapatan Dana Kapitasi Puskesmas Tambak	1.180.844.153,00	1.185.336.753,00	
4 3 3 1 2	**Pendapatan atas Pengembalian Hibah**	**0,00**	**402.545.000,00**	**0,00**
4 3 3 1 2 5	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia	0,00	402.545.000,00	
	BELANJA DAERAH	**3.940.889.310.579,00**	**3.554.000.944.526,53**	
	PELAKSANAAN URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
	URUSAN PENDIDIKAN			
	DINAS PENDIDIKAN	957.446.812.465,00	908.740.125.559,00	
	URUSAN KESEHATAN			
	DINAS KESEHATAN	693.694.743.149,00	605.564.307.214,53	
	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	197.611.668.357,00	165.816.394.670,00	
	DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	133.908.488.436,00	92.723.164.717,00	
	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
	DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	58.790.029.088,00	52.028.998.349,00	
	URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
	DINAS POLISI PAMONG PRAJA	29.696.316.500,00	26.163.285.539,00	
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	10.029.874.575,00	9.537.675.104,00	

NO REKENING	URAIAN	2022		PERANGKAT DAERAH
		PAPBD	Realisasi	
	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	9.772.576.100,00	9.501.393.339,00	
	URUSAN SOSIAL			
	DINAS SOSIAL	29.493.460.596,00	22.046.376.653,00	
	PELAKSANAAN URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
	URUSAN KETENAGAKERJAAN			
	DINAS TENAGA KERJA	8.971.806.925,00	8.502.066.411,00	
	URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN PENGENDALIAN PENDUDUK			
	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	23.554.710.460,00	18.984.144.787,00	
	URUSAN PANGAN			
	DINAS PERTANIAN	3.040.720.000,00	1.615.884.505,00	
	URUSAN PERTANAHAN			
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	63.198.301.000,00	20.987.016.295,00	
	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP			
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	40.193.223.680,00	38.786.729.138,00	
	URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL			
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	10.664.176.005,00	10.021.338.016,00	
	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	17.802.659.800,00	16.042.269.882,00	
	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.325.589.748,00	4.186.253.286,00	
	URUSAN PERHUBUNGAN			
	DINAS PERHUBUNGAN	39.680.439.855,00	36.322.666.153,00	
	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	14.121.993.165,00	13.773.059.884,00	
	URUSAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO			
	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	32.807.479.470,00	30.099.857.686,00	
	URUSAN PENANAMAN MODAL			
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	14.492.610.495,00	12.610.338.073,00	
	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
	DINAS PARIWISATA EKONOMI KREATIF KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	19.706.396.069,00	18.789.700.037,00	
	URUSAN STATISTIK			
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	99.862.100,00	82.378.972,00	
	URUSAN PERSANDIAN			
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	447.129.000,00	445.508.593,00	
	URUSAN KEBUDAYAAN			

NO REKENING	URAIAN	2022		PERANGKAT DAERAH
		PAPBD	Realisasi	
	DINAS PARIWISATA EKONOMI KREATIF KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	3.339.435.000,00	3.291.233.707,00	
	URUSAN PERPUSTAKAAN			
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	10.538.228.189,00	10.125.304.112,00	
	URUSAN KEARSIPAN			
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	316.983.250,00	301.876.093,00	
	PELAKSANAAN URUSAN PILIHAN			
	URUSAN PERIKANAN			
	DINAS PERIKANAN	12.431.838.246,00	11.959.956.507,00	
	URUSAN PARIWISATA			
	DINAS PARIWISATA EKONOMI KREATIF KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	11.829.628.897,00	11.472.556.046,00	
	URUSAN PERTANIAN			
	DINAS PERTANIAN	34.987.933.838,00	29.784.685.620,00	
	URUSAN PERDAGANGAN			
	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2.956.308.000,00	2.609.236.452,00	
	URUSAN PERINDUSTRIAN			
	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	426.000.000,00	393.533.242,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN			
	SEKRETARIAT DAERAH	166.894.478.959,00	153.129.187.684,00	
	SEKRETARIAT DPRD	87.652.956.450,00	79.175.372.395,00	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
	URUSAN PERENCANAAN			
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	14.537.493.860,00	13.577.707.116,00	
	URUSAN KEUANGAN			
	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.011.641.623.743,00	963.675.926.369,00	
	URUSAN KEPEGAWAIAN			
	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN SUMBER DAYA MANUSIA	12.310.118.390,00	10.913.304.105,00	Termasuk Urusan Pendidikan dan Pelatihan
	URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN SUMBER DAYA MANUSIA	4.109.149.800,00	3.372.633.940,00	
	URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2.127.147.100,00	1.894.832.839,00	
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
	INSPEKTORAT DAERAH	17.038.045.306,00	13.609.868.912,00	
	UNSUR KEWILAYAHAN			
	URUSAN KEWILAYAHAN			
	KECAMATAN GRESIK	27.441.218.077,00	24.282.153.908,00	

NO REKENING	URAIAN	2022		PERANGKAT DAERAH
		PAPBD	Realisasi	
	KECAMATAN KEBOMAS	18.401.548.085,00	17.430.005.177,00	
	KECAMATAN MANYAR	4.429.985.000,00	4.279.626.570,00	
	KECAMATAN CERME	4.383.812.000,00	4.116.136.772,00	
	KECAMATAN BENJENG	4.588.491.000,00	4.447.594.986,00	
	KECAMATAN BALONG PANGGANG	5.211.175.000,00	5.025.873.987,00	
	KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN	4.508.599.000,00	4.176.645.073,00	
	KECAMATAN DRIYOREJO	4.160.942.000,00	4.100.275.406,00	
	KECAMATAN WRINGINANOM	4.414.167.000,00	4.332.423.566,00	
	KECAMATAN KEDAMEAN	3.831.298.000,00	3.753.381.230,00	
	KECAMATAN MENGANTI	4.424.276.000,00	4.274.199.537,00	
	KECAMATAN SIDAYU	5.032.590.900,00	4.645.931.309,00	
	KECAMATAN UJUNG PANGKAH	4.483.948.600,00	4.223.229.825,00	
	KECAMATAN PANCENG	4.759.750.596,00	4.577.135.449,00	
	KECAMATAN BUNGAH	4.898.405.000,00	4.728.601.953,00	
	KECAMATAN DUKUN	4.616.185.000,00	4.463.727.277,00	
	KECAMATAN SANGKAPURA	4.151.513.000,00	3.433.820.803,00	
	KECAMATAN TAMBAK	3.967.881.885,00	3.501.124.700,00	
	UNSUR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	15.495.088.370,00	11.550.908.997,00	